

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI



BAPPENAS

*Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Wilayah Kehidupan Masyarakat
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan
Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2007*



RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NAD DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMUT TAHUN 2006-2007

LATAR BELAKANG. Pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2007 telah memasuki tahapan rekonstruksi. Hingga tahun ketiga sudah banyak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh berbagai stakeholders untuk lima bidang pemulihan, yaitu: (a) perumahan dan permukiman, (b) infrastruktur, (c) sosial budaya, (d) perekonomian, dan (e) kelembagaan dan hukum. Sebagaimana telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, selain mengevaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, pada tahun 2007 juga dilakukan penilaian dan evaluasi dalam rangka persiapan pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 10 Tahun 2005, jo. Undang-undang (UU) No 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, BRR akan mengakhiri masa tugasnya pada April 2009.

TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI. (1) Mendapatkan gambaran mengenai implementasi Rencana Induk melalui pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD-Nias; (2) Menilai tingkat dan dampak pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap pemulihan kehidupan masyarakat; dan (3) Menilai tahap persiapan yang terkait dengan peralihan dari pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias.

FOKUS PEMANTAUAN DAN EVALUASI. Di dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias pada tahun 2006-2007, dipergunakan lima fokus evaluasi, yaitu: (a) konsistensi, (b) koordinasi, (c) konsultasi, (d) kapasitas, dan (e) keberlanjutan.

KELOMPOK SASARAN. Kelompok sasaran kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi tahun 2006-2007 adalah: (a) Masyarakat Penerima Manfaat; (b) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias; dan (c) Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di wilayah NAD dan Nias.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA. Sesuai dengan dengan jenis data yang diperlukan, maka metode pemantauan dan evaluasi didasarkan pada data primer yang terdiri dari FGD, rapat koordinasi, konsultasi, observasi lapangan, survai kuesioner, dan

wawancara mendalam. Selain itu, juga didasarkan pada data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, laporan, kliping media massa, serta sumber data utama yang mengacu pada: (a) Laporan Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2005-2007; dan (b) Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2007-2009.

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI. Penilaian terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, didasarkan pada berbagai data dan informasi yang tersedia dari BRR NAD-Nias, Pemerintah Daerah, dan Donor/NGO dalam jangka waktu tahun 2006-2007. Klasifikasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dikelompokkan ke dalam lima bidang pemulihan, yaitu bidang-bidang: (a) perumahan, tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup; (b) infrastruktur; (c) sosial budaya; (d) perekonomian; dan (e) kelembagaan dan hukum.

EVALUASI ASPEK KONSISTENSI. Pada umumnya, realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selama periode tahun 2006-2007, belum seluruhnya mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada tahun 2006, dari alokasi APBN sebesar Rp10,5 triliun, dapat direalisasikan sebesar sebesar Rp7,79 triliun atau 74 persen dari alokasi DIPA BRR NAD-Nias. Sedangkan untuk perencanaan BRR NAD-Nias pada tahun 2007 sebesar Rp10,9 triliun, baru terserap sebesar 29,32 persen sampai dengan 31 Oktober 2007. Secara terinci, berdasarkan per bidang pemulihan, dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Realisasi DIPA BRR TA 2007 Per Bidang Program

No.	Bidang Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Agama, Sosial dan Budaya	247.272.269.000	93.360.413.340	37,76
2.	Ekonomi dan Usaha	989.291.183.000	257.910.481.863	26,07
3.	Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan	1.531.663.164.000	408.614.565.093	26,68
4.	Perumahan dan Permukiman	3.748.661.308.000	1.112.003.252.363	29,66
5.	Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan	2.947.084.432.000	800.193.284.434	27,15
6.	Kelembagaan dan Pengembangan SDM	681.259.987.000	236.791.971.431	34,76

EVALUASI ASPEK KOORDINASI. Secara umum, terjadi peningkatan kinerja proses koordinasi dalam penyusunan perencanaan maupun dalam pelaksanaan dua tahun rehabilitasi dan rekonstruksi, yang dilakukan oleh BRR NAD-Nias bersama stakeholders di pusat dan daerah, walaupun masih belum maksimal seperti yang diharapkan oleh berbagai pihak. Hal tersebut antara lain ditunjukkan BRR NAD-Nias dalam proses penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias tahun 2007-2009, yang baru disusun pada Juli-Agustus 2007, dimana dalam penyusunan tersebut, BRR NAD-Nias melibatkan Bappenas, kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah.

EVALUASI ASPEK KONSULTASI. Secara umum, melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi selama tahun 2006-2007, BRR NAD-Nias telah melibatkan konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program dan kegiatannya. Hal ini terlihat dengan keterlibatan masyarakat pada penyusunan Rencana Aksi Kepulauan Nias tahun 2007-2009, yang diselenggarakan pada Juni 2007 di

Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan melalui acara konsultasi publik. Hal serupa juga dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias tahun 2007-2009 melalui acara konsultasi publik di Pusat maupun daerah. Sebaliknya, program rekonstruksi berbasis masyarakat yang dikembangkan BRR NAD-Nias, sebagai upaya pengembangan keterlibatan masyarakat dalam proses rekonstruksi, masih belum optimal. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan masih terbatas diterapkan hanya dalam program pemulihan perumahan, dan belum sepenuhnya diterapkan didalam pemulihan perekonomian. Kesempatan masyarakat dalam proses pengawasan kualitas bangunan atau konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor juga terbatas karena masyarakat tidak memahami aspek teknis konstruksi.

EVALUASI ASPEK KAPASITAS. Sampai dengan 31 Oktober 2007, realisasi total pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Nias masih sangat rendah, yaitu baru mencapai 29,32 persen. Sementara pelaksanaan program dan kegiatan khusus pada pemulihan bidang perumahan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, masih relatif rendah pencapaian sarannya, baik menurut kebutuhan riil yang ditetapkan BRR NAD-Nias maupun sesuai dengan sasaran Rencana Induk. Rendahnya pencapaian sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi oleh BRR NAD-Nias tersebut tidak terlepas dari kapasitas lembaga dan sumber daya manusia yang menjadi pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi. Efektivitas mekanisme perencanaan dalam lingkungan internal BRR NAD-Nias, keberadaan standar perencanaan dan pelaksanaan, serta pengendalian dan pengawasan termasuk evaluasi yang dilakukan secara berkala, menjadi syarat mutlak dalam mengoptimalkan capaian sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, masih relatif rendahnya kualitas personel Bapel BRR NAD-Nias, Satker, Kontraktor, Konsultan Pengawas, di dalam memahami perencanaan, pelaksanaan, serta proses koordinasi dan konsultasi yang harus dilalui, serta masih belum memadainya peraturan terkait dengan pola pembinaan SDM yang akan memberikan pengaruh besar dalam capaian kinerja pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

EVALUASI ASPEK KEBERLANJUTAN. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, masa tugas BRR NAD-Nias adalah selama empat tahun dan akan berakhir pada April 2009. Walaupun dimungkinkan untuk diperpanjang masa tugasnya, namun sesuai prosedur harus berdasarkan rekomendasi Dewan Pengarah BRR NAD-Nias. Dengan berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias, maka tanggung jawab pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan diserahkan kepada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka mempersiapkan berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias, maka sangat diperlukan penguatan kesiapan dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam proses keberlanjutan dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Untuk menilai kesiapan tersebut, terutama dapat dilihat dari aspek perencanaan (RPJMD dan Renstra SKPD) dan aspek penganggaran pembangunan (APBD).

REKOMENDASI UNTUK PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM TAHUN 2008. Beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, koordinasi antar berbagai pihak yang terkait penanganan bencana, serta keterlibatan aktif dari berbagai unsur masyarakat

terutama yang berkaitan langsung dengan penanganan dan pengendalian bencana. Beberapa kebijakan pokok yang menjadi focus pelaksanaan di tahun 2008 diantaranya: (1) Mempercepat proses legalitas terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui payung hukum qanun atau peraturan daerah sehingga dapat menjadi acuan yang lebih kuat dan pasti dalam proses keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi di masa yang akan datang; (2) Mempercepat penyelesaian masalah krusial dalam pembebasan dan pengadaan lahan yang sering memicu permasalahan di lapangan; (3) Untuk percepatan pemulihan wilayah NAD dan Nias, pemulihan sektor perumahan dan permukiman yang diprioritaskan dan diutamakan bagi penanganan korban bencana, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi; (4) Pengawasan merupakan aspek penting yang dapat mengoptimalkan dan mempercepat pelaksanaan rencana di lapangan; (5) Perumahan dan permukiman merupakan sasaran prioritas dan strategis sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Induk dan menjadi prioritas penyelesaian pemulihan bagi Bapel BRR, sehingga pada tahun 2008 akan dijadikan tolok ukur penuntasan pemulihan perumahan dan permukiman; (6) Khusus bidang pemulihan infrastruktur, koordinasi masih perlu dimaksimalkan terutama pada daerah yang masih terisolasi; (7) BRR NAD-Nias perlu bekerjasama dengan donor/NGO dan melibatkan masyarakat dalam melakukan penilaian kebutuhan maupun dalam pelaksanaan serta evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan kelembagaan dan penegakan hukum.

REKOMENDASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DALAM RANGKA PENGAKHIRAN MASA TUGAS BRR NAD-NIAS PADA APRIL 2009. (1) Dalam rangka pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias, perlu dipersiapkan mekanisme dan prosedur perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memadai, dengan memperhatikan penyusunan perencanaan dan pembiayaan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan Pemda, melalui forum koordinasi yang telah ada (Musrenbang dan Sekertariat Bersama), yang didukung regulasi dan kebijakan yang memadai dan konsisten, serta penciptaan tata cara dan prosedur yang baku dan terpadu dalam setiap bidang pemulihan; (2) Perlu dilakukan optimalisasi keberadaan Sekretariat Bersama (Sekber) antara BRR, Pemda dan donor/NGO, sehingga dapat terwujud koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; (3) Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilaksanakan oleh BRR NAD-Nias, donor/NGO, kementerian/lembaga dan pihak terkait lainnya; (4) Perlu disusun berbagai regulasi atau kebijakan yang terkait dengan pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias, sehingga memiliki dasar hukum dalam rangka pengakhirannya; (5) Program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum selesai dilaksanakan selama masa tugas BRR NAD-Nias harus dilanjutkan penyelesaiannya oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah; (6) Salah satu langkah penting untuk memastikan transisi yang sukses dan lancar dari fase rekonstruksi menuju pada pembangunan daerah secara reguler adalah sedini mungkin melibatkan Pemerintah Daerah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

REKOMENDASI UNTUK PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA KEBERLANJUTAN DAN KESINAMBUNGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI. (1) Proses pembelajaran dari kekurangan dan kelebihan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan dalam periode BRR,

untuk lebih dioptimalkan dalam melaksanakan keberlanjutan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias; (2) Pengintegrasian program dan kegiatan pengurangan risiko bencana ke dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah; (3) Pemahaman dan komitmen dalam penyiapan APBD, sejalan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi, dimulai dengan pendampingan pembiayaan pada tahun 2008 sebelum masa berakhirnya BRR NAD-Nias; (4) Koordinasi antara BRR NAD-Nias dan Pemda dengan berbagai donor/NGO yang masih melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias pasca berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias; (5) Penyiapan sistem, mekanisme, aturan, dan pengawasan yang berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan kementerian/lembaga serta instansi terkait lainnya dalam keberlanjutan dan kesinambungan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

REKOMENDASI PERLUNYA PENYESUAIAN STRATEGI DAN SASARAN RENCANA INDUK. (1) Penyesuaian terhadap Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi perlu dilakukan terhadap kebijakan, strategi, program/kegiatan, dan besaran sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan kebutuhan riil sesuai kondisi di lapangan; dan (2) Penyesuaian terhadap Rencana Induk perlu dilakukan untuk dapat tercapainya sinkronisasi antardokumen perencanaan, dalam memenuhi dan mengakomodasi kebutuhan riil di lapangan.

REKOMENDASI KEMANFAATAN DAN DAMPAK KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI. Secara umum, para stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias hendaknya dapat meningkatkan kemanfaatan dan dampak dari berbagai bidang pemulihan yang dilaksanakan. Percepatan dalam pencapaian sasaran kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi pemulihan kehidupan masyarakat perlu terus ditingkatkan.

PERAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT, BRR NAD-NIAS, PEMERINTAH DAERAH, DAN DONOR/NGO. (1) Pemerintah Pusat. Bappenas perlu melakukan koordinasi sejak awal dengan kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah bersama dengan BRR NAD-Nias, dalam rangka kesinambungan dan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca BRR NAD-Nias, mengingat masih terdapat program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih perlu dilanjutkan oleh kementerian/lembaga terkait; (2) BRR NAD-Nias. Badan Pelaksana BRR NAD-Nias perlu melakukan upaya dan langkah-langkah strategis, baik yang masih dapat dilakukan dalam masa tahun 2008 dan awal tahun 2009, maupun dalam rangka persiapan menjelang berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias; (3) Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kapasitasnya, baik kelembagaan maupun sumber daya manusia, dalam rangka mempersiapkan keberlanjutan dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca berakhirnya tugas BRR NAD-Nias; (4) Donor/NGO. Mengingat peran donor/NGO sangat signifikan dalam pemulihan wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, maka sangat diperlukan upaya koordinasi yang lebih intensif dalam mengkomunikasikan hasil pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk dalam rangka percepatan maupun penyiapan pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias di April 2009.

KATA PENGANTAR

Tahun 2007 adalah tahun ketiga pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang lebih merupakan tahap rekonstruksi, sebagai kelanjutan dari tahap tanggap darurat dan rehabilitasi yang sudah berlangsung sebelumnya.

Dari berbagai laporan yang disampaikan oleh pelaku kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, dapat disimpulkan bahwa sudah banyak hasil-hasil yang telah dicapai, yang meliputi bidang-bidang pemulihan perumahan dan permukiman, infrastruktur, sosial budaya, perekonomian, serta kelembagaan dan hukum. Sebaliknya juga perlu diakui bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya.

Untuk mengawal proses pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, maka dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005. Berdasarkan Pasal 5 Perpres Nomor 30 Tahun 2005 tersebut, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Induk tersebut.

Melalui pemantauan dan evaluasi, dapat dilihat dan dinilai perkembangan dan kemajuan program rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mengacu pada dokumen Rencana Induk dan berbagai dokumen perencanaan lainnya. Selain itu, dapat diketahui berbagai permasalahan, tantangan serta dinamika yang terjadi dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dimaksud maka dipergunakan 5 (lima) variabel, yaitu 5K: Konsistensi, Koordinasi, Konsultasi, Kapasitas dan Keberlanjutan. Untuk melakukan operasionalisasi lima variabel evaluasi tersebut, telah diformulasikan indikatornya masing-masing sehingga dapat dilakukan penilaian dan pengukuran secara lebih terinci.

Maksud dan tujuan utama pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2006-2007 adalah: Pertama, mendapatkan gambaran mengenai kinerja implementasi Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara; kedua, menilai tingkat dan dampak pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap pemulihan kehidupan masyarakat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias; dan ketiga, menilai tahap persiapan yang terkait dengan peralihan dari pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias yang kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait.

Hasil laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) ini diharapkan dapat menjadi masukan, saran, rekomendasi dan arahan lebih lanjut bagi berbagai *stakeholders* yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, guna dapat mendorong dan mempercepat proses pemulihan wilayah dan kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana. Selain itu, laporan ini kiranya dapat menjadi masukan kerangka kebijakan dan regulasi dalam rangka mempersiapkan pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias pada April 2009 mendatang.

Pada akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Sekretariat P3B Kementerian Negara PPN/Bappenas ini, hingga terselesaikannya laporan pemantauan dan evaluasi ini. Semoga saja kerjasama yang baik selama ini dapat terus dilanjutkan, dalam rangka mendukung upaya percepatan pemulihan wilayah pascabencana di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias lebih lanjut.

Jakarta, 31 Maret 2008

Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
Selaku Ketua Tim Pengarah Tim Koordinasi
Pemantauan dan Pengendalian Penanganan Bencana
(P3B) Kementerian Negara PPN/Bappenas



Max H. Pohan

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xxv
DAFTAR GRAFIK	xxviii
DAFTAR SINGKATAN	xxxiii
1. PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Dasar Hukum	I - 6
1.3. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi	I - 6
1.4. Sasaran Pemantauan dan Evaluasi	I - 7
1.5. Ruang Lingkup	I - 7
1.6. Tahapan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	I - 7
1.7. Sistematika Penulisan Laporan	I - 9
2. METODOLOGI PEMANTAUAN DAN EVALUASI	II - 1
2.1. Kerangka Dasar Evaluasi Kinerja	II - 1
2.1.1. Kelompok Sasaran	II - 6
2.1.2. Lokasi Pemantauan dan Evaluasi	II - 6
2.1.3. Teknik Pengumpulan Data	II - 7
2.1.3.1. Data Primer	II - 7
2.1.3.2. Data Sekunder	II - 9
2.2. Sumber Data Utama: Laporan Evaluasi Paruh Waktu (MTR) dan Renaksi Wilayah NAD-Nias 2007-2009	II - 10

3.	PERKEMBANGAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TA 2006/2007	III - 1
3.1	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	III - 1
3.1.1	Pemulihan Perumahan, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	III - 1
3.1.1.1	Perumahan dan Permukiman.....	III - 1
3.1.1.2	Prasarana Dasar Permukiman	III - 6
3.1.1.3	Tata Ruang.....	III - 10
3.1.1.4	Pertanahan	III - 11
3.1.1.5	Lingkungan Hidup	III - 13
3.1.2	Pemulihan Infrastruktur.....	III - 15
3.1.2.1	Perhubungan, Jalan dan Jembatan	III - 16
3.1.2.2	Pos dan Telekomunikasi	III - 25
3.1.2.3	Energi dan Listrik	III - 26
3.1.2.4	Sumberdaya Air	III - 29
3.1.2.5	Air Bersih dan Sanitasi	III - 31
3.1.2.6	Fasilitas dan Bangunan Umum	III - 33
3.1.3	Pemulihan Sosial Budaya.....	III - 35
3.1.3.1	Pendidikan.....	III - 35
3.1.3.2	Kesehatan.....	III - 40
3.1.3.3	Peranan Perempuan dan Kesejahteraan Anak	III - 44
3.1.3.4	Keluarga Berencana	III - 46
3.1.3.5	Agama	III - 47
3.1.3.6	Sosial	III - 50
3.1.3.7	Budaya.....	III - 50
3.1.3.8	Pemuda dan Olahraga.....	III - 53
3.1.4	Bidang Pemulihan Perekonomian	III - 55
3.1.4.1	Perikanan	III - 55
3.1.4.2	Pertanian.....	III - 58
3.1.4.3	Perkebunan	III - 61

3.1.4.4	Peternakan	III - 62
3.1.4.5	Pengembangan Usaha	III - 64
3.1.4.6	Realisasi Anggaran	III - 70
3.1.5	Pemulihan Kelembagaan dan Hukum	III - 72
3.1.5.1	Kelembagaan	III - 73
3.1.5.2	Hukum	III - 79
3.1.5.3	Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M)	III - 84
3.2	Pemerintah Daerah	III - 88
3.2.1	Pemulihan Perumahan, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	III - 88
3.2.2	Pemulihan Infrastruktur	III - 93
3.2.3	Sosial Budaya	III - 98
3.2.3.1	Bidang Pendidikan	III - 102
3.2.3.2	Bidang kesehatan	III - 103
3.2.3.3	Bidang Agama, Sosial Budaya	III - 103
3.2.4	Pemulihan Ekonomi	III - 104
3.2.5	Pemulihan Kelembagaan dan Hukum	III - 117
3.3	Donor/NGO	III - 125
3.3.1	Pemulihan Perumahan, Tata Ruang, Pertanahan dan lingkungan Hidup	III - 125
3.3.1.1	Perumahan dan Permukiman	III - 127
3.3.1.2	Tata Ruang	III - 133
3.3.1.3	Pertanahan	III - 134
3.3.1.4	Lingkungan Hidup	III - 135
3.3.2	Pemulihan Infrastruktur	III - 136
3.3.2.1	Perhubungan dan Transportasi	III - 138
3.3.2.2	Energi dan Listrik	III - 138
3.3.2.3	Sumber Daya Air	III - 139
3.3.3	Sosial dan Budaya	III - 143
3.3.3.1	Pendidikan	III - 143
3.3.3.2	Kesehatan	III - 145

3.3.3.3	Agama	III - 148
3.3.3.4	Sosial	III - 150
3.3.4	Pemulihan Ekonomi.....	III - 152
3.3.4.1	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.....	III - 154
3.3.4.2	Ketenagakerjaan	III - 159
3.3.4.3	Perdagangan dan Perindustrian.....	III - 161
3.3.5	Pemulihan Kelembagaan dan Hukum	III - 164
3.3.5.1	Kelembagaan	III - 168
3.3.5.2	Hukum.....	III - 170
3.3.5.3	Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat	III - 171
3.3.6	Multi Sektor.....	III - 172
3.3.6.1	Donor/ NGO yang Berperan dalam Proyek-proyek di bidang Multi Sektor.....	III - 172
3.3.6.2	Keterkaitan Bidang Multi Sektor dengan Bidang Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	III - 176
3.3.6.3	Perkembangan Implementasi Berbagai Proyek di Bidang Multi Sektor.....	III - 177
4.	EVALUASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	IV - 1
4.1	Aspek Konsistensi	IV - 1
4.1.1.	Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan	IV - 2
4.1.1.1.	Bidang Perumahan dan Permukiman	IV - 5
4.1.1.2.	Bidang Infrastruktur	IV - 13
4.1.1.3.	Bidang Sosial Budaya	IV - 23
4.1.1.4.	Bidang Pemulihan Ekonomi.....	IV - 42
4.1.1.5.	Bidang Kelembagaan dan Hukum	IV - 51
4.1.2.	Konsistensi Antar Perencanaan dengan Pelaksanaan	IV - 55
4.1.2.1.	Bidang Perumahan dan Permukiman.....	IV - 55
4.1.2.2.	Bidang Infrastruktur	IV - 65
4.1.2.3.	Bidang Sosial Budaya	IV - 71
4.1.2.4.	Bidang Pemulihan Ekonomi.....	IV - 74
4.1.2.5.	Bidang Kelembagaan dan Hukum	IV - 82

4.1.3.	Konsistensi Antar Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	IV - 95
4.1.3.1.	Perumahan dan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan, dan Lingkungan Hidup.....	IV - 95
4.1.3.2.	Bidang Infrastruktur	IV - 97
4.1.3.3.	Bidang Sosial Budaya	IV - 100
4.1.3.4.	Bidang Pemulihan Ekonomi.....	IV - 102
4.1.3.5.	Bidang Kelembagaan dan Hukum	IV - 102
4.1.4.	Masyarakat Penerima Manfaat	IV - 104
4.1.4.1.	Perumahan dan Permukiman.....	IV - 104
4.1.4.2.	Infrastruktur	IV - 110
4.1.4.3.	Bidang Sosial Budaya	IV - 115
4.1.4.4.	Bidang Pemulihan Ekonomi.....	IV - 124
4.1.4.5.	Bidang Kelembagaan dan Hukum	IV - 129
4.1.5.	Bidang Multi Sektor	IV - 134
4.2	Aspek Koordinasi.....	IV - 135
4.2.1	Mekanisme Koordinasi dalam Penyusunan Perencanaan	IV - 135
4.2.1.1.	Bidang Perumahan dan Permukiman.....	IV - 135
4.2.1.2.	Bidang Infrastruktur	IV - 136
4.2.1.3.	Bidang Sosial Budaya	IV - 139
4.2.1.4.	Bidang Pemulihan Ekonomi.....	IV - 141
4.2.1.5.	Bidang Kelembagaan dan Hukum	IV - 144
4.2.2	Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan	IV - 145
4.2.2.1.	Bidang Perumahan dan Permukiman.....	IV - 145
4.2.2.2.	Bidang Infrastruktur	IV - 148
4.2.2.3.	Bidang Sosial Budaya	IV - 150
4.2.2.4.	Bidang Pemulihan Ekonomi.....	IV - 150
4.2.2.5.	Bidang Kelembagaan dan Hukum	IV - 151
4.2.3	Bidang Multi Sektor	IV - 152
4.3	Aspek Konsultasi	IV - 152
4.3.1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan dan Pelaksanaan	IV - 152

4.3.1.2.	Bidang Infrastruktur	IV - 153
4.3.1.3.	Bidang Sosial Budaya	IV - 155
4.3.1.4.	Bidang Pemulihan Ekonomi	IV - 155
4.3.1.5.	Bidang Kelembagaan dan Hukum	IV - 156
4.3.2	Media Partisipasi Masyarakat Secara Langsung	IV - 156
4.3.2.1.	Bidang Perumahan dan Permukiman	IV - 156
4.3.2.2.	Bidang Infrastruktur	IV - 158
4.3.2.3.	Bidang Sosial Budaya	IV - 158
4.3.2.4.	Bidang Pemulihan Ekonomi	IV - 158
4.3.2.5.	Bidang Kelembagaan dan Hukum	IV - 159
4.3.3	Ketersediaan Dan Kemudahan Akses Informasi Bagi Publik ...	IV - 160
4.3.4	Bidang Multi Sektor	IV - 160
4.4	Aspek Kapasitas	IV - 160
4.4.1	Aspek Kapasitas Kelembagaan	IV - 161
4.4.1.1.	Bidang Perumahan dan Permukiman	IV - 161
4.4.1.2.	Bidang Infrastruktur	IV - 162
4.4.1.3.	Bidang Sosial Budaya	IV - 166
4.4.1.4.	Bidang Pemulihan Ekonomi	IV - 167
4.4.1.5.	Bidang Kelembagaan dan Hukum	IV - 167
4.4.2	Aspek Kapasitas Sumber Daya Manusia	IV - 168
4.4.2.1.	Bidang Perumahan dan Permukiman	IV - 168
4.4.2.2.	Bidang Infrastruktur	IV - 169
4.4.2.3.	Bidang Sosial Budaya	IV - 170
4.4.2.4.	Bidang Pemulihan Ekonomi	IV - 171
4.4.2.5.	Bidang Kelembagaan dan Hukum	IV - 171
4.5	Aspek Keberlanjutan	IV - 173
4.5.1	Isu-Isu Dalam Persiapan Pengakhiran Masa Tugas BRR	IV - 174
4.5.2	Penyiapan Sistem	IV - 180
4.5.3	Mekanisme Peralihan Aset	IV - 182
4.5.4	Persiapan Pengalihan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah	IV - 184

5.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	V - 1
5.1	KESIMPULAN	V - 1
5.1.1	Aspek Konsistensi	V - 2
5.1.2	Aspek Koordinasi	V - 12
5.1.3	Aspek Konsultasi	V - 17
5.1.4	Aspek Kapasitas	V - 21
5.1.5	Aspek Keberlanjutan	V - 25
5.2	REKOMENDASI	V - 27
5.2.1	Penyusunan Kebijakan dan Program Tahun Anggaran 2008.....	V - 27
5.2.2	Mekanisme dan Prosedur Perencanaan dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Rangka Persiapan Pengakhiran Masa Tugas (PMT) BRR.	V - 31
5.2.3	Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Rangka Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayah pasca bencana	V - 32
5.2.4	Tinjauan kembali strategi dan sasaran program dan kegiatan dalam Rencana Induk.....	V - 34
5.2.5	Optimalisasi Kemanfaatan dan Dampak Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah NAD dan Kepulauan Nias.....	V - 37
5.2.6	Peran dan Kewenangan Pemerintah Pusat, BRR, Pemda, dan Donor/NGO untuk percepatan pelaksanaan RIRRWANS	V - 38
	DAFTAR PUSTAKA	L - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - 1	Ringkasan Skala Kerusakan di NAD dan Nias	I - 1
Tabel 1 - 2	Kemajuan Pemulihan NAD-Nias Status 31 Oktober 2007	I - 2
Tabel 1 - 3	Tahapan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi	I - 8
Tabel 2 - 1	Aspek Evaluasi dan Indikator Pemantauan dan Evaluasi	II - 2
Tabel 2 - 2	Lokasi Pemantauan dan Evaluasi	II - 7
Tabel 3 - 1	Realisasi Pembangunan Perumahan di NAD-Nias oleh Bapel RR hingga Oktober 2007	III - 2
Tabel 3 - 2	Realisasi Keuangan Bidang Perumahan dan Permukiman di NAD-Nias TA 2006 dan 2007	III - 3
Tabel 3 - 3	Kegiatan Penyediaan PSD, Komponen, dan Perangkat Teknis	III - 6
Tabel 3 - 4	Kegiatan PSD dalam Rekonstruksi Perumahan dan Permukiman Hingga Juli 2007	III - 7
Tabel 3 - 5	Realisasi dan Program Tata Ruang Hingga Juli 2007	III - 10
Tabel 3 - 6	Rincian Realisasi Kegiatan Pertanahan Tahun 2005-2006	III - 12
Tabel 3 - 7	Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi	III - 14
Tabel 3 - 8	Rekapitulasi Realisasi Dana On Budget BRR Bidang Infrastruktur	III - 15
Tabel 3 - 9	Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Program 2007 Sub Sektor Perhubungan Laut dan ASDP	III - 17
Tabel 3 - 10	Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Program 2007 Sub Sektor Perhubungan Udara	III - 18
Tabel 3 - 11	Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bandar Udara	III - 19
Tabel 3 - 12	Realisasi Pelaksanaan RR Airstrip dan Helipad	III - 20
Tabel 3 - 13	Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Program 2007 Sub Sektor Perhubungan Darat	III - 21
Tabel 3 - 14	Rekapitulasi Realisasi tahun 2005-2006 dan Program 2007 Jalan dan Jembatan	III - 22
Tabel 3 - 15	Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Program 2007 Sub Sektor Perhubungan Darat SAR dan BMG	III - 24
Tabel 3 - 16	Realisasi Pelaksanaan Kantor Pos	III - 25

Tabel 3 - 17	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Energi dan Listrik.....	III - 27
Tabel 3 - 18	Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Program 2007 Sub-Sektor Sumberdaya Air	III - 30
Tabel 3 - 19	Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Rencana 2007 Sub-Sektor Air Bersih dan Sanitasi	III - 32
Tabel 3 - 20	Program 2007 dan Rencana 2008 untuk Fasilitas dan Bangunan Umum	III - 33
Tabel 3 - 21	Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)	III - 35
Tabel 3 - 22	Realisasi Program Wajib 9 Tahun.....	III - 36
Tabel 3 - 23	Realisasi Pelaksanaan Program Pendidikan Menengah SMA/SMK.....	III - 37
Tabel 3 - 24	Realisasi Program Pendidikan Tinggi.....	III - 38
Tabel 3 - 25	Realisasi Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan.....	III - 40
Tabel 3 - 26	Realisasi Pelaksanaan Program Upaya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	III - 40
Tabel 3 - 27	Realisasi Program Pengkajian & Penelitian Terapan Penelitian Terapan, Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan & Program Perbaikan Gizi Masyarakat	III - 42
Tabel 3 - 28	Realisasi Program Kebijakan & Manajemen Pembangunan Kesehatan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengungsi Korban Bencana dan Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Program Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	III - 43
Tabel 3 - 29	Realisasi Pelaksanaan Program Penguatan Kelembagaan	III - 44
Tabel 3 - 30	Realisasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	III - 45
Tabel 3 - 31	Realisasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.....	III - 46
Tabel 3 - 32	Realisasi Pelaksanaan Program Pelayanan Keluarga Berencana	III - 46
Tabel 3 - 33	Realisasi Pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	III - 47
Tabel 3 - 34	Realisasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan	III - 48
Tabel 3 - 35	Realisasi Pelaksanaan Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan	III - 49
Tabel 3 - 36	Realisasi Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Aparatur Negara	III - 50

Tabel 3 - 37	Realisasi Pelaksanaan Program Pemulihan kembali jati diri dan asset budaya masyarakat	III - 51
Tabel 3 - 38	Realisasi Program Pembangunan Budaya dan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	III - 52
Tabel 3 - 39	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Pemuda dan Olah Raga	III - 53
Tabel 3 - 40	Realisasi Pelaksanaan TA 2006 dan Program TA 2007 Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias Sub Bidang Perikanan ...	III - 55
Tabel 3 - 41	Realisasi Pelaksanaan TA 2006 dan Program TA 2007	III - 59
Tabel 3 - 42	Realisasi Pelaksanaan TA 2006 dan Program TA 2007 Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias Sub Bidang Perkebunan	III - 61
Tabel 3 - 43	Realisasi Pelaksanaan TA 2006 dan Program TA 2007 Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias Sub Bidang Peternakan	III - 63
Tabel 3 - 44	Realisasi Pelaksanaan TA 2006 dan Program TA 2007 Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias Sub Bidang Industri.....	III - 64
Tabel 3 - 45	Realisasi Pelaksanaan TA 2006 dan Program TA 2007 Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias Sub Bidang Perdagangan.....	III - 65
Tabel 3 - 46	Realisasi Pelaksanaan TA 2006 dan Program TA 2007 Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias Sub Bidang Koperasi dan UKM.....	III - 67
Tabel 3 - 47	Realisasi Pelaksanaan TA 2006 dan Program TA 2007 Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias Sub Bidang Tenaga Kerja.....	III - 68
Tabel 3 - 48	Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pariwisata.....	III - 69
Tabel 3 - 49	Penyerapan Anggaran BRR TA 2006 Per Sub Bidang Pemulihan	III - 70
Tabel 3 - 50	Penyerapan Anggaran BRR TA 2007 Per Satuan Kerja	III - 71
Tabel 3 - 51	Penyerapan Anggaran DIPA BRR TA 2006 dan 2007 Bidang Kelembagaan dan Hukum.....	III - 71
Tabel 3 - 52	Perkembangan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	III - 73
Tabel 3 - 53	Perkembangan Program/Kegiatan Non Fisik Sub Bidang Kelembagaan oleh BRR	III - 76
Tabel 3 - 54	Perkembangan Kegiatan Fisik Rehabilitasi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Hukum	III - 78

Tabel 3 - 55	Perkembangan Kegiatan Non Fisik Bidang Hukum	III - 81
Tabel 3 - 56	Perkembangan Program dan Kegiatan Fisik Bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat.....	III - 84
Tabel 3 - 57	Perkembangan Program/Kegiatan Pengembangan Ketahanan Masyarakat.....	III - 86
Tabel 3 - 58	Alokasi APBD Kabupaten/Kota Bidang Perumahan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan, serta Lingkungan Hidup.....	III - 89
Tabel 3 - 59	Alokasi APBD Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi NAD tahun 2005 - 2007 (Dalam Rp. Ribu)	III - 94
Tabel 3 - 60	Alokasi APBD Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Infrastruktur tahun 2006 - 2007 (Dalam Rp. Ribu)	III - 95
Tabel 3 - 61	Rincian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Budaya	III - 99
Tabel 3 - 62	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ekonomi dan Usaha NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD	III - 105
Tabel 3 - 63	Pembangunan dan rehabilitasi Pasar Tradisional, Induk, Grosir, penunjang yang di koordinasikan oleh Pemda Prov. NAD di Provinsi NAD Tahun 2006 dan 2007.....	III - 106
Tabel 3 - 64	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi TA 2006 dan 2007 APBD Kab. Aceh Besar	III - 110
Tabel 3 - 65	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi TA 2006 dan 2007 APBD Kab. Pidie.....	III - 112
Tabel 3 - 66	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi TA 2006 dan 2007 APBD Kab. Aceh Jaya.....	III - 115
Tabel 3 - 67	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi TA 2006 dan 2007 Kab. Aceh Singkil	III - 115
Tabel 3 - 68	Alokasi APBD Kabupaten/Kota Bidang Kelembagaan dan Hukum	III - 118
Tabel 3 - 69	Donor/NGO Terbesar di Bidang Infrastruktur, Perumahan, Tata Ruang, ...	III - 125
Tabel 3 - 70	Realisasi Proyek Multi Donor Fund (MDF) Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Sampai September 2007	III - 127
Tabel 3 - 71	Realisasi Pembangunan Perumahan di NAD-Nias oleh Donor/NGO hingga Oktober 2007	III - 127
Tabel 3 - 72	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan oleh Donor dan NGO (Off Budget) Berdasarkan Jenis Kegiatan	III - 129
Tabel 3 - 73	Kriteria dan Prioritas Penerima Bantuan oleh IOM.....	III - 131

Tabel 3 - 74	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tata Ruang oleh Donor dan NGO (Off Budget).....	III - 134
Tabel 3 - 75	Rencana Kegiatan Ajudikasi RALAS Tahun 2006	III - 135
Tabel 3 - 76	Penyerapan Anggaran Donor/NGO dari 2005 s.d 10 Desember 2007 (Dalam \$. Ribu).....	III - 136
Tabel 3 - 77	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Publik (Perhubungan, Energi dan Listrik serta Sumberdaya Air) Dilaksanakan oleh seluruh Donor dan NGO (Off Budget).....	III - 137
Tabel 3 - 78	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Publik (Perhubungan, Energi dan Listrik serta Sumberdaya Air) Dilaksanakan oleh 10 Donor dan NGO Terbesar (Off Budget)	III - 140
Tabel 3 - 79	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Pendidikan Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)	III - 144
Tabel 3 - 80	Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sector Pendidikan berdasarkan Pelaku Donor/NGO	III - 144
Tabel 3 - 81	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Kesehatan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)	III - 146
Tabel 3 - 82	Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Kesehatan berdasarkan Pelaku Donor/NGO.....	III - 147
Tabel 3 - 83	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Agama yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)	III - 149
Tabel 3 - 84	Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Agama berdasarkan Pelaku Donor/NGO	III - 149
Tabel 3 - 85	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Sosial yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)	III - 150
Tabel 3 - 86	Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Donor/NGO	III - 151
Tabel 3 - 87	Komitmen Pendanaan Per Sub Bidang Pemulihan Perekonomian....	III - 152
Tabel 3 - 88	Sepuluh organisasi pelaksana terbesar berdasarkan komitmen pendanaan Bidang Pemulihan Perekonomian.....	III - 153
Tabel 3 - 89	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Perikanan dan Kelautan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)	III - 154
Tabel 3 - 90	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Pertanian, perkebunan dan Peternakan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)	III - 154
Tabel 3 - 91	Realisasi pelaksanaan 10 organisasi pelaksana terbesar sub bidang pemulihan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan	III - 155

Tabel 3 - 92	Realisasi Pelaksanaan 10 Organisasi Pelaksana Terbesar Sub Bidang Pemulihan Pengembangan Usaha (Koperasi Dan UKM)	III - 157
Tabel 3 - 93	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Ketenagakerjaan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)	III - 159
Tabel 3 - 94	Realisasi Pelaksanaan 10 Organisasi Pelaksana Terbesar Sub Bidang Pemulihan Tenaga Kerja	III - 159
Tabel 3 - 95	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perdagangan dan Industri yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)	III - 161
Tabel 3 - 96	Realisasi Pelaksanaan 10 Organisasi Pelaksana Terbesar Sub Bidang Pemulihan Industri Dan Perdagangan	III - 161
Tabel 3 - 97	Realisasi Pelaksanaan 10 Organisasi Pelaksana Terbesar Sub Bidang Pemulihan Pariwisata Dan Budaya	III - 162
Tabel 3 - 98	Pembiayaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Donor/NGO Bidang Kelembagaan dan Hukum	III - 164
Tabel 3 - 99	Pembiayaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Bidang Kelembagaan dan Hukum Berdasarkan Sub Sektor Oleh Donor/NGO Hingga Bulan Desember 2007.....	III - 166
Tabel 3 - 100	Realisasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bidang Kelembagaan Dan Hukum Oleh Donor/NGO.....	III - 166
Tabel 3 - 101	Keterkaitan antara proyek-proyek Multi Sektor dan keterkaitan dengan bidang-bidang pemulihan	III - 176
Tabel 3 - 102	Pencapaian Proyek Multi Sektor MDF di Aceh-Nias s/d September 2007	III - 177
Tabel 3 - 103	Pencapaian Proyek Multi Sektor AusAID di Aceh-Nias s/d Juli 2007 .	III - 178
Tabel 3 - 104	Pecapaian Proyek Multi Sektor UNDP di Aceh-Nias Sampai Pertengahan Tahun 2007	III - 179
Tabel 4 - 1	Kebutuhan Riil Bidang Perumahan Dan Permukiman NAD - Nias Tahun 2005-2009 Berdasarkan Rencana Aksi NAD-Nias.....	IV - 5
Tabel 4 - 2	Kebutuhan Riil Bidang Tata Ruang NAD - Nias Tahun 2005-2009.....	IV - 8
Tabel 4 - 3	Kebutuhan Riil Bidang Pertanahan NAD - Nias Tahun 2005-2009	IV - 9
Tabel 4 - 4	Kebijakan dan Kegiatan Pokok Pemulihan Lingkungan Hidup dan SDA dalam Rencana Induk	IV - 11
Tabel 4 - 5	Perbandingan Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Perumahan.....	IV - 13
Tabel 4 - 6	Perbandingan Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Tata Ruang	IV - 16

Tabel 4 - 7	Perbandingan Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pertanahan	IV - 18
Tabel 4 - 8	Kegiatan Dan Realisasi Ralas Tahun 2006/2007	IV - 19
Tabel 4 - 9	Perbandingan Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup.....	IV - 21
Tabel 4 - 10	Kontribusi Antara BRR Dan Donor/NGO Di Bidang Perumahan	IV - 23
Tabel 4 - 11	Peran Tiap Stakeholder Dalam Bidang Perumahan, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Lingkungan Hidup.....	IV - 24
Tabel 4 - 12	Koordinasi Dalam Penyusunan Perencanaan Bidang Pemulihan Perumahan Dan Permukiman Di Beberapa Kab/Kota.....	IV - 32
Tabel 4 - 13	Isu Dan Rekomendasi Bidang Perumahan Pada CFAN 3	IV - 33
Tabel 4 - 14	Koordinasi Dalam Pelaksanaan Bidang Pemulihan Perumahan Dan Permukiman Di Beberapa Kab/Kota	IV - 34
Tabel 4 - 15	Kebutuhan Riil Sub Sektor Jalan NAD-Nias Tahun 2005 - 2009 Berdasarkan Rencana Aksi.....	IV - 43
Tabel 4 - 16	Kebutuhan Riil Sub Sektor Perhubungan Laut Dan Asdp NAD-Nias Tahun 2005-S009 Berdasarkan Rencana Aksi.....	IV - 44
Tabel 4 - 17	Kebutuhan Riil Sub Sektor Perhubungan Udara NAD-Nias Tahun 2005-2009 Berdasarkan Rencana Aksi.....	IV - 45
Tabel 4 - 18	Kebutuhan Riil Sub Sektor Perhubungan Darat, Sar Dan Bmg NAD- Nias Tahun 2005-2009 Berdasarkan Rencana Aksi.....	IV - 45
Tabel 4 - 19	Kebutuhan Riil Sub Sektor Pos Dan Telekomunikasi NAD-Nias	IV - 46
Tabel 4 - 20	Kebutuhan Riil Sub Sektor Air Bersih NAD-Nias Tahun 2005-S009 Berdasarkan Rencana Aksi.....	IV - 47
Tabel 4 - 21	Kebutuhan Riil Sub Sektor Energi NAD-Nias Tahun 2005-2009 Berdasarkan Rencana Aksi.....	IV - 48
Tabel 4 - 22	Kebutuhan Riil Sub Sektor Tenaga Listrik NAD-Nias Tahun 2005- 2009 Berdasarkan Rencana Aksi	IV - 48
Tabel 4 - 23	Kebutuhan Riil Sub Sektor Sumber Daya Air NAD-Nias Tahun 2005- 2009 Berdasarkan Rencana Aksi	IV - 50
Tabel 4 - 24	Kebutuhan Riil Bidang Fasilitas Dan Bangunan Publik NAD-Nias Tahun 2005-2009 Berdasarkan Rencana Aksi	IV - 50
Tabel 4 - 25	Rekapitulasi Anggaran Kegiatan BRR Bidang Infrastruktur (Dalam Rp. Ribu)	IV - 57
Tabel 4 - 26	Pembagian Peran Dan Tanggungjawab Antar Pelaksana	IV - 57

Tabel 4 - 27	Kebutuhan Riil Program Pendidikan Anak Usia Dini NAD-Nias Tahun 2005-2009.....	IV - 78
Tabel 4 - 28	Program Wajib Belajar 9 Tahun	IV - 78
Tabel 4 - 29	Program Pendidikan Menengah	IV - 80
Tabel 4 - 30	Program Pendidikan Tinggi	IV - 82
Tabel 4 - 31	Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan.....	IV - 84
Tabel 4 - 32	Program Upaya Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan	IV - 84
Tabel 4 - 33	Program Pengkajian Dan Penelitian Terapan Di Bidang Kesehatan, Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan Dan Program Perbaikan Gizi Masyarakat	IV - 86
Tabel 4 - 34	Program Penyelenggaraan Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengungsi Korban Bencana, Penanggulangan Masalah Kesehatan Dan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan.	IV - 88
Tabel 4 - 35	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan.....	IV - 89
Tabel 4 - 36	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	IV - 89
Tabel 4 - 37	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan NAD - Nias	IV - 91
Tabel 4 - 38	Program Pelayanan Keluarga Berencana	IV - 91
Tabel 4 - 39	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	IV - 92
Tabel 4 - 40	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan.....	IV - 93
Tabel 4 - 41	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Kat, Mks	IV - 93
Tabel 4 - 42	Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial	IV - 94
Tabel 4 - 43	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pemuda Dan Olah Raga NAD - Nias	IV - 95
Tabel 4 - 44	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Budaya NAD - Nias	IV - 97
Tabel 4 - 45	Peran Dan Tanggung Jawab Stakeholders Dalam Bidang Pemulihan Sosial Budaya.....	IV - 103
Tabel 4 - 46	Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Kelautan Dan Perikanan	IV - 119
Tabel 4 - 47	Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Pertanian	IV - 120
Tabel 4 - 48	Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Pariwisata.....	IV - 122

Tabel 4 - 49	Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Perdagangan Dan Perindustrian	IV - 123
Tabel 4 - 50	Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Tenaga Kerja	IV - 124
Tabel 4 - 51	Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Sub Bidang Koperasi & Usaha Kecil	IV - 126
Tabel 4 - 52	Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Dengan Pelaksanaan Sub Bidang Kelautan Dan Perikanan.....	IV - 128
Tabel 4 - 53	Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Dengan Pelaksanaan Sub Bidang Pertanian	IV - 129
Tabel 4 - 54	Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Dengan Pelaksanaan Sub Bidang Perindustrian Dan Perdagangan	IV - 131
Tabel 4 - 55	Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Dengan Pelaksanaan Sub Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	IV - 132
Tabel 4 - 56	Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Dengan Pelaksanaan Sub Bidang Pariwisata	IV - 133
Tabel 4 - 57	Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Dengan Pelaksanaan Sub Bidang Tenaga Kerja.....	IV - 134
Tabel 4 - 58	Evaluasi Koordinasi Dalam Penyusunan Perencanaan Bidang Pemulihan Perekonomian.....	IV - 140
Tabel 4 - 59	Isu Dan Rekomendasi Bidang Pemulihan Perekonomian Pada CFAN 3.....	IV - 141
Tabel 4 - 60	Perencanaan Sarana Kantor Pemerintahan Tahun 2005-2009 Antara Rencana Induk Dengan Rencana Aksi BRR	IV - 148
Tabel 4 - 61	Perencanaan Sarana Dan Prasarana Hukum Antara Rencana Induk Dengan Rencana Aksi BRR	IV - 150
Tabel 4 - 62	Perencanaan Dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Non Fisik Bidang Kelembagaan	IV - 154
Tabel 4 - 63	Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Hukum	IV - 157
Tabel 4 - 64	Perencanaan Dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Non Fisik Bidang Hukum.....	IV - 158
Tabel 4 - 65	Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Penciptaan Rasa Aman Masyarakat.....	IV - 160
Tabel 4 - 66	Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pengembangan Ketahanan Masyarakat	IV - 163

Tabel 4 - 67	Peran BRR, Pemda Dan Donor/NGO Dalam Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bidang Kelembagaan Dan Hukum.....	IV - 165
Tabel 5 - 1	Realisasi DIPA BRR TA 2007 Per Bidang Program	V - 2
Tabel 5 - 2	Strategi dan Sasaran Program dan Kegiatan dalam Rencana Induk ...	V - 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 - 1	Kerangka Kerja Logis Pemantauan dan Evaluasi	II - 5
Gambar 2 - 2	Proses Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Paruh Waktu	II - 11
Gambar 3 - 1	Kondisi Prasarana Dasar di Benteng, Kabupaten Pidie.....	III - 8
Gambar 3 - 2	Kawasan Perumahan di Ujong Blang Mesjid, Kab. Bireun	III - 9
Gambar 3 - 3	Kawasan Perumahan di Lampulo, Banda Aceh.....	III - 9
Gambar 3 - 4	Penanaman Hutan Mangrove Departemen Kehutanan	III - 13
Gambar 3 - 5	Tanggul Pengaman Pantai di Pantai Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat	III - 15
Gambar 3 - 6	Kondisi Infrastruktur Pelabuhan yang sedang dibangun di Meulaboh	III - 18
Gambar 3 - 7	Kondisi Infrastruktur Bandara/Airport Kabupaten Aceh Jaya yang belum selesai dibangun	III - 20
Gambar 3 - 8	Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan.....	III - 23
Gambar 3 - 9	Kondisi Infrastruktur Listrik di Kabupaten Pidie	III - 26
Gambar 3 - 10	Kondisi Infrastruktur Pengaman Pantai di Kabupaten Aceh Barat .	III - 30
Gambar 3 - 11	Kondisi Infrastruktur Air bersih yang belum selesai dibangun	III - 31
Gambar 3 - 12	Kondisi escape hill di Kabupaten Aceh Jaya yang belum selesai dibangun.....	III - 33
Gambar 3 - 13	Pembangunan SD oleh Coca Cola di Lampulo	III - 37
Gambar 3 - 14	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gudang Farmasi dan Kantor Dinas Kesehatan Aceh Barat	III - 42
Gambar 3 - 15	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Mesjid di Aceh Singkil	III - 48
Gambar 3 - 16	Cold Storage dan Freezer Pendaratan Pelelangan Ikan (PPI), Kec. Peudada, Kab. Bireun	III - 56
Gambar 3 - 17	Infrastruktur Jalan Sudah Mulai Rusak Pendaratan Pelelangan Ikan (PPI), Kec. Peudada, Kab. Bireun.....	III - 57

Gambar 3 - 18	Tempat Pelelangan Ikan Pendaratan Pelelangan Ikan (PPI), Kec. Peudada, Kab. Bireun III - 57
Gambar 3 - 19	Pendaratan Pelelangan Ikan (PPI), Kab. Singkil.....III - 58
Gambar 3 - 20	Pendaratan Pelelangan Ikan (PPI), Kab. Singkil.....III - 58
Gambar 3 - 21	Pengembangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Tani Kec. Samalanga, Kab. Bireun III - 60
Gambar 3 - 22	Pengembangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Tani Kec. Ujong Blang Mesjid, Kab. Bireun.....III - 60
Gambar 3 - 23	Bibit Kelapa Sawit, Kota Calang, Kab. Aceh Jaya III - 62
Gambar 3 - 24	Penanaman Cabai Hijau, Kota Calang, Kab. Aceh Jaya.....III - 62
Gambar 3 - 25	Pasar Grosir, Kec. Peudada, Kab. Bireun III - 66
Gambar 3 - 26	Pabrik Es Sebagai Tempat Workshop III - 69
Gambar 3 - 27	Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Aceh Singkil III - 73
Gambar 3 - 28	Pembangunan Kantor Geuchik Lambada Lhok di Kabupaten Aceh Besar III - 74
Gambar 3 - 29	Pembangunan Balee Musyawarah di Kecamatan Meuraxa di Kota Banda Aceh.....III - 74
Gambar 3 - 30	Pembangunan Kantor Camat Meuraxa III - 74
Gambar 3 - 31	Pembangunan Kantor Camat Plimbang.....III - 74
Gambar 3 - 32	Pembangunan Mahkamah Syariah Provinsi NAD di Kota Banda Aceh.....III - 79
Gambar 3 - 33	Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat III - 80
Gambar 3 - 34	Pembangunan Kantor Pengadilan Negeri di Kota Juang Kabupaten Bireun.....III - 80
Gambar 3 - 35	Pembangunan Kantor Pengadilan Negeri di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat III - 80
Gambar 3 - 36	Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri di Kota Banda Aceh 80
Gambar 3 - 37	Pembangunan Rumah Dinas Polri di Kota Banda Aceh III - 87
Gambar 3 - 38	Pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemda III - 93

Gambar 3 - 39	PPI Kota Calang, Kab. Aceh Jaya	III - 108
Gambar 3 - 40	PPI Kota Calang, Kab. Aceh Jaya	III - 109
Gambar 3 - 41	Pasar Ikan, Kota Sigli, Kab. Pidie	III - 109
Gambar 3 - 42	Kondisi jalan lingkungan di Gampong Lamkruet, Lhok Nga	III - 131
Gambar 3 - 43	Kondisi Prasarana Dasar di Gampong Lamkruet, Lhok Nga.....	III - 132
Gambar 3 - 44	Kawasan Perumahan di Benteng, Kabupaten Pidie.....	III - 132
Gambar 3 - 45	Kawasan Perumahan di Samalanga, Kab. Bireun	III - 132
Gambar 3 - 46	Kegiatan Village Planning di Desa Lamjabat, Banda Aceh	III - 133
Gambar 3 - 47	Kegiatan Pengukuran dan Penyerahan Sertifikat Tanah	III - 134
Gambar 3 - 48	Rehabilitasi Lokasi Pembuangan Sampah Tsunami di Lapang, Kab. Aceh Berat	III - 135
Gambar 3 - 49	Pembangunan Gedung Serbaguna Desa di Kota Sigli Kabupaten Pidie oleh MDF.....	III - 167
Gambar 3 - 50	Pembangunan Kantor Desa Kajhu.....	III - 168
Gambar 3 - 51	Pembangunan Rumah Dinas KODIM Benteng di Kabupaten Pidie oleh Palang Merah Perancis.....	III - 170
Gambar 4 - 1	Proses Penstrukturan Masalah Pada Kegiatan Perencanaan Desa ..	IV - 37
Gambar 4 - 2	Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Teknis Desa	IV - 37
Gambar 4 - 3	Proses Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2007-2009	IV - 114

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3 - 1	Proporsi Komitmen dan Realisasi Pembangunan Perumahan (unit). III - 3
Grafik 3 - 2	Pagu dan Realisasi DIPA BRR Bidang Perumahan Tahun 2006 dan 2007 *) III - 5
Grafik 3 - 3	Perbandingan Realisasi Kegiatan Pertanahan Hingga Juni 2007 III - 13
Grafik 3 - 4	Penyerapan DIPA Tahun 2006 dan 2007 Bidang Infrastruktur III - 16
Grafik 3 - 5	Realisasi On Budget Sub Sektor Perhubungan Laut dan ASDP sampai Oktober 2007 terhadap Rencana Induk III - 17
Grafik 3 - 6	Realisasi On Budget Sub Sektor Perhubungan Udara sampai Oktober 2007 terhadap Rencana Induk III - 19
Grafik 3 - 7	Realisasi On Budget Sub Sektor Perhubungan Darat sampai Oktober 2007 terhadap Rencana Induk III - 21
Grafik 3 - 8	Realisasi On Budget Jalan dan Jembatan sampai dengan Oktober 2007 III - 23
Grafik 3 - 9	Realisasi On Budget Sub Sektor Perhubungan Darat sampai Oktober 2007 terhadap Rencana Induk III - 25
Grafik 3 - 10	Realisasi On Budget Sub Sektor Energi dan Listrik sampai Mei 2007 terhadap Rencana Induk III - 29
Grafik 3 - 11	Realisasi On Budget Sub Sektor Sumber Daya Air sampai Oktober 2007 terhadap Rencana Induk III - 30
Grafik 3 - 12	Realisasi On Budget Sub Sektor Air Bersih dan Sanitasi sampai Oktober 2007 terhadap Rencana Induk III - 32
Grafik 3 - 13	Realisasi On Budget Sub Sektor Fasilitas dan Bangunan Umum sampai Oktober 2007 terhadap Rencana Induk III - 34
Grafik 3 - 14	Realisasi Anggaran BRR Bidang Kelembagaan dan Hukum TA 2006 dan 2007* III - 73
Grafik 3 - 15	Komposisi Pembangunan Sektor Perumahan dengan APBD Kab/Kota III - 92
Grafik 3 - 16	Alokasi APBD dan Realisasi dalam kegiatan infrastruktur III - 98

Grafik 3 - 17	Prosentase Anggaran APBD Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan III - 102
Grafik 3 - 18	Prosentse Anggaran APBD Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kesehatan III - 103
Grafik 3 - 19	Prosentse Anggaran APBD Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Agama, Sosial Budaya III - 104
Grafik 3 - 20	Kontribusi Kegiatan Bidang Kelembagaan dan Hukum Berdasarkan APBD Tahun 2006 dan 2007 III - 118
Grafik 3 - 21	Komposisi Kegiatan Kelembagaan terhadap APBD Tahun 2006 dan 2007 III - 124
Grafik 3 - 22	Persentase Realisasi Komitmen Donor Terbesar Bidang Infrastruktur, Perumahan, Tata Ruang Pertanahan, dan Lingkungan Hidup III - 126
Grafik 3 - 23	Proporsi Komitmen dan Realisasi Pembangunan Perumahan (unit) oleh Donor/NGO Hingga Oktober 2007 III - 129
Grafik 3 - 24	Penyerapan Anggaran Donor/NGO (Dalam \$. Ribu) III - 137
Grafik 3 - 25	Realisasi Off Budget Sub Sektor Perhubungan dan transportasi sampai Oktober 2007 terhadap Rencana Induk III - 138
Grafik 3 - 26	Realisasi Off Budget Sub Sektor Energi dan Listrik sampai Oktober 2007 terhadap Rencana Induk III - 139
Grafik 3 - 27	Realisasi Off Budget Sub Sektor Sumber Daya Air sampai Oktober 2007 terhadap Rencana Induk III - 139
Grafik 3 - 28	Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sector Pendidikan berdasarkan Pelaku Donor/NGO III - 145
Grafik 3 - 29	Realisasi Pelaksanaana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Kesehatan berdasarkan Pelaku Donor/NGO III - 148
Grafik 3 - 30	Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Agama berdasarkan Pelaku Donor/NGO III - 150
Grafik 3 - 31	Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Donor/NGO III - 152
Grafik 3 - 32	Komitmen dan Realisasi Donor/NGO Bidang Kelembagaan dan Hukum III - 165
Grafik 4 - 1	Perbandingan Rencana Induk Dan Kebutuhan Riil Bidang Perumahan IV - 6

Grafik 4 - 2	Gambaran Perencanaan Dan Realisasi Pembangunan Rumah.....IV - 14
Grafik 4 - 3	Realisasi Capaian Kumulatif Penerbitan Sertifikat Pengganti Hingga November 2007 IV - 18
Grafik 4 - 4	Perbandingan Kontribusi Antara Brr Dan Donor/Ngo Di Bidang Perumahan IV - 23
Grafik 4 - 5	Rekapitulasi Lokasi Rumah Tinggal Sebelum Dan Sesudah 2 (Dua) Tahun Tsunami IV - 27
Grafik 4 - 6	Lokasi Tempat Tinggal Responden Sebelum Dan Sesudah 2 (Dua) Tahun Tsunami IV - 27
Grafik 4 - 7	Rekapitulasi Status Kepemilikan Rumah Sebelum Dan Sesudah 2 (Dua) Tahun Tsunami IV - 28
Grafik 4 - 8	Status Kepemilikan Rumah Responden Sebelum Dan Sesudah 2 (Dua) Tahun Tsunami IV - 29
Grafik 4 - 9	Rekapitulasi Jarak Rumah Menuju Tempat Aktivitas Sebelum IV - 30
Grafik 4 - 10	Jarak Tempuh Ke Tempat Aktivitas Sebelum Dan Sesudah 2 (Dua) Tsunami.....IV - 31
Grafik 4 - 11	Respon Masyarakat Hasil Survey Terhadap Kondisi Infrastruktur...IV - 61
Grafik 4 - 12	Kondisi Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Sebelum Dan Setelah 2 Tahun Tsunami IV - 62
Grafik 4 - 13	Kondisi Sarana Transportasi (Angkutan) Sebelum Tsunami Dan Setelah 2 Tahun Tsunami IV - 62
Grafik 4 - 14	Alat Transportasi Yang Digunakan Sebelum Tsunami Dan Setelah 2 Tahun Tsunami IV - 63
Grafik 4 - 15	Ketersediaan Infrastruktur Tenaga Listrik Sebelum Dan Setelah 2 Tahun Tsunami IV - 64
Grafik 4 - 16	Respon Masyarakat Hasil Survey Terhadap Kondisi Infrastruktur Air Bersih.....IV - 65
Grafik 4 - 17	Peningkatan Apbd Bidang Infrastruktur IV - 75
Grafik 4 - 18	Rekapitulasi Kondisi Fisik Ruang Kelas Sebelum Dan Sesudah 2 Tahun Tsunami Di 7 Kabupaten/Kota IV - 105
Grafik 4 - 19	Kondisi Fisik Ruang Kelas Sebelum Dan Setelah 2 Tsunami IV - 105

Grafik 4 - 20	Rekapitulasi Kondisi Kenyamanan Proses Belajar Mengajar Sebelum Dan Sesudah Dua Tahun Tsunami IV - 106
Grafik 4 - 21	Kondisi Kenyamanan Proses Belajar Mengajar Sebelum Dan Sesudah Dua Tahun Tsunami IV - 107
Grafik 4 - 22	Rekapitulasi Penerima Beasiswa Sebelum Dan Sesudah 2 tahun Tsunami..... IV - 108
Grafik 4 - 23	Penerima Beasiswa Sebelum Dan Sesudah 2 Tahun Tsunami IV - 108
Grafik 4 - 24	Kondisi Ketersediaan Tenaga Medis Sebelum Dan Sesudah 2 Tahun Tsunami..... IV - 109
Grafik 4 - 25	Kondisi Ketersediaan Tenaga Medis Sebelum Dan Sesudah 2 Tahun Tsunami..... IV - 110
Grafik 4 - 26	Rekapitulasi Kondisi Kemampuan Masyarakat Membayar Biaya Pengobatan Sebelum Dan Sesudah 2 Tahun Tsunami IV - 111
Grafik 4 - 27	Kondisi Kemampuan Membayar Biaya Pengobatan Sebelum Dan Sesudah 2 Tahun IV - 111
Grafik 4 - 28	Rekapitulasi Tempat Mendapatkan Pengobatan Masyarakat Sebelum Dan Sesudah 2 Tahun Tsunami IV - 112
Grafik 4 - 29	Kondisi Pengobatan Sebelum Tsunami IV - 112
Grafik 4 - 30	Kondisi Pengobatan Setelah 2 Tahun Tsunami IV - 113
Grafik 4 - 31	Hasil Survey Kemudahan Dalam Mendapatkan Pekerjaan Prov. Nad Dan Kepulauan Nias Prov.Sumatera Utara IV - 136
Grafik 4 - 32	Hasil Survey Kemudahan Dalam Mendapatkan Pekerjaan Per Kab/Kota IV - 136
Grafik 4 - 33	Hasil Survey Kondisi Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok Dua Tahun Pasca Tsunami Prov. Nad Dan Kepulauan Nias Prov.Sumatera Utara IV - 137
Grafik 4 - 34	Hasil Survey Kondisi Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok Dua Tahun Pasca Tsunami Per Kab/Kota..... IV - 138
Grafik 4 - 35	Hasil Survey Kondisi Harga Kebutuhan Pokok Dua Tahun Pasca Tsunami Prov. Nad Dan Kepulauan Nias Prov.Sumatera Utara ... IV - 139
Grafik 4 - 36	Hasil Survey Kondisi Harga Kebutuhan Pokok Dua Tahun Pasca Tsunami..... IV - 139

Grafik 4 - 37	Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan.....	IV - 153
Grafik 4 - 38	Rekapitulasi Pelaksanaan Siskamling Sebelum Dan Setelah 2 (Dua) Tahun Tsunami	IV - 168
Grafik 4 - 39	Pelaksanaan Siskamling Sebelum Dan Setelah 2 (Dua) Tahun Tsunami.....	IV - 168
Grafik 4 - 40	Rekapitulasi Pelayanan Kantor Desa/Lurah Sebelum Dan Setelah 2 (Dua) Tahun Tsunami.....	IV - 169
Grafik 4 - 41	Pelayanan Kantor Desa/Lurah Sebelum Dan Setelah 2 (Dua) Tahun Tsunami.....	IV - 170
Grafik 4 - 42	Rekapitulasi Fungsi Bale Musyawarah Sebelum Dan Setelah 2 (Dua) Tahun Tsunami	IV - 171
Grafik 4 - 43	Fungsi Bale Musyawarah Sebelum Dan Setelah 2 (Dua) Tahun Tsunami.....	IV - 172

DAFTAR SINGKATAN

5-K	Konsistensi, Koordinasi, Konsultasi, Kapasitas dan Keberlanjutan
A	
AD	Angkatan Darat (TNI-AD)
ADB	Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank)
AIPRD	Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development
AL	Angkatan Laut (TNI-AL)
andal	Analisis dampak lingkungan
APBD	Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
APBN	Anggaran dan Pendapatan Belanja Nasional
AU	Angkatan Udara (TNI-AU)
AUSAID	Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development
B	
bandara	Bandar Udara
BAPEDALDA	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Bapel	Badan Pelaksana BRR
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBI	Balai Benih Induk
BBU	Balai Benih Utama
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLK	Balai Latihan Kerja

BLM	Bantuan Langsung Masyarakat
BMG	Badan Meteorologi dan Geofisika
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BPPK	Bantuan Perumahan dan Permukiman Kembali
BPRB	Bantuan Pembangunan Rumah Baru
BPR	Bantuan Perbaikan Rumah
BPS	Badan Pusat Statistik
BRR	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara
C	
CFAN	Coordination Forum for Aceh dan Nias
CRS	Catholic Relief Services
D	
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DIPA	Daftar Isian Proyek Anggaran
DRR	Pengurangan Resiko Bencana (Disaster Risk Reduction)
DSF	Fasilitas Pendukung Desentralisasi (Decentralization Support Facility)
E	
ECLAC	Economic Commission for the Latin America and Caribbean
ERTR	Emergency Response and Transitional Recovery
F	
FAO	Food and Agriculture Organization

FGD	Focus Group Discussion
FY	Tahun Anggaran (Financial Year)
G	
GTZ	German Cooperation Agency (Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit)
H	
huntara	Hunian Sementara
I	
ILO	Organisasi Buruh Internasional (International Labor Organization)
IMC	International Medical Corps
IOM	International Organization for Migration
J	
JICA	Japan International Cooperation Agency
JICS	Japan International Cooperation System
JTM	Jaringan Tegangan Menengah (medium voltage network)
JTR	Jaringan Tegangan Rendah (low voltage network)
K	
K3M	Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat
KDP	Kecamatan Development Project
KEPMEN	Keputusan Menteri
KK	Kepala Keluarga
KL	Kementerian/ Lembaga
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

KUKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
L	
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LKM	Lembaga Keuangan Mikro
M	
MDF	Multi Donor Fund
MDTF	Multi Donor Trust Fund (untuk Aceh dan Sumatera Utara), umumnya
MTR	Evaluasi Paruh Waktu (Mid Term Review)
Monev	Monitoring dan Evaluasi
Musrenbang	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
N	
NAD	Nanggroe Aceh Darussalam
NGO	Lembaga Swadaya Masyarakat (Non-Governmental Organization)
P	
P2DTK	Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
P2KP	Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan
P3B	Perencanaan dan Pengendalian Bencana
P3RIRRWANS	Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PEMP	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	Pendapatan Daerah Regional Brutto

Pemda	Pemerintah Daerah
perpres	Peraturan Presiden
perpu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Pesantren	Sekolah Islam Tradisional dan Non Tradisional
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PLTA	Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTMH	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
PLTP	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
PLTS	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PNS	Pegawai Negeri Sipil
pp	Peraturan Pemerintah
PPK	Program Pengembangan Kecamatan
PPN	Perencanaan Pembangunan Nasional
PPI	Pusat Pelelangan Ikan
PT	Perguruan Tinggi
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
R	
RAND	Pusat data Pemulihan Aceh-Nias (Recovery Aceh-Nias Database)
RI	Republik Indonesia
RIRRWANS	Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
RISHA	Rumah Instant Sederhana Sehat
Renja BRR	Rencana Kerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Rakor	Rapat Koordinasi
RALAS	Reconstruction of Aceh Land Administration System
RDTRK	Rencana Detail Tata Ruang Kota

RE-KOMPAK	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas)
RKA-KL	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RRI	Radio Republik Indonesia
RS	Rumah Sakit
RTBL	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRWK	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
S	
Satker	Satuan Kerja
SCF	Save the Children Fund
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SEKBER	Sekretariat Bersama
Setwanrah	Sekretariat Dewan Pengarah
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMP	Sekolah Menengah Pertama (SLTP)
SMA	Sekolah Menengah Atas (SLTA)
SUMUT	Sumatera Utara
T	
TA	Tahun Anggaran
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TVRI	Televisi Republik Indonesia

U

UKM	Usaha Kecil dan Menengah
UN	Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations)
UNDP	Program Pembangunan PBB (United Nations Development Programme)
UNFPA	United Nations Family Planning Agency
UNICEF	United Nations Children's Fund
UNOCHA	United Nations Office Coordination Humanitarian Affairs
UNOPS	United Nations Office for Project Services
UNORC	United Nations Office of the Recovery Coordinator
USAID	United State Agency for International Development
UU	Undang-Undang
UUPA	Undang-Undang Pemerintahan Aceh

W

WB	Bank Dunia (World Bank)
WFP	World Food Program
WHO	Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization)

Y

YIPD	Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2007 telah memasuki tahapan rekonstruksi. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahapan tanggap darurat dan rehabilitasi yang sudah berlangsung sebelumnya sejak tahun 2005 pasca terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004. Hingga tahun ketiga sudah banyak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh berbagai stakeholders untuk lima bidang pemulihan, yang meliputi bidang pemulihan yaitu; perumahan dan permukiman, infrastruktur, sosial budaya, perekonomian dan kelembagaan dan hukum.

Namun, untuk melihat tingkat perkembangan dan kemajuan pencapaian beberapa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diperbandingkan dengan kondisi kerusakan yang terjadi di wilayah pascabencana Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut. Berikut ini merupakan kondisi kerusakan secara ringkas di wilayah bencana tersebut, yaitu:

Tabel 1 - 1
Ringkasan Skala Kerusakan di NAD dan Nias

No.	Sektor	NAD	NIAS
1.	Perumahan	Sebanyak 105.000 rumah rusak, termasuk prasarana/sarana air bersih dan sanitasi lingkungan	15.000 unit rumah rusak
2.	Infrastruktur	2260 jembatan sepanjang 2.450 meter, dan jalan sepanjang 5.403 km : terdiri dari jalan nasional, provinsi, kabupaten dan desa) rusak.	12 pelabuhan rakyat, 800 km jalan kab dan desa, 266 km jalan provinsi, dan 403 jembatan rusak.
3.	Kelembagaan	Dalam hal aspek kelembagaan terjadi penurunan fisik dan non fisik	Penurunan kapasitas kelembagaan. 1.052 gedung pemerintah rusak
4.	Pendidikan	sebanyak 150.000 siswa kehilangan sekolah 1.832 guru menjadi korban 17.228 siswa menjadi korban dan 2.112 sekolah rusak	sebanyak 755 sekolah rusak.
5.	Kesehatan	terdapat 690 puskesmas rusak dan mengalami kekurangan tenaga	2 rumah sakit rusak 173 puskesmas rusak

No.	Sektor	NAD	NIAS
		kesehatan	
6.	Ekonomi	Akan mengalami penurunan GDP sebesar 14%. 23.000 hektar sawah rusak 100.000 pengusaha kecil kehilangan mata pencaharian.	Para petani dan nelayan kehilangan pekerjaan dan 219 pasar unit mengalami kerusakan

Sumber: Laporan Kegiatan Enam Bulan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias; "Meletakkan fondasi membangun harapan", Oktober 2005, hal. 18.

Secara makro, beberapa capaian program dan kegiatan yang sudah direalisasikan hingga 31 Oktober 2007 dengan mempergunakan tolok ukur yang terdapat dalam perencanaan Rencana Induk dan perencanaan dalam Kebutuhan Riil sebagaimana disusun oleh BRR sebagai base line perkembangan kemajuan rehabilitasi dan rekonstruksi, antara lain, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 - 2
Kemajuan Pemulihan NAD-Nias
Status 31 Oktober 2007

No.	Kegiatan Pemulihan	Rencana Induk	Kebutuhan Riil	Realiasi
1.	Rumah permanen dibangun	90.158 unit	130.837 unit	102.063 unit
2.	Pengungsi yang masih tinggal di barak	-	-	5.287 KK
3.	Fasilitas kesehatan dibangun	898 unit	898 unit	534 unit
4.	Gedung sekolah dibangun	Tidak rinci unit atau ruang kelas	Tidak rinci unit atau ruang kelas	837 unit
5.	Guru dilatih	40.000 orang	18.029 orang	22.548 orang
6.	Jalan dibangun (semua tipe)	4.650 km	5.266 km	2.006 Km
7.	Jembatan dibangun	Tidak terinci	Terinci	216 unit
8.	Bandar udara dibangun	13 unit	9 unit	10 unit
9.	Pelabuhan laut dibangun	17 unit	15 unit	17 unit
10.	Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dibantu	Tidak terinci/tercantum	84.492 unit	99.710 unit

Sumber : Diolah dari Pusdatin-RAN Database-Sektor BRR, Rencana Induk, Rencana Aksi RR NAD-Nias, 2007

Tidak sedikit berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan. Antara lain: masih terdapat

pengungsi yang tinggal di barak atau hunian sementara; masih rendahnya kualitas perumahan yang dibangun sehingga banyak yang tidak bisa dimanfaatkan oleh korban bencana; minimnya fasilitas pendukung permukiman yang dibangun, seperti drainase dan sanitasi; masih belum terselesaikannya masalah infrastruktur utama seperti jalan, jembatan dan pelabuhan secara menyeluruh; masih belum maksimalnya penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka mempersiapkan secara dini menyongsong berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias pada tahun 2009 mendatang.

Bagaimanapun, upaya menciptakan kondisi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias yang lebih baik diarahkan untuk terwujudnya kondisi ideal sebagaimana digariskan dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan kembali masyarakat dengan cara memulihkan aspek-aspek kehidupan keagamaan, sosial budaya dan ketahanan masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan, hukum dan kelembagaan agama serta adat.
2. Pembangunan kembali ekonomi dengan cara penciptaan lapangan kerja, pemberian bantuan keuangan dan kredit untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, membangun kembali sektor-sektor produktif (perikanan, pertanian, industri, perdagangan, dan jasa) disertai pembangunan kembali sarana ekonomi (pasar, tempat pelelangan ikan, gudang).
3. Pembangunan Kembali Infrastruktur dan Perumahan dengan mendahulukan pemulihan fungsi prasarana dasar seperti jalan, pelabuhan udara dan laut, prasarana dan sarana telekomunikasi, pemulihan pengadaan listrik, air bersih dan perumahan.
4. Pembangunan Kembali Pemerintahan dengan cara memfungsikan kembali sistem dan pelayanan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota, merancang kembali (*redesign*) kota-kota dan pusat kegiatan baru.

Sejalan dengan itu, maka pembangunan kembali tersebut di atas ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007, dimana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi difokuskan pada kegiatan rekonstruksi, terutama pada sektor perumahan dan kualitas sanitasi lingkungan, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi skala korporasi, peningkatan pelayanan umum, pembangunan infrastruktur utama dan peningkatan kapasitas lembaga pemerintah daerah. Perencanaan yang tertuang dalam RKP 2007 tersebut menjadi salah satu tolak ukur dalam melihat sejauh mana kinerja pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk itu, beberapa indikator akan dipergunakan dalam menilai kinerja pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan tantangan yang muncul di tahun 2007, kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan masyarakat NAD dan Nias seperti dijelaskan dalam RKP 2007, adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat korban bencana dengan didukung berbagai sarana dan prasarana. Kemudian didukung juga dengan berbagai aturan kebijakan yang terkait dengan penataan kewilayahan.
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan peran serta dunia usaha dalam penyediaan lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja.

3. Mengembangkan ekonomi skala kecil, skala menengah, dan perkoperasian serta peningkatan peran dunia usaha dalam penyediaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah baik yang terkait dengan eksekutif dan legislatif, serta kelembagaan masyarakat.
5. Menyelesaikan perbaikan sistem administrasi pertanahan.
6. Pemulihan lingkungan hidup dan pengembangan cadangan sumber daya alam.
7. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
8. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program penanggulangan kemiskinan.
9. Pemulihan jalur transportasi darat, udara dan laut untuk mendukung pembangunan dan pengembangan wilayah.
10. Penyusunan rencana tata ruang wilayah yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek-aspek lokal.

Selain melihat kinerja pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, maka pada tahun 2007 pun dilakukan penilaian dan evaluasi dalam rangka persiapan pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 10 Tahun 2005, jo. Undang-undang (UU) No 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, BRR akan mengakhiri masa tugasnya pada April 2009. Maka langkah-langkah menuju berakhirnya masa tugas BRR sudah harus dilakukan sejak dini. Jika semua berjalan sesuai rencana, pada saat seluruh kegiatan rekonstruksi selesai, Pemerintah Daerah akan melanjutkan proses tersebut kepada fase pembangunan reguler. Para stakeholders yang terlibat dalam proses rekonstruksi memiliki beberapa tugas untuk menyongsong pencapaian exit strategy BRR NAD-Nias, yaitu (1). Memastikan transisi dari fase rekonstruksi menuju fase pembangunan sedini mungkin dengan melibatkan Pemerintah Daerah di dalam perencanaan, evaluasi, dan transfer kegiatan pemulihan. (2). Memastikan Pemerintah Daerah dan mitra-mitra yang terkait memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan dan memelihara fasilitas-fasilitas yang telah dibangun selama proses pemulihan, dan (3). Menyiapkan mekanisme manajemen resiko bencana ke dalam kerangka pembangunan Pemerintah Daerah. Oleh karenanya, diperlukan upaya-upaya persiapan yang optimal dalam rangka exit strategy BRR (Mid Term Review, 2007).

Dengan berakhirnya masa tugas BRR pada April 2009 nanti maka diperlukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk keberlanjutan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Program penguatan kelembagaan dan kapasitas lokal secara sistematis perlu disiapkan dan dilaksanakan secara bertahap yang dimulai sejak awal. Penguatan kelembagaan daerah ini muncul melalui peningkatan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditingkatkan dari tahun ke tahun. Keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor lainnya di kabupaten/kota serta program-program lainnya perlu ditingkatkan agar kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan bisa mencapai tingkat yang diharapkan memberikan dampak positif pada upaya melibatkan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya penguatan kelembagaan daerah ini juga diperlukan dalam rangka memastikan terjadinya keselarasan dan kesinambungan di wilayah NAD dan Kepulauan Nias pasca rekonstruksi baik dalam memelihara dan merawat seluruh kemajuan yang ada, maupun dalam melanjutkan dan mengembangkan program-program yang bersifat strategis. Namun demikian tak dapat dielakkan adanya potensi permasalahan dan hambatan dalam rangka kegiatan

selanjutnya yang merupakan tahap keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca mandat BRR berakhir.

Terkait dengan keberlanjutan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, diperlukan tindak lanjut berupa strategi pelaksanaan yang didasarkan kepada rencana aksi yang dijabarkan ke dalam rencana tata ruang wilayah yang terintegrasi dan komprehensif. Strategi pelaksanaan tersebut diperlukan dalam rangka mempercepat pembangunan perumahan dan prasarana permukiman, serta sekaligus menyelesaikan perbaikan sistem administrasi pertanahan, yang dilakukan seiring dengan upaya percepatan pemulihan mata pencaharian dan perluasan kesempatan kerja, pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah (KUKM), pemulihan dan perbaikan sistem pendidikan, pelayanan kesehatan, pemulihan prasarana utama jalan raya, pelabuhan udara dan pelabuhan laut, pemulihan kawasan pesisir, penguatan mitigasi dan penanganan bencana dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Keberadaan Sekretariat Bersama (Sekber) yang telah dibentuk oleh BRR bersama Pemerintah Daerah merupakan upaya koordinasi yang sangat baik, dalam upaya pelibatan Pemerintah Daerah di dalam kerangka persiapan alih tugas BRR pasca 2008-2009. Namun demikian, perlu dilakukan evaluasi terhadap pola “wahana peralihan” dari tugas BRR kepada Pemerintah Daerah. Evaluasi terhadap pola koordinasi ini juga berlaku dalam kerangka “wahana peralihan” kepada tugas-tugas yang menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah, khususnya berkaitan dengan koordinasi dengan lembaga Donor/NGO.

Permasalahan lain yang terpenting dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini sejauhmana tingkat dampak dan kemanfaatan dari program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana. Dengan demikian akan dapat dilihat dan dianalisis efektifitas dan efesiensi dari program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan. Karena memang dimaksudkan bahwa program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan untuk memulihkan kehidupan masyarakat akibat peristiwa bencana gempa dan tsunami yang sangat masif pada tanggal 26 Desember 2004 dan gempa bumi di Kepulauan Nias pada tanggal 28 Maret 2005.

Bila memperhatikan kerangka waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah memasuki tahun ketiga (2007) maka sudah bisa dilakukan penilaian kemanfaatan dan dampak program terhadap pemulihan kehidupan masyarakat. Sedangkan pada tahun 2005 dan 2006 indikator kinerjanya lebih banyak dilakukan terhadap masukan, proses dan keluaran dari pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan menilai kemanfaatan dan dampak terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi akan dapat diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi dalam pencapaian target dan sasaran program tersebut. Fokus penilaian tersebut yaitu pada masyarakat penerima manfaat di wilayah pasca bencana NAD dan Kepulauan Nias.

Berdasarkan analisis pemikiran singkat di atas maka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tahun 2007 sangat strategis dan urgen untuk melihat proses perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan merupakan momentum yang tepat untuk mulai melihat dampak program rehabilitasi dan rekonstruksi serta untuk memantau persiapan pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias pada tahun 2009 nanti.

1.2 Dasar Hukum

Penugasan Bappenas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2005, pasal 5, yang menyebutkan bahwa Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Induk yang sudah dituangkan ke dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka dibentuk sebuah Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 338/M.PPN/12/2005. Setelah itu, dilanjutkan dengan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B) yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 018/M.PPN/02/2007, yang berisi bahwa kegiatan program P3RIRRWANS ditujukan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut.

Beberapa dasar hukum dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ini yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 Tahun 2005, *jo.* Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
2. Perpres No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
6. Peraturan Presiden RI No. 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007
7. Keputusan Kepala Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi No. 120A/KEP/BP-BRR/VII/2007 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Paruh Waktu Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD-Nias tahun 2006 -2007 bertujuan :

1. Mendapatkan gambaran mengenai implementasi Rencana Induk melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja BRR NAD-Nias, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan komitmen Donor/NGO yang dilaksanakan oleh berbagai pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD-Nias
2. Menilai tingkat dan dampak pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap pemulihan kehidupan masyarakat NAD dan Kepulauan Nias sehingga dapat diketahui efektifitas dan efisiensinya.
3. Menilai tahap persiapan yang terkait dengan peralihan dari pengakhiran masa mandat dan tugas BRR NAD-Nias kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga dapat terwujud kesinambungan dan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana.

1.4 Sasaran Pemantauan dan Evaluasi

Sasaran pemantauan dan evaluasi Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD-Nias tahun 2006-2007 adalah :

1. Teridentifikasinya konsistensi penjabaran Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias sesuai Perpres No. 30 Tahun 2005
2. Teridentifikasinya kemanfaatan dan pemulihan terhadap kehidupan masyarakat NAD dan Kepulauan Nias sehingga terciptanya kondisi yang lebih baik sebelum terjadi peristiwa bencana.
3. Terciptanya langkah-langkah dan upaya-upaya yang strategis dalam rangka persiapan awal menjelang berakhirnya masa mandat dan tugas BRR NAD-Nias

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD-Nias tahun 2006-2007 meliputi dokumen-dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terkait satu dengan lainnya, yaitu:

- a. Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2005
- b. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006 dan 2007
- c. Rencana Kerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renja BRR) Tahun 2006 dan 2007
- d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2007 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2006 dan 2007
- e. Komitmen Donor/NGO

1.6 Tahapan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Ada tiga tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias tahun 2006-2007 ini, yaitu:

1.6.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan terdiri atas kegiatan-kegiatan koordinasi dan konsolidasi internal Tim Koordinasi P3B Bappenas, penyusunan kerangka acuan pemantauan dan evaluasi, penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi yang meliputi pedoman wawancara mendalam, pedoman observasi, kuesioner, dan panduan pengumpulan dokumen dan pedoman FGD, serta rapat-rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dan kehidupan Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut dengan stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

1.6.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan meliputi langkah-langkah pengumpulan data-data sekunder dari berbagai sumber seperti BRR, Pemerintah Daerah, Donor/NGO, kliping media massa dan sumber lainnya; pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan BRR, Pemerintah Daerah, Donor/NGO, dan masyarakat, observasi lapangan, Focus Group Discussion dengan partisipan BRR, Donor/NGO, serta diskusi dan pembahasan terhadap berbagai temuan pemantauan dan evaluasi.

1.6.3 Tahap Pelaporan

Pengolahan hasil-hasil temuan data dan informasi dilakukan dalam rangka penulisan laporan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Laporan pemantauan dan evaluasi disusun secara sistematis dan terstruktur, dengan analisa dan pembahasan yang dikelompokkan ke dalam lima bidang pemulihan yaitu bidang pemulihan perumahan dan infrastruktur, bidang pemulihan infrastruktur, bidang pemulihan sosial budaya, bidang pemulihan perekonomian dan bidang pemulihan hukum dan kelembagaan. Laporan disampaikan kepada berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini sebagai bentuk sosialisasi kepada stakeholders dan dalam rangka menerima masukan dan saran terhadap laporan pemantauan dan evaluasi yang telah dihasilkan.

Secara lebih detail, tahapan-tahapan diatas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 1 - 3
Tahapan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi

NO	Kegiatan	Kerangka Waktu											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan RKP, Renja BRR, RKP TA 2007												

NO	Kegiatan	Kerangka Waktu											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Musrenbang												
3.	Penyusunan Renaksi Nias												
4.	Penyusunan TOR Monev												
5.	Evaluasi Paruh Waktu RR NAD-Nias												
6.	Penyusunan Renaksi NAD-Nias												
7.	Penyusunan Instrumen Monev												
8.	Koordinasi internal P3B												
9.	Rakor Monev di Daerah												
10.	Kunjungan Lapangan												
11.	Pengumpulan Data Skunder												
12.	Stock Opname Data												
13.	Pengolahan Data dan informasi												
14.	Penulisan Laporan												
15.	Finalisasi Laporan												
16.	Workshop Laporan												

1.7 Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan laporan pemantauan dan evaluasi rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias tahun 2006-2007, sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN. Memaparkan tentang latar belakang penyusunan laporan monitoring dan evaluasi, dasar hukum yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias, tujuan pemantauan dan evaluasi RIRRWANS, sasaran pemantauan dan evaluasi, ruang lingkup pemantauan dan evaluasi, tahapan pelaksanaan operasional dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi untuk TA 2006-2007, dan sistematika penulisan laporan RIRRWANS TA 2006/2007.
- BAB II : METODOLOGI PEMANTAUAN DAN EVALUASI. Membahas mengenai kerangka dasar evaluasi kinerja yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, kelompok sasaran dalam pemantauan dan evaluasi, lokasi pemantauan dan evaluasi, dan teknik pengumpulan data yang secara garis besar, baik data primer maupun data sekunder.
- BAB III : PERKEMBANGAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI. Data dan informasi akan dianalisa mulai dari aspek perencanaan program/kegiatan dan penganggaran hingga pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh institusi BRR NAD-Nias, Pemerintah Daerah dan Donor/NGO. Penyajiannya akan dikelompokkan ke dalam lima bidang pemulihan pada program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan demikian akan dapat diketahui hal-hal apa saja yang sudah dicapai dan apa saja yang belum diraih bila dibandingkan dengan perencanaan yang sudah disusun sebelumnya.
- BAB IV : HASIL EVALUASI TERHADAP REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI. Menguraikan mengenai evaluasi pada setiap aspek dikelompokkan ke dalam lima bidang pemulihan, yaitu; 1. bidang pemulihan perumahan, 2. bidang pemulihan infrastruktur, 3. bidang pemulihan sosial budaya, 4. bidang pemulihan perekonomian, 5. bidang pemulihan kelembagaan dan hukum.
- Indikator yang dipergunakan dalam evaluasi dan pemantauan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias tahun 2006-2007 meliputi; 1. aspek konsistensi; Konsistensi antar dokumen perencanaan, konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan, Konsistensi antar pelaksana dan Konsistensi antara pelaksanaan dan kemanfaatan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. 2. Aspek Koordinasi; Mekanisme koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan Mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan: 3. Aspek Konsultasi; Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan Media partisipasi masyarakat secara langsung : 4. Aspek Kapasitas; kelembagaan dan Sumber Daya Manusia. 5. Aspek Keberlanjutan; Keberadaan Sistem dan Prosedur Manajemen. Mekanisme operasionalisasi sistem dan prosedur manajemen; Sistem Penganggaran Program/Kegiatan, Kesiapan peralihan asset dari BRR kepada Pemda, Kesiapan Exit Strategy bagi kelembagaan pemerintah daerah, Proses transisi, dan Sistem kelembagaan dalam transisi, berupa payung hukum dan tim pengalihan
- BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI. Berisi tentang kesimpulan yang dielaborasi menjadi point-point penting dari masing-masing aspek evaluasi yaitu aspek 5-K (konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan. Pada kesimpulan ini berlaku secara umum pula terhadap bidang pemulihan. Hasil

kesimpulan tidak terlepas dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya yaitu hasil evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu memuat tentang Rekomendasi untuk BRR, Pemda, Donor/NGO, K/L dan masyarakat.

METODOLOGI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bab 2

Metodologi Pemantauan dan Evaluasi

2.1 Kerangka Dasar Evaluasi Kinerja

Di dalam mendukung operasionalisasi kegiatan pemantauan dan evaluasi maka dirumuskan suatu kerangka kerja logis (logical framework) yang menggambarkan alur proses pemantauan dan evaluasi. Kerangka kerja logis tersebut menggunakan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja dilihat dari 4 tahapan proses yang secara lengkap dan komprehensif meliputi unsur-unsur :
 - a. *Input*, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan, baik program dan kegiatan, sumber dana, sumber daya alam, *sumber daya manusia*, maupun yang berupa teknologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
 - b. *Proccess*, yaitu upaya yang dilakukan di dalam mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator ini umumnya dikaitkan dengan keterlibatan stakeholders termasuk *penerima manfaat*, serta dikaitkan dengan mekanisme pelaksanaannya, termasuk *koordinasi dan hubungan kerja* antar unit organisasi.
 - c. *Output*, yaitu pencapaian sasaran dari suatu kegiatan, baik berupa *realisasi fisik maupun berupa non fisik*.
 - d. *Outcome*, yaitu menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan *manfaat keluaran kegiatan*.
2. Dengan menggunakan pendekatan sistem evaluasi di atas, di mana dalam setiap tahapan akan menekankan pada lima fokus evaluasi yaitu konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan yang tidak terpisah satu dengan lainnya.

Lima fokus pemantauan dan evaluasi, yaitu konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Konsistensi** yaitu proses penelaahan kesesuaian : (a) antara perencanaan yang tercantum dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias dengan Rencana Aksi dan Rencana Kerja yang disusun oleh para pelaksana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; (b) antara Rencana Aksi dan Rencana Kerja yang disusun oleh pelaksana dengan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan; serta (c) antar kegiatan pelaksanaan dari semua pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi, terkait dengan pelaksanaan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

2. *Koordinasi* yaitu suatu interaksi dan komunikasi antar berbagai *stakeholders* rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat NAD-Nias dalam mendorong tercapainya kesepahaman, kebersamaan, kesepakatan, dan komitmen dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah NAD-Nias.
3. *Konsultasi* yaitu keikutsertaan atau partisipasi Masyarakat NAD-Nias pada berbagai forum dalam rangka menyerap aspirasi dan pandangan, baik dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. *Kapasitas* yaitu kemampuan kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan sumber pendanaan, yang didayagunakan dalam melaksanakan berbagai upaya perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
5. *Keberlanjutan* yaitu proses kesinambungan dan saling keterkaitan antara pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan Badan Pelaksana BRR kepada Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dan pelaksana pembangunan.

Aspek-aspek evaluasi beserta indikator pemantauan dan evaluasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2 - 1
Aspek Evaluasi dan Indikator Pemantauan dan Evaluasi

NO.	ASPEK EVALUASI	INDIKATOR
1.	KONSISTENSI	1. Konsistensi <i>antar dokumen perencanaan</i>, yaitu antara Rencana Induk dengan RKP, Renja dan RKA, Renaksi, RKPD, Renja SKPD, dan Komitmen Donor/NGO. 2. Konsistensi <i>antara perencanaan dengan pelaksanaan</i>, yaitu antara Rencana Aksi dan/atau Renja yang dilakukan pada masing-masing bidang RIRRWANS oleh BRR, melalui Satker, Pemerintah Daerah melalui SKPD, dan Donor/NGO. 3. Konsistensi <i>antar pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi</i>, yaitu hasil pelaksanaan antara BRR, Pemerintah Daerah, dan Donor/NGO. 4. Konsistensi antara pelaksanaan dan kemanfaatan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
2.	KOORDINASI	1. Mekanisme <i>koordinasi dalam penyusunan perencanaan</i>: antara Bappenas, BRR, Donor/ NGO, dan Pemda Provinsi NAD dan Kab. Nias dan Kab. Nias Selatan Prov. Sumut. 2. Mekanisme <i>koordinasi dalam pelaksanaan</i>: Antara Bapel BRR, Satuan Kerja (Satker), dan Pemda Provinsi NAD dan Kab. Nias dan Kab. Nias Selatan Prov. Sumut, Donor/NGO.

NO.	ASPEK EVALUASI	INDIKATOR
3.	KONSULTASI (PARTISIPASI)	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Bapel BRR, Pemda, Donor/NGO, yang diwujudkan dalam identifikasi penilaian kebutuhan, sosialisasi rencana kerja pembangunan, legitimasi komitmen perencanaan, pelibatan dalam pelaksanaan kegiatan, serta pelibatan dalam pengawasan dan evaluasi. 2. Media <i>partisipasi masyarakat</i> secara langsung : ▪ <i>Sistem atau mekanisme</i> yang dibangun untuk memfasilitasi konsultasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaan ▪ <i>Forum pertemuan</i> untuk mengakomodasi permasalahan, revisi perencanaan dan pelaksanaannya, serta pengawasan pelaksanaan ▪ <i>Pola fasilitasi pendampingan</i> yang dilakukan oleh Pemda, lembaga perguruan tinggi, LSM/NGO, dan lembaga profesional lainnya ▪ <i>Ketersediaan dan kemudahan akses informasi</i> melalui Media massa lokal, Webbsite, Kotak pos pengaduan, Telpon bebas pulsa
4.	KAPASITAS (SDM dan Kelembagaan)	1. Kapasitas Kelembagaan ▪ <i>Mekanisme perencanaan di Bapel BRR</i> ▪ <i>Standar perencanaan dan pelaksanaan</i> ▪ <i>Mekanisme pengendalian dan pengawasan, termasuk di dalamnya mekanisme surveillance/audit sistem secara berkala serta manajemen review secara berkala.</i> ▪ <i>Mekanisme pelaporan.</i> 2. Kapasitas Sumber Daya Manusia ▪ <i>kapasitas personel Bapel BRR, Satker, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dalam memahami perencanaan, pelaksanaan, serta proses koordinasi dan konsultasi yang harus dilalui.</i> ▪ <i>Regulasi, kebijakan, program/kegiatan yang terkait pola pembinaan SDM BRR</i> ▪ <i>Evaluasi kinerja SDM serta tindakan perbaikan dan pembinaan SDM secara menerus.</i>
5.	KEBERLANJUTAN	1. Sistem yang dibangun bersama dalam rangka keberlanjutan: ▪ <i>Sistem dan prosedur manajemen, dalam perencanaan, pengendalian pelaksanaan, dan pengawasan</i> ▪ <i>Sistem Penganggaran Program/Kegiatan, sumber dana, serta pola pembelanjaan berbasis investasi</i> ▪ <i>Sistem kelembagaan transisi, yaitu penyusunan payung</i>

NO.	ASPEK EVALUASI	INDIKATOR
		<i>hukum dan pembentukan tim pengalihan.</i> 2. Mekanisme yang dibangun untuk peralihan aset dan Exit Strategy dari BRR kepada Pemda. 3. Proses transisi, yaitu pelaksanaan pengalihan aset/sistem, pengalihan dokumen, pengalokasian program/proyek, pengalokasian pendanaan, dan pengalokasian SDM.

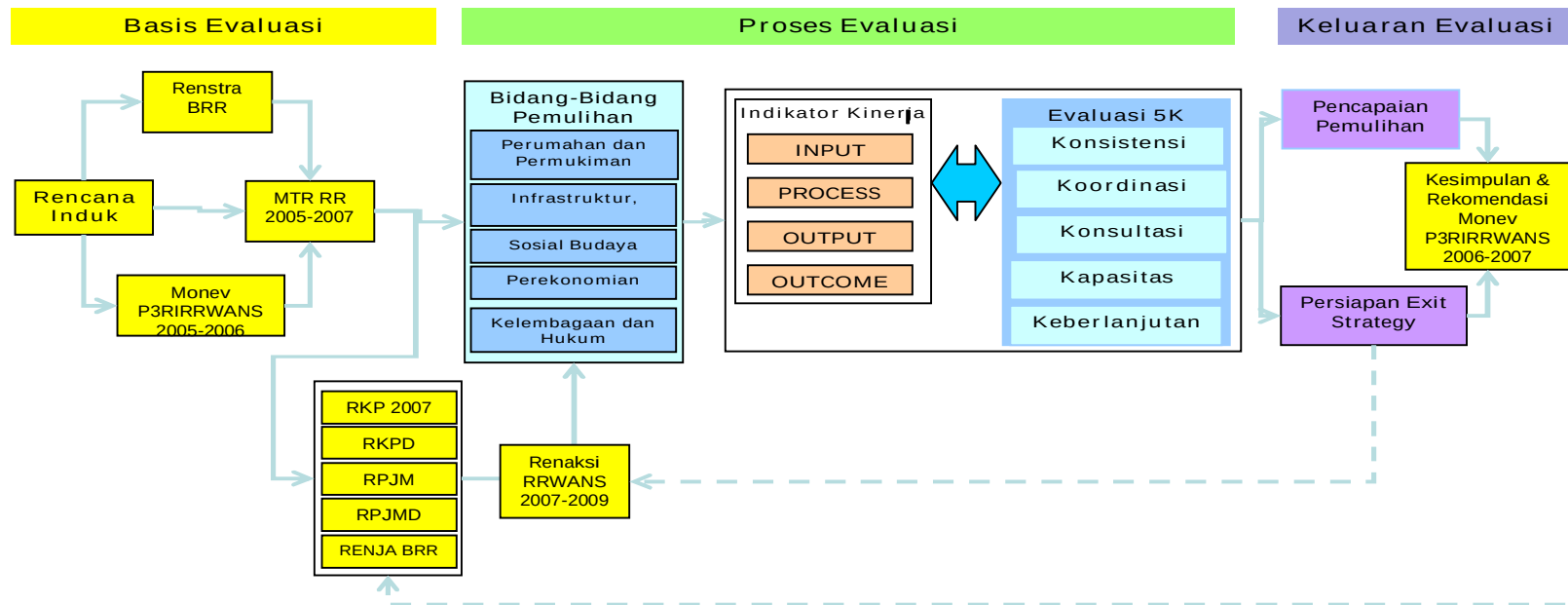
Sumber: P3B Bappenas, 2007

Di dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, telah dirancang suatu alur kerangka pikir yang merupakan gambaran secara umum. Kerangka kerja logis ini dapat divisualisasikan sebagai berikut:

Gambar 2 - 1

Kerangka Kerja Logis Pemantauan dan Evaluasi

KERANGKA KERJA LOGIS (LOGICAL FRAMEWORK) PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Sumber: P3B Bappenas, 2007

Secara naratif kerangka kerja logis di atas dapat dijelaskan sebagai berikut;

A. Basis Evaluasi:

Terdapat berbagai dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai basis dalam melakukan pemantauan dan evaluasi. Dokumen utama yang dipakai yaitu Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Selain itu, dokumen lain yang dipergunakan adalah Rencana Strategis BRR, Hasil Monitoring dan Evaluasi P3RIRRWANS TA 2005-2006, Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Kepulauan Nias, hasil Evaluasi Paruh Waktu (MTR) rehabilitasi dan rekonstruksi, serta Rencana Aksi Wilayah NAD dan Nias, yang dapat dijadikan sebagai base line data untuk laporan monitoring dan evaluasi RIRRWANS TA 2006-2007. Selain itu, pemantauan dan evaluasi juga mempertimbangkan dokumen perencanaan pemerintah jangka menengah (RPJM, RPJMD), serta dokumen perencanaan hasil musyawarah perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah (RKP, RKPD dan Renja BRR).

B. Proses Evaluasi:

Proses evaluasi dilakukan dengan sasaran evaluasi pada beberapa bidang pemulihan yaitu; bidang pemulihan perumahan dan permukiman, bidang pemulihan infrastruktur, bidang pemulihan perekonomian, bidang pemulihan sosial budaya, dan bidang pemulihan kelembagaan dan hukum. Terhadap kelima bidang pemulihan tersebut akan diukur tingkat kinerja pelaksanaannya dengan menggunakan indikator kinerja (input, proccess, output. outcome dan impact). Tahap selanjutnya, dilakukan evaluasi dengan menggunakan kerangka 5-K (konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan).

C. Keluaran Evaluasi

Dalam konteks pemantauan dan evaluasi tahun anggaran 2006-2007 ini, terdapat dua fokus utama yang akan dinilai yaitu; 1. fokus tingkat dampak dan kemanfaatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana. 2. Fokus pada langkah-langkah dan persiapan awal mengenai penyelesaian dan pengakhiran masa tugas BRR yang akan berakhir pada April 2009 nanti.

2.1.1 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi tahun 2006-2007 adalah:

1. Masyarakat Penerima Manfaat
2. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias
3. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
4. Donor/NGO

2.1.2 Lokasi Pemantauan dan Evaluasi

Lokasi-lokasi yang dijadikan pemantauan dan evaluasi ini didasarkan atas 6 (enam) wilayah kerja Bapel BRR dengan memilih beberapa sampel kabupaten/kota sebagaimana yang tertera dalam tabel di bawah ini yang dikelompokkan kedalam regionalisasi BRR NAD-Nias sebagai berikut:

Tabel 2 - 2
Lokasi Pemantauan dan Evaluasi

No.	WILAYAH KERJA BRR		LOKASI SAMPLE MONEV
1.	Regional I	Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar dan kepulauan sekitar, dan Aceh Jaya	Kota Banda Aceh Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Jaya
2.	Regional II	Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Lhok Seumawe, Aceh Timur, Langsa dan Aceh Tamiang	Kabupaten Pidie Kabupaten Bireuen
3.	Regional IV	Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya	Kabupaten Aceh Barat
4.	Regional V	Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Simeuleu serta kepulauan sekitar	Kabupaten Aceh Singkil
5.	Regional VI	Kepulauan Nias (Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan)	Kabupaten Nias

Dasar pemilihan sampel beberapa kabupaten/kota di atas yaitu : Pertama, wilayah-wilayah yang merupakan daerah yang terkena dampak bencana secara langsung. Kedua, dengan mempertimbangkan tingkat dampak wilayah bencana akibat gempa bumi dan tsunami baik yang terjadi pada 26 Desember 2004 di NAD dan Kepulauan Nias maupun bencana gempa pada 28 Maret 2005 di Kepulauan Nias. Ketiga, beberapa kabupaten/kota yang dijadikan sasaran pemantauan dan evaluasi ini dianggap dapat mewakili kawasan barat-selatan, kawasan utara-timur dan kawasan Kepulauan Nias. Tim P3B Bappenas telah melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Nias di Kepulauan Nias pada bulan Juni-Juli 2007. Sedangkan kunjungan ke 7 kabupaten/kota di Provinsi NAD sudah dilakukan pada bulan September-November 2007.

2.1.3 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan dengan jenis data, maka metode pemantauan didasarkan pada data primer, data sekunder, serta sumber data utama.

2.1.3.1 Data Primer

A. Rapat Koordinasi dengan stakeholders di daerah

Sebelum dilakukan kunjungan lapangan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi telah dilaksanakan pertemuan awal (kick off meeting) dengan Bappeda Provinsi NAD dan beberapa Bappeda kabupaten/kota yang akan dijadikan sebagai sampel dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Kegiatan rapat koordinasi dilaksanakan dalam beberapa sekuen pertemuan. Terkait dengan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, kegiatan pemantauan dan evaluasi sekaligus dalam rangka penyusunan Rencana Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pasca bencana gempa bumi 28 Maret 2005, dengan koordinasi Bappeda, dan melibatkan seluruh stakeholders di wilayah Kepulauan Nias. Sementara terkait kabupaten/kota lainnya, kegiatan rapat koordinasi dilaksanakan dengan koordinasi Bappeda Provinsi NAD di Banda Aceh dengan mengundang Bappeda Kota Banda Aceh, Bappeda Kab. Aceh Besar, Bappeda Kab. Aceh Jaya, Bappeda Kab. Aceh Barat, Bappeda Kab. Bireuen, Bappeda Kab. Pidie, dan Bappeda Kab. Aceh Singkil. Tujuan pelaksanaan rapat koordinasi tersebut untuk melakukan sosialisasi kerangka acuan pemantauan dan evaluasi, melakukan penyamaan

pemahaman terhadap rencana pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta melakukan tindak lanjut kerja bersama ketika dilaksanakan kunjungan lapangan.

Selain itu, kegiatan wawancara mendalam dilakukan dengan Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi Rekonstruksi NAD-Nias baik yang berada di Pusat maupun di regional, Bappeda Provinsi, Bappeda kabupaten/kota, SKPD prioritas di tingkat provinsi dan SKPD prioritas di tingkat kabupaten/kota, dan wawancara dengan Donor/NGO prioritas. Pengumpulan data dan informasi ini telah dilaksanakan di wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Pidie, Bireun dan Aceh Singkil. Wawancara mendalam ini dilakukan dalam rangka untuk menggali berbagai informasi yang terkait dengan 5 kerangka evaluasi yang telah ditentukan yaitu konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan.

B. Focus Group Discussion (FGD)

Tujuan pelaksanaan FGD ini untuk mendapatkan gambaran tentang dampak dan manfaat program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana. Selain itu, dibahas dan didiskusikan pula mengenai isu keberlanjutan proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca berakhirnya masa tugas BRR pada April 2009. Kegiatan FGD ini dilaksanakan di Banda Aceh, bekerja sama dengan salah satu NGO lokal setempat, dengan peserta dari Badan Pelaksana BRR, Sekretariat Dewan Pengarah BRR, Tim Pemantauan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B) Bappenas, Donor dan NGO.

C. Survey masyarakat penerima manfaat

Tujuan pelaksanaan survey ini adalah untuk melihat sejauhmana tingkat pemulihan kehidupan masyarakat dengan adanya program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dari hasil survey diharapkan adanya masukan perbaikan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Secara metodologis, operasionalisasi survey ini sebagai berikut:

- Teknik sampling yang dipergunakan adalah Teknik *Purposive Random Sampling*. Teknik ini bertujuan untuk mengambil populasi pada wilayah yang terkena bencana secara langsung. Dengan harapan output dari hasil survey diperoleh gambaran tingkat pemulihan kehidupan masyarakat dengan mengamati pada aspek-aspek survey sebagai berikut; aspek perumahan, aspek kesejahteraan, dan aspek perekonomian. Ketiga aspek tersebut sudah mencakup lima bidang pemulihan yang menjadi objek pemantauan dan evaluasi ini.
- Kuota sampel sebanyak 30 responden per lokasi sampel kabupaten/kota, sehingga total sampel yang diharapkan dapat dihimpun sebanyak 210 responden.
- Penyebaran kuesioner ini dilakukan di Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Bireuen, Pidie, dan Aceh Singkil.

D. Observasi/Pengamatan Lapangan

Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa lokasi pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi sampel lokasi pemantauan dan evaluasi. Objek yang diobservasi meliputi lima bidang pemulihan yaitu bidang pemulihan perumahan dan permukiman, bidang pemulihan infrastruktur, bidang pemulihan sosial budaya, bidang pemulihan perekonomian dan bidang pemulihan hukum dan kelembagaan. Dengan adanya observasi lapangan secara langsung dapat diperoleh gambaran kemajuan secara riil program/kegiatan di lapangan, serta gambaran masalah-masalah yang ditemui secara fisik pada hasil-hasil pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi.

E. Teknik wawancara

Tujuan pelaksanaan teknik wawancara ini bertujuan untuk melakukan penggalian dan penelusuran data dan informasi secara mendalam dan ini merupakan proses dialog dengan

berbagai stakeholders yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias. Adapun yang menjadi subjek dari pelaksanaan kegiatan wawancara ini yaitu dengan kalangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi baik di pusat maupun regional, Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan Donor/NGO. Hasil wawancara ini untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan lima aspek evaluasi (konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan) pada lima bidang pemulihan yaitu perumahan dan permukiman, infrastruktur, sosial budaya, perekonomian dan kelembagaan dan hukum.

2.1.3.2 Data Sekunder

A. Studi literatur

Beberapa bahan hasil studi literatur terkait proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta literatur dapat mendukung penulisan laporan pemantauan dan evaluasi ini. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan untuk mempertajam analisis dan evaluasi pemantauan dan evaluasi. Beberapa bahan tersebut, antara lain meliputi:

- Analisis Pengeluaran Publik Aceh: Pengeluaran untuk Rekonstruksi dan Pengentasan Kemiskinan (Desember 2006) yang diterbitkan atas kerja sama World Bank, DSF, BRR dan Pemda NAD.
- Pedoman Penyusunan Indikator, Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja (2004), yang diterbitkan oleh Bappenas.
- Teknik Sampling Analisis Opini Publik (2007), yang diterbitkan oleh LKiS, Jogjakarta.
- Tsunami Recovery Indicators Package (TRIP) For Aceh and Nias, UNORC, (March 2007)

B. Laporan

Dokumen laporan-laporan dari berbagai lembaga dihimpun untuk mendukung data pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Beberapa buku laporan yang dihimpun antara lain:

- Laporan yang bersumber dari BRR: Laporan Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2005-2007, Laporan Memperkokoh Hikayat Kehidupan: Laporan Kegiatan Dua Tahun BRR NAD dan Kepulauan Nias Agustus 2007, Monitoring Kemajuan Pekerjaan APBN 2007 di Bapel RR NAD-Nias: Menggunakan Kurva "S"), Laporan Kegiatan Tahun 2006 BRR Regional V, Singkil, Laporan Kegiatan DIPA Tahun 2007 BRR Regional V, Singkil, Laporan Kunjungan Kerja Anggota Dewan Pengarah (Ir.Usman Hasan, M.Si) di NAD, (20 Agustus - 2 September 2007), Aceh dan Nias 2 Tahun Setelah Tsunami; Laporan Kemajuan Tahun 2006. (Desember 2006), Laporan Kinerja Instansi pemerintah BRR NAD-Nias, TA 2006, BRR, Laporan Kegiatan BRR Regional IV, Aceh Barat, (31 Agustus 2007), Realisasi Trust Fund Per 30 Juni 2007, BRR, Laporan Lengkap Dari Regional VI Kep.Nias, BRR Nias, (Desember 2007), Sosialisasi RTRW Kabupaten dan Kawasan Permukiman Utama, Modul Kab. Aceh Singkil, BRR, (Tahun 2007).
- Laporan yang bersumber dari Pemerintah Daerah: Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Laporan Pelaksanaan Kegiatan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), laporan PDRB, laporan NAD dalam Angka, Laporan Nias dan Nias Selatan dalam Angka.
- Laporan yang bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yaitu laporan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk TA 2006.
- Laporan yang bersumber dari Donor/NGO yaitu berupa laporan tahunan atau yang dipublikasikan melalui media internal masing-masing lembaga, yaitu; Implementing Projects, Achieving Results, Progress Report III (Desember 2006), MDF Quarterly Financial Management Report No.9 (30 Juni 2007), Rebuilding Livelihoods, FAO, (April-

June 2006), Rebuilding Livelihoods, FAO, (Sep-Dec 2006), Laporan Tahun 2006, UNDP, ERTR Programme, Livelihoods, UNDP, (Jan 2005-Dec2006), Building Blocks for Sustainable Recovery, ERTR Programme, (2005-2006), FAST FACT, ERTR Programme, UNDP, (Jan 2005-Dec2007), Brief ETESP Progress Summary, Oct 2007, ADB, (Oct 2007), Status Report on the Asian Tsunami Fund (Jan-June 2007), ADB, (Sept 2007), A Fact Sheet 2007, ADB, (Desember 2006), Laporan Tahunan 2006, IOM (November 2006), Migration Health, IOM, (July 2007), Livelihood Support Programme, IOM, (July 2007), Panduan Rumah Permanen IOM, (Februari 2007), Report USAID to WB, USAID, (July 2007), Pencapaian Partner/ NGO di Aceh Barat, BRR, (30 Juli 2007), Support to Strengthen the Capacity and Role of CSOS in the Recovery Communities in Aceh and Nias, ANNUAL REPORT 2006, UNDP, (Jan-Dec 2006).

C. Kliping media massa

Data sekunder lainnya yang dapat dijadikan sumber untuk pemantauan dan evaluasi dilakukan pengumpulan data dan informasi yang bersumber dari media masa baik koran, majalah, dan tabloid. Secara intensif, pengumpulan data melalui media masa ini dilakukan dengan memanfaatkan kliping dari koran Serambi Indonesia, tabloid Modus, Kompas, Media Indonesia, Republika, Majalah TEMPO dan lain-lainnya. Sebagai gambaran, terdapat tiga artikel dalam majalah TEMPO yang lumayan mendalam membahas mengenai perkembangan program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias, yaitu: Lepas Landas Aceh Berkelanjutan, MAJALAH TEMPO, (13-19 Agustus 2007), Dua Tahun Momentum Keterlantaran, Majalah TEMPO, (7 Januari 2007), Siap-Siap Menjelang Tenggat, Majalah Tempo, (10-16 Desember 2007).

2.2 Sumber Data Utama: Laporan Evaluasi Paruh Waktu (MTR) dan Renaksi Wilayah NAD-Nias 2007-2009

Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara TA 2006-2007 ini tidak terlepas dari rangkaian pelaksanaan evaluasi dan penyusunan perencanaan sebelumnya. Ada dua rangkaian kegiatan sebelumnya yang saling terkait yang secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama, Evaluasi Paruh Waktu rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Tahun 2005-2007. Evaluasi ini dilaksanakan pada pertengahan waktu program rehabilitasi dan rekonstruksi yang menganalisis pencapaian realisasi pelaksanaan tahun 2005 dan 2006 serta program tahun 2007. Evaluasi paruh waktu telah memanfaatkan sumber-sumber data utama dari hasil Monitoring dan Evaluasi RIRRWANS tahun 2005-2006 dan hasil Rencana Aksi wilayah Nias 2005-2007. Proses evaluasi paruh waktu melibatkan berbagai stakeholders yang terdiri dari Badan Pelaksana (Bapel), Sekretariat Dewan Pengarah, Sekretariat Dewan Pengawas. Donor/NGO, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga serta para pemangku kepentingan lainnya.

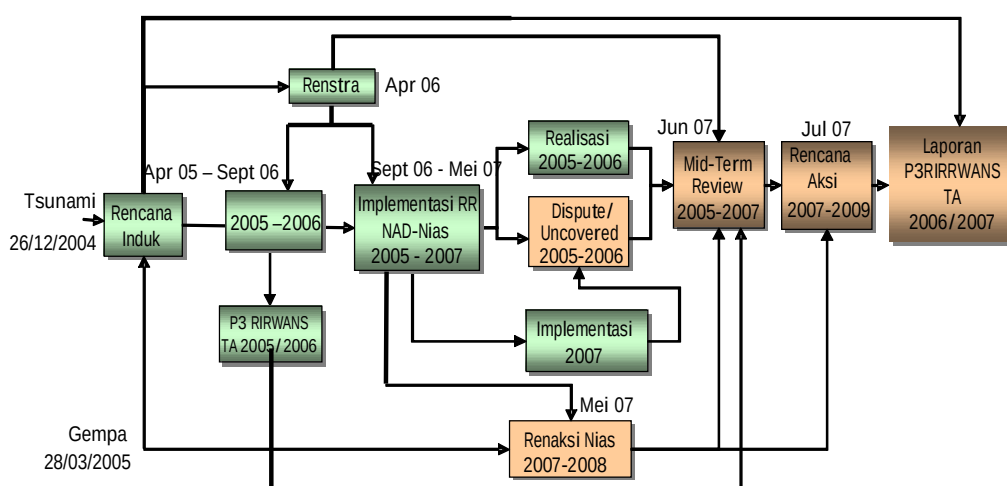
Kedua, Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut Tahun 2007-2009. Rencana Aksi ini merupakan kelanjutan dari hasil evaluasi paruh waktu yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan Rencana Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi ini didasarkan atas beberapa aspek: 1) Pertimbangan kerusakan dan kerugian akibat bencana tsunami dan gempa, dan mengacu kepada Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana tercantum dalam Perpres No 30 tahun 2005, dengan mempertimbangkan penanganan pasca bencana, khususnya di wilayah Nias dengan mengakomodasi kerusakan dan

kerugian akibat gempa 28 Maret 2005 secara menyeluruh. Dinamika yang berlangsung selama dua tahun terakhir juga diakomodasi dalam Rencana Aksi, 2) Penajaman sasaran Rencana Induk antara lain memuat penyesuaian substansi program, perubahan sasaran, proyeksi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mesti dituntaskan hingga 2009, 3) Pertimbangan masa transisi menjelang berakhirnya tugas BRR NAD-Nias.

Berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu dan penyusunan rencana aksi itu dijadikan sebagai bahan masukan antara untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Kepulauan Nias untuk tahun anggaran 2006/2007. Dengan demikian antar berbagai dokumen tersebut terdapat kesinambungan dan keterkaitan secara substantif. Selain itu, beberapa data dan informasi dari dokumen sebelumnya juga dijadikan sumber penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi TA 2006/2007. Selain itu, ketiga dokumen itu pun mempunyai keterkaitan secara kronologis waktu karena berlangsung dalam kerangka waktu yang berurutan.

Bagan alur berikut ini menggambarkan proses dan keterkaitan dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Paruh Waktu rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Tahun 2005-2007 dan penyusunan Rencana Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Tahun 2007-2009 dengan pelaksanaan P3RIRRWANS TA 2006/2007, sebagai berikut:

Gambar 2 - 2
Proses Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Paruh Waktu



PERKEMBANGAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TA 2006/2007

Bab 3

Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA 2006/2007

Pada bab III ini akan membahas hasil perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Nias tahun 2006/2007 yang dilaksanakan oleh pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi yang terdiri dari: Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), Pemerintah Daerah, Donor/NGO.

3.1 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

3.1.1 Pemulihan Perumahan, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

3.1.1.1 Perumahan dan Permukiman

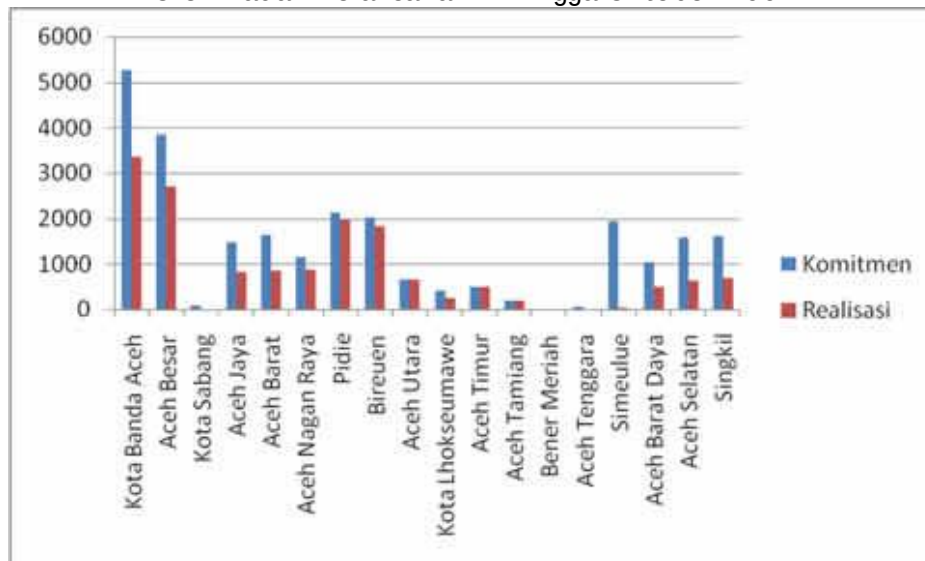
Hingga tanggal 31 Oktober 2007, seluruh pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara telah menyelesaikan pembangunan rumah sebanyak 102.863 unit, dan 50.463 unit sedang dalam proses pengerjaan. Komitmen keseluruhan yang tercatat sebanyak 152.526. Dari total jumlah yang telah terbangun, 92.000 unit rumah diantaranya berlokasi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sedangkan sisanya sebanyak 10.063 unit berlokasi di wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (Pusdatin BRR, Oktober 2007). Khusus pembangunan oleh Bapel RR, sudah terlaksana sebanyak 24.075 unit rumah, masih dalam pengerjaan 9.916 unit rumah, dengan komitmen keseluruhan 33.894 unit. Sumber dana untuk pembangunan perumahan berasal dari berbagai pembiayaan seperti DIPA APBN TA 2005 dan 2006, MDF (Multi Donor Fund), ADB (Asian Development Bank), dan dana off budget lainnya. Tabel berikut menjelaskan realisasi pembangunan rumah oleh Bapel RR di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3 - 1
Realisasi Pembangunan Perumahan di NAD-Nias oleh Bapel RR
hingga Oktober 2007

NO	KAB/KOTA	REALISASI BAPEL RR HINGGA OKTOBER 2007		
		KOMITMEN (UNIT)	SELESAI (UNIT)	SEDANG DIKERJAKAN (UNIT)
Nanggroe Aceh Darussalam				
1	Kota Banda Aceh	5262	3353	2015
2	Aceh Besar	3856	2712	1144
3	Kota Sabang	86	0	86
4	Aceh Jaya	1473	824	649
5	Aceh Barat	1646	834	814
6	Aceh Nagan Raya	1146	871	275
7	Pidie	2135	1961	174
8	Bireuen	2009	1830	179
9	Aceh Utara	664	664	0
10	Kota Lhokseumawe	413	250	163
11	Aceh Timur	500	500	0
12	Aceh Tamiang	200	200	0
13	Bener Meriah	0	0	0
14	Aceh Tenggara	50	0	50
15	Simeulue	1932	37	1895
16	Aceh Barat Daya	1046	496	540
17	Aceh Selatan	1587	618	968
18	Singkil	1614	681	933
Kepulauan Nias				
19	Nias	5667	5505	162
20	Nias Selatan	3031	2950	81
TOTAL		34.317	24.286	10.128

Sumber: Hasil Analisis Tim P3B-BAPPENAS berdasarkan data Dit. Pengendalian dan Monitoring, Deputi Perumahan dan Permukiman, Bapel RR NAD-Nias, Nov 2007

Grafik 3 - 1
Proporsi Komitmen dan Realisasi Pembangunan Perumahan (unit)
Oleh Badan Pelaksana RR Hingga Oktober 2007



Sumber: Hasil Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Realisasi DIPA BRR Tahun 2006 hingga 28 Desember 2006 sebesar Rp 3,2 triliun atau 74,68 % dari anggaran sejumlah Rp 4,3 triliun. Sementara untuk realisasi keuangan DIPA BRR TA 2007, dari pagu sebesar Rp 3,4 triliun, realisasi keuangan hingga 31 Oktober 2007 sebesar Rp 1,4 triliun atau 42,15 %. Ditinjau dari jumlah satker, terdapat perbedaan antara tahun 2006 dan 2007, di mana satker pada tahun 2006 berjumlah 15 satker dan 26 satker untuk tahun 2007. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 - 2
Realisasi Keuangan Bidang Perumahan dan Permukiman di NAD-
Nias TA 2006 dan 2007

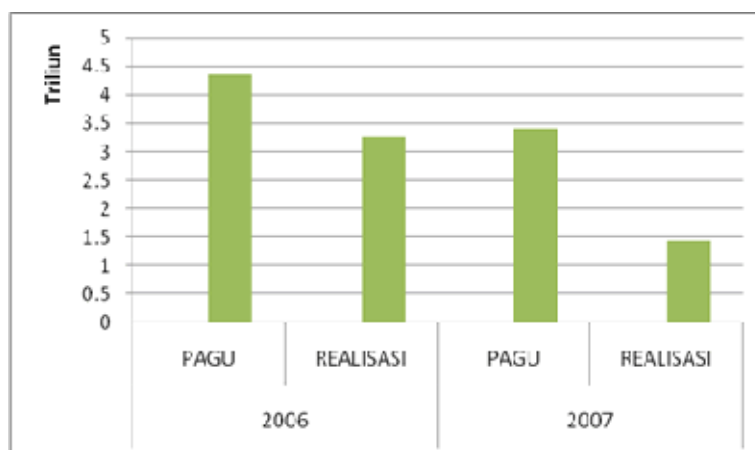
BIDANG/ SATKER		PAGU		REALISASI KEUANGAN			
		2006	2007	2006		2007	
		(RIBU RP)	(RIBU RP)	(RIBU RP)	%	(RIBU RP)	%
Bidang Perumahan dan Permukiman		4.354.814.168	3.407.739.634	3.251.992.689	74,68	1.436.323.454	42,15
1	Pengembangan Perumahan dan Permukiman NAD Wil. I	631.562.831	83.303.630	345.083.229	54,64	71.814.254	86,21
2	Pengembangan Perumahan dan Permukiman NAD Wil. II	267.757.900	14.367.914	217.095.224	81,08	4.663.386	32,46
3	Pengembangan Perumahan dan Permukiman NAD Wil. III	307.961.570	73.848.362	306.670.557	99,58	69.323.120	93,87
4	Pengembangan Perumahan dan Permukiman NAD Wil. IV	152.521.314	33.936.050	151.185.496	99,12	18.248.701	53,77
5	Pengembangan Perumahan dan Permukiman NAD - ADB		133.339.146			93.415.705	70,06

BIDANG/ SATKER		PAGU		REALISASI KEUANGAN			
		2006	2007	2006		2007	
		(RIBU RP)	(RIBU RP)	(RIBU RP)	%	(RIBU RP)	%
6	Bantuan Perumahan dan Pemukiman Kembali / BPPK NAD	403.982.146	507.801.898	403.751.111	99,94	149.842.006	29,51
7	Bantuan Perumahan dan Pemukiman Kembali / BPPK NAD - Simeulue		92.594.191			18.921.388	20,43
8	Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kota Calang		58.582.035			12.061.738	20,59
9	Infrastruktur Kawasan dan Permukiman	133.268.945	505.576.149	123.955.326	93,01	474.267.354	93,81
10	Infrastruktur Kawasan Siap Huni		205.903.712			41.906.179	20,35
11	Bantuan Sosial Bertempat Tinggal dan Perbaikan Rumah		249.893.290			67.281.869	26,92
12	Prakarsa Pembangunan Partisipatif		59.366.320			11.924.710	20,09
13	Kedeputian Perumahan dan Permukiman	81.113.500	144.117.330	74.294.095	91,59	52.342.271	36,32
14	Pengembangan Perumahan dan Permukiman (MDTF)	827.480.000	242.077.780	362.444.230	43,80	33.428.930	55,12
15	Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan	179.231.000	62.531.960	80.487.120	44,91	19.381.926	31,00
16	Penataan Ruang dan Lingkungan Permukiman		50.801.300			22.435.247	44,16
17	Pengelolaan Pertanahan NAD-Nias	603.943.132	316.833.038	514.581.631	85,20	58.888.844	18,59
18	Bantuan Perumahan dan Permukiman NAD Reg. Wil. II		44.324.679			26.093.233	58,87
19	Bantuan Perumahan dan Permukiman NAD Reg. Wil. III		42.763.654			9.211.627	21,54
20	Bantuan Perumahan dan Permukiman NAD Reg. Wil. IV		60.480.685			30.413.179	50,29
21	Bantuan Perumahan dan Permukiman NAD Reg. Wil. V		24.019.620			13.351.405	55,59
22	Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kab. Nias	536.548.500	31.325.738	465.051.266	86,67	8.161.420	26,05
23	Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kab. Nias Selatan		41.472.480			16.996.213	40,98
24	Pengelolaan Pertanahan Nias		6.667.000			1.213.550	18,20
25	Bantuan Perencanaan		167.315.173			10.735.200	6,42

BIDANG/ SATKER		PAGU		REALISASI KEUANGAN			
		2006	2007	2006		2007	
		(RIBU RP)	(RIBU RP)	(RIBU RP)	%	(RIBU RP)	%
	Pembangunan dan Rehabilitasi Kec. Nias (KRRP)						
26	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan NAD-NIAS (GRANT-KFW)	125.000.000	154.496.500	125.000.000	100,00	-	
27	Bantuan Perbaikan Rumah NAD	60.185.230		51.306.134	85,25		
28	Tata Ruang, Lingkungan, Pemantauan Dan Evaluasi Manfaat	34.719.000		31.087.269	89,54		
29	Pengembangan Kecamatan (PPK)	9.539.100		0	0,00		

Sumber: Pusat Pengendalian Mutu Konstruksi, Kedeputian Bidang Operasi, Bapel RR NAD Nias, 30 Nov 2007

Grafik 3 - 2
Pagu dan Realisasi DIPA BRR Bidang Perumahan
Tahun 2006 dan 2007 *)



Sumber: Hasil Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Ket: *) Realisasi DIPA 2007 adalah hingga 31 Oktober 2007

Untuk merealisasikan penyelesaian bantuan perumahan, Kedeputian Bidang Perumahan dan Permukiman Bapel RR mencanangkan 4 (empat) program pemberian bantuan, yaitu:

1. Bagi warga yang rumah dan tanahnya musnah atau tidak aman huni, akan dibangun rumah di lokasi lain melalui mekanisme Bantuan Perumahan dan Permukiman Kembali (BPPK).
2. Bagi warga yang rumah dan permukimannya rusak tapi tanahnya tidak musnah, akan dibangun rumah di tanah yang tersisa melalui mekanisme Bantuan Pembangunan Rumah Baru (BPRB).
3. Bagi warga yang rumahnya rusak tapi masih dapat diperbaiki, akan dilakukan rehabilitasi melalui mekanisme Bantuan Perbaikan Rumah (BPR).
4. Bagi warga berstatus penyewa, penumpang, dan “kepala keluarga gantung” yang rumahnya hancur, telah diterbitkan kebijakan terbaru untuk mengakomodasi kebutuhan mereka melalui mekanisme Bantuan Sosial untuk Bertempat Tinggal (BSBT).

Program BSBT dilansir pada awal 2007, menyusul tiga mekanisme lainnya, yakni BPPK (relokasi), BPRB (rumah baru), dan BPR (rehabilitasi).

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Nomor 3/PER/BP-BRR/I/2007 yang berhak mendapat bantuan pembangunan rumah baru (BPRB) dari BRR maupun NGO adalah korban bencana gempa dan tsunami yang rumahnya hancur. Pembangunan dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Setiap satu unit rumah yang dihuni hancur, diganti dengan satu unit rumah baru tipe 36. Dengan kata lain, satu unit rumah hancur yang dihuni akibat bencana gempa bumi dan tsunami, pemilik atau ahli warisnya hanya bisa menerima satu unit bantuan pembangunan rumah baru.

Bagi keluarga yang sebelum bencana tsunami, rumahnya dihuni lebih dari satu kepala keluarga, maka bantuan pembangunan rumah baru diberikan kepada kepala keluarga atau ahli waris yang memiliki hak atas tanah dan rumah. Sedangkan bagi kepala keluarga atau ahli waris yang tidak menerima bantuan pembangunan rumah baru diberikan bantuan sosial untuk bertempat tinggal yang diatur dalam keputusan tersendiri.

3.1.1.2 Prasarana Dasar Permukiman

Pembangunan permukiman ini mencakup kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman berupa jalan pemukiman, drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah rumah tangga dan drainase lingkungan, listrik serta adanya dukungan ketersediaan fasilitas umum lainnya. Selain itu juga arahan perencanaan yang lebih luas untuk mewadahi permukiman tersebut, yaitu Tata Ruang serta Pertanahan.

Tujuan pembangunan Prasarana Dasar Permukiman untuk ikut secara terpadu dan sinergi menciptakan tatanan lingkungan perumahan yang layak, aman, sehat, nyaman dan serasi serta dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat. Dengan terbangunnya PSD, diharapkan percepatan penghunian rumah dan menghunikan kembali masyarakat korban bencana gempa dan tsunami dapat dilaksanakan. Sasaran yang ditetapkan untuk pembangunan PSD dialokasikan di 900 desa/kawasan yang dapat melayani sekitar 128.000 unit.

Tabel 3 - 3
Kegiatan Penyediaan PSD, Komponen, dan Perangkat Teknis

MANDAT RENCANA INDUK TENTANG PENYEDIAAN PSD PERMUKIMAN	KEGIATAN UTAMA PENYEDIAAN PSD PERMUKIMAN	KOMPONEN PSD	PERANGKAT TEKNIS
Kebijakan: Membantu penyediaan perumahan dan prasarana dan sarana dasar pendukungnya bagi korban bencana yang berkeinginan pindah ke tempat baru (<i>resettlement</i>). Strategi: Terciptanya integrasi dan koordinasi antara	1. Pembangunan Baru PSD 2. Perbaikan PSD 3. Penyusunan DED kawasan/desa 4. Penyusunan Rencana Detail Induk Sistem PSD (RIS PSD) 5. Pembangunan PSD berbasis kecamatan	1. Jalan sepanjang 2250 km 2. Penyediaan air minum dengan kapasitas sekitar 45.000 m3/hari 3. Pembuatan drainage sepanjang 1800 km 4. Pembuatan sanitasi dengan kapasitas sekitar 31.500 m3/hari 5. Penanganan sampah dengan kapasitas sekitar 1280 m3/hari 6. Melakukan penataan lingkungan kawasan yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan	1. Penyediaan DED (<i>Detail Engineering Design</i>) 2. Penyusunan RIS (Rencana Induk Sistem) 3. Penyusunan pedoman Design Prototype untuk penyusunan DED skala kecil/ sederhana 4. Penyusunan pedoman <i>review design</i>, 5. Pengawasan pelaksanaan

MANDAT RENCANA INDUK TENTANG PENYEDIAAN PSD PERMUKIMAN	KEGIATAN UTAMA PENYEDIAAN PSD PERMUKIMAN	KOMPONEN PSD	PERANGKAT TEKNIS
perumahan dengan prasarana dan sarana dasar pendukungnya (air minum, air limbah, persampahan dan drainase). <i>Termasuk konsep penataan dan perencanaan teknis permukiman</i>			pembangunan PSD 6. Mendukung penerapan teknologi tepat guna 7. Melakukan pembangunan kawasan percontohan dengan pendekatan program pengembangan kecamatan

Sumber: Rencana Induk NAD-Nias dan Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, BRR Juli 2007

Seperti dijelaskan pada tabel di atas, amanat mengenai penyediaan PSD permukiman dalam Rencana Induk pada intinya adalah terintegrasinya setiap komponen dalam PSD permukiman dengan perumahan. Rencana Induk belum merinci kegiatan apa saja yang diperlukan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukanlah konsep penataan dan perencanaan teknisnya, di mana dalam hal ini diimplementasikan lebih lanjut oleh Bapel RR di lapangan.

Perangkat teknis dibutuhkan untuk mendukung percepatan dan kelancaran tugas penanganan PSD. Dalam realisasi penyediaan PSD permukiman, realisasinya dilakukan kerjasama dengan pihak penataan ruang desa (village plan) dan dikoordinasikan dengan bidang infrastruktur untuk cakupan yang lebih luas sehingga menjadi satu kesatuan sistem. Dalam hal penanganan desa di daerah perkotaan PSD juga melakukan koordinasi dan dukungan komponen dalam hal penyediaan air bersih dari PDAM/PAM.

Pemilihan lokasi pembangunan PSD tidak hanya untuk melayani prasarana dasar rumah yang dibangun melalui kegiatan rehabilitasi/rekonstruksi. Lokasi permukiman yang mengalami kerusakan dengan basis desa menjadi pertimbangan pembangunan ini. Informasi pelaksanaan PSD sulit diperoleh, akibat sistem informasi yang dibangun belum memadai. Tabel di atas walau kurang update merekapitulasi kesimpulan realisasi kegiatan PSD Permukiman.

Tabel 3 - 4

Kegiatan PSD dalam Rekonstruksi Perumahan dan Permukiman Hingga Juli 2007

No	Uraian Kegiatan	Target Desa	Pelaksanaan 2005 - 2006	Realisasi 2007*)	Capaian (%)	Keterangan (Pelaku)
1	Pembuatan DED	441	166	275	37,64	BRR = 413; NGO = 28;
2	Pembuatan RIS	460	0	415	-	BRR = 415
3	Pelaksanaan PSD	900	214	277	23,77	BRR = 340; NGO = 151

Sumber : Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias , BRR Juli 2007

**) Angka realisasi volume tahun 2007 masih merupakan target yang akan dicapai tahun 2007*

Mengenai tingkat hunian perumahan, menurut data survey lapangan yang dilakukan pada akhir November 2006 (Report Artistika, Desember 2006), hanya 44.520 rumah yang sudah ditempati (tingkat kerincian data ini adalah per Kabupaten). Apabila disandingkan

dengan jumlah rumah yang dibangun pada waktu yang sama, maka tingkat hunian hanya sekitar 77,93%. Hal ini dikarenakan: ¹

- Sebagian penduduk lebih suka tinggal di barak karena kebutuhan hidup sehari-hari dijamin.
- Kondisi rumah yang dinilai belum memenuhi standar/ spesifikasi yang ditetapkan.
- Prasarana dan sarana dasar permukiman belum lengkap, seperti sarana air bersih, sanitasi lingkungan, akses jalan lingkungan, dan aliran listrik. Demikian juga pelayanan kebutuhan sehari-hari jauh, seperti warung, kios atau toko. Hasil observasi lapangan Tim Sekretariat P3B Bappenas ditunjukkan di Kabupaten Bireun dan Kabupaten Pidie.
- Letak permukiman (perumahan) yang dibangun letaknya jauh dari tempat kerja atau jauh dari lapangan pekerjaan dan tidak adanya transportasi umum yang terjangkau menuju tempat kerja.
- Penduduk penerima manfaat memperoleh rumah lebih dari satu atau sudah mempunyai rumah lain, sehingga tidak berminat untuk kembali.
- Terdapat penduduk penerima bantuan yang masih terpengaruh oleh “kenangan buruk” kalau kembali ke tempat rumah semula, tetapi sebagai orang yang berhak menerima.

Gambar 3 - 1
Kondisi Prasarana Dasar di Benteng, Kabupaten Pidie



Sumber Sekretariat P3B Bappenas, November 2007

Prasarana dasar permukiman di Benteng, Kab.Pidie belum terbangun dengan baik. Hasil pengamatan menunjukkan kondisi jalan lingkungan masih berupa tanah dan jembatan belum ada. Prasarana penanganan air limbah, persampahan, dan drainase juga belum tersedia. Jaringan telekomunikasi belum tersedia, sedangkan jaringan listrik mulai terpasang di beberapa rumah.

¹ Dikutip dari Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias , BRR Juli 2007

Gambar 3 - 2
Kawasan Perumahan di Ujong Blang Mesjid, Kab. Bireun



Sumber: Sekretariat P3B Bappenas, November 2007

Beberapa kawasan perumahan dan permukiman ternyata belum menyediakan tempat atau jalur evakuasi jika ancaman tsunami datang. Kondisi ini ditemukan di daerah Ujong Blang Mesjid, Kab. Bireun. Hal ini disebabkan tata letak bangunan perumahan yang dibangun oleh Bapel BRR tidak memungkinkan berfungsi sebagai tempat evakuasi/tempat menyelamatkan diri jika terjadi tsunami. Dengan kata lain, pola dan jaringan jalan lingkungan belum direncanakan untuk fungsi evakuasi. Selain itu pembangunan rumah kembali berada di lokasi asal dan terletak hanya 20 meter dari bibir pantai. Kualitas konstruksi rumah sudah baik, hanya beberapa kerusakan kecil yang terdapat di beberapa rumah. Kebutuhan air bersih diperoleh warga dengan menggunakan sumur pribadi. Untuk prasarana penanganan air limbah dan persampahan belum tersedia.

Pelaksanaan rekonstruksi dan peningkatan kualitas bangunan perumahan dan permukiman pada tahun ini terus dilanjutkan, salah satunya yaitu di permukiman Kecamatan Lampulo, Banda Aceh. Perumahan yang dibangun oleh Bapel BRR ini pengerjaan konstruksinya masih dilanjutkan. Secara umum kondisi permukiman telah menyediakan akses/jalur evakuasi masyarakat jika terjadi bencana. Beberapa fasilitas umum seperti pasar, sekolah, fasilitas kesehatan dan tempat ibadah sudah dapat digunakan, dengan jarak sekitar 1 hingga 2 Km dari kawasan permukiman. Namun demikian di sekitar perumahan masih terdapat air menggenang (rawa kecil) yang belum disediakan saluran drainase dengan baik.²

Gambar 3 - 3
Kawasan Perumahan di Lampulo,
Banda Aceh



Sumber: Sekretariat P3B Bappenas, Sept 2007

² Hasil kunjungan lapangan Tim Sekretariat P3B Bappenas pada tanggal 3-7 September di kawasan perumahan di Kecamatan Lampulo, Banda Aceh

3.1.1.3 Tata Ruang

Adapun paket-paket perencanaan tata ruang meliputi seluruh wilayah yang terkena bencana di NAD dan Nias dalam berbagai skala kedalaman, baik rencana tata ruang wilayah Kabupaten (RTRWK), rencana detail tata ruang kota (RDTRK), maupun rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL). Penyusunan tata ruang lebih difokuskan pada inventarisasi isu-isu strategis untuk percepatan pembangunan perumahan, terutama untuk wilayah yang terkena bencana. Konsep dasarnya bukan penyusunan rencana baru, tapi lebih pada pemulihan kawasan yang rusak, yang selanjutnya akan diintegrasikan untuk me-review tata ruang yang sudah ada.

Selama tahun 2005 – 2007 Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi dan NGO/Lembaga Internasional yang menjadi mitra kerjanya telah dan sedang menyusun 1 revisi RTRW Propinsi NAD, 17 RTRW Kabupaten/Kota, 94 RDTR Kecamatan dan 542 Rencana Desa. Proses penyusunan rencana tata ruang ini mengikuti arahan UU 10/2005 berkenaan dengan penggunaan pendekatan partisipatif.

Kebijakan Penataan Ruang NAD-Nias

1. Mewujudkan kondisi wilayah yang aman dari bencana dan penghidupan yang lebih baik
2. Memberikan pilihan kepada warga untuk bermukim
3. Melibatkan masyarakat dan menggunakan pranata sosial dalam menghadapi bencana dan kegiatan pembangunan
4. Menonjolkan karakteristik budaya dan agama
5. Pendekatan penataan ruang partisipatif
6. Mengantisipasi bencana dan memitigasi kawasan bencana
7. Proses Penataan ruang sebagai perpaduan proses pendekatan dari atas dan bawah
8. Mengembalikan peran pemerintah daerah
9. Perlindungan terhadap hak perdata warga
10. Mempercepat proses administrasi pertanahan
11. Pemberian kompensasi dan ganti rugi yang adil dan terjangkau
12. Revitalisasi kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya alam

Tabel 3 - 5
Realisasi dan Program Tata Ruang Hingga Juli 2007

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				REALISASI 2007*)	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Penyediaan Peta Dasar Tata Ruang	Unit	14							
2	Pengelolaan Pertanahan		14							
3	Penyusunan Rencana Tata Ruang		842	54	545	599	71.14%	60	659	78.2%
a	Revisi RTRW Propinsi	Prov	1	1	0	1	100%	0	1	100%
b	RTRW Kabupaten/Kota (NAD dan Nias)	Kab./Kota	13	12	3	15	136.36%	2	17	154.5%
c	RDTR Kota/RTR Kecamatan	Kecamatan	95	2	90	92	96.8%	2	94	99%
d	RTBL/RTR Kawasan	Kawasan	5	5	0	5	100%	0	5	100%
e	Village Planning	Desa	730	34	452	486	66.6%	56	542	74,2%
4	Penyusunan	Prov,	3	3	0	3	100%	0	3	100%

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				REALISASI 2007*)	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
	Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kab./kota Kec. Desa								
5	Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang pada masyarakat	Prov, Kab./kota	14	0	0	0	0%	11	11	78,57%
6	Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah	Prov, Kab./kota	14	2		2			2	14.3%
7	Pemantapan Kelembagaan Penataan Ruang Daerah	Prov, Kab./kota	14	2		2		1	3	15.4%
8	Rencana Tindak Manajemen Bencana	Kab./Kota	13	1		1		1	2	14.3%
9	Penyusunan Peraturan Perundangan	Prov, Kab./kota	14			-			-	

Sumber : Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias , BRR Juli 2007

*) Angka realisasi volume tahun 2007 masih merupakan target yang akan dicapai tahun 2007

Pada skala penataan ruang yang lebih mikro, Bapel RR mengkoordinasikan kegiatan perencanaan desa (village planning) yang dilakukan berbagai NGO dan Donor. Kegiatan ini pada prinsipnya mengutamakan partisipasi masyarakat. Hingga akhir tahun 2007, telah diselesaikan sebanyak 854 village planning dari 887 village planning yang direncanakan. Penjelasan lebih rinci terdapat pada bab berikut.

Dalam pelaksanaan penyusunannya, sebagian besar village planning telah mendahului penyusunan RTRW Kab./Kota, maka pada proses penyusunan rencana pada tingkat kecamatan (RDTR Kecamatan) dan kabupaten/kota (RTRW Kab./Kota), village planning diperhatikan sebagai unit terkecil rencana tata ruang tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan rencana tata ruang lainnya.

3.1.1.4 Pertanahan

Terhitung sejak Mei 2007, tidak kurang dari 116.500 sertifikat tanah diterbitkan dan lebih dari 207.400 bidang tanah diukur.

Salah satu program pada Rencana Induk bidang hukum yaitu menetapkan payung hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, berupa kegiatan penyusunan substansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang hukum.

Bencana tsunami telah melahirkan serangkaian problem hukum yang tidak teratasi oleh instrumen hukum yang tersedia selama ini. Beberapa persoalan yang menuntut penyelesaian secara cepat dan tepat adalah persoalan hak-hak keperdataan korban dan keluarganya.

Pertama, hilangnya keluarga, atau keluarga yang hanya menyisakan anak-anak, menuntut penyelesaian hukum, baik atas hak kewarisan maupun hak perwalian sebagai upaya melindungi anak-anak korban itu di masa yang akan datang. Kedua, hilangnya

dokumen hak kepemilikan dan batas-batas fisik kepemilikan tanah telah menyulitkan upaya pembuktian keabsahan hak atas tanah. Begitu pula dengan bukti-bukti kepemilikan lain, seperti buku tabungan, akta jual beli, akta atas obyek harta tertentu, dan sebagainya yang lenyap disapu air. Tidak adanya kepastian hukum tentunya banyak pihak yang mengalami kerugian, misalnya, nasabah, bank, dan tentu saja pemilik sah warisan dari seorang korban.

Hingga Bulan Desember 2006, setelah hampir 2 tahun pasca bencana tsunami dan 1,5 tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh BRR, status Perpu tersebut belum disahkan oleh Presiden.

Perpu ini kemudian telah disahkan pada tanggal 6 September 2007 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Perpu No.2 Tahun 2007 yang mengatur tentang penanganan permasalahan hukum dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias. Perpu ini sebagai proteksi pemerintah untuk menangani keadaan darurat yang memerlukan penanganan secara cepat dan tepat berkaitan dengan bencana gempa dan tsunami tanggal 24 Desember 2004. Dari segi materi muatan, Perpu ini memiliki urgensi terutama berkaitan dengan pertanahan, kewarisan, perwalian, dan perbankan. Dalam bidang pertanahan misalnya, Perpu ini akan memberikan kepastian hukum terhadap tanah masyarakat yang musnah akibat tsunami, penggantian tanah musnah, pemulihan hak-hak keperdataan dan penggantian bukti kepemilikan atas tanah.

Tahun anggaran 2006, sedang dilaksanakan pekerjaan pengukuran dan adjudikasi, sampai dengan akhir Mei 2007 sebanyak 150.000 bidang/persil telah diajudikasi. Secara lebih terinci realisasi kegiatan pertanahan seperti pada tabel berikut.

Tabel 3 - 6
Rincian Realisasi Kegiatan Pertanahan Tahun 2005-2006
dan Program 2007 per Kabupaten

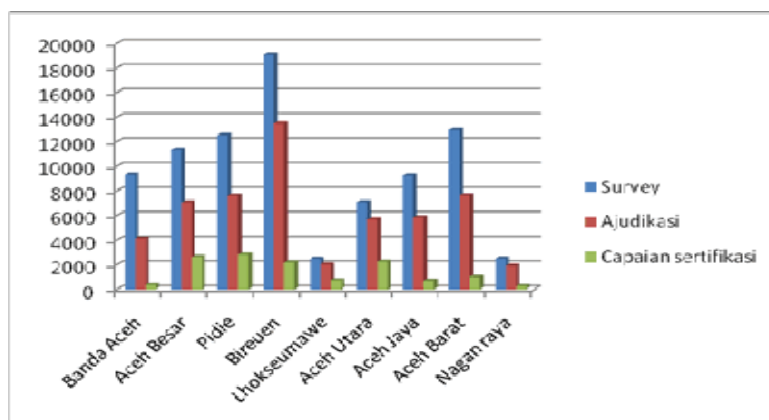
NO	KABUPATEN/KOTA	RENCANA INDUK	TARGET BRR	REALISASI 2005-2007**				CAPAIAN SERTIFIKASI*	
				SURVEY		AJUDIKASI		JUMLAH	PERSEN
				JUMLAH	PERSEN	JUMLAH	PERSEN		
1	Banda Aceh (2005)	*	25.000		90		60		20
2	Banda Aceh	*	15.000	9.326	62	4.144	28	366	2
3	Aceh Besar (2005)	*	25.000		90		60		40
4	Aceh Besar	*	20.000	11.358	57	7.096	35	2.659	13
5	Pidie	*	20.000	12.561	63	7.626	38	2.836	14
6	Bireuen	*	30.000	19.074	64	13.481	45	2.192	7
7	Lhokseumawe	*	5.000	2.494	50	2.029	41	750	15
8	Aceh Utara	*	10.000	7.120	71	5.698	57	2.253	23
9	Aceh Jaya	*	20.000	9.248	46	5.843	29	712	4
10	Aceh Barat	*	25.000	12.984	52	7.643	31	1.027	4
11	Nagan raya	*	5.000	2.540	51	1.928	39	279	6

Sumber: *Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, BRR Juli 2007*

Catatan : *) Rencana Induk tidak mencantumkan Sasaran Kuantitatif per bidang tanah

**) Capaian Terhadap Target yang ditetapkan oleh Direktorat Pertanahan Kedeputian Perumahan Permukiman, Bapel BRR

Grafik 3 - 3
Perbandingan Realisasi Kegiatan Pertanahan Hingga
Juni 2007



Sumber: Hasil Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Gambar 3 - 4
Penanaman Hutan Mangrove
Departemen Kehutanan



Sumber: Dok Sekretariat P3B Bappenas, Sept 2007

3.1.1.5 Lingkungan Hidup

Pada sektor kehutanan dan lingkungan, realisasi pelaksanaan proyek pada tahun anggaran 2005 dan 2006 untuk rehabilitasi hutan pantai dan mangrove seluas 5.113 Ha, atau baru mencapai sekitar 3% dari Rencana Induk seluas 164.840 Ha. Hingga April 2007 ini, hutan mangrove yang sudah direhabilitasi seluas 11.938 Ha, atau sekitar 7,2 %. Salah satu dokumentasi hasil kunjungan lapangan Tim Sekretariat P3B Bappenas ke Krueng Aceh berikut menunjukkan salah satu program penanaman hutan mangrove yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan.

Sedangkan program lain yang telah terealisasi pada tahun anggaran 2005 dan 2006 antara lain untuk rehabilitasi hutan alam seluas 820 Ha, rehabilitasi hutan kota seluas 130 Ha/paket, pengembangan hutan konservasi sejumlah 3 kawasan, pengukuran kawasan hutan (tata batas) sebesar 130 Km, tumpangsari hutan rakyat sebesar 2 paket, peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan sebanyak 40 kelompok, peningkatan kelembagaan lokal seluas 20 Ha, restorasi kawasan bufferzone sebesar 188 Ha, transplantasi terumbu karang sejumlah 1 paket dan rehabilitasi fasilitas kantor dinas sejumlah 1 unit.

Program tahun 2007 untuk sektor kehutanan dan lingkungan adalah rehabilitasi hutan pantai dan mangrove seluas 6.662 Ha dari Rencana Induk seluas 164.840 Ha, atau baru mencapai sekitar 7%.

Untuk program tahun 2007 lainnya yang berkaitan dengan sektor kehutanan dan lingkungan adalah rehabilitasi hutan alam seluas 961 Ha, rehabilitasi hutan kota seluas 36 Ha, magersari (tumpangsari di hutan) seluas 115 Ha; bantuan bibit kepada masyarakat sejumlah 20.000 batang, pengembangan hasil hutan Non Kayu sejumlah 7 Kabupaten, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir sejumlah 9 Kabupaten, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sejumlah 2 lokasi, Pawang Uteun & Inong Beuraleu sejumlah 3 paket dan Pembangunan Laboratorium. Klimatologi lapangan sejumlah 1 paket.

Tabel 3 - 7
Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Kehutanan dan Lingkungan Hingga Juli 2007

No	Program/ Kegiatan	Sat	Rencana Induk	Realisasi Tahun 2005-2006				Realisasi 2007**)	2005-2007	
				APBN	Non APBN	Total	Capaian		Total	Capaian
1	Rehab Hutan Mangrove	Ha	64.840	4.788	325	5.113	3	6.662	11.775	7%
2	Rehab Hutan Alam	Ha	-	820	162.263*	163.083	-	961	164.044	-
3	Rehabilitasi Hutan Kota	Ha/Pkt	-	130	-	130	-	36	166	-
4	Pembinaan Konservasi	awasan	-	3	-	3	-	-	3	-
5	Pengukuhan Kawasan Hutan (Tata batas)	Km	-	130	-	130	-	4	134	-
6	Tumpang Sari Hutan rakyat	Pkt	-	2	-	2	-	-	2	-
7	Peningkatan Usaha Masyarakat sekitar Hutan	Kelpk	-	40	-	40	-	36	76	-
8	Peningkatan Kelembagaan Lokal	Ha	-	20	-	20	-	3	23	-
9	Restorasi kawasan bufferzone	Ha	-	188	-	188	-	79	267	-
10	Transplantasi Terumbu Karang	Pkt	-	1	-	1	-	-	1	-
11	Rehabilitasi fasilitas Kantor Dinas Kehutanan	Unit	-	1	-	1	-	-	1	-
12	Magersari (Tumpang sari di hutan)	Ha	-	-	-	-	-	115	115	-
13	Bantuan Bibit Pada masyarakat	Btg	-	-	-	-	-	20.000	20.000	-
14	Pengembangan. Hasil Hutan Non kayu	Kab	-	-	-	-	-	7	7	-
15	Pengembangan Hutan Rakyat	Kab	-	-	-	-	-	13	2	-
16	Pawang uteun & Inong Beuraleun	Pkt	-	-	-	-	-	3	3	-
17	Pemb. Lab Klimatologi lapangan	Pkt	-	-	-	-	-	1	1	-

Sumber: Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, BRR Juli 2007

Catatan : *) Data Laporan Kegiatan Off Budget yang harus diklarifikasi kembali

**) Angka realisasi volume tahun 2007 masih merupakan target yang akan dicapai tahun 2007

Gambar 3 - 5
Tanggul Pengaman Pantai di Pantai
Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat



Sumber: Sekretariat P3B Bappenas, Sept 2007

Salah satu upaya penyelamatan lingkungan pantai dilakukan melalui tanggul pengaman pantai. Pembangunan tanggul pengaman pantai bertujuan untuk mengatasi masalah daya rusak air. Daya rusak air dari pantai inilah yang seringkali mengakibatkan abrasi pantai atau akibat dari tsunami. Salah satu hasil pengamatan tim Sekretariat P3B Bappenas yaitu pembangunan tanggul pengaman pantai yang dibangun oleh Bapel RR di Pantai Meulaboh, tepatnya Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, seperti ditunjukkan pada gambar berikut.³

3.1.2 Pemulihan Infrastruktur

Kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur adalah memprioritaskan penyediaan prasarana dan sarana untuk memperlancar logistik, membangun kembali sistem transportasi untuk mendukung kelancaran hubungan antar wilayah dalam dan antar Provinsi, merehabilitasi fasilitas distribusi energi dan kelistrikan sebagai upaya mendukung kembalinya aktivitas sosial dan perekonomian, mendukung ketersediaan pangan, peningkatan penyiapan fasilitas infrastruktur untuk mendukung upaya penyelamatan terhadap ancaman bencana.

Pemulihan bidang infrastruktur terdiri dari; Jalan dan Jembatan, Perhubungan (Udara, Darat, Laut, SAR, Pos dan Telematika), Sumber Daya Air (Irigasi, Pengamanan Pantai, Pengendalian Banjir), Energi dan Listrik, Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan, Fasilitas dan Bangunan Umum, serta Pemeliharaan.

Rekapitulasi kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh BRR dari tahun 2006 – 2007 per 27 November adalah sebagai berikut.

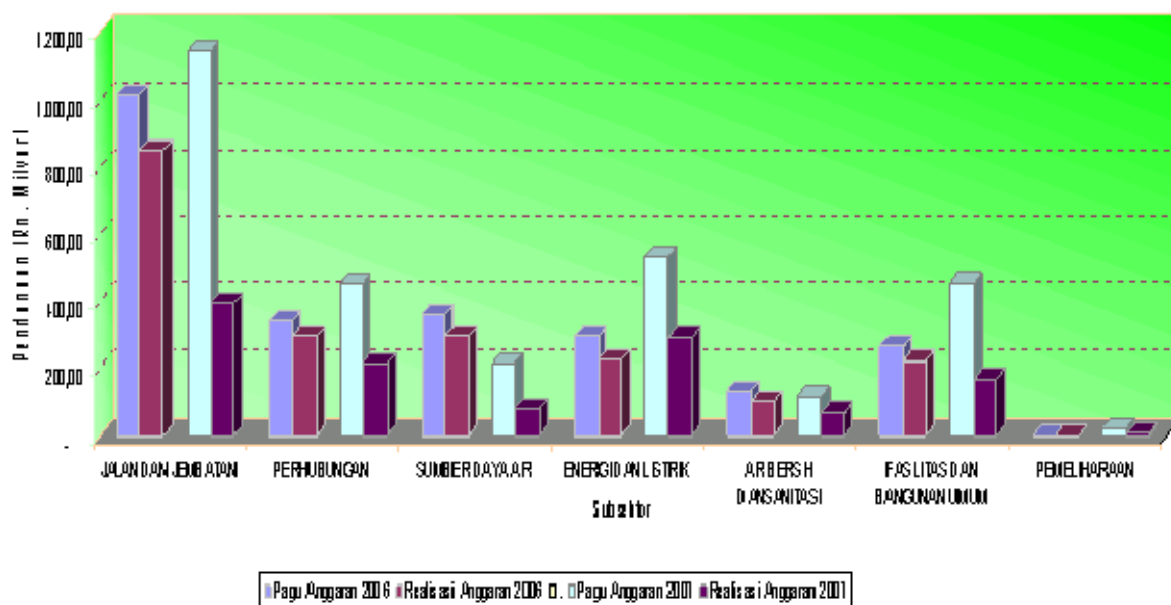
Tabel 3 - 8
Rekapitulasi Realisasi Dana On Budget BRR Bidang Infrastruktur
tahun anggaran 2006 dan 2007 (per 27 November)

NO	KEGIATAN	2006			2007		
		PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI	
		(Rp. Ribu)	(Rp. Ribu)	(%)	(Rp. Ribu)	(Rp. Ribu)	(%)
A	JALAN DAN JEMBATAN	1.017.542.576,00	851.650.781	83,70	1.143.783.990	395.777.953	34,60
B	PERHUBUNGAN	343.499.556,00	293.094.461	85,33	449.390.263	215.806.292	48,02
C	SUMBER DAYA AIR	361.341.356,00	294.866.718	81,60	215.284.633	78.829.423	36,62
D	ENERGI DAN LISTRIK	294.898.458,00	225.912.361	76,61	530.848.578	290.992.141	54,82
E	AIR BERSIH DAN SANITASI	134.871.661,00	102.968.387	76,35	116.998.931	68.194.442	58,29

³ Hasil kunjungan lapangan Tim Sekretariat P3B Bappenas pada tanggal 5-6 September di Pantai Meulaboh, Kab. Aceh Barat

NO	KEGIATAN	2006			2007		
		PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI	
		(Rp. Ribu)	(Rp. Ribu)	(%)	(Rp. Ribu)	(Rp. Ribu)	(%)
F	FASILITAS DAN BANGUNAN UMUM	264.034.706,00	223.250.697	84,55	452.528.501	169.409.367	37,44
G	PEMELIHARAAN	-	-	-	22.054.714	7.995.981	36,26
TOTAL		2.416.188.313,00	1.991.743.405	82,43	2.930.889.610	1.227.005.599	41,86

Grafik 3 - 4
Penyerapan DIPA Tahun 2006 dan 2007 Bidang Infrastruktur



Sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur berasal dari APBN dan Trust Fund yang termasuk hibah donor/NGO/LSM.

Realisasi DIPA 2006 pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 7.79 Trilyun atau 74% dari Pagu DIPA. Penyerapan tertinggi ada pada bidang Infrastruktur sebesar 87,4%.

Dari luncuran DIPA 2006 pada 2007, sampai 31 Mei 2007, berhasil diserap Rp. 1,24 Trilyun atau 55,9%. Dana Trust fund yang diluncurkan di tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 950,575 Milyar. Sehingga total penyerapan DIPA 2006 baik yang direalisasikan pada tahun 2006 maupun Trust Fund tahun 2007, adalah sebesar Rp. 9,03 Trilyun, atau 79,6% dari pagu.

Realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi per masing-masing sub bidang kegiatan diuraikan sebagai berikut.

3.1.2.1 Perhubungan, Jalan dan Jembatan

Prasarana perhubungan yang diamanahkan dalam rencana induk meliputi perhubungan udara, perhubungan laut dan sungai (ASDP), Kereta Api, Traffic management dan LLAJR (Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya), juga menangani prasarana penyelamatan (SAR), meteorologi dan geofisika serta pos dan telematika.

(1) Perhubungan Laut dan ASDP

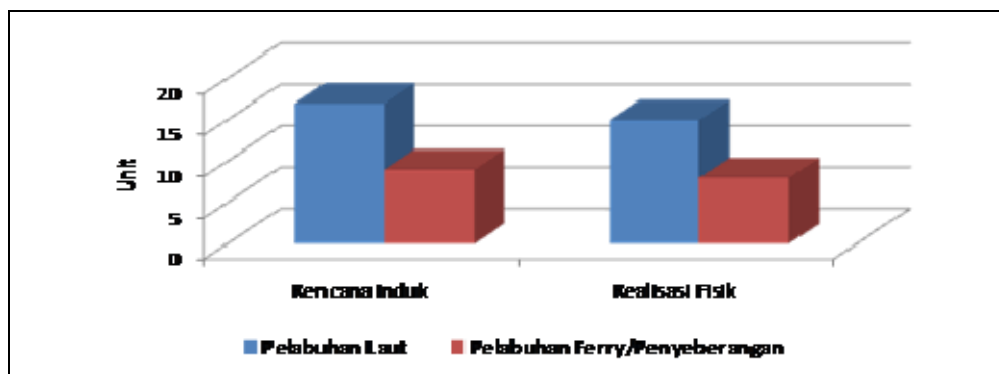
Sampai dengan tahun 2006 telah ditangani pelabuhan laut sebanyak 10 unit dan 5 unit pelabuhan penyeberangan. Salah satu pelabuhan penyeberangan di Ule leu, ditangani langsung melalui bantuan Donor (Off Budget). Selanjutnya pelabuhan laut yang ditangani sebanyak 8 unit (5 unit penanganan baru dan 3 unit penanganan lanjutan) dan pelabuhan penyeberangan sebanyak 4 unit (1 penanganan baru dan 3 unit penanganan lanjutan tahun 2006).

Tabel 3 - 9
Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Program 2007 Sub Sektor Perhubungan Laut dan ASDP

No	Bangunan/gedung	RI	Realisasi 2005-2006		Realisasi 2007 *		Realisasi Total 2005-2007	
			B	% ke RI	B	L	B	% ke RI
1	Pelabuhan Laut	17	10	59%	5	3	15	88%
2	Pelabuhan Ferry/Penyeberangan	9	7	78%	1	3	8	89%
	Total	26	17	37%	6	6	23	51%

B= Baru, L=Lanjutan, Sumber : Deputi Infrastruktur Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, Mei 2007.
Catatan : *) Angka realisasi volume tahun 2007 masih merupakan target yang akan dicapai tahun 2007.

Grafik 3 - 5
Realisasi On Budget Sub Sektor Perhubungan Laut dan ASDP sampai Oktober 2007 terhadap Rencana Induk



Rehabilitasi dan rekonstruksi pelabuhan penyeberangan ditargetkan sebanyak 9 unit sebagaimana tertuang dalam rencana induk. Dari keseluruhan jumlah tersebut, 7 unit telah ditangani pada tahun anggaran 2005-2006. Satu unit yakni pelabuhan penyeberangan Meulaboh akan dilaksanakan pada TA 2007. Satu unit yang belum ditangani adalah pelabuhan penyeberangan Gunung Sitoli.

Gambar 3 - 6
Kondisi Infrastruktur Pelabuhan yang sedang dibangun di Meulaboh



Pelabuhan Laut Meulaboh (lama)
(tidak diperbaiki)



Pelabuhan Laut Meulaboh (baru)
(sedang diperbaiki)

Rehabilitasi dan rekonstruksi pelabuhan di NAD dan Nias dalam rencana induk ditetapkan sejumlah 17 unit. Dari jumlah tersebut, 10 unit telah dan sedang dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksinya sedangkan 8 unit (5 baru dan 3 lanjutan) diprogramkan pada tahun 2007. Sehingga sampai akhir 2007 diperkirakan telah ditangani 15 unit pelabuhan dari rencana induk sebanyak 17 unit. Ada 3 unit pelabuhan dalam Rencana Induk yang belum ditangani yakni Sabang, Sibadeh, dan Sigli. Sementara itu terdapat 1 unit pelabuhan (Kuala Langsa) di luar Rencana Induk yang ditangani, selain itu juga dibangun dermaga di Pulau Rondo.

(2) Perhubungan Udara

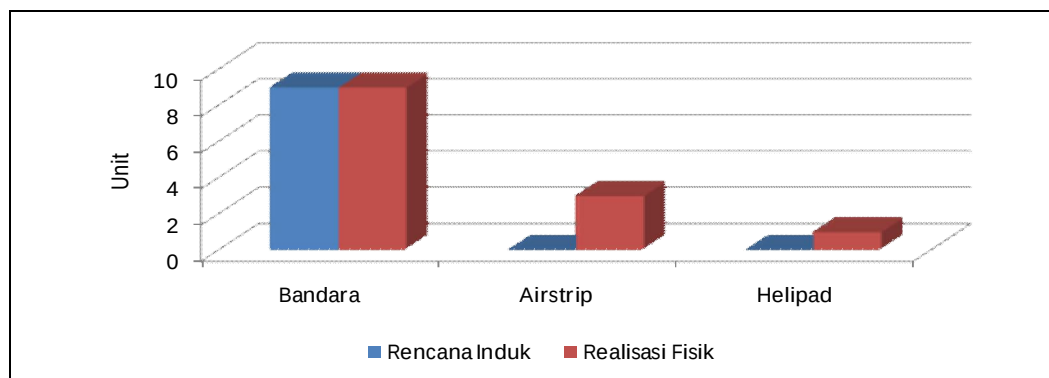
Pelabuhan udara yang telah ditangani sebanyak 6 unit. Selain itu juga telah dibangun 1 unit landasan udara/airstrip di Calang.

Tabel 3 - 10
Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Program 2007 Sub Sektor Perhubungan Udara

No	Bangunan/gedung	RI	Realisasi 2005-2006		Realisasi 2007 *		Realisasi Total 2005-2007	
			B	% ke RI	B	L	B	% ke RI
1	Bandara	9	6	67%	3	4	9	100%
2	Airstrip	-	1	-	1		3	-
3	Helipad	-		-	1		1	-
	Total	9	7	78%	5	4	13	144%

B= Baru, L=Lanjutan, Sumber : Deputi Infrastruktur Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, Mei 2007.

Grafik 3 - 6
Realisasi On Budget Sub Sektor Perhubungan Udara sampai Oktober 2007
terhadap Rencana Induk



Pada tahun anggaran 2007 diprogramkan penanganan untuk 7 unit bandara, 3 (tiga) merupakan penanganan baru, sedangkan 4 unit merupakan lanjutan. Selain itu juga direncanakan pembangunan airstrip di Blang kejeren dan landasan helikopter/helipad di Pulau Rondo-Aceh Besar.

Rehabilitasi dan rekonstruksi bandar udara sesuai dengan Rencana Induk dilaksanakan sebanyak 9 unit. Dari jumlah tersebut 6 unit diantaranya telah dan sedang dilaksanakan pada tahun 2005 – 2006. Tiga unit lainnya akan dilaksanakan pada tahun 2007 dan 2008. Bandara tersebut dilengkapi dengan fasilitas navigasi, keselamatan penerbangan serta pemadam kebakaran oleh BRR. Hampir sebagian besar lahan yang digunakan untuk pembangunan bandara menjadi beban pemerintah daerah.

Tabel 3 - 11
Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bandar Udara

No	Bandar Udara	Landasan		RI		Realisasi 2005-2006		Realisasi 2007 *		
		Awal	Akhir	#	Rp. Milyar	Baru	Rp. Milyar	Baru	Lanjut	Rp. Milyar
1	Maimun Saleh	1850 m x 30 m		1	25.1	v	12.25		v	1.41
2	S. Iskandar Muda	2500 m x 45 m	2950 m x 45 m	1	474.5			v		88.38
3	Cut Nyak Dhien	1000 m x 30 m	1700 m x 30 m	1	141.6	v	20.75		v	8.85
4	Teuku Cut Ali	750 m x 23 m	1250 m x 30 m	1	21.8		0.29	v		8.08
5	Lasikin	750 m x 23 m	1500 m x 30 m	1	25.6	v	24.80		v	13.93
6	Kuala Batee	750 m x 23 m	1300 m x 30 m	1	22.0		0.29	v		19.69
7	Rembele	1200 m x 30 m		1	26.1	v	10.96		v	5.99
8	Binaka	1400 m x 30 m		1	4.6	v	16.34			
9	Lasundre	750 m x 23 m		1	3.0	v	5.59			
	Total			9	744.3	6	91.27	3	4	146.33
	Kumulatif					6	91.27	9		237.60

No	Bandar Udara	Landasan		RI		Realisasi 2005-2006		Realisasi 2007 *		
		Awal	Akhir	#	Rp. Milyar	Baru	Rp. Milyar	Baru	Lanjut	Rp. Milyar
	Kum (%) ke RI					67%	12.26%	100%		31.92%

Catatan : *) Angka realisasi volume tahun 2007 masih merupakan target yang akan dicapai tahun 2007.

BRR telah membangun airstrip dan helipad tidak terdapat dalam Rencana Induk, fasilitas tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan geografis, topografi dan aksesibilitas kawasan dan diharapkan dapat digunakan untuk evakuasi bencana pada kendaraan darurat. Pembangunan airstrip telah dilaksanakan dengan dana Off-Budget sejak tahun 2005.

Tabel 3 - 12
Realisasi Pelaksanaan RR Airstrip dan Helipad

No	Landasan	Lokasi	RI		Realisasi 2005-2006		Realisasi 2007 *		
			#	Rp. Milyar	Baru	Rp. Milyar	Baru	Lanjut	Rp. Milyar
Landasan Udara									
1	Airstrip Calang	Aceh Jaya			v	0.7			
2	Airstrip Blangkejeren	Gayo Luwes					v		8.2
3	Airstrip Sibigo	Simeulue							
4	Airstrip Teluk Dalam	Nias Selatan					v		4.5
	Total		0	0	1	0.70	1	0	12.7
	Kumulatif				1	0.70	2		13.7
Landasan Helikopter									
1	Pulau Rondo	Aceh Besar					1		1.4
2	Pulau Breuh	Aceh Besar							
3	Pulau Banyak	Singkil							
	Total		0	0	0	0.00	1	0	1.40
	Kumululatif				0	0.00	1		1.40

Catatan : *) Angka realisasi volume tahun 2007 masih merupakan target yang akan dicapai tahun 2007.

Gambar 3 - 7
Kondisi Infrastruktur Bandara/Airport Kabupaten Aceh Jaya yang belum selesai dibangun



Bangunan yang sudah dibangun, landasan belum selesai dibangun

Sumber : Dokumentasi P3B-Bappenas

(3) Perhubungan Darat

Berdasarkan Rencana Induk, kebutuhan terminal dan stasiun DAMRI sebanyak 29 unit. Sampai dengan 2006, 7 unit terminal dan stasiun DAMRI sedang dalam proses pembangunan. Pada tahun 2007 dialokasikan pembangunan terminal sebanyak 7 unit.

Tabel 3 - 13
Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Program 2007 Sub Sektor Perhubungan Darat

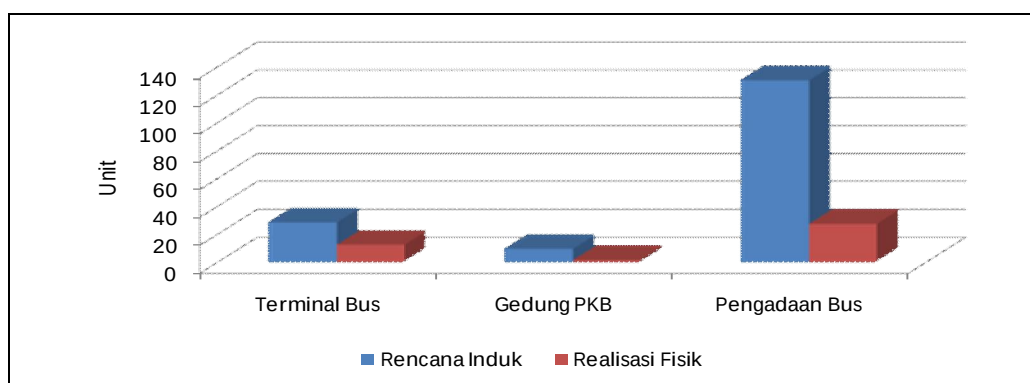
No	Bangunan/gedung	RI		Realisasi 2005-2006			Realisasi 2007 *		Realisasi Total 2005-2007			
		Volume	Rp. Milyar	B	Rp. Milyar	% ke RI	B	Rp. Milyar	L	B	Rp. Milyar	% ke RI
1	Terminal Bus	29		8		28%	5			13		45%
2	Gedung PKB	10					2			2		20%
3	Pengadaan Bus	131		28		22%	*			28		
4	Kereta Api (km)***	233										
	Total	403		36		9%	7			43		11%

B= Baru, L=Lanjutan, Sumber : Deputi Infrastruktur Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, Mei 2007.

Catatan : *) Angka realisasi volume tahun 2007 masih merupakan target yang akan dicapai tahun 2007.

**) Tidak dikerjakan oleh BRR

Grafik 3 - 7
Realisasi On Budget Sub Sektor Perhubungan Darat sampai Oktober 2007 terhadap Rencana Induk



Pembangunan gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Rencana Induk dibangun sejumlah 10 unit. Lokasi pembangunan gedung PKB diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Fasilitas gedung PKB mulai dilaksanakan pada tahun 2007 sejumlah 2 unit, yaitu di Meulaboh dan Langsa.

Pengadaan Bus Bantuan menurut Rencana Induk sebanyak 131 unit. Dari jumlah tersebut 28 unit diantaranya telah dilaksanakan pengadaannya pada tahun 2006 dan telah diserahkan serta dioperasikan oleh DAMRI sedangkan sisanya akan diadakan pada tahun 2007 dan 2008 untuk diserahkan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Pembangunan/rehabilitasi jembatan timbang sebanyak 3 unit dan pembangunan halte bus sebanyak 60 unit yang tercantum dalam rencana induk sampai saat ini belum dilaksanakan.

Dalam Rencana Induk direncanakan pembangunan prasarana jalan kereta api sepanjang 233 km dengan biaya Rp.1,093 triliun. Pelaksanaan studi dan pembangunan jalan kereta api telah mulai dirintis Departemen Perhubungan bersama Pemerintah Provinsi NAD sehingga pelaksanaan kegiatan yang menelan biaya sangat besar tersebut tidak ditangani oleh BRR.

(4) Jalan dan Jembatan

Rekapitulasi realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan jembatan disajikan pada tabel berikut.

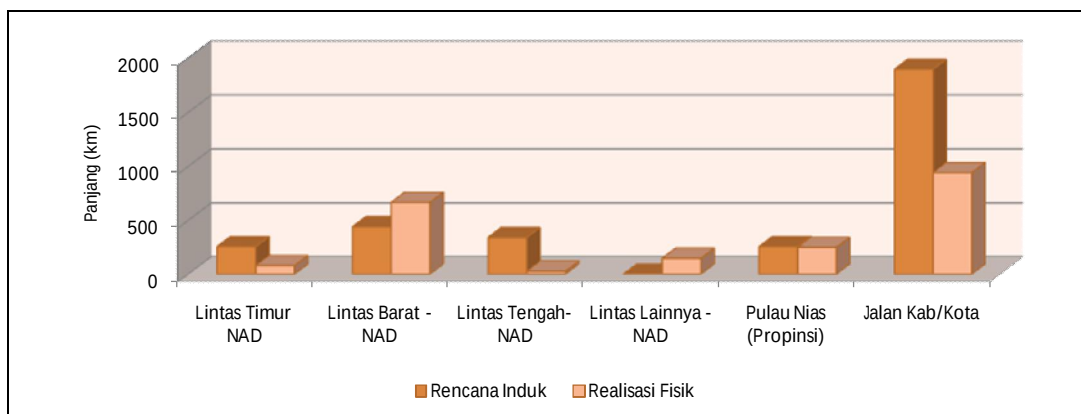
Tabel 3 - 14
Rekapitulasi Realisasi tahun 2005-2006 dan Program 2007 Jalan dan Jembatan

No	Kegiatan	Sat.	Rencana Induk (RI)		Realisasi 2005-2006				Realisasi 2007*			Realisasi total 2005 - 2007	
			Ruas	Km	On	Off	On&Off	% RI	On	Off	On&off	Volume	% RI
1	Lintas Timur NAD	Km	4	257	0		0	0%	80		80	80	31%
2	Lintas Barat - NAD	Km	7	441	132	152	284	101%	363	20	383	667	151%
3	Lintas Tengah- NAD	Km	8	341	20		20	15%	7		7	27	8%
4	Lintas Lainnya - NAD	Km	46	1.455	127		127	17%	21		21	148	10%
5	Pulau Nias (Propinsi)	Km	2	256	76		76	385%	174		174	250	98%
6	Jalan Kab/Kota	Km	23 kab	1900	625		625	132%	317		317	942	50%
	TOTAL			4.650	980	152	1.132	24%	962	20	982	2.114	45%

Sumber : Rencana Induk dan data Deputi Infrastruktur Mei 2007

Catatan : *) Angka realisasi volume tahun 2007 masih merupakan target yang akan dicapai tahun 2007.

Grafik 3 - 8
Realisasi On Budget Jalan dan Jembatan sampai dengan Oktober 2007



Gambar 3 - 8
Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan



Belum diperbaiki (sementara), Aceh Jaya



sedang diperbaiki, Aceh Jaya



sudah diperbaiki, Aceh Jaya



sedang diperbaiki, Meulaboh

Sumber : Dokumentasi P3B-Bappenas



belum diperbaiki, Aceh Jaya

Sampai dengan akhir tahun 2006, total jalan yang telah ditangani (rehabilitasi dan rekonstruksi) mencapai 1.132 km terdiri dari jalan Nasional sepanjang 404 km, jalan propinsi 203 km (Propinsi NAD: 127 km dan Kepulauan Nias 76 km) dan jalan kabupaten sepanjang 625 km, dengan total biaya Rp. 1.699 Milyar.

Pada tahun 2007 diprogramkan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan sepanjang 982 km. Total anggaran tahun 2007 sebesar Rp. 1.609 Milyar. Sampai 10 Desember tahun 2007 telah ditangani jalan sepanjang 2.114 km jalan dengan total biaya mencapai Rp. 3,31 Trilyun.

Perhatian BRR masih sangat terfokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi jalan Lintas Barat NAD. Hal ini dapat dilihat pada jumlah realisasi pelaksanaan kegiatan yang sudah mencapai 151%. Sedangkan progress pekerjaan di lintas Tengah, lintas Timur, dan Lintas lainnya di NAD serta beberapa jalan kabupaten/kota masih menunjukkan realisasi kurang dari 50%.

(5) SAR dan BMG

Pembangunan gedung dan sarana kantor SAR NAD telah selesai dibangun pada tahun 2006. Untuk melengkapi berbagai fasilitas pendukung lainnya maka dialokasikan Rp. 1,696 Milyar pada tahun 2007.

Pembangunan rescue boat berdasarkan Rencana Induk dilaksanakan sebanyak 2 unit dan BRR akan melakukan pengadaan sebanyak 2 unit pada tahun 2007 dan 2008.

Untuk mengantisipasi musibah yang sering terjadi di perairan karena Provinsi NAD berada langsung di lintasan pelayaran internasional maka perlu dilakukan pengadaan sea rider sebanyak 3 unit dan fasilitas-fasilitas peralatan pendukung operasi pencarian dan penyelamatan. Pengadaan fasilitas tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2006 – 2007.

Enam stasiun BMG telah selesai direhabilitasi dan direkonstruksi untuk NAD (Mata ie, Blang Bintang, Indrapuri, Tapak tuan, Meulaboh, Takengon), dan 2 stasiun BMG di Nias (Onowaembo dan Binaka) sesuai dengan yang ditargetkan dalam Blue Print, Untuk perumahan dinas BMG yang ditargetkan dalam Rencana Induk sebanyak 40 unit, namun yang telah dicapai sampai sekarang sebanyak 26 unit di NAD dan 6 Unit di Nias dan terdapat 8 unit lagi yang harus diselesaikan, namun sampai saat ini masih terkendala dengan permasalahan pembebasan lahan yang belum terselesaikan. Target dalam Blue Print terdapat 1 unit peralatan Meteorologi konvensional dan telah diadakan di Saree NAD dalam bentuk taman alat meteorologi untuk pertanian.

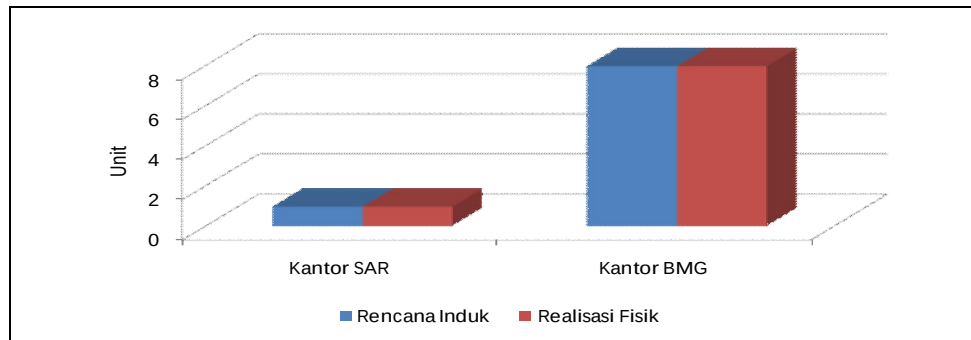
Tabel 3 - 15
Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Program 2007 Sub Sektor
Perhubungan Darat SAR dan BMG

No	Bangunan/ gedung	RI	Realisasi 2005-2006		Realisasi 2007 *	Realisasi Total 2005-2007
		Volume	B	% ke RI	B	B
1	Kantor SAR	1	1	100%		1
2	Kantor BMG	8	8	100%		8
	Total	9	9	100%		9

B= Baru, L=Lanjutan, Sumber : Deputi Infrastruktur Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, Mei 2007.

Catatan : *) Angka realisasi volume tahun 2007 masih merupakan target yang akan dicapai tahun 2007.

Grafik 3 - 9
Realisasi On Budget Sub Sektor Perhubungan Darat sampai
Oktober 2007 terhadap Rencana Induk



3.1.2.2 Pos dan Telekomunikasi

Dalam Blue Print juga dicantumkan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas TVRI, RRI dan Dinas Infokom, namun dalam pelaksanaannya ditangani langsung oleh sektor kelembagaan dan kapasitas ke deputian ILP hanya memberikan bantuan teknis melalui Direktorat Fasilitas dan Bangunan Umum, yang bersifat evaluasi perencanaan fisik dan monitoring di lapangan.

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan telekomunikasi masyarakat yang harus segera dipenuhi, maka BRR telah melaksanakan rehab 4.310 SST, yang merupakan capaian sampai dengan awal tahun 2007, meliputi wilayah Meulaboh, Simpang Peut, Kaway XVI. Sedangkan sisanya untuk wilayah lainnya akan ditangani oleh PT. TELKOM tbk.

Infrastruktur ICT (VSAT & Wifi base) telah dibangun di 21 lokasi (seluruh ibukota kabupaten di Propinsi NAD) dan selesai pada tahun 2006 sehingga sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan rencana untuk ke depan akan dilakukan migrasi dari Wifi ke Wimax karena ini merupakan dasar pemikiran awal bahwa NAD adalah propinsi Cyber pertama di Indonesia dan ini juga merupakan sasaran baru yang dilakukan ke deputian Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan yaitu terciptanya pemerintah dan masyarakat yang memanfaatkan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan distribusi informasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, bisnis, pegawai, dan departemen lainnya serta untuk meningkatkan kinerja pemerintahan itu sendiri, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (target e-government dan e-community), migrasi ini rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2008.

Untuk prasarana POS sesuai dengan target yang dicantumkan dalam Rencana Induk ada 19 unit kantor POS yang mengalami rusak berat dan yang telah ditangani adalah 11 kantor POS selesai dibangun (4 di Banda Aceh, 2 di Aceh Besar, dan 2 di Aceh Jaya), 3 kantor pos selesai direhabilitasi (1 di Aceh Barat, 2 di Aceh Besar) untuk tahun 2005 – 2006 dan 5 unit kantor POS sedang direhabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2007.

Tabel 3 - 16
Realisasi Pelaksanaan Kantor Pos

No	Kantor Pos	RI	Realisasi 2005-2006	Realisasi* 2007	
		#	Baru	Baru	Lanjut
1	KPRK Sigli 24100	2		2	
3	KPRK Banda Aceh 23000	10	8	2	

No	Kantor Pos	RI	Realisasi 2005-2006	Realisasi* 2007	
		#	Baru	Baru	Lanjut
4	KPRK Meulaboh 23600	5	3	1	
5	KPRK Gunung Sitoli 22800	2			
	Total	19	11	5	0
	Kumulatif		11	16	
	% RI		58%	84%	

Catatan: *) Angka realisasi volume tahun 2007 masih merupakan target yang akan dicapai tahun 2007.

3.1.2.3 Energi dan Listrik

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi energi dan listrik BRR lebih difokuskan pada pelayanan sambungan rumah untuk rumah-rumah yang baru dibangun, jaringan tegangan rendah (JTR), penggantian diesel-diesel pembangkit listrik yang rusak dan tidak berfungsi dan sebagian jaringan tegangan menengah (JTM).

(1) Sarana Prasarana Kelistrikan

Dari target 119.253 sambungan rumah, sampai dengan Desember 2006 telah dicapai pengadaan sebanyak 71.993 unit (60%). Pemasangan sambungan rumah terus dilaksanakan sesuai dengan progress penyelesaian pembangunan rumah bagi korban bencana tsunami. Pada tahun anggaran 2007, sasaran yang akan dicapai adalah pengadaan sambungan rumah sebanyak 64.387 unit (54%). Dengan demikian secara keseluruhan, target yang telah dicapai sampai dengan 2007 untuk pengadaan listrik (sambungan rumah) mencapai 136.380 unit atau melebihi target yang tercantum dalam Rencana Induk. Kelebihan alokasi ini dimaksudkan untuk memenuhi target sambungan rekonstruksi sebanyak 120.000 unit rumah dan permintaan masyarakat lainnya seperti fasilitas dan bangunan umum, fasilitas sosial, bangunan publik lainnya. Sebagai catatan: Kebijakan BRR selama ini adalah bahwa masyarakat korban tsunami dan gempa harus dibebaskan dari membayar Biaya Penyambungan (BP).

Gambar 3 - 9
Kondisi Infrastruktur listrik di Kabupaten Pidie



sudah terpasang

Sumber : Dokumentasi P3B-Bappenas



Pusat Pembangkit Listrik Sementara, Aceh Jaya

Dari target sasaran 2.394 km JTR dan 1.046 km JTM, sampai Desember 2006 telah dilaksanakan sebanyak 397.8 km JTR dan 256.5 km JTM. Pada tahun anggaran 2007 sasaran yang akan dicapai sepanjang 397.6 km JTR dan 212.5 km JTM. Dengan demikian masih terdapat sisa target sebesar 1,636.6 km JTR dan 577.9 km JTM. Sedangkan target sasaran 736 unit Gardu Distribusi (GD) dan 6 unit Gardu Hubung (GH), sampai Desember 2006 telah

tercapai 217 GD dan 3 unit GH. Tahun anggaran 2007 sasaran yang akan dicapai sebanyak 260 unit GD dan 1 unit GH. Dengan demikian masih terdapat sisa target sebesar 298 unit GD.

Pembangunan pembangkit listrik dengan target 16 unit, sampai Desember 2006 telah berhasil dicapai 11 unit pembangkit listrik. Pada tahun anggaran 2007 tidak ada pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik. Target pembangkit listrik tersebut belum termasuk target rekonstruksi pembangunan baru Pembangkit Listrik Tenaga Air Peusangan (PLTA) Peusangan dengan kapasitas 2X42 MW. Pembangunan PLTA Peusangan akan dibiayai JBIC dengan percepatan proses pinjaman sehingga pelaksanaannya dapat dimulai akhir tahun 2007. Sebagai tambahan dari pemenuhan target rekonstruksi tersebut, PT. PLN juga sudah memproses tender pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara sebesar 2X100 MW di kabupaten Nagan Raya. Departemen ESDM juga akan memproses tender pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 2X20 MW di Seulawah, kabupaten Aceh Besar.

Untuk bangunan gedung layanan umum, dari sasaran target 6 unit bangunan gedung, BRR hanya akan membangun satu gedung pelayanan masyarakat di Merduati. Masih terdapat sisa target 5 gedung kantor termasuk kantor wilayah.

PT. PLN sebagai badan usaha mempunyai kewajiban untuk turut membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana tenaga listrik. Pembangunan kembali gedung kantor wilayah NAD harus dibiayai oleh PT. PLN. Demikian juga pembiayaan pembangunan gedung-gedung lainnya. Rehabilitasi sebagian JTM dan JTR dibiayai melalui dana PT. PLN demikian juga untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan. Sebagian perluasan sebagai bagian dari target rekonstruksi JTR dan JTM juga dibiayai dana APBN Departemen ESDM melalui program listrik desa.

Khusus untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan listrik, BRR membiayai pengadaan 1.691 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan 1 unit Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH). Departemen ESDM juga melalui program Listrik Desa mengadakan 1.000 unit PLTS pada tahun anggaran 2006. Pada tahun anggaran 2007 sasaran yang akan dicapai 469 unit. Tahun anggaran 2008, perlu dilanjutkan pengadaan PLTS sebanyak 1.000 unit.

Tabel 3 - 17
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Energi dan Listrik

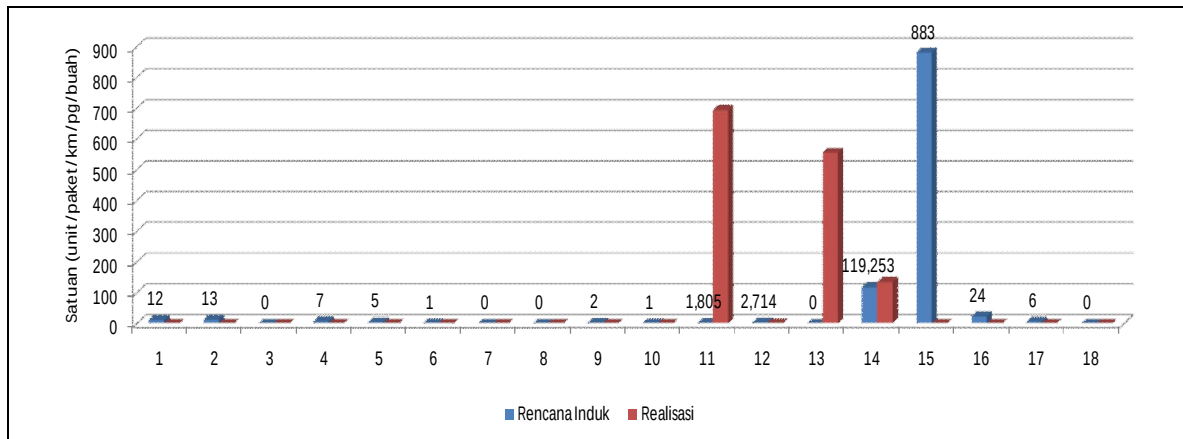
No	Kegiatan Pembangunan	Sat	Renc. Induk	Realisasi Tahun 2005 - 2006				Realisasi * 2007	Realisasi Total 2005-2007		Ket
				APBN	Non APBN	Total	%		Total	%	
1	Sarana dan Prasarana Energi	pkt	12	*	*	*	*	*	*	*	
2	Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	pkt	13	*	*	*	*	*	*	*	
3	Rehabilitasi dan pengembangan jaringan distribusi		tersebr	*	*	*	*	*	*	*	
4	Pengadaan generator	pkt	7	*	*	*	*	*	*	*	

No	Kegiatan Pembangunan	Sat	Renc. Induk	Realisasi Tahun 2005 - 2006				Realisasi * 2007	Realisasi Total 2005-2007		Ket
				APBN	Non APBN	Total	%		Total	%	
5	Perbaikan kantor PT. PLN	pkt	5	*	*	*	*	*	*	*	
6	Pengadaan PLTD Apung baru	pkt	1	*	*	*	*	*	*	*	
7	Pengembangan Sistem Ketenagalistrikan NAD		tersebr	*	*	*	*	*	*	*	
8	Pembangunan jaringan transmisi		tersebr	*	*	*	*	*	*	*	
9	Pembangunan PLTA/PLTM	Unit	2	*	*	*	*	*	*	*	
10	Pembangunan PLTG	Unit	1	*	*	*	*	*	*	*	
11	Trasmission lines (SUTM dan SKTM)	Km	1.805	412	*	412	23%	283	695	39%	
12	Distribution lines (SKTR)	Km	2.714	689	*	689	25%	413	1.102	41%	
13	Stasiun Distribusi	Unit	*	*	*	*	*	*	557	*	
14	Sambungan Pelanggan	Pg	119.253	71.993	*	71.993	60%	64.387	136.380	114%	
15	Gardu Distribusi	Unit	883	217	*	217	25%	318	535	61%	
16	Diesel	Unit	24	12	*	12	50%			50%	
17	Bangunan	Buah	6	*	*	*	*	1	1	17%	
18	Infrastructure Energy NAD - Nias	Unit	*	*	*	*	*	*	*	*	

Sumber : Deputi Infrastruktur Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, Mei 2007.

Catatan : *) Angka realisasi volume tahun 2007 masih merupakan target yang akan dicapai tahun 2007.

Grafik 3 - 10
Realisasi On Budget Sub Sektor Energi dan Listrik sampai
Mei 2007 terhadap Rencana Induk



(2) Sarana Energi

Sebagian besar rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkaitan dengan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dilaksanakan oleh PT. Pertamina dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang penyaluran BBM. Khusus untuk pembangunan Depo BBM di pulau Simeulue, BRR berkontribusi pembiayaan pembangunan Depo BBM di pulau tersebut. BRR membantu sepertiga (atau senilai Rp. 10 Milyar) dari biaya pembangunan Depo BBM di Simeulue. Pada akhir Desember 2006, pembangunan Depo BBM Simeulue saat sudah mencapai 71 persen dan kontribusi BRR sebesar Rp. 10 milyar telah dibayarkan kepada kontraktor PT. Pertamina pada bulan Desember 2006.

Selain penanganan masalah BBM, BRR pada tahun anggaran 2005 dan 2006 melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi gedung dinas, gedung dan peralatan laboratorium, gedung balai latihan kerja (BLK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NAD, pengadaan peralatan pertambangan rakyat dan peralatan pengeboran sumur dalam. Selain itu BRR juga membangun kembali 3 unit gedung pemantau gunung api yang hancur berikut pengadaan peralatan pemantau gunung api.

3.1.2.4 Sumberdaya Air

Dari 62.995 ha target rehabilitasi dan rekonstruksi Irigasi, sampai dengan Desember 2006 telah dilaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana Irigasi seluas 78.766 ha (125%). Tahun anggaran 2007, terdapat penambahan seluas 31.212 Ha sehingga total luas irigasi adalah 108.181 (172%) Meskipun dilihat dari kuantitas pencapaian target, Irigasi akan selesai pada tahun anggaran 2006, tetapi sebagaimana dimaklumi masih banyak daerah irigasi (DI) yang perlu ditangani karena mengalami kerusakan lainnya yang diakibatkan bukan oleh tsunami ataupun gempa, lebih karena akibat konflik yang menyebabkan lahan pertanian dan jaringan irigasi terlantar tidak terpelihara.

Gambar 3 - 10
Kondisi Infrastruktur Pengaman Pantai di Kabupaten Aceh Barat



Sumber : Dokumentasi P3B-Bappenas
sudah terpasang dan rusak

sudah terpasang dan sebagai alternatif pengganti yang rusak

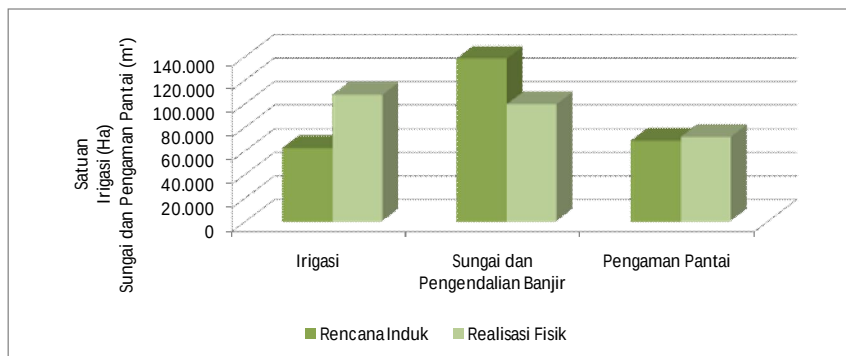
Tabel 3 - 18
Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Program 2007 Sub-Sektor Sumberdaya Air

No	Kegiatan pembangunan	Sat	Renc. Induk	Realisasi Tahun 2005 - 2006				Realisasi 2007	2005-2007	
				APBN	Non APBN	Total	%		Total	%
1	Irigasi	Ha	62.995	78.766		78.766	125	31.212	108.181	172
2	Sungai dan Pengendalian Banjir	m'	138.796	76.689	2.000	78.689	130	12.163	100.189	72
3	Pengaman Pantai	m'	69.058	57.854		57.854	165	23.376	72.454	105

Sumber : Deputi Infrastruktur Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, Mei 2007.

Catatan : *) Angka realisasi volume tahun 2007 masih merupakan target yang akan dicapai tahun 2007.

Grafik 3 - 11
Realisasi On Budget Sub Sektor Sumber Daya Air sampai Oktober 2007 terhadap Rencana Induk



Dari target 138.796 meter sungai yang harus direhabilitasi dan direkonstruksi, sampai dengan Desember 2006 telah dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sungai sepanjang 76.689 meter (55%). Tahun anggaran 2007, sasaran yang akan ditangani adalah sepanjang 12.163 meter. Total penanganan menjadi 100.189 meter (72%). Target yang ditetapkan untuk pengendalian banjir ini sebenarnya tidak seluruhnya untuk penanganan sungai yang rusak akibat tsunami dan gempa. Rehabilitasi dan rekonstruksi sungai sebagian besar ditujukan untuk melindungi kawasan pemukiman atau kawasan produktif lainnya dari

banjir. Masalah banjir yang umum terjadi di kawasan pemukiman atau perkotaan disebabkan oleh topografi yang landai, sistem drainase yang tidak memadai dan banjir kiriman. Sedangkan banjir di kawasan lain di luar perkotaan disebabkan karena rusaknya kondisi daerah aliran sungai.

Dari target 69.058 meter pantai yang harus dilindungi, pada tahun anggaran 2005-2006 telah dikerjakan bangunan pengaman pantai sepanjang 57.854 meter (84%) dan pada tahun anggaran 2007 sepanjang 23.376 meter. Target yang telah dicapai dalam dua tahun anggaran sebesar 72.454 meter atau 105%. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang meminta bangunan pelindung pantai dan usulan tersebut terus dikaji. Permintaan bangunan pelindung pantai umumnya untuk melindungi rumah-rumah yang baru didirikan di dekat pantai bagi korban bencana tsunami.

3.1.2.5 Air Bersih dan Sanitasi

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka penyediaan air minum dan air bersih telah berjalan sejak tahun 2005 dan tahun 2007. Sampai tahun ketiga telah teralokasi dana sebesar Rp. 309,943 Milyar atau sebesar 13.54% dari target (on budget yang terserap dan telah dialokasikan pada tahun 2007). Komponen terbesar adalah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi air bersih atau sebesar 63,53% atau sebesar Rp. 196,906 Milyar, untuk komponen air limbah sebesar Rp. 23,093 milyar (7,45%), komponen persampahan sebesar Rp. 50,407 milyar (16,26%), dan komponen drainase sebesar Rp. 39,536 milyar (12,76%).

Pada tahun 2005 kegiatan rekonstruksi diarahkan pada penanganan darurat untuk terpenuhinya kebutuhan air bersih kota-kota terkena tsunami dan barak-barak pengungsian. Kemajuan secara fisik telah banyak dicapai dalam rehabilitasi dan rekonstruksi air bersih. Keterlibatan bantuan masyarakat Internasional melalui Donor dan NGO (off budget) pada pelaksanaan penyediaan air bersih telah memberikan peran yang sangat besar, sejak masa tanggap darurat. Banyak lembaga donor yang terlibat diantaranya adalah: SAB-SAS, JICS, UNICEF, UNDP, OXFAM, IRD, AMERICAN RED CROSS, CARE INTERNATIONAL dll.

Gambar 3 - 11
Kondisi Infrastruktur Air bersih yang belum selesai dibangun



belum diperbaiki

Sumber : Dokumentasi P3B-Bappenas



sudah diperbaiki tapi belum berfungsi

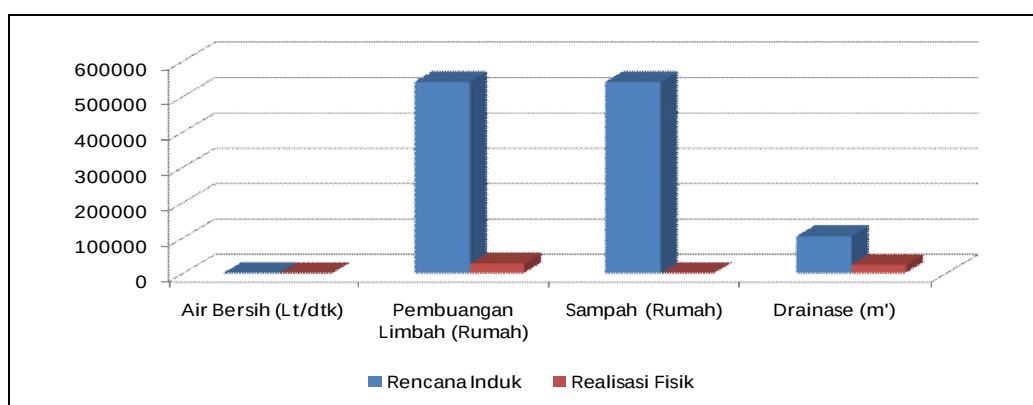
Pencapaian dengan anggaran APBN yang telah dibangun/dalam tahap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah sebesar Rp. 196,906 milyar, dengan anggaran sebesar ini akan terbangun fasilitas pelayanan air bersih perpipaan dengan kapasitas sebesar 480 lt/det yang tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Simeulue.

Tabel 3 - 19
Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Rencana 2007 Sub-Sektor Air Bersih dan Sanitasi

No	Kegiatan Pembangunan	Sat	Renc. Induk	Realisasi Tahun 2005 - 2006				Realisasi* 2007	Realisasi Tahun 2005-2007	
				APBN	Non APBN	Total	%		TOTAL	%
1	Air Bersih	Lt/dtk	3.256	135		135	4.15	345	480	15
2	Pembuangan Limbah	Rumah	543.217	1.400		1.400	0.26	290.310	291.710	54
3	Sampah	Rumah	543.217	636		636	0.12	1.529	2.165	0.4
4	Drainase	m'	106.347	16.753		16.753	15.8	9.449	26.202	25

Catatan : *) Angka realisasi volume tahun 2007 masih merupakan target yang akan dicapai tahun 2007.

Grafik 3 - 12
Realisasi On Budget Sub Sektor Air Bersih dan Sanitasi sampai Oktober 2007 terhadap Rencana Induk



Masih dibutuhkan tambahan kapasitas penyediaan air bersih sebesar 2.976 lt/det yang memerlukan rekonstruksi. Sisa kapasitas ini akan dilaksanakan pada tahun 2008 dengan lokasi yang menjadi sasaran utama, yaitu kota terkena tsunami dan kota dengan potensi ekonomi yang tinggi. Sedangkan kota lainnya akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NAD untuk membangunnya baik dengan dan dari APBN maupun dari APBD.

Penanganan darurat persampahan juga sebagian besar ditangani oleh Donor dan NGO, antara lain yang cukup besar adalah oleh UNDP untuk city wide selama tahun 2005. Sedangkan UNICEF menangani masalah persampahan untuk lokasi-lokasi barak. Pelaksanaan pembangunan untuk persampahan sampai tahun 2006 lebih banyak berupa penyediaan sarana pengangkutan sampah berupa Dump Truck dan Arm roll truck. Baru pada tahun 2007 ini beberapa lokasi TPA akan dibangun, yaitu TPA di Langsa, TPA di Meulaboh, TPA di Nagan Raya, dan TPA di Aceh Singkil. Dengan pelaksanaan kegiatan sampai tahun 2006 telah mampu menangani sampah baik pengangkutan maupun pengolahan sebesar 2.165 m³/hari atau baru mencapai 0,4% dari target operasi pengelolaan sampah yang direncanakan. Dana APBN (on budget) yang telah dialokasikan/terserap sebesar Rp. 50,407 milyar.

Pencapaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi air limbah sampai saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Baru IPLT di Banda Aceh yang sudah selesai dibangun oleh UNDP. Beberapa MCK telah dibangun dengan dana APBN (on budget) dan juga dana bantuan Donor dan NGO (off budget). Sedangkan IPLT di kabupaten/kota lainnya sedang

dilaksanakan pembangunannya melalui pembiayaan pada tahun anggaran 2007 berjalan ini.

Drainase lingkungan permukiman sampai saat ini baru terbangun saluran drainase sepanjang 26.202 m dari total 106.347 m atau sekitar 25%. Alokasi anggaran yang telah terserap adalah sebesar Rp. 39,536 milyar. Masih kecilnya capaian pelaksanaan pekerjaan drainase lingkungan permukiman ini adalah karena perumahan dan permukiman masih dalam proses pelaksanaan.

3.1.2.6 Fasilitas dan Bangunan Umum

Fasilitas dan bangunan umum yang dibangun BRR meliputi PUSLAKAT mitigasi Tsunami, escape building, museum tsunami, laboratorium dan peralatan.

Bangunan 'escape hill' dan 'escape building' seperti yang diamanahkan dalam Rencana Induk sudah mulai dipersiapkan. Pola bangunan yang dipakai disesuaikan dengan kondisi lapangan. Untuk daerah yang dekat pegunungan, berbagai jalur evakuasi 'escape hill' mulai dipersiapkan meskipun belum tuntas. Namun untuk daerah yang jauh dari pegunungan/dataran tinggi, seperti Meulaboh, 'escape building' dalam dak atap bangunan ruko 2 lantai menjadi alternatif.

Gambar 3 - 12
Kondisi escape hill di Kabupaten Aceh Jaya yang belum selesai dibangun



sudah diperbaiki sementara

Sumber : Dokumentasi P3B-Bappenas

Tabel 3 - 20
Program 2007 dan Rencana 2008 untuk Fasilitas dan Bangunan Umum

No	Kegiatan Pembangunan	Sat	Rencana Induk		Realisasi 2005 - 2006				Realisasi 2007 *	Realisasi Total 2005-2007	
			Rekon	Rehab	APBN	Non APBN	Total	%		Volume	%
1	Development of Central and Training Mitigation of Tsunami NAD disaster area Banda Aceh		T/A	T/A	-	-	-	-	4	T/I	T/I
2	Escape Hill	Unit	5	-	-	-	-	-	-	T/I	0
3	Design and construction of Escape Building in Aceh Jaya	Unit	1	-	-	-	-	-	1	1	100
4	Design and construction of Escape Building in Aceh Barat	Unit	1	-	-	-	-	-	1	1	100
5	Design and construction of Escape Building in Lhokseumawe	Unit	1	-	-	-	-	-	1	1	100
6	Design and construction of	Unit	1	-	-	-	-	-	1	1	100

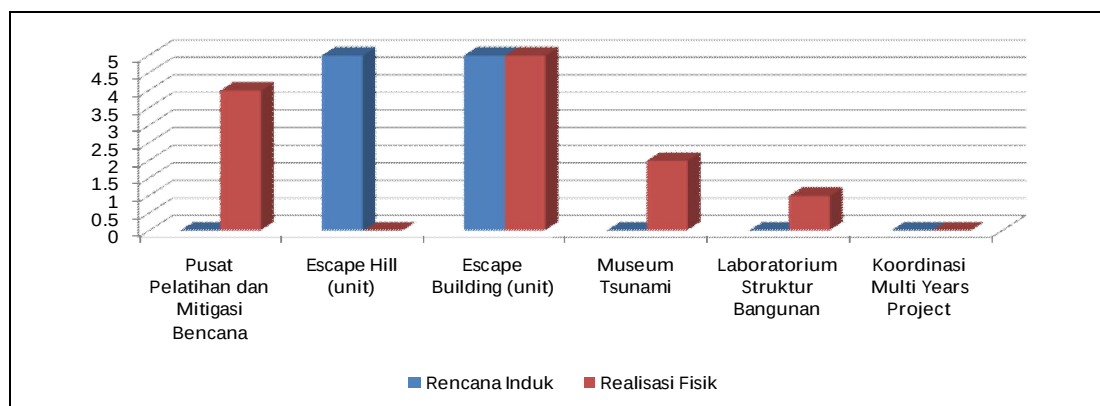
No	Kegiatan Pembangunan	Sat	Rencana Induk		Realisasi 2005 - 2006				Realisasi 2007 *	Realisasi Total 2005-2007	
			Rekon	Rehab	APBN	Non APBN	Total	%		Volume	%
	Escape Building in Bireuen										
7	Design and construction of Escape Building in Pidie	Unit	1	-	-	-	-	-	1	1	100
8	Center of Tsunami Museum Development in Banda Aceh (Multi year want to start 2007 with the Design & Construction in 2008/9)		T/A	T/A	-	-	-	-	2	T/I	T/I
9	Construction of Building of Structural Quality Central in Banda Aceh & Equipment for Lab		T/A	T/A	-	-	-	-	1	T/I	T/I
10	Coordination and Consultation of Work Plan and Program of Government NAD - NIAS - Multi Year project		T/A	T/A	-	-	-	-	0	T/I	T/I
	TOTAL										

Sumber : Mid Term Review BRR, 2007

T/A = Tidak ada dalam Rencana Induk, T/I = Belum ada informasi

Catatan : *) Angka realisasi volume tahun 2007 masih merupakan target yang akan dicapai tahun 2007.

Grafik 3 - 13
Realisasi On Budget Sub Sektor Fasilitas dan Bangunan Umum sampai Oktober 2007 terhadap Rencana Induk



Konsentrasi rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas dan bangunan public yang pada umumnya adalah pembangunan baru, memiliki prioritas pada pembangunan escape building di daerah dataran pantai dan penyediaan alur pendakian escape hill untuk daerah perbukitan. Realisasi pencapaian kegiatan pembangunan escape building telah 100% dilaksanakan. Sedangkan pembangunan escape hill, rute dan prasarana dasarnya telah dibangun hanya belum dibuatkan perkerasan jalan. Contoh kondisi di lapangan dapat

dilihat pada gambar 3- 14 Pelaksanaan proyek perkerasan dan penyelesaian bangunan umum baru ini diprogramkan pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2008.

3.1.3 Pemulihan Sosial Budaya

Bidang pemulihan sosial budaya meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan sosial budaya. Rincian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat digambarkan sebagai berikut :

3.1.3.1 Pendidikan

Program wajib belajar 9 tahun yang menjadi prioritas utama program bidang pendidikan disebabkan karena sarana dan prasarana sekolah dasar yang paling banyak mengalami kerusakan baik secara fisik maupun non fisik. Secara terperinci, kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pendidikan akan diuraikan dalam beberapa Tabel berikut berdasarkan kelompok program/kegiatannya.

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program pendidikan anak usia dini mempunyai 2 (dua) kegiatan utama yaitu pembangunan gedung dan pelaksanaan proses pendidikan anak usia dini, secara rinci realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 - 21
Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)

No	Program/kegiatan	Sat	Rencana induk	Realisasi tahun 2005-2006				Prog. 2007	2005 -2007	
				APBN	Non apbn	Total	Capaian		Total	Capaian
A	Pembangunan Gedung darurat/sementara	Unit/Ruang	12	49	246	295	2458%		295	2458.3%
B	Program Pendidikan Anak Usia Dini/TK									
1	Rehabilitasi dan pembangunan TK	Unit	101		61	61	60.4%	2	63	62.4%
2	Perabot/Peralatan	set	125		61	61	48.8%		106	84.8%
3	Materi belajar mengajar		125		61	61	48.8%	15	126	100.8%

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan, Juli 2007.

Berdasarkan Rencana Induk direncanakan sejumlah 12 unit namun dalam realisasi mencapai 295 unit. Demikian pula dengan penyediaan materi belajar mengajar sampai dengan akhir tahun 2007 yang telah melampaui target realisasi (100.8%). Pada rehabilitasi dan pembangunan TK dan bantuan peralatannya, terlihat target realisasi lebih dari separuhnya sampai dengan tahun 2006. Realisasi ini terutama berasal dari pendanaan yang bersumber dari bantuan NGO dan Donor (non APBN).

2. Program Wajib Belajar 9 Tahun

Program wajib belajar 9 tahun, terdiri atas pendidikan tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan luar biasa. Pada pendidikan Sekolah Dasar, realisasi yang mencapai 100% ke atas adalah pada program paket belajar, pembangunan unit sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sekolah, pengembangan

fasilitas/komputer sekolah, meubeler dan trauma konseling. Secara terperinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3 - 22
Realisasi Program Wajib 9 Tahun

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Sat.	Rencana Induk	Realisasi Tahun 2005 - 2006				Program 2007	2005 -2007	
				APBN	Non APBN	Total	Capaian		Total	Capaian (%)
A	Sekolah Dasar									
	Rehab sekolah	Unit	627	85	228	313	49.9%	164	477	76.1%
	Pembangunan USB	Unit	25	26		26	104.0%	4	30	120.0%
	Pembangunan RKB	Ruang	12	111		111	925.0%	11	122	1016.7%
	Pemb. Sekolah Terpadu		3				0.0%		-	0.0%
	Pembangunan Rumah Guru	Unit		178		178			178	
	Rehab sekolah akibat konflik	Unit	23				0.0%		23	100.0%
	Alat Olahraga, kesenian, teknologi dasar, life skill	Set	882				0.0%		-	0.0%
	Meubelair	pkt	113	8	518	526	465.5%	36	562	497.3%
	Paket Belajar	pkt	103.599		680.357	680.357	656.7%	9.169	689.526	665.6%
	Buku Perpustakaan	SD	1.717				0.0%		-	0.0%
	Buku Pelajaran Pokok	Exp	284.505				0.0%		-	0.0%
	Diklat Kep Sek, Pembina/Pengawas	Orang	3.107				0.0%		-	0.0%
	Block grant operasional SD		129				0.0%		-	0.0%
	Pengembangan Telekomunikasi, Komputer dll	pkt	1				0.0%		3	300.0%
	Trauma Conseling	Kab	2		16	16	800.0%		16	800.0%
	Fasilitas sanitasi				55	55			60	
B	Sekolah Menengah Pertama									
	Pembangunan gedung	skl	293	111	34	145	49.5%	1	146	49.8%
	Pembangunan USB	Unit	84	19	39	58	69.0%	18	76	90.5%
	Pembangunan RKB pengembangan	Ruang	1.150	273	436	709	61.7%		709	61.7%
	Pembangunan Sekolah Binaan/Unggul			3	3	6		27	39	
	Pembangunan Asrama Siswa	Unit	19		4	4	21.1%		4	21.1%
	Meubeler	Pkt	206	90		90	43.7%	30	120	58.3%
	Beasiswa	Orang	9.009			-	0.0%		-	0.0%
	Trauma Conseling		2			-	0.0%		-	0.0%
	Investasi Mutu					-			-	
	Pemb. Pustaka, Lab. IPA, RK	Unit	193			-	0.0%		-	0.0%
	Pemb. Perpustakaan	unit	100			-	0.0%		-	0.0%
	Buku Pelajaran	Eksp	1.539.000			-	0.0%		-	0.0%
	Lab Komputer	set	100			-	0.0%		-	0.0%
	Alat Ketrampilan	set	53			-	0.0%		30	56.6%
	Pelatihan Guru	Org	10.000	221	17.115	17.336	173.4%	693	18.029	180.3%
	Pengembangan Mutu Sekolah	skl	90		27	27	30.0%		53	58.9%
	Kegiatan Kesiswaan	skl	2.386			-	0.0%		210	8.8%
	Pengembangan IT untuk SMP	pkt	1			-	0.0%		8	800.0%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Sat.	Rencana Induk	Realisasi Tahun 2005 - 2006				Program 2007	2005 -2007	
				APBN	Non APBN	Total	Capaian		Total	Capaian (%)
	Efisiensi dan Efektivitas (akreditasi, Kinerja, CB)	skl	239			-	0.0%		20	8.4%
C	Pendidikan Luar Biasa/SLB	UNIT								
	Pembangunan UGB	lokasi	6		1	1	16.7%		5	83.3%
	Rehab Gedung	Ruang	5			-	0.0%		4	80.0%
	Bantuan Meubeler	skl	6		1	1	16.7%		5	83.3%
	Beasiswa SLB	Org	2.900			-	0.0%		-	0.0%
	Sarana Prasarana	lokasi	4		1	1	25.0%		5	125.0%
	Peralatan Pendidikan	unit	10		1	1	10.0%		5	50.0%
	Peralatan Kantor	unit	25		1	1	4.0%		5	20.0%

Sumber : Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan, Juli 2007.

Adapun perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam sektor pendidikan, juga dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

Gambar 3 - 13
Pembangunan SD oleh Coca Cola di Lampulo



Sumber : Dokumentasi P3 BBAPPENAS

Sekolah Dasar yang dibangun oleh Coca Cola sebagai bagian dari kontribusi pihak swasta terhadap pembangunan Aceh kembali. Terlihat kondisi fisik bangunan SD masih baru dan fasilitas pendukung seperti meja, kursi papan tulis dan ruang kelas cukup memadai dan telah digunakan dalam proses belajar mengajar sejak SD ini diresmikan dalam jangka waktu yang belum lama. Proses belajar mengajar sudah dapat dilaksanakan dengan lancar (Hasil Kunjungan Lapangan P3B-Bappenas, 2007)

3. Program Pendidikan Menengah

Pada program pendidikan menengah meliputi 3 kegiatan utama yang mengacu pada jenis sekolah yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah (Tsanawiyah dan Aliyah). Rincian dari masing-masing kegiatan jenis sekolah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 - 23
Realisasi Pelaksanaan Program Pendidikan Menengah SMA/SMK

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Satuan	Rencana Induk	Realisasi Tahun 2005 - 2006				Program 2007	2005 -2007	
				APBN	Non APBN	Total	Capaian		Total	Capaian (%)
A	SMA	UNIT								
	Pembangunan RKB	Paket	530	209	37	246	46.4%	23	269	50.8%
	Pembangunan UGB Reguler & Berasrama	Unit	42	22		22	52.4%	16	40	95.2%
	Rehab	skl	148		43	43	29.1%	21	76	51.4%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Satuan	Rencana Induk	Realisasi Tahun 2005 - 2006				Program 2007	2005 -2007	
				APBN	Non APBN	Total	Capaian		Total	Capaian (%)
	Meubeler	pkt	90	14		14	15.6%	59	85	94.4%
	Buku perpustakaan	Expl	973.208	-	431.000	431.000	44.3%	21.000	487.000	50.0%
	Lab IPA dan Komputer	pkt	140	44		44	31.4%		44	31.4%
	Ruang Serbaguna/RPL	pkt	100	24		24	24.0%	12	42	42.0%
	Fasilitas Ibadah	pkt	100			-	0.0%		-	0.0%
	Peralatan Olahraga dan Seni	pkt	100			-	0.0%		69	69.0%
	Pengembangan sekolah bertaraf International	skl	20			-	0.0%		7	35.0%
	Operasional dan pemeliharaan	skl	1.120			-	0.0%		-	0.0%
	Peningkatan kapasitas manajemen sekolah	skl/org	92	120		120	130.4%		360	391.3%
B	SMK	unit				-			-	
	Rehab gedung	unit	14		1	1	7.1%		1	7.1%
	Pembangunan	unit	3		1	1	33.3%		1	33.3%
	Pembangunan RKB	ruang	34			-	0.0%		-	0.0%
	Pendidikan dan pelatihan siswa	siswa	240	100		100	41.7%		100	41.7%
	Bantuan Peralatan dan meubeler	lokasi	67			-	0.0%		-	0.0%
	Bantuan BOP (buku, bahan ajar, PBS	skl	152			-	0.0%		-	0.0%
	Vocational Training	Org			10.540	10.540		435	10.975	
C	Pendidikan Depag (Madrasah)	unit								
	Pembangunan RKB madrasah		85	291		291	342.4%		291	342.4%
	Pembangunan UGB Madrasah		52	32		32	61.5%		32	61.5%
	Pembangunan BKG Madrasah			31		31			31	

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan, Juli 2007

Pada program Sekolah Menengah Atas (SMA) terlihat kegiatan peningkatan kapasitas manajemen sekolah realisasi sebesar 139%. Sedangkan program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terlihat kegiatan Pendidikan dan pelatihan siswa (vocational training) dengan realisasi sebesar 42% merupakan prioritas penganggaran. Sedangkan pada program Madrasah terlihat kegiatan pembangunan RKB madrasah yang menjadi prioritas dengan realisasi sebesar 342%.

4. Program Pendidikan Tinggi

Pada program pendidikan tinggi secara umum memiliki 2 (dua) kegiatan utama yaitu rehabilitasi fisik(gedung) dan kegiatan pemberian beasiswa kepada anak didik korban bencana tsunami. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 - 24
Realisasi Program Pendidikan Tinggi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Satuan	Rencana Induk	Realisasi Tahun 2005 - 2006				Program 2007	2005 -2007	
				APBN	Non APBN	Total	Capaian		Total	Capaian (%)
1	Penyediaan dosen bantu 6 bulan	OB	900				0.0%		-	0.0%
2	Kompensasi SPP 2004/2005	Mhs	-						-	
3	Beasiswa Mhs korban tsunami/kurang Mampu/ikatan dinas	Mhs	13.500	8.846	17.194	26.040	192.9%	6.782	40.746	301.8%
4	Penggantian ruang kantor dan Laboratorium	pkt	4			-	0.0%	3	4	100.0%
5	Penggantian mobiler kuliah, lab & kantor	pkt	17		12	12	70.6%	4	16	94.1%
6	Perbaikan Mess Dosen	pkt	2		2	2	100.0%		2	100.0%
7	Penggantian Mobiler asrama mahasiswa	pkt	2	1		1	50.0%	1	2	100.0%
8	Perbaikan Asrama mhs	m2	5.900			-	0.0%	1	1	0.0%
9	Penggantian/pengadaan peralatan Lab	pkt	26			-	0.0%	6	8	30.8%
10	Penambahan Luas asrama mahasiswa	pkt	1			-	0.0%		-	0.0%
11	Penggantian Kendaraan Dinas	unit	10		8	8	80.0%		8	80.0%
12	Santunan dosen/tenaga administrasi PT	org	213		500	500	234.7%		500	234.7%
13	Penggantian Bus kampus	unit	15			-	0.0%		-	0.0%
14	Perbaikan pagar kampus	m2	5.200			-	0.0%		-	0.0%
15	Perbaikan jalan Kampus	pkt	1		1	1	100.0%		2	200.0%
16	Beasiswa dan Pelatihan Dosen S2/S3	org	150	142		142	94.7%	87	369	246.0%
17	Pembangunan Rumah Dosen	pkt	1		5	5	500.0%		5	500.0%
18	Pembuatan sumur dan jaringan air bersih	unit	3	1		1	33.3%	2	3	100.0%
19	Pembangunan Pusat Pelatihan Unsyiah	pkt	1			-	0.0%		1	100.0%
20	Meubeler Pusat Pelatihan Unsyiah	palet	1			-	0.0%		1	100.0%
21	Rehab gedung PGSD Unsyiah	pkt	1	1		1	100.0%	1	2	200.0%
22	Mobiler PT	pkt	1	1		1	100.0%	3	8	800.0%
23	Perbaikan gedung pendidikan PT	pkt	7		10	10	142.9%	12	23	328.6%
24	Pembangunan kembali gedung kuliah/lab PTN & PTS	pts	3	1	1	2	66.7%	4	7	233.3%

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan, Juli 2007.

Berdasarkan tabel diatas terlihat kegiatan rehabilitasi fisik/gedung dalam rangka peningkatan kelancaran proses belajar mengajar menjadi prioritas. Hampir seluruh kegiatan pada program ini telah mencapai realisasi yang telah ditetapkan dalam rencana induk (pencapaian lebih dari 100%). Namun demikian, terdapat beberapa program yang belum terealisasi yaitu perbaikan dan perluasan asrama mahasiswa sampai dengan tahun 2007 belum terealisasi sampai tahun 2007.

5. Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

Pada program penelitian dan Pengembangan pendidikan diprioritaskan dalam rangka peningkatan kapasitas penelitian bagi mahasiswa dan dosen. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 - 25
Realisasi Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Sat	Rencana Induk	Realisasi Tahun 2005 - 2006				Program 2007	2005 -2007	
				APBN	Non APBN	Total	Capaian		Total	Capaian (%)
1	Teaching Grant	Keg	56	17		17	30.4%		51	91.1%
2	Riset	Keg	56	42		42	75.0%	13	81	144.6%
3	Bantuan Praktek Mhs & ekstra kurikuler	OB	1.800	600		600	33.3%	79	837	46.5%
4	Akreditasi, sertifikasi, dan pelatihan data base	Keg	-	29		29		5	40	
5	TOEFL dan POT dosen	Org	-	60		60			180	
6	Matrikulasi mahasiswa Undangan	Org	-	270		270			540	
7	Buku Pustaka	Pkt	59	2		2	3.4%	3	11	18.6%
8	Monitoring dan pengawasan	Keg	184	2		2	1.1%	2	8	4.3%

Sumber: Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan, Juli 2007.

Berdasarkan tabel diatas terlihat kegiatan riset merupakan kegiatan yang diprioritaskan dalam rangka peningkatan kapasitas mahasiswa dan para dosen dengan realisasi pelaksanaan mencapai 144%.

3.1.3.2 Kesehatan

Bidang Kesehatan memuat 10 (sepuluh) program utama pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias yang terdiri dari upaya pengelolaan, upaya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Program Pengkajian & Penelitian Terapan, Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan.

1. Program Upaya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Program upaya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan secara umum memiliki dua kegiatan utama yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi fisik sarana dan prasarana kesehatan serta kegiatan pelatihan dan pendidikan tenaga medis, rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 - 26
Realisasi Pelaksanaan Program Upaya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

No	Program / kegiatan	Sat	Rencana Induk	Realisasi tahun 2005-2006				Prog 2007	2006-2007	
				Apbn	Non apbn	Total	%		Total	%
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	pkt	1	114	-	114	11400,0%	136	250	25000,0%

No	Program / kegiatan	Sat	Rencana Induk	Realisasi tahun 2005-2006				Prog 2007	2006-2007	
				Apbn	Non apbn	Total	%		Total	%
2	Pembangunan Rumah Negara	pkt								
-	Rumah Dinas	pkt	21	1	-	1	4,8%	-	1	4,8%
-	Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas	pkt	42	64	-	64	152,4%	53	117	278,6%
3	Pembangunan dan Perawatan Gedung Kesehatan/Pendidikan									
-	Kantor Dinas Kesehatan	pkt	5	2	-	2	40,0%	13	15	300,0%
-	Rumah Sakit	pkt	9	12	4	16	133,3%	15	31	344,4%
-	Pustu	pkt	174	-	45	45	0,0%	79	124	71,3%
-	Polindes	pkt	700	-	56	56	0,0%	180	236	33,7%
-	Klinik	pkt	6	-	5	5	0,0%	-	5	83,3%
-	BBPOM	pkt	3	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%
-	Laboratorium Kesehatan	pkt	1	-	-	-	0,0%	1	1	100,0%
4	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit	pkt	4	12		12	300,0%	-	12	300,0%
5	Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB	pkt	4	24		24	600,0%	19	43	1075,0%
6	Pengadaan Kendaraan Roda 4/Roda 6/Roda 10 (ambulance)	pkt	69	5		5	7,2%	-	5	7,2%

Sumber: Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan, Juli 2007

Berdasarkan tabel diatas, terlihat pelaksanaan program upaya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan capaiannya rata-rata telah melebihi rencana induk yang telah ditetapkan. Untuk kegiatan pengadaan alat kedokteran, operasional dan pemeliharaan rumah sakit serta pendidikan dan pelatihan teknis realisasinya telah mencapai lebih dari 100% dan utamanya dilaksanakan pada tahun 2005-2006. Namun demikian masih terdapat beberapa kegiatan yang sampai dengan tahun 2007 belum terealisasi sepenuhnya seperti pembangunan rumah dinas dan pembangunan kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

2. Program Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah

Pada Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah, terdiri dari dua kegiatan dengan capaian yang telah melebihi rencana induk yang telah ditetapkan. Untuk kegiatan bantuan penanggulangan bencana alam dan kerusakan dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit menular telah merealisasikan 2 paket dari 1 paket yang diamanatkan dalam rencana induk (200%) sedangkan pembangunan kantor kesehatan pelabuhan baru merealisasikan 50% dari rencana induk sebesar 2 paket.

3. Program Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Pada program pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan terdapat dua kegiatan yaitu pengadaan peralatan medis dan pembangunan gudang farmasi/obat. Realisasi program pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan seluruhnya telah mencapai lebih dari 100% dari rencana induk. Pengadaan peralatan medis dan pembangunan gedung farmasi/obat telah dilaksanakan seluruhnya pada tahun 2006 dan diteruskan lagi pada tahun 2007. Realisasi kegiatan pembangunan gudang farmasi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3 - 14
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gudang Farmasi dan
Kantor Dinas Kesehatan Aceh Barat



Sumber : Dokumentas P3B-Bappenas

Gambar diatas terlihat rehabilitasi terhadap 1 unit gudang farmasi dinas kesehatan, dilaksanakan oleh BRR NAD-Nias yang berada dalam pengawasan perwakilan wilayah IV. Dengan nilai sebesar 2.6 milyar. Pembangunan gedung dibangun pada Februari 2007 dan diharapkan selesai pada agustus 2007, pada areal seluas + 200 m persegi diatas bangunan lama yang telah dirubuhkan, dengan sarana dan prasarana lengkap dan namun belum seluruhnya digunakan, karena masih dalam tahap penyelesaian. Kelengkapan standar minimum bangunan seperti air bersih, jaringan komunikasi, listrik, dan pembuangan sampah telah terintegrasi dengan baik. Diharapkan dapat dioperasionalisasikan pada akhir tahun 2007 (*kunjungan lapangan P3B-Bappenas, 2007*).

4. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Program peningkatan kesehatan masyarakat pembangunan terdiri dari 2 kegiatan yang meliputi program fasilitas puskesmas dan pelayanan kesehatan di pengungsian. Kedua program ini telah terealisasi masing-masing sebesar 148.4% dan 276.4% sampai dengan tahun 2007.

5. Program Pengkajian & Penelitian Terapan, Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan & Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program pengkajian & penelitian terapan, pengembangan pendidikan tenaga kesehatan & program perbaikan gizi masyarakat secara rinci dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3 - 27
Realisasi Program Pengkajian & Penelitian Terapan Penelitian Terapan, Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan & Program Perbaikan Gizi Masyarakat

No	Program / Kegiatan	Satuan	Rencana induk	Realisasi tahun 2005-2006				Program 2007	2006-2007	
				Apbn	Non apbn	Total	Capaian		Total	Capaian
A	Pengkajian & Penelitian Terapan di Bidang Kesehatan	pkt	2	2	-	2	100,0%	1	3	150,0%
1	Pengadaan Barang Reagensia Litbangkes untuk Kegiatan Laboratorium	pkt	1	1	-	1	100,0%	-	1	100,0%
2	Penelitian, Pengkajian dan Pelaksanaan Terapan	pkt	1	1	-	1	100,0%	1	2	200,0%
B	Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan	pkt	8	7	-	7	87,5%	12	19	237,5%

No	Program / Kegiatan	Satuan	Rencana induk	Realisasi tahun 2005-2006				Program 2007	2006-2007	
				Apbn	Non apbn	Total	Capaian		Total	Capaian
1	Pengadaan Buku Perpustakaan UPTD Pendidikan	pkt	1	1	-	1	100,0%	-	1	100,0%
2	Beasiswa Pendidikan Lanjutan Tenaga Kesehatan	pkt	1	4	-	4	400,0%	-	4	400,0%
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Institusi Pendidikan dan Pengembangan Kesehatan	pkt	6	2	-	2	33,3%	12	14	233,3%
C	Perbaikan Gizi Masyarakat		21	21	-	21	100,0%	21	21	100,0%
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Kab/Kota	21	21	-	21	100,0%	21	21	100,0%
2	Pelayanan Kesehatan & Perbaikan Gizi	Kab/Kota	21	21	-	21	100,0%	21	21	100,0%

Sumber: Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan, Juli 2007

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat program pengkajian dan penelitian bidang kesehatan, realisasi telah mencapai 100% untuk seluruh kegiatannya. Bahkan pada program perbaikan gizi masyarakat, realisasi mencapai lima kali lipat dari amanat rencana induk (lebih dari 500%) dan telah dilaksanakan pada 21 kota/kabupaten di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

Program pengembangan pendidikan tenaga kesehatan, seluruh kegiatan telah melampaui amanat rencana induk (lebih dari 100%) kecuali pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Institusi Pendidikan dan Pengembangan Kesehatan yang baru mencapai realisasi 33% (2 unit) dari amanat rencana induk.

Selanjutnya pada program penyelenggaraan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, program peningkatan pelayanan kesehatan pengungsi korban bencana dan penanggulangan masalah kesehatan dan program penyelenggaraan penyehatan lingkungan, realisasi seluruhnya telah mencapai target atau melampaui target yang telah ditetapkan rencana induk sejak periode tahun 2005-2006.

6. Program Penyelenggaraan Kebijakan & Manajemen Pembangunan Kesehatan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Program Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Secara rinci kegiatan dari masing-masing tiga program utama diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3 - 28

Realisasi Program Kebijakan & Manajemen Pembangunan Kesehatan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengungsi Korban Bencana dan Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Program Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

No	Program / Kegiatan	Sat	Rencana Induk	Realisasi tahun 2005-2006				Program 2007	2006-2007	
				APBN	Non APBN	Total	Capaian		Total	Capaian
A	Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	pkt	3	6	-	6	600,0%	24	30	1000,0%
1	Administrasi Umum	pkt	1	2	-	2	200,0%	1		
2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	pkt	1	2	-	2	200,0%	1	3	300,0%
3	Bantuan Penanggulangan Bencana	pkt	1	2	-	2	200,0%	22	24	2400,0%

No	Program / Kegiatan	Sat	Rencana Induk	Realisasi tahun 2005-2006				Program 2007	2006-2007	
				APBN	Non APBN	Total	Capaian		Total	Capaian
	Alam dan Kerusakan									
B	Peningkatan Pelayanan Kesehatan		1	1	-	1	100,0%	1	2	200,0%
1	Program Promosi Kesehatan	pkt	1	1	-	1	100,0%	1	2	200,0%
C	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	pkt	1	2	-	2	200,0%	70	72	7200,0%
1	Peningkatan Sarana Sanitasi Air Bersih dan Sarana Sanitasi Dasar	pkt	1	2	-	2	200,0%	70	72	7200,0%

Sumber: Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan, Juli 2007

Pada program kebijakan dan manajemen kesehatan terlihat dari 4 kegiatan utama, kegiatan bantuan penanggulangan bencana alam dan kerusakan menjadi prioritas dengan realisasi pelaksanaan mencapai 2400% dari rencana induk. Program peningkatan pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan pelaksanaannya mencapai 200%. Sedangkan program penyelenggaraan penyehatan lingkungan melalui kegiatan peningkatan sarana sanitasi, air bersih dan sanitasi dasar telah terealisasi sebanyak 7200% atau 72 unit.

3.1.3.3 Peranan Perempuan dan Kesejahteraan Anak

Bidang peranan perempuan dan kesejahteraan anak meliputi 3 (tiga) program utama yaitu : Penguatan Kelembagaan, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Rincian realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dari masing-masing program utama tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3 - 29
Realisasi Pelaksanaan Program Penguatan Kelembagaan

No	Program / Kegiatan	Sat	Rencana Induk	Realisasi tahun 2005-2006				Program 2007	2005 -2007	
				APBN	Non APBN	Total	Capaian		Total	Capaian
1	Revitalisasi Kelembagaan	Unit	51	2		2	3.9%	1	3	5.9%
2	Pengarusutamaan Gender	Paket Pertemuan	51	2		2	3.9%	1	3	5.9%
3	Assessment data dan kebutuhan khusus perempuan	Survey	17	4		4	23.5%	1	5	29.4%
4	Rehabilitasi psikologis & peningkatan keterampilan perempuan	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%
5	Beasiswa bagi ulama perempuan, pelatihan dan kursus singkat bagi pemimpin perempuan	Paket	1					1	1	100.0%
6	Sosialisasi garapan kepada masyarakat desa	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%
7	Community volunteer training bagi remaja desa	Paket	1							

Sumber : Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan, Mei 2007

Berdasarkan tabel diatas terlihat tiga kegiatan utama dalam proses pengautan kelembagaan pasca tsunami yaitu rehabilitasi psikologis dan peningkatan keterampilan

perempuan, kegiatan beasiswa bagi ulama perempuan serta sosialisasi garapan kepada masyarakat desa yang masing-masing sudah terealisasi mencapai 100%.

2. Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan mempunyai memiliki beberapa kegiatan yang berkenan dengan fasilitasi program, workshop, pemberdayaan ekonomi, sosial dan hukum bagi perempuan, pelatihan dan penyediaan sarana publik bagi kaum perempuan dan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 - 30
Realisasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan

No	Program / Kegiatan	Sat	Renc. Induk	Realisasi tahun 2005-2006				Prog. 2007	2005 -2007	
				Apbn	Non apbn	Total	Capaian		Total	Capaian
1	Fasilitasi <i>Woman Crisis Center</i>	Unit	51	10		10	19.6%		10	19.6%
2	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan	Kelompok	901	10		10	1.1%	13	23	2.6%
3	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Kelompok	850	1.800		1.800	211.8%	3.500	5.300	623.5%
4	Dukungan Hukum untuk Perempuan	Kasus	17	118		118	694.1%	100	218	1282.4%
5	Training life skill dan vocational skill untuk perempuan	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%
6	Bantuan pada kelompok pengajian	Paket	1	2.100		2.100			2.100	
7	Bantuan untuk masyarakat dengan kompetensi	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%
8	Penyediaan sarana tempat perempuan melakukan kegiatan	Unit	50	49		49	98.0%		49	98.0%
9	Workshop gugus anti trafficking	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%
10	Workshop judicial watch networking	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%

Sumber : Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan, Mei 2007

Berdasarkan tabel diatas terlihat kegiatan dukungan hukum untuk perempuan dalam rangka perlindungan terhadap perempuan pasca bencana tsunami merupakan kegiatan prioritas dengan reaalisasi mencapai 1.282% dari rencana induk. Disamping itu juga terdapat program yang terealisasi 100% yaitu training life skill dan vocational skill untuk perempuan, bantuan untuk masyarakat dengan kompetensi, workshop gugus anti trafficking, dan workshop judicial watch networking.

3. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi diarahkan pada kegiatan-kegiatan pola peningkatan perlindungan anak korban tsunami berupa fasilitasi dan bantuan langsung. Rincian kegiatannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 - 31
Realisasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

No	Program / Kegiatan	Satuan	Rencana Induk	Realisasi tahun 2005-2006				Program 2007	2005 -2007	
				APBN	Non APBN	Total	Capaian		Total	Capaian
1	Fasilitasi <i>Children Center dan Kid Conselling</i>	Unit	34	10		10	29.4%		10	29.4%
2	Reunifikasi Keluarga	Anak	6.800				0.0%	120	120	1.8%
3	Dukungan untuk mendapatkan akte kelahiran gratis	Anak		38.386		38.386		34.837	73.223	
4	Dukungan untuk pengembangan pola asuh anak									
5	Pedoman dan KIE	Paket	1				0.0%	1	1	100.0%
6	TOT bagi Pola Asuh Anak	Diklat	1				0.0%	1	1	100.0%
7	Qanun perlindungan anak (akte kelahiran bebas)	Paket	1				0.0%	1	1	100.0%
8	Penyelenggaraan kongres anak	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%
9	Monitoring dan evaluasi untuk kegiatan Satker	Paket	4	1		1	25.0%	1	2	50.0%

Sumber : Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan BRR, 2007

Berdasarkan tabel berikut terlihat kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, mengkonsentrasikan pada rehabilitasi psikologis anak dan keluarga pasca bencana serta kelengkapan kebutuhan administrasi kependudukan. Hampir seluruh program telah mencapai target realisasi yang telah ditetapkan oleh rencana induk seperti TOT pola asuh anak, qanun perlindungan anak, penyelenggaraan kongres anak, dan pedoman dan KIE (pencapaian 100%). Namun demikian, terdapat beberapa program yang realisasinya di bawah 100% yaitu reunifikasi keluarga, fasilitasi *children center and kid conselling*.

3.1.3.4 Keluarga Berencana

Program Pelayanan Keluarga Berencana (KB) menitikberatkan pada program pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan gizi serta pengadaan peralatan/perlengkapan operasional. Hampir seluruh program telah terealisasi pada periode tahun 2005-2006. dari keseluruhan program yang telah ditetapkan dalam rencana induk, hanya 2 program yang belum terealisasi penuh sampai dengan tahun 2007 yaitu program perlengkapan sarana kantor dan pengadaan kendaraan roda 4 yang masing-masing pencapaiannya sebesar 33.3%. Secara terperinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3 - 32
Realisasi Pelaksanaan Program Pelayanan Keluarga Berencana

No	Program / Kegiatan	Sat	Renc. Induk	Realisasi tahun 2005-2006				Prog. 2007	2005 -2007	
				Apbn	Non apbn	Total	Capaian		Total	Capaian
1	Pendidikan dan pelatihan masyarakat	Paket	190	190		190	100.0%		190	100.0%
2	Penyuluhan dan penyebaran informasi	Paket	190	190		190	100.0%		190	100.0%

No	Program / Kegiatan	Sat	Renc. Induk	Realisasi tahun 2005-2006				Prog. 2007	2005 -2007	
				Apbn	Non apbn	Total	Capaian		Total	Capaian
3	Pelayanan kesehatan/perbaikan gizi ibu/anak dan kb	Paket	190	190		190	100.0%		190	100.0%
4	Pengadaan perlengkapan sarana gedung	Paket	3	1		1	33.3%		1	33.3%
5	Pengadaan kendaraan bermotor roda 2	Unit	271	271		271	100.0%		271	100.0%
6	Pengadaan kendaraan bermotor roda-4/roda-6/roda-10	Unit	3	1		1	33.3%		1	33.3%

Sumber : Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan BRR, 2007

3.1.3.5 Agama

Program bidang dalam bidang agama terdapat empat program utama yang meliputi program peningkatan pelayanan kehidupan beragama, pengembangan nilai-nilai keagamaan, peningkatan pendidikan agama dan keagamaan, peningkatan sarana dan prasarana gedung aparatur negara. Secara rinci realisasi masing-masing program utama dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama difokuskan pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana tempat ibadah yang rinciannya dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 - 33
Realisasi Pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

No	Program / Kegiatan	Satuan	Rencana induk	Realisasi tahun 2005-2006				Program 2007	2005 -2007	
				APBN	Non APBN	Total	Capaian		Total	Capaian
1	Terbangunnya kembali tempat ibadah									
	Masjid	Unit	1167	620	50	670	57%	54	724	62%
	Menasah**	Unit	1062	455	16	471	44%	47	518	48%
	Vihara	Unit	4	2	0	0	0%	2	2	50%
	Gereja	Unit	1943	337	0	337	17%	141	478	25%
2	Terbangunnya kembali KUA	Unit	68	56	0	56	82%	25	81	119%
3	Pengadaan buku nikah	exp.	30000	0	0	0	0	0	0	0%

Sumber: Kedeputian Agama Sosial Budaya Kemasyarakatan, Juli 2007

Berdasarkan tabel diatas terlihat pembangunan kembali KUA yang direncanakan dalam rencana induk sebanyak 68 buah, sementara kebutuhan ril sebanyak 143 unit. Pada tahun 2005-2006 telah terealisasi pembangunannya sebanyak 56 unit dan tambahan sebanyak 25 unit pada tahun 2007 sehingga total KUA terbangun kembali sebanyak 81 KUA. Kelebihan ini melewati rencana induk karena pertimbangan bertambahnya kecamatan pada wilayah-wilayah pemekaran serta pembangunan kembali KUA yang terbakar di masa konflik. Untuk pengadaan buku nikah yang direncanakan sejumlah 30.000 eksemplar dalam rencana induk tidak dilaksanakan oleh BRR karena pengadaannya dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama.

2. Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan

Program pengembangan nilai-nilai keagamaan pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi diprioritaskan pada kegiatan peningkatan kegiatan keagamaan dan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 - 34
Realisasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan

No	Program / Kegiatan	Satuan	Rencana induk	Realisasi tahun 2005-2006				Program 2007	2005 -2007	
				APBN	Non APBN	Total	Capaian		Total	Capaian
1	Kegiatan rehabilitasi mental dan spiritual	Pkt	589	99		99		5	104	30%
2	Bantuan guru pengajian, imam dan da'i	Org	0	2230		2230			2230	100%
3	Beasiswa Mahasiswa, Siswa dan Santri Korban Tsunami	Org	0	7.900		7.900			7.900	100%

Sumber: Kedeputian Agama Sosial Budaya Kemasyarakatan BRR, Juli 2007

Berdasarkan tabel diatas terlihat kegiatan bantuan guru pengajian, imam dan da'i serta beasiswa kepada mahasiswa dan santri korban bencana merupakan kegiatan yang tidak ada dalam rencana induk tetapi menjadi prioritas kegiatan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini merupakan kegiatan sebagai hasil akomodasi terhadap kebutuhan masyarakat Aceh yang mayoritas memeluk agama islam.

Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan meliputi pelatihan kader-kader agama melalui pelatihan singkat 3 hari dan pembukaan kelas Studi Purna Ulama selama 3 bulan, pembinaan dan pendampingan penulisan buku bagi ulama/santri dayah tradisional, penelitian keagamaan dan bantuan lembaga pendidikan agama. Sumber pembiayaan terutama berasal dari APBN, namun pada beberapa kegiatan juga didanai dari sumber non APBN seperti bantuan pembangunan dayah sebanyak 7 unit pada tahun 2005-2006. Realisasi pelatihan dan pembinaan seperti pembinaan imam mesjid, remaja mesjid, majelis taklim, guru TPA, kaderisasi da'i, tajhiz mayat, petugas baitul mal, dan lain-lain yang telah dilatih sebanyak 585 orang pada tahun 2005-2006.

Gambar 3 - 15
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Mesjid di Aceh Singkil



Sumber : Dokumentasi P3B-Bappenas

Kegiatan pembangunan mesjid raya An-Nur ini masih dalam tahap pembangunan fisik. Lokasinya berada di pusat kota Singkil. Sumber pembiayaan pembangunan sarana ibadah ini berasal dari DIPA BRR, namun untuk penyelesaian pembangunannya masih membutuhkan dana sebesar Rp 1 milyar yang bersumber dari APBD (*Kunjungan lapangan P3B-Bappenas, 2007*).

3. Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Selanjutnya tahun 2007 telah dilakukan beberapa realisasi seperti pembangunan asrama santri, bantuan pembangunan gedung dan pengadaan fasilitas agama, kegiatan magang dan kegiatan lainnya. Realisasi program pada periode 2005-2006 dan sampai dengan tahun 2007 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3 - 35
Realisasi Pelaksanaan Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan

No	Program / Kegiatan	Satuan	Rencana induk	Realisasi tahun 2005-2006				Program 2007	2005 -2007	
				APBN	Non APBN	Total	Capaian		Total	Capaian
1	Pembinaan/pelatihan imam Masjid, khatib, da'i, santri, dan lain-lain	Pkt	154	68		68			68	44%
2	Penelitian Keagamaan	Judul		8		8			8	
3	Bantuan Koperasi Dayah	Pkt		45		45			45	
4	Penempatan/Bantuan Guru dan Tenaga Dai	Org		3.755		3.755			3.755	
5	Bantuan Pembangunan Dayah	Unit		148	7	155		30	185	
6	Bantuan Pembangunan Balai Pengajian	Unit		51		51		64	115	
7	Pembukaan Kelas Studi Purna Ulama	Akt		2		2		1	1	
8	Pendidikan Madang pengajar dayah/santri	Akt		1		1		1	1	
9	Pembinaan dan pendampingan penulisan bagi buku ulama/santri	Pkt		3		3		2	2	

Sumber: Kedeputan Agama Sosial Budaya Kemasyarakatan BRR, Juli 2007

Berdasarkan tabel diatas terlihat dari 9 kegiatan utama dalam program peningkatan pendidikan agama dan keagamaan, hanya satu kegiatan yang ada dalam rencana induk yaitu pembinaan/pelatihan imam majid, khatib, dai dan santri. Sedangkan delapan kegiatan lainnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang muncul berdasarkan kondisi lapangan pasca tsunami.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Aparatur Negara

Program peningkatan sarana dan prasarana gedung aparaturnegara dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami diprioritaskan pada pembanguna fisik sarana kantor keagamaan, rinciannnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 - 36
Realisasi Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung
Aparatur Negara

No	Program / Kegiatan	Satuan	Rencana Induk	Realisasi tahun 2005-2006				Program 2007	2005 -2007	
				APBN	Non APBN	Total	Capaian		Total	Capaian
1	Gedung Kanwil Depag Propinsi NAD	Unit	1				0%	0		0%
2	Gedung Kandepag Kab./kota	Unit	7	6		6	90%	2	8	110%
3	Gedung Dinas Syariat propinsi dan gedung Dinas Syariat Kab./Kota	Unit	4	4		4	100%	1	5	110%
4	Gedung MPU propinsi dan gedung MPU kab./kota	Unit	4	5		5	110%		5	110%
5	Gedung Observasi Hilal*	Unit	1	1		1	100%		1	100%
6	Asrama Haji	Unit	1	1		1	100%		1	100%
7	Gedung Baitul Mal	Unit						5	5	
8	Mobil operasional haji dan ambulance	Unit						3	3	
9	Bangunan lain (rumah dinas dan Aula)	Unit	4					2	2	50%

*Catatan : *) Gedung dan segala peralatan observasi direncanakan selesai seluruhnya pada tahun 2008*

Berdasarkan tabel diatas terlihat secara umum dapat terlaksana sampai tahun 2007, namun terdapat tiga program yang tidak terealisasi yaitu pembangunan kantor Departemen Agama, pembangunan gedung baitul mal, dan pengadaan operasional haji dan ambulance.

3.1.3.6 Sosial

Program Rehabilitasi Rekonstruksi untuk Sosial dalam Rencana induk ada 5 (lima) kelompok, yaitu: Bantuan dan jaminan sosial; Pelayanan dan rehabilitasi sosial; Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya; Penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial; Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan sosial.

Program bantuan jaminan sosial sebagian besar telah dilaksanakan pada masa tanggap darurat, berupa bantuan kebutuhan pokok kepada pengungsi dikoordinir langsung oleh pemerintahan pusat. Selanjutnya pada program tahun 2007, masih dilakukan beberapa kegiatan untuk membantu para masyarakat pengungsi yang masih tinggal di lebih dari 300 hunian sementara (huntara).

3.1.3.7 Budaya

Rencana Induk Budaya meliputi 3 jenis program, yaitu pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman budaya dan pengelolaan budaya. Realisasi pelaksanaan Budaya sampai dengan tahun 2006 telah ditangani untuk seluruh kegiatan pada masing-masing program tersebut di atas. Sedangkan pada program tahun 2007 hanya menangani 3 jenis kegiatan, yaitu: Kegiatan penguatan kebanggaan dan ikatan sosial masyarakat Aceh, menyediakan hiburan kepada pengungsi, dan pembangunan gedung pusat dokumentasi dan informasi Aceh.

1. Program Pemulihan Kembali Jati Diri dan Asset Budaya Masyarakat

Program pemulihan kembali jati diri dan asset budaya masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi sarana budaya dalam rangka pemulihan kembali nilai-nilai dan dokjumen budaya Aceh yang hilang dan rusak akibat tsunami. Rincian pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 - 37
Realisasi Pelaksanaan Program Pemulihan kembali jati diri dan asset budaya masyarakat

No	Program / Kegiatan	Satuan	Rencana Induk	Realisasi tahun 2005-2006				Program 2007	2005 -2007	
				APBN	Non APBN	Total	Capaian		Total	Capaian
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung BKSNT dan Site BP3	Unit	3	2		2	67.00%	1	3	100%
2	Pendukung rehabilitasi bangunan bersejarah (Tjut Nyak Dhien dan Cut Meutia) dan sejumlah bangunan purbakala BCB yang rusak (20 buah di NAD dan 6 di Nias-Sumut)	Paket	26	10		10	38.46 %	10	20	77.00%
3	Rehabilitasi lingkungan, gedung, dan fasilitas Taman Budaya serta Museum Negeri NAD	Paket	6	2		2	33.33%	2	4	67.00%
4	Pemugaran dan konservasi objek budaza (Pustaka KunoTanoh Abee)	Paket	5	-		-	%	2	2	40.00%
5	Pembangunan Pusat Data dan Informasi Aceh (PDIA)									%
	- Penelusuran dan pengumpulan koleksi	Paket	4	-		-		-	-	%
	- Pembangunan gedung	Unit	2	-		-		1	1	50.00%
6	Pembuatan, penggandaan dan sosialisasi film dokumenter bencana alam gempa dan tsunami dari sisi budaya	Paket	1	-		-		-	-	%
7	Pengumpulan dokumentasi bencana kemanusiaan akibat tsunami	Paket	2	-		-		-	-	%
8	Penyusunan peta budaya	Paket	5	-		-	%	1	1	20.00%
9	Bantuan alat-alat seni	Paket	5	5		5	100%			
10	Reinventarisasi potensi budaya dan penyelamatan warisan budaya yang terkena bencana	Paket	2	-		-	%	1	1	50.00%
11	Pembuatan antologi puisi bertemakan kebangkitan budaya Aceh dari bencana	Paket	1	-		-	%	1	1	100%
12	Wawasan Budaya dalam pembangunan kembali wilayah bencana di Aceh dan Sumatera Utara									
	a. Workshop	Paket	2					-		%
	b. Sosialisasi	Paket	5					-		%
13	Membangun sistem ja ringan informasi kebudayaan	Paket	1					-		%
14	Menghimpun informasi kebudayaan	Paket	2					1	1	50.00%

No	Program / Kegiatan	Satuan	Rencana Induk	Realisasi tahun 2005-2006				Program 2007	2005 -2007	
				APBN	Non APBN	Total	Capaian		Total	Capaian
	(NAD dan Nias-Sumut)									

Sumber : Data Kedeputian Agama, Sosial dan Budaya, Mei 2007.

Berdasarkan tabel diatas terlihat dari 14 (Empat Belas) kegiatan yang ada, program dalam rangka mendukung pengembalian sejarah budaya masyarakat Aceh dan benda-benda purbakala menjadi prioritas dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami di provinsi NAD. Terdapat 5 (lima) kegiatan yang tidak terlaksana yaitu pembuatan, penggandaan dan sosialisasi film dokumenter bencana alam gempa dan tsunami dari sisi budaya, pengumpulan dokumentasi bencana kemanusiaan akibat tsunami, serta pengembangan wawasan budaya dalam pembangunan kembali wilayah bencana di Aceh dan Sumatera Utara.

2. Program Pembangunan Budaya dan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya

Program pembangunan budaya dan pengembangan nilai-nilai budaya mempunyai 6 (enam) kegiatan utama yang terdiri dari : revitalisasi meunasah, Pengadaan buku & seni budaya aceh, Bantuan alat & kegiatan seni sanggar, pembangunan taman bacaan gampong, pelatihan imeum mukim, & kepemimpinan, pembangunan gedung, dan makam, situs. Keenam kegiatan tersebut tersebar di 21 Kabupaten/Kota yang mengalami dampak bencana tsunami dan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 - 38
Realisasi Program Pembangunan Budaya dan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya

No	Kabupaten/kota	Revitalisasi meunasah	Pengadaan buku & seni budaya aceh	Bantuan alat & kegiatan seni Sanggar	Pembangunan taman bacaan gampong	Pelatihan imeum mukim, & kepemimpinan	Pembangunan gedung, makam, situs
1	Banda Aceh	3	840	21	3	0	5
2	Aceh Besar	7	1680	3	6	40	5
3	Sabang	1	280	1	1	12	1
4	Aceh Jaya	2	560	1	2	47	2
5	Pidie	2	560	5	3	49	2
6	Bireuen	3	560	6	2	69	2
7	Aceh Utara	3	840	6	3	11	6
8	Lhokseumawe	1	280	12	1	47	1
9	Aceh Tengah	1	1280	6	1	47	1
10	Bener Meriah		280		1	47	1
11	Gayo Lues		280		1	62	1
12	Aceh Timur	2	1120		3	48	4
13	Langsa	1	280	2	1	51	1
14	Aceh Tamiang	2	280	1	1	56	4
15	Aceh Barat	5	840	9	3	55	3
16	Nagan Raya	1	560		2	51	2
17	Abdya	1	560	2	2	55	2
18	Simeulue	4	280	1	1	2	2

No	Kabupaten/kota	Revitalisasi meunasah	Pengadaan buku & seni budaya aceh	Bantuan alat & kegiatan seni Sanggar	Pembangunan taman bacaan gampong	Pelatihan imeum mukim, & kepemimpinan	Pembangunan gedung, makam, situs
19	Aceh Selatan	2	280	7	3	56	3
20	Aceh Singkil		280	2	1	42	1
21	Aceh Tenggara		280	1	1	68	1
JUMLAH		42	12200	103	42	915	50

Sumber : Data Kedeputian Agama, Sosial dan Budaya., Mei 2007.

Berdasarkan diatas terlihat kegiatan pengadaan buku & seni budaya Aceh merupakan kegiatan yang diprioritaskan dalam program pengembangan nilai-nilai budaya Aceh selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami.

Pelaksanaan program dan kegiatan sosial untuk Kependudukan dan Keluarga Berencana, BRR tidak lagi melaksanakan programnya karena program pendataan penduduk sudah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).

3.1.3.8 Pemuda dan Olahraga

Dalam bidang pemuda dan olahraga program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda, program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, dan program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Secara umum realisasi pelaksanaan reahabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami dapatdilihat pada tabel berikut :

Rencana Induk program dan kegiatan Pemuda dan Olahraga yang tertuang memuat tentang beberapa kegiatan yang meliputi program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda; Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga dan program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, dengan berbagai kegiatan yang merupakan turunan dari program tersebut.

Tabel 3 - 39
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Pemuda dan Olah Raga

No	Program / Kegiatan	Satuan	Rencana induk	Realisasi tahun 2005-2006				Program 2007	2005 -2007	
				APBN	Non APBN	Total	Capaian		Total	Capaian
A	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda									
1	Rencana Kegiatan (Adm.) (Kab./Kota)	OB	300	21		21	7%	60	81	27%
2	Penumbuhan KUPP	kelompok	125	115		115	92%	25	140	112%
3	Kelompok Pemuda sebaya	kelompok	40	83		83	208%	8	91	228%
4	Pengembangan Sentra Pemberdayaan pemuda	lokasi	5	1		1	20%	1	2	40%
5	Pertukaran Pemuda antar Propinsi	orang	160					32	32	20%
6	Monitoring dan Evaluasi life skills	kelompok	250					50	50	20%
7	Latihan kewirausahaan Pemuda di Kabupaten/Kota	orang	300					60	60	20%
8	Bantuan untuk lembaga kepemudaan	lembaga	25					5	5	20%

No	Program / Kegiatan	Satuan	Rencana induk	Realisasi tahun 2005-2006				Program 2007	2005 -2007	
				APBN	Non APBN	Total	Capaian		Total	Capaian
9	Pelatihan/seleksi SP3	orang	100					20	20	20%
10	Peningkatan Sumber daya SP3	orang	275					55	55	20%
11	Sosialisasi dan sinkronisasi SP3	kegiatan	10					2	2	20%
12	Monitoring dan Evaluasi SP3	kegiatan	5					1	1	20%
B	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga									
1	Peningkatan mutu SDM keolahragaan daerah	orang	300	326		326	109%	60	386	129%
2	Inventarisasi/Pendataan OR daerah	kegiatan	5	1		1	20%	1	2	40%
3	Pembinaan Akademik Atlet Pelajar (PPLP)	kegiatan	5					1	1	20%
4	Festival OR Tradisional bagi masyarakat	orang	100	420		420	420%	20	440	440%
5	Kompetisi antar klub OR Pelajar	orang	1125					225	225	20%
6	Pemberdayaan Diklat OR Pelajar berbakat	orang	125					25	25	20%
7	Pemberdayaan Diklat OR Mahasiswa berbakat	orang	50					10	10	20%
8	Kompetisi antar PPLP dan PPLS	orang	330					66	66	20%
9	Pekan OR Pelajar	orang	550					110	110	20%
10	Pemberdayaan organisasi OR Pelajar dan ORMAS	kegiatan	5	5		5	100%	1	6	120%
11	Training Camp Atlet Pelajar	orang	400					80	80	20%
12	Pekan OR Pelajar Cacat	orang	175					35	35	20%
13	Pekan OR Pedesaan	kec./desa	15					3	3	20%
14	Peringatan HAORNAS	21 kab./kota	105					21	21	20%
15	Dukungan admn. Pengelolaan Kegiatan (Kab./Kota)	kegiatan	5	21		21	420%	1	22	440%
C	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga									
1	Bantuan Peralatan Olahraga	paket	5	91		91	1820%	1	92	1840%
2	Inventarisasi Organisasi dan Potensi Olahraga	kab./kota	30	1		1	3%	6	7	23%
3	Konsolidasi dengan Stake Holder keolahragaan	organisasi	90					18	18	20%
4	Menyusun model increatment dan strategi perlakuan	kegiatan	5					1	1	20%
5	TOT instruktur dari masyarakat setempat	orang	300					60	60	20%

Sumber : Data Kedeputian Agama, Sosial dan Budaya, Juli 2007

Berdasarkan tabel diatas terlihat pada program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda kegiatan Kelompok Pemuda sebaya merupakan prioritas kegiatan yang ditandai dengan realisasi sebesar 228 % , dalam program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga terlihat kegiatan Festival Olahraga Tradisional bagi masyarakat menjadi kegiatan prioritas dengan reaalisasi sebesar 440%. Sedangkan pada program program peningkatan sarana dan

prasarana olahraga kegiatan bantuan peralatan olahraga merupakan kegiatan utama dengan realisasi sebesar 184%.

3.1.4 Bidang Pemulihan Perekonomian

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Bidang Perekonomian meliputi sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM serta tenaga kerja. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi khususnya aspek fisik sarana dan prasarana publik adalah pada sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, dan perdagangan. Sedangkan pada sektor perindustrian, koperasi & UKM, dan tenaga kerja lebih menekankan pemulihan pada aspek pelatihan, bantuan modal kerja dan pemberdayaan baik untuk individu dan rumah tangga.

3.1.4.1 Perikanan

Hingga tahun 2006 BRR telah merehabilitasi tambak yang rusak seluas 13.403 Ha dan seluas 654 Ha di tahun 2007, atau capaian kumulatif per Bulan Oktober 2007 sebesar 39 persen dari yang ditetapkan dalam rencana induk seluas 36.597 Ha.

Untuk perikanan tangkap (nelayan), hingga tahun 2006 BRR telah menyediakan sejumlah 633 unit Kapal motor kayu ukuran (<3,5 – 8 GT), merehabilitasi kapal boat sejumlah 50 unit dan pengadaan alat tangkap sejumlah 89 paket. Pada tahun 2007 telah menyediakan pengadaan kapal motor sebanyak 66 unit, Hatchery skala rumah tangga sebanyak 19 unit, dan Keramba Jaring Apung sebanyak 23 unit. Atau capaian kumulatif per Bulan Oktober 2007 sebesar 16 persen dari yang ditetapkan dalam rencana induk yaitu jumlah kapal motor kayu adalah 21.455 unit dan 16.012 unit alat tangkap.

Prasarana Pelabuhan Perikanan (PPI/PPP) sampai dengan tahun 2006 telah berhasil direhab sejumlah 8 unit dan telah dibentuk 216 UPI (Unit Pengolahan Ikan) atau telah melebihi target yang ditetapkan dalam rencana induk sebanyak 1 unit.

Tabel 3 - 40
Realisasi Pelaksanaan TA 2006 dan Program TA 2007
Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias
Sub Bidang Perikanan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAAN		TOTAL	CAPAAN
1	Rehabilitasi Tambak	Ha	36.597	5.520	7.883*	13.403	36,62%	1.388	14.791	40,42%
2	Bantuan Agroinput	Ha	-	5.304	-	5.304	-	1.388	6.692	-
3	Pengemb. BBIP Simeulue	Pkt	-	-	-	-	-	1	1	-
4	Hatchery skala rumah tangga	Unit	-	12	-	12	-	41	53	-
5	Keramba Jaring Apung	Unit	-	16	-	16	-	48	64	-
6	Unit/Sentra Pengolahan Ikan	Unit	-	216	-	216	-	1	217	-
7	Bagan Apung	Unit	-	50	-	50	-	-	-	-
8	Kapal Motor	Unit	21.455	633	2.748	3.381	15,76%	139	3.520	16,41%
9	Pelabuhan Perikanan Lampulo	Unit	1	-	-	-	-	1	1	-

Sumber : Evaluasi Paruh Waktu BRR NAD-Nias.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Bapel BRR tidak semuanya mengacu kepada rencana induk. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang berdasarkan pertimbangan lapangan perlu dan dibutuhkan untuk dilaksanakan. Dalam sub bidang pemulihan perikanan dan kelautan program dan kegiatan tersebut adalah Bantuan Agroinput, Pengembangan BBIP Simeulue, Hatchery skala rumah tangga, Keramba Jaring Apung, Sentra Pengolahan Ikan dan Bagan Apung.

Untuk bantuan agroinput (pupuk, benih ikan, obat-obatan, pakan ikan dan fasilitas produksi lainnya) hingga tahun 2006 telah melayani areal tambak yang telah berhasil direhabilitasi seluas 5.304 Ha. Sedangkan pada tahun 2007 telah terealisasi bantuan agroinput untuk areal seluas 654 Ha.

Hingga tahun 2006 telah terealisasi pengadaan Hatchery skala rumah tangga sebanyak 12 unit, rekonstruksi sentra pengelolaan ikan 1 unit, Keramba Jaring Apung sebanyak 16 unit, dan pengadaan kapal motor sebanyak 633 unit. Program pengembangan perikanan pada tahun 2007 adalah rehabilitasi tambak seluas 1.388 Ha, pengembangan BBIP Simeuleu 1 pkt, bantuan agroinput untuk 1.388 Ha, Hatchery skala rumah tangga sebanyak 41 unit, rekonstruksi sentra pengelolaan ikan 1 unit, Keramba Jaring Apung sebanyak 48 unit, dan pengadaan kapal motor sebanyak 139 unit. Per bulan Oktober telah terealisasi rehabilitasi tambak seluas 654 Ha, bantuan agroinput untuk 654 Ha, Hatchery skala rumah tangga sebanyak 19 unit, Keramba Jaring Apung sebanyak 23 unit, dan pengadaan kapal motor sebanyak 66 unit.

Berikut beberapa contoh terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang pemulihan perikanan yang dilaksanakan oleh Bapel BRR yang telah terealisasi per bulan Oktober 2007, yaitu:

1. Rekonstruksi PPI di Kec. Peudada, Kab. Bireun.

Ini merupakan pembangunan PPI terbesar dan termegah di Kab. Bireun dengan kelengkapan Cold Storage, Freezer, Tempat Pelelangan, Tempat pendaratan Ikan dan Pos polisi, Heli Pad, Lapangan Olah Raga, dan dilengkapi dengan Pertokoan dan pasar ikan (khususnya). Namun sejalan dengan waktu, infrastruktur jalan sudah mulai rusak dan belum diperbaiki kembali.

Gambar 4 - 16
Cold Storage dan Freezer
Pendaratan Pelelangan Ikan (PPI), Kec. Peudada,
Kab. Bireun



*Sumber : Kunjungan Lapangan Tim P3B
Bappenas, November 2007*

Gambar 3 - 17
Infrastruktur Jalan Sudah Mulai Rusak
Pendaratan Pelelangan Ikan (PPI), Kec. Peudada,
Kab. Bireun



Sumber : Kunjungan Lapangan Tim P3B
Bappenas, November 2007

Gambar 3 - 18
Tempat Pelelangan Ikan
Pendaratan Pelelangan Ikan (PPI), Kec. Peudada,
Kab. Bireun



Sumber : Kunjungan Lapangan Tim P3B
Bappenas, November 2007

PPI ini dibangun atas kerjasama Pemerintah Italia dengan Pemerintah Indonesia (BRR NAD-Nias), pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2007, pada areal seluas + 1 Ha, dengan letak yang sangat strategis dekat aliran sungai Peudada.

Rekonstruksi ini diharapkan dapat mengembangkan program yang dicanangkan oleh Pemda Kab.Bireun melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP). Sehingga partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan dana ekonomi produktif PEMP diharapkan akan meningkatkan taraf hidup.

2. Rekonstruksi PPI di Kecamatan Singkil, Kab. Aceh Singkil.

Pelaksana kegiatan ini adalah Satker BRR dan sebagian melalui dana DAK Kab. Aceh Singkil. Beberapa fasilitas yang sudah dibangun yaitu kantor operasional PPI, tempat pelelangan ikan dan tempat pendingin ikan. Sedangkan fasilitas dermaga dan GT belum dibangun.

Gambar 3 - 19
Pendaratan Pelelangan Ikan (PPI), Kab. Singkil



Sumber : Kunjungan Lapangan Tim P3B Bappenas,
November 2007

Sebagian besar yang sudah terbangun merupakan fasilitas darat sedangkan fasilitas laut belum terlaksana karena kebutuhan pendanaan yang sangat besar. Untuk pengembangan PPI Pelaksanaannya direncanakan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan akan diupayakan pula pendanaannya melalui DIPA BRR.

Gambar 3 - 20
Pendaratan Pelelangan Ikan (PPI), Kab. Singkil



Sumber : Kunjungan Lapangan Tim P3B Bappenas,
November 2007

3.1.4.2 Pertanian

3.1.4.2.1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Hingga tahun 2006 telah direhabilitasi Lahan pertanian (Sawah dan Tegalan) seluas 85.132 Ha atau sudah melebihi target yang tercantum dalam rencana induk seluas 47.675 Ha (capaian terhadap rencana induk sebesar 178 persen). Adapun pada tahun 2007 direncanakan rehabilitasi lahan pertanian (sawah dan tegalan) seluas 9.338 Ha sehingga diperkirakan pada akhir tahun 2007 realisasi pelaksanaan terhadap rencana induk mencapai 198 persen.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Bapel BRR sub bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tidak semuanya mengacu kepada rencana induk. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang berdasarkan pertimbangan lapangan perlu dan dibutuhkan untuk dilaksanakan. Dalam sub bidang pemulihan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura program dan kegiatan tersebut adalah Penghijauan pekarangan, Lining

jaringan irigasi, Bantuan material jalan usaha tani, Balai Benih (BBU dan BBI), Alsintan, Pengadaan Gudang Alsintan, Gudang dan mesin RMU, Balai Pertemuan Petani.

Hingga tahun 2006 telah terealisasi pengadaan Penghijauan pekarangan seluas 26.000 batang, Lining jaringan irigasi sepanjang 105 Km, Bantuan material jalan usaha tani sepanjang 6200 Km, Balai Benih (BBU dan BBI) sebanyak 3 unit, traktor, mesin dan peralatan pertanian berupa traktor roda 4 (4 WD) = 46 unit, Hand traktor = 366 unit, Power Tresher = 975 unit, dan Hand sprayer = 1.395 unit, serta alat pertanian kecil sebanyak 33.734 unit, Alsintan sebanyak 12.700 unit, Pengadaan Gudang Alsintan sebanyak 1 unit, Gudang dan mesin RMU sebanyak 82 unit, dan Balai Pertemuan Petani sebanyak 142 unit.

Tabel 3 - 41
Realisasi Pelaksanaan TA 2006 dan Program TA 2007
Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias
Tanaman Pangan dan Horticultura

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005 - 2006				PROGRAM 2007	2005 - 2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Rehabilitasi lahan pertanian	Ha	47.675	41.912	43.220*	85.132	178%	9.338	94.470	198%
A	Lahan Sawah	Ha	23.330	26.677	-	26.667	-	9.289	35.966	-
	- Rehabilitasi sawah	Ha	-	11.886	-	11.886	-	2.000	13.886	-
	- Pengembangan Sawah/Agroinput	Ha	-	13.015	-	13.015	-	6.144	19.159	-
	- Pencetakan sawah baru	Ha	-	1.776	-	1.776	-	1.145	2.921	-
B	Lahan kering/tegalan	Ha	24.345	15.235	-	15.235	-	49	15.284	-
	- Rehabilitasi tegalan	Ha	-	2.200	-	2.200	-		2.200	-
	- Pengembangan tegalan	Ha	-	13.035	-	13.035	-	49	13.084	-
2	Penghijauan pekarangan	Batang	-	26.000	-	26.000	-	-	26.000	-
3	Lining jaringan irigasi	Km	-	0.896	103	105	-	31	136	-
4	Bantuan material jalan usaha tani	Km	-	6.200	-	6.200	-	-	6.200	-
5	Balai Benih (BBU dan BBI)	Unit	-	3	-	3	-	14	17	-
6	Alsintan	Unit	-	3.234	9.467	12.701	-		12.701	-
7	Pengadaan Gudang Alsintan	Unit	-	1	-	1	-	22	23	-
8	Gudang dan mesin RMU	Unit	-	82	-	82	-	2	84	-
9	Balai Pertemuan Petani	Unit	-	142	-	142	-	12	154	-

Sumber : Evaluasi Paruh Waktu BRR NAD-Nias

Sedangkan pada tahun 2007 Program pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah pembangunan lining irigasi 31 km; pembangunan Balai Benih Utama (BBU) dan Balai Benih Induk (BBI) sebanyak 14 unit; gudang Alsintan sebanyak 22 unit dan gedung Balai Pertemuan Petani sebanyak 12 unit dan penggilingan padi (Rice

Milling Unit) sebanyak 2 unit. Per 31 Okt tahun 2007 telah terealisasi rehabilitasi lahan pertanian seluas 4.401 Ha, pembangunan lining irigasi 15 km; pembangunan Balai Benih Utama (BBU) dan Balai Benih Induk (BBI) sebanyak 7 unit; gudang Alsintan sebanyak 10 unit dan gedung Balai Pertemuan Petani sebanyak 6 unit dan penggilingan padi (*Rice Milling Unit*) sebanyak 1 unit.

Berikut ini beberapa contoh terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang pemulihan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura oleh Bapel BRR yang telah terealisasi per bulan Oktober 2007, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wilayah

Gambar 3 - 21
Pengembangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Tani
Kec. Samalanga, Kab. Bireun



Sumber : Kunjungan Lapangan Tim P3B Bappenas, November 2007

Ini merupakan program BRR untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha bagi kelompok usaha tani pada beberapa wilayah di Aceh.

Kelompok tani SABENA di desa Namloh Blanggarang, Kecamatan Samalanga, kabupaten Bireun melalui program ini dibantu oleh BRR NAD-Nias untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian seluas 20 Ha, dengan jumlah petani sebanyak 71 orang.

Gambar 3 - 22
Pengembangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Tani
Kec. Ujong Blang Mesjid, Kab. Bireun



Sumber : Kunjungan Lapangan Tim P3B Bappenas, November 2007

Kelompok tani Selat Malaka di desa Ujong Blang Mesjid, kecamatan Kuala, kabupaten Bireun melalui program ini dibantu oleh BRR NAD-Nias untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian seluas 10 Ha, dengan jumlah petani sebanyak 55 orang.

3.1.4.3 Perkebunan

Hingga tahun 2006 telah direhabilitasi Lahan perkebunan seluas 6.703 Ha dari target yang direncanakan dalam rencana induk seluas 102.451 Ha, atau baru sebesar 6,54 persen. Rencana program di tahun 2007 adalah rehabilitasi areal perkebunan seluas 10.508 Ha sehingga di akhir tahun 2007 diharapkan realisasi pelaksanaan terhadap rencana induk mencapai 16,8 persen.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Bapel BRR tidak semuanya mengacu kepada rencana induk. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang berdasarkan pertimbangan lapangan perlu dan dibutuhkan untuk dilaksanakan. Dalam sub bidang pemulihan perkebunan program dan kegiatan tersebut adalah Pembangunan Jalan Produksi, Pengadaan Bibit Kelapa Sawit, bangunan kantor Layanan public, Diklat Fasilitator Daerah, dan Penyuluh Pendamping.

Hingga tahun 2006 telah terealisasi Pembangunan Jalan Produksi sepanjang 1.386 Km, Pengadaan Bibit Kelapa Sawit sebanyak 685 ribu batang, bangunan kantor Layanan public sebanyak 10 unit, Diklat Fasilitator Daerah sebanyak 90 orang, dan Penyuluh Pendamping sebanyak 275 orang. Sedangkan pada tahun 2007 diprogramkan Rehabilitasi perkebunan seluas 10.508 ha. Untuk penyediaan bibit kelapa sawit, pada tahun 2007 diprogramkan sebesar 1,211,500 batang. Per 31 Okt tahun 2007 telah terealisasi rehabilitasi perkebunan seluas 4.952 Ha, pengadaan bibit kelapa sawit sebanyak 570.980 batang, diklat fasilitator daerah untuk 78 orang dan penambahan penyuluh pendamping sebanyak 52 orang.

Tabel 3 - 42
Realisasi Pelaksanaan TA 2006 dan Program TA 2007
Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias
Sub Bidang Perkebunan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Rehabilitasi Perkebunan	Ha	102.461	6.703	-	6.703	6,54%	10.508	17.211	16,8%
2	Pembangunan Jalan Produksi	M	-	1.386	-	1.386	-	-	1	-
3	Pengadaan Bibit Kelapa Sawit	Batang	-	685.000	-	685.000	-	1.211.500	1.896.500	-
4	bangunan kantor Layanan public	Unit	-	10	-	10	-	-	10	-
5	Diklat Fasilitator Daerah	Orang	-	90	-	90	-	165	255	-
6	Penyuluh Pendamping	Orang	-	275	-	275	-	110	385	-

Sumber : Evaluasi Paruh Waktu BRR NAD-Nias

Berikut beberapa contoh terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang perkebunan yang dilaksanakan oleh Bapel BRR yang telah terealisasi per bulan Oktober 2007, yaitu:

1. Penanaman bibit Kelapa Sawit di Kota Calang, Kab. Aceh Jaya

Penanaman bibit kelapa sawit sebanyak 1000 buah ini merupakan salah satu program bantuan dari BRR NAD-Nias dalam rangka membantu masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi rakyat pada awal tahun 2007. Penanaman ini bertempat pada lintasan jalan Banda Aceh-Calang-Meulaboh. Tepatnya berada di kec. Krueng Sabee, Kab Aceh Jaya. Namun kelanjutan dari penanaman ini telah terlantar pemeliharannya setelah 6 bulan penanamannya. Sehingga masyarakat beralih kepada penanaman tanaman alternatif yaitu penanaman cabai hijau, karena dinilai akan lebih produktif dalam waktu cepat. Penanaman bibit ini dilaksanakan pada areal dengan luas + 3 Ha.

Gambar 3 - 23
Bibit Kelapa Sawit, Kota Calang, Kab. Aceh Jaya



Sumber : Kunjungan Lapangan Tim P3B Bappenas, November 2007

Gambar 3 - 24
Penanaman Cabai Hijau, Kota Calang, Kab. Aceh Jaya



Sumber : Kunjungan Lapangan Tim P3B Bappenas, November 2007

3.1.4.4 Peternakan

Hingga tahun 2006 Bapel BRR telah melakukan restocking ternak sebesar 26.682 ekor yang terdiri dari ternak besar, kecil dan unggas, atau capaian kumulatif sebesar 1 persen dari target rencana induk sebesar 1,9 juta ekor. Pada tahun 2007 diprogramkan restocking

ternak sebanyak 5.900 ekor. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara data kebutuhan dalam rencana induk dengan data Dinas Peternakan. Berdasarkan data dari Departemen Pertanian (Sub Dinas Peternakan) menyebutkan bahwa ternak yang hilang akibat tsunami adalah sapi sejumlah 40.000 ekor, kerbau sejumlah 39.000 ekor, kambing dan domba sejumlah 65.000 ekor, serta unggas sejumlah 1.800.000 ekor.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Bapel BRR tidak semuanya mengacu kepada rencana induk. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang berdasarkan pertimbangan lapangan perlu dan dibutuhkan untuk dilaksanakan. Dalam sub bidang Peternakan program dan kegiatan tersebut adalah Pengendalian penyakit hewan menular, Pembangunan Poskeswan, Pelayanan Inseminasi Buatan, Pembangunan pasar hewan, Tempat Pemotongan Hewan, Tempat Penjualan daging, Peningkatan laboratorium, Diklat inseminator, Rehabilitasi kandang ternak, Pengembangan kebun HMT, Tempat penempatan ternak, dan Pengembangan Kawasan Peternakan.

Hingga tahun 2006 telah terealisasi Pengendalian penyakit hewan menular untuk 25.650 ekor, Pembangunan Poskeswan sejumlah 9 unit, Pelayanan Inseminasi Buatan sebanyak 33.000 Dosis, Pembangunan pasar hewan sejumlah 1 unit, Tempat Pemotongan Hewan sejumlah 4 unit, Tempat Penjualan daging 6 unit, Peningkatan laboratorium sebanyak 1 paket, Diklat inseminator untuk 42 orang, Rehabilitasi kandang ternak seluas 27.344 meter persegi. Adapun kegiatan Pengembangan kebun HMT, Tempat penempatan ternak, dan Pengembangan Kawasan Peternakan baru dilaksanakan di tahun 2007.

Tabel 3 - 43
Realisasi Pelaksanaan TA 2006 dan Program TA 2007
Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias
Sub Bidang Peternakan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Restocking ternak (besar, kecil, unggas)	Ekor	1.904.587	25.650	1.032	26.682	1%	5.935	32.617	2%
2	Pengendalian penyakit hewan menular	Ekor	-	25.650	-	25.650	-	5.935	31.895	-
3	Pembangunan Poskeswan	Unit	-	9	-	9	-	7	16	-
4	Pelayanan Inseminasi Buatan	Dosis	-	33.000	-	33.000	-	-	33.000	-
5	Pembangunan pasar hewan	Unit	-	1	-	1	-	1	2	-
6	Tempat Pemotongan Hewan	Unit	-	4	-	4	-	2	6	-
7	Tempat Penjualan daging	Unit	-	6	-	6	-	1	7	-
8	Peningkatan laboratorium	Paket	-	1	-	1	-	-	1	-
9	Diklat inseminator.	Orang	-	42	-	42	-	50	92	-
10	Rehabilitasi kandang ternak	m'	-	-	27.344	27.344	-	-	27.344	-
11	Pengembangan kebun HMT	Ha	-	-	-	-	-	70	70	-
12	Tempat penempatan ternak	Unit	-	-	-	-	-	2	2	-
13	Pengembangan Kawasan Peternakan	Kwsn	-	-	-	-	-	1	1	-

Pada tahun 2007 diprogramkan Restocking ternak sejumlah 5.935 ekor. Sehingga secara kumulatif sampai dengan akhir program tahun 2007 diharapkan Restocking ternak (besar, kecil dan unggas) sejumlah 32,814 ekor atau sekitar 2 persen dari Rencana Induk sebesar 1.904.587 ekor. Program pendukung pengembangan peternakan pada tahun 2007 adalah pembangunan Poskeswan 7 unit, pembangunan Pasar Hewan sebanyak 1 unit, Tempat Pemotongan Hewan sebanyak 2 unit, Tempat Penjualan Daging sebanyak 1 unit, pengembangan Kebun HMT sebesar 70 Ha dan Tempat Penempatan Ternak sebanyak 2 unit. Per 31 Okt tahun 2007 telah terealisasi Restocking ternak (BSRR, KCL, unggas) sejumlah 2.797 ekor, pembangunan Poskeswan 3 unit, Tempat Pemotongan Hewan sebanyak 1 unit, pengembangan Kebun HMT sebesar 33 Ha dan Tempat Penempatan Ternak sebanyak 1 unit.

3.1.4.5 Pengembangan Usaha

Sub bidang Pengembangan Usaha dibagi ke dalam 5 (lima) bagian, yaitu Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (UKM), Ketenagakerjaan dan Pariwisata.

3.1.4.5.1 Industri

Hingga tahun 2006 Bapel BRR telah merealisasikan pembangunan sarana prasarana pelabuhan seperti yang diamanatkan rencana induk yaitu pembangunan pelabuhan Malahayati sejumlah 1 unit, atau telah terealisasi 100 persen yang ditargetkan Rencana Induk. Sedangkan dari 6 unit Pilot Project Industri Garam rakyat baru terealisasi 1 unit dan direncanakan akan direalisasikan sebanyak 2 unit lagi di tahun 2007, sehingga pada akhir tahun 2007 diharapkan capaian terhadap rencana induk sebesar 50 persen.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Bapel BRR tidak semuanya mengacu kepada rencana induk. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang berdasarkan pertimbangan lapangan perlu dan dibutuhkan untuk dilaksanakan. Dalam sub bidang industri, program dan kegiatan tersebut adalah BLM Masyarakat Industri, Penyediaan Fasilitas Industri, Pengembangan Desa Batik Aceh, Pengembangan Industri oleh Dekranas, Bantuan pengembangan Ekonomi produktif, BLM Sentra dan Non Sentra Industri, dan BLM Modal LKM.

Pada tahun anggaran 2006 Bapel BRR telah merealisasikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) industri untuk 5.214 orang dan Penyediaan Fasilitas Industri sejumlah 105 unit. Sedangkan program dan kegiatan Pengembangan Desa Batik Aceh, Pengembangan Industri oleh Dekranas, Bantuan pengembangan Ekonomi produktif, BLM Sentra dan Non Sentra Industri, dan BLM Modal LKM diprogramkan di tahun 2007.

Tabel 3 - 44
Realisasi Pelaksanaan TA 2006 dan Program TA 2007
Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias
Sub Bidang Industri

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	BLM Masyarakat Industri	Org	-	5.214	-	5.214	-	-	5.214	-
2	Sarana-prasarana Pelabuhan Malahayati	Unit	1	1	-	1	100%	-	1	-
3	Pilot Project Industri Garam rakyat	Lokasi	6	1	-	1	17%	2	3	50%
4	Penyediaan Fasilitas Industri	Unit	-	-	105	105	-	-	105	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
5	Pengembangan Desa Batik Aceh	Pkt	-	-	-	-	-	4	4	-
6	Pengembangan Industri oleh Dekranas	Pkt	-	-	-	-	-	1	1	-
7	Bantuan pengembangan Ekonomi produktif	Kab.	-	-	-	-	-	4	4	-
8	BLM Sentra dan Non Sentra Industri	Paket	-	-	-	-	-	24	24	-
9	BLM Modal LKM	Paket	-	-	-	-	-	43	43	-

Sumber : *Evaluasi Paruh Waktu BRR NAD-Nias*

Pada tahun 2007 diprogramkan Kegiatan Pengembangan Desa Batik Aceh sebanyak 4 paket, Pengembangan industri oleh Dekranas sebanyak 1 paket, Bantuan pengembangan ekonomi produktif di 4 Kabupaten, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perajin Sentra dan Non Sentra industri sebanyak 24 paket, dan BLM Modal LKM sejumlah 43 paket. Per 31 Oktober tahun 2007 telah terealisasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perajin Sentra dan Non Sentra industri sebanyak 11 paket, BLM modal LKM 20 pkt, pilot Project industri garam rakyat di 1 lokasi, Program pendukung pengembangan industri antara lain pengembangan Desa Batik Aceh sebanyak 2 paket, dan Bantuan pengembangan ekonomi produktif telah terealisasi di 2 Kabupaten.

3.1.4.5.2 Perdagangan

Hingga tahun 2006 Bapel BRR telah merealisasikan Pembangunan/rehabilitasi pasar sebanyak 62 unit dari target 193 unit, atau dengan capaian sebesar 32 persen terhadap rencana induk. Rehabilitasi pasar telah mencapai 62 unit, terdiri diantaranya rehabilitasi pasar induk sejumlah 42 unit dan sisanya merupakan pasar grosir dan pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Dengan rincian sumber pembiayaan dari APBN sebesar 34 unit pasar dan Non APBN (Off Budget) sebesar 28 unit pasar. Untuk kota Banda Aceh, konsentrasi pasar pasca tsunami dialihkan ke pasar Lambaro yang masih terus dalam tahap pembangunan, yaitu pasar induk Lambaro yang merupakan bantuan dari JICs. Serta sedang dilakukan pembebasan lahan untuk perluasan pasar. Pada tahun 2007 diiprogramkan pembangunan pasar sejumlah 11 unit, sehingga diakhir tahun 2007 diharapkan dapat terealisasi 38 persen terhadap target yang ditetapkan dalam rencana induk.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Bapel BRR tidak semuanya mengacu kepada rencana induk. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang berdasarkan pertimbangan lapangan perlu dan dibutuhkan untuk dilaksanakan. Dalam sub bidang perdagangan, program dan kegiatan tersebut adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pedagang Pasar (Revolving), Alat dan Kemetrolagian, Pembangunan Halte Labuy, Pembangunan Pasar Labuy dan Pengadaan Cold Storage.

Pada tahun anggaran 2006 Bapel BRR telah merealisasikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pedagang Pasar (Revolving) untuk 12.639 Orang, Pengadaan Alat dan Kemetrolagian sejumlah 1 unit. Sedangkan Program dan Kegiatan Pembangunan Halte Labuy, Pembangunan Pasar Labuy dan Pengadaan Cold Storage diprogramkan di tahun 2007.

Tabel 3 - 45
Realisasi Pelaksanaan TA 2006 dan Program TA 2007
Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias
Sub Bidang Perdagangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1.	BLM Pedagang Pasar (Revolving)	Pkt/Org	-	894	11.745*	12.639	-	-	12.639	-
2.	Pembangunan/Rehab pasar	Unit	193	34	28	62	32%	11	73	38%
3	Alat dan Kemetrolagian	Pkt	-	1	-	1	-	-	1	-
4	Pembangunan Halte Labuy	Unit	-	-	-	-	-	3	3	-
5	Pembangunan Pasar Labuy	Unit	-	-	-	-	-	1	1	-
6	Pengadaan Cold Storage	Unit	-	-	-	-	-	1	1	-

Sumber : Evaluasi Paruh Waktu BRR NAD-Nias

Pada tahun 2007 diprogramkan pengadaan Alat dan Kemetrolagian sebanyak 1 unit, Pembangunan Halte Labuy sebanyak 3 unit, Pembangunan Pasar Labuy sejumlah 1 unit dan Pengadaan Cold Storage sebanyak 1 unit. Per 31 Oktober tahun 2007 berdasarkan catatan Tim Monev P3B Bappenas kegiatan tersebut telah terealisasi, sehingga realisasi target yang diharapkan dalam rencana induk dalam sub bidang perdagangan telah mencapai 100 persen.

Berikut beberapa contoh terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang Perdagangan yang dilaksanakan oleh Bapel BRR yang telah terealisasi per bulan Oktober 2007, yaitu:

1. Pembangunan Pasar Grosir di Kec. Peudada, Kab. Bireun

Pasar Grosir terbesar ini dibangun atas kerjasama BRR NAD-Nia dengan Pemda Kab.Bireun, pada pertengahan tahun 2006 dan rampung pelaksanaan pada tahun 2007, pada areal seluas + 1 Ha yang terletak ditengah Kota Juang, Kab.Bireun.

Gambar 3 - 25
Pasar Grosir, Kec. Peudada, Kab. Bireun



Sumber : Kunjungan Lapangan Tim P3B Bappenas, November 2007

Ini merupakan pembangunan Pasar Grosir terbesar dan termegah di Kab.Bireun dan pertama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan berbagai kelengkapan yang memenuhi standar sebuah plaza dan super market, dengan areal parkir yang luas dan

berada pada tempat yang strategis dan disisi jalan utama provinsi (lintasan Banda Aceh –Medan). Namun masih belum dipergunakan, karena pada beberapa bagian belum selesai, seperti jalan masuk, dan areal perparkiran yang belum diaspal/ disemen, dan instrumen-instrumen kelistrikan belum semuanya lengkap, demikian juga dengan jaringan komunikasi.

3.1.4.5.3 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Hingga tahun 2006 Bapel BRR telah merealisasikan program Pemberdayaan Koperasi dan UKM sejumlah 294 paket dari target yang ditetapkan sejumlah 254 unit, atau capaian realisasi adalah 115 persen terhadap rencana induk. Adapun Pada tahun 2007 diprogramkan lagi sejumlah 65 unit sehingga diharapkan pada akhir tahun 2007, program ini dapat diimplementasikan terhadap 359 unit/orang, atau 141 persen terhadap target dalam rencana Induk.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Bapel BRR tidak semuanya mengacu kepada rencana induk. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang berdasarkan pertimbangan lapangan perlu dan dibutuhkan untuk dilaksanakan. Dalam sub bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), program dan kegiatan tersebut adalah Bantuan Modal LKM Usaha Masyarakat, Aceh Micro Finance, Pelatihan Pengelola LKM, Pelatihan Kewirausahaan, Bantuan teknis dan manajemen LKM, Kelembagaan koperasi terpadu, Bantuan Langsung Masyarakat Masyarakat, Melalui Koperasi Terpadu, dan Modal UKM Integrated Trading House.

Pada tahun anggaran 2006 Bapel BRR telah merealisasikan Bantuan Modal LKM Usaha Masyarakat untuk 77.316 orang, Aceh Micro Finance sebesar 11 unit. Pengembangan koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) direalisasikan melalui bantuan modal melalui LKM (Lembaga Keuangan Mikro) kepada 77.316 pedagang kecil (40.875 pedagang kecil melalui APBN dan 36.441 melalui Non APBN) dan bantuan modal untuk pemulihan aset produktif telah dilakukan kepada 22.441 orang dan telah dibentuk sejumlah 294 Unit LKM (146 Unit LKM On Budget dan 148 Unit Off Budget) yang tersebar di kabupaten/kota NAD.

Pemberian bantuan mesin jahit sebagai peralatan kerja untuk usaha konveksi di Banda Aceh. Di Provinsi NAD, untuk usaha konveksi diberikan bantuan kepada 48 kelompok kerja untuk 10 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, dan Simeulue. Jenis bantuan yang diberikan terdiri atas bantuan modal kerja dan bantuan peralatan kerja.

Tabel 3 - 46
Realisasi Pelaksanaan TA 2006 dan Program TA 2007
Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias
Sub Bidang Koperasi dan UKM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Pemberdayaan Koperasi dan UKM	Unit	254	146	148*	294	115%	65	359	141%
2	Bantuan Modal LKM Usaha Masyarakat	Orang	-	40.875	36.441*	77.316	-	19.992	97.308	-
3	Aceh Micro Finance	Unit	-	11	-	11	-	11	22	-
4	Pelatihan Pengelola LKM	Orang	-	-	-	-	-	400	400	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
5	Pelatihan Kewirausahaan	Orang	-	-	-	-	-	2.016	2.016	-
6	Bantuan teknis dan manajemen LKM	Paket	-	-	-	-	-	100	100	-
7	Kelembagaan koperasi terpadu	Paket	-	-	-	-	-	1	1	-
8	Bantuan Langsung Masyarakat Melalui Koperasi Terpadu	Unit	-	-	-	-	-	60	60	-
9	Modal UKM Integrated Trading House	Paket	-	-	-	-	-	1	1	-

Sumber : Evaluasi Paruh Waktu BRR NAD-Nias

Pada tahun 2007 diprogramkan Pelatihan Pengelola LKM untuk 400 orang, Pelatihan Kewirausahaan untuk 2.016 orang, Bantuan teknis dan manajemen LKM sejumlah 100 paket, Kelembagaan koperasi terpadu sebanyak 1 paket, Bantuan Langsung Masyarakat Melalui Koperasi Terpadu sebanyak 60 unit, dan Modal UKM Integrated Trading House sebanyak 1 paket. Per 31 Oktober tahun 2007 telah terealisasi Pemberdayaan Koperasi & UKM (Usaha Kecil Menengah) sebesar 31 unit, Bantuan Modal LKM Usaha Masyarakat sebanyak 9.422 orang, Pelatihan Pengelola LKM sebanyak 189 orang, Pelatihan Kewirausahaan sebanyak 950 orang, dan Bantuan Teknis dan Manajemen LKM sebanyak 47 paket.

3.1.4.5.4 Ketenagakerjaan

Hingga tahun 2006 Bapel BRR telah merealisasikan Pembangunan Balai Latihan Kerja sejumlah 3 unit dari yang ditargetkan sejumlah 6 unit, atau 50 persen terhadap rencana induk. Adapun Pada tahun 2007 diprogramkan pembangunan 3 unit BLK sehingga diharapkan pada akhir 2007 diharapkan program pengadaan BLK dapat terealisasi 100 persen. Pada tahun 2006 Program Pengadaan peralatan BLK baru terealisasi 1 unit dari 6 unit yang ditargetkan, atau sebesar 16 persen terhadap rencana induk. Pada tahun 2007 diprogramkan pengadaan 2 unit peralatan BLK sehingga pada akhir tahun 2007 telah terealisasi capaian 50 persen dari target yang diharapkan dalam rencana induk.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Bapel BRR tidak semuanya mengacu kepada rencana induk. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang berdasarkan pertimbangan lapangan perlu dan dibutuhkan untuk dilaksanakan. Dalam sub bidang Ketenagakerjaan, program dan kegiatan tersebut adalah Pelatihan Keterampilan, Pekerja Cash for Work, Pelatihan Pegawai, Pembangunan KLP, Pembangunan Jalan Lingkungan BLK, dan Informasi Bursa Kerja.

Pada tahun anggaran 2006 Bapel BRR telah merealisasikan Program Pelatihan Keterampilan untuk 40.413 orang, Pekerja Cash for Work untuk 91.242 orang, Pelatihan Pegawai untuk 247 orang, dan Informasi Bursa Kerja sejumlah 1 unit. Sedangkan Program Pembangunan KLP dan Pembangunan Jalan Lingkungan BLK dilaksanakan pada tahun 2007.

Tabel 3 - 47
Realisasi Pelaksanaan TA 2006 dan Program TA 2007
Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias
Sub Bidang Tenaga Kerja

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Pelatihan Keterampilan	Orang	-	10.935	29.478	40.413	-	1.540	41.953	-
2	Balai Latihan Kerja (BLK)	Unit	6	3	-	3	50%	3	6	100%
3	Peralatan BLK	Unit	6	1	-	1	16%	2	3	50%
4	Pekerja <i>Cash for Work</i>	Org	-	-	91.242	91.242	-	-	91.242	-
5	Pelatihan Pegawai	Org	-	-	247	247	-	-	247	-
6	Pembangunan KLK	Pkt	-	-	-	-	-	1	1	-
7	Pembangunan Jalan Lingkungan BLK	Pkt	-	-	-	-	-	1	1	-
8	Informasi Bursa Kerja	Pkt	-	1	-	1	-	1	2	-

Sumber : *Evaluasi Paruh Waktu BRR NAD-Nias*

Pada tahun 2007 diprogramkan Program Pelatihan Keterampilan untuk 1.540 orang, Pembangunan KLK sebanyak 1 paket, Pembangunan Jalan Lingkungan BLK sebanyak 1 paket, dan Informasi Bursa Kerja sejumlah 1 paket. Berdasarkan catatan Tim P3B Bappenas, Per 31 Oktober tahun 2007 telah terealisasi pelatihan keterampilan untuk 726 orang, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) sebanyak 1 unit, Peralatan BLK sebesar 1 unit.

Berikut beberapa contoh terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Bapel BRR yang telah terealisasi per bulan Oktober 2007, yaitu:

1. Pembangunan pabrik es sebagai tempat workshop.

Kegiatan ini berlokasi di Kec. Lambada Lhok, Kab. Aceh Besar. Pelaksana dari kegiatan ini adalah JICS (Japan International Cooperation System). Tempat Pembuatan Es di Lambada Lhok ini dibangun oleh Pemerintah Jepang melalui JICS (Japan International Cooperation System). Secara fisik, bangunan tersebut sudah selesai dibangun dan sudah dapat beroperasi untuk pembuatan es dan tempat untuk workshop.

Gambar 3 - 26
Pabrik Es Sebagai Tempat Workshop
Kec. Lambada Lhok, Kab. Aceh Besar



Sumber : *Kunjungan Lapangan Tim P3B Bappenas, November 2007*

3.1.4.5.5 Pariwisata

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan pariwisata tidak tercantum secara eksplisit dalam rencana induk sehingga terdapat kesulitan dalam memonitor pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan Renstra BRR, hingga tahun 2006 Bapel BRR telah merealisasikan Pemugaran Kawasan Wisata di pulau Sabang, Pulau Banyak, Ujung Batee, Lampuuk, Kota Sabang, dan pengembangan sarana dan site plan wisata. Sedangkan pada tahun 2007 telah diprogramkan kegiatan Pelatihan bidang Pariwisata, Penyelenggaraan pesta rakyat, Pengemb Usaha ekonomi pariwisata, dan Pengemb wisata kota Banda Aceh sehingga keseluruhan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pariwisata dapat diselesaikan pada akhir tahun 2007.

Adapun pada tahun 2007 diprogramkan Peningkatan objek wisata di kota Sabang sebanyak 11 paket, Pelatihan bidang Pariwisata sejumlah 9 paket, Penyelenggaraan pesta rakyat sejumlah 4 paket, Pengembangan Usaha ekonomi pariwisata sejumlah 56 paket, dan Pengembangan wisata kota Banda Aceh sejumlah 55 paket. Berdasarkan catatan Tim P3B Bappenas Per 31 Oktober tahun 2007 telah terealisasi Pengembangan pariwisata berupa Peningkatan obyek wisata Kota Sabang sebanyak 5 paket, pelatihan bidang pariwisata sebanyak 4 paket; penyelenggaraan pesta rakyat sebanyak 2 paket; pengembangan usaha ekonomi pariwisata sebanyak 26 paket dan pengembangan wisata Kota Banda Aceh sebanyak 26 paket

Tabel 3 - 48
Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pariwisata

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Pemugaran Kws. Wisata P. Sinabang	Pkt	-	1	-	1	-	-	-	-
2	Pemugaran Kws Wisata P. Banyak	Pkt	-	1	-	1	-	-	1	-
3	Pemugaran Kws Wisata Ujung Batee	Pkt	-	1	-	1	-	-	1	-
4	Pemugaran Kws Wisata Lampuuk	Pkt	-	1	-	1	-	-	1	-
5	Peningk Objek Wisata Kota Sabang	Pkt	-	1	-	1	-	11	12	-
6	Pengemb Sarana & Site Plan Wisata	Pkt	-	1	-	1	-	-	1	-
7	Pelatihan bidang Pariwisata	Pkt	-	1	-	-	-	9	9	-
8	Penyelenggaraan pesta rakyat	Pkt	-	-	-	-	-	4	4	-
9	Pengemb Usaha ekonomi pariwisata	Pkt	-	-	-	-	-	56	56	-
10	Pengemb wisata kota Banda Aceh	Pkt	-	-	-	-	-	55	55	-

Sumber : Evaluasi Paruh Waktu BRR NAD-Nias

3.1.4.6 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Bapel BRR Tahun Anggaran 2006 adalah Rp. 590 miliar dari pagu anggaran sebesar 842 miliar atau terserap sebesar 70,1 persen. Penyerapan Tahun Anggaran 2006 jauh lebih baik jika dibandingkan penyerapan pada TA 2005 sebesar 4,5

persen. Untuk bidang pemulihan perekonomian tidak ada anggaran yang diluncurkan ke tahun 2007 (trust fund).

Tabel 3 - 49
Penyerapan Anggaran BRR TA 2006
Per Sub Bidang Pemulihan

NO	BIDANG	DIPA 06	TF 07	D 06 + TF	REAL 06	% R 06	RTF 07	% RTF 07	R 06 + TF	% R 06 + TF
		1	2	3	4	5 = 4/1	6	7 = 6/2	8 = 4+6	9 =8/3
1	Perikanan	285.133	-	285.133	134.995	47.34%	-	-	134.995	47.34%
2	Tanaman Pangan dan Hortikultura	125.441	-	125.441	93.634	74.64%	-	-	93.634	74.64%
3	Perkebunan	68.648	-	68.648	62.288	90.74%	-	-	62.288	90.74%
4	Peternakan	48.721	-	48.721	46.867	96.19%	-	-	46.867	96.19%
5	Industri	40.534	-	40.534	36.999	91.28%	-	-	36.999	91.28%
6	Perdagangan	37.256	-	37.256	20.695	55.55%	-	-	20.695	55.55%
7	Koperasi & UKM	71.753	-	71.753	64.799	90.31%	-	-	64.799	90.31%
8	Tenaga Kerja	42.044	-	42.044	38.881	92.48%	-	-	38.881	92.48%
9	Pariwisata	43.732	-	43.732	27.733	63.42%	-	-	27.733	63.42%
10	Kehutanan	36.365	-	36.365	29.560	81.51%	-	-	29.560	81.51%
11	Pesisir & Lingkungan Hidup	43.231	-	43.231	34.517	79.84%	-	-	34.517	79.84%
Ekonomi & Usaha		842.758	-	842.758	590.968	70.1%	-	-	590.968	70.1%

Sumber: 1) Evaluasi Paruh Waktu BRR

2) Realisasi Anggaran Per 28 Desember 2006, Dit. Akuntansi BRR NAD-Nias

Anggaran Bapel BRR per 31 Oktober tahun anggaran 2007 telah terserap sebesar Rp.466 miliar dari pagu anggaran Rp.989 miliar atau sekitar 47,13 persen. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan ekonomi dan usaha diupayakan lebih berdampak langsung terhadap masyarakat. Hal ini terlihat dari anggaran satker BRR TA 2007 yang sebagian besar di alokasikan pada pengembangan ekonomi dan usaha di tingkat wilayah/daerah. Anggaran BRR Regional adalah sebesar Rp. 443 miliar dari pagu TA 2007 sebesar Rp. 989 miliar atau sebesar 45 persen.

Tabel 3 - 50
Penyerapan Anggaran BRR TA 2007
Per Satuan Kerja

BIDANG / SATKER			PAGU	KEUANGAN	
			TOTAL	REALISASI	
			(RP)	(RP)	%
Bidang Ekonomi dan Usaha			989.309.183	466.215.108	47,13
1	888910	Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha	290.199.184	143.884.261	49,58
2	888926	Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wil. I	104.799.584	52.024.329	49,64
3	888932	Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wil. II	63.283.470	34.724.530	54,87
4	888941	Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wil. III	71.072.395	33.634.351	47,32

BIDANG / SATKER			PAGU	KEUANGAN	
			TOTAL	REALISASI	
			(RP)	(RP)	%
5	888957	Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wil. IV	95.545.338	54.818.468	57,37
6	888963	Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Wil. V	43.374.105	20.626.653	47,56
7	888972	Bidang Ekonomi dan Usaha Nias Kab. Nias	38.015.347	20.354.935	53,54
8	888988	Bidang Ekonomi dan Usaha Nias Kab. Nias Selatan	27.071.498	19.892.891	73,48
9	890331	ETESP ADB Perikanan 2007	172.408.149	55.386.703	32,13
10	890340	ETESP ADB Pertanian 2007	83.540.113	30.867.986	36,95

Sumber :BRR NAD-Nias, Lap.Penyerapan DIPA BRR per31 Okt 2007

3.1.5 Pemulihan Kelembagaan dan Hukum

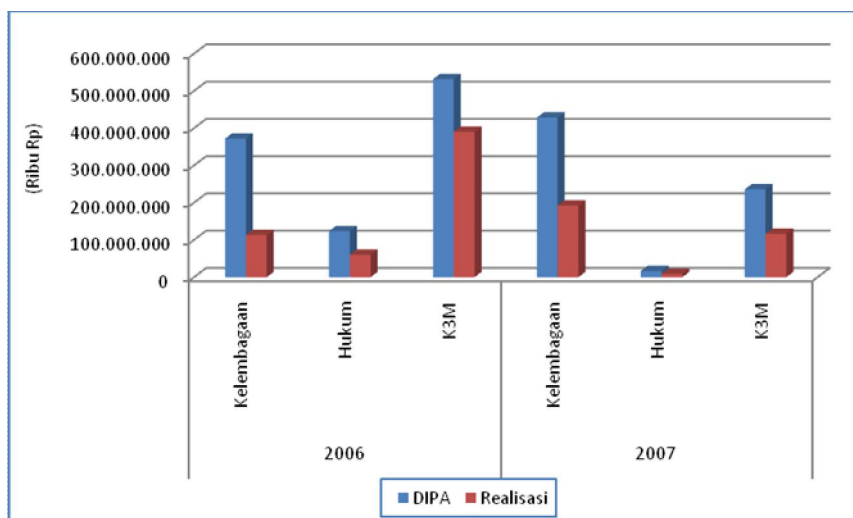
Bidang kelembagaan dan hukum terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yaitu kelembagaan, hukum, dan ketertiban, keamanan dan ketahanan masyarakat (K3M). Dalam perkembangannya, anggaran Bapel BRR bidang kelembagaan dan hukum mengalami penurunan dari Rp. 1 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp. 681 miliar pada tahun 2007. Realisasi anggaran BRR TA 2007 bidang kelembagaan dan hukum mencapai Rp. 318 miliar atau 46,73 persen dari anggaran sebesar Rp. 681 miliar. Rincian penyerapan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 3 - 51
Penyerapan Anggaran DIPA BRR TA 2006 dan 2007 Bidang
Kelembagaan dan Hukum

SUB SEKTOR	DIPA 2006 (RIBU RP)	REALISASI DIPA 2006		DIPA 2007 (RIBU RP)	REALISASI DIPA 2007	
		(RIBU RP)	(%)		(RIBU RP)	(%)
Kelembagaan	372.141.987	113.091.279	30,39	428.522.144	192.483.173	44,92
Hukum	123.667.666	60.324.124	48,78	16.795.800	8.953.820	53,31
K3M	531.726.941	390.322.844	73,41	235.942.043	116.694.295	49,46
Total	1.027.536.594	563.738.247	54,86	681.259.987	318.131.287	46,70

Sumber : Laporan Penyerapan Anggran Bapel BRR per 28 Desember 2006 dan 30 November 2007

Grafik 3 - 14
Realisasi Anggaran BRR Bidang Kelembagaan dan Hukum TA
2006 dan 2007*



Sumber : Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2007

Keterangan : *) Status realisasi DIPA 2007 adalah 30 November 2007

3.1.5.1 Kelembagaan

Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan terbagi dalam 2 (dua) kelompok berdasarkan batas administrasi wilayah dan lintas daerah. Program dan kegiatan per kabupaten merupakan kegiatan yang bersifat pembangunan fisik sarana dan prasarana perkantoran. Sedangkan kegiatan-kegiatan lintas kabupaten, merupakan kegiatan yang sifatnya pendataan, penataan, fasilitasi, pemberdayaan, pelatihan, dan lain sebagainya.

Kegiatan per kabupaten terdiri dari kegiatan 1) rehabilitasi/pembangunan kantor, penyediaan sarana dan prasarana kerja, penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana, serta penyediaan sarana media centre dan forum komunikasi, dan 2) pembangunan meunasah dan/atau bale musyawarah.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang kelembagaan difokuskan pada pembangunan yang mendukung kelancaran pemerintahan, salah satunya dengan melakukan rehabilitasi dan pembangunan kantor pemerintahan yang lumpuh, meliputi kantor kepala daerah/badan/dinas, kantor camat, rumah dinas camat desa/kelurahan, dan kantor mukim/balee musyawarah. Pada akhir tahun 2007 diperkirakan akan terbangun 631 unit kantor pemerintahan, dimana rincian pembangunan kantor pemerintahan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

KEBIJAKAN SISTEM KELEMBAGAAN DAERAH NAD-NIAS BERDASARKAN RENCANA INDUK

- a) Kelembagaan pemerintahan
 1. Memulihkan pemerintahan daerah dalam jangka pendek untuk pelayanan umum darurat,
 2. Meningkatkan kapasitas pemerintahan di daerah dalam jangka menengah
 3. Mempercepat penyediaan sarana dan prasarana lembaga pemerintahan yang permanen
- b) Kelembagaan Agama, Adat, dan Sosial Lainnya
 1. Meningkatkan peranserta lembaga agama, adat, dan sosial lainnya tingkat mukim dan gampong dalam penyusunan rencana dan kebijakan.
 2. Memfasilitasi sarana dan prasarana agama, adat, dan sosial lainnya tingkat mukim dan gampong.

Sumber : Lampiran 6 Rencana Induk NAD-Nias, 2005

Tabel 3 - 52
Perkembangan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI 2005-2006		REALISASI 2007**	REALISASI 2005 - 2007	
				TOTAL	CAPAIAN (%)		TOTAL	CAPAIAN (%)
1	Kantor KDH/DPRD/Dinas/Meuligo	Unit	76	5	6.6	25	30	39.5
2	Kantor Kecamatan	Unit	23	14	60.9	6	20	87.0
3	Rumah Dinas Camat	Unit	-	69		11	80	
4	Kantor Desa/Kelurahan	Unit	450	283	62.9	33	316	70.2
5	Ktr Mukim/Balee	Paket	*	118		67	185	

Sumber : Laporan Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, BRR Juli 2007

*Keterangan : *) Target spesifik belum dijabarkan di dalam Rencana Induk*

***) Realisasi tahun 2007 merupakan target yang akan dicapai tahun 2007*

Beberapa hasil pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan fisik sub bidang kelembagaan yaitu sebagai berikut⁴.

Gambar 3 - 27
Pembangunan Kantor Bappeda Kabupaten Aceh Singkil



Sumber: Sekretariat P3B-Bappenas, November 2007

1. Pembangunan Kantor Badan/Dinas

Salah satu kantor badan yang dibangun oleh BRR adalah kantor Bappeda Kabupaten Aceh Singkil di bawah Satker BRR Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Wilayah V. Pembangunan dimulai pada 16 Juni 2007 dan hingga November 2007 masih terus dilakukan tahapan pembangunan seperti yang terlihat pada gambar di samping.

Gambar 3 - 28
Pembangunan Kantor Geuchik Lambada Lhok di Kabupaten Aceh Besar



Sumber: Sekretariat P3B-Bappenas, November 2007

⁴ Hasil kunjungan lapangan Tim P3B-Bappenas ke Provinsi Banda Aceh Bulan September-November 2007

Gambar 3 - 30
Pembangunan Kantor Camat Meuraxa
di Kota Banda Aceh



Sumber: Sekretariat P3B-Bappenas, September 2007

Gambar 3 - 29
Pembangunan Balee Musyawarah
di Kecamatan Meuraxa di Kota Banda
Aceh



Sumber: Sekretariat P3B-Bappenas, September 2007

2. Pembangunan Kantor Camat

Salah satu kantor camat di Kota Banda Aceh yang mengalami kerusakan akibat tsunami yaitu di Kecamatan Meuraxa. Saat ini kantor camat tersebut sudah terbangun dan sudah dapat digunakan. Prasarana kantor seperti meja, kursi, lemari, komputer/printer dan jaringan listrik dan telepon sudah cukup memadai. Untuk menunjang kegiatan musyawarah masyarakat di sekitar Kecamatan Meuraxa, BRR juga telah membangun balee musyawarah di depan kantor camat tersebut.

Pembangunan kantor camat lainnya yaitu di Kecamatan Plimbang Kabupaten Bireun. Kantor camat tersebut merupakan bangunan baru yang telah direlokasi. Bangunan ini terletak pada areal seluas + 500 m² dan kondisi jaringan telepon, listrik dan air bersih sudah memadai. Namun kantor tersebut belum dapat digunakan karena sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan, dan diharapkan selesai pada akhir November 2007.

3. Pembangunan Kantor Desa/Lurah

Kantor Desa Pasar Aceh merupakan bangunan baru yang terletak di lokasi baru (relokasi). Luas bangunan ± 100 m² dan jaringan telepon, listrik dan air bersih sudah memadai. Kantor desa tersebut dibangun pada tahun 2006 dan awal tahun 2007 ini sudah dapat digunakan sebagai pusat administrasi desa Pasar Aceh Kec. Johan Pahlawan.

Selain kantor desa juga dibangun Kantor Geuchik Lambada Lhok yang terletak di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Kondisi jaringan listrik, telepon, dan air bersih sudah memadai di area kantor tersebut, namun berdasarkan hasil pengamatan kantor tersebut belum dimanfaatkan oleh penduduk sekitar karena prasarana dasar kantor belum memadai.

Gambar 3 - 31
Pembangunan Kantor Camat Plimbang
di Kabupaten Bireun



Sumber: Sekretariat P3B-Bappenas, November 2007

Kegiatan lintas kabupaten terdiri dari 11 program utama. Program lintas kabupaten (non fisik) yang telah dilaksanakan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 oleh BRR adalah :

1. Dari delapan kegiatan yang direncanakan dalam program peningkatan profesionalisme aparat Pemda, kemajuan pada

tahun 2005-2007 adalah pemberdayaan dan fasilitasi aparat Pemda, penanganan masalah administrasi kepegawaian, penataan dan penyediaan (rekrutmen dan mutasi) aparat Pemda, penyusunan rencana pengelolaan pegawai, dan peningkatan kapasitas mitigasi bencana Pemda.

2. Kemajuan pelaksanaan program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda tahun 2005-2007 semua rincian kegiatan sudah dilaksanakan, antara lain penyelamatan administrasi pemerintahan, penyusunan rencana tata organisasi, sistem komunikasi, BOP kecamatan/gampong, peningkatan kapasitas pemerintahan, dan rencana perbaikan sisdur kerja lembaga pemerintah.
3. Kegiatan pada program peningkatan kapasitas keuangan Pemda hingga 2007 sudah terealisasi pada peningkatan kapasitas legislatif dan penataan keuangan daerah dan pengelolaannya di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.
4. Program peningkatan kerjasama antar daerah terdiri dari dua kegiatan yaitu optimalisasi kerjasama antar daerah dan koordinasi penyelenggaraan pusat dan daerah. Pencapaian pada hingga tahun 2007 masing-masing kegiatan tersebut sudah dilaksanakan.
5. Program Penataan administrasi penduduk sudah terealisasi 73 dokumen.
6. Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terealisasi melalui kegiatan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial (trauma centre).
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial hingga tahun 2007 telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, penguatan fasilitasi lembaga masyarakat, dan FKK stakeholder rehabilitasi dan rekonstruksi. Program
8. Program Penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi melalui kegiatan dukungan penyiapan kepada daerah dan DPRD di 21 Kabupaten/Kota.
9. Program Penataan Perundang-Undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi daerah pada tahun 2007 terealisasi sebanyak 7 paket melalui kegiatan harmonisasi peraturan di Aceh.

Program/kegiatan lainnya yang terdapat pada Rencana Induk, ada yang belum dilaksanakan oleh BRR, antara lain Program Pengelolaan Pertanahan dan Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur. Rincian perkembangan pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 - 53
Perkembangan Program/Kegiatan Non Fisik Sub Bidang Kelembagaan oleh BRR

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI 2005-2006		REALISASI 2007**	REALISASI 2005-2007	
				TOTAL	CAPAIAN (%)		TOTAL	CAPAIAN (%)
A	Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda							
1	Pemberdayaan dan Fasilitasi Aparat PEMDA	Paket	*			3	3	
2	Penanganan masalah administrasi Kepegawaian	Paket	*			1	1	
3	Penyusunan Sisdur Adm	Paket	*					

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI 2005-2006		REALISASI 2007**	REALISASI 2005-2007	
				TOTAL	CAPAIAN (%)		TOTAL	CAPAIAN (%)
	Paska Bencana bagi PNS							
4	Penyediaan tenaga-tenaga Kontrak/ Suplemen	Paket	*					
5	Penyelesaian rekrutmen CPNS yang telah dilaksanakan	Paket	*					
6	Penataan & Penyediaan (rekrutmen & mutasi) aparatur Pemda	Paket	*			5	5	
7	Penyusunan Rencana Pengelolaan Pegawai	Kab/kota	13	8	61.5	6	14	107.7
8	Peningkatan Kapasitas Mitigasi Bencana Pemda	Kab/kota	13	7	53.8		7	53.8
B	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PEMDA							
1	Penyelamatan Administrasi Pemerintahan	Pemda	13	23	176.9		23	176.9
2	Penyusunan Rencana Penataan Organisasi Pemda	Pemda	13	11	84.6	5	16	123.1
3	Pemantapan dan Monev Penataan Organisasi Pemda	Pemda	13			4	4	30.8
4	Penataan Siskom Humas daerah (media centre)	Pemda	13			1	1	7.7
5	BOP Kecamatan/Gampong (Buku, Komputer, Fax, Roda2, Seragam)	Kab/kota	13	23	176.9		23	176.9
		Kec.	77	263	341.6		263	341.6
6	Peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan/ mukim/gampong	Kab/kota	13	6	46.2	1	7	
		Kec.	77	263	341.6		263	341.6
7	Rencana Perbaikan Sisdur Kerja lembaga Pemerintah	Keg	*	21			21	
C	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemda							
1	Peningkatan Kapasitas Legislatif dalam PKeuD	Kab/kota	13	21	161.5	4	25	192.3
2	Penataan Keuangan Daerah dan Pengelolaannya	Kab/kota	13	21	161.5	1	22	169.2
D	Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah							

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI 2005-2006		REALISASI 2007**	REALISASI 2005-2007	
				TOTAL	CAPAIAN (%)		TOTAL	CAPAIAN (%)
1	Optimalisasi Kerjasama antara Daerah	Paket	*	1		1	2	
2	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah	Paket	*	1			1	
E	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dok	*				73	
F	Program Penataan Administrasi Wilayah Pemerintah	Kab. / Kota	13					
G	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial							
	Layanan Rehab Kessos (Trauma centre)	Paket	*				1	
H	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial							
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Paket	*			1	1	
	Penguatan dan Fasilitasi Lembaga Masy.	Paket	*	1		1	2	
	FKK Stakeholder RR	Paket	*	1		1	2	
I	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi							
	Dukungan Penyiapan KDH dan DPRD	Kab/kota	*				21	
J	Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan (Desentralisasi / OTDA)							
	Harmonisasi Peraturan di Aceh	Paket	*	1		6	7	
K	Program Pengelolaan SDM Aparatur							
	Fasilitasi Penyediaan Aparat Instansi Vertikal di Aceh	Paket	*			**	**	

Sumber : Laporan Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, BRR Juli 2007

Keterangan : *) Target spesifik belum dijabarkan di dalam Rencana Induk

**) Realisasi tahun 2007 merupakan target yang akan dicapai tahun 2007

3.1.5.2 Hukum

Bidang hukum terbagi atas 4 (empat) program berdasarkan Rencana Induk yaitu (1) mewujudkan jaminan kepastian, perlindungan dan penegakan hukum dan HAM, (2) Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana hukum, (3) Penambahan dan peningkatan kualitas SDM aparatur hukum, (4) Menetapkan payung hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam kurun waktu tahun 2005-2007, program rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana hukum lebih menitikberatkan pada pembangunan kembali berbagai sarana dan prasarana hukum yang mengalami kerusakan. Penyediaan sarana dan prasarana hukum menjadi jawaban terhadap lumpuhnya sebagian besar kegiatan penegakan hukum di Aceh pasca bencana. Bentuk pembangunan di bidang hukum yang telah dilakukan hingga tahun 2007 adalah penyediaan gedung perkantoran untuk institusi penegakan hukum di Aceh, seperti kejaksaan, pengadilan, Kanwil Departemen Hukum dan HAM, Mahkamah Syariah, lembaga masyarakat serta rumah dinas. Rinciannya tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Kebijakan Bidang Hukum NAD-Nias berdasarkan Rencana Induk

- a) Mewujudkan jaminan kepastian, perlindungan, penegakan hukum dan HAM;
- b) Menyediakan sarana dan prasarana hukum;
- c) Menetapkan payung hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memperhatikan pengarusutamaan kesetaraan gender.

Sumber : Lampiran 9 Rencana Induk NAD-Nias, 2005

Tabel 3 - 54
Perkembangan Kegiatan Fisik Rehabilitasi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Hukum

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI 2005-2006		REALISASI 2007**	REALISASI 2005 -2007	
				TOTAL	CAPAIAN (%)		TOTAL	CAPAIAN (%)
A	Sarpras Kejaksaan Agung							
	Kejati Provinsi NAD	Unit	1	1	100.0		1	100.0
	Kejari	Unit	5	6	120.0		6	120.0
	Rumah Dinas (Kejaksaan Agung)	Unit	38	20	52.6	2	22	57.9
	Peralatan Kantor	Paket	6	79	1316.7		79	1316.7
	Kendaraan R2	Unit	38	17	44.7		17	44.7
	Kendaraan R4	Unit	15		0.0			0.0
	Kendaraan Tahanan	Unit	12	7	58.3		7	58.3
B	Sarpras Kanwil Depkumham							
	Rumah Dinas (Kanwil Depkumham)	Unit	70	20	40.8	4	24	49.0
	Lapas/Rutan	Unit	6	3	50.0	6	9	150.0
	Bapas/Rupbasan	Unit	2	1	50.0	1	2	100.0
	Kanwil Depkumham	Unit	1	1	100.0		1	100.0
	Kantor Imigrasi	Unit	2	2	100.0		2	100.0
	Kendaraan R2	Unit	8		0.0			0.0
	Kendaraan R4	Unit	10	6	60.0		6	60.0
	Peralatan Kantor	Paket	3	19	633.3		19	633.3
C	Sarpras Mahkamah Agung							
	PT/PTUN	Unit	2		0.0	1	1	50.0
	Pengadilan Negeri	Unit	9	10	111.1	5	15	166.7

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI 2005-2006		REALISASI 2007**	REALISASI 2005 -2007	
				TOTAL	CAPAIAN (%)		TOTAL	CAPAIAN (%)
	Kendaraan R2 Pengadilan	Unit	25		0.0			0.0
	Kendaraan R4 Pengadilan	Unit	33		0.0			0.0
	Mahkamah Syari'ah	Unit	6	1	16.7	5	6	100.0
	Kendaraan R2 Mah. Syari'ah	Unit	33	12	36.4		12	36.4
	Kendaraan R4 Mah. Syari'ah	Unit	18	17	94.4		17	94.4
	Peralatan Kantor	Unit	17	79	464.7		79	464.7
	Pengadilan Militer	Paket	-			1	1	
	Rumah Dinas (Mahkamah Agung)	Unit	179					
	Pengawasan Pembangunan Gedung	Paket	-			1	1	

Sumber : Laporan Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, BRR Juli 2007

Keterangan : *) Target spesifik belum dijabarkan di dalam Rencana Induk

**) Realisasi tahun 2007 merupakan target yang akan dicapai tahun 2007

Untuk mendukung pembangunan fisik, BRR juga melaksanakan beberapa hal penting untuk mendukung penegakan hukum. Beberapa hasil pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang hukum yaitu sebagai berikut⁵.

1. Dukungan terhadap Mahkamah Syari'ah

Mahkamah Syari'ah merupakan lembaga istimewa di Provinsi NAD sebagai bagian dari penerapan legal formal Syari'at Islam secara menyeluruh. Untuk lebih meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan hukum oleh Mahkamah Syariah, BRR menyediakan jaringan komunikasi (information technology-IT) Mahkamah Syari'ah. Dengan adanya jaringan IT ini akan lebih mendorong terciptanya transparansi peradilan dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat pencari keadilan.

Gambar 3 - 32
Pembangunan Mahkamah Syariah Provinsi NAD di Kota Banda Aceh



Sumber: Sekretariat P3B-Bappenas, September 2007

Bulan September 2006 lalu salah satu pembangunan gedung Mahkamah Syariah Provinsi NAD belum dilaksanakan karena baru mencapai tahap penentuan lokasi yaitu di kompleks kantor pemerintahan Jl. T. Nyak Arief Banda Aceh dengan rencana seluas 5271 m². Kemajuan pelaksanaan hingga September 2007 yaitu gedung tersebut sedang dalam proses pembangunan, seperti yang terlihat pada gambar di samping.

2. Pembangunan Pusat Klinik Hukum

Pusat Klinik Hukum akan menjadi sebuah pusat lembaga pembinaan dan pelatihan untuk para aparaturnya penegak hukum serta sebagai tempat untuk konsultasi berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Aceh.

⁵ Hasil kunjungan lapangan Tim P3B-Bappenas ke Provinsi Banda Aceh Bulan September-November 2007

3. Pembangunan Kantor Pengadilan

Beberapa kantor Pengadilan Negeri yang di bangun BRR diantaranya di Kabupaten Bireun dan Aceh Barat. Pengadilan Negeri di Kota Juang Kabupaten Bireun adalah hasil

Gambar 3 - 34
Pembangunan Kantor Pengadilan Negeri
di Kota Juang Kabupaten Bireun



Sumber: Sekretariat P3B-Bappenas, November 2007

rehabilitasi oleh BRR karena bangunan tersebut rusak akibat gempa dan pada sejak akhir tahun 2006 telah dioperasionalisasikan. Dalam proses pembangunan gedung, Pengadilan Tinggi dan Pemda bertugas sebagai pengawas. Hal yang sama juga terjadi di Kantor Pengadilan Negeri di Meulasudah dapat digunakan sejak Maret 2007 sebagai tempat pelaksanaan kegiatan bidang hukum.

4. Pembangunan Kantor Kejaksaan

Kantor Kejaksaan Negeri di Meulaboh adalah bangunan yang rusak akibat gempa dan direkonstruksi kembali oleh BRR. Pembangunan Kantor Kejaksaan ini diawasi langsung oleh Kejaksaan Tinggi. Sampai saat ini gedung ini telah aktif digunakan sebagai tempat pelaksanaan berbagai kegiatan di bidang hukum di Kabupaten Aceh Barat.

5. Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan

Pembangunan rumah dinas Kejaksaan Negeri di Banda Aceh didasarkan atas kebutuhan pegawai yang kehilangan rumah akibat tsunami. Komplek perumahan dengan tipe 42 ini terletak di belakang kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Status rumah

Gambar 3 - 35
Pembangunan Kantor Pengadilan Negeri
di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat



Sumber: Sekretariat P3B-Bappenas, September 2007

Gambar 3 - 33
Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri
di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat



Sumber: Sekretariat P3B-Bappenas, September 2007

Gambar 3 - 36
Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan
Negeri di Kota Banda Aceh



Sumber: Sekretariat P3B-Bappenas, September 2007

merupakan milik sendiri setelah proses serah terima dari BRR. Jumlah unit rumah terbangun per kawasan terdiri dari 12 unit dimana dari keseluruhan rumah tersebut sudah dihuni. Kualitas konstruksi rumah cukup memadai, atap rumah terbuat dari seng/asbes, kondisi lantai rata dan tidak bergelombang, namun dinding rumah mengalami keretakan ringan. Setiap rumah dibangun termasuk kamar mandi di dalamnya. Mengenai kondisi umum prasarana lingkungan yaitu jalan lingkungan belum beraspal melainkan dilapisi batu kecil/kerikil. Kebutuhan air bersih diperoleh melalui pompa air di masing-masing rumah. Jaringan listrik sudah tersedia, namun tidak ada jaringan telepon. Selain itu instalasi penanganan air limbah rumah tangga tidak tersedia.

Selain kegiatan fisik, juga terdapat kegiatan non fisik yaitu program penambahan dan peningkatan kualitas SDM aparatur hukum, namun pada Rencana Aksi program tersebut dinamakan pemberdayaan dan pengembangan institusi hukum. Rincian realisasi pelaksanaan kegiatan program tersebut yaitu pada penelitian dan pengembangan hukum, pengembangan hokum adat, pendidikan dan pelatihan teknis hokum dan HAM, sedangkan kegiatan lainny belum diketahui karena belum diperoleh data terbaru.

Tabel 3 - 55
Perkembangan Kegiatan Non Fisik Bidang Hukum

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005- 2006				REALISASI 2007**	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN (%)		TOTAL	CAPAIAN (%)
	Pemberdayaan dan pengembangan institusi hukum									
1	Penelitian dan Pengembangan Hukum	Paket	-					1	1	
2	Pengembangan Hukum Adat	Paket	*					1	1	
3	Pendidikan dan pelatihan teknis hukum dan HAM	Paket	*					1	1	
4	Pengembangan pusat studi hukum	Paket	-							
5	Pembentukan badan pembinaan hukum Aceh	Paket	-							
6	Peningkatan kapasitas aparatur hukum	Paket	*							
7	Peningkatan Akses Pelayanan Hukum bagi Masyarakat	Paket	-							
8	Pembangunan gedung badan pembinaan hukum Aceh	Paket	-							

Sumber : Laporan Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, BRR Juli 2007

Keterangan : *) Target spesifik belum dijabarkan di dalam Rencana Induk

***) Realisasi tahun 2007 merupakan target yang akan dicapai tahun 2007

Program selanjutnya yang tercantum pada Rencana Induk yaitu program mewujudkan jaminan kepastian, perlindungan dan penegakan hukum dan HAM belum dapat terwujud karena belum adanya landasan hukum. Banyak permasalahan yang dihadapi di lapangan, diantaranya:

- Penyelesaian permasalahan warisan/ahli waris yang masih menggunakan regulasi yang lama, sehingga penyelesaiannya agak lamban.
- Bank belum bisa memberi kebebasan terhadap ahli waris.

- Sertifikat tanah banyak yang belum diberikan oleh BPN kepada pemiliknya karena belum adanya landasan hukum, dll

Dengan disahkannya Perpu 2/2007 mengenai Penanganan Permasalahan Hukum dalam rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias pada September 2007 yang lalu, jaminan kepastian, perlindungan dan penegakan hukum dan HAM khususnya pada aspek bidang pertanahan, perbankan, keperdataan dan kependudukan dapat segera terwujud, diantaranya:

- Pemulihan dan pemberian hak-hak keperdataan serta penerbitan kembali alat bukti haknya (status hukum ahli waris dan objek warisan, status harta benda yang tidak ada lagi pemiliknya, status kepemilikan hak atas tanah baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar, hak perwalian dan pengasuhan anak, dan Hak atas Kekayaan Intelektual)
- Pemulihan hak-hak yang berkaitan dengan hukum publik
- Pemberian kembali dokumen identitas (kepastian hilang/meninggalnya seseorang, status kelahiran, dan status perkawinan/perceraian)
- Pemberian status hukum Baital Maal sebagai subjek hukum khusus bagi Provinsi NAD

Kebijakan Bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat NAD-Nias berdasarkan Rencana Induk

- Membangun masyarakat melalui penciptaan kematangan dan kedewasaan social politik baik tata kehidupannya maupun kelembagaan dan mekanismenya dalam kerangka demokrasi;
- Membangun masyarakat melalui penciptaan rasa aman dan tertib di masyarakat bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat.

Program menetapkan payung hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satunya adalah dengan disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang tentunya akan melengkapi proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Undang-undang tersebut memiliki prinsip otonomi yang seluas-luasnya di bidang politik kepada masyarakat Aceh dan mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip good governance. Dalam menyelenggarakan otonomi yang seluas-luasnya itu, masyarakat Aceh memiliki peran serta, baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah. Lahirnya UU Pemerintahan Aceh mengharuskan penataan ulang berbagai tatanan kehidupan masyarakat, baik dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan lain-lain, dan semua ini terkait dengan syariat Islam.

Selain itu untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, diperlukan percepatan penetapan Perpu 2/2007 (Penanganan Permasalahan Hukum dalam rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias) menjadi UU, guna menjadi dasar bagi BRR dan K/L terkait dengan penyelesaian permasalahan hukum dalam mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD-Nias. Urgensi Penetapan Perpu 2/2007 ke dalam Undang-Undang diantaranya:

1. Kepastian penyelesaian masalah pertanahan, diperlukan untuk jaminan ketersediaan lahan bagi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh BRR, khususnya untuk penyediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana
2. Proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh BRR akan segera berakhir pada April 2009, sehingga perlu didukung penyelesaian permasalahan pertanahan dan perbankan, serta perdata dan kependudukan di NAD dan Nias
3. Penyelesaian masalah hukum dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh BRR akan menjadi prasyarat untuk dapat dilakukannya masa transisi dan alih tanggung jawab

dari BRR kepada Pemerintah Daerah di NAD dan Nias dalam rangka keberlanjutan pemulihan jangka menengah dan panjang oleh Pemda NAD dan Nias.

3.1.5.3 Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M)

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat NAD dan Nias dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketahanan masyarakat terbagi ke dalam 2 bidang utama yaitu penciptaan rasa aman masyarakat dan pengembangan ketahanan masyarakat. Penciptaan rasa aman masyarakat dikelompokkan ke dalam 3 program yaitu (a) Refungsionalisasi Kelembagaan; (b) Dukungan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan (c) Keamanan dan Ketertiban Daerah.

Sebagian besar kegiatan refungsionalisasi kelembagaan Menkopolhukam, Menkominfo, dan Polri telah mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Induk, bahkan ada yang melebihi target diantaranya pada pembangunan kantor, rumah dinas, stasiun RRI, serta pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Pada TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU dan Matra Integratif juga telah melaksanakan pengadaan peralatan dan penyediaan kendaraan.

Realisasi perkembangan program pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah pada tahun 2005-2006 lebih menitikberatkan pada mobilisasi pasukan POLRI, namun untuk realisasi 2007 belum diketahui pelaksanaannya. Program yang belum dilaksanakan oleh BRR yaitu program dukungan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemajuan pelaksanaan penciptaan rasa aman masyarakat secara terperinci ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 3 - 56
Perkembangan Program dan Kegiatan Fisik Bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI 2005-2006		REALISASI 2007**	REALIASI 2005 -2007	
				TOTAL	CAPAIAN (%)		TOTAL	CAPAIAN (%)
A	Program Refungsionalisasi Kelembagaan							
1	Menkopolhukam							
	Gedung Kantor	Unit	1	1	100		1	100
2	Menkominfo							
	Gedung Kantor Dinas Kominfo	Unit	1	2	200	1	3	300
	Stasiun RRI	Unit	1	3	300	7	10	1000
	Stasiun Transmisi TVRI	Unit	6	10	166	6	16	266
	Gedung PWI	Unit	-	1		1	2	
	Rumah Dinas	Unit	-	1		1	2	
	Kendaraan Roda-2 dan Roda - 4	Unit	-	3			3	
3	LSN							
	Kamar Sandi	Unit	1					
	Peralatan Sandi	Unit	1					
	Alat Pendukung Utama dan Telekomunikasi	Unit	1					
4	POLRI							
a	Pengembangan Sarana dan Prasarana							
	Penampungan Sementara (1416 KK)	Unit	1.416	1	0.1		1	0.1

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI 2005-2006		REALISASI 2007**	REALIASI 2005 -2007	
				TOTAL	CAPAIAN (%)		TOTAL	CAPAIAN (%)
	Mapolda	Kompleks	1	1	100	1	2	200
	Brimobda	Kompleks	1	1	100	1	2	200
	Dit. Polair	Kompleks	1			2	2	200
	Polres	Unit	5					
	Rumah Dinas (Aspol)	Komplek	28			57	57	219
	Polsek	Unit	-	2	10	6	8	
b	Pengadaan Material (Gedung)	Unit	*	193			193	
	Pengadaan Peralatan dan Komlek	Unit	*	434		5	439	
	Kendaraan Roda - 4	Unit	*	71			71	
	Gedung PUSDIK Pasukan Anjing/Kuda	Unit	*					
	Perencanaan dan Pengawasan	Unit	*			5	5	
5	TNI-AD							
	Bidang ALPAL		*	1			1	
	- Kendaraan	Unit	-	8			8	
	- Alat Angkutan Air	Unit	-	2			2	
	- Alat Berat Zeni	Unit	-	27			27	
	- Alat Utama Militer (Senjata)	Unit	-	295			295	
	- Alpasus Zeni	Unit	-	39			39	
	- Alsatri dan Alsintor	Unit	-	4			4	
	- Peralatan Lainnya	Unit	-	7			7	
	- Kendaraan Roda - 2	Unit	-	217			217	
	- Kendaraan Roda - 4	Unit	-	28			28	
	Bidang Faskon	Unit	*	461			461	
	Bidang Alkon	Unit	*	1			1	
	Korem/Kodim	Unit	-			2	2	
	Rumah Dinas	Unit	-			1	1	
	Kompi	Unit	-			2	2	
	Biaya Perencanaan dan Pengawasan	Paket	-			1	1	
6	TNI-AL						-	
	Bidang Bekal Umum	Unit	*	1			1	
	Bidang ALPAL	Unit	*	1			1	
	- Alat Perlengkapan Laut Lanal Sabang	Unit	-	1		3	4	
	- Peralatan Bengkel	Unit	-	4			4	
	- Peralatan Laut Komar	Unit	-	1			1	
	- Peralatan Khusus Komar	Unit	-	130			130	
	- Persenjataan (Senapan dan Pistol)	Unit	-	56			56	
	- Amunisi	Butir	-	19.769			19.769	
	- Kendaraan	Unit	-	6			6	
	- Peralatan Lainnya	Unit	-	74		2	76	
	Bidang Faskon	Unit	*	40			40	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI 2005-2006		REALISASI 2007**	REALIASI 2005 -2007	
				TOTAL	CAPAIAN (%)		TOTAL	CAPAIAN (%)
	Rumah Sakit Sabang	Unit	-				-	
	Rumah Dinas	Unit	-			2	2	
	Posal Sitoli (Dermaga + Mesjid)	Unit	-			2	2	
	Pengembangan SARPRAS Gedung	Unit	-			3	3	
7	TNI-AU						-	
	Bidang ALPAL	Paket	*				-	
	Bidang Faskon	Paket	*				-	
	Lanud Maimun Saleh	Unit	-			1	1	
	Lanud Iskandar Muda	Unit	-			1	1	
	Paskhas AU	Unit	-			1	1	
	Satrad	Unit	-			3	3	
8	Matra Integratif/Mabes TNI						-	
	Bidang Bekal Umum	Unit	*	3			3	
	Bidang ALPAL	Unit	*				-	
	- Kendaraan Roda-2	Unit	-	40			40	
	- Alat Utama Militer	Unit	-	958			958	
	- Alat Angkutan Air	Unit	-	13			13	
	- Jembatan Bailey	Unit	-	15			15	
	- Alat Berat	Unit	-	483			483	
	- Suku Cadang/Ban Pesawat	Unit	-	2.299			2.299	
	Bidang Faskon	Unit	*	3			3	
	Bidang Kesehatan	Unit	*	4			4	
	Bidang Alkon	Unit	*	1			1	
B	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Daerah							
	Mobilisasi Pasukan TNI	Personil	*					
	Mobilisasi Pasukan POLRI	Personil	*	1650			1650	
	Pemberdayaan potensi keamanan	Personil	*					
C	Program Dukungan Rehabilitasi dan Rekonstuksi							
	Pembukaan Daerah Terisolasi		*					
	Pembersihan Kota/Desa dari Puing		*					
	Pengadaan Rumah Sakit Lapangan		*					
	Pelayanan pendidikan dan Kesehatan		*					
	Operasi Bhakti TNI		*					

Sumber : Laporan Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, BRR Juli 2007

Keterangan : *) Target spesifik belum dijabarkan di dalam Rencana Induk

**) Realisasi tahun 2007 merupakan target yang akan dicapai tahun 2007

Program utama lainnya yaitu Program Pengembangan Ketahanan Masyarakat. Ketahanan masyarakat sebenarnya merupakan kondisi dinamis suatu masyarakat yang mengandung keuletan dan ketangguhan, yakni suatu kemampuan mengembangkan kekuatan masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung

maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup serta perjuangan mengejar tujuan pembangunan masyarakatnya.

Realisasi perkembangan pada tahun 2005-2006 lebih menitikberatkan pada kegiatan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, peningkatan komitmen pesatuan dan kesatuan, dan penataan hubungan negara dan masyarakat. Untuk kegiatan pengembangan peran diplomasi belum dilaksanakan oleh BRR. Rincian perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 - 57
Perkembangan Program/Kegiatan Pengembangan Ketahanan Masyarakat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI 2005-2006		REALISASI 2007**	REALISASI 2005 -2007	
				TOTAL	CAPAIAN (%)		TOTAL	CAPAIAN (%)
A	Program Pengembangan Ketahanan Masyarakat							
	a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik							
	Perencanaan dan sosialisasi kegiatan dan materi kampanye	Kegiatan	*	200			200	
	Dialog antar komponen masyarakat	Paket	*					
	Kerjasama dengan pers dan media	Paket	*					
	Fasilitasi jaringan sosial tradisional	Kegiatan	*	150			150	
	Advokasi dan dialog penanaman nilai demokrasi	Kegiatan	*	2			2	
	Evaluasi dan Monitoring		*					
	b. Peningkatan Komitmen Pesatuan dan Kesatuan							
	Bintek dan replika Cinta Tanah Air dan Bhakti Pertiwi		*					
	Revitalisasi wawasan kebangsaan	Kegiatan	*	150			150	
	Konsolidasi dan penguatan kelembagaan	Lembaga	*	3			3	
	Sosialisasi Bidang POLKAM	Kegiatan	*	1			1	
	Pemantauan situasi perkembangan politik masyarakat		*					
	Pemantapan semangat Bela Negara		*					
	c. Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat							
	Fasilitasi pelembagaan forum kemasyarakatan	Kegiatan	*	1			1	
	Pendataan ulang kependudukan		*					
	Tim perumus rekomendasi kebijakan ttg insentif		*					
	Pengkajian kondisi masyarakat	Kegiatan	*	1			1	
	Pembuatan EWS		*					
	Operasionalisasi EWS		*					
	Desk Aceh	Unit	*	1			1	
	d. Pengembangan Peran Diplomasi							
	Pemantapan diplomasi kemanusiaan		*					
	Peningkatan diplomasi kebencanaan		*					

Sumber : Laporan Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, BRR Juli 2007

Keterangan : *) Target spesifik belum dijabarkan di dalam Rencana Induk

**) Realisasi tahun 2007 merupakan target yang akan dicapai tahun 2007

Salah satu contoh pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang K3M yaitu pada pembangunan rumah dinas Polri di Kota Banda Aceh oleh BRR6. Lokasi bangunan rumah dinas ini langsung bersebelahan dengan kantor Polisi di Ulee Lheu. Rumah tersebut sudah langsung ditempati oleh pegawai Polri. Kualitas konstruksi rumah cukup memadai, misalnya terlihat dari atap yang berada dalam kondisi baik, namun ada beberapa bagian dinding yang mengalami retak ringan. Selain itu, kondisi prasarana dasar perumahan juga sudah memadai terlihat dari adanya jaringan air bersih (pompa air) dan jaringan listrik melalui adanya parabola di masing-masing rumah.

Gambar 3 - 37
Pembangunan Rumah Dinas Polri di Kota Banda Aceh



Sumber: Sekretariat P3B-Bappenas, November 2007

3.2 Pemerintah Daerah

3.2.1 Pemulihan Perumahan, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Kontribusi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya di bidang perumahan dan permukiman, tata ruang, pertanahan, dan lingkungan hidup tidak begitu besar. Seperti misalnya untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan, dalam beberapa kasus, Pemda tidak melakukan kegiatan pembangunan fisik perumahan. Pemda dalam hal ini berkontribusi dalam pembebasan lahan, seperti untuk:⁷

1. Pada pembebasan lahan untuk kawasan perumahan, Pemda melalui Tim Pembebasan yang dibentuk menghitung pembebasan lahan untuk bangunan.
2. Tiap rencana pembangunan oleh Bapel BRR yang menyangkut pembebasan tanah di wilayah Kabupaten Aceh Besar, Tim Pembebasan berasal dari Pemda (dana *sharing* dari APBD dan BRR). Kecuali untuk jalan, dimana 100 % dari BRR.

Untuk bidang lingkungan hidup, penataan ruang terbuka hijau dan pengadaan gedung laboratorium lingkungan hidup dan pengkajian dampak lingkungan merupakan contoh

⁶ Hasil kunjungan lapangan Tim P3B-Bappenas ke Provinsi NAD Bulan September-November 2007

⁷ Hasil Wawancara dengan Kasubdin Dinas Kimpraswil Kab. Aceh Besar (Bapak Mahdi Budiman), 04/09/07

bentuk kegiatan Pemda yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan untuk bidang pertanahan, selain dilakukan pembebasan lahan untuk beberapa kawasan perumahan, juga untuk beberapa fasilitas kepentingan umum seperti sekolah dan terminal.

Gambaran proporsi Pemda melalui APBD Tahun 2006 dan 2007 di beberapa Kab/Kota terpilih di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara yang mendukung keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi dijelaskan secara lebih rinci pada tabel berikut.

Tabel 3 - 58
Alokasi APBD Kabupaten/Kota Bidang Perumahan Permukiman,
Tata Ruang dan Pertanahan, serta Lingkungan Hidup

No	Provinsi/ Kabupaten /Kota				Keterangan (SKPD/Badan Terkait)
	TA 2006		TA 2007		
	Kegiatan Utama	Alokasi Anggaran (Rp)	Kegiatan Utama	Alokasi Anggaran (Rp)	
Kota Banda Aceh		144.542.327.605		266.614.014.177	APBD Kota Banda Aceh
1	Sektor Perumahan dan Permukiman	3.327.031.500		1.806.792.250	Dinas Tata Kota dan Permukiman
	Perbaikan Perumahan dan Permukiman	1.926.168.500		283.550.000	
2	Sektor Lingkungan Hidup	424.185.500		1.646.687.950	Bapedalda
	Pengadaan alat-alat laboratorium pengendaliandampak lingkungan hidup	345.000.000	Kegiatan: Pembangunan gedung laboratorium lingkungan hidup	842.840.000	
Kab. Aceh Besar		164.211.850.022		473.995.400.000	APBD Kab. Aceh Besar
1	Sektor Perumahan dan Permukiman	37.861.518.860			Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
	Perbaikan Perumahan dan Permukiman	4.008.622.000	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	1.788.750.000	Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
Kab. Pidie		587.058.793.087		625.211.813.239	APBD Kab. Pidie
1	Sektor Perumahan dan Permukiman				
	Peningkatan sarana dan prasarana permukiman	6.075.833.000	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan	5.361.400.000	Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

No	Provinsi/ Kabupaten /Kota				Keterangan (SKPD/Badan Terkait)
	TA 2006		TA 2007		
	Kegiatan Utama	Alokasi Anggaran (Rp)	Kegiatan Utama	Alokasi Anggaran (Rp)	
2	Sektor Lingkungan Hidup				
	Rehabilitasi lingkungan pantai yang rusak dan pemeliharaan kualitas SDA	608.980.000	Pengadaan prasarana laboratorium pengkajian dampak lingkungan	378.665.000	
Kab. Bireun		466.575.493.400		528.697.202.569	APBD Kab. Bireun
1	Sektor Perumahan dan Permukiman				
	Hanya belanja modal, administrasi umum, dan pegawai saja yang dicantumkan, tidak ada nama kegiatan		Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong	1.923.781.142	Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
2	Sektor Lingkungan Hidup				
	*		Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	304.864.000	Bappeda
			Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	15.000.000	Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Kab. Aceh Jaya		247.477.263.405		306.046.859.219	APBD Kab. Aceh Jaya
1	Sektor Perumahan dan Permukiman				
	Pembangunan dan rehabilitasi saluran lingkungan (luncuran 2005)	654.187.533	Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan	3.237.703.500	Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
			Pembangunan sarana prasarana air bersih perdesaan	2.985.171.000	Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
Kab. Aceh Barat		265.206.512.670			APBD Kab. Aceh Barat
	Tidak ada kegiatan yang terkait rehabilitasi dan				

No	Provinsi/ Kabupaten /Kota				Keterangan (SKPD/Badan Terkait)
	TA 2006		TA 2007		
	Kegiatan Utama	Alokasi Anggaran (Rp)	Kegiatan Utama	Alokasi Anggaran (Rp)	
	rekonstruksi				
Kab. Aceh Singkil		257.252.636.319		324.031.344.300	A[BD Kab. Aceh Singkil
1	Sektor Perumahan dan Permukiman				
	*		Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Sederhana Sehat	1.972.923.915	Dinas Perkotaan dan Permukiman
			Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	3.217.798.200	Dinas Perkotaan dan Permukiman
2	Sektor Lingkungan Hidup				
			Penataan ruang terbuka hijau	107.570.000	
3	Sektor Tata Ruang				
			Penyusunan Rencana Induk Ibukota Kecamatan	272.400.000	
Kab. Nias		394.827.151.900			APBD Kab. Nias
1	Sektor Perumahan dan Permukiman				
	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan	1.550.000.000			Dinas Perkotaan dan Permukiman
2	Sektor Pertanahan				
	Pembebasan/ganti rugi tanah untuk kepentingan umum	9.213.786.000			Dinas Pertanahan
Kab. Nias Selatan		**		**	

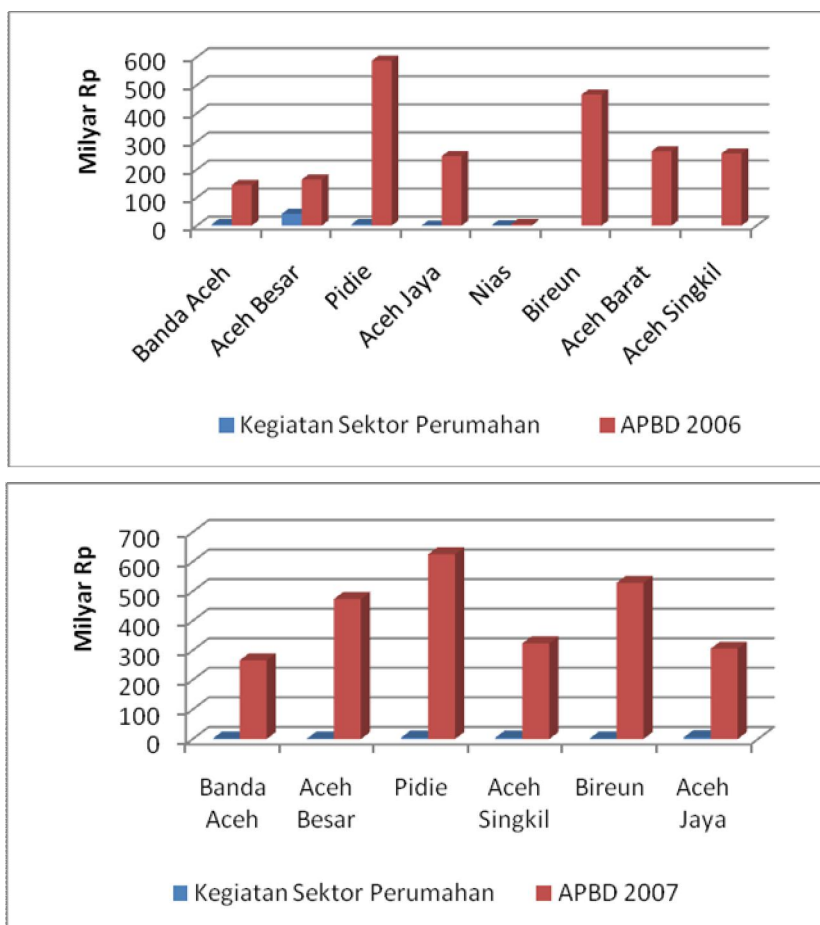
Sumber: APBD Kota Banda Aceh 2006 dan 2007, APBD Kabupaten Aceh Besar 2006 dan 2007, APBD Kabupaten Pidie 2006 dan 2007, APBD Kab. Bireun 2006 dan 2007, APBD Kab. Aceh Jaya 2006, APBD Kab. Aceh Barat 2006, APBD Kab. Aceh Singkil 2006 dan 2007, APBD Kab. Nias 2006

Keterangan: *) Tidak tercantum rincian kegiatan , hanya mencantumkan anggaran belanja

**) Tidak diperoleh dokumen dari Kab/Kota terkait

Dari tabel di atas, terdapat beberapa kabupaten/kota yang tidak mencantumkan rincian kegiatan, seperti di Kab. Aceh Singkil dan Kab. Aceh Barat, sementara untuk Kab.Nias Selatan, dokumen APBD terkait tidak diperoleh. Kondisi pada ketiga kabupaten ini menyebabkan analisis tidak dapat dilakukan lebih mendalam. Namun demikian, nilai total APBD Kab. Aceh Singkil dan Kab. Aceh Barat tetap dicantumkan pada gambar berikut. Kontribusi pembangunan sektor perumahan berbanding dengan total APBD dengan nilai persentase di bawah 5 % terdapat Kota Banda Aceh, Kab. Pidie dan Kab. Aceh Jaya, sedangkan Kab. Aceh Besar dan Kab.Nias sebesar 25 % dari total masing-masing APBD.

Grafik 3 - 15
Komposisi Pembangunan Sektor Perumahan dengan
APBD Kab/Kota



Sumber: Hasil Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Keterangan: Kab.Bireun, Aceh Barat, Singkil hanya nilai APBD 2006 total saja

Sementara untuk kegiatan bidang lingkungan hidup, terlihat adanya peningkatan kegiatan. Hal ini ditunjukkan pada tabel di atas baik dari alokasi pendanaan, atau adanya alokasi untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang lingkungan hidup, di mana pada tahun 2006 tidak ada, namun di tahun 2007 sudah ada, seperti pada Kab. Bireun dan Kab. Aceh Singkil. Kegiatan bidang lingkungan hidup yang mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan alokasi pendanaan sebesar hamper 3 (tiga) kali lipat dibandingkan tahun 2006. Sedangkan Kab, Pidie justru mengalami penurunan alokasi pendanaan sebesar 37 %.

Untuk kegiatan tata ruang dan pertanahan, kontribusi Pemda sepanjang tahun 2006 dan 2007 ditinjau dari alokasi APBD tidak begitu besar. Di tahun 2006, hanya Kab.Nias dengan kegiatan pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan tahun 2007 hanya Kab. Aceh Singkil dengan kegiatan penyusunan Rencana Induk Ibukota Kecamatan.

3.2.2 Pemulihan Infrastruktur

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pembiayaan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Kimpraswil, Dinas Perhubungan. Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah tersebut berasal dari APBD dan bantuan donor.

Konsentrasi pelaksanaan kegiatan pemulihan infrastruktur banyak dititikberatkan pada pembukaan akses-akses jalan dan jembatan ke daerah yang terputus atau belum ada. Peran pemerintah daerah juga sangat besar dalam upaya pembebasan lahan. Sampai saat ini, sengketa lahan seringkali menjadi permasalahan yang selalu dihadapi di lapangan. Sehingga menyebabkan hambatan di beberapa rencana kegiatan.

Gambar 3 - 38
Pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemda



Pembebasan lahan untuk jalan -Aceh Barat



Areal Pelabuhan -Aceh Jaya



Areal Perkantoran -Aceh Jaya
Sumber : Dokumentasi P3B, 2007

Kegiatan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum lebih diprioritaskan pada penyelesaian pekerjaan infrastruktur umum seperti jalan dan jembatan, irigasi, drainase, sungai pengendali banjir serta tanggul pengaman pantai. Pada umumnya, untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur tersebut lebih dominan berasal dari sumber dana APBN. Perencanaan kegiatan yang bersumber dari APBD sebagian besar digunakan untuk melanjutkan pembangunan BRR yang masih belum rampung dan kegiatan pemeliharaan.

Tabel 3 - 59
Alokasi APBD Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi NAD tahun 2005 – 2007 (Dalam Rp. Ribu)

No	Prov/Kabupaten	DAK Tahun			Jumlah	DAU Tahun			Jumlah
		2005	2006	2007		2005	2006	2007	
1	Provinsi NAD	609.699	182.900	-	792.599	271.147.000	460.881.000	460.881.000	1.192.909.000
2	Kab. Aceh Barat	14.532.250	26.680.000	26.680.000	67.892.250	139.496.000	229.450.000	229.450.000	598.396.000
3	Kab. Aceh Besar	12.717.794	32.510.000	32.510.000	77.737.794	192.200.000	322.660.000	322.660.000	837.520.000
4	Kab. Aceh Selatan	16.116.668	27.790.000	27.790.000	71.696.668	145.661.000	244.851.000	244.851.000	635.363.000
5	Kab. Aceh Singkil	11.190.000	26.820.000	26.820.000	64.830.000	117.849.000	174.747.000	174.747.000	467.343.000
6	Kab. Aceh Tengah	13.044.000	25.830.000	25.830.000	64.704.000	120.251.000	239.193.000	239.193.000	598.637.000
7	Kab. Aceh Tenggara	12.895.000	24.440.000	24.440.000	61.775.000	149.207.000	215.362.000	215.362.000	579.931.000
8	Kab. Aceh Timur	17.701.040	37.750.000	37.750.000	93.201.040	159.002.000	244.423.000	244.423.000	647.848.000
9	Kab. Aceh Utara	13.458.150	37.870.000	37.870.000	89.198.150	199.896.000	199.896.000	199.896.000	599.688.000
10	Kab. Aceh Bireuen	11.592.000	38.460.000	38.460.000	88.512.000	183.713.000	308.062.000	308.062.000	799.837.000
11	Kab. Pidie	16.217.000	41.400.000	41.400.000	99.017.000	242.139.000	391.468.000	391.468.000	1.025.075.000
12	Kab. Aceh Simeulue	12.386.432	26.810.000	26.810.000	66.006.432	105.355.000	149.309.000	149.309.000	403.973.000
13	Banda Aceh / Kota	8.583.000	22.630.000	22.630.000	53.843.000	160.363.000	266.705.000	266.705.000	693.773.000
14	Kota Sabang	8.490.657	27.490.000	27.490.000	63.470.657	92.661.000	149.841.000	149.841.000	392.343.000
15	Kota Langsa	9.190.000	21.720.000	21.720.000	52.630.000	104.780.000	184.322.000	184.322.000	473.424.000
16	Kota Lhokseumawe	8.966.000	18.890.000	18.890.000	46.746.000	108.124.000	168.470.000	168.470.000	445.064.000
17	Kab. Gayo Lues	11.584.745	22.460.000	22.460.000	56.504.745	112.152.000	179.312.000	179.312.000	470.776.000
18	Kab. Aceh Barat Daya	13.469.000	26.870.000	26.870.000	67.209.000	103.201.000	171.540.000	171.540.000	446.281.000
19	Kab. Aceh Jaya	12.865.119	25.260.000	25.260.000	63.385.119	100.016.000	157.363.000	157.363.000	414.742.000
20	Kab. Nagan Raya	13.623.150	25.760.000	25.760.000	65.143.150	116.281.000	189.358.000	189.358.000	494.997.000
21	Kab. Aceh tamiang	12.559.055	27.090.000	27.090.000	66.739.055	120.685.000	188.709.000	188.709.000	498.103.000
22	Kab. Bener Meriah	4.737.200	28.270.000	28.270.000	61.277.200	57.692.000	184.958.000	184.958.000	427.608.000
		256.527.959	592.982.900	592.800.000	1.442.310.859	3.101.871.000	5.020.880.000	5.020.880.000	13.143.631.000

Sumber : APBD provinsi/kabupaten/kota di Provinsi NAD tahun anggaran 2005, 2006 dan 2007.

Total anggaran Provinsi NAD tahun 2007 untuk kegiatan pembangunan di daerah adalah Rp. 5 Triliun untuk DAU dan dan Rp. 593 Milyar untuk DAK. Tidak seluruh dana tersebut digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, sebagian besar masih digunakan untuk mengembangkan kapasitas dan kegiatan reguler.

Dana DAU di masing-masing kabupaten/kota sebagian besar digunakan untuk kegiatan rutin seperti belanja dinas, belanja modal, belanja barang, dan lain lain. Sedangkan dana DAK untuk provinsi dan sebagian kabupaten/kota di Provinsi NAD telah ada yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Daerah-daerah yang melakukan ini adalah daerah yang memiliki PAD cukup tinggi dibandingkan daerah lainnya, seperti Banda Aceh dan Aceh Timur.

Dana Dekonsentrasi merupakan dana yang hampir seluruhnya digunakan untuk menunjang rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk Provinsi Aceh mendapatkan dana dekonsentrasi total sebesar Rp. 3 Triliun untuk tahun 2007 yang dialokasikan untuk kegiatan infrastruktur.

Pada APBD kabupaten kota, tidak mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi melainkan dana perbantuan yang pertanggungjawabannya dilakukan langsung ke Departemen atau Kementrian/Lembaga. Tidak seluruh kabupaten/kota mendapatkan alokasi dana ini dan besarnya juga berbeda untuk tiap wilayah. Dari 7 (tujuh) kabupaten/kota yang dikunjungi, dana perbantuan ini sulit untuk diidentifikasi. Sehingga tidak ada informasi maupun data yang dapat dikumpulkan.

Provinsi NAD dan Sumatera Utara merupakan daerah maju dengan PAD yang mulai membaik selama 3 tahun berjalan pasca tsunami. Untuk tahun 2008 dana tersebut akan

mulai diberikan oleh pusat kepada Provinsi NAD. Dengan demikian sampai saat ini tidak ada dana otonomi khusus yang dialirkan ke Provinsi NAD.

Khusus untuk kegiatan infrastruktur, besarnya penyerapan dana APBD tahun anggaran 2006-2007 akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3 - 60
Alokasi APBD Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Infrastruktur tahun
2006 - 2007 (Dalam Rp. Ribu)

NO	2006		2007		Keterangan
	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Kegiatan	Alokasi Anggaran	
1. PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM					
1	Penataan Lingkungan dan Permukiman dan Penyediaan Fasilitas Penunjang Kepentingan Umum	5.840.400.000	Infrastruktur jalan, jembatan, energi, SDA	3.049.559	APBN Dekon, TP
2	Transportasi (Perencanaan Teknis Jalan/Jembatan)	484.957.000	Pembangunan jalan dan jembatan	57.966,9	Pembantuan
3	Surve Kondisi Jaringan Jalan	196.000.000	Pembangunan sumber energi dan listrik	3.567,9	Dekonsentra si
4	Identifikasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	52.402.000	Reguler	5.666.371,0	DAU
2. KOTA BANDA ACEH					
1	Rehabilitasi saluran drainase	595.371	Pembangunan drainase	106.500	
2	Rehabilitasi bangunan terminal	400.456			
3	Rehabilitasi /pembangunan terminal barang	389.724			
3. KAB. ACEH BESAR					
1	Pembangunan Irigasi	4.704.539	Reguler PU	796.891	
2	Pembuatan Tanggul pengaman	1.713.800	Reguler Perhubungan	932.161	
3	Pembangunan Saluran drainase	1.585.972	N/A		
4	Penyediaan sarana Air bersih	2.557.350	N/A		
5	Pembangunan Jembatan	2.320.926	N/A		
6	Pembangunan jalan	4.942.886	N/A		
7	Rehabilitasi terminal	323.581	N/A		
4. KAB. PIDIE					
1	Pembangunan jembatan lokal	3.182.204	Reguler PU	1.015.000	
2	Rehab ilitasi irigasi	4.220.485	Reguler Perhubungan	923.590	APBD 2006
3	Rehabilitasi irigasi	1.660.837			Luncuran 2005
4	Rehabilitasi jalan kabupaten	4.720.259			
5	Rehabilitasi jembatan kabupaten	4.205.424			

NO	2006		2007		Keterangan
	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Kegiatan	Alokasi Anggaran	
6	Penguatan tebing sungai	1.120.230			
7	Air limbah	602.934			
8	Pembangunan bangunan terminal	105.673			
9	Rehabilitasi terminal	48.650			
10	Perbaikan terminal Sigli	7.200			
5. KAB. BIREUN					
1	Pembangunan jalan	32.270.893	Pembangunan jalan dan jembatan	30.041.394	
2	Pembangunan jembatan	6.282.049	Pembangunan saluran drainase	1.923.781	
3	Pembangunan irigasi	11.417.611	Rehabilitasi irigasi	3.823.036	
4	Pembangunan instalasi air limbah	1.301.627	Pengendalian banjir	1.550.630	
5	Rehabilitasi instalasi air minum	2.317.302	Pembangunan terminal dan halte bus	177.000	
6. KAB. ACEH JAYA					
1	Rehabilitasi Jalan Kabupaten	7.419.050	Rehabilitasi jalan dan jembatan	42.338.158	
2	Peningkatan Jalan kabupaten	6.201.925	Pembangunan saluran drainase	7.108.703	
3	Rehabilitasi sarana prasarana jalan	5.149.950	Rehabilitasi jembatan darurat	2.577.978	
4	Rehabilitasi Jembatan permanen	584.100	Pengembangan/pengelolaan jaringan irigasi	17.398.810	
5	Pembangunan jembatan permanen	2.379.350	Penyediaan ir bersih	342.275	
6	Rehabilitasi jembatan darurat	2.689.784	Pembuatan sarana air minum	341.000	
7	Pembuatan sarana Air bersih	1.632.490	Pengendalian banjir	23.673.054	
8	Rehabilitasi Irigasi	1.922.930	Mitigasi bencana untuk kebakaran	150.000	
9	Pembuatan tanggul pengaman pantai	1.625.000			
10	Pembuatan tanggul sungai	9.743.625			
11	Penanganan pasca bencana alam	543.192			
12	Rehab dermaga speed boat	5.000			
7. KAB. ACEH BARAT					
1	Perbaikan/Pemeliharaan Jalan Kabupaten	3.819.620	N/A		
2	Perbaikan/Pemeliharaan Jembatan	1.820.380	N/A		
3	Kegiatan Pembangunan Pengamanan Tebing	3.431.640	N/A		
4	Perbaikan Jaringan Rawa	1.076.000	N/A		

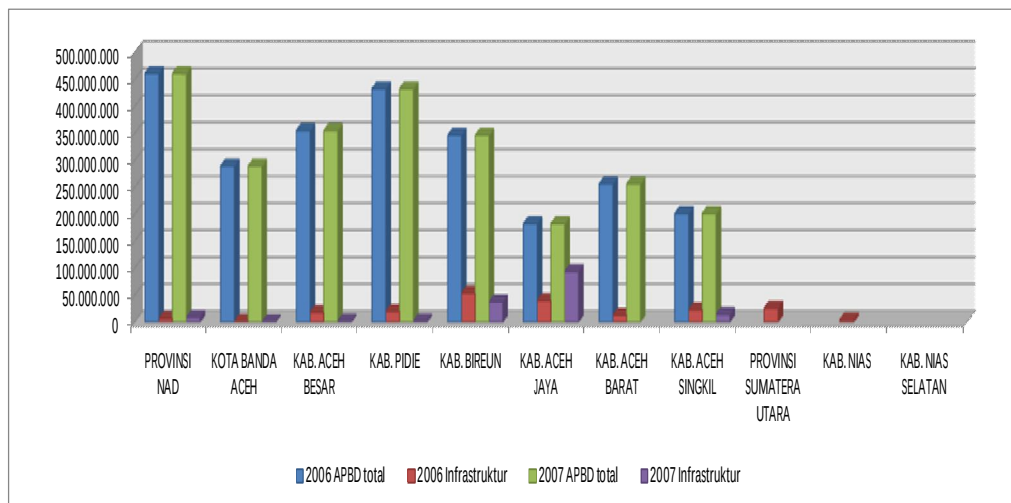
NO	2006		2007		Keterangan
	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Kegiatan	Alokasi Anggaran	
5	Pembangunan Sarana Air Bersih	1.740.000	N/A		
6	Irigasi - Pembuatan Bangunan Pengelak Krueng Meureubo	750.000	N/A		
8. KAB. ACEH SINGKIL					
1	Pembangunan alan	12.769.742	Pembangunan/perbaikan jalan	9.825.556	
2	Pembangunan jembatan	3.954.815	Pembangunan/perbaikan jembatan	3.573.612	
3	instalasi air minum	2.431.857	Perbaikan drainase	528.379	
4	Perbaikan Terminal	224.125	Perbaikan tanggul sungai	782.457	
5	Pengadaan alat angkutan	13.000			
6	Pembuatan/perbaikan irigasi	3.434.647			
9. PROVINSI SUMATERA UTARA					
1	Jalan	22.575.000	N/A		
2	Irigasi	200.330	N/A		
3	Pengendali banjir	1.050.000	N/A		
4	Pengamanan Pantai	2.256.700	N/A		
10. KAB. NIAS					
1	Rehabilitasi Jalan	2.500.000	N/A		D. Kimpraswil
2	Rehabilitasi sarana prasarana Air bersih	408.000	N/A		
3	Rehabilitasi sistem irigasi	1.683.000	N/A		
11. KAB. NIAS SELATAN					
	N/A		N/A		

N/A = Tidak ada Data.

Sumber : APBD masing-masing provinsi/kabupaten/kota, 2006 dan 2007.

Catatan : *) kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Grafik 3 - 16
Alokasi APBD dan Realisasi dalam kegiatan infrastruktur



Alokasi anggaran di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi NAD dan Sumatera Utara telah mulai menunjukkan adanya peningkatan. Beberapa Kabupaten yang masih memiliki APBD rendah seperti Aceh Jaya dan Aceh Singkil lebih banyak melakukan pembenahan dan pembangunan infrastruktur kembali pascabencana. Sedangkan intensitas alokasi pembangunan infrastruktur lebih banyak difokuskan untuk peningkatan di bidang yang lain.

3.2.3 Sosial Budaya

Pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias pasca tsunami, pendanaannya selain bersumber dari dana BRR, NGO, K/L, juga diharapkan dari APBD Provinsi sebagai penunjang proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdapat 21 Kabupaten/Kota yang kena dampak akibat bencana tsunami dan 2 kabupaten di provinsi Sumatera Utara yaitu Kabupaten Nias dan kabupaten Nias Selatan. Dalam penjelasan berikut akan dibahas 8 kabupaten/kota sebagai sample. Fokus kajian diarahkan untuk melihat kontribusi dana APBD Kabupaten/Kota dalam menunjang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami selain untuk pelaksanaan program dan kegiatan regular pemerintah daerah. Adapun 7 kabupaten/kota tersebut meliputi : Kota Banda Aceh, Kab Aceh Besar, Kab Aceh Jaya, Kab Aceh Barat, Kab Pidie, Kab Birien, Aceh Singkil, dan Kab Nias. Alokasi APBD Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut akan dibahas lebih lanjut. Rincian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang sosial budaya di 9 Kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Tahun 2006			Tahun 2007		Ket
	Kegiatan	Alokasi Anggaran		Kegiatan	Alokasi Anggaran	
Kota Banda Aceh		144,542,327,605			266,614,014,177	Total APBD
1	Pendidikan	23,863,204,418	1	Pendidikan	45,222,768,127	
a	Kegiatan Rehabilitasi Sekolah		a	Peningkatan Pelayanan Pendidikan		
b	Pembinaan dan Pelatihan Guru		b	Rehabilitasi sekolah		
c	Pemberian Beasiswa		c	Pemberian Beasiswa		
2	Kesehatan	6,702,225,782	2	Kesehatan	14,994,031,313	
a	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular		a	Pemberantasan Penyakit Menular		
b	Rehab Rumah Medis dan Para Medis		b	Rehab Rumah Medis dan Para Medis		
3	Agama, Sosial dan Budaya	3,769,898,285	3	Agama, Sosial dan Budaya	48,646,713,497	
a	Rehabilitasi dan Bantuan Untuk Penyandang Masalah Sosial		a	Pembinaan Fakir Miskin dan Wanita Rawan Sosial		
b	Sosialisasi Syariat Islam		b	Pelatihan Ulama		
c	Pemberdayaan, Pengembangan dan Pengendalian Pariwisata		c	Dialog Kebudayaan		
Kabupaten Aceh Besar		164,211,850,022			473,995,400,000	Total APBD
1	Pendidikan	11,648,700,000	1	Pendidikan	8,462,755,220	
a	Rehabilitasi gedung sekolah		a	Rehabilitasi ruang sekolah		
b	Pelatihan peningkatan mutu guru		b	Pemberian beasiswa		
c	Pemberian beasiswa		c	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik		
2	Kesehatan	8,061,154,323	2	Kesehatan	479,235,460	
a	Pembangunan & Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (Polindes, Pustu, rumah dokter dan rumah paramedis)		a	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan		
b	Rehabilitasi sarana air bersih Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat		b	Revitalisasi sistem kesehatan masyarakat		
			c	Peningkatan pelayanan dan penanganan masalah		
			d	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan		
			e	Pelayanan penanganan penyakit menular		
3	Agama, Sosial dan Budaya	1,865,888,916	3	Agama, Sosial dan Budaya	2,552,575,500	
a	Pembinaan & penyantunan yatim piatu		a	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial		
b	Sosialisasi syariat Islam		b	Peningkatan pembangunan sarana & prasarana olahraga		
c	Peningkatan sarana & prasarana olahraga		c	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian		
Kabupaten Pidie		587,058,793,087			625,211,813,239	Total APBD
1	Pendidikan	19,559,580,875	1	Pendidikan	20,208,902,000	
a	Rehabilitasi gedung sekolah		a	Rehabilitasi gedung sekolah		
b	Pelaksanaan beasiswa		b	Pemberian beasiswa		
2	Kesehatan	12,058,367,374	2	Kesehatan	8,893,806,000	
a	pemeliharaan sarana kesehatan		a	Pembangunan sarana kesehatan		
b	Peningkatan pelayanan kesehatan		b	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan		
c	Perencanaan kebijakan kesehatan					
d	Pencegahan pemberantasan penyakit					
3	Agama, Sosial dan Budaya	12,341,280,000	3	Agama, Sosial dan Budaya	583,180,172	
a	Pemberdayaan sosial kemasyarakatan		a	Bimbingan sosial dan bantuan sarana EEP kepada KUBE fakir miskin		
b	Pembinaan keolahragaan		b	Pengembangan kegiatan keagamaan & syariat Islam		
c	Pengkajian dan pengembangan syariat islam		c	Peningkatan pemb sarana & prasarana olahraga		

Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA 2006/2007 III - 100

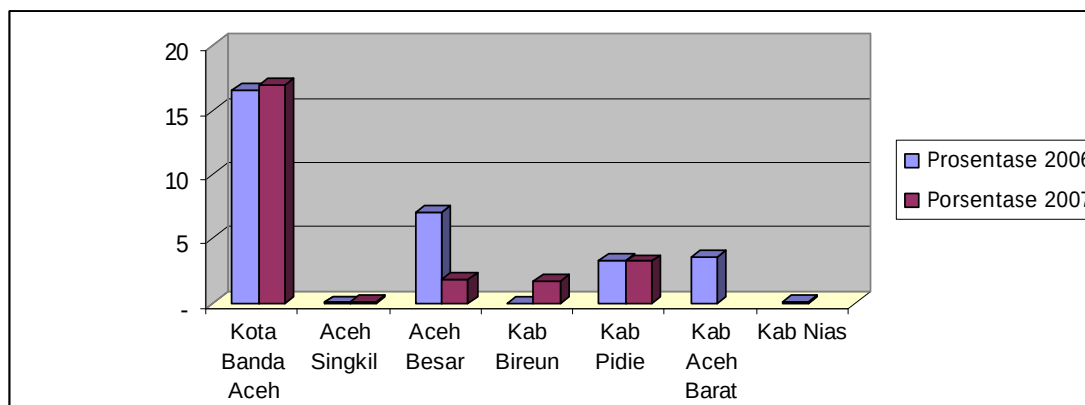
No	Tahun 2006			Tahun 2007		Ket
	Kegiatan	Alokasi Anggaran		Kegiatan	Alokasi Anggaran	
Kabupaten Bireun		466,575,493,400			528,697,202,569	Total APBD
1	Pendidikan	*	1	Pendidikan	8,965,442,670	
			a	Program penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini, SD, Menengah dan Non formal		
			b	Pendidikan Mutu dan tenaga pendidik		
			c	Manajemen Pelayanan pendidikan		
2	Kesehatan	*	2	Kesehatan	733,809,459	
			a	Program upaya kesehatan masyarakat		
			b	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat		
			c	Perbaikan gizi masyarakat		
			d	Pencegahan penyakit menula		
3	Agama, Sosial dan Budaya	*	3	Agama, Sosial dan Budaya	560,825,500	
			a	Pembinaan anak terlantar		
			b	Pembinaan para penyandang cacat dan trauma		
			c	Peningkatan mutu organisasi & tenaga keolahragaan		
Kabupaten Aceh Jaya		247,477,263,405			**	Total APBD
1	Pendidikan		1	Pendidikan	**	
a	Rehabilitasi gedung sekolah					
b	Rehabilitasi rumah dinas guru					
2	Kesehatan		2	Kesehatan	**	
	Pembangunan rumah dinas dokter dan perawat					
b	Pemberantasan penyakit menular					
c	Pelayanan kesehatan pengungsi tsunami					
d	Perbaikan gizi masyarakat					
3	Agama, Sosial dan Budaya		3	Agama, Sosial dan Budaya	**	
a	Pelatihan dan sosialisasi syariat Islam					
b	Pelatihan tenaga kerja					
c	Pembinaan seni dan kebudayaan					
Kabupaten Aceh Barat		265,206,512,670			**	Total APBD
1	Pendidikan	9,298,991,500	1	Pendidikan	**	
a	Rehabilitasi gedung sekolah					
b	Manajemen pelatihan kepala sekolah					
c	Bantuan beasiswa					
2	Kesehatan	8,084,490,001	2	Kesehatan	**	
	Kegiatan Penanggulangan pencegahan penyakit menular					
a	Rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan					
b	kesehatan					
3	Agama, Sosial dan Budaya	888,486,000	3	Agama, Sosial dan Budaya	**	
	Kegiatan Pengkajian dan Sosialisasi/Publikasi syariat Islam					
a	Bimbingan dan Pelatihan bagi Pekerjaan sosial masyarakat					
b						
Kabupaten Aceh Singkil		257,252,636,319			324,031,344,300	Total APBD
1	Pendidikan	180,000,000	1	Pendidikan	120,000,000	
	Tidak ada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, hanya kegiatan reguler berupa belanja modal dan jasa			Tidak ada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, hanya kegiatan reguler berupa belanja modal dan jasa		
2	Kesehatan	180,000,000	2	Kesehatan	305,000,000	
	Tidak ada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, hanya kegiatan reguler berupa belanja modal dan jasa			Tidak ada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, hanya kegiatan reguler berupa belanja modal dan jasa		
3	Agama, Sosial dan Budaya	143,000,000	3	Agama, Sosial dan Budaya	90,600,000	
	Tidak ada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, hanya kegiatan reguler berupa belanja modal dan jasa			Tidak ada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, hanya kegiatan reguler berupa belanja modal dan jasa		
Kabupaten Nias		394,827,151,900			**	Total APBD
1	Pendidikan	188,619,000	1	Pendidikan	**	
	Penyelenggaraan paket A, B dan C					
2	Kesehatan	99,057,000	2	Kesehatan	**	
	Pelatihan manajemen puskesmas					
	Pemberantasan penyakit menular					
3	Agama, Sosial dan Budaya	10,124,000	3	Agama, Sosial dan Budaya	**	
	Sosialisasi pengarusutamaan gender					

Dalam konteks kontribusi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias terlihat dari alokasi anggaran dan program dari APBD Kab/Kota di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias pada tahun 2006/2007. Dari 7 kab/kota yang menjadi sampel terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan. Pada aspek anggaran, pada tahun 2006 terdapat 6 kabupaten yang mengalokasikan APBD 2006 untuk pemulihan bidang pendidikan yang meliputi : Kota Banda Aceh (17%), Kab Aceh Besar (7%), Kab Aceh Barat (4%), Kab Pidie (3%), Kab Aceh Singkil, dan Kab Nias. Sedangkan Kab Bireun tidak mengalokasikan APBD untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi dan hanya difokuskan pada program reguler berupa pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2007 sesuai ketersediaan dokumen anggaran Pemda, dari 5 kabupaten/kota terdapat 4 kab/kota mengalokasikan anggaran APBD untuk proses pemulihan bidang pendidikan yaitu : Kota Banda Aceh (17%), Kab Pidie (3%), Kab Bireun (2%), Kab Aceh Besar (2%). Sedangkan Kab Aceh Singkil tidak mengalokasikan APBD untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi dan hanya difokuskan pada program reguler berupa pengadaan barang dan jasa dan mengalami defisit anggaran sebesar Rp 33.6 miliar.

3.2.3.1 Bidang Pendidikan

Sedangkan pada aspek program, keenam kab/kota pada tahun 2006 dan 4 Kab/kota pada tahun 2007 melaksanakan program sesuai dengan rencana ainduk berupa pelaksanaan 4 program utama sesuai dengan rencana induk yaitu program *rehabilitasi gedung sekolah, penyelenggaraan pendidkan paket A-C, pembinaan dan pelatihan guru, dan pemberian beasiswa kepada siswa yang kena bencana*. Gambaran prosentase kontribusi APBD pemerintah daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang pendidikan dapat dilihat pada diagram berikut :

Grafik 3 - 17
Prosentase Anggaran APBD Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan



Sumber : Analisis P3B-Bappenas

Dari diagram diatas terlihat Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan kontribusi anggaran terbesar dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang pendidikan. Sedangkan Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Nias memberikan kontribusi yang kecil dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi secara maksimal karena anggaran masih diprioritaskan untuk biaya modal dan jasa.

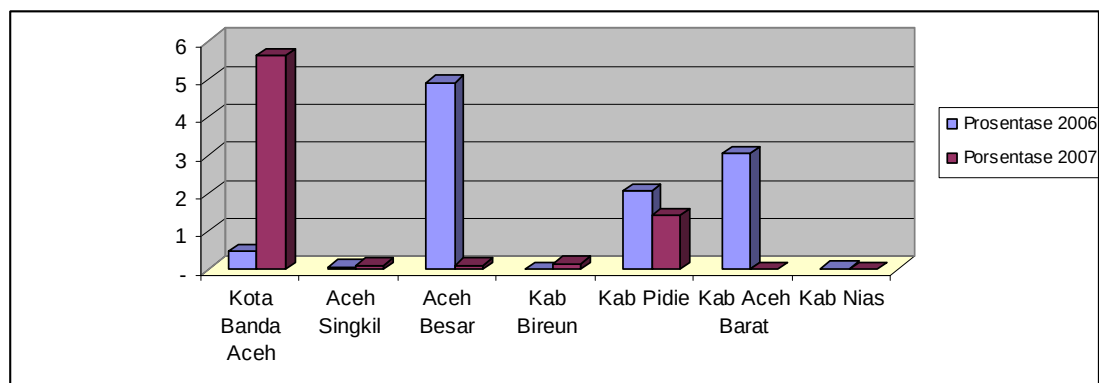
3.2.3.2 Bidang kesehatan

Pada tahun 2006 terdapat 6 kabupaten yang mengalokasikan APBD 2006 untuk pemulihan bidang kesehatan yang meliputi : , Kab Aceh Besar (5%), Kab Aceh Barat (3%), Kab Pidie (2%), Kota Banda Aceh, Kab Aceh Singkil, dan Kab Nias. Sedangkan Kab Bireun tidak mengalokasikan APBD untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi dan hanya difokuskan pada program reguler berupa pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2007 terdapat 3 kabupaten/kota mengalokasikan anggaran APBD untuk proses pemulihan bidang kesehatan yaitu : Kota Banda Aceh (6%), Kab Pidie (1%), Kab Bireun, Kab Aceh Besar, Kab Bireun. Sedangkan 2 lainnya Kab Aceh Barat dan Kab Nias tidak mengalokasikan APBD untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi dan hanya difokuskan pada program reguler berupa pengadaan barang dan jasa .

Sedangkan pada aspek program, keenam kab/kota pada tahun 2006 dan 5 Kab/kota pada tahun 2007 melaksanakan program sesuai dengan rencana induk berupa pelaksanaan 4 program utama sesuai dengan rencana induk yaitu : *program rehabilitasi sarana kesehatan, pelatihan manajemen tenaga medis, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, dan perbaikan gizi masyarakat.*

Gambaran prosentase kontribusi APBD pemerintah daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang pendidikan dapat dilihat pada diagram berikut:

Grafik 3 - 18
Prosentse Anggaran APBD Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kesehatan



Sumber : Analisis P3B-Bappenas

Dari diagram diatas terlihat Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan kontribusi anggaran terbesar dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang pendidikan. Sedangkan Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Nias memberikan kontribusi terkescil dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi secara maksimal karena anggaran masih diprioritaskan untuk biaya modal dan jasa.

3.2.3.3 Bidang Agama, Sosial Budaya

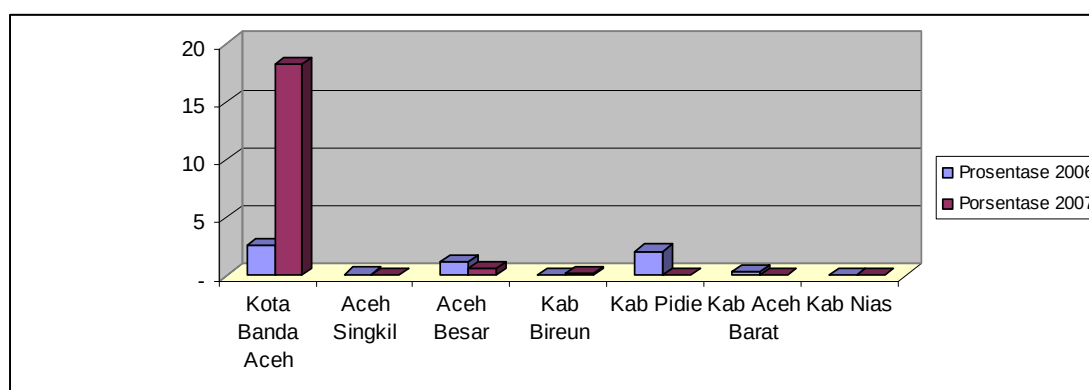
Pada tahun 2006 terdapat 6 kabupaten yang mengalokasikan APBD 2006 untuk pemulihan bidang agama, sosial budaya yang meliputi : , Kota Banda Aceh, Kab Pidie (2%) Kab Aceh Besar (1%), Kab Aceh Barat, Kab Aceh Singkil, dan Kab Nias. Sedangkan Kab Bireun tidak mengalokasikan APBD untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi dan hanya difokuskan pada program reguler berupa pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2007 semua 5 kabupaten/kota mengalokasikan anggaran APBD untuk proses pemulihan bidang

agama, sosial budaya yaitu : Kota Banda Aceh (18%), Kab Aceh Besar, Kab Pidie, Kab Bireun, dan Kab Nias.

Sedangkan pada aspek program, keenam kab/kota pada tahun 2006 dan 5 Kab/kota pada tahun 2007 melaksanakan program sesuai dengan rencana induk berupa pelaksanaan 4 program utama sesuai dengan rencana induk yaitu : *program peningkatan kajian keislaman, pemberdayaan sosial kemasyarakatan, pengarusutamaan gender, dan peningkatan nilai kebudayaan.*

Gambaran prosentase kontribusi APBD pemerintah daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang pendidikan dapat dilihat pada diagram berikut:

Grafik 3 - 19
Prosentse Anggaran APBD Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Agama, Sosial Budaya



Sumber : Analisis P3B-Bappenas

Dari diagram diatas terlihat Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan kontribusi anggaran terbesar dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang pendidikan. Sedangkan Kabupaten Aceh Singkil, Kab Bireun, Kab Aceh barat dan Kabupaten Nias memberikan alokasi yang kecil mengalokasikan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi secara maksimal karena anggaran masih diprioritaskan untuk biaya modal dan jasa.

3.2.4 Pemulihan Ekonomi

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Pemerintah daerah dilakukan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau yang kita kenal dengan Dinas. Dalam pemulihan perekonomian SKPD/Dinas yang terkait adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas pariwisata. Pelaksanaan program kegiatan oleh masing-masing dinas dapat terlihat dari program kegiatan dan anggaran yang dicantumkan dalam APBD.

Pelaksanaan program pada Dinas Perikanan dan Kelautan NAD lebih menekankan pada pengadaan peralatan dan perlengkapan perikanan tangkap maupun budidaya. Dinas Pertanian Tanaman Pangan NAD mengkonsentrasikan kegiatan pada pengadaan sarana produksi pertanian, pemberian bantuan alat pertanian, rehabilitasi/pembangunan sarana dan prasarana sektor pertanian, pendidikan dan pelatihan.

Adapun Dinas Koperasi dan UKM NAD menekankan pada aspek pembinaan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia serta pengembangan pada aspek permodalan usaha. Dinas Perindustrian dan Perdagangan NAD menekankan pada pembangunan pasar sebagai

salah satu cara untuk menghidupkan kembali penghidupan ekonomi masyarakat. Dinas Tenaga Kerja menekankan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. Dinas Perkebunan melaksanakan program pemulihan tanaman khususnya padi dan bakau.

Tabel 3 - 61
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ekonomi dan Usaha NAD-Nias oleh
Pemerintah Daerah NAD

NO	PEMERINTAH DAERAH	KEGIATAN
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NAD	▪ Penyediaan peralatan pengolahan ikan (fish Nugget) ▪ Penyediaan alat penangkap ikan ▪ Rehabilitasi saluran tambak ▪ Pengadaan sarana alat pengolahan ikan ▪ Optimalisasi tambak masyarakat pasca tsunami dan penguatan institusi pembenihan ▪ Pengadaan alat penangkapan ikan skala kecil ▪ Penyediaan bantuan agroinput perikanan ▪ Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap
2	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi NAD (di 10 Kabupaten/Kota yaitu Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Timur, Nagan Raya, Aceh Jaya, Simeulue)	▪ Realisasi Penarikan/Penyerapan Dana 2006 Hibah ADB No. 0002 - INO Juli 2006 Rp. 32.205.986.418,- atau sebesar 44,70% (dari pagu anggaran Rp. 72.050.000.000,-) dengan sisa dana Rp. 39.84.013.582,- atau sebesar 55,30% terdiri dari: ▪ Administrasi Umum, Pengadaan Sarana Produksi ▪ Pembangunan Gedung Kantor ▪ Pembangunan Prasarana dan sarana lingkungan gedung ▪ Pengadaan perlengkapan sarana gedung, pengadaan meubeler ▪ Pengadaan alat pertanian, pengadaan alat pengolah data, Pengadaan kendaraan ▪ Pencetakan sawah, rehabilitasi dan konservasi lahan ▪ Pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pertanian ▪ Rehabilitasi Gedung Negara ▪ Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Pertanian ▪ Pengintegrasian Teknis, Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kerja ▪ Sedangkan Komitmen dan Realisasi Keuangan CMU Coordination dan Monitoring Unit) Dana Hibah ADB No.0002-INO-Juli 2006 sebesar Rp. 822.297.000,- atau sebesar 100%.
3	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NAD	▪ Pemantapan program pembinaan koperasi dan UKM ▪ Penataan dan Perkuatan kelembagaan koperasi dan UKM ▪ Monitoring dan evaluasi perkoperasian ▪ Pengembangan sarana dan perkuatan usaha bagi koperasi unggulan ▪ Perkuatan modal usaha sarana bagi UKI ▪ Bimbingan teknis KSP/USP Koperasi Pola Syari'ah ▪ Analisis diklat bagi Koperasi dan UKM

NO	PEMERINTAH DAERAH	KEGIATAN
		▪ Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi dan UKM
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NAD	▪ Pembuatan Leaflet/Poster ▪ Pendidikan dan Pelatihan Teknis ▪ Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/Updating/Analisa dan Statistik ▪ Penyusunan Program dan Rencana Teknis ▪ Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi ▪ Bantuan Usaha Ekonomi Produktif ▪ Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Industri Kecil Menengah ▪ Penyelenggaraan Lomba, Sayembara dan Festival ▪ Pemberian Status Badan Hukum ▪ Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 ▪ Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4
5	Dinas Tenaga Kerja Provinsi NAD	▪ Memberikan bantuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdaya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Simeulue, Aceh Singkil ▪ Pembuatan Kebun Cabe di Sabang ▪ Perbaikan Saluran Air, Pembuatan Saluran Irigasi di Aceh Besar ▪ Perbaikan sarana publik, rehab jalan di Banda Aceh
6	Dinas Perkebunan Provinsi NAD	▪ Pemulihan tanaman padi dan bakau juga ditambah adanya pembangunan sarana kantor, pengadaan kendaraan di NAD

Sumber : Bedah APBD Provinsi NAD Tahun Anggaran 2006 dan 2007 , Tim P3B BAPPENAS

Tabel berikut menyajikan penyebaran pembangunan dan rehabilitasi pasar pada 18 Kabupaten/Kota dengan berbagai bantuan sumber pendanaan TA 2006.

Tabel 3 - 62
Pembangunan dan rehabilitasi Pasar Tradisional, Induk, Grosir, penunjang yang di koordinasikan oleh Pemda Prov. NAD di Provinsi NAD Tahun 2006 dan 2007

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH (UNIT)	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	Banda Aceh	Kuta Alam Baiturrahman	1 1	CHF CHF	Pasar Ikan Peunayong Rehab Pasar Kp. Baro
2	Aceh Besar	Seulimun Lembah Selawah Lhoong Pulo Aceh Lhoknga Krueng Raya Ingin Jaya Lhoong Kuta Baro (Pekan ateuk) Lhoknga (Lampuuk)	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BRR BRR BRR JICs JICs JICs JICs CHF CHF CHF	Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar Induk Rehab. Pasar sayur Rehab Pasar Ikan dan sayur Pasar tradisional

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH (UNIT)	SUMBER DANA	KETERANGAN
		Baitussalan (Kajhu)	1	CHF	Pasar tradisional
3	Pidie	Panteraja	1	BRR	Pasar tradisional
		Panteraja	1	CHF	Rehab Pasar Ikan
		Meuredu	1	CHF	Rehab Pasar Ikan
		Jangka Buya	1	CHF	Rehab Pasar Ikan
		Muara tiga	1	CHF	Rehab Pasar Ikan
		Simpang Tiga	2	APBNP	Pasar tradisional
		Glumpang Baro	1	APBNP	Pasar tradisional
		Muara Tiga	1	APBNP	Pasar tradisional
		Padang Tiji	1	APBNP	Pasar tradisional
		Batee	1	APBNP	Pasar tradisional
		Kota Sigli	1	JICs	Pasar Penunjang
4	Bireun	Kota Juang	1	BRR	Pasar Grosir
		Peudada	1	BRR	Pasar tradisional
		Simpang Mamplam	1	BRR	Pasar tradisional
		Peulimbang	1	BRR	Pasar tradisional
		Simpang Mamplam	1	APBNP	Pasar tradisional
		Juli	1	APBNP	Pasar tradisional
		Nibong	1	APBNP	Pasar tradisional
5	Aceh Utara	Baktiya	1	BRR	Pasar tradisional
		Meurah Mulia	1	BRR	Pasar tradisional
		Muara Batu	1	BRR	Pasar tradisional
		Cot Girek	1	BRR	Pasar tradisional
		Syamtalira Bayu	1	APBNP	Pasar tradisional
		Seunedon	1	APBNP	Pasar tradisional
		Nibong	1	APBNP	Pasar tradisional
6	Lhokseumawe	Blang Mangat	1	BRR	Pasar tradisional
		Banda Sakti	1	BRR	Pasar tradisional
7	Aceh Timur	Banda Alam	1	BRR	Pasar tradisional
		Darul Aman	1	APBNP	Pasar tradisional
		Idi rayek	1	APBNP	Pasar tradisional
8	Aceh Tamiang	Kota Kuala Simpang	1	BRR	Pasar tradisional
		Seureuwey	2	APBNP	Pasar tradisional
9	Bener Meriah	Pintu Rime Gayo	1	BRR	Pasar tradisional
		Permata	1	APBNP	Pasar tradisional
10	Aceh tengah	Jagong Jeget	1	BRR	Pasar tradisional
		Batu Lintang	1	APBNP	Pasar tradisional
11	Gayo Lues	Pantan Cuaca	1	BRR	Pasar tradisional
		Pantan Cuaca	1	APBNP	Pasar tradisional
12	Aceh Tenggara	Seumadam	1	BRR	Pasar tradisional
		Lawe Alas	1	APBNP	Pasar tradisional
13	Aceh Singkil	Singkil	2	BRR	Pasar tradisional
		Singkil	1	APBNP	Pasar tradisional
14	Aceh Selatan	Meukek	1	BRR	Pasar tradisional
		Kluet Tengah	1	BRR	Pasar tradisional
		Trumon Timur	1	BRR	Pasar tradisional
		Trumon Timur	1	APBNP	Pasar tradisional
		Pasi Raja	1	APBNP	Pasar tradisional
		Labuhan Haji	1	APBNP	Pasar tradisional
15	Abdya	Tangan-tangan	1	BRR	Pasar tradisional
		Manggeng	1	APBNP	Pasar tradisional

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH (UNIT)	SUMBER DANA	KETERANGAN
		Susoh	1	APBNP	Pasar tradisional
16	Nagan Raya	Darul Makmur	1	BRR	Pasar tradisional
		Kuala	1	APBNP	Pasar tradisional
17	Aceh Barat	Sungai Mas	1	BRR	Pasar tradisional
		Pante cermen	1	BRR	Pasar tradisional
		Woyla Barat	1	BRR	Pasar tradisional
		Woyla	1	APBNP	Pasar tradisional
		Bubon	1	APBNP	Pasar tradisional
		Arongan Lambalek	1	APBNP	Pasar tradisional
18	Aceh Jaya	Sampolnit	1	BRR	Pasar tradisional
		Krueng Sabee	3	BRR	Pasar tradisional
		Krueng Sabee	1	APBNP	Pasar tradisional
		Teunom	1	APBNP	Pasar tradisional
		Panga	1	APBNP	Pasar tradisional
		Sampolnit	1	APBNP	Pasar tradisional
		Krueng Sabee	1	CHF	Pasar tradisional
		Setia Bakti	1	CHF	Pasar tradisional
		Sampoinet	3	CHF	Pasar tradisional
		Teunom	1	CHF	Pasar tradisional
		Jaya	1	CHF	Pasar tradisional
19	Simeulue	Simeulue Timur	1	APBNP	Pasar tradisional
20	Sabang	Sabang	1	APBNP	Pasar tradisional

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NAD, up date per November 2007

Berikut beberapa contoh terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang telah terealisasi per bulan Oktober 2007, yaitu:

1. Rehabilitasi PPI Kota Calang, Kab. Aceh Jaya

Pembangunan Tempat Pelelangan ikan di kota Calang ini merupakan relokasi dari tempat lama yang sebelumnya telah hancur yang berada dipinggir pantai pada lintasan jalan Banda Aceh-Calang-Meulaboh. Alokasi pembangunan PPI ke tempat baru ini dinilai masih sangat strategis karena bersebelahan langsung dengan sungai yang bermuara ke laut (+ 300 m dari laut).

Gambar 3 - 39
PPI Kota Calang, Kab. Aceh Jaya



Sumber: Kunjungan Lapangan Tim P3B Bappenas,
November 2007

PPI ini juga dilengkapi dengan tempat pelabuhan pendaratan ikan yang telah memenuhi standar dan berdekatan langsung dengan pasar ikan, pasar daging, pasar ternak dan pasar sayur. Bangunan PPI dibangun dengan luas + 300 m persegi pada areal + 1 Ha persegi, letaknya sangat strategis akses dari kota Calang hanya 100 meter.

Gambar 3 - 40
PPI Kota Calang, Kab. Aceh Jaya



Sumber: Kunjungan Lapangan Tim P3B Bappenas, November 2007

Pembangunan pasar ikan baru ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemda Kab. Aceh Jaya dan dukungan pendanaan dari BRR NAD-Nias. Disamping itu PPI ini juga dilengkapi dengan balai musyawarah berjarak hanya 50 m dari PPI yang diperuntukkan bagi para nelayan.

2. Pembangunan Pasar Ikan Kota Sigli

Pembangunan pasar ikan kota Sigli ini merupakan relokasi dari tempat lama yang sebelumnya berada di tengah kota Sigli, yang mengakibatkan terganggunya aktifitas dan lalu lintas dalam kota. Alokasi pembangunan ke tempat baru ini dinilai sangat strategis karena bersebelahan langsung dengan sungai yang bermuara ke laut (+ 500 m dari laut). Pasar ikan ini juga dilengkapi dengan tempat pendaratan ikan, pasar daging, pasar ternak dan pasar sayur. Dengan areal + 1 Ha persegi, letaknya sangat strategis akses dari kota hanya 100 meter.

Pembangunan pasar ikan baru ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemda Kab. Pidie dan dukungan pendanaan dari BRR NAD-Nias.

Gambar 3 - 41
Pasar Ikan, Kota Sigli, Kab. Pidie



Sumber : Kunjungan Lapangan Tim P3B Bappenas, November 2007

Berikut ini adalah program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD TA 2006 dan 2007 terkait pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Tabel 3 - 63
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi TA 2006 dan 2007
APBD Kab. Aceh Besar

TA 2006		TA 2007		KETERANGAN
KEGIATAN UTAMA	ALOKASI ANGGARAN	KEGIATAN UTAMA	ALOKASI ANGGARAN	
	(RP)		(RP)	
Kab. Aceh Besar				
PERIKANAN				
Pengembangan sumber daya petani dan nelayan	2.407.800.000	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	2.255.000.000	
		Pengembangan lembaga usaha perikanan tangkap	1.024.080.000	
PERTANIAN				
Pengembangan tanaman hortikultura	949.500.000	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK)	1.195.700.280	Dinas Pertanian
Pengembangan mutu intensifikasi dan palawija	11.817.000.000	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	324.465.000	Dinas Pertanian
Perbaikan jaringan irigasi tersier untuk peningkatan produksi pangan	487.000.000	Pengembangan pertanian pada lahan kering	754.650.000	Dinas Pertanian
Pengembangan jagung hibrida dan pemberdayaan penangkar benih dan palawija	405.889.000	Peningkatan produksi; produktivitas dan mutu perkebunan	697.068.750	Dinas Pertanian
Peningkatan sarana dan operasional penyuluh pet	300.000.000	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	755.715.000	Dinas Pertanian
Peningkatan mutu genetik ternak sapi/kerbau melalui kawin suntik	500.000.000	Pembangunan sarana prasarana pasar hasil peternakan	809.250.000	Dinas Pertanian
Pengembangan kawasan komoditi Kakao	1.276.177.500			Dinas Pertanian
Pengembangan kelapa sawit pola terpadu	901.090.000			Dinas Pertanian
INDUSTRI				
Pembangunan gedung pengolahan rumput laut	455.962.800	Pembinaan industri kecil menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	1.211.875.900	Dinas Perindustrian & Perdagangan
Peningkatan sarana dan prasarana kantor	793.732.000			Dinas Perindustrian & Perdagangan
Perdayaan dan pengembangan IRT, Industri kecil dan	1.685.419			Dinas Perindustrian & Perdagangan

TA 2006		TA 2007		KETERANGAN
KEGIATAN UTAMA	ALOKASI ANGGARAN	KEGIATAN UTAMA	ALOKASI ANGGARAN	
	(RP)		(RP)	
Kab. Aceh Besar				
menengah				
Pembinaan dan pengembangan industri garam rakyat	283.790.000			Dinas Perindustrian & Perdagangan
PERDAGANGAN				
Pasar rakyat	180.600.000			Dinas Perindustrian & Perdagangan
Pembinaan pedagang kecil dan kemetrolologiaan	369.413.000			Dinas Perindustrian & Perdagangan
Pembangunan pasar sementara Keutapang Dua	339.227.000			Dinas Perindustrian & Perdagangan
KOPERASI & UKM				
Pelatihan perkoperasian	50.000.000			Dinas Koperasi & UKM
Bantuan penunjang usaha UKM	520.000.000			Dinas Koperasi & UKM
TENAGA KERJA				
		Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana BLK	202.927.000	Disnaker
		Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	50.711.700	Disnaker
PARIWISATA				
Pembangunan obyek wisata lampuk dan tahura saree	174.750.968	Pengembangan obyek wisata unggulan	739.650.000	Dinas Pariwisata
Pembangunan sarana monumen penerbangan Kec. Sukamakmur	186.636.000	Pelestarian peninggalan sejarah purbakala;museum	923.525.000	Dinas Pariwisata
Pembinaan dan pergelaran kesenian tradisional	121.348.163			Dinas Pariwisata
pemugaran cagar budaya Mesjid Bung Sidom dan Kuburan masal	303.400.000			Dinas Pariwisata

Sumber : APBD Kab. Aceh Besar TA 2006 dan 2007

Hasil penyisiran APBD Kab.Aceh Besar TA 2006 dan TA 2007 menunjukkan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pelaksanaan program pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Aceh Besar lebih menekankan pada pengadaan peralatan dan perlengkapan perikanan tangkap maupun budidaya. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Aceh Besar mengkonsentrasikan kegiatan pada pengadaan sarana produksi pertanian, pemberian bantuan alat pertanian, rehabilitasi/pembangunan sarana dan prasarana sektor pertanian, pendidikan dan pelatihan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Besar menekankan pada pembangunan pasar sebagai salah satu cara untuk menghidupkan kembali penghidupan ekonomi masyarakat. Namun untuk TA 2007 tidak terlihat program rehabilitasi rekonstruksi bidang perdagangan.

Dinas Koperasi dan UKM menekankan pada aspek pembinaan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia serta pengembangan pada aspek permodalan usaha. Namun untuk TA 2007 tidak terlihat program rehabilitasi rekonstruksi bidang UKM.

Dinas Tenaga Kerja menekankan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. Dinas pariwisata menekankan pada pemugaran obyek wisata dan pembinaan kesenian. Namun untuk TA 2007 tidak terlihat program rehabilitasi rekonstruksi bidang pariwisata.

Tabel 3 - 64
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi TA 2006 dan 2007
APBD Kab. Pidie

TA 2006		TA 2007		Keterangan
Kegiatan Utama	Alokasi Anggaran (Juta Rp)	Kegiatan Utama	Alokasi Anggaran (Juta Rp)	
Kab. Pidie				
PERIKANAN				
Pembangunan balai benih udang/Hatchery (DAK)	308.480.000			Dinas Kelautan Perikanan
Pembangunan tempat pelelangan ikan (DAK)	55.200.000			Dinas Kelautan Perikanan
Pembangunan tempat pelelangan ikan (DAK)	222.856.000			Dinas Kelautan Perikanan
Pembangunan sarana prasarana perikanan kelautan	570.765.000			Dinas Kelautan Perikanan
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
Pengembangan produksi padi, palawija dan hortikultura	468.365.000	Penanganan Daerah rawan Pangan	25.441.000	Dinas Pertanian
Pengembangan sarana prasarana penyuluhan pertanian (DAK)	102.650.000	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	32.340.000	Dinas Pertanian
Infrastruktur peningkatan produksi dan produktivitas	1.279.637.600	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija	1.981.647.000	Dinas Pertanian
Produksi tanaman pangan (Dana Pendamping BRR)	126.878.000	Pengembangan pertanian lahan kering	457.925.400	Dinas Pertanian
		Pengembangan pembenihan/pembibitan	569.994.000	Dinas Pertanian
		Peningkatan Mutu dan Keamanan	43.698.500	Dinas

TA 2006		TA 2007		Keterangan
Kegiatan Utama	Alokasi Anggaran	Kegiatan Utama	Alokasi Anggaran	
	(Juta Rp)		(Juta Rp)	
Kab. Pidie				
		Pangan		Pertanian
		Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian	65.985.300	Dinas Pertanian
		Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	24.741.000	Dinas Pertanian
		Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	50.754.000	Dinas Pertanian
		Penegembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	1.271.532.500	Dinas Pertanian
		Peningkatan sarana prasarana kelembagaan penyuluh pertanian	1.615.832.600	Dinas Pertanian
PERKEBUNAN				
Penghijauan	918.940.000	Peningkatan mutu dan ketahanan pangan	239.250.000	Dinas Pertanian
Reboisasi	297.488.000	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan	302.012.000	Dinas Pertanian
Pengembangan dan pembinaan perkebunan rakyat	1.019.207.740	Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	29.093	Dinas Pertanian
		Pendamping DIPA Dep.Kehutanan/Pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	43.850.000	Dinas Pertanian
PETERNAKAN				
Pembangunan balai benih udang/Hatchery (DAK)	3.718.220.000	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	174.148.375	Dinas Pertanian
		Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak dan pendamping DAK	530.125.125	Dinas Pertanian
INDUSTRI				
Pembangunan gedung penempatan mesin rumput laut	187.500.000			Dinas Perindustrian & Perdagangan
PERDAGANGAN				
Pembangunan pasar tradisional Kec.Mila Kab.Pidie	1.550.000			Dinas Perindustrian & Perdagangan
Bantuan kios bagi pedagang kecil di Kec.Batee	1.325.000			Dinas Perindustrian & Perdagangan
KOPERASI & UKM				
Pengembangan UKM melalui pemantapan Klinik Konsultasi Bisnis (KKB)	230.785.000	Renovasi gedung industri garmen	347.000.000	Dinas Koperasi & UKM

TA 2006		TA 2007		Keterangan
Kegiatan Utama	Alokasi Anggaran	Kegiatan Utama	Alokasi Anggaran	
	(Juta Rp)		(Juta Rp)	
Kab. Pidie				
Revitalisasi dan penyehatan koperasi	379.097.000	Peningkatan sarana prasarana industri keramik	23.300.000	Dinas Koperasi & UKM
		Pengadaan alat prosesing kilang padi keliling	100.000.000	Dinas Koperasi & UKM
		Bantuan peralatan kerja	210.118.700	Dinas Koperasi & UKM
		Partisipasi pameran dan promosi	77.290.000	Dinas Koperasi & UKM
		Fasilitasi pengembangan UKM	64.937.000	Dinas Koperasi & UKM
		Fasilitasi pengembangan koperasi	181.169.150	Dinas Koperasi & UKM
TENAGA KERJA				
				Disnaker
PARIWISATA				
				Dinas Pariwisata

Sumber : APBD Kab. Pidie TA 2006 dan 2007

Hasil penyisiran APBD Kab. Pidie TA 2006 dan TA 2007 menunjukkan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama subbidang perikanan, pertanian dan Koperasi & UKM.

Pelaksanaan program pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Pidie lebih menekankan pada pengadaan peralatan dan perlengkapan perikanan tangkap maupun budidaya. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Pidie mengkonsentrasikan kegiatan pada pengadaan sarana produksi pertanian, pemberian bantuan alat pertanian, rehabilitasi/pembangunan sarana dan prasarana sektor pertanian, pendidikan dan pelatihan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pidie menekankan pada pembangunan pasar dan pembangunan gedung prasarana industri (rumput laut) sebagai salah satu cara untuk menghidupkan kembali penghidupan ekonomi masyarakat. Namun untuk TA 2007 tidak terlihat program rehabilitasi rekonstruksi bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Koperasi dan UKM menekankan pada aspek pembinaan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia serta pengembangan pada aspek permodalan usaha. Untuk TA 2007 terlihat program rehabilitasi rekonstruksi bidang UKM semakin meningkat.

Dinas Tenaga Kerja dan Dinas pariwisata untuk TA 2006 dan TA 2007 tidak terlihat program rehabilitasi rekonstruksi.

Tabel 3 - 65
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi TA 2006 dan 2007
APBD Kab. Aceh Jaya

TA 2006		TA 2007		Keterangan
Kegiatan Utama	Alokasi Anggaran	Kegiatan Utama	Alokasi Anggaran	
	(Juta Rp)		(Juta Rp)	
Kab. Aceh Jaya				
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
Pengadaan bibit tanaman, argo input dan alat-alat pertanian kecil	817.000.000	Tidak ada kegiatan RR		Dinas Pertanian
PETERNAKAN				
Pengadaan sarana prasarana percontohan penggemukan sapi sistem keraman	49.542.500	Tidak ada kegiatan RR		Dinas Pertanian

Sumber : APBD Kab. Aceh Jaya TA 2006 dan 2007

Hasil penyisiran APBD Kab. Aceh Jaya TA 2006 menunjukkan keterlibatan pemerintah daerah dalam berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama subbidang pertanian. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Aceh Jaya mengkonsentrasikan kegiatan pada pengadaan sarana produksi pertanian, bibit, pemberian bantuan alat pertanian, rehabilitasi/pembangunan sarana dan prasarana sektor pertanian, pendidikan dan pelatihan.

Tabel 3 - 66
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi TA 2006 dan 2007
Kab. Aceh Singkil

TA 2006		TA 2007		Keterangan
Kegiatan Utama	Alokasi Anggaran	Kegiatan Utama	Alokasi Anggaran	
	(Juta Rp)		(Juta Rp)	
Kab. Aceh Singkil				
PERIKANAN				
Pengembangan bibit ikan unggul		Pengembangan bibit ikan unggul	679.679	Dinas Perikanan & Kelautan
Pembinaan dan pengembangan perikanan		Pembinaan dan pengembangan perikanan	1.379.046	Dinas Perikanan & Kelautan
Pengembangan usaha perikanan tangkap		Pengembangan usaha perikanan tangkap	2.804.994.480	Dinas Perikanan & Kelautan
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
Pengembangan cadangan pangan daerah		Pengembangan cadangan pangan daerah	1.416.237.500	Dinas Pertanian
Pengembangan pembenihan/pembenihan		Pengembangan pembenihan/pembenihan	2.845.300.000	Dinas Pertanian
Pengembangan sarana prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat		Pengembangan sarana prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat	622.900.000	Dinas Pertanian

TA 2006		TA 2007		Keterangan
Kegiatan Utama	Alokasi Anggaran	Kegiatan Utama	Alokasi Anggaran	
	(Juta Rp)		(Juta Rp)	
Kab. Aceh Singkil				
guna		guna		
PERKEBUNAN				
Pengadaan sarana prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna		Pengadaan sarana prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	620.322.659	Dinas Pertanian
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan		Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	1.038.650.000	Dinas Pertanian
PETERNAKAN				
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak		Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	311.500.000	Dinas Pertanian
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak		Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	1.109.158.600	Dinas Pertanian
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat		Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	1.563.440.000	Dinas Pertanian
Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan		Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	235.000.000	Dinas Pertanian
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna		Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	417.500.000	Dinas Pertanian
INDUSTRI				
Pembinaan kemampuan teknologi industri		Pembinaan kemampuan teknologi industri	1.167.000.000	Dinas Perindustrian Perdagangan
Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima		Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima	261.500.000	Dinas Perindustrian Perdagangan
PERDAGANGAN				
				Dinas Perindustrian Perdagangan
KOPERASI & UKM				
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah		Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	2.138.928.100	Dinas Koperasi & UKM
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan		Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	64.428.275	Dinas Koperasi & UKM
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD		Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	19.899.425	Dinas Koperasi & UKM
Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi		Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	26.674.425	Dinas Koperasi & UKM
TENAGA KERJA				
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja		Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	22.038.760	Disnaker
PARIWISATA				
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam		Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam	80.732.448	Dinas Pariwisata

TA 2006		TA 2007		Keterangan
Kegiatan Utama	Alokasi Anggaran	Kegiatan Utama	Alokasi Anggaran	
	(Juta Rp)		(Juta Rp)	
Kab. Aceh Singkil				
dan LN		dan LN		
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata		Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	409.798.375	Dinas Pariwisata
Pengembangan daerah tujuan wisata		Pengembangan daerah tujuan wisata	429.000.000	Dinas Pariwisata

Sumber : APBD Kab. Aceh Singkil TA 2006 dan 2007

Hasil penyisiran APBD Kab. Aceh Singkil TA 2006 dan TA 2007 menunjukkan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama pada semua bidang pemulihan perekonomian.

Pelaksanaan program pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Aceh Singkil lebih menekankan pada pengadaan peralatan dan perlengkapan perikanan tangkap maupun budidaya. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Aceh Singkil mengkonsentrasikan kegiatan pada pengadaan sarana produksi pertanian, pemberian bantuan alat pertanian, rehabilitasi/pembangunan sarana dan prasarana sektor pertanian, pendidikan dan pelatihan.

Dinas Perindustrian Kab. Aceh Singkil menekankan pada pembinaan kemampuan teknologi dan pembangunan gedung prasarana industri sebagai salah satu cara untuk menghidupkan kembali penghidupan ekonomi masyarakat. Tidak terlihat program kegiatan subbidang perdagangan.

Dinas Koperasi dan UKM menekankan pada aspek pembinaan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia serta pengembangan pada aspek permodalan usaha. Dinas Tenaga Kerja menekankan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. Dinas pariwisata menekankan pada pemugaran obyek wisata dan pembinaan kesenian.

3.2.5 Pemulihan Kelembagaan dan Hukum

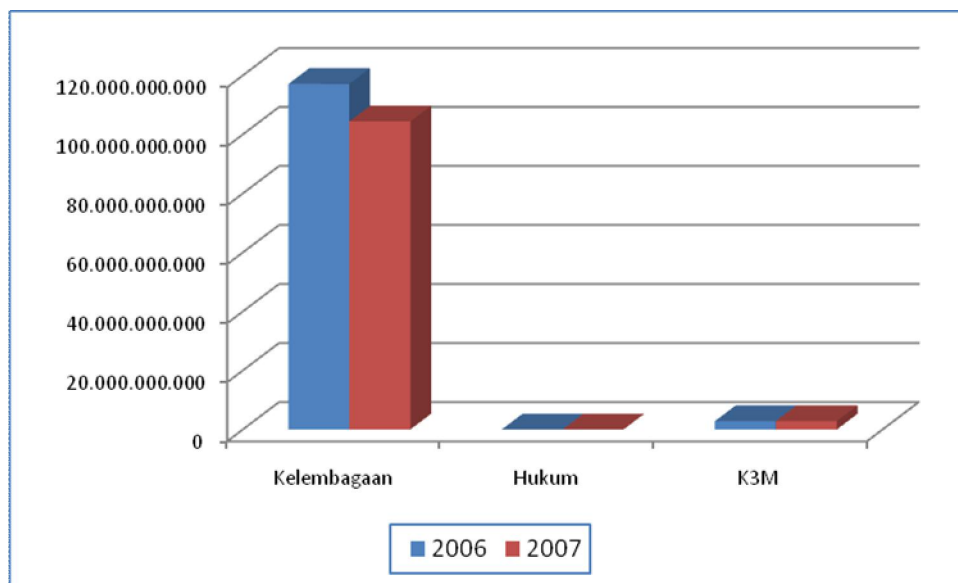
Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini diharapkan juga melibatkan kontribusi Pemda melalui APBD, terutama yang mendukung kegiatan bidang kelembagaan dan hukum. APBD Pemda yang dianalisis melibatkan 9 Kabupaten/Kota sebagai sample yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan.

Dana APBD yang terkait dengan bidang kelembagaan dan hukum dilaksanakan melalui Sekretariat Daerah, Badan Pengawas Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Dinas Informasi dan Komunikasi. Sedangkan instansi lainnya adalah instansi vertikal, antara lain Badan Kepegawaian Daerah, Kanwil Departemen Hukum dan HAM, Pengadilan Tinggi/Negeri, Kejaksaan Tinggi/Negeri, Mahkamah Syariah/Pengadilan Tinggi Agama, Mapolda/Makodam, dan lain sebagainya.

Kontribusi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya di bidang kelembagaan dan hukum sangat kecil. Jika dilihat secara keseluruhan, kegiatan pendukung rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi perhatian

terbesar Pemda pada tahun 2006 adalah bidang kelembagaan (5,43 persen) dan bidang K3M (0,13 persen). Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2007 yaitu kelembagaan adalah bidang yang menjadi perhatian oleh Pemda, dimana kontribusinya sebesar 4,71 persen dan untuk bidang K3M tetap sama yaitu 0,13 persen dari total APBD tahun 2007, sedangkan untuk bidang hukum tidak ada kegiatan yang mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi dalam APBD. Rincian tersebut dapat dilihat pada grafik dan tabel di bawah ini.

Grafik 3 - 20
Kontribusi Kegiatan Bidang Kelembagaan dan Hukum Berdasarkan APBD Tahun 2006 dan 2007



Sumber : Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2007.

Tabel 3 - 67
Alokasi APBD Kabupaten/Kota Bidang Kelembagaan dan Hukum

N O	PROVINSI/ KABUPATEN /KOTA				KETERANGA N
	TA 2006		TA 2007		
	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	
Kota Banda Aceh		144,542,327,605		266,614,014,177	Total APBD
1	Sub Sektor Kelembagaan Pengadaan tanah Penataan batas wilayah	53,227,693,032	1. Sub Sektor Kelembagaan Pengadaan tanah Penataan batas wilayah	46,794,222,970	
2	Sub Sektor Hukum	0	2. Sub Sektor Hukum	0	
3	Sub Sektor K3M Pelayanan informasi kepada masyarakat	50,000,000	3. Sub Sektor K3M Pelayanan informasi kepada masyarakat	32,570,000	

N O	PROVINSI/ KABUPATEN /KOTA				KETERANGA N
	TA 2006		TA 2007		
	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	
Kab. Aceh Besar		164,211,850,022		473,995,400,000	Total APBD
1	Sub Sektor Kelembagaan Pengadaan tanah Penataan asset daerah	5,035,711,000	1. Sub Sektor Kelembagaan Pengadaan tanah Penataan batas wilayah Rehabilitasi dan pembangunan kantor Rehabilitasi dan pembangunan rumah jabatan/dinas Pemberdayaan Pemerintahan Gampong/Kelurahan dan Mukim Pengadaan Sarpras Evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	9,968,374,900	
2	Sub Sektor Hukum	0	2. Sub Sektor Hukum	0	
3	Sub Sektor K3M	0	3. Sub Sektor K3M Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	483,255,000	
Kab. Pidie		587,058,793,087		625,211,813,239	Total APBD
1	Sub Sektor Kelembagaan Pembebasan Tanah Pembangunan sarpras Pemda Pembangunan kantor Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Dinas Camat Pemberdayaan Pemerintahan Gampong/Kelurahan dan	20,164,092,250	1. Sub Sektor Kelembagaan Pengadaan tanah Pembangunan sarprasPemda Pembangunan Kantor Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Dinas Camat Pemberdayaan Pemerintahan Gampong/Keluraha	16,804,260,511	

N O	PROVINSI/ KABUPATEN /KOTA				KETERANGA N
	TA 2006		TA 2007		
	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	
	Mukim		n dan Mukim		
2	Sub Sektor Hukum	0	2. Sub Sektor Hukum	0	
3	Sub Sektor K3M	2,376,791,000	3. Sub Sektor K3M	961,143,887	
	Penyebaran dan Pembangunan Informasi Pelayanan dan Pengembangan Komunikasi Pelayanan Informasi Pedesaan Pelayanan dan Pengembangan Komunikasi Pembinaan Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat		Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan penyuluhan bagi masyarakat		
Kab. Bireun		466,575,493,400		528,697,202,569	Total APBD
1	Sub Sektor Kelembagaan	*	1. Sub Sektor Kelembagaan Pembinaan pertanahan Penataan batas wilayah Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Pembangunan rumah Dinas	18,371,022,780	
2	Sub Sektor Hukum	*	2. Sub Sektor Hukum	0	
3	Sub Sektor K3M	*	3. Sub Sektor K3M Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	546,650,000	
Kab Aceh Jaya		247.477.263.405			Total APBD
1	Sub Sektor Kelembagaan Pengadaan dan ganti rugi	5,906,200,000	1. Sub Sektor Kelembagaan	**	

N O	PROVINSI/ KABUPATEN /KOTA				KETERANGA N
	TA 2006		TA 2007		
	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	
	tanah Penataan batas wilayah Pembuatan gedung pemerintahan Pembentukan/ Pengembanga n Fungsi Media Center				
2	Sub Sektor Hukum	0	2. Sub Sektor Hukum	**	
3	Sub Sektor K3M	0	3. Sub Sektor K3M	**	
Kab Aceh Barat		265,206,512,67 0			Total APBD
1	Sub Sektor Kelembagaan Penunjang Pembinaan & Penyelesaian ADM Keagrariaan, Pengadaan Tanah Pemda dan Fasilitas Umum serta Ganti Rugi Peunayah Penataan batas wilayah Penataan dan Penilaian Aset Daerah Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Bupati dan Relokasi Rumah Dinas Bupati serta sarana penunjang lainnya	27,064,605,260	1. Sub Sektor Kelembagaan	**	
2	Sub Sektor Hukum	0	2. Sub Sektor Hukum	**	
3	Sub Sektor K3M Penyebaran Informasi Melalui Internet	36,800,000	3. Sub Sektor K3M	**	
Kab Aceh Singkil		257,252,636,31 9		324,031,344,30 0	Total APBD
1	Sub Sektor Kelembagaan	*	1. Sub Sektor Kelembagaan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rehabilitasi dan pembangunan rumah dinas Rehabilitasi dan	12,479,592,251	

N O	PROVINSI/ KABUPATEN /KOTA				KETERANGA N
	TA 2006		TA 2007		
	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	
			pembangunan gedung kantor Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		
2	Sub Sektor Hukum	*	2. Sub Sektor Hukum	0	
3	Sub Sektor K3M	*	3. Sub Sektor K3M Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah	836,463,766	
Kab Nias		394.827.151.90 0			Total APBD
1	Sub Sektor Kelembagaan Penetapan dan penegasan batas daerah Pemberdayaan Desa/Kelurahan	5,740,080,000	1. Sub Sektor Kelembagaan	**	
2	Sub Sektor Hukum	0	2. Sub Sektor Hukum	**	
3	Sub Sektor K3M Fasilitasi personil dalam memonitor dan memantau terjadinya kebencanaan di daerah Sosialisasi prosedur tetap penanganan bencana Studi banding unsur satlak bersama legislatif tentang penanaman mangrove di lingkungan pantai dan penyediaan jalur dan tempat evakuasi bila terjadi gempa, tsunami dan banjir	390,000,000	3. Sub Sektor K3M	**	
Kab Nias Selatan					Total APBD
1	Sub Sektor Kelembagaan	**	1. Sub Sektor Kelembagaan	**	
2	Sub Sektor Hukum	**	2. Sub Sektor	**	

N O	PROVINSI/ KABUPATEN /KOTA				KETERANGA N
	TA 2006		TA 2007		
	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	
			Hukum		
3	Sub Sektor K3M	**	3. Sub Sektor K3M	**	

Sumber : APBD Kota Banda Aceh 2006 dan 2007, APBD Kabupaten Aceh Besar 2006 dan 2007, APBD Kabupaten Pidie 2006 dan 2007, APBD Kab. Bireun 2006 dan 2007, APBD Kab. Aceh Jaya 2006, APBD Kab. Aceh Barat 2006, APBD Kab. Aceh Singkil 2006 dan 2007, APBD Kab. Nias 2006

Keterangan:

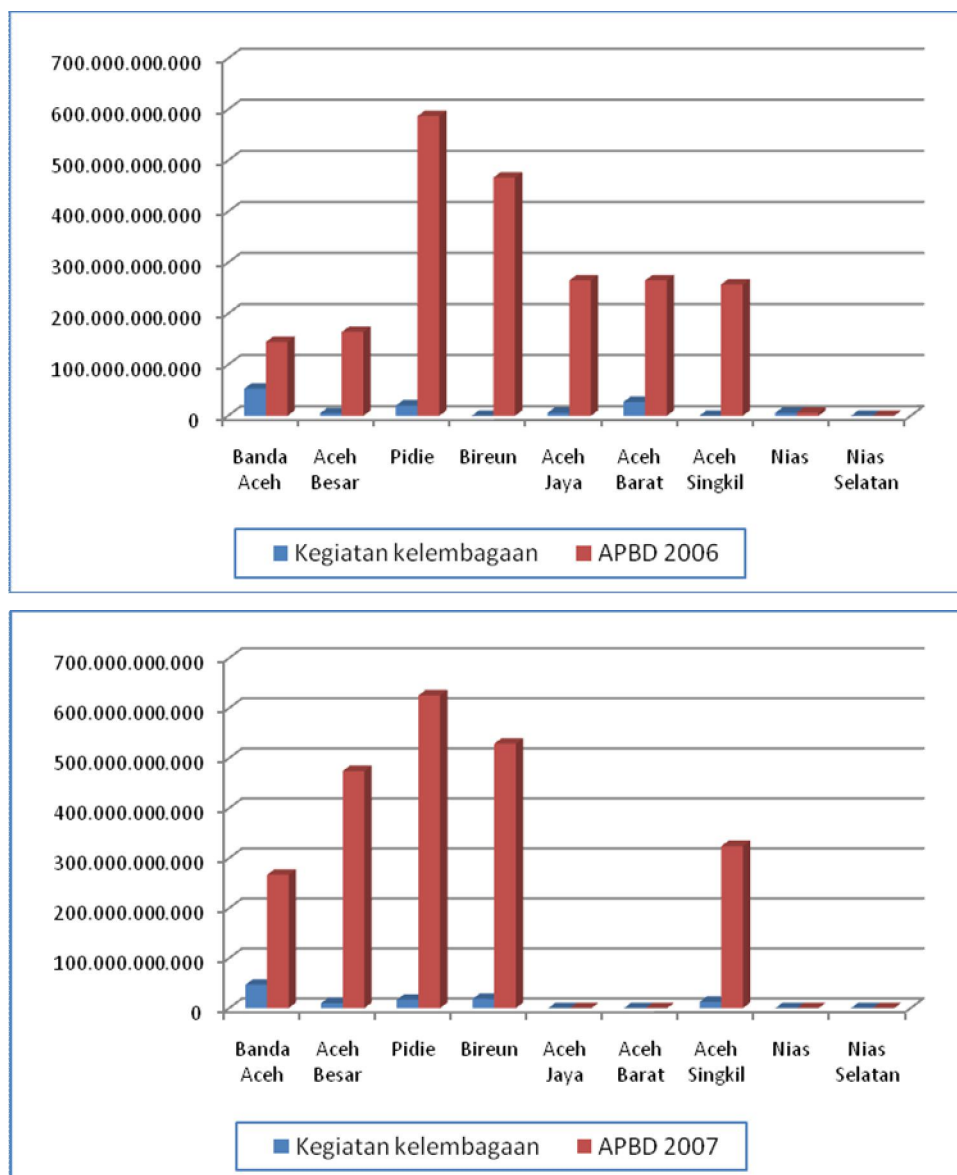
*) Tidak tercantum rincian kegiatan, hanya mencantumkan anggaran belanja.

**) Tidak diperoleh dokumen APBD dari Kabupaten/Kota terkait

Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang tidak mencantumkan rincian kegiatan pada tahun 2006 seperti Kabupaten Bireun dan Aceh Singkil, dan untuk Kabupaten Nias Selatan tidak diperoleh data APBD Tahun 2006. Selain itu dokumen APBD Tahun 2007 untuk Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nias dan Nias Selatan juga tidak diperoleh. Hal ini menyebabkan analisis tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Jika dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota, persentase kegiatan pendukung rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan terhadap APBD tahun 2006 yaitu Kota Banda Aceh mencapai 36,82 persen, Kabupaten Aceh Barat mencapai 10,21 persen, sedangkan kabupaten/kota lainnya hanya sekitar 1-3 persen. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2007, Kota Banda Aceh memiliki kontribusi terbesar yaitu 17,55 persen sedangkan kabupaten/kota lainnya berkisar 2-3 persen. Kegiatan pendukung bidang kelembagaan antara lain adalah pengadaan dan penertiban tanah untuk Pemerintah Daerah dan fasilitas umum, pembuatan pilar tanda batas gampong/kelurahan dan kecamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi kantor dan rumah dinas, serta pemberdayaan desa/kelurahan. Rincian persentase kegiatan kelembagaan terhadap APBD masing-masing Kabupaten/Kota terpilih dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3 - 21
Komposisi Kegiatan Kelembagaan terhadap APBD
Tahun 2006 dan 2007



Sumber : Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2007.

Catatan : Dokumen APBD 2006 Kab. Bireun dan Kab. Aceh Singkil tidak mencantumkan rincian kegiatan dan Kab. Nias Selatan tidak diperoleh dokumen APBD 2006. Dokumen APBD 2007 Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nias dan Nias Selatan tidak diperoleh.

Salah satu kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang hukum yaitu harmonisasi peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pada APBD, karena yang tercantum dalam APBD hanya menyangkut peraturan daerah/qanun. Selain itu kegiatan lainnya yang terkait dengan penyediaan dan peningkatan aparatur hukum dan bangunan kantor lebih banyak melibatkan instansi vertikal dibandingkan oleh Pemda setempat. Instansi vertikal tersebut diantaranya Kanwil Departemen Hukum dan HAM, Pengadilan Tinggi/Negeri, Kejaksaan Tinggi/Negeri, Mahkamah Syariah/Pengadilan Tinggi Agama. Sebagai contoh, Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa keterlibatan Kejari dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi hanya sebagai narasumber yang memberikan masukan mengenai bangunan kantor maupun rumah dinas yang perlu dibangun karena mengalami kerusakan akibat tsunami.

Kegiatan pendukung bidang K3M antara lain penyebaran informasi kepada masyarakat, pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan kontribusi kegiatan pendukung rehabilitasi dan rekonstruksi bidang K3M terhadap APBD tahun 2006/2007, kontribusi tertinggi pada Kabupaten Nias untuk tahun 2006 sebesar 6,36 persen dan pada tahun 2007 tertinggi pada Kabupaten Aceh Singkil sebesar 0,26 persen, sedangkan Kabupaten/Kota lainnya kontribusi kegiatan tersebut sangat rendah yaitu 0,01 – 0,4 persen.

Selain itu kegiatan di atas, beberapa Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan yang terkait dengan mitigasi bencana yaitu pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam, serta kegiatan penataan aset daerah sebagai kegiatan antisipasi berakhirnya masa tugas BRR.

3.3 Donor/NGO

3.3.1 Pemulihan Perumahan, Tata Ruang, Pertanahan dan lingkungan Hidup

Pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi melibatkan berbagai pihak termasuk dunia internasional. Melalui dukungan dana dan bantuan yang diberikan, mereka berkontribusi di seluruh bidang pemulihan. Donor/NGO terbesar di bidang infrastruktur, perumahan, tata ruang dan pertanahan, serta lingkungan hidup adalah USAID, MDF, dan ADB. Infrastruktur masuk ke dalam pengelompokan ini karena kategori data di RAN Database Aceh Nias mengelompokkan infrastruktur bersamaan dengan perumahan dan pertanahan. Total komitmen yang tercatat dari seluruh Donor/NGO dan Nias sejak tahun 2005 adalah sebesar USD 1,8 milyar dan realisasi hingga saat ini sebesar USD 1 milyar (55 %). Rincian dari 10 Donor/NGO terbesar dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3 - 68
Donor/NGO Terbesar di Bidang Infrastruktur, Perumahan, Tata Ruang,
dan Lingkungan Hidup

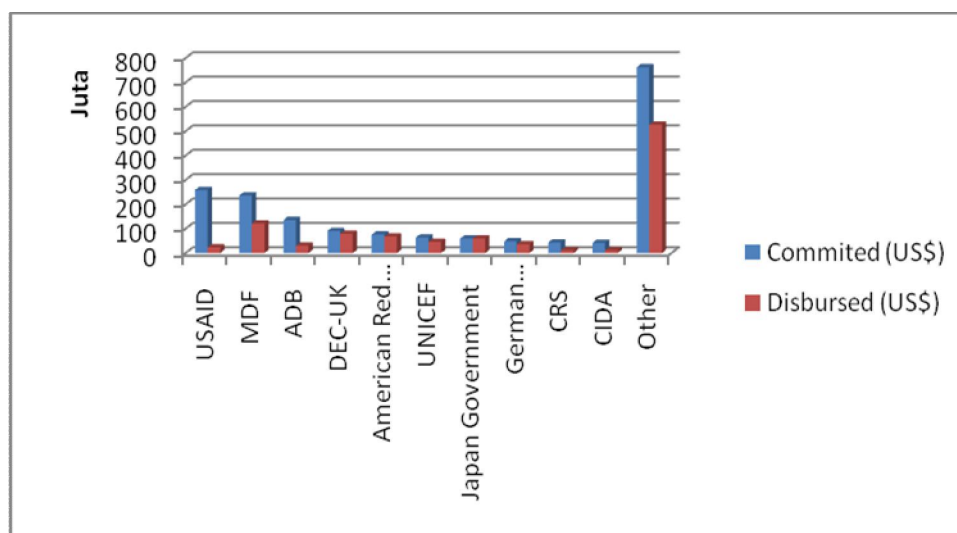
No	Lembaga Penyandang Dana	Komitmen (US\$)	Realisasi (US\$)	Persentase (%)
1	USAID (United States Agency for International Development)	259.086.360	23.551.195	9,09
2	MDF (Multi Donor Fund)	236.042.519	120.715.341	51,14
3	ADB (Asian Development Bank)	135.558.089	30.244.496	22,31
4	DEC-UK(UK Disaster Emergency Committee)	90.910.596	79.381.951	87,32
5	American Red Cross	76.062.695	68.649.468	90,25
6	UNICEF (United Nations Children's Fund)	63.913.716	46.041.732	72,04
7	Japanese Government	59.490.696	59.456.117	99,94
8	German Development Cooperation through KfW Development Bank (German Financial Cooperation)	48.367.051	35.798.275	74,01
9	CRS (Catholic Relief Service)	43.749.773	11.170.953	25,53
10	CIDA (Canadian International	42.197.323	11.706.296	27,74

No	Lembaga Penyandang Dana	Komitmen (US\$)	Realisasi (US\$)	Persentase (%)
	Development Agencies)			
11	Other	762.111.384	526.163.296	69,04
TOTAL		1.817.490.202	1.012.879.120	55,73

Sumber: RAND dan hasil analisis Tim P3B-BAPPENAS, Des 2007

Meskipun USAID memiliki komitmen terbesar di antara seluruh Donor/NGO, realisasi hingga tahun 2007 ini masih di bawah 10 %. Realisasi komitmen yang mendekati 100 % atau dengan kata lain hampir menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah Japanese Government (99,94 %) dan American Red Cross (90,25 %). Gambaran presentase realisasi komitmen masing-masing Donor/NGO ditunjukkan pada gambar berikut.

Grafik 3 - 22
Persentase Realisasi Komitmen Donor Terbesar Bidang Infrastruktur, Perumahan, Tata Ruang Pertanian, dan Lingkungan Hidup



Sumber: Hasil Analisis Tim P3B-BAPPENAS, 2007

Khusus mengenai Multi Donor Fund (MDF), Pemerintah Indonesia dan komunitas internasional melalui MDF bagi Aceh dan Nias menjalankan koordinasi atas pendanaan dari negara-negara donor untuk rekonstruksi melalui MDF. Dana tersebut berjumlah sekitar US\$ 670 juta dalam bentuk komitmen dari berbagai 15 negara donor (Komisi Eropa, Belanda, Inggris, Bank Dunia, Swedia, Denmark, Norwegia, Kanada, ADB, Amerika Serikat, Jerman, Belgia, Finlandia, Selandia Baru, dan Irlandia). Tabel berikut memperlihatkan komitmen dan realisasi khusus di bidang perumahan dan permukiman, pertanian, dan lingkungan hidup.

Tabel 3 - 69
Realisasi Proyek Multi Donor Fund (MDF) Bidang Perumahan,
Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Sampai September 2007

Kegiatan	Mitra	Badan Pelaksana	Komitmen US\$ juta	Realisasi US\$ juta
Perumahan dan Permukiman				
Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemukiman Berbasis Komunitas NAD-Nias	World Bank	Dept. PU	85,00	78,16
Pertanahan				
Proyek Rekonstruksi Administrasi Pertanahan NAD (RALAS)	World Bank	BPN	28,50	11,70
Lingkungan Hidup				
Program Pengolahan Limbah Tsunami	UNDP	UNDP/ Dinas	24,41	14,43
Proyek Hutan dan Lingkungan Hidup Aceh	World Bank	LIF/FFI	17,53	4,69
Program Mitigasi Banjir di Banda Aceh	World Bank	Muslim Aid	4,50	0,86

Sumber: Laporan Keuangan MDF, 30 September 2007

3.3.1.1 Perumahan dan Permukiman

Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi NAD dan Kepulauan Nias mendapatkan perhatian besar dari masyarakat Internasional, sehingga sumber pembiayaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut sebagian besar bersumber dari sumbangan (hibah) masyarakat Internasional, baik melalui donor ataupun langsung dilaksanakan oleh NGO/LSM.

Sampai dengan pertengahan 31 Oktober , rekonstruksi sebanyak 78.788 unit rumah telah selesai dilakukan oleh Donor/NGO, sedang dikerjakan 39.547 unit rumah, dari total komitmen keseluruhan sebanyak 117.404. Rincian per Kabupaten/kota di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara ditunjukkan pada tabel berikut.

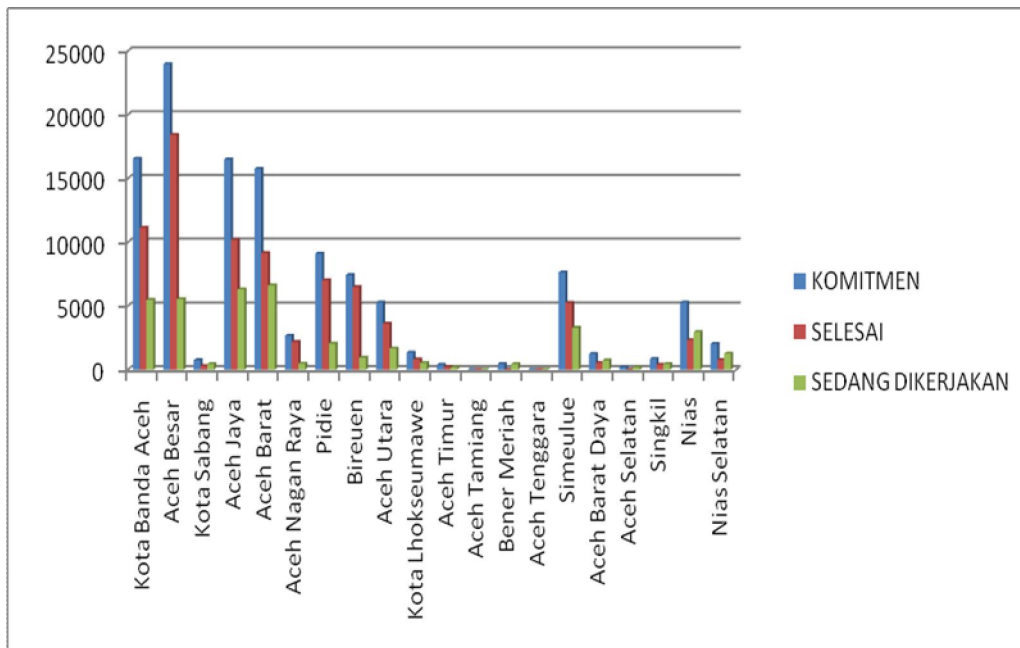
Tabel 3 - 70
Realisasi Pembangunan Perumahan di NAD-Nias
oleh Donor/NGO hingga Oktober 2007

No	Kab/Kota	Donor/NGO		
		Komitmen (unit)	Selesai (unit)	Sedang Dikerjakan (unit)
Nanggroe Aceh Darussalam				
1	Kota Banda Aceh	16552	11125	5478
2	Aceh Besar	23970	18434	5545

No	Kab/Kota	Donor/NGO		
		Komitmen (unit)	Selesai (unit)	Sedang Dikerjakan (unit)
3	Kota Sabang	749	297	452
4	Aceh Jaya	16498	10183	6315
5	Aceh Barat	15765	9151	6614
6	Aceh Nagan Raya	2662	2180	482
7	Pidie	9102	7023	2044
8	Bireuen	7433	6496	937
9	Aceh Utara	5278	3614	1664
10	Kota Lhokseumawe	1350	819	531
11	Aceh Timur	386	206	180
12	Aceh Tamiang	0	0	0
13	Bener Meriah	450	0	450
14	Aceh Tenggara	0	0	0
15	Simeulue	7626	5244	3282
16	Aceh Barat Daya	1243	524	725
17	Aceh Selatan	187	0	187
18	Singkil	842	400	442
Kepulauan Nias				
19	Nias	5279	2321	2958
20	Nias Selatan	2032	771	1261
TOTAL		117.404	78.788	39.547

Sumber: Hasil Analisis Tim P3B-BAPPENAS berdasarkan data Dit. Pengendalian dan Monitoring, Deputi Perumahan dan Permukiman, Bapel RR NAD-Nias, Nov 2007

Grafik 3 - 23
Proporsi Komitmen dan Realisasi Pembangunan Perumahan (unit)
oleh Donor/NGO Hingga Oktober 2007



Sumber: Hasil Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

Program yang capaian terhadap komitmen nya masih rendah yaitu rumah rusak berat yang harus diperbaiki, dimana capaian nya masih di bawah 50% dari komitmen awal. Sedangkan capaian kinerja NGO dan Donor terhadap komitmennya yang masih jauh di bawah 50% adalah pada kegiatan penyediaan material bangunan permukiman baru, realisasinya baru sebesar 101.060 USD (0,89%) dari total komitmen sejumlah 11.313.292 USD. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 - 71
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan
oleh Donor dan NGO (Off Budget) Berdasarkan Jenis Kegiatan

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
A	PERUMAHAN				
1	Rumah rusak berat yang diperbaiki	unit	1166	403	22,92%
2	Rumah yang dibangun	unit	79.964	59.103	34,56%
3	Rumah yang ditempati	unit	32.481	22.438	69,08%
4	Rumah rusak ringan yang diperbaiki	unit	913	467	51,15%
5	Pembangunan rumah yang direlokasi	unit	4.987	2.971	59,57%
6	Pembangunan rumah sementara	unit	14.616	14.245	97,46%
B	PERMUKIMAN	Satuan	Target	Realisasi	(%)
1	Suplai bahan bangunan (USD)	\$	11.313.292	101.060	0,89%

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
2	Fasilitas Distribusi Komunikasi yang direhabilitasi	unit	5	0	0%
3	Fasilitas Distribusi Listrik yang direhabilitasi	unit	245	109	44,49%
4	Gedung pemerintah yang dibangun/diperbaiki	unit	78	69	88,46%
5	Surat tanah yang diterbitkan	persil	4.805	4,505	95,61%
6	Gedung kantor yang dibangun/diperbaiki	unit	35	17	48,57%
7	Jumlah orang yang dipekerjakan	org	459	409	89,11%
8	Jumlah orang yang dilayani	org	289.453	208.889	72%
10	Gedung sarana publik yang dibangun/diperbaiki	unit	551	509	92,38%
11	Restorasi taman publik/umum	unit	54	19	35,19%
12	Laporan sebagai bahan untuk dipelajari	pkt	31	12	38,17%
13	Gedung pendukung yang dibangun/diperbaiki	unit	272	272	100%
14	Kemajuan fisik (%)	%	6.601	4.997	75,70%

Sumber : Recovery Aceh Nias Database, 10 Desember 2007

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

Pada salah satu NGO yang bergerak di bidang perumahan, International Organization for Migration, tercatat bahwa fokus kegiatannya pada awal masa setelah tsunami yaitu pembangunan rumah sementara yang aman dan tahan gempa. Pada akhir tahun 2005, program perumahan sementara IOM ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat korban tsunami, dan terdapat harapan yang semakin besar di pihak penerima bantuan dan donor untuk solusi permanen terhadap krisis perumahan di Aceh pasca tsunami.

Paradigma baru ini mengharuskan pemikiran ulang pada perancangan program tahun 2006 dalam unit layanan konstruksi IOM, yang didasari pada pembangunan tempat tinggal permanen dengan fasilitas air dan sanitasi yang terpadu, termasuk pilihan mata pencaharian jangka panjang. Kriteria penerima bantuan di Aceh dan kepada siapa prioritas perumahan diberikan dijelaskan pada tabel berikut.

RUMAH PERMANEN IOM

Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA)



RISHA ditujukan bagi pembangunan rumah sederhana sehat, rumah swadaya, rumah pengungsi, serta rumah darurat. Sistem RISHA adalah sistem konstruksi langsung jadi atau instant yang dapat dibongkar pasang (*knock down*) dengan komponen-komponen yang dibuat secara pabrikasi.

Sistem ini ditujukan untuk mendukung Kepmen Kimpraswil No.403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Rumah Sederhana Sehat. Teknologi konstruksi RISHA dapat pula diterapkan pada bangunan umum, seperti sekolah, poliklinik, mesjid, perkantoran, perdagangan, dan lainnya.

Sumber: Panduan Rumah Permanen IOM, 2007

Tabel 3 - 72
Kriteria dan Prioritas Penerima Bantuan oleh IOM

Kriteria Penerima Bantuan	Prioritas Bantuan Perumahan
▪ Rumah rusak total atau tidak dapat diperbaiki akibat gempa dan tsunami ▪ Pemohon dapat menunjukkan salinan sah dari (i) identitas diri, (ii) kartu keluarga, (iii) keterangan sebagai warga yang ditandatangani oleh pimpinan masyarakat dan camat ▪ Penerima bantuan potensial tidak memiliki rumah lain dalam kondisi baik dan belum menerima bantuan rumah atau janji tegas bantuan perumahan dari organisasi lain ▪ Hanya satu pemohon dalam tiap keluarga yang rumahnya hancur akan dipertimbangkan	▪ Rumah tangga yang dikepalai oleh seorang wanita yang tidak bersuami ▪ Keluarga dengan 3+ anak dibawah 16 tahun ▪ Yatim piatu hingga umur 15 tahun ▪ Keluarga yang memiliki tanggungan kerabat manula ▪ Keluarga tanpa pendapatan yang tetap ▪ Keluarga yang tinggal di fasilitas masyarakat (sekolah, fasilitas olah raga, dsb) ▪ Yatim piatu di atas 15 tahun yang tidak memiliki sumber dukungan keuangan ▪ Pemohon yang memiliki tanah dan tinggal di sebuah lokasi baru yang berbeda dari rumah asli mereka

Sumber: Laporan Tahunan 2006, IOM Indonesia

Di salah satu kawasan perumahan di Lhok Nga menunjukkan masih ada beberapa rumah, yang menggunakan 1-2 buah MCK secara komunal. Kondisi MCK yang dibangun swadaya oleh penduduk setempat sangat tidak memperhatikan aspek kebersihan dan kesehatan lingkungan. Untuk kondisi jalan lingkungan, jalan yang menghubungkan kawasan perumahan dengan jalan raya berupa jalan setapak. Sedangkan sebagian jalan lingkungan lain yang berada di dalam kawasan perumahan masih berupa batu kerikil. Posisi jalan lingkungan langsung terhubung dengan jalan raya yang menghubungkan antara Banda Aceh dan Lhok Nga. Perumahan dengan tipe unit 36 yang dibangun atas hasil kerjasama beberapa Donor dan NGO yaitu Handicap International, UNICEF, Fondation de France, Croix-Rouge Francaise, Lafarge Cement ini masih merupakan kawasan yang padat permukiman penduduk lainnya dan tidak jauh dari tempat-tempat aktifitas sosial lainnya, seperti lembaga pendidikan, dan tempat melakukan transaksi ekonomi masyarakat.⁸

Gambar 3 - 42
Kondisi jalan lingkungan di Gampong Lamkruet, Lhok Nga



Sumber: Dok. Kunjungan Lapangan Sekretariat P3B Bappenas, Sept 2007

Sedangkan mengenai kondisi Prasarana Dasar Lingkungan, kebutuhan air minum sudah terpenuhi dengan adanya PDAM dan sudah terpasang di setiap unit rumah. Selain itu, jaringan listrik sudah tersedia dengan terpasangnya kWh meter di setiap rumah. Saluran drainase yang ada di lingkungan terlihat tidak berfungsi dengan baik. Saluran tersumbat dengan kayu-kayu atau sampah. Bahkan saluran drainase tidak terintegrasi dengan baik dalam lingkungan perumahan dan tidak terawat.

⁸ Hasil kunjungan lapangan Tim Sekretariat P3B Bappenas pada tanggal 3-7 September di kawasan perumahan di Gampong Lamkruet, Lhok Nga

Gambar 3 - 43
Kondisi Prasarana Dasar di Gampong Lamkruet, Lhok Nga



Sumber: Dok. Kunjungan Lapangan Sekretariat P3B Bappenas, Sept 2007

Sedangkan pada hasil observasi kawasan perumahan di Desa Benteng Kabupaten Pidie, secara umum tata letak bangunan belum berfungsi sebagai tempat evakuasi/tempat menyelamatkan diri jika terjadi tsunami. Pola dan jaringan jalan lingkungan belum direncanakan untuk fungsi evakuasi, karena terletak 25 meter dari bibir pantai. Kualitas konstruksi rumah sudah bagus, tidak ada kerusakan pada atap dan dinding, dan saat ini masih tahap penyelesaian. Mengenai akses lokasi perumahan dengan pusat kegiatan, jarak yang ditempuh maksimal 200 meter untuk ke tempat kegiatan seperti pasar, sekolah, pusat kesehatan, dan sarana ibadah. Perumahan ini dibangun oleh UNDP dan ALISEI.

Gambar 3 - 44
Kawasan Perumahan di Benteng, Kabupaten Pidie



Sumber: Dok. Kunjungan Lapangan Sekretariat P3B Bappenas, November 2007

Gambar 3 - 45
Kawasan Perumahan di Samalanga, Kab. Bireun



Sumber: Dok. Kunjungan Lapangan Sekretariat P3B Bappenas, November 2007

Kondisi yang berbeda ditunjukkan di daerah Samalanga, Kab. Bireun. Kawasan perumahan di sana sudah tersedia jalur evakuasi dan telah tersedia escape building yang berjarak + 30 meter dari kawasan perumahan. Prasarana penanganan air limbah masih secara tradisional dan pada beberapa rumah telah tersedia drainase yang baik. Demikian juga dengan tempat sampah, belum merata pada setiap rumah. Jaringan telekomunikasi pada beberapa rumah telah tersedia dan digunakan, dan jaringan listrik telah terpasang dan digunakan pada setiap rumah. Untuk kualitas kelengkapan bangunan, MCK telah terintegrasi dengan baik. Demikian juga dengan ketersediaan air bersih (walaupun belum adanya jaringan PDAM), namun air sumur layak untuk digunakan sebagai konsumsi sehari-hari. Perumahan ini dibangun oleh Departemen PU, BRR, MDF, World Bank, dan REKOMPAK.

Gambar 3 - 46
Kegiatan Village Planning di Desa
Lamjabat, Banda Aceh



Sumber: Laporan Kegiatan 1 Tahun Bapel RR
NAD-Nias: Membangun Tanah Harapan,
April 2006

3.3.1.2 Tata Ruang

Penyusunan rencana desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tahapan pembangunan perumahan. Dimulai dari pembuatan batas tanah kepemilikan (land mapping), dilanjutkan dengan penyusunan rencana desa (village planning), detail engineering design (DED), dan terakhir pembangunan perumahan. Dari sekitar 887 desa yang membutuhkan village mapping, telah 804 desa yang sudah selesai (Laporan Kegiatan 2 Tahun Bapel RR, Agustus 2007). Donor/NGO untuk bidang tata ruang lebih banyak berperan untuk kegiatan village planning dan berbasis.

Telah selesainya Pedoman Teknis Perencanaan Permukiman Berbasis Masyarakat sebagai penjabaran dari Pedoman Menata dan Membangun Desa diharapkan akan mempercepat penyusunan rencana desa yang dilakukan berbagai pihak, antara lain USAID, ADB, YIPD, AIPRD, MercyCorps, dan GTZ. Para stakeholder melakukan koordinasi yang intensif untuk menyinergikan percepatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Kesenjangan (gap) yang ada antara kebutuhan dan komitmen lembaga donor/LSM untuk village planning akan dijumpai oleh BRR melalui dana APBN 2006.⁹

Kegiatan Perencanaan dan Pemetaan untuk menunjang kualitas dan pelaksanaan proyek perumahan dan permukiman, antara lain survey dan pemetaan tata batas (desa/Gampong). Telah hampir 100 % dari komitmen 416 desa. Mengenai kegiatan perencanaan dan pemetaan oleh Donor/NGO di NAD-Nias hingga Juni 2007, terdapat 6 kegiatan yang telah dilaksanakan, di antaranya peta dan surat tanah yang diterbitkan. Selengkapnya pada tabel berikut.

⁹ Dikutip dari Laporan Kegiatan 1 Tahun Bapel RR NAD-Nias: Membangun Tanah Harapan, April 2006

Tabel 3 - 73

Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tata Ruang oleh Donor dan NGO (Off Budget)

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
	PERENCANAAN & PEMETAAN				
1	Peta yang telah dihasilkan (persentase)	%	20.359	5.157	25,33%
2	Surat tanah yang diterbitkan	persil	6.565	6.565	100%
3	Jumlah orang yang dilayani	org	102.125	100.202	98,12%
4	Laporan sebagai bahan untuk dipelajari	pkt	58	28	48,28%
5	Desa yang dilengkapi batas property	Gampong	416	415	99,76%
6	Desa yang dilengkapi gambar tampilan	Gampong	1165	65	56,52%

Sumber : Recovery Aceh Nias Database, 10 Desember 2007

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

3.3.1.3 Pertanahan

Bencana gempa bumi dan tsunami telah menghancurkan dan menghilangkan batas-batas banyak persil tanah ataupun obyek-obyek lain yang dapat digunakan sebagai acuan keberadaan persil-persil. Selain itu, bukti hukum seperti surat bukti hak atas tanah, baik yang disimpan di rumah, maupun yang berada di kantor-kantor BPN setempat ataupun yang disimpan di Bank sebagai anggunan, juga musnah akibat tsunami.

Berkaitan dengan usaha rekonstruksi batas persil tanah di Aceh setelah terjadinya bencana gempa dan tsunami, proyek Rekonstruksi Administrasi Pertanahan NAD atau RALAS (Reconstruction of Aceh Land Administration System) mengidentifikasi kepemilikan tanah dan menerbitkan sertifikat tanah melalui pendataan tanah masyarakat, pemulihan data pertanahan, dan pembentukan sebuah pangkalan data tanah.

Status kepemilikan tanah akan dipulihkan melalui beberapa tahapan proses. Melalui fasilitasi yang diberikan oleh NGO atau Badan Pertanahan Nasional (BPN), masyarakat akan melaksanakan sebuah proses pendataan tanah yang merupakan langkah awal bagi mereka untuk memberdayakan kembali komunitasnya. Ini dilakukan sesuai dengan petunjuk dari BPN. Selanjutnya, BPN akan memutuskan hasilnya dengan melakukan pengukuran terhadap bidang-bidang tanah dan melaksanakan validasi terhadap kesepakatan masyarakat atas kepemilikan dan batasan tanah. Hasil-hasil tersebut juga diperiksa melalui perbandingan dengan dokumentasi pra-tsunami. Pada akhirnya, BPN akan mengumumkan hasil keputusannya tersebut selama empat minggu, dilanjutkan dengan pendaftaran dan

Gambar 3 - 47
Kegiatan Pengukuran dan Penyerahan Sertifikat Tanah



Sumber: Paparan Laporan Kegiatan Ajudikasi RALAS 2005 dan 2006, Kanwil BPN NAD 2007

penerbitan sertifikat kepemilikan tanah.

Pelaksanaan kegiatan RALAS tahun 2006 dimulai bulan Juli 2006 sampai dengan Mei 2007. Lokasi kegiatan tersebar di 9 Kab/Kota yaitu Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireun, Kab. Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat dan Kab. Nagan Raya. Penyelesaian kegiatan mencakup target 150.000 bidang tanah, pengukuran bidang tanah sebanyak 157.253 bidang, penertiban sertifikat sebanyak 103.586 bidang, dan penyerahan sertifikat sebanyak 94.719 bidang. Ringkasan rinci mengenai kegiatan ini ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3 - 74
Rencana Kegiatan Ajudikasi RALAS Tahun 2006

NO	KEGIATAN	BIDANG	WAKTU PELAKSANAAN	LOKASI
1.	Target	150.000	Juli 2006-Mei 2007	Aceh Besar, Banda Aceh, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya
2.	Pengukuran Bidang Tanah	157.253		
3.	Penerbitan sertifikat	103.586		
4.	Penyerahan sertifikat	94.719		

Sumber: Paparan Laporan Kegiatan Ajudikasi RALAS 2006, Kanwil BPN NAD 2007

3.3.1.4 Lingkungan Hidup

Proyek pengelolaan limbah untuk perbaikan pasca tsunami (Tsunami Recovery Waste Management) sebesar US\$ 15,2 juta yang dipimpin oleh UNDP ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas pemerintah dalam mengelola limbah, menciptakan lapangan kerja dan usia kehidupan yang lebih lama dari pengelolaan limbah, sambil memberi manfaat bagi lingkungan sekitar melalui pengumpulan, perbaikan dan pengolahan ulang dari bahan limbah untuk dapat digunakan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Contoh hasil limbah yang dapat digunakan kembali di antaranya penyediaan kayu untuk furniture, proses daur ulang plastik untuk dijual, dsb.

Kemajuan hingga bulan November 2006: (1) Sampah tsunami dibersihkan 12,066 m³, (2) Kayu hasil olahan kembali 313 m³, (3) Rehabilitasi jalan dari puing reruntuhan 4 km, (4) Pengumpulan sampah kota 4.497 m³, dan (4) Pekerja sementara program TRWMP sebanyak 902 orang.

Sedangkan kemajuan pekerjaan hingga Oktober 2007: (1) Tim dari Austcare dan CAP/GTZ sudah direkrut, untuk lokasi pekerjaan di Banda Aceh, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Simeulue, Kab. Nias, dan Kab. Nias Selatan, (2) Rencana kegiatan dan laporan awal, (3) Forum dan website mata pencaharian sudah diluncurkan ([//groups.yahoo.com/groups/acehwastemanagement](http://groups.yahoo.com/groups/acehwastemanagement)), (4) Kebutuhan riil, analisa pasar, dan sosialisasi kegiatan telah selesai, dan (5) Kemajuan awal telah direview dan disetujui.

Gambar 3 - 48
Rehabilitasi Lokasi Pembuangan Sampah
Tsunami di Lapang, Kab. Aceh Berat



Sumber: Laporan Bulanan TRWMP, UNDP Nov 2006

3.3.2 Pemulihan Infrastruktur

Peran Donor/NGO maupun LSM dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sangat besar. Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi off budget menangani hampir di semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur fisik meliputi jalan dan jembatan, transportasi, energi dan listrik, sumberdaya air, fasilitas dan bangunan umum, serta pemeliharaan.

Berikut ini adalah beberapa Donor/NGO yang memiliki kontribusi paling besar dalam kegiatan infrastruktur di NAD-Nias. Realisasi disbursed berdasarkan total komitmen yang dijanjikan sampai dengan 10 Desember 2007 yang dilakukan oleh Donor/NGO adalah:

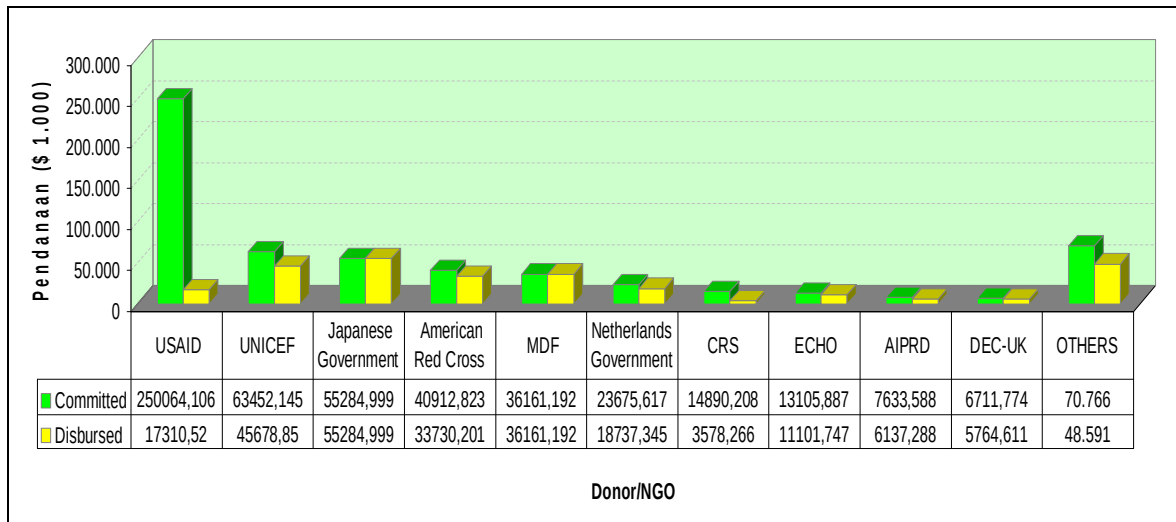
Tabel 3 - 75
Penyerapan Anggaran Donor/NGO dari 2005 s.d 10 Desember 2007 (Dalam \$. Ribu)

NO	DONOR/NGO	JUMLAH PROGRAM	COMMITTED (USD)	COMMITTED (USD)	REALISASI ANGGARAN (%)
1	USAID (United States Agency for International Development)	8	250.064.106	17.310.520	6,92
2	UNICEF (United Nations Children's Fund)	7	63.452.145	45.678.850	71,99
3	Japanese Government	3	55.284.999	55.284.999	100,00
4	American Red Cross	6	40.912.823	33.730.201	82,44
5	MDF * (Multi Donor Fund)	5	36.161.192	36.161.192	100,00
6	Netherlands Government	3	23.675.617	18.737.345	79,14
7	CRS (Catholic Relief Service)	14	14.890.208	3.578.266	24,03
8	ECHO (European Commission Humanitarian Aid Office)	17	13.105.887	11.101.747	84,71
9	AIPRD (Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development)	2	7.633.588	6.137.288	80,40
10	DEC-UK (UK Disaster Emergency Committee)	10	6.711.774	5.764.611	85,89
TOTAL 10 DONOR/NGO TERBESAR			511.892.339	233.485.019	45,61
OTHERS DONOR/NGO			70.765.548	48.590.931	68,66
TOTAL KESELURUHAN DONOR/NGO			582.657.887	282.075.950	48,41

Sumber: Data Ran Database, 12 Desember 2007.

Catatan: *) Donor MDF terdiri dari Komisi Eropa, Bank Dunia, Asian Development Bank, Pemerintah Belanda, Inggris, Swedia, Denmark, Norwegia, Jerman, Kanada, Belgia, Finlandia, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Irlandia.

Grafik 3 - 24
Penyerapan Anggaran Donor/NGO (Dalam \$. Ribu)



Sandingan realisasi keuangan dan kegiatan yang dilaksanakan masing-masing Donor/NGO diatas sulit untuk dilakukan karena tidak seluruh Donor/NGO diatas memberikan pelaporan secara detail.

Secara umum, persentase realisasi dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi komitmen mereka baru mencapai 48,41%. Alokasi dana Donor/NGO yang diperuntukkan untuk kegiatan infrastruktur mencapai 37% dari total alokasi pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi seluruh sektor.

Tabel 3 - 76
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Publik (Perhubungan, Energi dan Listrik serta Sumberdaya Air) Dilaksanakan oleh seluruh Donor dan NGO (Off Budget)

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI S.D JUNI 2007	
				VOLUME	(%)
A	Perhubungan dan Transportasi				
1	Pembangunan/perbaikan landasan pacu/airstrip (Km)	km	6	6	100%
2	Pembangunan jembatan (m)	m	255	233	91%
3	Pembangunan/perbaikan jalan sekitar pelabuhan dan bandara (m)	m	150	150	100%
4	Pembangunan/perbaikan jalan sekitar perumahan/desa (m)	m	46,640	3,542	8%
5	Pembangunan/perbaikan jalan untuk fasilitas publik (m)	m	7,802	2,427	31%
6	Pembangunan/perbaikan jalan (Km)	km	8,207	4,613	56%
7	Pembangunan jembatan	unit	186	170	91%
8	Pengembangan bandara/pelabuhan	unit	17	13	76%
B	ENERGI DAN LISTRIK				
1	Pembangunan tenaga listrik (kW)	kw	57,721	43,801	76%
2	Penyediaan peralatan dan suku cadang (value in USD)	\$	1,551,249	1,365,340	88%
C	SUMBER DAYA AIR				
1	Pembangunan tanggul/pengendali banjir (Km ²)	km ²	524	22	4%
2	Pembangunan sistem irigasi (Ha)	ha	75	74	99%

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI S.D JUNI 2007	
				VOLUME	(%)
3	Rehabilitasi/pembuatan drainase/waduk sepanjang drainase (m)	m	446,495	377,828	85%
4	Rehabilitasi/pembuatan drainase/waduk sepanjang outlet drainase (m)	m	30,742	30,742	100%

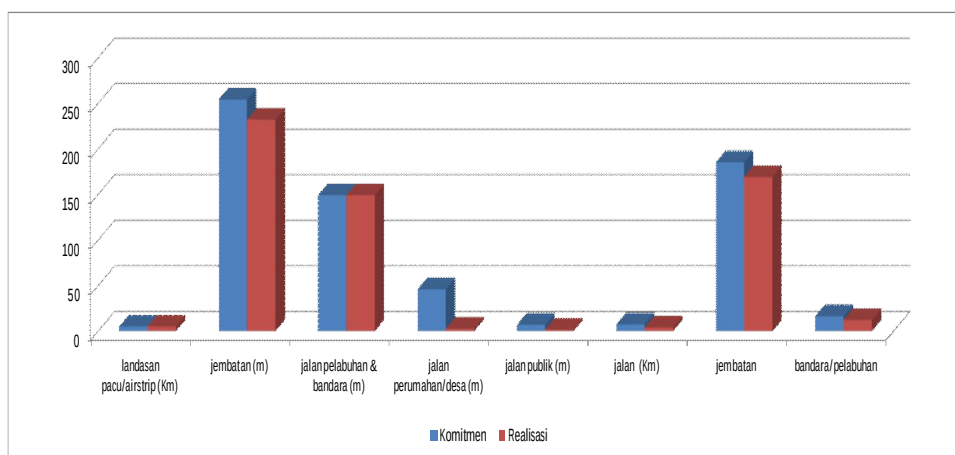
Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

3.3.2.1 Perhubungan dan Transportasi

Perbaikan jembatan telah mencapai realisasi 91% (dari komitmen 255 meter dan 186 unit) dan perbaikan fasilitas jalan mencapai realisasi sebesar 31% dari komitmen 7.802 meter. Namun demikian, masih ada realisasi yang baru mencapai 8% dari komitmen, yakni pembangunan/konstruksi jalan kampung yang baru merealisasikan 3.542 meter dari komitmen sepanjang 46.640 meter.

Grafik 3 - 25
Realisasi Off Budget Sub Sektor Perhubungan dan transportasi
sampai Oktober 2007 terhadap Rencana Induk

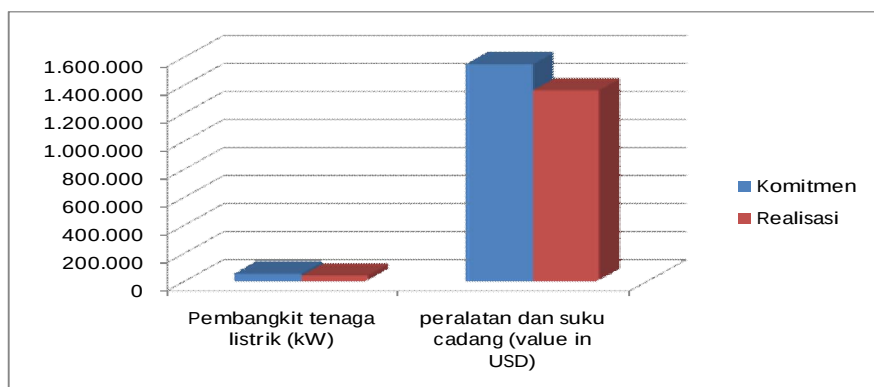


Pembangunan kembali/rehabilitasi landasan pacu (airstrip) dan jalan di sekitar bandara telah mencapai realisasi 100% dari komitmen (masing-masing sepanjang 6 km dan 150 meter) dan pembangunan kembali pelabuhan telah terealisasi sejumlah 13 unit dari 17 unit yang dikomitmenkan (76%).

3.3.2.2 Energi dan Listrik

Pada kegiatan energi dan listrik, pengadaan generator telah dilakukan dan kapasitas sampai saat ini adalah sebesar 43.801 Kw dari komitmen awal sebesar 57.721 Kw. Selanjutnya suplai peralatan telah direalisasikan sebesar 88% dari nilai bantuan sejumlah 1.551.249 USD.

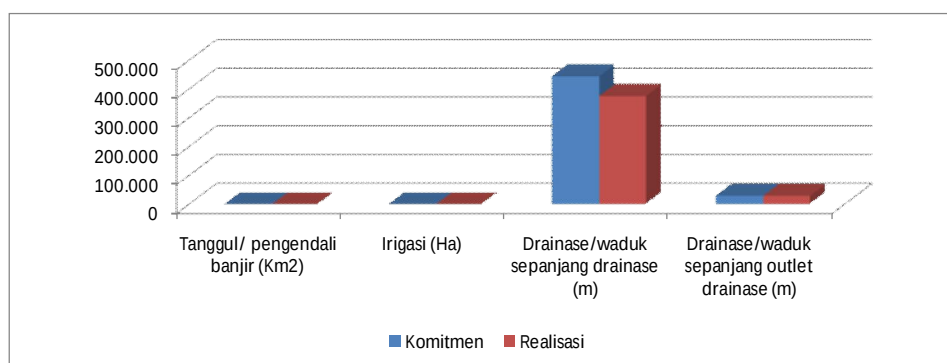
Grafik 3 - 26
Realisasi Off Budget Sub Sektor Energi dan Listrik sampai
Oktober 2007 terhadap Rencana Induk



3.3.2.3 Sumber Daya Air

Rehabilitasi drainase telah direalisasikan mencapai 100% dengan panjang struktur outlet sepanjang 30.742 meter. Selanjutnya konstruksi drainase yang telah direhabilitasi adalah sepanjang 377.828 (85%) dari komitmen. Rehabilitasi areal irigasi telah terealisasi seluas 74 H (99%) dari komitmen seluas 75 Ha. Selanjutnya, perlindungan pantai dan pengendalian banjir baru terealisasi 22 km² dari komitmen 524 km² (4%).

Grafik 3 - 27
Realisasi Off Budget Sub Sektor Sumber Daya Air sampai Oktober
2007 terhadap Rencana Induk



Secara lebih terperinci, dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3 - 77
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Publik (Perhubungan,
Energi dan Listrik serta Sumberdaya Air) Dilaksanakan oleh 10 Donor dan
NGO Terbesar (Off Budget)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KOMITMEN	REALISASI S.D 30 OKTOBER 2007	
			VOLUME	(%)
USAID (United States Agency for International Development)				
A	Perhubungan dan Transportasi			
1	Banda Aceh-Meulaboh Road and Bridge Reconstruction and Rehabilitation Project	195,000,000	0	0
2	Aceh road/bridge rehabilitation and reconstruction Project banda aceh - meulaboh	81,405,000	5,146,204	6%
3	Banda Aceh-Meulaboh Road and Bridge Reconstruction Project	35,000,000	10,655,885	30%
4	Construction Department	2,000,000	2,000,000	100%
5	Cash for Work (CfW)	300,000	300,000	100%
B	Energi Dan Listrik			
C	Sumber Daya Air			
D	Air dan Sanitasi			
1	Environmental Services Delivery-Drinking Water Supply and Sanitation	3,000,000	2,400,000	80%
E	Fasilitas dan Bangunan Umum			
UNICEF (United Nations Children's Fund)				
A	Perhubungan dan Transportasi			
B	Energi Dan Listrik			
C	Sumber Daya Air			
D	Air Bersih dan Sanitasi			
1	Provision of Clean Water Supply and Basic Sanitation Facilities	61,737,492	32,516,110	53%
2	Small Towns and Rural Communities Water Restoration Program Phase I	1,496,393	1,496,393	100%
E	Fasilitas dan Bangunan Umum			
1	Medair IDN02 Tsunami Rehabilitation Project Phase 2	305,503	0	0
Japanese Government				
A	Perhubungan dan Transportasi			
	Rehabilitation and Reconstruction of West Coast Road in North Sumatra	31,486,146	31,486,146	100%
B	Energi Dan Listrik			
C	Sumber Daya Air			
1	Emergency Repair Work of Flood Way Dyke in Banda Aceh	10,181,818	10,181,818	100%
D	Air Bersih dan Sanitasi			
	Recovery of Water Supply and Snitation System	9,636,363	0	0%
E	Fasilitas dan Bangunan Umum			
American Red Cross				
A	Air Bersih dan Sanitasi			
1	Rural Water Supply & Sanitation in Aceh	24,398,942	24,398,94	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KOMITMEN	REALISASI S.D 30 OKTOBER 2007	
			VOLUME	(%)
	Province		2	
2	Calang Water and Sanitation Project	5,965,329	5,965,329	100
3	Movement Immediate Needs Response in IDP Camps and Temporary Settlements	2,515,404	2,515,404	100
4	Water and Sanitation for Transitional Shelters	8,357,879	8,357,879	100
5	Cash for Work 2	296,751	296,751	100
6	Community Water and Sanitation Aceh Province, Indonesia	7,182,619	0	0
7	Integrated Community Based Risk Reduction Project	6,120,000	6,120,000	100
MDF (Multi Donor Fund)				
A	Perhubungan dan Transportasi			
1	Rehabilitasi Jalan Pedesaan Padat Karya NAD-Nias		24,700,000	
2	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pelabuhan	3,782,000	3,580,000	95%
3	Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur (IRFF)		100,000,000	
4	Perbaikan Jalan dan Jembatan Lamno - Calang	1,259,193	1,250,000	100%
5	WFP Shipping Service Logistic	24,600,000	15,756,945	64%
6	Nias Roads, Transport & City Development Planning and Design.	5,000,000	0	0
7	West Coast Infrastructure Planning & Design	10,000,000	0	0
B	Energi dan listrik			
C	Sumber Daya Air			
1	Banda Aceh Flood Relief Flow Valves & Pump Stations	4,500,000	577,871	13%
2	Air Bersih dan Sanitasi			
3	Tsunami Recovery Waste Management Programme (TRWMP) in NADNias	14,431,105	14,431,105	100%
D	Fasilitas dan bangunan Umum			
1	Program Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IREP)		42,000,000	
2	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus		25,000,000	
3	Provincial-Level Strategic Infrastructure Planning and Design.	6,000,000	0	0%
4	Infrastructure Program Management (IPM)	21,000,000	0	0
Netherlands Government				
A	Perhubungan dan Transportasi			
1	Reconstruction of Malahayati Port	10,080,247	10,080,247	100%
B	Energi dan Listrik			
C	Sumber Daya Air			
1	Aceh and Nias Sea Defence, Flood Protection, Refuge and Early Warning Systems Consultancy	8,888,889	0	0
2	Sektor Air Belanda dukung Sektor Air Sumatera Wilayah Utara (SABSAS)	13,580,247	1,234,568	9%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KOMITMEN	REALISASI S.D 30 OKTOBER 2007	
			VOLUME	(%)
CRS (Catholic Relief Service)				
A	Perhubungan dan Transportasi			
1	Lamno Calang Road Repair and Urgent Small Works Program	542,254	542,254	100%
2	Reconstruction of Punge Blang Cut Village	1,607,300	346,561	22%
3	Reconstruction of Rima Jeuneu Village	964,830	964,830	100%
4	Reconstruction of Rukoh Village	2,250,000	672,526	30%
5	Reconstruction and Road Repairs in Alue Naga Village	3,593,400	0	0
B	Energi Dan Listrik			
C	Sumber Daya Air			
D	Air Bersih dan Sanitasi			
1	Lam Teungoh Water and Sanitation System	194,544	194,544	100
2	Babah Ie & Gle Meulha Water and Sanitation System	1,844,617	0	0
3	Water and Sanitation system in Lam Sujen and Krueng Kala, Lhoong sub district	31,419	31,419	0
E	Fasilitas dan Bangunan Umum			
1	Krueng Sabee Raised Platforms for Tent Floors	55,313	0	0
ECHO (European Commission Humanitarian Aid Office)				
A	Perhubungan dan Transportasi			
1	Logistics support (storage, boat and truck transportation) for all humanitarian organizations	4,060,056	4,060,056	100%
2	Logistic Support and Infrastructure Rehabilitation	544,132	544,132	100%
3	Logistics support and public infrastructure repair for disaster affected population in Nias Phase IV, Indonesia	599,692	599,692	100%
4	Logistic Support and Infrastructure Rehabilitation (another location)	514,139	514,139	100%
B	Sumber Daya Air			
1	Rehabilitation of the water distribution system and the water intake of the water treatment plan to re-establish sustainable water supply for the tsunami and earthquake victims	385,385	385,385	100%
C	Air Bersih dan Sanitasi			
1	Water rehabilitation for the tsunami victims in Pidie and Bireuen Aceh province	1,219,512	0	0%
2	Water supply in Leupung	680,247	680,247	100%
3	Water and sanitation program for vulnerable people of Lolofitu-Moi, Mandrehe, Hiliduo sub-districts of Nias Island and Aceh Barat and Nagan in the Aceh Province.	1,359,872	1,359,872	100%
4	Demonstrating Environmental Sound Technologies (ESTs) for Building waste Reduction in Indonesia – DEBRI"	925,926	0	0
D	Fasilitas dan Bangunan Umum			
1	Environmental Health Interventions for survivors of the December 2004 Tsunami and the March Nias earthquake.	1,101,997	1,101,997	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KOMITMEN	REALISASI S.D 30 OKTOBER 2007	
			VOLUME	(%)
2	Assistance to Underserved Tsunami Affected Communities in Aceh Jaya (AUTAC) - Infrastructure	674,811	488,200	72%
3	Emergency response for the displaced populations victim of the tsunami and earthquake	677,215	339,241	50%
4	Rehabilitation and Capacity Building of Primary Health Care Centres Damaged by the Earthquake & Tsunami in Indonesia	1,630,000	1,630,000	100%
AIPRD (Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development)				
A	Perhubungan dan Transportasi			
1	Banda Aceh Port at Ulee Lheue - Reconstruction Stage 2	2,290,076	0	0%
DEC-UK (UK Disaster Emergency Committee)				
A	Perhubungan dan Transportasi			
1	Rekonstruksi Infrastruktur Pulau Nias	82,593	82,593	100
B	Air Bersih dan Sanitasi			
2	Kegiatan penyediaan air dan sanitasi Lamno	644,559	0	0
4	Fasilitas air bersih integratif	166,129	166,129	100
C	Fasilitas dan Bangunan Umum			
1	Program respon tsunami Aceh Besar dan Banda Aceh	19,627,780	19,627,780	0
5	Program respon tsunami di Aceh Barat (Meulaboh)	1,187,686	1,187,686	100
6	Program respon tsunami di Aceh Timur (Sigli dan Lhokseumawe)	7,177,534	7,177,534	100
7	Program respon tsunami di Nias	5,188,461	5,188,461	100
8	Program respon gempa dan tsunami untuk mensejahterakan masyarakat Aceh Jaya (Lamno)	7,511,305	7,511,305	100

Sumber : RAND Database 30 Oktober 2007, Laporan MDF 27 November 2007, Laporan Donor/NGO, 2007.

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

3.3.3 Sosial dan Budaya

Pada rehabilitasi dan rekonstruksi sosial dan budaya, meliputi aspek, pendidikan, kesehatan, agama, sosial dan budaya serta aspek sumberdaya manusia Indonesia lainnya seperti, peranan wanita, perlindungan anak, pemuda dan olahraga serta lainnya.

3.3.3.1 Pendidikan

Kegiatan bidang pendidikan yang didanai oleh NGO/donor utamanya berkenaan dengan penyediaan fasilitas pendidikan berupa buku dan furnitur sekolah, dan peralatan lainnya. Kegiatan lainnya adalah rehabilitasi bangunan/fasilitas sekolah dasar sampai dengan universitas, pelatihan, pelayanan dan pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa. Hal ini ditujukan untuk memulihkan kembali aspek kualitas pendidikan di Provinsi NAD dan Nias.

Rata-rata pencapaian/realisasi sampai dengan tahun 2007 adalah di atas 50% dari komitmen, antara lain adalah kegiatan penyediaan buku-buku (90%), pelayanan masyarakat pendidikan (84%), perbaikan gedung sekolah (78%) dan penyediaan peralatannya (83%). Namun demikian terdapat juga kegiatan yang realisasinya di bawah 50% terhadap komitmen seperti pembangunan gedung SMA (41%), serta penyediaan

fasilitas air bersih dan sanitasi sekolah yang pencapaiannya masing-masing sebesar 14% dan 33%. Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3 - 78
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Pendidikan Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
1	Penerima manfaat/partisipan pada pelatihan kejuruan	org	193.243	193.243	82
2	Penyediaan buku-buku	buku	193.243	193.243	82
3	Penyediaan ruang kelas dengan furniture	kelas	592	469	79
4	Sekolah dasar yang dibangun/diperbaiki	unit	686	549	80
5	Sekolah menengah pertama yang dibangun/diperbaiki	unit	390	275	71
6	Taman Kanak-kanak yang dibangun/diperbaiki	unit	76	64	84
7	Jumlah orang yang dilayani	org	113.106	10.884	10
8	Beasiswa yang disediakan	murid	19.386	13.174	68
9	Perlengkapan sekolah dengan fasilitas sanitasi	unit	679	282	42
10	Perlengkapan sekolah dengan fasilitas air	sekolah	236	34	14%
11	Sekolah Menengah Umum yang dibangun/diperbaiki	unit	70	38	54
12	Guru yang diberi pelatihan	guru	2.379	16.209	681
13	Sekolah smentara yang dibangun	unit	167	57	34
14	Transportasi yang disediakan	unit	63	57	90
15	Universitas yang dibangun/diperbaiki	unit	9	7	78
16	Perlengkapan & Penyediaan Sekolah (Nilai USD)	\$	9.022.683	7.435.533	82
17	Jumlah laporan untuk tujuan studi dan survey	Pkt	942	862	92

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

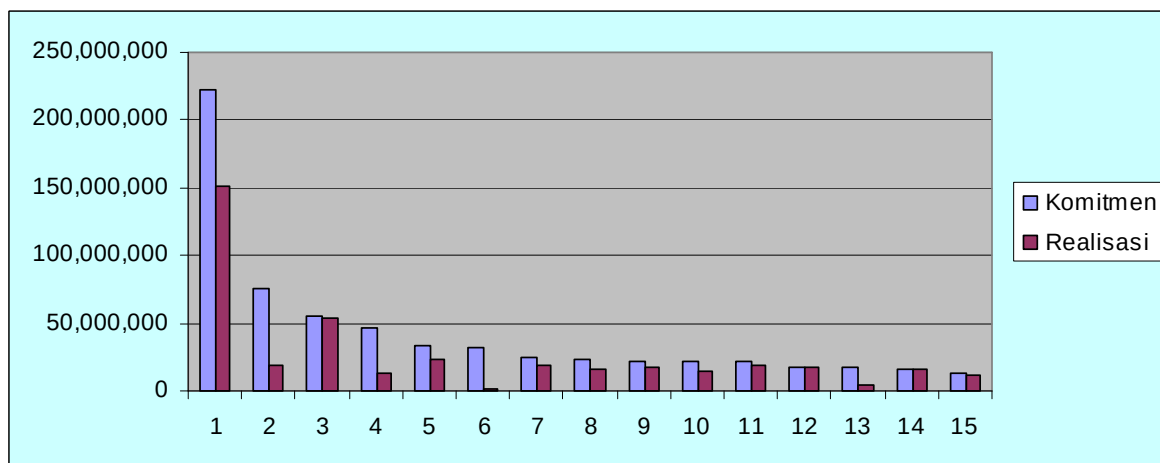
Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Donor/NGO berdasarkan para pelaku dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 3 - 79
Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sector Pendidikan berdasarkan Pelaku Donor/NGO

NO	NAMA DONOR/NGO	KOMITMEN (USD)	REALISASI
1	UNICEF (United Nations Children's Fund)	222,898,281	150,485,131
2	German Development Cooperation through KfW Development Bank (German Financial Cooperation)	75,221,254	19,193,090
3	Private Funds	55,820,468	54,469,031
4	USAID (United States Agency for International Development)	46,955,221	13,015,575
5	MDF (Multi Donor Fund)	33,672,572	22,622,148
6	ADB (Asian Development Bank)	31,285,239	1,605,911

NO	NAMA DONOR/NGO	KOMITMEN (USD)	REALISASI
7	American Red Cross	24,493,438	19,120,322
8	AIPRD (Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development)	23,752,577	16,010,694
9	Japanese Government	22,496,555	17,885,648
10	German Development Cooperation through GTZ (German Technical Cooperation)	22,174,980	14,932,252
11	DEC-UK(UK Disaster Emergency Committee)	21,398,954	18,997,375
12	WHO (World Health Organization)	18,128,499	18,078,549
13	SOS-KINDERDORF INTERNATIONAL	17,200,001	4,198,445
14	WVI (World Vision International)	16,670,104	16,668,691
15	ECHO (European Commission Humanitarian Aid Office)	13,486,392	11,307,203
16	Other Donor /NGO	394735267	251501008
Total		1,040,389,802	650,091,073

Grafik 3 – 28
Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sector Pendidikan berdasarkan Pelaku Donor/NGO



Keterangan :

UNICEF

German Financial Cooperation

Private Funds

USAID (United States Agency for International Development)

MDF (Multi Donor Fund)

ADB (Asian Development Bank)

American Red Cross

AIPRD (Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development)

9. Japanese Government

10. GTZ

11. DEC-UK

12. WHO

13. Sos-Kinderdorf International

14. WVI (World Vision International)

15. ECHO

3.3.3.2 Kesehatan

Sumbangan NGO dan Donor pada rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kesehatan meliputi delapan kelompok kegiatan yaitu tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pelayanan CDC, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan promosi kesehatan, pelayanan dan pelatihan bidang kesehatan.

Realisasi kegiatan pada saat tanggap darurat berkenaan dengan penyediaan dan distribusi peralatan medis dan obat-obatan, peralatan medis, penyediaan komunikasi dan

informasi serta penataan kelembagaan. Selanjutnya pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi, kegiatan berupa pembangunan/rehabilitasi klinik, puskesmas, puskesmas pembantu, laboratorium, rumah sakit, polindes dan posyandu kegiatan lainnya adalah pelatihan bidang kesehatan dan penataan kelembagaan kesehatan. Pelayanan CDC meliputi penanganan terhadap wabah penyakit seperti diare, malaria, TBC maupun program lainnya.

Selanjutnya dalam kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan dan promosi pelayanan kesehatan, kegiatan realisasi berupa program pengelolaan limbah/sampah serta kampanye dan sosialisasi bidang kesehatan. Kegiatan lainnya berupa pelatihan dan pelayanan dibidang kesehatan seperti kesehatan anak dan orang tua, reproduksi, kesehatan mental, nutrisi dan lain sebagainya. Rata-rata pencapaian sampai dengan tahun 2007 adalah lebih dari 50%. Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3 - 80
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Kesehatan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
A	Perlengkapan dan Peralatan				
1	Aktivient penilaian (angka)	Keg	69,722	62,043	89
2	Program Peningkatan Kapasitas & Lain-lain (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	175,827	37,408	21
3	Perlengkapan & Peralatan - Non Kesehatan - TEknologi Informasi & Komunikasi (Nilai USD)	\$	348,686	347,804	100
4	Perlengkapan & Peralatan- Kesehatan - Yang dapat dikonsumsi	\$	4,157,163	3,292,562	79
5	Perlengkapan & Peralatan- Kesehatan - Yang tidak dapat dikonsumsi	\$	9,331,158	5,613,390	60
6	Perlengkapan & Peralatan- Non Kesehatan - Transportasi	\$	14,206,765	3,406,765	24
7	Perlengkapan & Peralatan- Lain-lain (nilai USD)	\$	1,531,187	469,388	31
8	Jumlah peralatan kesehatanyang didistribusi	Unit	71,679	71,679	100
9	Jumlah orang yang dilayani	Org	3,609,075	3,036,088	84
B	Rehabilitasi & Rekonstruksi				
1	Klinik (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	10	9	90
2	Kantor distrik kesehatan (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	10	6	60
3	Lembaga pendidikan (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	8	4	50
4	Pusat Pelatihan Kesehatan(Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	2	2	100
5	Laboratorium (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	1	1	100
6	Gudang Farmasi (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	2	2	100
7	Posyandu (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	63	63	100
8	Rumah Sakit (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	93	78	84
9	Lain-lain (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	372	342	92
10	Polindes (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	505	137	27
11	Puskesmas (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	91	75	82
12	Pustu (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	160	118	74
13	Satellite Health Posts (Jumlah yang disediakan)	Unit	77	77	100
C	Pelayanan/Jasa CDC				
1	Program Diare (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	240,541	130,541	54
2	Program Pengawasan Penyakit (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	4,247	4,247	100
3	Program EPI (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	240,502	74,746	31
4	Program Malaria (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	2,812,627	810,673	29

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
5	Program lainnya (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	10,483	10,468	100
6	Program TBC (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	4,672	4,672	100
D	Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
1	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Limbah (Jumlah Penerima Manfaat)	org/kk	293,702	70,828	24
2	Program Lainnya (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	44,365	40,538	91
E	Promosi Pelayanan Kesehatan				
	Program Promosi Kesehatan (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	2,484,000	589,843	24
F	Pelayanan				
1	Program Anak & Remaja (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	541,836	536,147	99
2	Program Reproduksi Kesehatan (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	43,479	33,377	77
3	Program Kesehatan Mental (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	255,064	57,709	23
4	Program Nutrisi (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	1,820,362	872,008	48
5	Program Pencegahan (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	202,124	153,240	76
6	Program Lainnya (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	1,536,291	1,515,501	99
G	Pelatihan				
1	Pelayanan CDC (Jumlah Orang yang dilatih)	Org	34,339	33,553	98
2	Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Jumlah Orang yang dilatih)	Org	9,360	8,796	94
3	Promosi Kesehatan (Jumlah Orang yang dilatih)	Org	62,494	42,608	68
4	Pelayanan MCH (Jumlah Orang yang dilatih)	Org	11,789	11,217	95
5	Pelayanan Kesehatan Mental (Jumlah Orang yang dilatih)	Org	7,755	7,444	96
6	Pelayanan Nutrisi (Jumlah Orang yang dilatih)	Org	8,964	7,781	87

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

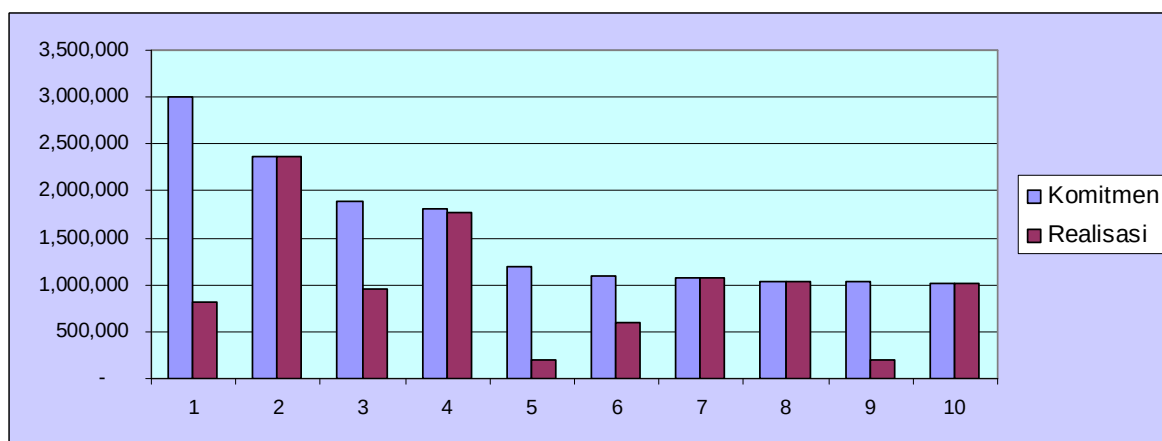
Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Donor/NGO Sesuai pelaku dapat dilihat pada tabe berikut :

Tabel 3 - 81
Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Kesehatan berdasarkan
Pelaku Donor/NGO

NO	NAMA DONOR/NGO	KOMITMEN (USD)	REALISASI (USD)
1	UNICEF (United Nations Children's Fund)	65,071,814	47,523,036
2	ECHO (European Commission Humanitarian Aid Office)	26,478,252	23,482,252
3	German Development Cooperation through GTZ (German Technical Cooperation)	20,380,247	4,315,784
4	WHO (World Health Organization)	18,000,000	18,000,000
5	Australian Government; Canadian Government; Chinese Government; ECHO (European Commission Humanitarian Aid Office); Finland Government; Germany (Other); Japanese Government; Netherlands Government; New Zealand Government; Norwegian Government; Sweden Government; UNFIP (United Nations Fund for International Partnerships)	16,082,108	14,659,221
6	UNICEF (United Nations Children's Fund)	8,343,839	6,269,922
7	Japanese Government; Mercy Malaysia; RANTF (Recovery of Aceh-Nias)	7,502,778	4,356,567

NO	NAMA DONOR/NGO	KOMITMEN (USD)	REALISASI (USD)
	Trust Fund)		
8	CARE International; USAID (United States Agency for International Development); DEC-UK(UK Disaster Emergency Committee)	6,336,000	3,965,000
9	Neighbour in Need; Hilfswerk Austria; Hungarian Red Cross	6,188,519	-
10	Netherlands Government; Private Funds; CARE International; Plan International; Taiwan (province of China); HJ Heinz Company Foundation; Sight and Life Task Force; SurfAid; The Michael and Susan Dell Foundation; Brother's Brother Foundation; Mees Pierson Asia; Akzo Nobel Chemicals Singapore; TDH Italy (Terre des Hommes Italy); Sullivan & Cromwell Foundation	4,760,817	4,349,804
	Other Donor/NGO	111,301,175	68,947,904
		290,445,549	195,869,490

Grafik 3 - 29
Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Kesehatan berdasarkan Pelaku Donor/NGO



Keterangan :

1. UNICEF (United Nations Children's Fu

2. ECHO (European Commission Humanitarian Aid Office)

3. GTZ (German Technical Cooperation)

4. WHO (World Health Organization)

6. Japanese Government; Mercy Malaysia;

8. CARE International; USAID (United States Agency for International Development)

8. Neighbour in Need; Hilfswerk Austria; Hungarian Red Cross

9. Neighbour in Need; Hilfswerk Austria; Hungarian Red Cross

10. Netherlands Government

5. Australian Government; Canadian Government; etc

7. RANTF (Recovery of Aceh-Nias Trust Fund)

3.3.3.3 Agama

Tujuan utama dari rehabilitasi dan rekonstruksi bidang agama adalah untuk mengembalikan situasi kehidupan beragama pasca tsunami di provinsi NAD dan Nias. Implikasinya berupa pembangunan/rehabilitasi sarana ibadah, penyediaan fasilitas keagamaan, pelayanan masyarakat serta pelatihan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui bidang keagamaan.

Realisasi yang telah dicapai pada saat tanggap darurat adalah sebesar 70% untuk KPI dan penggunaan 90% anggaran penyediaan bahan dan peralatan bidang keagamaan senilai 1.479.306 USD (komitmen).

Selanjutnya pembangunan/rehabilitasi sarana ibadah adalah berupa pembangunan/rehabilitasi gereja yang telah terlaksana 2 unit dari 3 unit komitmen, Masjid dengan realisasi 80%, pesantren (56%), dan vihara 1 unit (100%). Realisasi kegiatan lainnya yang mencapai 100% adalah pelayanan masyarakat dan pelatihan guru agama. Terdapat juga kegiatan yang masih kurang direalisasikan antara lain pembangunan/perbaikan meunasah yang baru terlaksana 15 unit dari rencana komitmen 17.947 unit. Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3 - 82
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Agama yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
	KPI untuk ditegaskan		440,000	308,000	70%
	Perlengkapan & peralatan yang disediakan (nilai USD)	\$	884,368	760,868	86
1	Gereja yang dibangun/diperbaiki	Unit	4	2	50
2	Pelajar Dayah yang menerima pelatihan keterampilan hidup	santri	650	650	100
3	Meunasah (aula ibadah) yang dibangun/diperbaiki	Unit	30	26	87
4	Mesjid yang dibangun/diperbaiki	Unit	76	65	86
5	Jumlah orang yang dilayani	Org	15,442	15,442	100
6	Pesantren (sekolah keagamaan) yang dibangun/diperbaiki	Unit	9	5	56
7	Laporan untuk tujuan studi/survey	Pkt	2,800	2,800	100
8	Guru/pemimpin dayah yang dilatih	Org	600	600	100
9	Kuil yang dibangun kembali/diperbaiki	Unit	1	1	100%
10	Kemajuan Fisik (%)		1,400	1,210	86%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

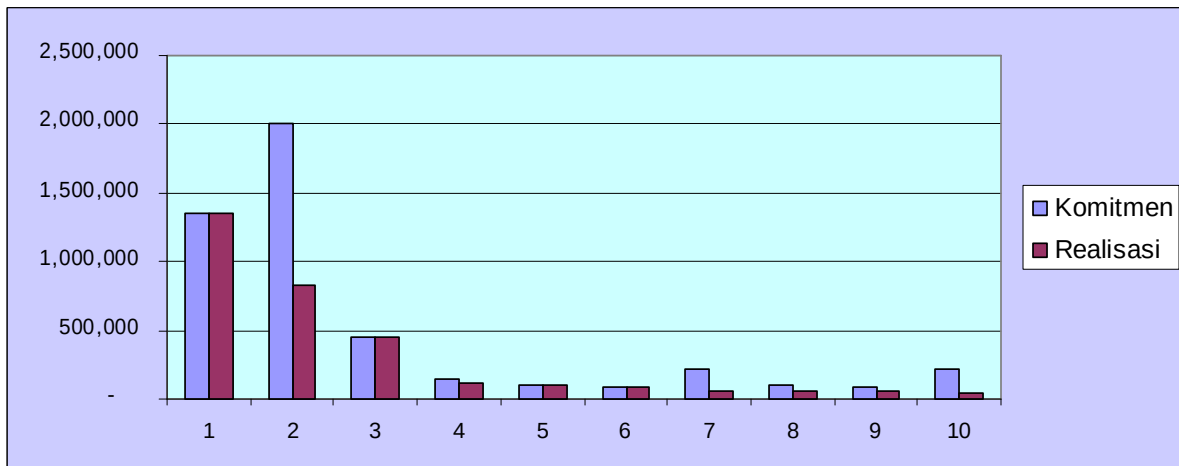
Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang agama yang dilaksanakan oleh Donor/NGO Sesuai pelaku dapat dilihat pada tabe berikut :

Tabel 3 - 83
Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Agama berdasarkan Pelaku Donor/NGO

No	Nama Donor/NGO	Komitmen (USD)	Realisasi
1	Yayasan Sheikh Eid Bin Mohammad Al Thani	1,350,000	1,350,000
2	The Saudi Charity Campaign	2,000,000	828,432
3	Turkish Red Crescent	453,000	453,000
4	RANTF (Recovery of Aceh-Nias Trust Fund)	144,436	115,004
5	RANTF (Recovery of Aceh-Nias Trust Fund)	99,894	97,222
6	SCU (Smiling Club Union)	90,000	90,000
7	RANTF (Recovery of Aceh-Nias Trust Fund)	222,222	63,667
8	Qatar Charity	94,500	56,444
9	Danone	93,855	53,573
10	RANTF (Recovery of Aceh-Nias Trust Fund)	219,263	42,243

No	Nama Donor/NGO	Komitmen (USD)	Realisasi
	Other Donor/NGO	97,000	75,000
		4,864,170	3,224,585

Grafik 3 - 30
Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Agama berdasarkan
Pelaku Donor/NGO



Keterangan

1. Yayasan Sheikh Eid Bin Mohammad Al Thani	6. Qatar Charity
2. The Saudi Charity Campaign	7. Danone
3. Turkish Red Crescent	
4. RANTF (Recovery of Aceh-Nias Trust Fund)	
5. SCU (Smiling Club Union)	

3.3.3.4 Sosial

Sumbangan Donor dan NGO pada aspek sosial berkenaan dengan pembangunan/rehabilitasi fasilitas sosial, penanganan masalah anak, kaum perempuan, pelatihan peningkatan sumberdaya manusia dan lain sebagainya. Berikut akan diuraikan secara singkat beberapa kegiatan di bidang ini.

Realisasi yang telah dicapai pada saat tanggap darurat adalah sebesar 33% untuk KPI dan penggunaan 81% anggaran penyediaan bahan dan peralatan bidang keagamaan senilai 1.479.306 USD (komitmen). Selanjutnya pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, hampir seluruh realisasi kegiatan bidang sosial yang didanai oleh donor/NGO pencapaiannya di atas 50% dari komitmen. Hanya 3 kegiatan yang pencapaiannya masih di bawah 50% sampai dengan tahun 2007 yaitu pelatihan masyarakat (18%), laporan studi/survei (33%) dan pencetakan media publikasi (17%). Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3 - 84
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Sosial yang Dilaksanakan oleh
Donor dan NGO (Off Budget)

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
	KPI belum terdefinisi		19,968	6,653	33%
	Perlengkapan & peralatan yang disediakan (nilai USD)	\$	3,620,796	3,349,196	92

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
1	Pusat sosial yang dibentuk/dibangun	Unit	90	88	98
2	Organisasi anak-anak atau panti asuhan	Anak	1,748	1,287	74
3	Program Penerimaan Komunitas Psikososial Wanita dan Anak-anak	Org	395,768	388,100	98
4	Jumlah anak yang menerima bantuan penuh (makanan, pendidikan, dan program psikososial)	Org	140,803	132,983	94
5	Jumlah anak yang kembali ke keluarganya	Org	69	69	100
6	Mendirikan grup diskusi komunitas awal	Kel	511,706	479,453	94
7	Balai desa yang dibangun	Unit	398	345	87
8	Pertunjukan kebudayaan yang diadakan	Keg	4,073	3,996	98
9	Workshop/Pelatihan Kebudayaan	Keg	3,653	3,567	98
10	Asrama baru/yang dibangun	Unit	83	67	81
11	Komunitas gabungan berdasar pusat pembangunan wanita	Kel	20	20	100
12	Museum, perpustakaan, dan fasilitas kebudayaan lainnya yang dibangun/diperbaiki	Unit	33	11	33
13	Jumlah orang yang dilayani	Org	458,891	456,151	99
14	Jumlah orang yang dilatih (contoh kepemimpinan masyarakat, pendidikan perdamaian, penelitian sosial, metodologi penelitian sosial)	Org	35,263	8,018	23
15	Proposal yang diimplementasikan untuk memperingati tsunami	Pkt	12	12	100
16	Taman bacaan umum yang dibangun	Unit	721	716	99
17	Fasilitas olahraga yang direhabilitasi	Unit	45	40	89
18	Pemberdayaan staf untuk proyek	Org	8	8	100%
19	Laporan untuk tujuan studi dan survey	Pkt	2,071	1,994	96
20	Bantuan hukum untuk wanita	Org	846	533	63
21	Pelatihan Kapasitas Bermata Pencarian untuk wanita	Org	10,100	5,365	53
22	Pelatihan yang diterima oleh wanita	Org	12,900	2,738	21

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

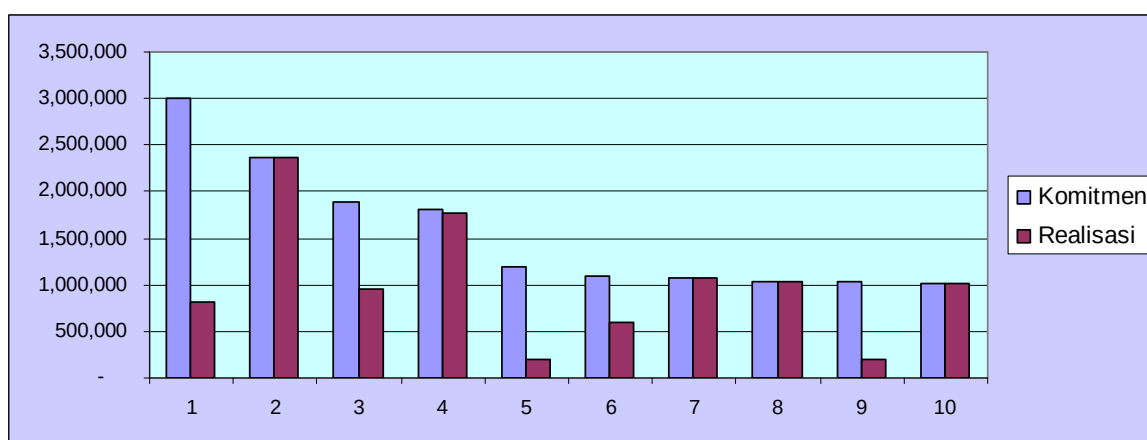
Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Donor/NGO berdasarkan masing-masing pelaku dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 3 - 85
Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Donor/NGO

NO	NAMA DONOR/NGO	KOMITMEN (USD)	REALISASI
1	IDB (Islamic Development Bank)	3,000,000	810,000
2	USAID (United States Agency for International Development)	2,368,006	2,368,006
3	ECHO (European Commission Humanitarian Aid Office); Caritas Network	1,893,000	953,780
4	UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)	1,800,000	1,771,057
5	Yayasan Sheikh Eid Bin Mohammad Al Thani	1,200,000	200,000

NO	NAMA DONOR/NGO	KOMITMEN (USD)	REALISASI
6	Private Funds	1,085,000	600,764
7	WVI (World Vision International)	1,068,690	1,068,690
8	Donors to be identified; BASF; Ernst Schering Foundation; Allianz Direct Help Foundation	1,043,210	1,043,210
9	Qatar Charity	1,040,711	196,196
10	ECHO (European Commission Humanitarian Aid Office)	1,017,821	1,017,821
	Other Donor/NGO	17,275,578	12,021,577
		32,792,016	22,051,101

Grafik 3 - 31
Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Donor/NGO



3.3.4 Pemulihan Ekonomi

Aspek pemulihan (*recovery*) perekonomian masyarakat di provinsi NAD dan kepulauan Nias meliputi sektor primer (pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan), sektor sekunder (industri) dan sektor tersier (perdagangan, koperasi dan UKM) serta aspek ketenagakerjaan. Program dan kegiatan yang mendapatkan perhatian dan bantuan dari masyarakat dunia melalui sumbangan NGO dan Donor tercatat melalui RAN Database.

Tabel 3 - 86
Komitmen Pendanaan Per Sub Bidang Pemulihan Perekonomian

SEKTOR / SUBSEKTOR	COMMITTED (USD)	DISBURSED (USD)
ECONOMIC DEVELOPMENT		
Agriculture, Forestry, Fisheries, and Maritime	209.299.558	108.909.013
Business Development	173.305.207	86.292.086
Labor	32.098.259	25.587.445
Industry and Construction	9.168.726	6.786.488
Development of Tourism and Culture	1.906.205	461.711

SEKTOR / SUBSEKTOR	COMMITTED (USD)	DISBURSED (USD)
ECONOMIC DEVELOPMENT		
Lainnya	92.156.804	51.285.591
Total	517.934.759	279.322.334

Sumber : RAN Database, Oktober 2007

Total komitmen lembaga donor dan NGO untuk pemulihan perekonomian per Oktober 2007 tercatat sebesar 517 juta USD, dengan alokasi komitmen terbesar pada pemulihan sektor pertanian, kelautan, perikanan dan kehutanan sebesar 209 juta USD atau sebesar 40,41 persen dari keseluruhan total komitmen. Komitmen pada sektor pengembangan usaha sebesar 173 juta USD (33,46 persen), sektor tenaga kerja 32 juta USD (6,20 persen), sektor industri dan perdagangan 9 juta USD (1,77 persen), sektor pariwisata dan budaya 1,9 juta USD (0,37 persen) dan sektor lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan pencaharian dan sumber pendapatan masyarakat sebesar 92 juta USD (17 persen).

Hingga bulan Oktober 2007, pada sektor pertanian, kelautan, perikanan dan kehutanan telah terserap komitmen pendanaan sebesar 108 juta USD atau sebesar 52 persen persen dari keseluruhan total komitmen awal. Penyerapan komitmen pada sektor pengembangan usaha sebesar 86 juta USD (50 persen), sektor tenaga kerja 25 juta USD (80 persen), sektor industri dan perdagangan 6,7 juta USD (74 persen), sektor pariwisata dan budaya 461 ribu USD (24 persen) dan sektor lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan pencaharian dan sumber pendapatan masyarakat sebesar 51 juta USD (56 persen).

Secara keseluruhan per Oktober 2007 penyerapan komitmen pendanaan untuk keseluruhan bidang pemulihan perekonomian adalah 279 juta USD dari komitmen awal keseluruhan sebesar 517 juta USD atau sebesar 53,93 persen.

Tabel 3 - 87
Sepuluh organisasi pelaksana terbesar berdasarkan komitmen pendanaan
Bidang Pemulihan Perekonomian

NO	ORGANISASI PELAKSANA	COMMITTED (USD)	DISBURSED (USD)	
1	FAO (Food and Agriculture Organization)	32.906.313	15.808.319	48,04%
2	Ministry of Settlement and Regional Infrastructure	30.500.002	25.420.002	83,34%
3	UNDP (United Nations Development Programme)	30.468.212	10.888.186	35,74%
4	Save the Children	30.059.997	27.626.702	91,91%
5	British Red Cross	18.919.339	14.771.362	78,08%
6	GTZ	17.606.272	12.248.311	69,57%
7	BRR SATKER - 464652 - SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NAD	14.413.950	3.830.000	26,57%
8	Ministry of Home Affairs	12.940.000	11.160.986	86,25%
9	Mercy Corps	12.861.199	11.853.517	92,16%
10	NCBA (National Cooperative Business Association)	12.800.000	6.883.776	53,78%
	Total 10 Pelaksana Besar	213.475.284	140.491.161	65,81%
	Total sektor	517.934.759	279.322.334	53,93%
	Persen 10 pelaksana besar terhadap sektor	41,22%		

Sumber : RAN Database, Oktober 2007

Berdasarkan organisasi pelaksana (implementing agency), FAO merupakan lembaga dengan komitmen pendanaan terbesar kemudian diikuti oleh Dep.PU Republik Indonesia,

UNDP, Save the Children dan British Red Cross. Sepuluh besar organisasi terbesar pelaksana rehabilitasi rekonstruksi pemulihan bidang perekonomian merepresentasikan 41 persen dari keseluruhan pelaksana rehabilitasi rekonstruksi berdasarkan komitmen pendanaan.

Perikanan dan Kelautan

Perikanan dan kelautan merupakan sektor yang mengalami kerugian paling besar akibat bencana alam tsunami. Sehingga rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan dan kelautan ini mendapat perhatian yang utama dengan tujuan untuk membangun kembali dan dalam upaya mewujudkan normalisasi kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pada golongan nelayan baik nelayan tangkap maupun nelayan budidaya.

Beberapa kegiatan perikanan dan kelautan yang menggunakan pendanaan donor/NGO realisasinya mencapai lebih dari 50% untuk semua kegiatan kecuali pembangunan dan rehabilitasi tempat pelelangan ikan (TPI) yang baru mencapai realisasi sebesar 44% pada tahun 2007. Untuk kegiatan lain masing-masing realisasinya adalah sebagai berikut: perbaikan tambak rakyat (86%), bantuan fasilitas perkapalan (99%), perbaikan pesisir (39%) penyediaan FAD (100), bantuan perikanan (86%). Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3 - 88
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Perikanan dan Kelautan
yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
1	Area of fishponds/ tambak restored (Hectares)		9,181	7,883	86%
2	Boat building facilities completed (unit)		68	67	99%
3	Area of coastal (inshore, beach, corals) restored		621	241	39%
4	Fish agregat device (FAD)provided (Unit)		120	120	100%
5	Fish landing facilities (TPI) rebuilt/rehabilitated		9	4	44%
6	Fisheries cooperatives		29	25	86%
7	Fishing vessels provided/replaced		4,048	2,748	68%
8	Sets of fish processing equipment provided		597	318	53%
9	Other fisheries activities established		1,305	952	73%

Sumber : Data Ran Database, Oktober 2007.

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

3.3.4.1 Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Sektor pertanian mencakup sub sektor pertanian tanaman pangan (lahan kering dan sawah), perkebunan dan peternakan. Rehabilitasi dan rekonstruksi pertanian, perkebunan dan Peternakan mencakup pembangunan kembali areal pertanian (sawah, ladang/kebun dan perkebunan) yang rusak sebagai akibat dari bencana tsunami. Kegiatan bertujuan untuk memulihkan perekonomian masyarakat di Provinsi NAD dan Nias, karena secara statistik sektor pertanian, perkebunan dan peternakan ini merupakan sektor terbesar yang menyumbang perekonomian wilayah NAS dan Nias Kepulauan, terutama bagi masyarakat pedesaan (*rural*).

Tabel 3 - 89

Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Pertanian, perkebunan dan Peternakan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
1	Area of agricultural land rehabilitated (Hectares)		61,033	43,220	71%
2	Length of irrigation canal new/rehabilitated		112,534	103,658	92%
3	Amount of seeds and fertilizer provided (Kg)		3,882,089	2,410,371	62%
4	Agricultural machines provided		9,548	9,467	99%
5	Area of cages rebuilt/rehabilitated (Sq meters)		27,344	27,344	100%
6	livestock provided		7,454	1,032	14%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

Dalam sub bidang pemulihan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, per Oktober 2007 penyerapan komitmen pendanaan adalah 108 juta USD dari komitmen awal keseluruhan sebesar 209 juta USD atau sebesar 52,03 persen. Organisasi pelaksana terbesar rehabilitasi rekonstruksi pemulihan sub bidang pemulihan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan adalah FAO, Dep. PU Republik Indonesia, Dep. Pertanian dan organisasi pelaksana lainnya yang dapat dilihat pada tabel berikut. Sebagian besar kegiatan masih berjalan/ongoing sedangkan sebagian kecil masih pada tahap design dan terselesaikan/completed.

Tabel 3 - 90

Realisasi pelaksanaan 10 organisasi pelaksana terbesar sub bidang pemulihan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan

NO	SUBSEKTOR / PARTNER (1ST LEVEL)	KABUPATEN	IMPLEMENTATION STATUS	COMMITTED (USD)	DISBURSED (USD)	
Agriculture, Forestry, Fisheries, and Maritime						
1	FAO (Food and Agriculture Organization)	Unallocated; All Kabupatens - All Provinces; Kabupaten to be Defined - All Provinces; Kab. SIMEULUE; Kab. ACEH SINGKIL; Kab. ACEH SELATAN; Kab. ACEH TIMUR; Kab. ACEH BARAT; Kab. ACEH BESAR; Kab. PIDIE; Kab. BIREUEN; Kab. ACEH UTARA; Kab. ACEH BARAT DAYA; Kab. ACEH TAMIANG; Kab. NAGAN RAYA; Kab. ACEH JAYA; Kota BANDA ACEH; Kota LANGSA; Kota LHOKSEUMAWE; Kab. NIAS; Kab. NIAS SELATAN	Initial Phase; Design; Ongoing; Completed	32.906.313	15.808.319	48,04%
2	Ministry of Settlement and Regional Infrastructure	Unallocated; Kab. ACEH SELATAN; Kab. ACEH BESAR; Kab. BIREUEN; Kab. ACEH UTARA; Kab.	Ongoing	30.500.002	25.420.002	83,34%

NO	SUBSEKTOR / PARTNER (1ST LEVEL)	KABUPATEN	IMPLEMENTATION STATUS	COMMITTED (USD)	DISBURSED (USD)	
Agriculture, Forestry, Fisheries, and Maritime						
		NIAS; Kab. NIAS SELATAN				
3	Ministry of Agriculture (MOA)	Unallocated; Kabupaten to be Defined - All Provinces; Kab. SIMEULUE; Kab. ACEH TIMUR; Kab. ACEH BARAT; Kab. ACEH BESAR; Kab. PIDIE; Kab. BIREUEN; Kab. ACEH UTARA; Kab. ACEH BARAT DAYA; Kab. NAGAN RAYA; Kab. ACEH JAYA; Kab. NIAS; Kab. NIAS SELATAN	Ongoing	24.399.986	-	0,00%
4	BRR SATKER - 464652 - SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NAD	Unallocated; Kab. ACEH BARAT; Kab. ACEH BESAR; Kab. PIDIE; Kab. BIREUEN; Kab. ACEH UTARA; Kab. NIAS	Ongoing	13.453.950	3.680.000	27,35%
5	NCBA (National Cooperative Business Association)	Kab. ACEH TENGAH; Kab. ACEH BARAT; Kab. ACEH BESAR; Kab. ACEH BARAT DAYA; Kab. NAGAN RAYA; Kab. BENER MERIAH; Kota BANDA ACEH	Ongoing	12.800.000	6.883.776	53,78%
6	BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	All Kabupatens - All Provinces; Kab. NIAS; Kab. NIAS SELATAN	Design; Ongoing	7.125.001	-	0,00%
7	JICS	Unallocated; Kab. ACEH BESAR; Kota BANDA ACEH; Kota SABANG	Completed	5.660.855	5.660.855	100,00%
8	CWS (Church World Service)	Unallocated; Kab. ACEH BARAT; Kab. ACEH BESAR; Kab. PIDIE; Kab. NAGAN RAYA; Kab. NIAS; Kab. NIAS SELATAN	Ongoing; Completed	5.139.756	1.237.602	24,08%
9	Leuser International Foundation	Unallocated; Kab. ACEH SINGKIL; Kab. ACEH SELATAN; Kab. ACEH TENGGARA; Kab. ACEH TENGAH; Kab. ACEH BARAT; Kab. ACEH BESAR; Kab. PIDIE; Kab. ACEH UTARA; Kab. ACEH BARAT DAYA; Kab. GAYO LUES; Kab. NAGAN RAYA; Kab. ACEH JAYA; Kab. BENER MERIAH	Ongoing	3.295.742	140.958	4,28%
10	AIPRD (Australia	Kab. ACEH BESAR	Ongoing	3.053.435	3.030.303	99,24%

NO	SUBSEKTOR / PARTNER (1ST LEVEL)	KABUPATEN	IMPLEMENTATION STATUS	COMMITTED (USD)	DISBURSED (USD)	
Agriculture, Forestry, Fisheries, and Maritime						
	Indonesia Partnership for Reconstruction and Development)					
	Total 10 Pelaksana Besar			138.335.040	61.861.815	44,72%
	Total sektor			209.299.558	108.909.013	52,03%
	Persen 10 pelaksana besar terhadap sektor			66,09%	56,80%	

Sumber : RAN Database, Oktober 2007

Sepuluh besar organisasi terbesar pelaksana rehabilitasi rekonstruksi sub bidang pemulihan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan merepresentasikan 66 persen dari keseluruhan pelaksana rehabilitasi rekonstruksi berdasarkan komitmen pendanaan.

Koperasi dan UKM

Dalam sub bidang pemulihan pengembangan usaha (Koperasi dan UKM), secara keseluruhan per Oktober 2007 penyerapan komitmen pendanaan adalah 86 juta USD dari komitmen awal keseluruhan sebesar 173 juta USD atau sebesar 49,79 persen. Organisasi pelaksana terbesar rehabilitasi rekonstruksi pemulihan sub bidang pemulihan pengembangan usaha (Koperasi dan UKM) adalah Save the Children, UNDP dan British Red Cross. Sebagian besar kegiatan masih berjalan/ongoing sedangkan sebagian kecil masih pada tahap terselesaikan/completed.

Tabel 3 - 91
Realisasi pelaksanaan 10 organisasi pelaksana terbesar sub bidang pemulihan Pengembangan Usaha (Koperasi dan UKM)

NO	SUBSEKTOR / PARTNER (1ST LEVEL)	KABUPATEN	IMPLEMENTATION STATUS	COMMITTED (USD)	DISBURSED (USD)	
Business Development						
1	Save the Children	Unallocated; Kab. ACEH SIMEULUE; Kab. ACEH BESAR; Kab. PIDIE; Kab. ACEH BIREUEN; Kab. ACEH UTARA; Kota BANDA ACEH; Kota SABANG; Kota LHOKESEUMAWE	Ongoing	30.059.997	27.626.702	91,91%
2	Project Management Unit	All Kabupatens - All Provinces	Ongoing	21.540.000	-	0,00%
3	UNDP (United Nations Development	All Kabupatens - All Provinces; Kab. ACEH JAYA	Ongoing; Completed	18.978.697	705.408	3,72%

NO	SUBSEKTOR / PARTNER (1ST LEVEL)	KABUPATEN	IMPLEMENTATION STATUS	COMMITTED (USD)	DISBURSED (USD)	
Business Development						
	Programme)					
4	British Red Cross	Unallocated; Kab. ACEH BESAR; Kab. ACEH JAYA	Ongoing	18.919.339	14.771.362	78,08%
5	Yayasan Mitra Dhuafa	Unallocated; Kab. ACEH BESAR; Kab. BIREUEN; Kota BANDA ACEH	Ongoing	9.325.001	195.000	2,09%
6	GTZ	Unallocated; Kab. ACEH BESAR; Kab. PIDIE; Kab. BIREUEN; Kab. ACEH UTARA; Kota BANDA ACEH; Kota LHOKSEUMAWE	Ongoing	5.435.398	3.753.024	69,05%
7	ILO (International Labour Organization)	All Kabupatens - All Provinces; Kab. ACEH TIMUR; Kab. ACEH TENGAH; Kab. ACEH BESAR; Kab. ACEH TAMIANG; Kab. ACEH JAYA; Kota BANDA ACEH; Kota SABANG; Kab. NIAS SELATAN	Ongoing	4.975.435	3.963.741	79,67%
8	PUM (Netherlands Senior Experts)	Unallocated; All Kabupatens - All Provinces; Kab. ACEH BARAT; Kab. ACEH BESAR; Kab. NAGAN RAYA; Kota BANDA ACEH; Kota SABANG; Kota LHOKSEUMAWE; Kab. NIAS; Kab. NIAS SELATAN	Ongoing	4.910.000	3.800.000	77,39%
9	IOM (International Organization for Migration)	Unallocated; Kab. SIMEULUE; Kab. ACEH SINGKIL; Kab. ACEH TENGGARA; Kab. ACEH TIMUR; Kab. ACEH TENGAH; Kab. ACEH BARAT; Kab. ACEH BESAR; Kab. PIDIE; Kab. BIREUEN; Kab. ACEH UTARA; Kab. ACEH BARAT DAYA; Kab. ACEH TAMIANG; Kab. NAGAN RAYA; Kab. ACEH JAYA; Kab. BENER MERIAH; Kota BANDA ACEH; Kota LHOKSEUMAWE; Kab. NIAS; Kab. NIAS SELATAN	Ongoing; Completed	3.866.532	3.278.076	84,78%
10	SBFIC (Savings Banks Foundation for International Cooperation)	Unallocated; Kab. ACEH SELATAN; Kab. ACEH TENGAH; Kab. ACEH BARAT; Kab. PIDIE; Kab. BIREUEN; Kab. ACEH BARAT DAYA; Kab. ACEH JAYA; Kota BANDA ACEH; Kota LANGSA; Kota LHOKSEUMAWE	Ongoing	3.703.704	723.923	19,55%
	Total 10 Pelaksana Besar			121.714.103	58.817.236	48,32%
	Total sektor					49,79%

NO	SUBSEKTOR / PARTNER (1ST LEVEL)	KABUPATEN	IMPLEMENTATION STATUS	COMMITTED (USD)	DISBURSED (USD)
Business Development					
				173.305.207	86.292.086
	Persen 10 pelaksana besar terhadap sektor			70,23%	68,16%

Sumber : RAN Database, Oktober 2007

Sepuluh besar organisasi terbesar pelaksana rehabilitasi rekonstruksi sub bidang pemulihan pengembangan usaha (Koperasi dan UKM) merepresentasikan 70,23 persen dari keseluruhan pelaksana rehabilitasi rekonstruksi berdasarkan komitmen pendanaan.

3.3.4.2 Ketenagakerjaan

Kegiatan Bidang Pelatihan dan Tenaga Kerja Donor dan NGO menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan pada masyarakat, pegawai pemerintah, workshop, pemantapan organisasi dan pemberian hibah. Realisasi masing-masing kegiatan adalah 59% untuk kegiatan *Participants of vocational training*, 18% untuk kegiatan *extension, training, information and testing programmes established*, 48% untuk kegiatan *Government officials participated in training*, 36% untuk kegiatan *Vocational training organized (batch or time)*, 84% untuk kegiatan *worker for cash work programme*, 46% untuk kegiatan *workshops completed*, 94% untuk kegiatan *community development organization established* dan 56% untuk kegiatan *entrepreneur received grant*.

Kegiatan lain dengan pendanaan berasal dari donor/NGO adalah program implementasi tenaga kerja (dengan realisasi 86%), penyediaan peralatan dan bantuan material (dengan realisasi 30%), pelayanan masyarakat (dengan realisasi 75%), laboratorium/pusat penelitian (dengan realisasi 100%) dan berupa kajian/survei (dengan realisasi 75%). Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3 - 92

Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Ketenagakerjaan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
1	Participants of vocational training		50.089	29.478	59%
2	Extension, training, information and testing programmes established		11.992	2.192	18%
3	Government officials participated in training		510	247	48%
4	Vocational training organized (batch or time)		3.272	1.189	36%
5	Worker for cash work programme		108.326	91.242	84%
6	Workshops completed		185	86	46%
7	Community development organization established		253	237	94%
8	Entrepreneur received grant		9.200	5.138	56%
9	Employment programme implemented (Number of beneficiaries)		41.389	35.559	86%
10	Equipment and supplies provided (Value USD)		5.385.906.177	1.619.448.038	30%
11	People served		133.429	99.911	75%

12	Research centers or laboratories supported/provided		2	2	100%
13	Study/survey report		147	110	75%

Sumber : Data Ran Database, Oktober 2007.

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

Dalam sub bidang pemulihan Tenaga Kerja, secara keseluruhan per Oktober 2007 penyerapan komitmen pendanaan adalah 25 juta USD dari komitmen awal keseluruhan sebesar 32 juta USD atau sebesar 79 persen. Organisasi pelaksana terbesar rehabilitasi rekonstruksi pemulihan sub bidang pemulihan Tenaga Kerja adalah UNDP, ILO, Dep.Pertanian RI dan Swisscontact. Sebagian besar kegiatan masih berjalan/ongoing sudah pada tahap terselesaikan/completed.

Tabel 3 - 93
Realisasi pelaksanaan 10 organisasi pelaksana terbesar
sub bidang pemulihan Tenaga Kerja

NO	SUBSEKTOR / PARTNER (1ST LEVEL)	KABUPATEN	IMPLEMENTATION STATUS	COMMITTED (USD)	DISBURSED (USD)	
Labor						
1	UNDP (United Nations Development Programme)	Unallocated; Kab. ACEH TIMUR; Kab. ACEH BARAT; Kab. ACEH BESAR; Kab. PIDIE; Kab. NAGAN RAYA; Kab. ACEH JAYA; Kota BANDA ACEH; Kab. NIAS; Kab. NIAS SELATAN	Ongoing; Completed	7.280.683	7.280.683	100,00%
2	ILO (International Labour Organization)	Kab. ACEH BARAT; Kab. ACEH BESAR; Kab. ACEH UTARA; Kab. ACEH JAYA; Kota BANDA ACEH; Kota SABANG	Ongoing; Completed	4.566.879	4.566.879	100,00%
3	Ministry of Agriculture (MOA)	Unallocated; Kab. SIMEULUE; Kab. ACEH TIMUR; Kab. ACEH BARAT; Kab. ACEH BESAR; Kab. PIDIE; Kab. BIREUEN; Kab. ACEH UTARA; Kab. ACEH BARAT DAYA; Kab. NAGAN RAYA; Kab. ACEH JAYA; Kab. NIAS; Kab. NIAS SELATAN	Ongoing	3.078.012	-	0,00%
4	Swisscontact	Unallocated; Kab. ACEH TIMUR; Kab. ACEH BARAT; Kab. ACEH BARAT DAYA; Kota BANDA ACEH; Kota LHOKSEUMAWE; Kab. NIAS	Ongoing	2.935.107	595.238	20,28%
5	USAID (United States Agency for International Development)	Kabupaten to be Defined - All Provinces; Kab. ACEH BARAT; Kab. ACEH BESAR; Kab. PIDIE; Kab. ACEH JAYA	Ongoing	2.500.000	2.500.000	100,00%

NO	SUBSEKTOR / PARTNER (1ST LEVEL)	KABUPATEN	IMPLEMENTATION STATUS	COMMITTED (USD)	DISBURSED (USD)	
Labor						
6	ACF (Action Contre la Faim)	Unallocated; Kab. ACEH BARAT; Kab. ACEH JAYA	Ongoing	1.232.572	1.232.573	100,00%
7	Islamic Relief	Kab. ACEH BARAT; Kab. ACEH BESAR; Kab. PIDIE; Kab. NAGAN RAYA; Kab. ACEH JAYA; Kota BANDA ACEH	Completed	1.159.533	1.043.848	90,02%
8	TdH Italy (Terre des Hommes Italy)	Unallocated; Kab. BIREUEN	Completed	1.071.206	1.071.206	100,00%
9	Alisei	Kab. PIDIE	Completed	1.042.429	938.187	90,00%
10	PCI (Project Concern International)	Unallocated; Kab. ACEH BARAT; Kab. ACEH BESAR; Kab. ACEH JAYA	Completed	840.758	819.158	97,43%
	Total 10 Pelaksana Besar			25.707.179	20.047.772	77,99%
	Total sektor			32.098.259	25.587.445	79,72%
	Persen 10 pelaksana besar terhadap sektor			80,09%	78,35%	

Sumber : RAN Database, Oktober 2007

Sepuluh besar organisasi terbesar pelaksana rehabilitasi rekonstruksi sub bidang pemulihan tenaga kerja merepresentasikan 80,09 persen dari keseluruhan pelaksana rehabilitasi rekonstruksi berdasarkan komitmen pendanaan.

3.3.4.3 Perdagangan dan Perindustrian

Donor dan NGO memberikan bantuan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi mengkonsentrasikan pada 10 item yang berkenaan dengan penyediaan/pembangunan kembali pabrik, pemberian pinjaman lunak, pengembangan usaha skala kecil dan menengah, pengembangan kemitraan, lembaga keuangan mikro, penyediaan fasilitas industri dan pembangunan pasar tradisional. Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2007 adalah sekitar 50% dari komitmen. Pencapaian yang tinggi (94%) adalah pada penyediaan fasilitas industri, sedangkan realisasi terendah (2%) adalah pada bantuan pinjaman skala menengah (pinjaman lebih dari 50 juta Rupiah). Adapun bantuan berupa support terhadap industri kecil dan bantuan lembaga keuangan mikro realisasinya cukup baik mencapai di atas 60%. Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3 - 94
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perdagangan dan Industri yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
1	Ice plant provided/rebuilt (unit)		12	6	50%

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *)	
				VOLUME	(%)
2	Loans provided to medium business (loan > IDR 50 Million)		3,272	71	2%
3	Loans provided to micro business (loan < 5 million)		17,923	8,873	50%
4	Loans provided to small business (loan IDR 5-50 million)		4,501	2,801	62%
5	Micro business developed		67,827	36,441	54%
6	Partnership established		216	16	7%
7	Business developed		39,380	28,212	72%
8	Microfinance institutions supported/established.		224	148	66%
9	Industrial facilities provided (unit)		112	105	94%
10	Traditional markets established		75	28	37%

Sumber : Data Ran Database, Oktober 2007.

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

Dalam sub bidang pemulihan industri dan perdagangan, secara keseluruhan per Oktober 2007 penyerapan komitmen pendanaan adalah 6,7 juta USD dari komitmen awal keseluruhan sebesar 9,1 juta USD atau sebesar 74 persen. Organisasi pelaksana terbesar rehabilitasi rekonstruksi pemulihan sub bidang pemulihan industri dan perdagangan adalah USAID, CHF International dan CWS.

Tabel 3 - 95
Realisasi pelaksanaan 10 organisasi pelaksana terbesar
sub bidang pemulihan Industri dan Perdagangan

NO	SUBSEKTOR / PARTNER (1ST LEVEL)	KABUPATEN	IMPLEMENTATION STATUS	COMMITTED (USD)	DISBURSED (USD)	
Industry and Construction						
1	USAID (United States Agency for International Development)	Kabupaten to be Defined - All Provinces; Kab. ACEH BARAT; Kab. ACEH BESAR; Kab. PIDIE; Kab. ACEH JAYA	Ongoing	2.500.000	2.500.000	100,00%
2	CHF International (Community Habitat Finance International)	Kab. ACEH BESAR; Kab. PIDIE; Kab. ACEH JAYA; Kota BANDA ACEH	Ongoing; Completed	1.110.266	1.110.266	100,00%
3	CWS (Church World Service)	Unallocated; Kab. NIAS SELATAN	Ongoing	1.000.000	236.969	23,70%
4	Samaritan's Purse	Unallocated; Kab. NAGAN RAYA	Completed	937.467	937.467	100,00%
5	BAPPEDALDA Sumut (Environmental Impact Assesment Agency of North Sumatera)	Unallocated; Kab. NIAS SELATAN	Approval	935.720	-	0,00%
6	Yayasan Sosial Kreasi	Unallocated; Kab. ACEH BESAR	Ongoing	725.000	359.423	49,58%
7	United Diversity Forum	Kab. NIAS	Completed	611.111	611.111	100,00%
8	IDES (International Disaster Emergency	Kab. ACEH JAYA	Completed	250.000	250.000	100,00%

NO	SUBSEKTOR / PARTNER (1ST LEVEL)	KABUPATEN	IMPLEMENTATION STATUS	COMMITTED (USD)	DISBURSED (USD)	
Industry and Construction						
	Service)					
9	AUSTCARE	Kab. ACEH BESAR	Completed	206.666	201.005	97,26%
10	Malteser International	Kab. ACEH UTARA; Kota LHOKSEUMAWE	Ongoing	154.000	-	0,00%
	Total 10 Pelaksana Besar			8.430.230	6.206.241	73,62%
	Total sektor			9.168.726	6.786.488	74,02%
	Persen 10 pelaksana besar terhadap sektor			91,95%	91,45%	

Sumber : RAN Database, Oktober 2007

Sebagian besar kegiatan masih berjalan/ongoing dan sebagian sudah pada tahap terselesaikan/completed. 10 besar organisasi terbesar pelaksana rehabilitasi rekonstruksi sub bidang pemulihan industri dan perdagangan merepresentasikan 91,95 persen dari keseluruhan pelaksana rehabilitasi rekonstruksi berdasarkan komitmen pendanaan.

Pariwisata dan Budaya

Dalam sub bidang pemulihan pariwisata dan budaya, secara keseluruhan per Oktober 2007 penyerapan komitmen pendanaan adalah 461 ribu USD dari komitmen awal keseluruhan sebesar 1,9 juta USD atau sebesar 24,22 persen.

Tabel 3 - 96
Realisasi pelaksanaan 10 organisasi pelaksana terbesar
sub bidang pemulihan Pariwisata dan Budaya

NO	SUBSEKTOR / PARTNER (1ST LEVEL)	KABUPATEN	IMPLEMENTATION STATUS	COMMITTED (USD)	DISBURSED (USD)	
Development of Tourism and Culture						
1	BAPPEDALDA Sumut (Environmental Impact Assesment Agency of North Sumatera)	Unallocated; Kab. NIAS; Kab. NIAS SELATAN	Approval	831.067	-	0,00%
2	BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	Kab. NIAS; Kab. NIAS SELATAN	Ongoing	515.000	-	0,00%
3	UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)	Kab. ACEH BESAR; Kota BANDA ACEH; Kab. NIAS SELATAN	Ongoing; Completed	243.404	243.404	100,00%
4	UNDP (United Nations Development Programme)	Kab. NIAS SELATAN	Completed	150.000	150.000	100,00%
5	FFI (Flora Fauna International)	Kota SABANG	Ongoing	107.524	17.294	16,08%
6	IFC (International Finance Corporation)	All Kabupatens - All Provinces	Ongoing	43.600	43.600	100,00%

NO	SUBSEKTOR / PARTNER (1ST LEVEL)	KABUPATEN	IMPLEMENTATION STATUS	COMMITTED (USD)	DISBURSED (USD)	
7	LEAP (Local Empowerment Assistance Project Inc.)	Kab. NIAS	Ongoing	10.558	4.498	42,60%
8	PanEco Foundation	Kab. ACEH SINGKIL; Kab. ACEH SELATAN; Kab. ACEH BARAT DAYA; Kab. NAGAN RAYA	Ongoing	3.048	1.550	50,85%
9	AWSF (Aceh Water Sports Foundation)	Kab. ACEH BESAR	Ongoing	1.822	1.288	70,69%
10	Yayasan Ekosistem Lestari	Kab. ACEH SINGKIL; Kab. ACEH SELATAN; Kab. ACEH BARAT DAYA; Kab. NAGAN RAYA	Ongoing	181	77	42,54%
	Total 10 Pelaksana Besar			1.906.204	461.711	24,22%
	Total sektor			1.906.205	461.711	24,22%
	Persen 10 pelaksana besar terhadap sektor			100,00%	100,00%	

Sumber : RAN Database, Oktober 2007

Organisasi pelaksana terbesar rehabilitasi rekonstruksi sub bidang pemulihan pariwisata dan budaya adalah Bapedalda Prov.Sumatera Utara, BRR, UNESCO dan UNDP. Alokasi anggaran sebagian besar dialokasikan di wilayah kepulauan Nias. Untuk Bapedalda Sumut dan BRR data realisasi penyerapan anggaran belum tersedia. Sebagian besar kegiatan masih berjalan/ongoing dan sebagian sudah pada tahap terselesaikan/completed.

3.3.5 Pemulihan Kelembagaan dan Hukum

Berdasarkan RAN Database BRR, total komitmen Donor/NGO bidang kelembagaan dan hukum pada tahun 2005-2007 sebesar 154.270.782 USD. Realisasi anggaran hingga Bulan Desember 2007 mencapai 72,18 persen atau sebesar 111,345,867 USD. Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Donor/NGO berdasarkan urutan terbesar hingga terkecil pada bidang kelembagaan dan hukum dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

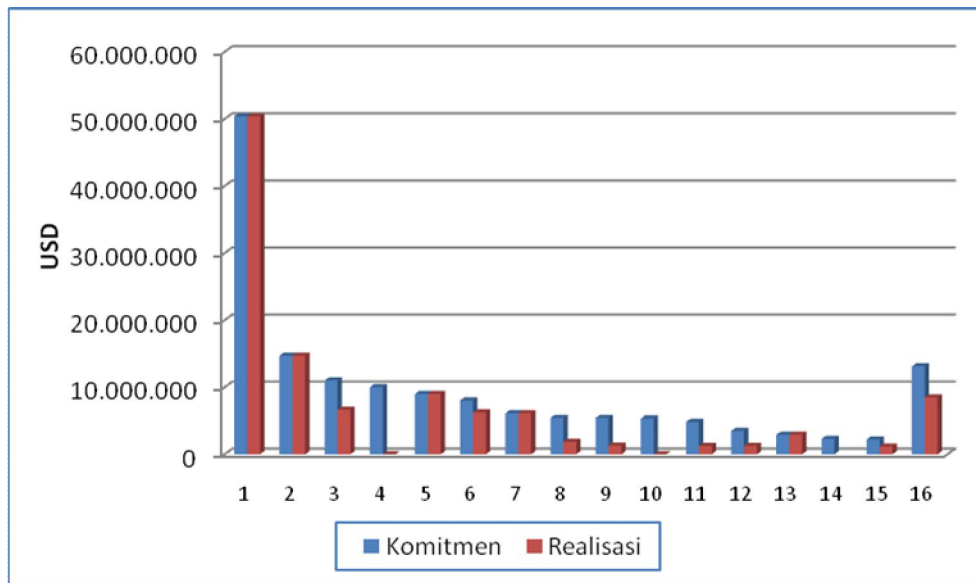
Tabel 3 - 97
Pembiayaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Donor/NGO Bidang Kelembagaan dan Hukum

NO	DONOR (FUNDING AGENCY)	PELAKSANA (PARTNER FIRST LEVEL)	KOMITMEN (USD)	REALIASI	
				(USD)	(%)
1	WB (World Bank)	Ministry for Development of Disadvantaged Areas	50,382,946	50,382,946	100.00
2	MDF (Multi Donor Fund)	UNDP (United Nations Development Programme)	14,700,000	14,700,000	100.00
3	ADB (Asian Development Bank)	ADB (Asian Development Bank)	11,000,000	6,655,429	60.50
4	UNDP (United Nations Development Programme); DEC-	UNDP (United Nations Development	10,000,000	0	0.00

NO	DONOR (FUNDING AGENCY)	PELAKSANA (PARTNER FIRST LEVEL)	KOMITMEN (USD)	REALIASI	
				(USD)	(%)
	UK(UK Disaster Emergency Committee); MDF (Multi Donor Fund)	Programme)			
5	Japanese Government	JICS	8,996,042	8,996,042	100.00
6	German Development Cooperation through GTZ (German Technical Cooperation)	GTZ	8,024,691	6,250,790	77.89
7	American Red Cross	American Red Cross	6,120,000	6,120,000	100.00
8	ECHO (European Commission Humanitarian Aid Office)	GTZ	5,432,099	1,851,852	34.09
9	ECHO (European Commission Humanitarian Aid Office)	UNDP (United Nations Development Programme)	5,431,937	1,312,440	24.16
10	Australian Red Cross	Australian Red Cross	5,343,511	0	0.00
11	ACT International (Action by Churches Together Alliances)	YTBI (Yayasan Tanggul Bencana di Indonesia)	4,813,262	1,266,684	26.32
12	USAID (United States Agency for International Development)	LGSP (Local Governance Support Program)	3,500,000	1,250,000	35.71
13	EU/EC (European Union/European Commission)	GTZ	2,910,277	2,910,277	100.00
14	AIPRD (Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development)	AIPRD (Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development)	2,290,076		0.00
15	Canadian Government	Sekretaris Daerah	2,213,750	1,153,106	52.09
16	Other Donor/NGO	Other Partner First Level	13,112,191	8,496,301	64.80
	Total		154,270,782	111,345,867	72.18

Sumber : Recovery Aceh Nias Database, 10 Desember 2007.

Grafik 3 - 32
Komitmen dan Realisasi Donor/NGO Bidang Kelembagaan dan Hukum



Sumber: Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2007

Keterangan:

1	WB	7	American Red Cross	13	EU/EC
2	MDF	8	ECHO with GTZ	14	AIPRD
3	ADB	9	ECHO with UNDP	15	Canadian Government
4	UNDP; DEC-UK; MDF	10	Australian Red Cross	16	Other Donor/NGO
5	Japanese Government	11	ACT International		
6	German Development Cooperation through GTZ	12	USAID		

Jumlah proyek di bidang kelembagaan dan hukum yang ditangani oleh Donor/NGO sebanyak 70 proyek, dan komitmen Donor/NGO terbesar diantaranya adalah World Bank, Multi Donor Fund (MDF), Asian Development Bank (ADB), dan lain sebagainya. Proporsi Donor/NGO bidang kelembagaan dan hukum dapat dilihat pada bagan di atas, sedangkan komitmen dan realisasi Donor/NGO berdasarkan sub sektor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 - 98
Pembiayaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Bidang Kelembagaan dan Hukum Berdasarkan Sub Sektor Oleh Donor/NGO Hingga Bulan Desember 2007

NO	SUB SEKTOR	COMMITTED (USD)	DISBURSED (USD)
1	Semua Sub Sektor – Pengembangan Aparatur	23,269,175	17,398,852
2	Pengembangan Aparatur	12,410,048	6,955,429
3	Pengembangan Aparatur ; Urusan Hukun; Urusan Hukum Lainnya; Keinginan dan Keamanan Masyarakat	50,382,946	50,382,946
4	Pengembangan Aparatur; Pengembangan Regional; SubSektor untuk ditegaskan – Pengembangan Aparatur	3,500,000	1,250,000
5	Pengembangan dan Penelitian Dasar Ilmu dan Teknologi	11,301	7,992

NO	SUB SEKTOR	COMMITTED (USD)	DISBURSED (USD)
6	Pengembangan dan Penelitian Dasar Ilmu dan Teknologi; Pelayanan Riset dan Pengembangan Pemerintah Publik; Pelayanan Publik Lainnya oleh Pemerintah	234,860	167,205
7	Pengembangan Masyarakat	14,751,769	9,241,922
8	Penanganan Bencana	24,103,958	9,087,784
9	Bantuan Luar Negeri	922,785	100,000
10	Bantuan Luar Negeri , Pelayanan Umum	229,008	229,008
11	Pelayanan Umum	1,783,196	1,463,665
12	Urusan Hukum	5,745,937	1,626,440
13	Pelayanan Publik Lainnya oleh Pemerintah	9,182,864	7,388,784
14	Urusan Hukum Lainnya, Keinginan dan Keamanan Masyarakat	700,173	700,173
15	Pelayanan Riset dan Pengembangan Pemerintah Publik	3,160,845	1,469,441
16	Pengembangan Regional	971,640	965,949
17	Sub Sektor untuk ditegaskan - Pengembangan Aparatur	2,910,277	2,910,277
	TOTAL	154,270,782	111,345,867

Sumber : Recovery Aceh Nias Database, 10 Desember 2007.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas program yang dilaksanakan Donor/NGO lebih terfokus pada bidang kelembagaan daripada bidang hukum dan K3M, namun untuk proporsi diantara ketiga sub bidang tersebut tidak dapat dilakukan karena ada beberapa kegiatan yang merupakan gabungan dua bidang.

Perkembangan kegiatan bidang kelembagaan dan hukum yang ditangani melalui sumbangan Donor/NGO yaitu kegiatan penyediaan bahan dan peralatan, pengembangan kapasitas, pelatihan, penyediaan tenaga ahli dan fasilitator, pembangunan dan perbaikan gedung pemerintahan, dan pelayanan pada masyarakat. Rincian realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 - 99
Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kelembagaan dan Hukum oleh Donor/NGO

NO	KEGIATAN	SATUAN	KOMITMEN	REALISASI *	
				VOLUME	%
1	KPI yang harus didefinisikan		162	68	41.98
2	Penyediaan bahan dan peralatan (nilai dalam USD)	\$	1,338,655,017	1,331,955,845	99.50
3	Studi/penelitian pengembangan institusi	Pkt	28,490	28,466	99.92
4	Pengembangan Kapasitas (seminar/workshop/training/mentoring/konsultasi/pelatihan & pendidikan) dalam peran sebagai perwakilan	Keg.	2,352	395	16.79
5	Pengembangan Kapasitas (seminar/workshop/training/mentoring/konsultasi/pelatihan & pendidikan) dalam pemerintahan	Keg.	4,041	328	8.12
6	Training tentang kajian dan penguatan PNS	Org	5,909	2,080	35.20
7	PNS yang telah menerima pelatihan	Org	8,753	5,903	67.4

N O	KEGIATAN	SATUA N	KOMITMEN	REALISASI *	
				VOLUME	%
					4
8	Penyusunan pengembangan pedoman/panduan		473,175	472,487	99.85
9	Penyediaan tenaga ahli	Org	30	25	83.33
10	Penyediaan fasilitator untuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Org	4,632	3,988	86.10
11	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kantor Pemerintahan	Unit	12	10	83.33
12	Pengujian Hukum berdasarkan hukum pengaturan kembali	Pkt	5	3	60.00
13	Pengembangan penyusunan monitoring untuk menekankan pemenuhan yang relevan dengan standar dan panduan	Keg.	1,463	385	26.32
14	Pejabat pemerintah yang menerima pengembangan kapasitas	Org	664	624	93.98
15	Organisasi (CSO/CBO/NGO) yang menerima pengembangan kapasitas	Kel/	1,607	297	18.48
16	Pelayanan Masyarakat	Org	4,316,786	2,822,404	65.38
17	Sosialisasi/diseminasi/publikasi yang diterbitkan	Keg.	40	27	67.50

Sumber : Recovery Aceh Nias Database, 10 Desember 2007.

Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

3.3.5.1 Kelembagaan

Pada bidang kelembagaan, ada 3 (tiga) Donor/NGO yang akan dijelaskan secara lebih terperinci yaitu Multi Donor Fund, AIPRD, dan USAID.

A. Multi Donor Fund (MDF)

Multi Donor Fund (MDF) merupakan donor kedua terbesar di bidang kelembagaan dan hukum. MDF mendukung pembangunan kapasitas para pemangku kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil, organisasi berbasis komunitas dan para kontraktor. Melalui hibah sebesar \$ 14,7 juta kepada BRR, dana tersebut telah memperkuat perencanaan, koordinasi, dan kapasitas pelaksanaan dari badan tersebut.

Untuk membangun kapasitas pemerintah daerah, World Bank melalui program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) menyediakan dukungan bagi seluruh pemerintah Kabupaten Aceh dan Nias untuk mempromosikan perencanaan yang bersifat partisipatif dan manajemen keuangan yang efektif serta pengawasan atas berbagai aktifitas mereka.

MDF juga telah menyediakan hibah sebesar \$6 juta untuk meningkatkan kapasitas dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan berbagai organisasi berbasis komunitas dalam hal

Gambar 3 - 49
Pembangunan Gedung Serbaguna
Desa di Kota Sigli Kabupaten Pidie
oleh MDF



Sumber: Sekretariat P3B-Bappenas,
November 2007

manajemen proyek, pengembangan masyarakat, pelatihan kepemimpinan, berbagai isu yang berkaitan dengan gender serta berbagai teknik pengawasan dan evaluasi.

Salah satu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan yang telah dibangun oleh MDF adalah pembangunan gedung sebagai desa¹⁰. Pembangunan gedung serbaguna ini merupakan bangunan baru yang dibangun sejak awal September 2006 dan pada Agustus 2007 telah digunakan. Luas bangunan 100 m² dan pembangunan gedung tersebut dibiayai oleh Multi Donor Fund (MDF) melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Hingga saat ini, gedung tersebut digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan administrasi desa dan kecamatan.

B. AIPRD

Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development (AIPRD) adalah donor kedua belas terbesar di bidang kelembagaan. AIPRD melalui Program *Local Governance and Infrastructure for Communities in Aceh* (LOGICA) telah berkontribusi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan. Program tersebut dimulai pada Bulan Maret 2005 dan berakhir pada Januari 2008, dimana komitmen mencapai AUD 40 juta dan lokasi pelaksanaan program terletak di Aceh Besar, Aceh Barat & Aceh Jaya. Kegiatan telah diselesaikan antara lain :

6. Memperkuat pemerintahan kecamatan

- Kantor-kantor kecamatan di Baitussalam telah diselesaikan dan dapat beroperasi kembali. 3 kantor lainnya hampir selesai dibangun kembali di Kabupaten Aceh Besar, dan 4 kantor sedang menjalani proses pembangunan.
- Para fasilitator sedang bekerja sama dengan erat dengan para pejabat pemerintah di 17 kantor kecamatan, termasuk memberikan pelatihan dan lokakarya dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan layanan kecamatan.
- Kunjungan belajar ke Sragen oleh para pejabat kabupaten dan kecamatan dari Aceh Besar, Barat & Jaya untuk mempelajari cara pelaksanaan layanan masyarakat yang lebih baik.
- Pengadaan, pemasangan dan pelatihan basis data dan perlengkapan kependudukan untuk membuat kartu tanda penduduk di 17 kantor pemerintah Kecamatan.
- Pelatihan dalam prosedur administratif dasar dan pengadaan layanan masyarakat bagi 60 staf kantor pemerintah kecamatan dari 5 kecamatan.
- Penyediaan pelayanan terpadu di kantor kecamatan, dimana pelayanan publik terpadu satu pintu tersebut dapat mengurus kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat kematian, surat nikah dan pengurusan perijinan lainnya, dan masyarakat tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh ke kabupaten.

7. Membangun kembali masyarakat tingkat desa.

- Pembangunan Balai Desa dan Kantor Desa 38 unit telah selesai, 55 unit sedang

Gambar 3 - 50
Pembangunan Kantor Desa Kajhu
Kabupaten Aceh Besar oleh AIPRD



Sumber : Sekretariat P3B-Bappenas, September 2007

¹⁰ Hasil kunjungan lapangan Tim P3B-Bappenas ke Provinsi NAD, September-November 2007

dibangun dan 84 uni sedang dalam proses tender. Salah satunya adalah pembangunan Kantor desa Kahju Aceh Besar¹¹. Kondisi Kantor Desa Kajhu ini sangat baik dengan ruang pertemuan yang memadai. Kantor ini merupakan bangunan permanen dengan atap terbuat dari genteng dan dinding semen. Posisi bangunan tersebut berada di pinggir jalan raya Desa Kahju. Kantor Desa tersebut sering dipergunakan sebagai balai pertemuan warga sekitar.

- Lebih dari 2.000 pemimpin masyarakat di lebih dari 200 desa telah mendapatkan pelatihan kepemimpinan, motivasi dan pemberdayaan. Lebih dari 51% adalah perempuan.
- Bantuan dan pelatihan ke 200 desa dalam konstruksi dasar dan pengawasan.

C. USAID

United States Agency for International Development (USAID) merupakan donor keempat belas terbesar di bidang kelembagaan. USAID melalui *Local Governance Support Program* atau *Program Dukungan bagi Tata Pemerintahan Daerah* (LGSP) berkomitmen menyediakan dana sebesar 4 juta dolar AS untuk membantu pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan pemulihan yang diperlukan bagi masyarakat, dunia usaha, dan korban bencana di Aceh selama dua tahun (2005-2007). Tujuan LGSP membantu pemulihan kelembagaan Aceh :

- memperkuat kepemimpinan dan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat
- mendukung upaya pemerintah daerah dalam melakukan dan mengkoordinasikan pemulihan yang menyeluruh
- mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan demi terwujudnya transparansi dan daya tanggap
- memanfaatkan inisiatif dan sumber daya daerah, dan
- membantu pemerintah daerah memaksimalkan program dan bantuan provinsi/nasional/ internasional

USAID melalui LGSP melaksanakan Pelatihan 17 Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada April 2007. Acara ini merupakan kerjasama LGSP, UNDP, Pemprov NAD dan BRR. Pelatihan bertujuan membekali bupati/walikota dan wakil-wakilnya dengan informasi yang terkait dengan tugas kepala daerah sesuai dengan UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Informasi ini meliputi bidang pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan daerah, perwakilan, pelayanan publik dan pengawasan. Pemahaman terhadap bidang-bidang ini akan memudahkan kepala daerah menjalankan proses perencanaan dan penganggaran serta mekanisme persiapan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban.

3.3.5.2 Hukum

International Development Law Organization (IDLO) merupakan salah satu Donor yang terlibat dalam bidang hukum, walaupun tidak termasuk kedalam 15 besar donor terbesar, namun perannya cukup signifikan dalam memberikan bantuan hukum paska tsunami terutama yang berkaitan dengan persoalan perwalian, warisan, pertanahan, dan lain sebagainya yang muncul setelah tsunami. Program yang sudah dilakukan IDLO di Aceh hingga Maret 2007 adalah:

¹¹ Hasil kunjungan lapangan Tim P3B-Bappenas ke Provinsi NAD, September-November 2007

3. Pelatihan yang terkait tentang warisan, perwalian, pertanahan, dan hasil penelitian ini sudah diterbitkan menjadi sebuah buku panduan
4. Training mediasi tentang perwalian, warisan, pertanahan untuk aparat gampong/lembaga-lembaga adat yang memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan di tingkat gampong. Pelatihan ini dilakukan di Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya dan Aceh Barat
5. Program bantuan hukum paska tsunami, misalnya program pemutaran film (Februari sampai Juni 2007) di 100 Gampong di kawasan Banda Aceh dan Aceh besar merupakan media bagi penyuluhan hukum tentang waris dan perwalian menurut hukum Islam dan hak atas tanah

Untuk beberapa program, IDLO bekerja sama dengan LOGICA AIPRD, Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTgA) dan Mahkamah Syaria'ah. IDLO juga memiliki program untuk melengkapi referensi seperti undang-undang sejumlah yurisprudensi di perpustakaan-perpustakaan Pengadilan Negeri yang terkena dampak tsunami di Aceh.

Gambar 3 - 51
Pembangunan Rumah Dinas KODIM
Benteng di Kabupaten Pidie oleh Palang
Merah Perancis



Sumber Sekretariat P3B-Bappenas, November 2007

3.3.5.3 Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat

Salah satu contoh pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang K3M oleh Donor/NGO yaitu pada pembangunan Rumah Dinas Komando Distrik Militer di daerah Benteng di Kabupaten Pidie¹². Tata letak bangunan belum berfungsi sebagai tempat evakuasi/tempat menyelamatkan diri jika terjadi tsunami, karena masih berada di lokasi yang lama. Pola dan jaringan jalan lingkungan belum direncanakan untuk fungsi evakuasi, karena terletak 200 meter dari bibir pantai.

Jumlah unit rumah dinas yang terbangun sampai dengan Desember 2006 sekitar 70 unit, dan 80 persen telah dihuni. Akses terhadap pusat kegiatan, misalnya

pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah cukup dekat yaitu sekitar 50-200 m. Kondisi jalan lingkungan belum teraspal. Kualitas konstruksi rumah dibangun dengan baik, tidak ada kerusakan yang signifikan pada konstruksi rumah, dan beberapa masih dalam tahap penyelesaian. Di dalam kompleks perumahan dinas tersebut air bersih dan septic tank telah tersedia pada setiap rumah, namun kloset belum tersedia, sehingga kamar mandi belum dapat digunakan. Prasarana lingkungan seperti penanganan air limbah, drainase, jaringan listrik, jaringan telepon dan TPS (tempat pembuangan sampah) telah terintegrasi dengan baik.

Selain pembangunan fisik bidang K3M di atas, salah satu Donor/NGO yaitu *International Organization for Migration* (IOM) bekerja sama dengan Polda NAD untuk membantu dan memberikan dukungan kepada peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparat Polri yang dimulai sejak tahun 2006 dan akan berakhir pada tahun 2009. Tujuan program pelatihan ini untuk memastikan agar para perwira sepenuhnya menghargai standar-standar internasional HAM yang harusnya dijadikan komitmen untuk ditegakkan. Pada bulan November 2007, sebanyak 23 pusat pelatihan Perpolisian masyarakat (Perpolmas) sudah

¹² Hasil kunjungan lapangan Tim P3B-Bappenas ke Provinsi NAD, September-November 2007

diserah terimakan oleh IOM kepada Polri melalui Polda NAD di 21 Markas Polres dan Poltabes di seluruh Aceh. Pusat-pusat pelatihan tersebut terdiri dari sebuah fasilitas pelatihan dengan ruang kelas yang mampu menampung 50 peserta dan sebuah asrama yang cukup besar untuk mengakomodir 40 orang. Pelatihan ini diawali dari pelatihan bagi trainer HAM di tingkat Polda. Selanjutnya para trainer tersebut akan melatih anggota Polri pada Polres/Polresta di *pilot project* sekembalinya dari pelatihan.

Dengan mendukung upaya-upaya untuk menata ulang dan memodernisasi kepolisian Aceh, proyek IOM ini akan membantu kepolisian untuk menerapkan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Helsinki yang telah mengakhiri konflik selama hampir 30 tahun di Aceh, dan mendukung perkembangan demokrasi dan *rule of law* dalam konteks pascakonflik di Provinsi NAD.

3.3.6 Multi Sektor

Rehabilitasi dan rekonstruksi Multi Sektor merupakan kumpulan beberapa kegiatan proyek yang menjadi payung terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor tertentu. Proyek-proyek di bidang multi sektor dilaksanakan dalam rangka mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Keberadaan mekanisme rehabilitasi dan rekonstruksi multisektor ini cukup strategis mengingat proyek ini sangat mendukung tercapainya program-program/kegiatan yang terdapat dalam bidang pemulihan perumahan dan permukiman; infrastruktur; sosial dan budaya; perekonomian; serta kelembagaan dan Hukum. Adapun pengkategorian terhadap proyek-proyek di Multi Sektor adalah bahwa:

6. Proyek tersebut terdiri dari beberapa program/ kegiatan, dan itu merupakan bagian dari *salah satu program yang termasuk ke dalam 5 bidang pemulihan*. Seperti: program Rekonstruksi terhadap Sistem Administrasi Tanah Aceh (RALAS) yang dikategorikan kepada Proyek Pemulihan Komunitas.
7. Program/ kegiatan yang dilaksanakan melalui proyek multi sektor diluar kategorisasi dalam bidang pemulihan seperti proyek untuk program pengurangan resiko yang harus diterapkan dalam perencanaan pembangunan dimasukkan kedalam bagian proyek penguatan kapasitas pemerintahan. Dan program lainnya seperti *bantuan tenaga teknis untuk mendukung Pemerintah Daerah dan BRR NAD-Nias*.
8. Adapun kategori yang ketiga adalah proyek pelestarian lingkungan yang mempromosikan tentang *pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan*. Seperti proyek yang dilaksanakan oleh MDF mengenai Proyek Hutan Aceh dan Lingkungan Hidup yang merupakan sebuah program hutan dan lingkungan hidup yang *bertujuan untuk melindungi ekosistem kawasan hutan Leuser dan Ulu Masen di Provinsi NAD*.

3.3.6.1 Donor/ NGO yang Berperan dalam Proyek-proyek di bidang Multi Sektor

1. MDF (Multi Donor Fund)

Sesudah tsunami dan gempa bumi, sumbangan kalangan internasional berdatangan ke negara-negara yang terkena dampak musibah tersebut. Indonesia, sebagai negara yang terkena dampak terbesar, menerima komitmen berlipat ganda untuk bantuan masyarakat pada masa tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias. Dengan banyaknya dana yang mengalir, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa sumber-sumber pendanaan tersebut dikelola secara efektif, terkoordinasi dan transparan. Pemerintah Indonesia mengajukan kepada Bank Dunia untuk membentuk Multi Donor Fund sebagai salah satu mekanisme yang efisien dan terkoordinasi dalam mengelola pendanaan. Saat ini Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias mengelola lebih dari 650 juta dolar AS sebagai komitmen dari 15 donor negara dan lembaga internasional.

Cakupan proyek-proyek MDF yang dikategorikan termasuk ke dalam bidang multi sektor, adalah:

Pemulihan Komunitas

Pemulihan komunitas merupakan pendekatan secara terpadu yang dilakukan melalui suatu paket atas lima proyek yang bertujuan untuk ; (1) mengembalikan hak atas properti; (2) pembangunan rumah; (3) memberdayakan pengambilan keputusan masyarakat; dan (4) perbaikan terhadap infrastruktur desa/ kelurahan. Proyek ini dilaksanakan melalui program pendampingan melalui jaringan lebih dari 13.000 fasilitator yang menjangkau seluruh pedesaan di Aceh dan Nias, berbagai komunitas pedesaan menilai sendiri kebutuhan mereka, merencanakan berbagai aktifitas, mengambil berbagai keputusan secara demokratis dan menerapkannya pada berbagai proyek mereka, dengan kendali penuh atas keuangan dan mekanisme pertanggungjawaban yang kuat.

Program pemulihan komunitas melalui mekanisme berbasis masyarakat dibagi kedalam beberapa proyek yang terdiri dari :

- Proyek Rekonstruksi terhadap Sistem Administrasi Tanah Aceh (RALAS) dengan tujuan: memberikan hak kepemilikan tanah pada buku tanah sehingga memberikan jaminan hak atas tanah dan memungkinkan masyarakat membangun kembali usaha rumah tangga serta faasilitas publik. Proyek ini dalam implementasinya dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bekerjasama dengan pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Proyek Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Kedua proyek ini bertujuan: membangun pelayanan publik termasuk pembiayaan atas berbagai fasilitas, termasuk irigasi, saluran drainase, proyek air bersih dan penampungan, fasilitas sanitasi, sekolah, pos kesehatan, pusat komunitas dan rekonstruksi terhadap jalan dan jembatan di pedesaan. Termasuk penyediaan beasiswa, kredit mikro terhadap individu dan kelompok serta penciptaan kesempatan kerja. Dalam implementasinya, proyek yang berbasis pada masyarakat ini dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Direktorat Cipta Karya.
- Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman berbasis Komunitas (RE-KOMPAK) bertujuan: pembangunan kembali rumah penduduk. Proyek ini juga dalam implementasinya dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Direktorat Cipta Karya dengan partisipasi langsung masyarakat.
- Proyek Pemulihan dan Perencanaan Kecamatan Nias (KRRP) bertujuan untuk pengembangan di bidang sosial, budaya, ekonomi dan penguatan kelembagaan di Kepulauan Nias. Proyek ini diimplementasikan oleh pemerintah daerah pada tingkat kabupaten hingga kecamatan.

Pembangunan Kapasitas

Dukungan terhadap pembangunan kapasitas bagi pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil, organisasi berbasis komunitas. Termasuk pengembangan atas suatu basis data pemantau bagi proyek pemerintah dalam pengembangan kebijakan dan dukungan implementasi seperti di bidang pendidikan, tata kelola, manajemen proyek, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan jender.

Proyek-proyek yang termasuk kedalam pembangunan kapasitas dan tata kelola adalah

- Proyek Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) bertujuan: membangun kapasitas pemerintah daerah dengan menyediakan dukungan bagi seluruh pemerintah kabupaten di Aceh dan Nias untuk mempromosikan

perencanaan yang bersifat partisipatif dan manajemen keuangan yang relatif serta pengawasan atas berbagai aktifitas mereka, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Adapun yang mengimplementasikan proyek ini adalah kementerian pembangunan daerah tertinggal dan bekerjasama dengan konsultan dan pemerintah setempat.

- Proyek Perencanaan dan Pemulihan Berbasis Kecamatan di Nias bertujuan untuk pemulihan dan pengembangan sistem perencanaan di berbagai bidang di Kepulauan Nias. Proyek ini diimplementasikan oleh pemerintah daerah pada tingkat kabupaten hingga kecamatan.
- Proyek Pekerjaan Jalan Berbasis Sumber Daya Lokal di Aceh dan Nias, ini bertujuan untuk peningkatan sumber daya badan usaha lokal untuk merehabilitasi jalan-jalan di Aceh dan Nias. Sehingga berbagai badan usaha lokal berpotensi untuk mengajukan penawaran atas kontrak perbaikan jalan juga telah mendapat pelatihan di dalam hal penentuan harga kontrak, proses penawaran yang kompetitif dan penggunaan metode rehabilitasi jalan padat karya, metode ini dinilai sangat efektif dari segi biaya dibandingkan dengan berbagai pendekatan alternatif lainnya. Implementasi proyek ini berada dibawah koordinasi Departemen Pekerjaan Umum yang bekerjasama dengan satuan kerja pemerintah daerah.
- Proyek Bantuan Teknis bagi BRR NAD-Nias dan staff pemerintah lokal ditujukan agar masyarakat terutama para staff pemerintahan mendapatkan pelatihan dalam pengelolaan atas rehabilitasi dan pemeliharaan jalan-jalan kabupaten, termasuk manajemen kontrak, manajemen pengadaan dan keuangan. Implementasi dari proyek ini adalah BRR NAD-Nias dan pemerintah daerah provinsi hingga kabupaten/kota.
- Proyek Dukungan untuk Memperkuat Peran dan Kapasitas dari organisasi Masyarakat Sipil, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan berbagai organisasi berbasis komunitas dalam hal manajemen proyek, pengembangan masyarakat, pelatihan kepemimpinan, berbagai isu berkaitan dengan jender serta berbagai teknik pengawasan dan evaluasi. Proyek ini diimplementasikan dengan bekerjasama dengan LSM lokal dan pemerintah daerah.

Pelestarian Lingkungan Hidup

MDF termasuk salah satu Donatur terbesar yang berinisiatif untuk mempromosikan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Proyek yang termasuk dalam sektor ini adalah:

- Proyek Pengelolaan Limbah, yaitu untuk: (1) membersihkan lebih dari satu juta kubik meter puing pasca tsunami; (2) mengumpulkan limbah perkotaan pada delapan kabupaten; dan (3) merehabilitasi sawah serta dan mendaur ulang kayu tsunami yang dapat digunakan untuk konstruksi dan usaha furnitur.
- Proyek Hutan Aceh dan Lingkungan Hidup, merupakan sebuah program hutan dan lingkungan hidup yang bertujuan untuk melindungi ekosistem kawasan hutan Leuser dan Ulu Masen. Dan melindungi lingkungan penting bagi persediaan air, biodiversitas dan kendali terhadap erosi dan merupakan proyek koridor ekologi terbesar di Asia Tenggara.

Untuk proyek pelestarian lingkungan dalam implementasinya didukung oleh LSM Leuser, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang bekerjasama dengan pemerintah daerah.

8. AusAID (Australian AID)

Program bantuan pembangunan luar negeri Pemerintah Australia merupakan program yang dibiayai Pemerintah Federal untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara-negara berkembang. Program ini dikelola oleh Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Australia (AusAID) yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Luar Negeri Australia. Program bantuan Australia untuk Indonesia bertujuan untuk mendukung kepentingan nasional Australia dengan membantu Indonesia mengurangi tingkat kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkesinambungan.

Bantuan AusAID di Indonesia dilaksanakan melalui proyek-proyek yang dikelola oleh kontraktor yang dipilih secara kompetitif berdasarkan Aturan Pemerintah Persemakmuran untuk penyediaan barang/jasa. Program ini adalah program antar Pemerintah (Government to Government), dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai mitra utama AusAID. Program ini menggunakan berbagai pendekatan pelaksanaan.

AusAID memiliki proyek-proyek bilateral dan juga menyalurkan dana melalui badan-badan Perserikatan Bangsa Bangsa, Lembaga Keuangan Internasional (IFI) dan Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional (INGO). AusAID juga mendukung Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dan berbagai kelompok masyarakat lain. Semua kegiatan program membutuhkan persetujuan dari Pemerintah Indonesia.

Bencana tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 di wilayah barat Laut Sumatera mencerminkan sangat rentannya Indonesia terhadap bencana alam. Australia, salah satu donor utama bantuan kemanusiaan untuk Indonesia sejak krisis ekonomi akhir tahun 90-an, langsung merespon dengan menyetujui dibentuknya Kemitraan Australia-Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan bernilai A\$1 milyar dengan Pemerintah Indonesia untuk jangka waktu 5 tahun. Kemitraan ini bertujuan untuk membantu usaha rekonstruksi dan pembangunan Indonesia baik di dalam maupun di luar daerah yang terkena dampak tsunami.

Mulai 1 Mei 2006, program bantuan bilateral Australia di Indonesia dipromosikan dengan nama Kemitraan Australia Indonesia (AIP): program bantuan Pemerintah Australia secara keseluruhan dengan anggaran pengeluaran sekitar A\$2 milyar untuk jangka waktu lima tahun. Program ini mencakup paket Kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (AIPRD) bernilai AU\$1 milyar, satu-satunya paket bantuan terbesar dalam sejarah Australia.

Adapun proyek-proyek AusAID yang dapat dikategorikan kedalam proyek multisektor adalah:

- *Infrastruktur Pemerintahan dan Permukiman*

Proyek Infrastruktur Pemerintahan dan permukiman *bertujuan* untuk membangun dan memperkuat kembali infrastruktur pemerintahan daerah dan permukiman pada tingkat kecamatan dan pedesaan yang mencakup:

- Pembangunan kembali infrastruktur pemerintah dan komunitas
- Pemetaan tanah di daerah permukiman
- Penguatan kapasitas pemimpin dan staf pemerintahan daerah
- Dukungan terhadap sistem dan proses untuk efektifitas pemerintahan daerah, dan
- Kemitraan melalui kontribusi Pemerintah Australia terhadap PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dalam membangun infratraktur permukiman yang dimulai dari pendanaan pada tahap tanggap darurat.

Proyek yang terdiri dari beberapa program/kegiatan diatas diimplementasikan oleh AusAID yang merangkap sebagai lembaga donor yang di dukung oleh lembaga World Bank seperti dalam bentuk *Kecamatan Development Programe (KDP)*.

Proyek Rekonstruksi di Nias

Proyek rekonstruksi untuk kepulauan Nias Sumatera Utara *bertujuan* untuk merekonstruksi pembangunan permukiman disamping penyediaan tenaga ahli guna mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelaksanaan proyek rekonstruksi ini dilaksanakan melalui:

- Program membangun kembali infrastruktur vital pada permukiman penduduk dan penciptaan kembali lapangan kerja bagi masyarakat
- Program penyediaan tenaga ahli untuk Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah selama proses rekonstruksi berlangsung.

9. UNDP (United Nation Development Program)

UNDP telah menetapkan prioritas-prioritas untuk tahun 2007. Sasarannya adalah untuk menggalakkan pembangunan di Aceh dan Sumatera Utara dengan melaksanakan program jangka panjang di bidang tata pemerintahan dan pemulihan ekonomi.

Seiring dengan upaya UNDP untuk menggalang kemitraan eksternal dengan pemerintah, Lembaga-lembaga PBB, LSM dan masyarakat, UNDP secara internal juga telah mengupayakan peningkatan kapasitas, termasuk di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan program dan proyek. UNDP Indonesia juga tanpa henti menegakkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang andal pada tiap-tiap program. Beberapa proyek dari UNDP yang dapat dikategorikan ke dalam multi sektor adalah:

Penguatan Kapasitas Pemerintahan untuk Keberlanjutan Pemulihan dan Mitigasi Bencana

Proyek ini menekankan pada dukungan untuk memfasilitasi Bappenas, Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk penguatan kapasitas masyarakat sipil. Termasuk penerapan sistem pengurangan resiko bencana dalam setiap perencanaan pembangunan.

3.3.6.2 Keterkaitan Bidang Multi Sektor dengan Bidang Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi proyek-proyek multi sektor berperan besar dalam pemulihan pasca bencana. Diantara lembaga donor/NGO yang ikut berperan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang termasuk kategori proyek multi sektor berdasarkan data yang kami peroleh adalah MDF, AusAID dan UNDP. Diantara 3 lembaga tersebut, MDF merupakan lembaga yang melaksanakan rekonstruksi di berbagai sektor. Sehingga ada keterkaitan yang saling mendukung diantara kegiatan proyek multi sektor dengan penyelesaian program di bidang pemulihan. Adapun keterkaitan tersebut dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3 - 100
Keterkaitan antara proyek-proyek Multi Sektor
dan keterkaitan dengan bidang-bidang pemulihan

DONOR/NGO	NAMA PROYEK	TERKAIT
MDF	Pemulihan Komunitas	

DONOR/NGO	NAMA PROYEK		TERKAIT
	a	Proyek Rekonstruksi terhadap Sistem Administrasi Tanah Aceh (RALAS)	Bidang Pemulihan Perumahan, Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
	b	Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Proyek Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)	Bidang Pemulihan Perekonomian
	c	Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman berbasis Komunitas (RE-KOMPAK)	Bidang Pemulihan Perumahan, Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
	d	Proyek Pemulihan dan Perencanaan Kecamatan Nias (KRRP)	Bidang Pemulihan Sosial Budaya; Perekonomian; dan Kelembagaan dan Hukum
	Pembangunan Kapasitas		
	a	Proyek Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)	Bidang Pemulihan Perekonomian
	b	Proyek Perencanaan dan Pemulihan Berbasis Kecamatan di Nias	Bidang Pemulihan Sosial Budaya; Perekonomian; dan Kelembagaan dan Hukum
	c	Proyek Pekerjaan Jalan Berbasis Sumber Daya Lokal di Aceh dan Nias	Bidang Pemulihan Infrastruktur
	d	Proyek Bantuan Teknis bagi BRR NAD-Nias dan Pemerintah Daerah	Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum
	e	Proyek Dukungan untuk Memperkuat Peran dan Kapasitas dari organisasi Masyarakat Sipil	Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum
	Pelestarian lingkungan Hidup		
	a	Proyek Pengelolaan Limbah	Bidang Pemulihan Perumahan, Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
	b	Proyek Hutan Aceh dan Lingkungan Hidup	Bidang Pemulihan Perumahan, Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
AusAID	a	Proyek Infrastruktur Pemerintahan dan Permukiman	Bidang Pemulihan Perumahan, Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; Infrastruktur; Perekonomian; dan Kelembagaan dan Hukum
	b	Proyek Rekonstruksi di Kepulauan Nias	Bidang Pemulihan Infrastruktur dan Kelembagaan dan Hukum
UNDP		Proyek Penguatan Kapasitas Pemerintahan untuk Keberlanjutan Pemulihan dan Mitigasi Bencana	Bidang Pemulihan Perumahan, Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; Infrastruktur; dan Kelembagaan dan Hukum

Sumber: Analisis Tim P3B Bappenas, 2007.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat keterkaitan antara proyek multi sektor dengan bidang-bidang pemulihan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Seperti salah satu proyek MDF dalam pemulihan komunitas, pada proyek RALAS mengenai kegiatan rekontruksi administrasi pertanahan, rencana kegiatan adjudikasi RALAS (*Reconstruction Aceh Land Administration System*). Adjudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Hal ini sangat terkait dengan bidang pemulihan permukiman, pertanahan, tata ruang, dan lingkungan hidup.

3.3.6.3 Perkembangan Implementasi Berbagai Proyek di Bidang Multi Sektor

Implementasi dari proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Donor/NGO selama masa rehabilitasi dan rekonstuksi di NAD dan Nias dapat dilihat dalam beberapa tabel berikut:

- *Implementasi Proyek MDF*

Tabel 3 - 101
Pencapaian Proyek Multi Sektor MDF di Aceh-Nias s/d September 2007

DONOR/NGO	NO	NAMA PROYEK	BUDGET DALAM USD	PENCAPAIAN DALAM USD S/D SEPT 2007
Multi Donor Fund (MDF)	1	Pemulihan Komunitas :		
		Rekonstruksi Proyek Sistem Administrasi Tanah Aceh (RALAS)	28,500,000	11,700,000
		Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK)	64,700,000	64,700,000
		Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)	17,960,000	17,900,000
		Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman Berbasis Komunitas (RE-KOMPAK)	85,000,000	78,160,000
		Proyek Pemulihan dan Perencanaan Kecamatan Nias (KRRP)	25,750,000	10,150,000
	2	Pembangunan Kapasitas dan Tata Kelola :		
		Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)	25,000,000	2,500,000
		Bantuan Teknis bagi BRR	14,740,000	14,740,000
		Pekerjaan Jalan Berbasis Sumber Daya Lokal di Aceh dan Nias	6,420,000	4,420,000
		Dukungan untuk Memperkuat Peran dan Kapasitas dari Organisasi Masyarakat Sipil	6,000,000	3,000,000
	3	Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan :		
		Program Pengelolaan Limbah Tsunami	24,410,000	14,430,000
		Proyek Hutan Aceh dan Lingkungan Hidup	17,530,000	4,690,000

Sumber: Disarikan dari Progress Report III MDF, December 2006 dan Quarterly Financial Management Report No.10, MDF, 30 September 2007.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa MDF telah mengkategorikan beberapa program yang terkait ke dalam 5 bidang pemulihan seperti proyek pemulihan komunitas yang terlihat hampir 100 % telah terimplementasikan dengan baik berdasarkan budget yang dialokasikan. Di lain pihak, proyek-proyek pembangunan kapasitas dan tata kelola, mayoritas program baru mencapai 50 % dari alokasi dana yang diimplementasikan termasuk program bantuan teknis bagi BRR NAD-Nias. Demikian pula dengan proyek pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan yang masih belum mencapai target komitmen yang ditetapkan.

- *Implementasi Proyek AusAID*

Tahun 2006-2007, Indonesia menjadi penerima Bantuan Pembangunan Resmi terbesar dari Australia. Tujuan program bantuan ini adalah untuk membantu mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang berkesinambungan. Program bantuan ini memiliki empat komponen utama:

1. Memperbaiki pertumbuhan dan manajemen ekonomi melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung manajemen ekonomi yang sehat dan sektor swasta yang kuat dan produktif.

2. Mendukung transisi ke era demokrasi dengan membantu Indonesia membangun lembaga-lembaga demokrasi yang kuat dan mendukung partisipasi secara luas di berbagai proses demokrasi. Komponen ini meliputi bantuan untuk reformasi hukum dan pengadilan, bantuan untuk lembaga hak azasi manusia (HAM) dan akuntabilitas publik, proses pemilihan umum dan perwakilan rakyat, serta swadaya masyarakat.
3. Meningkatkan keamanan dan stabilitas manusia dengan membantu berdirinya lembaga penegakan hukum dan lembaga bantuan darurat yang kompeten, serta memperkuat kemampuan Indonesia dalam merespon secara efektif terhadap bahaya penyakit menular seperti avian influenza dan HIV/AIDS. Komponen ini juga mencakup kegiatan penanggulangan konflik dan bencana, dan bantuan kemanusiaan bagi kelompok rentan.
4. Meningkatkan akses dan mutu jasa layanan umum, khususnya di Indonesia bagian Timur. Program ini meliputi berbagai kegiatan yang mencakup bantuan untuk pengembangan kebijakan di tingkat nasional hingga bantuan untuk perencanaan dan pelaksanaan di tingkat kabupaten. Program ini juga mencakup bantuan bagi pendekatan berbasis masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan empat komponen program bantuan AusAID diatas, maka yang terkait dengan proyek Multi Sektor adalah proyek infrastruktur pemerintahan dan permukiman dan proyek rekonstruksi untuk pengembangan kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Proyek ini adalah untuk mendukung komponen yang pertama yaitu untuk pertumbuhan dan manajemen ekonomi melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung manajemen ekonomi yang sehat dan sektor swasta yang kuat dan produktif. Adapun pencapaian dari kedua proyek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 - 102
Pencapaian Proyek Multi Sektor AusAID di Aceh-Nias s/d Juli 2007

DONOR/NGO	NAMA PROYEK	BUDGET DALAM USD	PENCAPAIAN DALAM USD S/D JULY 2007
AusAID (Australian AID)	Proyek Infrastruktur Pemerintahan dan Permukiman	32,653,340	35,269,683
	Proyek Rekonstruksi di Nias	7,593,800	2,057,553

Sumber : Disarikan dari Report AUSAID to World Bank, AUSAID, (July 2007).

- *Implementasi Proyek UNDP*

Sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi melalui UNDP adalah untuk menggalakkan pembangunan di Aceh dan Sumatera Utara dengan melaksanakan program jangka panjang di bidang tata pemerintahan dan pemulihan ekonomi, termasuk didalamnya adalah pentingnya penerapan prinsip pengurangan resiko bencana yang terintegrasi dalam setiap proses rekonstruksi dan pembangunan. UNDP, di dukung oleh UNESCO dan bekerjasama dengan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) dan lembaga pemerintah lainnya, mendesain sistem peringatan yang membantu masyarakat untuk mengingatkan masyarakat terhadap kemungkinan munculnya gelombang tsunami. Adapun capaian-capaian lainnya yang dilaksanakan oleh UNDP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 - 103
Pecapaian Proyek Multi Sektor UNDP di Aceh-Nias Sampai Pertengahan Tahun 2007

DONOR/NGO	NAMA PROYEK	TAHUN 2006		TAHUN 2007	
		SASARAN	PENCAPAIAN	SASARAN	PENCAPAIAN
UNDP	Penguatan	- Sebanyak 40.000	- Terdistribusiny	- Kajian Akses ke	- Tercapainya

DONOR/NGO	NAMA PROYEK	TAHUN 2006		TAHUN 2007	
		SASARAN	PENCAPAIAN	SASARAN	PENCAPAIAN
(United Nation Development Program)	Kapasitas Pemerintahan untuk Keberlanjutan Pemulihan dan Mitigasi Bencana	- wind-up radio disalurkan ke pelbagai kelompok masyarakat dalam rangka melancarkan akses informasi - Pendampingan teknis disediakan kepada Pemerintah daerah dan BRR untuk menjamin kualitas penyelenggaraan bantuan - Membentuk komunitas kelompok siaga bencana di bagian barat NAD - Pendampingan bagi KPU NAD dalam menyelenggarakan kegiatan informasi pemilihan dan pendidikan pemilihan agar pilkada berlangsung secara damai dengan partisipasi yang maksimal	- a 35,000 radio sebagai informasi tentang hasil program - Dukungan terhadap kerangka hukum pembangunan dalam pemerintah Aceh dan Manajemen Bencana - Adanya 14 tempat di Indonesia yang direncanakan untuk penempatan Sistem Peringatan Tsunami - Tercapainya stabilitas komunitas kelompok Siaga Bencana di Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya dan Sumatera Barat - Tercapainya Kebutuhan untuk Akses terhadap Keadilan - Promosi pemilihan dan pendidikan sipil dalam Pilkada untuk Desember 2006.	- Keadilan di NAD yang berlandaskan pada kajian reformasi hukum pada tataran kabupaten - UNDP dan para mitranya menyelenggarakan lokakarya nasional, workshop tentang reintegrasi dan pemerintahan.	- dukungan terhadap akses memperoleh keadilan di Aceh, dan Bekerjasama secara berkelanjutan dengan Pemerintah Provinsi - Memfasilitasi workshop untuk: Mendukung sistem yang akuntabel dan transparan dalam setiap pemilihan; Terintegrasi ya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan ; dan Dukungan terhadap sistem peringatan dini terhadap tsunami dan prosedur sistem peringatan dini.

Sumber: Disarikan dari Second Annual Report ETR Programme, UNDP, 2005-2006 dan Fast Facts ETR, ETR, mid-2007.

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan sasaran dan capaian pada proyek Multi Sektor yang berada di bawah koordinasi UNDP. Dapat diambil contoh sasaran dari bagian proyek penguatan kapasitas pemerintahan mengenai penyebaran 40.000 wind-up radio yang disalurkan ke pelbagai kelompok masyarakat dalam rangka melancarkan akses informasi namun capaian yang berhasil dicapai hingga akhir tahun 2006 hanya terdistribusi 35.000 wind-up radio sebagai informasi tentang hasil program. Berbeda halnya dengan sasaran yang ada pada tahun 2007 UNDP dan mitranya menyelenggarakan workshop tentang pemerintahan sehingga implementasi yang menjadi pencapaian hingga pertengahan 2007 adalah terdukungnya sistem yang akuntabel dan transparan dalam setiap pemilihan; Terintegrasiya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan; dan

dukungan terhadap sistem peringatan dini terhadap tsunami dan prosedur sistem peringatan dini.

Secara menyeluruh dapat diketahui bahwa kegiatan proyek-proyek yang berada dalam lingkup proyek multi sektor merupakan bagian dari proyek-proyek single sektor. Seperti proyek PPK yang dilaksanakan oleh MDF merupakan proyek untuk mendukung peningkatan perekonomian rakyat di tingkat kecamatan. Proyek ini sangat mendukung pemulihan di bidang perekonomian. Namun berbeda dengan proyek pemulihan perekonomian rakyat pada sektor perikanan, seperti pembangunan PPI di Ulee Lheu oleh Muslim AID yang diperuntukkan khusus untuk peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan di Provinsi NAD khususnya bagi masyarakat yang berada di kecamatan Meuraksa. Dengan demikian peran single sektor terlihat lebih dominan karena peran pada masing-masing proyek lebih spesifik dalam menangani bidang pemulihan.

EVALUASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bab 4

EVALUASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Evaluasi terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Kepulauan Nias merupakan suatu usaha untuk mengukur dan menilai secara objektif atas hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah direncanakan secara sistematis dan objektif dengan menggunakan metode evaluasi yang sesuai. Pelaksanaan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan pada tahapan perencanaan hingga pelaksanaan. Sedangkan fokus evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi ini pada lima (5) aspek yang meliputi ; konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan. Disamping lima aspek tersebut, juga mengkaji manfaat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah berjalan 3 tahun di NAD dan Kepulauan Nias. Kelima aspek ini akan dielaborasi satu per satu baik pada tatanan perencanaan maupun pada tatanan pelaksanaan.

Sebagaimana amanat Perpres Nomor 30 tahun 2005 tentang rencana Induk, terdapat 4 pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi Badan Pelaksana BRR, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah dan Donor/NGO. Evaluasi lebih diprioritaskan pada 2 pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu Badan Pelaksana BRR dan Pemerintah Daerah. Dari 2 lembaga pelaku ini diarahkan untuk melihat kinerja Bapel BRR setelah 3 tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka proses transisi pasca keberadaan BRR pada tahun 2009, serta melihat kontribusi dan kesiapan Pemerintah Daerah dalam keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca keberadaan BRR baik dari aspek kapasitas SDM, anggaran keuangan serta sinkronisasi program dan kegiatan.

4.1 ASPEK KONSISTENSI

Aspek evaluasi awal dalam konsistensi yaitu dengan menganalisis antar dokumen perencanaan dari berbagai lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi. Beberapa dokumen perencanaan yang perlu dilihat dalam evaluasi ini terutama sekali merujuk kepada Rencana Induk.

Pasal 4 Perpres Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk dijelaskan bahwa BRR bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam rencana Induk yang dituangkan dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rencana aksi ini merupakan dokumen perencanaan dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias. Dalam tahap awal, dokumen perencanaan BRR sudah disusun melalui Rencana Strategis (Renstra), namun dokumen ini tidak berfungsi secara baik dari aspek perencanaan maupun aspek legal. Selama tahun 2005-2007, BRR melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi difokuskan pada program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan masyarakat korban tsunami. Hal ini menyebabkan Rencana Induk tidak dijadikan acuan sepenuhnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Setelah 2 tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, BRR dengan melibatkan stakeholders pusat dan pemerintah daerah melaksanakan Mid Term Review (Evaluasi Paruh Waktu) terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mengacu kepada Rencana Induk sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasil MTR tersebut meliputi 4 hal yaitu :

1. Kegiatan Realisasi sasaran program dan kegiatan yang melebihi dari Rencana Induk
2. Realisasi sasaran program dan kegiatan yang lebih rendah dari Rencana Induk
3. Program dan kegiatan yang dilaksanakan di luar dari Rencana Induk
4. Program dan kegiatan dalam Rencana Induk yang tidak dilaksanakan tetapi dilaksanakan oleh pihak lain

Hasil Mid Term Review (Evaluasi Paruh waktu) selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007-2009. Dalam Rencana aksi bertujuan mengakomodasikan kebutuhan riil di lapangan sesuai dengan ketersediaan dana dan sumberdaya manusia serta kelembagaan dan sistem kerja menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku. Penyusunan Rencana Aksi ini dilakukan dalam masa transisi menjelang proses peralihan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dari BRR kepada Pemerintah Daerah dalam rangka keberlanjutan. Keberadaan Rencana Aksi ini merupakan penyempurnaan terhadap Rencana Strategis dan Rencana Aksi yang sudah pernah dilakukan oleh BRR sebelumnya dengan mempertimbangkan dinamika serta kondisi lapangan.

4.1.1. Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa rencana induk sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias, tidak sepenuhnya dapat digunakan sebagai acuan. Secara otomatis mengalami perubahan pada perencanaan di aspek pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi terutama pada target program yang ada dalam rencana induk dengan kebutuhan riil dalam dokumen perencanaan (Rencana Aksi) rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias tahun 2007-2009. Berdasarkan hasil review BPKP tahun 2007 terhadap Rencana Aksi Rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias tahun 2007 - 2009, terdapat 3 hal yaitu :

1. Perlunya penyesuaian terhadap strategi/kebijakan sebagaimana yang diatur dalam Perpres No.30 tahun 2005 tentang Rencana Induk untuk menjadi acuan dalam perubahan Rencana Induk dan penyusunan rencana aksi 2007-2009
2. Kebutuhan riil dan capaian program/kegiatan dalam Rencana Aksi tahun 2005-2007 tidak sepenuhnya sama dengan Rencana Induk sesuai Perpres No. 30 tahun 2005 yang meliputi :
 - a. Kebutuhan Riil lebih besar daripada Rencana Induk
 - b. Kebutuhan Riil sama dengan Rencana Induk
 - c. Kebutuhan Riil lebih kecil daripada Rencana Induk
 - d. Terdapat kegiatan di Rencana Aksi, tetapi tidak tercantum dalam Rencana Induk
3. Dalam rencana aksi tahun 2007-2009, tercantum program/kegiatan berdasarkan kebutuhan riil yang umumnya berbeda dengan Rencana Induk.
4. Sisa Program/kegiatan berdasarkan kebutuhan riil yang belum direalisasikan hingga akhir tahun 2007 merupakan program/kegiatan yang dituangkan dalam tahun 2008 dan 2009.

Terkait dengan bidang pemulihan sosial Budaya, sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Induk terdiri dari 8 bidang yaitu 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Agama, 4) Pemberdayaan Perempuan, 5) Budaya, 6) Sosial, 7) Kependudukan & Keluarga Berencana, 8) Pemuda dan Olahraga. Sedangkan dalam Renstra BRR, bidang kajian sosial budaya sangat disederhanakan menjadi hanya 4 yaitu Agama, Sosial Budaya, Pendidikan (termasuk Iptek), dan Kesehatan (termasuk KB dan Peran Perempuan).

Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2007-2009

- Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan pengurangan resiko bencana misalnya melalui (i) peningkatan pengetahuan, pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam pencegahan dini terhadap bencana gempa bumi dan gelombang tsunami dengan memperhatikan kearifan budaya lokal, (ii) penyelesaian pembangunan pusat peringatan dini (*early warning system*) dan (iii) memanfaatkan teknologi tepat guna dalam mendukung kehidupan sosial, ekonomi, budaya, kesehatan dan pendidikan masyarakat;
- Memfasilitasi sarana dan prasarana agama, adat, dan sosial lainnya di tingkat *mukim* dan *gampong*
- Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan cara mengembangkan dan memfungsikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), *Women Crisis Center*, *Children Center*, reunifikasi keluarga, bantuan hukum, dan dukungan untuk pengasuhan anak;
- Meningkatkan mutu kehidupan adat, tradisi, dan kegiatan seni budaya serta pelestarian warisan budaya masyarakat dengan cara (i) memetakan kembali keberadaan nilai-nilai budaya, warisan seni dan budaya masyarakat yang perlu dilestarikan serta (ii) membangun kembali atau memperbaiki atau memugar sarana dan prasarana serta warisan budaya yang rusak;
- Peningkatan peran pemuda dan budaya olah raga dengan menyediakan fasilitas kepemudaan dan

sumber: Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2007-2009, Juni 2007

Pada dasarnya aspek perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan sosial budaya, mengikuti kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang telah ditetapkan dalam Perpres No. 30 tahun 2005. Perbedaan sifatnya lebih pada aspek taktis, karena perlu adanya penyesuaian terhadap kondisi wilayah dan masyarakat sebagai penyesuaian terhadap kondisi wilayah dan masyarakat pasca bencana gempa dan tsunami dari masing-masing.

Terdapat beberapa stakeholders yang terlibat langsung dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Kepulauan Nias pasca bencana gempa dan tsunami selain Badan rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), diantaranya kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga donor dan lembaga lainnya. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) menjadikan Rencana Induk sebagai dokumen perencanaan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diarahkan pada membangun kembali masyarakat melalui penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan merehabilitasi sarana agama, pemberdayaan perempuan, peningkatan kembali kualitas adat, pemuda, dan budaya olahraga.

Program Jangka Menengah Provinsi NAD 2007-2112

Pendidikan

- Program pendidikan anak usia dini melalui pengadaan alat praktek, dan pengembangan kurikulum
- Program pendidikan non formal
- Program manajemen pelayanan pendidikan melalui pelaksanaan evaluasi kinerja, pelatihan, dan seminar

Kesehatan

- Program Perbaikan Gizi Masyarakat mencakup penanggulangan KEP, Anemia dan Gizi Besi.
- Program pengembangan lingkungan sehat
- Program peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak

Sosial

- Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Pembinaan Anak Terlantar
- Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Peranan Perempuan dan Anak

- Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan memfasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
- Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT

Budaya

- Mendorong organisasi sanggar budaya
- Penghargaan bagi budayawan yang berdedikasi

Pemuda dan Olahraga

- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program Jangka Menengah Kepulauan Nias 2007-2112

Pendidikan

- Mendekatkan pelayanan pendidikan khususnya pembangunan gedung baru SLTP dan SLTA dengan memperlonggar persyaratan teknis
- Memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan pendidikan khususnya pendidikan luar sekolah
- Membebaskan biaya pendidikan di tingkat Sekolah Dasar

Kesehatan

- Mempercepat pengembangan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan khususnya di pusat-pusat wilayah pengembangan
- Mempercepat revitalisasi posyandu
- Membebaskan keluarga miskin dari biaya pengobatan di Puskesmas dan RSU

Sosial

- Menjamin ketersediaan panti bagi anak yatim
- Mendorong partisipasi masyarakat

Peranan Perempuan dan Anak

- Mendorong GOW untuk mampu merealisasikan program kerjanya

Pemuda dan Olahraga

Pertukaran pemuda dan pelajar

Dalam implementasi program dan kegiatan di lapangan secara umum juga telah searah dengan Rencana Rencana Pembangunan Manengah Daerah (RPJMD) di provinsi NAD dan kepulauan Nias provinsi Sumatera Utara dan saling melengkapi. Program pendidikan formal yang tidak menjadi program utama di bidang pendidikan oleh BRR dilengkapi dalam RPJMD provinsi NAD, sehingga proses percepatan pemulihan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka meningkatkan proses

belajar mengajar pasca bencana gempa dan tsunami diharapkan bisa cepat pulih. Begitu juga program pengembangan sarana kesehatan di wilayah pengembangan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara merupakan kegiatan yang dilengkapi dalam RPJMD yang tidak ada dalam dokumen perencanaan BRR maupun dalam rencana induk. Dengan demikian dokumen perencanaan bidang sosial budaya saling melengkapi dan diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan keberlanjutan pasca BRR di NAD dan Nias.

Pemantauan konsistensi terhadap dokumen perencanaan BRR dilihat dari dokumen rencana induk dengan kebutuhan riil sebagai rencana pembangunan yang merupakan hasil verifikasi sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan pasca bencana tsunami.

4.1.1.1. Bidang Perumahan dan Permukiman

4.1.1.1.1 Perumahan dan Permukiman

Evaluasi konsistensi antar dokumen perencanaan bidang perumahan dan permukiman, tata ruang, pertanahan, dan lingkungan hidup mengacu pada Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, yang didasarkan pada Perpres No. 30 Tahun 2005, dan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2007-2009, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NAD dan RPJMD Kab.Nias dan Kab.Nias Selatan.

Kegiatan perumahan dan permukiman setelah dilakukan verifikasi lapangan melalui berbagai metode penggalangan partisipasi masyarakat, telah melahirkan jumlah kebutuhan pembangunan rumah baru (yang jumlahnya lebih besar dari sasaran Rencana Induk), rumah yang perlu direhabilitasi (yang jumlahnya lebih kecil dari sasaran Rencana Induk), dan jenis rumah yang tidak tertuang dalam Rencana Induk; berupa program rumah bagi penyewa (renters) sebagai hasil verifikasi penghunian Huntara dan adanya program rumah upgrading (sebagai akibat tuntutan masyarakat). Dengan demikian, modifikasi terhadap kebutuhan riil ini disesuaikan dengan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan. Perencanaan untuk tahun 2007-2009 yang tertuang di dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias meski berbeda dalam jumlah volume kegiatannya dengan yang tercantum di Rencana Induk, tetapi dikatakan tetap mengacu kepada Rencana Induk. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4 - 1
Kebutuhan Riil Bidang Perumahan dan Permukiman NAD - Nias Tahun 2005-2009 Berdasarkan Rencana Aksi NAD-Nias

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Komitmen BRR dan Donor Hingga Nov 2007
1.	Rumah Baru (Bangun Baru)	Unit	90.158	162.341	
2.	Perbaikan Rumah (Perbaikan)	Unit	155.838	101.084	
	Total Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	Unit	245.996	263.425	152.526
3.	Prasarana Dasar	Pkt	420	**	
-	Pembangunan baru PSD	Pkt	*	***	
-	Perbaikan PSD	Pkt	*	***	
-	Penyusunan DED kawasan	Pkt	*	***	
-	Penyusunan Rencana Detail Induk Sistem PSD	Pkt	*	***	
-	Pembangunan PSD berbasis kecamatan	Pkt	*	***	
4.	Rumah bagi penyewa (BSBT-Bantuan Sosial Bertempat Tinggal/ Renters)	Unit	*	8.898	

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

*** : Tergabung dalam Program Prasarana Dasar

Total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk perumahan menurut Rencana Induk berjumlah 245.996 unit rumah. Sementara hasil need assessment menunjukkan jumlah yang berbeda, yaitu 263.425 unit. Untuk masing-masing kategori juga terdapat penyesuaian, rekonstruksi rumah atau bangun baru mengalami peningkatan sebesar 80,06 %, dan untuk perbaikan rumah atau rehabilitasi justru mengalami penurunan sebesar 35 % jika dibandingkan dengan Rencana Induk. Untuk lebih jelasnya digambarkan berikut.

Program Jangka Menengah Bidang Perumahan dan Permukiman

RPJMD Provinsi NAD Tahun 2007-2012

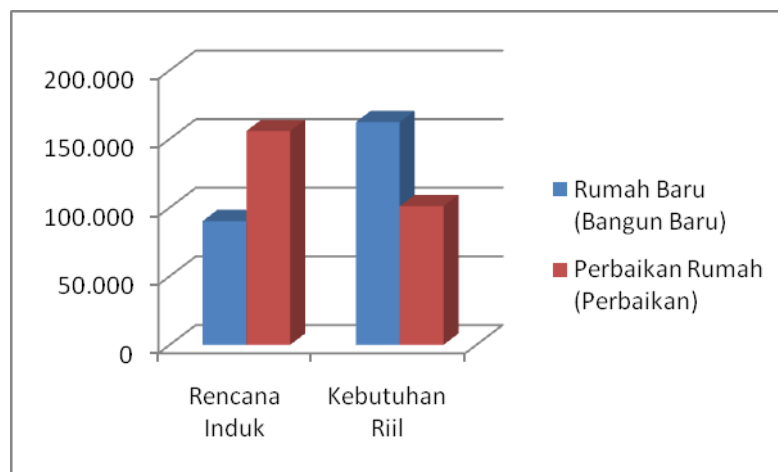
- Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan pada kawasan terisolir serta infrastruktur perdesaan
- Pengembangan Rumah Sehat Sederhana
- Pembangunan perumahan bagi masyarakat korban tsunami
- Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
- Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong di areal permukiman
- Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, air minum, dan air limbah
- Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

RPJMD Kab.Nias Tahun 2006-2011

- Pembangunan sarana air minum dan drainase
- Penyediaan rumah keluarga miskin yang belum tertangani BRR, dengan bekerja sama Perumnas

RPJMD Kab.Nias Selatan 2006-2011 tidak mencantumkan program untuk perumahan dan permukiman

Grafik 4 - 1
Perbandingan Rencana Induk dan Kebutuhan Riil
Bidang Perumahan



Sumber: Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2007

Hal yang serupa yang terkait dengan *beneficiaries/client* atau pemanfaat yang berbeda juga terjadi pada berbagai bidang lainnya. Pada umumnya terkait dengan permintaan masyarakat dan Pemda yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas-Dinas atau unsur Pemerintah terkait. Meskipun sebagian besar permintaan atau kebutuhan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan fisik, karena aspek ini adalah yang paling mudah dan nyata. Karena permintaan lebih besar dari penyediaan alokasi anggaran,

maka yang merupakan masalah dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini adalah penetapan skala prioritas. Selain hal tersebut adalah bagaimana menemukan aspek-aspek yang paling esensial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga ada keseimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik, yang menghasilkan manfaat optimal bagi kehidupan masyarakat, khususnya untuk bangkit dari masalah akibat bencana dan meningkatkan kehidupannya.

Pada kegiatan jangka menengah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NAD, khusus pada bidang perumahan dan permukiman, program yang akan dilakukan dalam kurun waktu tahun 2007-2012 sebagian besar fokus pada penataan lingkungan permukiman melalui penyediaan berbagai prasarana dasar (lihat pada box). Dari segi dokumen perencanaan, hal ini melengkapi perencanaan yang disusun oleh Bapel BRR.

4.1.1.1.2 Tata Ruang

Berdasarkan Rencana Induk, kegiatan penyusunan Tata Ruang perlu diikuti oleh berbagai kegiatan lain sebagai pendukung dan kelanjutannya. Selama 2005-2007, sebagian besar upaya tindak lanjut belum selesai dilaksanakan. Rencana Tata Ruang baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten diharapkan akan menjadi acuan bagi seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang seharusnya menjadi tugas Pemda, namun karena dalam kondisi pasca bencana yang serba darurat, di mana semua bidang pemulihan harus segera dapat dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan mendasar, maka semua kegiatan termasuk perencanaan tata ruang di semua tingkatan dilakukan secara paralel dengan kegiatan fisik itu sendiri. Hingga saat ini, beberapa dokumen rencana tata ruang atau RTRW Kab/Kota masih dalam proses, sebagaimana juga tercantum dalam RPJMD (lihat pada box).

Program Jangka Menengah Bidang Tata Ruang

RPJMD Provinsi NAD Tahun 2007-2012

- Penyusunan Revisi Perda RTRWP NAD
- Revisi RTRW Provinsi
- Revisi RTRW Kab/Kota

RPJMD Kab.Nias Tahun 2006-2011

- Penyusunan RUTR-IKK Kecamatan yang baru

RPJMD Kab.Nias Selatan 2006-2011

- Penyusunan rencana kesepakatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan, dan evaluasi
- Penyusunan arahan pengembangan kawasan perbatasan

Tabel 4 - 2
Kebutuhan Riil Bidang Tata Ruang NAD - Nias Tahun 2005-2009
Berdasarkan Rencana Aksi NAD-Nias

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009
1.	Penyusunan Rencana Tata Ruang			
a	Penyusunan RTRW Provinsi NAD	propinsi	1	1
b	Penyusunan dan Revisi RTRW Kabupaten/Kota (NAD dan Nias)	Kabupaten/Kota	13	14
c	Perencanaan RDTR Kecamatan dan Kawasan Kota	Kota	8	27
d	RTBL/RTRK	Kabupaten/Kota	13	**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009
	i. Penyusunan Rencana <i>Tsunami Heritage and Living Museum</i>		*	1
	ii. Penyusunan Rencana <i>Water front City</i> (Banda Aceh)		*	1
	iii. Perencanaan Kawasan lainnya		*	10
2.	Penyusunan SOP Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Buku Pedoman)	Propinsi	1	2
		Kabupaten/Kota	13	
3.	Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang	Propinsi	1	2
		Kabupaten/Kota	13	
4.	Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Program Integrasi Sektoral)	Propinsi	1	1
		Kabupaten/Kota	13	
5.	Pemantapan Kelembagaan Penataan Ruang	Propinsi	1	1
		Kabupaten/Kota	13	
6.	Rencana Tindak Manajemen Bencana	Kabupaten/Kota	13	-
7.	Perencanaan <i>Bottom Up Planning</i>	Unit	*	**
a	Kecamatan <i>Action Plan</i>	Unit	*	148
b	<i>Village Planning</i>	Unit	*	812
8.	Studi	Unit	*	6

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

*** : Tergabung dalam Program/Kegiatan Penyusunan RTBL/RTRK

Village planning merupakan kegiatan penunjang untuk perumahan dan permukiman, sehingga akan terbangun sebuah pemukiman yang terencana dan tertata dengan baik sesuai dengan harapan pemukimnya, karena direncanakan secara bersama-sama dengan masyarakat pemukim di kampung tersebut. Meskipun *village planning* tidak secara eksplisit tertuang dalam Rencana Induk namun pendekatan pembangunan yang dilakukan adalah *community based approach*. Oleh karena itu, dalam hal perencanaan pun sebanyak mungkin menyerap aspirasi dari masyarakat korban itu sendiri yang disertai dengan petunjuk mengenai pengurangan resiko bencana dan wawasan lingkungan.

Untuk kegiatan yang tidak terdapat di Rencana Induk tetapi kemudian muncul kegiatan baru ketika dilakukan *need assessment*, seperti Penyusunan Rencana Water Front City Banda Aceh, tidak serta merta menunjukkan ketidak konsistenan antara dokumen perencanaan yang ada. Hasil kebutuhan riil menunjukkan adanya program maupun kegiatan yang diperlukan, tetapi belum diakomodasikan dalam Rencana Induk. Sehingga dapat dikatakan hal ini justru melengkapi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

4.1.1.1.3 Pertanahan

Aspek pertanahan merupakan kegiatan yang menentukan dalam kelancaran dan keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan khususnya dan pembangunan NAD -Nias secara umum.

Kegiatan pemetaan dan administrasi pertanahan dimaksudkan untuk:

1. Menyiapkan infrastruktur pertanahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
2. Mewujudkan rekonstruksi pemilikan hak atas tanah.
3. Menyediakan lahan yang memenuhi syarat kelayakan untuk resettlement (program relokasi) korban tsunami serta kebutuhan rehabilitasi-rekonstruksi lainnya.
4. Meningkatkan kapasitas pelayanan, mengembangkan sistem penanganan sengketa serta mengembangkan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan

Berdasarkan kebutuhan riil bidang pertanahan dari Rencana Aksi NAD-Nias Tahun 2007-2009, secara keseluruhan hanya 1 (satu) kegiatan yang mengalami penyesuaian kebutuhan, yaitu sertifikat tanah. Hal ini dikarenakan masalah bukti hukum kepemilikan atas tanah merupakan persoalan yang krusial di bidang pertanahan, sehingga menjadi prioritas pemulihan. Kegiatan-kegiatan lain jika belum dapat dilaksanakan dalam rentang waktu hingga berakhirnya masa tugas Bapel RR NAD-Nias pada April tahun 2009, dimungkinkan untuk dilanjutkan dalam jangka menengah dan panjang oleh Pemerintah Daerah. Dokumen RPJMD Provinsi NAD, Kab.Nias, dan Kab.Nias Selatan juga belum mencantumkan program untuk bidang pertanahan, dengan demikian, kegiatan rencana induk yang belum terlaksana oleh Bapel RR dapat dipandang sebagai rencana jangka menengah.

Tabel 4 – 3
Kebutuhan Riil Bidang Pertanahan NAD – Nias Tahun 2005-2009
Berdasarkan Rencana Aksi NAD-Nias

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009
1	Pemulihan pelayanan pertanahan 2005-2006	Propinsi	1	**
		Kab/Kota	13	**
2	Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan pengelolaan dan pelayanan pertanahan 2005-2008	Propinsi	1	**
		Kab./Kota	13	**
3	Pembangunan fisik kadastral 2005-2006	Propinsi	1	**
		Kab/Kota	13	**
4	Penyusunan rencana tata guna tanah 2005	Propinsi	1	**
		Kab/Kota	13	**
5	Pengadaan peralatan komputerisasi, training, serta pembangunan <i>database digital</i> 2005-2006	Propinsi	1	**
		Kab/Kota	13	**
6	Pembuatan sertifikat pengganti 2005-2006	Propinsi	1	400.000 Bidang Sertifikat
		Kab/Kota	13	
7	Konsolidasi tanah 2005-2009	Propinsi	1	**
		Kab/Kota	13	**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009
8	Penanganan sengketa pertanahan 2005-2008	Propinsi	1	**
		Kab./Kota	13	**
9	Penyusunan naskah perundang-undangan dan penyuluhan	Propinsi	1	**
		Kab/Kota	13	**

Sumber : Bapel BRR, 2007
Ket **) : Data belum tersedia

4.1.1.1.4 Lingkungan Hidup

Sub bidang ini merupakan lintas sektoral sehingga beberapa program dan kegiatannya telah diakomodasi dalam program kegiatan bidang-bidang lainnya, seperti bidang perumahan dan permukiman, bidang infrastruktur dan bidang ekonomi.

Untuk program jangka menengah Pemda bidang lingkungan hidup, sebagian besar fokus pada keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup, mulai dari aspek legal, perlindungan SDA, dan sebagainya. *(selengkapnya pada box).*

Berdasarkan Rencana Induk telah ditetapkan 4 kebijakan utama yang menjadi acuan dari program rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, yaitu: 1) Memulihkan kembali daya dukung lingkungan dan mengantisipasi ancaman bencana alam, 2) Memulihkan kembali kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya alam, 3) Melibatkan masyarakat dan menggunakan pranata sosial dan budaya lokal dalam menghadapi bencana dan kegiatan pembangunan dan 4) memulihkan kembali sistem kelembagaan pemerintahan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Program Jangka Menengah Bidang Lingkungan Hidup

RPJMD Provinsi NAD Tahun 2007-2012

- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengkajian dampak lingkungan
- Perlindungan dan konservasi SDA

RPJMD Kab.Nias Tahun 2006-2011

- Pencegahan kepunahan biota langka
- Pembangunan berkelanjutan

RPJMD Kab.Nias Selatan 2006-2011

- Pengendalian kawasan ekosistem rawan kerusakan
- Tersusunnya Perda Kab.Nias Selatan tentang pengelolaan lingkungan hidup
- Konservasi dan pemanfaatan lahan kritis
- Pengelolaan SDA berkelanjutan

Tabel 4 - 4
Kebijakan dan Kegiatan Pokok Pemulihan
Lingkungan Hidup dan SDA dalam Rencana Induk

No	KEBIJAKAN	No	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK
1	Pemulihan kembali daya dukung lingkungan dan antisipasi ancaman	1	Mengamankan dan menginformasikan wilayah yang terkena pencemaran dan bahaya kegempaan	Survei Berkala parameter pencemar, Penetapan status keamanan lingkungan dari suatu wilayah, dan Sosialisasi kualitas lingkungan dan ancaman bahaya gempa

No	KEBIJAKAN	No	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK
	bencana alam	2	Melakukan pembersihan wilayah bencana	Pembuangan limbah padat tsunami, Penataan kembali sistem persampahan kota, Menata ulang sistem drainase perkotaan, Membangun sistem pengolahan limbah cair.
		3	Merehabilitasi tanah	Penelitian kualitas tanah, termasuk kegiatan survei, pengklasifikasian status tanah, evaluasi dan rekomendasi penanganan serta rehabilitasi tanah.
		4	Merehabilitasi terumbu karang	Pendataan kembali terumbu karang, penanaman kembali terumbu karang dan penyusunan mekanisme kelembagaan
		5	Merehabilitasi dan membangun kawasan pesisir khususnya pada zona penyangga (green belt), kawasan tambak dan hutan sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan karakter pantai	Rehabilitasi Mangrove dan Rehabilitasi Vegetasi Pelindung kawasan pantai lainnya; rehabilitasi kawasan tambak; dan pembangunan hutan kota
		6	Mengamankan fungsi kawasan lindung eksisting	Mengamankan Taman Nasional Lueser dari Pembangunan R3WANS dan Mengamankan fungsi kawasan lindung lainnya, yang berada di NAD dan Nias, maupun provinsi lainnya yang berdekatan
		7	Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pengelolaan lahan melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), melindungi dan mengembangkan sumber-sumber air, pengelolaan vegetasi untuk perlindungan tanah dan tata air dan pembinaan kesadaran dan kemampuan sumber daya manusia.

No	KEBIJAKAN	No	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK
2	Pemulihan kembali kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya alam	1	Memulihkan dan meningkatkan kegiatan pertanian	Rehabilitasi/ pembangunan saluran air dan irigasi tersier dan kuarter (menurut skema dan tipe); rehabilitasi jalan usaha tani/ produksi; pembangunan unit pembibitan/ pembenihan; pembangunan fasilitas pemasaran hasil pertanian; pembangunan pos kesehatan hewan (Poskeswan); penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna; Bantuan sarana pertanian dalam rangka reinisiasi produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; pengembangan pertanian terpadu, penyediaan modal kerja untuk usaha pertanian; bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan bantuan kios sarana produksi serta peningkatan usaha ekonomi masyarakat khususnya di daerah penyangga kawasan konservasi (taman wisata, cagar alam dan suaka margasatwa).
		2	Memulihkan dan meningkatkan kegiatan perikanan	Mengembalikan kegiatan perikanan tangkap, Merehabilitasi lahan tambak masyarakat dan perikanan budidaya lainnya dan fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.
		3	Menyediakan material dasar pembangunan dari sumber daya alam yang tidak mengancam kelestarian lingkungan	Penyediaan kayu dan Penyediaan bahan dan material bangunan konstruksi lainnya, Pengembangan alternatif bahan bangunan dari kayu kelapa, Pembinaan dan pengendalian perusahaan hutan serta pembinaan dan pengendalian pemanfaatan hutan produksi NAD dan Sumut.
3	Pelibatan masyarakat dan penggunaan pranata sosial dan budaya lokal dalam menghadapi bencana dan kegiatan pembangunan	1	Membangun Sistem Peringatan Dini secara terintegrasi	Menyusun Standar, operasi dan prosedur (SOP) untuk respon darurat bencana, Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi pemerintah, dan Membangun prasarana dan sarana sistem peringatan dini
		2	Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana	Memanfaatkan nilai kearifan lokal sebagai bagian yang melengkapi sistem peringatan dini, Memberdayakan peran masyarakat dalam mekanisme penanganan bencana, Mengembangkan Pendidikan tentang kebencanaan
		3	Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bidang SDA dan LH	Memberdayakan pranata sosial dan lembaga adat yang ada dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta membangun mekanisme pengawasan sesuai dengan nilai sosial, budaya dan aspirasi masyarakat setempat

No	KEBIJAKAN	No	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK
4	Pemulihan kembali sistem kelembagaan pemerintahan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	1	Melengkapi dan mengisi kembali formasi pegawai (tenaga ahli dan tenaga pendukung)	Melakukan kajian kelembagaan yang responsif terhadap visi pembangunan di masa yang akan datang, melakukan rekrutmen pegawai baru dan meningkatkan kapasitas aparat di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
		2	Memulihkan sarana dan prasarana pemerintahan bidang sumber daya alam dan lingkungan daerah	Melakukan pembangunan dan rehabilitasi kantor dan sarana pendukung kegiatan operasional instansi bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah.

Sumber : Lampiran III Rencana Induk

4.1.1.2. Bidang Infrastruktur

Konsistensi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dapat dilihat dari kesinambungan antara perencanaan terhadap kebijakan dan acuan perencanaan. Hirarki perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2005, tentang Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Sehingga setiap dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, RPJM Daerah, RKPD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Renja BRR Sasaran tahun 2008

- Terselesaikannya pembangunan 12.000 rumah baru, [runway bandara Sultan Iskandar Muda](#), [4 pelabuhan laut \(Lhoksemawe, Meulaboh, Calang, dan Langsa\)](#);
- Terlatihnya 42.000 guru, 38 Sekolah, 46 unit layanan kesehatan, 5 unit Puskesmas, 59 unit tempat ibadah di 23 Kabupaten/Kota di NAD - Nias;
- 529 unit lembaga keuangan mikro dan mikro, 42 unit usaha industri manufaktur, 12 unit kantor pelayanan investasi satu atap, 54 unit prasarana perikanan, 23 kabupaten/kota NAD-Nias;
- [Lima unit peralatan mitigasi bencana](#), sarana dan prasarana sistem kehumasan di 6 kantor pemda dan 10 forum komunikasi, 6 unit gedung pemerintah, 26 gedung mukim, 5 rumah negara;
- Enam Rencana Induk (Master Plan) Wilayah, [3 DED \(detailed engineering design\)](#), [sistem drainase di 250 kawasan](#), pengembangan 6 wilayah kerja BRR di NAD-Nias;
- Tersusunnya skema pemodalan kepada 350 Koperasi/UKM di daerah pascabencana

Secara umum, program kegiatan infrastruktur dalam Rencana Induk telah sangat rinci. Dokumen rencana kerja yang disusun BRR tahun 2008 merupakan bagian dari penajaman Rencana Induk, namun sebagian besar masih bersifat makro dan belum menggambarkan perencanaan kegiatan per bidang secara rinci seperti yang terdapat di Rencana Induk. Rencana Aksi BRR juga telah disusun akan tetapi masih direview kembali dan belum dapat dijadikan acuan karena belum ada legal policy yang menguatkan untuk mendukung perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sampai akhir masa mandat BRR.

RPJMD di kabupaten Nias 2006-2011

1. Pekerjaan Umum
 - a. Peningkatan jalan dan jembatan dari ibukota Kabupaten ke ibukota Kecamatan dan antar ibukota Kecamatan
 - b. Pembangunan jalan desa yang menghubungkan kota kecamatan, antara lain:
 - i. Desa Dekha -Lahemo ke Kota Kecamatan Lolofitu Moi melalui Tuhemberua -Lewa-lewa
 - ii. Desa Sihare'o ke kecamatan Ma'u
 - c. Membangun jaringan listrik
 - d. Membangun irigasi, sungai, pengendalian banjir
2. Perhubungan
 - a. Menyediakan sarana perhubungan ke pulau-pulau kecil yang potensial
 - b. Mendorong peningkatan pelayanan perhubungan laut dan udara ke dan dari Kabupaten Nias
 - c. Rehabilitasi bandara dan pelabuhan
3. Tidak mengeluarkan sertifikat hak milik pada kawasan konservasi seperti sempadan sungai, pantai dan daerah perlindungan lainnya
4. Komunikasi dan Informasi
 - a. Mendorong pengembangan jaringan pelayanan dan kualitas layanan para penyedia jasa layanan telekomunikasi
 - b. Memastikan adanya sarana telekomunikasi dari pemerintah kabupaten ke kecamatan dan dari setiap kecamatan ke desa-desa di wilayahnya.
 - c. Pengadaan peralatan komunikasi sistem radio

RPJMD Provinsi NAD-Nias 2007 - 2012 bidang infrastruktur

Jalan dan jembatan

- Perencanaan dan pengawasan teknis jalan/jembatan di Provinsi NAD
- Pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi NAD
- Rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan di Provinsi NAD
- Penanganan jalan perkotaan di Provinsi NAD

Perhubungan Udara

Pembangunan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan di antaranya pengembangan fasilitas keselamatan penerbangan di :

- Bandara SIM,
- Cut Nyak Dien-Meulaboh,
- T.Cut Ali-Tapaktuan,
- Lasikin-Sinabang,
- Leuser-Kutacane,
- Maimun Saleh-Sabang,
- Rembele-Takengon,
- Kuala batee- Blang Pidie

Perhubungan Laut

- Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan laut di: Pelabuhan Malahayati, Sabang, Meulaboh, Calang, Sinabang
- Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan melalui pembangunan pelabuhan penyeberangan lamteng, dermaga balohan, fasilitas dermaga Ulee Lheue, Meulaboh, Sinabang, dan Calang

Perhubungan Darat

- Pembangunan gedung terminal tipe A Banda Aceh
- Peningkatan terminal Tipe C menjadi Tipe A di Meulaboh
- Pembangunan Kantor Damri di Meulaboh
- Pembangunan sarana prasarana pos dan stasiun telekomunikasi serta penyediaan radio dinas perhubungan

Energi dan Listrik

Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan melalui pengembangan listrik perdesaan, pembangunan PLTMH, pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Sumber Daya Air

- Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
- Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- Pengendalian banjir pada daerah tangkapan sungai dan badan-badan sungai
- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Komunikasi dan informasi

- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi termasuk sumber dayanya
- Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat, melalui media pers

Peran antar BRR, Kementerian/ Lembaga, Donor/NGO dan Pemerintah Daerah NAD dalam penyusunan dokumen perencanaan infrastruktur dilakukan dengan karakteristik dan proses berbeda-beda untuk setiap regional atau daerah. Dokumen RPJMD atau RKPD Pemerintah daerah NAD dan Kepulauan Nias lebih menitikberatkan pada pembangunan dan pemulihan infrastruktur. Sedangkan rencana kerja BRR lebih mengacu kepada rencana induk.

Penerapan kebijakan tersebut di dalam proses penyusunan secara umum telah sesuai prioritas pembangunan, hal ini dapat dilihat dari beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota "besar" yang telah berangsur pulih dan mulai mendukung pelaksanaan kegiatan program yang dilakukan BRR maupun Donor/NGO secara aktif melalui proses perencanaan kegiatan. Sehingga masukan dan arahan perencanaan BRR dapat diselaraskan dengan RPJM daerah atau sebaliknya. Namun, keterlibatan pemerintah daerah di sebagian kabupaten/kota "kecil/ terpencil" dalam perencanaan masih terbatas akibat keterbatasan akses komunikasi dan informasi.

RKPD dan rencana induk secara umum telah terkait, akibat keterbatasan anggaran maka sebagian besar kegiatan rehabilitasi dan

RPJMD di kabupaten Nias Selatan 2006-2011

1. Prasarana Jalan
 - a. Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas pelayanan prasarana jalan
 - b. Meningkatkan aksesibilitas wilayah pedesaan, wilayah perbatasan maupun kepulauan
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana alat-alat berat
 - d. Pembangunan jalan desa yang menghubungkan kota kecamatan, antara lain:
 - o □Desa Bawolatow (Kecamatan Lahusa) ke Desa Golambanua I (Kecamatan Lahusa)
 - o □Desa Golambanua I (Kecamatan Lahusa) ke Desa Hilinawalo (Kecamatan Teluk Dalam)
2. Lalu lintas Angkutan Jalan
 - a. Meningkatkan keterpaduan antar kota
 - b. Meningkatkan keterjangkauan pelayanan transportasi umum
 - c. Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan darat
 - d. Meningkatkan kualitas angkutan jalan darat
3. Transportasi Laut
 - a. Meningkatkan pelayanan angkutan laut
 - b. Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan dan pengelolaan transportasi laut
 - c. Pembangunan prasarana transportasi laut
4. Transportasi Udara (bandara)
 - a. Komunikasi dan Informasi
 - b. Pengadaan peralatan komunikasi sistem radio

rekonstruksi dilakukan melalui anggaran/kegiatan BRR maupun lembaga donor/NGO.

Pada umumnya perencanaan kegiatan infrastruktur BRR telah mengacu kepada Rencana Induk dan RPJM daerah, akan tetapi amandemen terhadap perencanaan berdasarkan dokumen acuan (Rencana Induk) juga dilakukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Perubahan tersebut merupakan kebijakan yang diambil berdasarkan hasil assessment dan verifikasi kebutuhan di lapangan.

Beberapa hal yang juga menjadi kendala dalam konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan infrastruktur di lapangan (sumber: Mid Term Review, Juli 2007 dan hasil analisis tim P3B, Desember 2007) antara lain :

- (1) Rencana Induk belum tersosialisasikan dengan baik di lingkungan BRR, terutama di level satker.
- (2) Penetapan tujuan dan sasaran program kegiatan yang berjangka menengah yang terkendala dengan keterbatasan mandat BRR
- (3) Ketajaman data/informasi terhadap realisasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dan memprediksi program tahun berjalan (karena akhir penetapan perencanaan, minimal dilakukan program 3 bulan sebelum tahun program berjalan berakhir).
- (4) Kelengkapan/dukungan teknis yang memadai, seperti adanya Rencana Teknis Detil (DED) dan atau dukungan studi kelayakan dan atau dokumen pembenaran lainnya (antara lain pemenuhan kebutuhan masyarakat yang esensial).
- (5) Keterlambatan proses pendanaan sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan serta perencanaan kegiatan (baru/lanjutan) berikutnya.
- (6) Komitmen dari pelaku di lapangan (kontraktor) yang tidak memenuhi kriteria teknis yang disyaratkan.
- (7) Sarana dan prasarana pendukung suatu proses perencanaan yang baik dan efektif belum dapat sepenuhnya tersedia, seperti database, perpetaan, perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) pendukung perencanaan seperti GIS dan lainnya.

Beberapa strategi penataan ruang wilayah Kepulauan Nias pasca bencana (Berdasarkan draft RTRW Kabupaten Nias 2006 - 2016) adalah :

1. Mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Nias sesuai dengan arahan rencana tata ruang dan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD - Nias;
2. Membangun kembali wilayah, kota, kawasan dan lingkungan permukiman yang rusak akibat bencana gempa dan tsunami sehingga masyarakat dapat segera melakukan aktivitasnya dalam kondisi yang lebih baik dan aman dari sebelum bencana;
3. Penataan kembali wilayah Nias harus mengikuti kaidah-kaidah dan norma-norma perencanaan yang tepat dengan memasukkan aspek mitigasi terhadap bencana alam dalam rangka meminimalkan resiko dikemudian hari dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan implementasinya;
4. Pengembangan Nias diarahkan untuk menjaga keseimbangan, mendorong perkembangan dan pemerataan antar wilayah serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dengan memperhatikan aspek lokal terutama keterkaitannya dengan rawan bencana dengan kawasan konservasi dan penyangga yang berfungsi lindung;
5. Rencana pemanfaatan ruang Nias ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan

Pemantauan konsistensi terhadap beberapa dokumen perencanaan infrastruktur BRR adalah sebagai berikut.

(1) Jalan dan Transportasi

Pada kegiatan jalan/jembatan, pada umumnya sejalan dengan rencana induk, meskipun sasaran yang dituju terdapat perbedaan. Sejauh ini perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan melibatkan adanya kerjasama Bapel dengan pemerintah daerah (pada berbagai ruas jalan, terutama jalan Kabupaten), Kementerian/Lembaga (di lintas Timur) dan Donor/NGO (lintas Barat). Sehingga tumpang tindih kegiatan dapat dihindari. Adanya kerjasama BRR dan Donor/NGO dengan pemerintah daerah setempat, dalam upaya perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur terutama jalan dan jembatan yang telah terbangun menjadi sarana untuk mensinergikan kegiatan di daerah.

Tabel 4 - 51
Kebutuhan Riil Sub Sektor Jalan NAD-Nias tahun 2005 - 2009 berdasarkan Rencana Aksi

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007
1	Lintas Timur NAD (Jalan Nasional)	km	257	80	80
2	Lintas Barat NAD (Jalan Nasional)	km	441	702	667
3	Lintas Tengah NAD (Jalan Nasional)	km	341	191	27
4	Lintas Lainnya (Jalan Propinsi)	km	1.455	313	148
5	Jalan Propinsi P. Nias	km	256	469	250
6	Jalan Kabupaten NAD dan Nias	km	1.900	3.511	942
TOTAL		km	4.650	5.266	2.114

Sumber : Rencana Induk dan data Deputi Infrastruktur Oktober 2007

Dari tabel diatas, rincian detail terhadap informasi rehabilitasi jembatan tidak dapat terlihat secara rinci dalam rencana induk maupun realisasi kerja BRR, demikian juga terhadap informasi dalam rencana kerja Pemda. Satuan paket dalam rencana induk menjelaskan bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan bukan hanya jalan tapi juga termasuk jembatan di ruas tersebut. Oleh karena itu, penilaian terhadap konsistensi pelaksanaan jembatan belum dapat dilakukan secara maksimal.

Peningkatan dan pemeliharaan jalan menjadi prioritas dari perencanaan BRR, Pemda dan Donor/NGO. Kebutuhan riil rehabilitasi dan rekonstruksi jalan lintas Barat NAD dan jalan di Kepulauan Nias melampaui jumlah perencanaan dari Rencana Induk. Sedangkan jalan di ruas yang lain pada umumnya jumlah kebutuhan riil menjadi lebih rendah daripada jumlah dalam rencana induk. Perubahan ini sesuai dengan hasil dari assessment BRR di lapangan. Namun, ruas-ruas jalan yang ditambah atau dikurangi tidak dapat ditelusuri secara lebih rinci akibat, keterbatasan penyajian informasi dari dokumen perencanaan yang ada.

Komitmen lembaga Donor/NGO cukup besar, USAID (United States Agency for International Development) menjadi donor dengan jumlah komitmen terbesar dalam kegiatan infrastruktur. Kegiatan yang dilakukan meliputi hampir seluruh kegiatan infrastruktur publik, terutama rehabilitasi dan rekonstruksi jalan. Sebagian besar perencanaan kegiatan yang dilakukan USAID sebagai salah satu donor telah mengacu pada dokumen perencanaan BRR dan rencana induk, namun masih terdapat perencanaan kegiatan lebih mengacu terhadap hasil assessment di lapangan. Hal ini juga terjadi pada sebagian besar donor/NGO yang terlibat di lapangan.

Kegiatan transportasi dan perhubungan merupakan salah satu proyek pilar utama yang direncanakan pemanfaatannya untuk mendukung kelancaran pembangunan dan menopang perkembangan perekonomian. Transportasi laut dan udara bersifat sangat mendesak penyelesaiannya di daerah kepulauan sehingga pada umumnya sejalan dengan rencana induk, bahkan terdapat penambahan dalam unit maupun kapasitasnya, seperti pelabuhan, bandara, landasan airstrip dan heli pad.

Tabel 4 - 62
Kebutuhan Riil Sub Sektor Perhubungan Laut dan ASDP NAD-Nias tahun
2005-2009 berdasarkan Rencana Aksi

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007
1	Pel. Laut	unit	17	15	15
2	Pel. Ferry	unit	9	8	8
3	Pengadaan kapal	unit	2	*	-

*) Tidak ada informasi secara rinci dari BRR

Sumber : Rencana Induk dan data Deputi Infrastruktur Oktober 2007

Pada sub sektor perhubungan laut, perencanaan pelabuhan prioritas dalam rencana induk sejalan dengan rencana kerja Pemda dan BRR. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi antara seluruh dokumen perencanaan. Sedangkan perencanaan terhadap adanya kebutuhan kapal perintis menjadi salah satu prioritas rencana kerja Pemda daerah Kepulauan. Sedangkan dalam rencana kerja BRR belum tercantumkan secara rinci. Dengan demikian, sebagian besar dokumen perencanaan perhubungan laut masih tidak konsisten dengan apa yang tercantum dengan rencana induk.

Tabel 4 - 73
Kebutuhan Riil Sub Sektor Perhubungan Udara NAD-Nias tahun 2005-2009
berdasarkan Rencana Aksi

Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007
Bandara	Unit	10	9	9
Airstrip	Unit	*	3	3
Helipad	Unit	*	1	1

Sumber : Rencana Induk dan data Deputi Infrastruktur Oktober 2007

Catatan : *) kegiatan baru.

Secara umum, perencanaan transportasi perhubungan udara dalam dokumen perencanaan BRR, Pemda dan rencana induk sudah selaras. Penambahan beberapa kebutuhan airstrip dan helipad merupakan prioritas tambahan BRR dan Donor/Ngo yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah yang memiliki aksesibilitas darat dan laut relatif sulit.

Tabel 4 - 84
Kebutuhan Riil Sub Sektor Perhubungan Darat, SAR dan BMG NAD-Nias
tahun 2005-2009 berdasarkan Rencana Aksi

Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007
Pembangunan Terminal dan stasion/ol Damri	unit	29	13	8
Rehab dan rekon sarana keselamatan LLAJ (rambu, traffic-light, pagar, patok, lampu)	unit	622.416	325	*
Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	unit	10	2	2
Rehab jembatan timbang	unit	3	2	0
Pengadaan bus bantuan	unit	131	36	28
Pembangunan halte bus	unit	60	60	0
Kantor SAR	unit	1	1	1
Meteorologi dan Geofisika	unit	8	8	8
Pos dan Telematika	unit	19	19	16

Sumber : Rencana Induk dan data Deputi Infrastruktur Oktober 2007

*) Tidak dikerjakan oleh BRR

Untuk sub sektor perhubungan darat SAR dan BMG, terdapat beberapa perubahan dalam dokumen perencanaan Pemda, BRR, Donor/Ngo serta Pemerintah Pusat (Departemen Perhubungan). Penghapusan rencana BRR yang tidak sesuai dengan Rencana Induk sebagian besar merupakan hasil kesepakatan dengan Pemda dan Departemen Perhubungan. Seperti perencanaan jaringan kereta api mengalami penyesuaian (penundaan atau pengurangan) terutama akibat besarnya lingkup pekerjaan dan belum adanya perencanaan awal dan masterplan pendukungnya. Begitu juga dengan pembangunan halte bus. Kegiatan yang tidak dilaksanakan BRR ini disikapi dengan *sharing* kegiatan antar masing-masing stakeholder.

Orientasi dalam perencanaan SAR dan BMG dalam dokumen perencanaan BRR dan Donor/NGO lebih rinci dari rencana induk, namun tidak demikian dengan rencana kerja Pemda. Hal ini mengindikasikan bahwa konsistensi dalam sub sektor ini masih cukup relevan dengan rencana induk.

(2) Pos dan Telekomunikasi

Fokus layanan pos dan telekomunikasi adalah komplemen terhadap perencanaan pemulihan layanan Pos dan PT. Telkom yang diperlukan masyarakat. Penerapannya dengan pengurangan dan penambahan kegiatan dalam rencana induk untuk mencapai sasaran yang belum dimasukkan dalam perencanaan kegiatan di masing-masing penyedia layanan diatas.

Tabel 4 - 95
Kebutuhan Riil Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi NAD - Nias
Tahun 2005 - 2009 Berdasarkan Rencana Aksi

No	Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007
	Pos dan Telekomunikasi				
1	Fastel Desa PFS-PASTI dan Radio	unit	143	**	**
2	Rehab/Rekonstruksi BMF UPT Postel	unit	1	**	**
3	Rehab/rekonstruksi PS RRI-TVRI	paket	9	**	**
4	Radio Broadcast EWS	paket	1	**	**
5	Fasilitas Telematika		*	12	4
6	Pemb Infrastructure WIMAX Prov. NAD dan P Nias		*	**	**

Sumber : Rencana Induk dan data Deputi Infrastruktur Oktober 2007

*) tidak terinci/tercantum dalam rencana induk

**) data belum tersedia

Kebutuhan telekomunikasi di daerah menjadi cukup penting pascabencana tahun 2005. Oleh karena itu, dalam dokumen perencanaan Pemda tercantum penguatan dalam bidang ini. Perencanaan dalam dokumen BRR lebih bersifat pemberian bantuan terhadap dinas/instansi terkait seperti TVRI, RRI dan Dinas Infokom. Kebutuhan riil dan realisasi tidak tersedia, sehingga pemetaan terhadap konsistensi dalam sub sektor ini sulit untuk dilakukan.

(3) Air Bersih

Pada kegiatan seperti air bersih mengalami penyesuaian tanpa mengurangi esensi dalam Rencana Induk. Sasaran volume air bersih pada Rencana Induk hanya disebutkan sasaran rumah tangga (daerah perkotaan dan perdesaan), maka pada pelaksanaannya telah disebutkan sasaran volume liter/detik, termasuk sasaran rumahtangganya selain jaringan perpipaannya.

Tabel 4 - 106
Kebutuhan Riil Sub Sektor Air Bersih NAD-Nias tahun 2005 - 2009
berdasarkan Rencana Aksi

	Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007
1	Air Bersih	Lt/dtk	3.256	1.467	480
2	Pembuangan Limbah	Rumah	543.217	365.243	291.710
3	Sampah	Rumah	543.217	**	**
4	Drainase	m'	106.347	27.563	26.202

Sumber : Rencana Induk dan data Deputi Infrastruktur Oktober 2007

**) data belum tersedia

Pada umumnya, konsentrasi penanganan terhadap bidang ini tersebar di BRR dan Donor/NGO. Dokumen perencanaan pemda kurang menunjukkan adanya fokus terhadap kebutuhan tersebut. Dilihat dari kondisi tersebut, BRR dan Donor/Ngo secara konsisten telah menyusun dokumen perencanaan sejalan dengan rencana induk, sedangkan pemda belum sepenuhnya mencantumkan kegiatan ini sebagai salah satu prioritas kebutuhan sekarang ini.

(4) Energi dan Tenaga Listrik

Khusus untuk energi dan tenaga listrik, sejak awal perencanaan, sasaran program yang menyangkut pembangkit listrik yang besar, seperti; PLTGU, PLTD dan PLTA tidak dimasukkan. Kegiatan yang dilakukan melalui Rehab/rekon BRR adalah bersifat suplemen terhadap yang dilakukan PLN, ditambah kegiatan yang tidak ada di Rencana Induk namun dianggap perlu, yaitu seperti PLTMH dan tenaga surya; karena akan membantu listrik perdesaan yang di luar jangkauan PLN.

Tabel 4 - 117
Kebutuhan Riil Sub Sektor Energi NAD-Nias
Tahun 2005-2009 Berdasarkan Rencana Aksi

No	Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007
1	Rekon Sarana dan Prasarana Energi	Pkt	15	**	**
2	Diklat ESDM	Pkt	2	**	**
3	Rehab / Pembangunan SPBU		tersebar	**	**
4	Pengadaan mobil	Pkt	2	**	**

No	Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007
	tangki BBM				
5	Rehab / Pembangunan depot BBM		tersebar	**	**
6	Perbaikan kantor PT. Pertamina	Pkt	2	**	**

Sumber : Rencana Induk dan data Deputi Infrastruktur Oktober 2007

Tabel 4 - 128
Kebutuhan Riil Sub Sektor Tenaga Listrik NAD-Nias
Tahun 2005-2009 Berdasarkan Rencana Aksi

No	Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007
1	Sarana dan Prasarana Energi	pkt	12	**	**
2	Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	pkt	13	**	**
3	Rehabilitasi dan pengembangan jaringan distribusi		tersebar	**	**
4	Pengadaan generator	pkt	7	**	**
5	Perbaikan kantor PT. PLN	pkt	5	**	**
6	Pengadaan PLTD Apung baru	pkt	1	**	**
7	Pengembangan Sistem Ketenagalistrikan NAD		tersebar	**	**
8	Pembangunan jaringan transmisi		tersebar	**	**
9	Pembangunan PLTA / PLTM	Unit	2	**	**
10	Pembangunan PLTG	Unit	1	**	**
11	Trasmission lines (SUTM dan SKTM)	Km	1.805	**	695
12	Distribution lines (SKTR)	Km	2.714	**	1.102
13	Stasiun Distribusi	Unit		**	557
14	Sambungan Pelanggan	Pg	119.253	**	136.380
15	Gardu Distribusi	Unit	883	**	535
16	Diesel	Unit	24	**	**
17	Bangunan	Buah	6	**	1
18	Infrastructure Energy NAD-Nias	Unit	*	**	**

Sumber : Rencana Induk dan data Deputi Infrastruktur Oktober 2007

*) tidak terinci/tercantum dalam rencana induk

**) data belum tersedia

**) dilaksanakan oleh PLN

Pemulihan terhadap kelistrikan menjadi salah satu komitmen besar dari BRR kepada masyarakat. Sehingga BRR bersama dengan pemerintah pusat dan PLN merencanakan kegiatan untuk membangun pembangkit tenaga listrik baru dan pemulihan jaringan listrik, gardu listrik, generator, diesel dsb. yang rusak atau yang belum tersedia. Oleh

karena itu, dapat dikatakan bahwa pemulihan listrik oleh BRR sangat relevan dengan prioritas dalam rencana induk.

(5) Sumber Daya Air

Berkaitan dengan sumber daya air, perencanaan program yang dibuat (hingga 2007) telah jauh melebihi sasaran pada Rencana Induk, hal ini disebabkan kenyataan lapangan. Meskipun pada beberapa bagian adalah merupakan sasaran yang di luar akibat bencana.

Tabel 4 - 139
Kebutuhan Riil Sub Sektor Sumber Daya Air NAD-Nias
Tahun 2005-2009 berdasarkan Rencana Aksi

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007
1	Irigasi	ha	62.995	121.884	108.181
2	Pengendalian Banjir	m'	138.795	132.938	100.189
3	Pengaman Pantai	m'	69.057	139.745	72.454

Sumber : Rencana Induk dan data Deputi Infrastruktur Oktober 2007

Peningkatan jumlah kebutuhan riil dari rencana induk adalah salah satu pembangunan infrastruktur sumber daya air yang lebih baik dari kondisi sebelum bencana. Informasi tersebut kurang dapat terinci dengan jelas dalam rencana induk. Identifikasi dalam kebutuhan riil sebagai verifikasi kebutuhan lapangan dianggap sudah mencakup sebagian besar perencanaan dalam rencana induk.

(6) Fasilitas dan Bangunan Publik

Pemeliharaan infrastruktur menjadi sasaran penting juga dalam strategi pemulihan infrastruktur. Hal ini dipandang sangat tepat untuk menjaga agar usia infrastruktur menjadi lebih panjang dan akan menghemat biaya pembangunan atau perbaikan selanjutnya. Oleh karena itu, BRR juga telah melakukan inisiasi melalui kebijakan dalam IREP serta program-program pemeliharaan lainnya.

Tabel 4 - 1410
Kebutuhan Riil Bidang Fasilitas dan Bangunan Publik NAD-Nias
Tahun 2005-2009 berdasarkan Rencana Aksi

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007
1	Pusat Pelatihan Mitigasi Bencana Banda Aceh	unit	*	1	4
2	Escape Hill	unit	5	0	0
3	Escape Building	unit	*	5	5
4	Museum Tsunami Banda Aceh	unit	*	1	2
5	Pusat Kualitas Struktur dan Lab	unit	*	1	1
6	Koordinasi dan Konsultasi program dan	pkt	*	1	0

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007
	Proyek Infrastruktur NAD-Nias				
7	Bangunan Pemerintah	pkt	*	1	**
8	Pasar	pkt	1	**	**

Sumber : Rencana Induk dan data Deputi Infrastruktur Oktober 2007

*) tidak terinci/tercantum dalam rencana induk

**) data belum tersedia

Seluruh item infrastruktur publik untuk mitigasi bencana telah dimasukkan dalam rencana kerja BRR. Meskipun realisasinya masih belum seluruhnya disempurnakan. Konsistensi antara dokumen perencanaan BRR dan sebagian besar Donor/NGO masih kurang dapat terinci terhadap rencana induk dan masih disertai perbedaan terminologi yang ada pada rencana induk.

Dokumen perencanaan pemda pascabencana sebagian besar penyusunannya masih bersifat partisipatif secara *bottom-up*. Perencanaan sektoral (RKPD) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah mengarah kedalam upaya pembenahan infrastruktur yang lebih baik di tahun 2006 dan 2007, pascabencana, meskipun belum seluruhnya. Namun, perencanaan tersebut dapat dinilai realistis karena dilengkapi dengan strategi yang jelas dan program-program yang berdasarkan target dan mencerminkan prioritas-prioritas pembangunan. *Overlapping* proyek antara satker dengan satker atau dinas terkait lainnya sudah mulai berangsur berkurang mulai tahun 2007 ini.

Pemerintah daerah dan masyarakat masih banyak yang merasakan ketidakpuasan dengan kebijakan perencanaan yang dilakukan oleh BRR. Fungsi sinkronisasi dalam perencanaan kegiatan antara Pemerintah daerah dan BRR masih dirasa tidak seimbang, sehingga sering menimbulkan persepsi atau pandangan yang tidak tepat di masing-masing pihak. Namun demikian, mekanisme perencanaan kegiatan dengan mengacu pada dokumen perencanaan dan kebijakan yang berlaku dinilai telah berjalan dengan baik dari tahun-tahun sebelumnya.

4.1.1.3. Bidang Sosial Budaya

4.1.1.3.1 Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan mempunyai 5 (lima) program utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi masing-masing program.

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pada program pendidikan anak usia dini konsistensi antar dokumen rencana induk dengan kebutuhan riil dalam dokumen perencanaan BRR dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 - 15
Kebutuhan Riil Program Pendidikan Anak Usia Dini NAD-Nias tahun 2005-2009

PROGRAM/ KEGIATAN		SATUAN	RENCANA INDUK 2005-2009	KEBUTUHAN RIIL 2005-2009
A	Pembangunan Gedung darurat/ sementara	Unit/ Ruang	12	295
B	Program Pendidikan Anak Usia Dini/TK			
1	Rehabilitasi dan pembangunan TK	Unit TK	101	76
2	Perabot/Peralatan	Set/paket	125	106 set dan 2 paket
3	Materi belajar mengajar		125	126

Sumber : Bapel BRR, 2007

Kebutuhan riil pada gedung darurat ternyata lebih besar dari yang tercantum pada Rencana Induk. Sedangkan Program kebutuhan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ternyata tidak sebanyak yang disebutkan dalam Rencana Induk. Pada rehabilitasi dan pembangunan TK dan bantuan peralatannya, terlihat target realisasi lebih dari separuhnya sampai dengan tahun 2006. Secara umum target program dalam rencana induk searah dengan target dalam dokumen perencanaan BRR. Program ini juga tercantum dalam dokumen RPJMD provinsi NAD. Dengan dicantumkannya program ini pada dokumen perencanaan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat mempercepat regenerasi anak didik yang meninggal akibat tsunami.

2. Program Wajib Belajar 9 tahun

Pada program wajib belajar 9 tahun konsistensi antara dokumen rencana induk dengan kebutuhan riil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 - 16
Program Wajib Belajar 9 tahun

PROGRAM/ KEGIATAN		SATUAN	RENCANA INDUK 2005-2009	KEBUTUHAN RIIL 2005-2009
A	Sekolah Dasar			
	Rehabilitasi sekolah	SD	1.093	664
	Pembangunan USB	SD	25	30
	Pembangunan RKB	Ruang	12	122
	Pembangunan Rumah Guru	Unit	TD	
	Rehabilitasi sekolah akibat konflik	SD	111	
	<i>Meubelair</i>	Sekolah/ pkt	143 sekolah	
	Paket Belajar	pkt	207.196	
	Pengembangan Telekomunikasi, Komputer dll	pkt	1	3
	<i>Trauma Conseling</i>	Kab	2	16
	Fasilitas sanitasi	Unit SD	TD	60
B	Sekolah Menengah Pertama			
	Rehabilitasi berat, rehabilitasi ringan dan Pembangunan kembali sekolah yang hancur	SMP	387	1427
	Pembangunan USB	Unit	84	
	Pembangunan RKB pengembangan	Ruang	1.150	

PROGRAM/ KEGIATAN		SATUAN	RENCANA INDUK 2005-2009	KEBUTUHAN RIIL 2005-2009
	Pembangunan Sekolah Binaan/ Unggul	Paket	TD	39
	Pembangunan Asrama Siswa	Unit	75	
	Meubelair	Pkt	377	
	Investasi Mutu			
	Alat Ketrampilan	set	53	53
	Pelatihan Guru	Org	40.000	18.029
	Pengembangan Mutu Sekolah	skl	90	90
	Kegiatan Kesiswaan	skl	2.386	210
	Pengembangan IT untuk SMP	pkt	1	8
	Akreditasi Sekolah	SMP	239	20
C	Pendidikan Luar Biasa/SLB			
	Pembangunan UGB	lokasi	6	5
	Rehabilitasi Gedung	Ruang	11	4
	Bantuan Meubelair	skl	6	5
	Sarana Prasarana	lokasi	20	5
	Peralatan Pendidikan	unit	22	5
	Peralatan Kantor	unit	27	5

Sumber: Bapel BRR, 2007

Program wajib belajar 9 tahun, terdiri atas pendidikan tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan luar biasa. Kebutuhan riil rehabilitasi gedung pendidikan Sekolah Dasar tidak sebanyak yang dicantumkan pada Rencana Induk, namun pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) yang lebih diperlukan. Begitu pula program paket belajar, pembangunan unit sekolah baru, pengembangan fasilitas/komputer sekolah, meubelair dan trauma konseling. Mengingat wajib belajar 9 tahun adalah penting di sektor pendidikan, maka rendahnya target dalam dokumen rencana BRR seharusnya dapat tercover dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah setempat (RPJMD). Namun dari dokumen RPJMD NAD program pendidikan diarahkan pada pendidikan anak usia dini dan RPJMD Kepulauan Nias program pendidikan difokuskan pada pendidikan anak SLTP dan SLTP. Diharapkan kegiatan ini menjadi pada perencanaan pembangunan keberlanjutan pasca BRR di NAD dan Kepulauan Nias.

3. Program Pendidikan Menengah

Pada program pendidikan menengah konsistensi antar dokumen rencana induk dan kebutuhan riil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 - 17
Program Pendidikan Menengah

PROGRAM/ KEGIATAN		SATUAN	RENCANA INDUK 2005-2009	KEBUTUHAN RIIL 2005-2009
A	SMU			
1	Pembangunan RKB	Paket	530	530
2	Pembangunan UGB Reguler dan Berasrama	Unit	43	42
3	Rehabilitasi	skl	167	148

PROGRAM/ KEGIATAN		SATUAN	RENCANA INDUK 2005-2009	KEBUTUHAN RIIL 2005-2009
4	Meubelair	pkt	5	90
5	Buku perpustakaan	Expl	973.308	973.208
6	Laboratorium IPA (Kimia, Fisika dan Biologi) dan Komputer	pkt	458	140
7	Ruang Serbaguna/ RPL	pkt	100	100
8	Fasilitas Ibadah	pkt	100	100
9	Peralatan Olahraga dan Seni	pkt	100	100
10	Pengembangan sekolah bertaraf International	skl	20	20
11	Operasional dan pemeliharaan	skl	1.120	1.120
12	Peningkatan kapasitas manajemen sekolah	skl/org	92	360
B	SMK			
1	Rehabilitasi gedung (berat dan sedang)	unit	22	14
2	Pembangunan/ Rekonstruksi	unit	2	3
3	Pembangunan RKB	ruang	34	34
4	Pendidikan dan pelatihan siswa (untuk 24 TC/CC)	siswa	2.400	240
5	Bantuan Peralatan dan meubeler	lokasi	67	67
6	Bantuan BOP (buku, bahan ajar, PBS)	skl	152	152
7	<i>Vocational Training</i>	Org	TD	**
C	PENDIDIKAN DEPAG (MADRASAH)	UNIT		
1	Pembangunan RKB madrasah		TD	291
2	Pembangunan UGB Madrasah		TD	52
3	Pembangunan BKG Madrasah		TD	31

Sumber : Bapel BRR, 2007

TD : Tidak Disebutkan (dalam Rencana Induk)

* : Sama seperti Rencana Induk

** : Data belum tersedia

Program pendidikan menengah meliputi sekolah SMA, SMK dan madrasah. Kebutuhan riil pada fasilitas ibadah, ruang serba guna dan peralatan olahraga pada sekolah SMA mempunyai target yang sama dengan target yang tercantum pada rencana induk. Rendahnya kebutuhan riil pada kegiatan *pendidikan dan pelatihan* oleh BRR karena kegiatan tersebut diarahkan pada perencanaan oleh donor /NGO dan RPJMD. Perencanaan pembangunan gedung madrasah mengalami penyesuaian (penyempurnaan) terhadap rencana induk sesuai dengan kebutuhan pasca bencana.

Sasaran 2008-2009 Program-Program Pendidikan Menengah yang masih harus dilanjutkan yaitu:

1. SMA. Pembangunan RKB 261 unit, Pembangunan UGB Reguler dan Berasrama 2 unit, Rehab 72 sekolah, Meubelair 5 paket , Buku perpustakaan 486.208 unit, Laboratorium IPA dan Komputer 96 unit, Ruang Serbaguna/RPL 58 unit, Fasilitas Ibadah 100 unit, Peralatan Olahraga dan Seni 31 unit, Pengembangan sekolah bertaraf International 13 unit, Operasional dan pemeliharaan 1.120 sekolah.

2. SMK. Rehab gedung 13 unit, Pembangunan 2 unit, Pembangunan RKB 34 ruang, Pendidikan dan pelatihan siswa 140 orang, Bantuan Peralatan dan meubelair 67 lokasi, bantuan BOP (buku, bahan ajar, PBS) 152 sekolah.
3. Madrasah. Pembangunan UGB Madrasah 20 unit.
4. Program Pendidikan Tinggi

Pada program program pendidikan tinggi konsistensi antar dokumen rencana induk dengan kebutuhan riil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 - 18
Program Pendidikan Tinggi

PROGRAM/ KEGIATAN		SATUAN	RENCANA INDUK 2005-2009	KEBUTUHAN RIIL 2005-2009
PENDIDIKAN TINGGI (4 PT + swasta)				
1	Penyediaan dosen bantu 6 bulan	OB	900	900
2	Kompensasi SPP 2004/2005	Mhs	-	-
3	Beasiswa mahasiswa korban tsunami/ kurang mampu/ ikatan dinas	Mhs	13.500	43.753
4	Penggantian ruang kantor dan Laboratorium	pkt	4	4
5	Penggantian meubelair kuliah, laboratorium dan kantor	pkt	17	17
6	Perbaikan Mess Dosen	pkt	2	2
7	Penggantian meubelair asrama mahasiswa	pkt	2	2
8	Perbaikan Asrama Mahasiswa	m ²	5.900	5.900
9	Penggantian/pengadaan peralatan Laboratorium	pkt	26	26
10	Penambahan Luas asrama mahasiswa	pkt	1	1
11	Penggantian Kendaraan Dinas	unit	10	10
12	Santunan dosen/tenaga adm PT	org	213	500
13	Penggantian Bus kampus	unit	15	15
14	Perbaikan pagar kampus	m	5.200	5.200
15	Perbaikan jalan Kampus	pkt	1	2
16	Beasiswa dan Pelatihan Dosen S2/S3	org	150	369
17	Pembangunan Rumah Dosen	pkt	1	5
18	Pembuatan sumur dan jaringan air bersih	unit	3	3
19	Pembangunan Pusat Pelatihan Unsyiah	pkt	1	1
20	Meubelair Pusat Pelatihan Unsyiah	pkt	1	1
21	Rehabilitasi gedung PGSD Unsyiah	pkt	1	2
22	Meubelair PT	pkt	1	8
23	Perbaikan gedung pendidikan PT	pkt	7	23
24	Pembangunan kembali gedung kuliah/lab PTN & PTS	pts	3	7

Sumber : Bapel BRR, 2007

Perencanaan kegiatan pada pendidikan tinggi diarahkan pada fasilitasi pendidikan kepada mahasiswa dan dosen berupa pemberian beasiswa dan pembangunan fisik. Banyaknya mahasiswa dan dosen yang menjadi korban bencana tsunami menjadikan

kebutuhan riil yang tinggi daripada rencana induk. Sedangkan program fisik berupa pembangunan sarana pendidikan juga merupakan perencanaan oleh lembaga donor sebagai hasil kerjasama antar perguruan tinggi setempat dengan lembaga donor/NGO yang terkait. Kegiatan pemberian beasiswa merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk ketersediaan SDM di daerah bencana, maka untuk itu diharapkan stakeholder baik BRR, Perguruan Tinggi maupun lembaga donor mencantumkan dalam dokumen perencanaan pasca keberadaan BRR di Aceh dan Nias.

5. Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

Pada program pendidikan tinggi konsistensi antar dokumen rencana induk dengan kebutuhan riil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 - 19
Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009
1	<i>Teaching Grant</i>	Keg	56	56
2	Riset	Keg	56	81
3	Bantuan Praktek Mahasiswa dan ekstra kurikuler	OB	1.800	1800
4	Akreditasi, sertifikasi, dan pelatihan <i>data base</i>	Keg	TD	40
5	TOEFL dan POT dosen	Org	TD	180
6	Matrikulasi mahasiswa Undangan	Org	TD	540
7	Buku Pustaka	Pkt	59	59
8	Monitoring dan pengawasan	Keg	184	184

Sumber : Bapel BRR, 2007

Kegiatan bantuan praktek mahasiswa dan ekstrakurikuler merupakan program utama dalam peningkatan penelitian dan secara aspek perencanaan terdapat kesesuaian antar kebutuhan riil dengan rencana induk. Tingginya kebutuhan riset daripada rencana induk merupakan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat Aceh dan Nias mengembalikan..... . Secara umum terdapat sinkronisasi antar perencanaan rencana induk dengan dokumen perencanaan BRR.

4.1.1.3.2 Bidang Kesehatan

Berdasarkan Rencana Induk pemulihan bidang kesehatan memuat tentang beberapa kegiatan yang meliputi upaya pengelolaan, pemeliharaan, pemulihan, pencegahan, pemberantasan penyakit, penyehatan masyarakat, kefarmasian, peralatan, perbaikan gizi, penelitian, kebijakan dan lain-lain. Konsistensi antar dokumen rencana induk dengan kebutuhan riil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 - 20
Program Upaya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	pkt	1	250
2	Pembangunan Rumah Negara			
-	Rumah Dinas	pkt	21	21
-	Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas	pkt	42	149
3	Pembangunan atau Rehabilitasi dan Perawatan Gedung Kesehatan/ Pendidikan	pkt		
-	Kantor Dinas Kesehatan	pkt	5	15
-	Rumah Sakit	pkt	9	31
-	Pustu	pkt	174	174
-	Polindes	pkt	700	700
-	Klinik	pkt	6	6
-	BBPOM	pkt	3	1
-	Laboratorium Kesehatan	pkt	1	1
4	Operasional Pemeliharaan Rumah Sakit	pkt	4	12
5	Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB	unit	4	43
6	Pengadaan Kendaraan Roda 4/ Roda 6/ Roda 10 (<i>ambulance</i>)	unit	69	69

Sumber : Bapel BRR, 2007

Berdasarkan tabel diatas terlihat ada perbedaan sasaran program yang ada dalam rencana induk dengan kebutuhan riil. Dari 6 (enam) kegiatan utama yang ada dalam rencana induk terdapat perubahan sasaran dengan rencana induk. Kebutuhan riil melebihi dari rencana induk, dan nampaknya memang harus menjadi perhatian pasca bencana, yaitu pendidikan dan pelatihan teknis untuk paramedic pasca bencana, operasional pemeliharaan rumah sakit dan pengadaan alat medis. Selain itu kebutuhan untuk pembangunan rumah dokter/paramedic dan rumah sakit juga menjadi bagian perhatian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami. RPJMD pemerintah daerah provinsi NAD dan RPJMD Kepulauan Nias provinsi Sumatera Utara diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan tersebut menjadi program keberlanjutan dalam rangka pemulihan kesehatan pasca tsunami.

2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah

Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah mempunyai 2 program utama. Kedua program tersebut mengalami perbedaan sasaran dengan rencana induk. Bantuan penanggulangan bencana alam dan kerusakan dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dalam rencana induk terdapat 1 paket dan menjadi 24 paket pada kebutuhan. Meningkatnya kebutuhan riil bantuan penanggulangan bencana daripada rencana induk karena banyaknya masyarakat yang mengalami penyakit kulit, demam berdarah, pernapasan dan penyakit menular lainnya. Program ini juga mejadi program darurat Departemen Kesehatan pada masa tanggap darurat pasca tsunami. Sedangkan meningkatnya kebutuhan riil program pembangunan kantor kesehatan pelabuhan (KKP) daripada rencana induk karena banyaknya sarana kesehatan

dipelabuhkan yang rusak akibat hantaman tsunami dan belum teridentifikasi pada saat penyusunan rencana induk.

3. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Pada program kefarmasian dan alat kesehatan dan program peningkatan kesehatan masyarakat terdapat dua kegiatan utama dan secara sasaran semuanya berbeda dengan rencana induk. Kegiatan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan dalam rencana induk sebanyak 6 paket dan di kebutuhan riil meningkat menjadi 21 paket. Meningkatnya kebutuhan riil daripada rencana induk terjadi karena obat-obatan dan peralatan kefarmasian diperkirakan tidak bisa menampung korban bencana tsunami. Begitu juga halnya dengan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat yang dimana dalam rencana induk sebanyak 119 unit dan menjadi kebutuhan riil di pangan meningkat menjadi 298 unit. Perbedaan target yang cukup tinggi antara rencana induk dengan kebutuhan riil pada layanan peningkatan kesehatan masyarakat dan peralatan kesehatan seharusnya menjadi fokus utama dokumen rencana induk maupun dokumen rencana pemerintah daerah. Dalam RPJMD provinsi NAD dan RPJMD Kepulauan Nias.

4. Program Pengkajian dan Penelitian Terapan di Bidang Kesehatan, Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Konsistensi dokumen perencanaan dalam rencana induk dan kebutuhan riil oleh BRR pada program pengkajian dan penelitian terapan di bidang kesehatan, pengembangan pendidikan tenaga kesehatan dan program perbaikan gizi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 - 21
Program Pengkajian dan Penelitian Terapan di Bidang Kesehatan, Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009
A	Pengkajian dan Penelitian Terapan di Bidang Kesehatan			
1	Pengadaan Barang Reagensia Litbangkes untuk Kegiatan Laboratorium	pkt	1	1
2	Penelitian, Pengkajian Dan Pelaksanaan Terapan	pkt	1	1
B	Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan			
1	Pengadaan Buku Perpustakaan UPTD Pendidikan	pkt	1	1
2	Beasiswa Pendidikan Lanjutan Tenaga Kesehatan	pkt	1	1
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Institusi Pendidikan dan Pengembangan Kesehatan	pkt	6	14
C	Perbaikan Gizi Masyarakat			
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Kab/Kota	21	21
2	Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi	Kab/Kota	21	21

Sumber : Bapel BRR, 2007

Tiga kegiatan utama program pengkajian dan penelitian terapan di bidang kesehatan dan pengembangan pendidikan tenaga kesehatan secara sasaran sesuai dengan rencana induk. Namun kegiatan pembangunan sarana dan prasarana institusi pendidikan dan pengembangan kesehatan dalam rencana induk meningkat pada kebutuhan riil sebanyak 6 paket dan di kebutuhan riil meningkat menjadi 14 paket. Program perbaikan gizi bagi juga telah tercantum dalam dokumen RPJMD provinsi NAD.

5. Program Pengkajian dan Penelitian Terapan di Bidang Kesehatan,
Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Konsistensi dokumen perencanaan dalam rencana induk dan kebutuhan riil oleh BRR pada program pengkajian dan penelitian terapan di bidang kesehatan, pengembangan pendidikan tenaga kesehatan dan program perbaikan gizi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 - 22

Program Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengungsi Korban Bencana, Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan.

PROGRAM/ KEGIATAN		SATUAN	RENCANA INDUK 2005-2009	KEBUTUHAN RIIL 2005-2009
A	Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan			
1	Administrasi Umum	pkt	1	1
2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	pkt	1	3
3	Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan	pkt	1	24
B	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengungsi Korban Bencana dan Penanggulangan Masalah Kesehatan			
1	Program Promosi Kesehatan	pkt	1	1
C	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan			
1	Peningkatan Sarana Sanitasi Air Bersih dan Sarana Sanitasi Dasar	pkt	1	72

Sumber: Bapel BRR, 2007

Sasaran Program Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengungsi Korban Bencana dan Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Program Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan telah terealisasi semua. Program penyehatan lingkungan juga selaras dengan dokumen RPJMD provinsi NAD.

4.1.1.3.3 Bidang Peranan Perempuan, Kesejahteraan Anak dan KB

1. Program penguatan kelembagaan

Konsistensi dokumen perencanaan dalam rencana induk dan kebutuhan riil oleh BRR pada program pengkajian dan penelitian terapan di bidang kesehatan, pengembangan pendidikan tenaga kesehatan dan program perbaikan gizi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 – 23
Program Pengkajian Dan Penelitian Terapan Di Bidang Kesehatan,
Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan Dan Program Perbaikan Gizi
Masyarakat

PROGRAM/ KEGIATAN		SATUAN	RENCANA INDUK 2005-2009	KEBUTUHAN RIIL 2005-2009
I	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN			
	GENDER DAN ANAK			
a	Revitalisasi Kelembagaan	Unit	55	3
b	Peng-arus-utama-an Gender	Paket	57	3
c	Assessment data dan kebutuhan	survai	19	5
	Rehabilitasi Psikologis dan Peningkatan Keterampilan Perempuan	Paket	*	1
	Beasiswa Bagi Ulama Perempuan, Pelatihan dan Kursus Singkat Bagi Pemimpin Perempuan	Paket	*	1
	Sosialisasi Garapan Kepada Masyarakat Desa	Paket	*	1
	Community Volunteer Training Bagi Remaja Desa	Paket	*	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Kebutuhan riil secara umum mengalami perubahan (pengurangan) daripada rencana induk. Disamping itu juga terdapat penyempurnaan rencana induk melalui penentuan volume yang jelas pada kegiatan rehabilitasi psikologis, beasiswa ulama perempuan dan training bagi remaja desa yang tidak dijelaskan dalam rencana induk. Dengan rendahnya kebutuhan riil daripada rencana induk seyogyanya menjadi perhatian dalam RPPJMD provinsi NAD dan Kepulauan Nias maupun lembaga donor pasca keberadaan BRR pada tahun 2009.

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan

Tabel 4 - 24
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan

	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK 2005-2009	KEBUTUHAN RIIL 2005-2009
a	Fasilitasi <i>Women Crisis Center</i>	Unit	57	10
b	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan	Kelompok	6	23
c	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Kelompok	1.951	5300
d	Dukungan Hukum untuk Perempuan	Paket	17	218
e	<i>Training lifeskill</i> dan <i>vocational skill</i> untuk perempuan	Paket	TD	1
f	Bantuan pada kelompok pengajian	Paket	TD	2100
g	Bantuan untuk masyarakat dengan kompetensi	Paket	TD	1
h	Penyediaan sarana tempat perempuan melakukan kegiatan	Unit	TD	49
i	<i>Workshop</i> gugus anti <i>trafficking</i>	Paket	TD	1
j	<i>Workshop judicial watch networking</i>	Paket	TD	1

Sumber : Bapel BRR, 2007

TD : Tidak Dicantumkan (dalam Rencana Induk)

O : Sudah terlaksana

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan nampak lebih berkonsentrasi pada bantuan-bantuan dalam karnagka pemberdayaan ekonomi perempuan, dan belum memperhatikan kebutuhan pelayanan trauma, yang dapat dilaksanakan melalui fasilitasi women crisis centre pasca tsunami. Karakter khusus aspek psikologis perempuan perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penanganan pasca bencana.

3. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

Reunifikasi keluarga bagi anak-anak yang kehilangan orang tua akibat tsunami serta pengadaan akte kelahiran gratis merupakan program utama dalam rangka peningkatan kesejahteraan perlindungan anak. Tingginya kebutuhan riil dari rencana induk dari dua kegiatan ini disebabkan karena banyaknya anak-anak yang kehilangan keluarga dan orang tua. Pengambilan anak oleh orang tua angkat dilakukan secara tidak resmi (bawah tanah), sehingga hal ini sangat dibutuhkan akte kelahiran sebagai legalisasi formal.

Tabel 4 - 25
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan NAD - Nias
(Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak)

	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK 2005-2009	KEBUTUHAN RIIL 2005-2009
a	Fasilitasi <i>Children Center</i> dan <i>Kid Line Counseling</i>	Unit	38	34
b	Reunifikasi keluarga	Anak	3.600	6.800

PROGRAM/ KEGIATAN		SATUAN	RENCANA INDUK 2005-2009	KEBUTUHAN RIIL 2005-2009
c	Dukungan untuk mendapatkan akte kelahiran gratis	Anak	3.600	73.223
d	Dukungan untuk pengembangan pola asuh anak:			
	1. Pedoman dan KIE	Paket	8	1
	2. TOT bagi pola asuh anak	Diklat	19	1
e	Qanun Perlindungan Anak (Akte Kelahiran Bebas)	Paket	*	1
f	Penyelenggaraan Kongres Anak	Paket	*	1
g	Monitoring Dan Evaluasi Untuk Kegiatan Satker	Paket	*	2

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

4. Program Pelayanan Keluarga Berencana

Perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan penyebaran informasi serta perbaikan gizi ibu dan anak mengalami perubahan dengan peningkatan pada kebutuhan riil terhadap rencana induk pada aspek sasaran paket.

Tabel 4 - 26
Program Pelayanan Keluarga Berencana

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009
1.	Pendidikan dan pelatihan masyarakat	Paket	190	290
2.	Penyuluhan dan penyebaran informasi	Paket	190	290
3.	Pelayanan kesehatan/perbaikan gizi ibu/anak dan KB	Paket	190	290
4.	Program Perlengkapan Sarana Gedung	Paket	3	3
5.	Pengadaan kendaraan bermotor roda 2	Unit	271	271
6.	Pengadaan kendaraan bermotor roda-4/roda-6/roda-10	Unit	3	3

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

4.1.1.3.4 Agama, Sosial, Budaya, Pemuda dan Olah Raga

4.1.1.3.4.1 Agama

Secara umum perencanaan semua kegiatan program peningkatan dan pelayanan kehidupan beragama mengalami perubahan dengan rencana induk. Meningkatnya kebutuhan riil mesjid dan meunasah merupakan bentuk akomodasi dari kebutuhan masyarakat Aceh yang meliputi 21 kabupaten/ kota mayoritas beragama islam.

Tabel 4 - 27
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

PROGRAM/ KEGIATAN		SATUAN	RENCANA INDUK 2005-2009	KEBUTUHAN RIIL 2005-2009
1.	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama			
-	Program Bantuan Tempat Ibadah:	Unit	3.114	2.830
-	Masjid	Unit	1.167	1.533
-	Meunasah	Unit	*	1.062
-	Dayah	Unit	*	252
-	Balai Pengajian	Unit	85	211
-	Vihara	Unit	4	2
-	Gereja	Unit	1.943	478
-	Terbangunnya kembali KUA	Unit	68	143
-	Pengadaan buku nikah	exp.	30.000	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

2. Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan

Terkait dengan kegiatan bantuan quran dan beasiswa santri mengalami perubahan yang cukup signifikan antara rencana induk dengan kebutuhan riil. Program ini dipandang sangat perlu dalam pengembangan nilai-nilai keagamaan khususnya bagi masyarakat beragama islam.

Tabel 4 - 28
Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009
1.	Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan			
-	Terbinanya kembali ketenteraman bathin	Pkt	589	589
-	Bantuan Qur'an dan Kitab	Buah	*	32.655
2.	Beasiswa Siswa dan Santri Korban Tsunami	Org	*	9.000

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

2. Sosial

Kegiatan bantuan usaha ekonomi produktif merupakan salah satu program utama yang direncanakan pemanfaatannya untuk mendukung pemulihan ekonomi dan menopang keberlanjutan kehidupan masyarakat korban tsunami. Panti masyarakat bersifat sangat mendesak pelaksanaannya di sehingga pada umumnya sejalan dengan rencana induk, bahkan terdapat penambahan dalam unit maupun kapasitasnya. Sedangkan rehabilitasi sosial daerah kumuh lebih kecil daripada rencana induk, kondisi ini mengingat wilayah provinsi NAD dan kepulauan Nias tidak banyak terdapat wilayah kumuh.

Tabel 4 - 29
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, MKS

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009
1.	Bantuan usaha ekonomis produktif	KK	15.660	20.000
2.	Pengembangan usaha ekonomis produktif	KK	9.500	10.000
3.	Rehabilitasi sosial daerah kumuh	KK	20.000	1.000
4.	Pendampingan sosial dan monitoring evaluasi	kegiatan	19	500
5.	Pemberdayaan KAT	KK	546	**
6.	Peningkatan kesejahteraan sosial keluarga	KK	33.600	**
7.	Panti Masyarakat	Panti	14	14
8.	Rehabilitasi TMP/ MPN	TMP/MPN	4 TMP +2 MPN	4 TMP + 2 MPN
9	Perbaikan Rumah Perintis Kemerdekaan	RPK	9	9

Sumber : Bapel BRR , 2007

** : Program yang telah atau akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial NAD

Tabel 4 - 30
Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009
1.	Bantuan Panti Sosial	Keg	12	50
2	Bantuan sarana Panti Sosial	Panti	*	49

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009
3	Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan	Unit	*	1
4	Bantuan Sarana Penyandang Cacat	Unit	*	10
5	Penampungan anak dan lansia (Org)	Paket	*	229
6	Bantuan Biaya fakir miskin	Org	*	13.360
7	Bantuan Lokakarya Bidang Sosial	Angk.	*	10
8	Bantuan Prasarana dan sarana penyandang cacat	Pkt	*	35
9	Bantuan ekonomi untuk Panti	Pkt	*	42
10	Bantuan Makan Panti	Org	*	10.000
11	Peningkatan Kesra Anak (Org)	Pkt	*	139.382
12	Bantuan anak berprestasi	Org	*	500

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Program/ Kegiatan tersebut tidak dianggarkan pada TA 2008-2009

Perencanaan kegiatan dalam program pelayanan rehabilitasi sosial secara keseluruhan berbeda pada aspek volume antara rencana induk. Kondisi ini sebetulnya tidak mengurangi esensi program dalam rencana induk.

3. Pemuda dan Olahraga

Kebutuhan riil pertukaran pemuda antar provinsi lebih kecil dari dokumen rencana induk. Rendahnya kegiatan ini karena pada saat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pertukaran pemuda telah masuk pada perencanaan kegiatan pemerintah pusat melalui pemindahan mahasiswa dan pemberian beasiswa korban bencana.

Tabel 4 - 31
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pemuda dan Olah Raga
NAD - Nias

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009
A	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda			
1	Rencana Kegiatan (Adm.) (Kab./Kota)	OB	300	81
2	Penumbuhan KUPP	kelompok	125	140

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009
3	Kelompok Pemuda sebaya	kelompok	40	91
4	Pengembangan Sentra Pemberdayaan pemuda	lokasi	5	2
5	Pertukaran Pemuda antar Propinsi	orang	160	32
6	Monitoring dan Evaluasi <i>life skills</i>	kelompok	250	50
7	Latihan kewirausahaan Pemuda di Kabupaten/Kota	orang	300	60
8	Bantuan untuk lembaga kepemudaan	lembaga	25	5
9	Pelatihan/seleksi SP3	orang	100	20
10	Peningkatan Sumber daya SP3	orang	275	55
11	Sosialisasi dan sinkronisasi SP3	kegiatan	10	2
12	Monitoring dan Evaluasi SP3	kegiatan	5	1
B	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			
1	Peningkatan mutu SDM keolahragaan daerah	orang	300	386
2	Inventarisasi/Pendataan OR daerah	kegiatan	5	2
3	Pembinaan Akademik Atlet Pelajar (PPLP)	kegiatan	5	1
4	Festival OR Tradisional bagi masyarakat	orang	100	440
5	Kompetisi antar klub OR Pelajar	orang	1125	225
6	Pemberdayaan Diklat OR Pelajar berbakat	orang	125	25
7	Pemberdayaan Diklat OR Mahasiswa berbakat	orang	50	10
8	Kompetisi antar PPLP dan PPLS	orang	330	66
9	Pekan OR Pelajar	orang	550	110
10	Pemberdayaan organisasi OR Pelajar dan ORMAS	kegiatan	5	6
11	<i>Training Camp</i> Atlet Pelajar	orang	400	80
12	Pekan OR Pelajar Cacat	orang	175	35

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009
13	Pekan OR Pedesaan	kec./desa	15	3
14	Peringatan HAORNAS	21 kab./kota	105	21
15	Dukungan administrasi Pengelolaan Kegiatan (Kabupaten/ Kota)	kegiatan	5	22
C	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			
1	Bantuan Peralatan Olahraga	paket	5	92
2	Inventarisasi Organisasi dan Potensi Olahraga	kab./kota	30	7
3	Konsolidasi dengan <i>Stake Holder</i> keolahragaan	organisasi	90	18
4	Menyusun model increament dan strategi perlakuan	kegiatan	5	1
5	TOT instruktur dari masyarakat setempat	orang	300	60

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

4.1.1.3.4.2 Budaya

Tabel 4 - 32
Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Budaya
NAD - Nias

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009
1.	Pengembangan Nilai Budaya			
	(1) Pengumpulan dokumentasi bencana kemanusiaan akibat tsunami	Paket	2	2
	(2) Penyembuhan trauma dan membangkitkan kembali semangat melalui gerakan kebudayaan			
	(a) Penyusunan Materi Penguatan Tradisi	Naskah	2	2
	(b) Penyebarluasan materi penguatan tradisi	Paket	2	2

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009
	ke masyarakat			
	(3) Reinventarisasi potensi budaya dan penyelamatan warisan budaya yang terkena bencana	Paket	2	2
	(4) Pemulihan sumberdaya budaya yang rusak terkena bencana.	Paket	2	2
	(5) Penyusunan modul dan sosialisasi nilai budaya Aceh melalui media elektronik	Paket	2	2
	(6) Pagelaran budaya Aceh	Kali	2	2
	(7) Pedoman penanganan berwawasan budaya pasca bencana			
	(a) Penyusunan dan penerbitan buku	Paket	1	1
	(b) Penggandaan dan penyebarluasan	Paket	1	1
2.	Pengelolaan Keragaman Budaya			
	(1) Wawasan Budaya dalam pembangunan kembali wilayah bencana di Aceh dan Sumatera Utara		*	**
	(a) Workshop	Kali	2	2
	(b) Sosialisasi	Paket	5	5
	(2) Membangun sistem jaringan informasi kebudayaan	Paket	1	1
	(3) Penyusunan peta budaya	Paket	5	5
	(4) Museum Peringatan Bencana Kemanusiaan Tsunami			
	(a) Pembuatan Rancangan	Paket	1	1
	(b) Pendirian	Paket	2	2
	(5) Museum Budaya dan Sejarah Purbakala Nias	Paket	1	1
	(6) Menghimpun informasi kebudayaan (NAD dan Nias-Sumut)	Paket	2	2
	(7) Mendukung rehabilitasi bangunan bersejarah (Tjut Nyak Dhien dan Cut Meutia) dan sejumlah bangunan purbakala yang rusak (20	Paket	26	26

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009
	buah di NAD dan 6 di Nias-Sumut)			
	(8) Rehabilitasi Gedung Kantor BKSNT dan BP3 Banda Aceh	Paket	2	3
	(9) Pengembangan SDM Kebudayaan di tingkat Kabupaten dan Provinsi	Paket	1	3
	(10) Bantuan rehabilitasi lingkungan, gedung, dan fasilitas Taman Budaya serta Museum Negeri NAD	Paket	6	5
	(11) Pemugaran dan konservasi objek budaya	Paket	5	5
3.	Pengelolaan Kekayaan Budaya			
	(1) Penyembuhan trauma dan membangkitkan kembali semangat melalui gerakan kebudayaan			
	(a) Pelatihan seni grafis budaya Aceh	Kali	2	2
	(b) Pemulihan norma-norma budaya melalui seni tutor	Kali	5	5
	(c) Pembuatan, penggandaan dan sosialisasi film dokumenter bencana alam gempa dan tsunami dari sisi budaya	Paket	1	1
	(d) Pembuatan antologi puisi bertemakan kebangkitan budaya Aceh dari bencana	Paket	1	5
	Pencetakan dan penyebarluasan antologi puisi bertemakan kebangkitan budaya Aceh dari bencana	Paket	1	5
	Penyusunan buku cerita anak berlatar norma dan nilai budaya	Judul	1	1
	Penyebarluasan buku cerita anak berlatar norma dan nilai budaya	Paket	1	2
	Pembuatan kembali instrumen seni		*	*
	Pembuatan	Paket	1	1
	Pemberian bantuan alat-alat seni	Paket	5	5
	Pembangunan Pusat Data dan Informasi Aceh (PDIA)		*	*

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009
Penelusuran dan pengumpulan koleksi	Paket	4	4
Pembangunan gedung	Paket	2	2

Sumber : Bapel BRR, 2007

* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

** : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

4.1.1.4. Bidang Pemulihan Ekonomi

4.1.1.4.1 Subbidang Kelautan dan Perikanan

Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan kelautan dan perikanan, baik yang dimiliki BRR NAD-Nias, Pemerintah Daerah dan Lembaga Donor/NGO, secara garis besar telah mengacu kepada Rencana Induk.

Tabel 4 - 33
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

RENCANA INDUK	RENSTRA BRR	RPJMD	Perencanaan Lembaga Donor/NGO
Rencana Induk sub bidang kelautan dan perikanan terdiri dari 2 (dua) program, yaitu : (1) Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana dan Bantuan Privat/ modal dan (2) Rehabilitasi & Rekonstruksi sarana Prasarana Publik.	Renstra BRR terdiri 1 (satu) program yaitu Pemulihan Fasilitas Pelayanan Masyarakat. Penjabaran Program tersebut dijabarkan dalam berbagai kegiatan sbb : • Merehabilitasi tambak yang rusak, • Pengadaan Kapal motor kayu, • merehabilitasi kapal boat, • pengadaan alat tangkap, • Bantuan	Prov.NAD : 1. <u>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</u> Pesisir melalui pembinaan kelompok ekonomi 2. <u>Pemberdayaan Masyarakat</u> dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan melalui <u>pemetaan dan rencana zonasi</u> pengelolaan daerah Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) 3. <u>Peningkatan Mitigasi Bencana</u> Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut 4. Pengembangan budidaya perikanan dengan bibit ikan unggul 5. Pengembangan perikanan tangkap dengan memberikan alat bantu operasional 6. Optimalisasi	Program dan Kegiatan yang Direncanakan oleh Lembaga donor/NGO, mencakup : 1).Area of fishponds/tambak restored (Hectares); 2).Boat building facilities completed (unit); 3). Area of coastal (inshore, beach, corals) restored (Hectares); 4).Fish agregat device (FAD) provided (Unit); 5). Fish landing facilities (TPI) rebuilt/rehabilitated; 6).Fisheries cooperatives supported/created/operational; 7).Fishing vessels provided/replaced; 8). Sets of fish processing equipment provided;

RENCANA INDUK	RENSTRA BRR	RPJMD	Perencanaan Lembaga Donor/NGO
	Agroinput, • Pengembangan BBIP Simeulue, • Pengadaan Hatchery skala rumah tangga, • Keramba Jaring Apung, • Sentra Pengolahan Ikan • Bagan Apung.	<u>pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</u> 7. Pengembangan budidaya laut, air payau dan air tawar melalui identifikasi dan <u>inventarisasi daya dukung lahan perikanan budidaya.</u> <u>Kab.Nias : NA</u> <u>Kab.Nias Selatan :</u> 1. Pengadaan peralatan tangkap ikan 2. Pembentukan kelompok nelayan	

Sumber : Analisa Tim P3B Bappenas

Amanat Rencana Induk dijabarkan ke dalam dua program utama dengan menekankan pada rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana perikanan kelautan serta bantuan privat/permodalan guna pemberdayaan masyarakat korban bencana. Namun, Rencana Strategis (Renstra) BRR menerjemahkan Rencana Induk bidang pemulihan kelautan perikanan melalui Program Fasilitas Pelayanan Masyarakat, yang lebih berorientasi pada bantuan sarana prasarana dibandingkan dengan bantuan permodalan, dengan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mengembalikan aset dan peralatan penangkapan ikan, seperti kegiatan rehabilitasi tambak, bantuan perahu, jala, benih, hingga pembangunan/rehabilitasi Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI).

Sementara, Pemerintah Provinsi NAD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012, tidak saja pada bantuan sarana prasarana namun juga pada pemberdayaan masyarakat dan kebutuhan masyarakat penting lainnya seperti aspek pemasaran, pemetaan dan zonasi. RPJMD Prov.NAD juga telah merencanakan program Peningkatan Mitigasi Bencana dan Prakiraan Iklim Laut.

Dilain pihak, Perencanaan oleh Lembaga Donor juga lebih berorientasi pada pemulihan sarana dan prasarana perikanan, seperti bantuan peralatan tangkap(perahu, jala, benih ikan, pembangunan PPI dan rehabilitasi tambak.

4.1.1.4.2 Sub bidang Pertanian

Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan Pertanian, baik yang dimiliki BRR NAD-Nias,Pemerintah Daerah dan Lembaga Donor/NGO, secara garis besar juga telah mengacu kepada Rencana Induk. Dalam Rencana Induk dijabarkan dua program utama dengan tujuan utama pulihnya kembali fasilitas produksi pertanian, dan pengembangan serta peningkatan kualitas hasil pertanian.

Tabel 4 - 34
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan
Sub Bidang Pertanian

RENCANA INDUK	RENSTRA BRR	RPJMD	Perencanaan Lembaga Donor/NGO
Di Rencana Induk, sub bidang pertanian terdapat 2 (dua) program yaitu : (1) Perbaikan & pembangunan kembali prasarana umum dan (2) Pemulihan usaha ekonomi masyarakat dan partisipasi Swasta.	Renstra BRR menjabarkan melalui 4 (empat) program yaitu (1) Pemulihan sarana irigasi, (2) Pemulihan pusat penjualan hasil produksi; (3) Pengembangan dan Peningkatan kualitas hasil produksi; (4) Pemulihan fasilitas pendukung pertanian dan budidaya perairan. Adapun Program tersebut dijabarkan melalui kegiatan: • Rehabilitasi lahan sawah, • Penghijauan pekarangan, • Lining jaringan irigasi, • Bantuan material jalan usaha tani, • Balai Benih (BBU dan BBI), • Alsintan dan Pengadaan Gudang Alsintan, • Gudang dan mesin RMU, • Balai Pertemuan Petani.	<u>Prov.NAD</u> : 1) Program peningkatan dan pemasaran hasil produksi pertanian melalui pembangunan terminal agribisnis dan pengembangan daerah agrowisata. 2) Peningkatan penerapan teknologi pertanian <u>Kab.Nias</u> : NA <u>Kab.Nias Selatan</u> : 1) Penguatan struktur ekonomi berbasis pertanian 2) Pengembangan produk olahan (agro industri) 3) Pengembangan hasil pertanian berorientasi pasar 4).Pengembangan balai penyuluhan (BPP) untuk menjamin produk lokal regional 5).Meningkatkan pengawasan mutu pupuk pestisida 6).Meningkatkan kualitas SDM penyuluh pertanian 7). Publikasi metode maupun paket usaha pertanian 8)Pengadaan peternakan	Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Lembaga donor/NGO, mencakup : 1). Area of agricultural land rehabilitated (Hectares) 2). Length of irrigation canal new/rehabilitated (meter) 3). Amount of seeds and fertilizer provided (Kg) 4). Agricultural machines provided 5). Area of cages rebuilt/rehabilitated (Sq meters) 6). livestock provided Total komitmen awal keseluruhan adalah sebesar 209 juta USD. (termasuk komitmen awal pemulihan bidang perikanan dan kelutan)

Sumber : Analisa Tim P3B Bappenas

Rencana Strategis (Renstra) BRR menerjemahkan Rencana Induk bidang pemulihan pertanian dengan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mengembalikan aset pertanian seperti Rehabilitasi lahan sawah, Penghijauan pekarangan, Lining jaringan irigasi, Bantuan material jalan usaha tani, Balai Benih (BBU dan BBI), Alsintan, Pengadaan Gudang Alsintan , Gudang dan mesin RMU, Balai Pertemuan Petani. Pemerintah Provinsi NAD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012 juga telah merencanakan hal dimaksud dalam Rencana Induk melalui

Program dan Kegiatan dalam APBD tahun 2006 dan tahun 2007, termasuk melalui penggunaan teknologi pertanian yang tepat untuk peningkatan produksi pertanian.

Perencanaan yang dilakukan oleh Lembaga Donor/NGO dengan berbagai kegiatan juga telah sejalan yang ditetapkan dalam rencana induk, seperti penyediaan bantuan ternak, rehabilitasi lahan pertanian, perbaikan irigasi, dan penyediaan bibit unggul, untuk peningkatan produksi. Lembaga donor/NGO sangat serius terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan pertanian dan perikanan kelautan sebagai sub bidang yang paling parah akibat tsunami. Adapun Total komitmen awal keseluruhan pemulihan bidang pertanian, perikanan dan kelautan adalah sebesar 209 juta USD.

Secara keseluruhan, dengan mengacu kepada Rencana Induk yang mengamanatkan pemulihan bidang pertanian pada dua sisi pembangunan yaitu pembangunan prasarana ekonomi dan pemulihan usaha ekonomi masyarakat/swasta, maka baik perencanaan BRR, Pemerintah Daerah, maupun donor/NGO, nampak masih terfokus pada satu sisi pembangunan saja, yaitu pembangunan prasarana perekonomian, sementara pembangunan pada sisi pemulihan usaha belum mendapatkan perhatian memadai.

4.1.1.4.3 Sub bidang Pariwisata

Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan Pariwisata, baik yang dimiliki BRR NAD-Nias, Pemerintah Daerah dan Lembaga Donor/NGO, juga secara garis besar telah mengacu kepada Rencana Induk. Dalam Rencana Induk dijabarkan 1 (satu) program yaitu Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana & Prasarana di Kawasan serta Objek & Daya Tarik Wisata (ODTW).

Tabel 4 - 35
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan
Sub Bidang Pariwisata

RENCANA INDUK	RENSTRA BRR	RPJMD	Perencanaan Lembaga Donor/NGO
Rencana Induk subbidang pariwisata terdapat 1 (satu) program yaitu Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana & Prasarana di Kawasan serta Objek & Daya Tarik Wisata (ODTW), yang tidak ditemui pada Renstra BRR.	Sementara itu, pada Rencana Induk terdapat 2 (dua) Program yaitu (1) Rehabilitasi & Rekonstruksi sarana & prasarana pariwisata yang rusak terkena bencana; dan (2) Pengadaan sarana angkutan wisata darat, yang tidak terdapat pada Renstra BRR subbidang pariwisata. Adapun Program tersebut dijabarkan melalui kegiatan Pemugaran Kawasan Wisata di pulau Sabang, Pulau Banyak, Ujung Batee, Lampuuk, Kota Sabang, dan	<u>Prov.NAD :</u> Pengembangan Pemasaran Pariwisata melalui: 1. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran pariwisata 2. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 3. Pelatihan pemandu wisata terpadu Pengembangan Destinasi Pariwisata melalui: 1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 2. Pembuatan Masterplan pengembangan kawasan wisata <u>Kab. Nias :</u> NA	Program dan Kegiatan yang Direncanakan oleh Lembaga donor/NGO, mencakup : Pemulihan sarana dan prasarana pariwisata di kab. Aceh besar; kota banda aceh; kab. Nias selatan, Kota sabang, Kab. Aceh singkil; kab. Aceh selatan; kab. Aceh barat daya; kab. Nagan raya Total komitmen awal keseluruhan sebesar 1,9 juta USD.

RENCANA INDUK	RENSTRA BRR	RPJMD	Perencanaan Lembaga Donor/NGO
	pengembangan sarana dan site plan wisata.	Kab.Nias Selatan : NA	

Sumber : Analisa Tim P3B Bappenas

Rencana Strategis (Renstra) BRR menerjemahkan Rencana Induk bidang pemulihan pariwisata dengan 2 (dua) Program yaitu (1) Rehabilitasi & Rekonstruksi sarana & prasarana pariwisata yang rusak terkena bencana; dan (2) Pengadaan sarana angkutan wisata darat dengan berbagai program dan kegiatan yang ditujukan utamanya untuk mengembalikan Daya tarik wisata. Kegiatan yang telah dan akan diprogramkan yaitu merealisasikan Pemugaran Kawasan Wisata di pulau Sabang, Pulau Banyak, Ujung Batee, Lampuuk, Kota Sabang, dan pengembangan sarana dan site plan wisata.

Pemerintah Provinsi NAD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012 juga telah merencanakan hal dimaksud dalam Rencana Induk melalui Program dan Kegiatan dalam APBD tahun 2006 dan tahun 2007 terutama di Kab.Aceh Besar dan Kab.Aceh Singkil. Berbeda dengan rencana induk program dan kegiatan pada APBD telah merencanakan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran dan promosi pariwisata. Terdapat pula kegiatan Pelatihan terpadu untuk meningkatkan kapasitas pemandu wisata. Adapun program dan kegiatan lainnya seperti, Pembangunan obyek wisata lampuuk dan tahura saree, Pembangunan sarana monumen penerbangan Kec.Sukamakmur, Pembinaan dan pergelaran kesenian tradisional, pemugaran cagar budaya Mesjid Bung Sidom dan Kuburan masal. Pemerintah Provinsi NAD juga telah merencanakan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran pariwisata.

Perencanaan yang dilakukan oleh Lembaga Donor dengan berbagai kegiatan juga telah sejalan dengan Rencana Induk, yang mencakup kegiatan pemulihan sarana dan prasarana pariwisata, yang dilaksanakan oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), UNDP (United Nations Development Programme), FFI (Flora Fauna International), IFC (International Finance Corporation), LEAP (Local Empowerment Assistance Project Inc.), PanEco Foundation, AWSF (Aceh Water Sports Foundation) di berbagai Kab/Kota di Prov.NAD dan Kep.Nias Provinsi Sumatera Utara.

4.1.1.4.4 Sub bidang Perdagangan dan Perindustrian

Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan Perdagangan dan Perindustrian, baik yang dimiliki BRR NAD-Nias, Pemerintah Daerah dan Lembaga Donor/NGO, secara garis besar juga telah mengacu kepada Rencana Induk. Dalam Rencana Induk dijabarkan untuk sub bidang perdagangan terdapat 5 (lima) program Sedangkan untuk sub bidang perindustrian terdapat 2 (dua) program. Program-program tersebut menekankan pada pemulihan sarana produksi dan sarana perdagangan guna peningkatan kapasitas/produktivitas produksi dan kelancaran aktivitas perdagangan.

Tabel 4 - 36
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

RENCANA INDUK	RENSTRA BRR	RPJMD	Perencanaan Lembaga Donor/NGO
Di Rencana Induk sub bidang perdagangan terdapat 5 (lima) program yaitu (1) (Masa Tanggap Darurat: Tenda Pasar Darurat; (2) Rehabilitasi & Rekonstruksi; (3) Pasar Tradisional Permanen; (4) Pasar Grosir/Induk; (5) Pergudangan; Kemetrolagian dan Koordinasi Posko Rencana Induk subbidang perindustrian terdapat 2 (dua) program yaitu (1) Rekonstruksi Sarana Laboratorium dan Sarana Baristan; dan (2) Rekonstruksi Sarana Laboratorium dan Sarana SMTI.	Program pemulihan sub bidang perdagangan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan seperti : Pembangunan/rehabilitasi pasar, dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pedagang Pasar (Revolving). Sedangkan program Bidang Perindustrian dilaksanakan melalui kegiatan : Pembangunan/Rehabilitasi pelabuhan malahayati, BLM Masyarakat Industri, Penyediaan Fasilitas Industri, Pengembangan Desa Batik Aceh, Pengembangan Industri oleh Dekranas, Bantuan pengembangan Ekonomi produktif, BLM Sentra dan Non Sentra Industri, dan BLM Modal LKM	<u>Prov. NAD :</u> a. Peningkatan kerjasama perdagangan internasional melalui perluasan pasar serta promosi b. Peningkatan ekspor dan IKM (Industri Kecil dan Menengah) c. Pengembangan sentra industri potensial seperti makanan khas Aceh dan berbagai kerajinan <u>Kab. Nias</u> : NA <u>Kab. Nias Selatan</u> : Bantuan modal kerja industri rumah tangga	Program dan Kegiatan yang Direncanakan oleh Lembaga donor/NGO, mencakup : Penyediaan/pembangunan kembali pabrik, pemberian pinjaman lunak, pengembangan usaha skala kecil dan menengah, pengembangan kemitraan, lembaga keuangan mikro, penyediaan fasilitas industri dan pembangunan pasar tradisional. Total komitmen awal keseluruhan sebesar 9,1 juta USD.

Sumber : Analisa Tim P3B Bappenas

Rencana Strategis (Renstra) BRR menerjemahkan Rencana Induk bidang pemulihan Perdagangan dan Perindustrian melalui beberapa kegiatan seperti : Pembangunan/rehabilitasi pasar, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pedagang Pasar (Revolving). Sedangkan pada Bidang Perindustrian melalui kegiatan : Pembangunan/Rehabilitasi pelabuhan malahayati, BLM Masyarakat Industri, Penyediaan Fasilitas Industri, Pengembangan Desa Batik Aceh, Pengembangan Industri oleh Dekranas, Bantuan pengembangan Ekonomi produktif, BLM Sentra dan Non Sentra Industri, dan BLM Modal LKM. Berbeda dengan rencana induk, program dan kegiatan pada Renstra BRR selain menekankan pada pembangunan fisik (Pasar) juga menekankan pada pemberian bantuan permodalan dan peralatan melalui Program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Pemerintah Provinsi NAD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012 juga telah merencanakan hal dimaksud dalam Rencana Induk,

melalui kegiatan dan program dalam APBD tahun 2006 dan 2007 dengan menekankan pada pembangunan pasar sebagai salah satu cara untuk menghidupkan kembali penghidupan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan rencana induk, program dan kegiatan RPJMD Prov.NAD selain menekankan pada pembangunan fisik juga menekankan Peningkatan kerjasama perdagangan internasional melalui perluasan pasar serta promosi. Adapun perencanaan yang dilakukan oleh Lembaga Donor/NGO dengan berbagai kegiatan juga telah sejalan yang ditetapkan dalam rencana induk, seperti pemberian pinjaman lunak, dan penyediaan fasilitas industri dan pembangunan pasar tradisional.

4.1.1.4.5 Sub bidang Tenaga Kerja

Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan Tenaga Kerja, baik yang dimiliki BRR NAD-Nias, Pemerintah Daerah dan Lembaga Donor/NGO, secara garis besar juga telah mengacu kepada Rencana Induk. Dalam Rencana Induk dijabarkan untuk subbidang tenaga kerja terdapat 4 (empat) program dengan menekankan pada kegiatan pemulihan pendapatan masyarakat pasca bencana dan pelatihan tenaga kerja.

Tabel 4 - 37
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan
Sub Bidang Tenaga Kerja

RENCANA INDUK	RENSTRA BRR	RPJMD	Perencanaan Lembaga Donor/NGO
Rencana Induk subbidang tenaga kerja terdapat 5 (lima) program yaitu (1) Rehabilitasi & Rekonstruksi Prasarana Publik; (2) Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja; (3) Perlindungan & Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja; dan (4) Perluasan & Pengembangan Kesempatan Kerja.	Renstra BRR hanya terdapat 1 (satu) program yaitu Pemulihan Pendapatan Masyarakat. Program tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Penyediaan lapangan kerja dan (2) Pelatihan	<u>Prov. NAD:</u> a. Pelatihan dan keterampilan tenaga kerja dengan membangun kemitraan dan program pelatihan sesuai dengan permintaan pasar kerja b. Perluasan lapangan kerja <u>Kab. Nias:</u> <u>Kab. Nias Selatan :</u>	Program dan Kegiatan yang Direncanakan oleh Lembaga donor/NGO, mencakup : 1) Participants of vocational training 2) Extension, training, information and testing programmes established 3) Government officials participated in training 4) Vocational training organized (batch or time) 5) Worker for cash work programme 6) Workshops completed 7) Community development organization established 8) Entrepreneur received grant 9) Employment programme implemented (Number of beneficiaries) 10) Equipment and

RENCANA INDUK	RENSTRA BRR	RPJMD	Perencanaan Lembaga Donor/NGO
			supplies provided (Value USD) 11) People served 12) Research centers or laboratories supported/provided Total komitmen awal keseluruhan sebesar 32 juta USD.

Sumber : Analisa Tim P3B Bappenas

Rencana Strategis (Renstra) BRR menerjemahkan Rencana Induk bidang pemulihan Tenaga Kerja melalui 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Penyediaan lapangan kerja dan (2) Pelatihan. Pemerintah Provinsi NAD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012 juga telah merencanakan hal dimaksud dalam Rencana Induk, melalui kegiatan dan program dalam APBD tahun 2006 dan 2007 dengan menekankan pada Memberikan bantuan/pelatihan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja (di Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Simeulue, Aceh Singkil), Pembuatan Kebun Cabe di Sabang, Perbaikan Saluran Air, Pembuatan Saluran Irigasi di Aceh Besar; dan Perbaikan sarana publik, rehab jalan di Banda Aceh. Berbeda dengan rencana induk, program dan kegiatan pada baik pada Renstra BRR maupun RPJMD Prov.NAD belum mengakomodir Program Perlindungan & Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. Perencanaan yang dilakukan oleh Lembaga Donor/NGO dengan berbagai kegiatan juga telah sejalan yang ditetapkan dalam rencana induk, terutama pada program pelatihan tenaga kerja dan kegiatan “Cash for Work” dalam rangka pemulihan pendapatan. Adapun total komitmen awal lembaga donor/NGO dalam pemulihan ketenagakerjaan sebesar 32 juta USD.

4.1.1.4.6 Sub bidang Koperasi & Usaha Kecil

Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan Koperasi & Usaha Kecil, baik yang dimiliki BRR NAD-Nias, Pemerintah Daerah dan Lembaga Donor/NGO, secara garis besar juga telah mengacu kepada Rencana Induk. Dalam Rencana Induk dijabarkan untuk subbidang tenaga kerja terdapat terdapat 1 (satu) program yaitu Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana Publik, dengan penekanan pada kegiatan bantuan kredit murah bergulir, pemberdayaan koperasi dan UKM, serta pembinaan kemitraan.

Tabel 4 - 38
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan
Sub Bidang Koperasi & Usaha Kecil

RENCANA INDUK	RENSTRA BRR	RPJMD	Perencanaan Lembaga Donor/NGO
Rencana Induk Koperasi dan Usaha Kecil terdapat 1 (satu) program yaitu Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana Publik.	Program dalam renstra BRR, yaitu : (1) Pemberian bantuan yg berkaitan dgn tanah yg tdk dpt digunakan sbg tempat permukiman & bantuan perumahan, sistem insentif kredit & bantuan teknis utk memperoleh akses kpd sumber daya produktif; (2) Pemberian bantuan Rp. 5 - 15 juta sbg pemulihan sarana atau utk melakukan kegiatan usaha dana pendamping (matching fund) dan (3) Pemberian hibah langsung, maksimal Rp. 2 juta. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan dilapangan, yaitu : Pemberdayaan Koperasi dan UKM, Bantuan Modal LKM Usaha Masyarakat, Aceh Micro Finance, Pelatihan Pengelola LKM, Pelatihan Kewirausahaan, Bantuan teknis dan manajemen LKM, Kelembagaan koperasi terpadu, Bantuan Langsung Masyarakat Masyarakat, Melalui Koperasi Terpadu, dan Modal UKM Integrated Trading House.	Prov. NAD : Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro dan Menengah. Kab. Nias : Kerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar dari luar daerah. Kab. Nias Selatan : NA	Program dan Kegiatan yang Direncanakan oleh Lebagadonor/NGO dalam pemulihan koperasi dan pengembangan UKM, yaitu: 1). Loans provided to medium business (loan > IDR 50 Million) 2)'Loans provided to micro business (loan < 5 million) 3). Loans provided to small business (loan IDR 5-50 million) 4).Micro business developed 5). Partnership established 6).Business developed 7).Microfinance institutions supported/established. Total komitmen awal keseluruhan sebesar 173 juta USD.

Sumber : Analisa Tim P3B Bappenas

Rencana Strategis (Renstra) BRR menerjemahkan Rencana Induk bidang pemulihan koperasi dan UKM melalui berbagai kegiatan seperti Pemberdayaan Koperasi dan UKM, Bantuan Modal LKM Usaha Masyarakat, Aceh Micro Finance, Pelatihan Pengelola LKM, Pelatihan Kewirausahaan, Bantuan teknis dan manajemen LKM, Kelembagaan koperasi terpadu, Bantuan Langsung Masyarakat Masyarakat, Melalui Koperasi Terpadu, dan Modal UKM Integrated Trading House. Namun berdasarkan catatan Tim P3B Bappenas, kegiatan kemitraan (Partnership) antara UKM dengan Industri besar (bapak asuh) belum ada.

Pemerintah Provinsi NAD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012 juga telah merencanakan hal dimaksud dalam Rencana Induk, melalui kegiatan dan program dalam APBD tahun 2006 dan 2007 dengan berbagai

kegiatan seperti Penataan dan Perkuatan kelembagaan koperasi dan UKM, Monitoring dan evaluasi perkoperasian, Pengembangan sarana dan perkuatan usaha bagi koperasi unggulan, Perkuatan modal usaha sarana bagi UKI, Bimbingan teknis KSP/USP Koperasi Pola Syari'ah, Analisis diklat bagi Koperasi dan UKM, Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi dan UKM.

Perencanaan yang dilakukan oleh Lembaga Donor/NGO dengan berbagai kegiatan juga telah sejalan yang ditetapkan dalam rencana induk, terutama pada program kredit mikro. Adapun total komitmen awal lembaga donor/NGO dalam pemulihan ketenagakerjaan sebesar 32 juta USD.

4.1.1.5. Bidang Kelembagaan dan Hukum

4.1.1.5.1 Kelembagaan

Konsistensi antara perencanaan sub bidang kelembagaan pada Rencana Induk dan Rencana Aksi yaitu Rencana Aksi sudah mengacu pada Rencana Induk, namun pada perkembangannya di lapangan tidak semuanya dapat dijadikan acuan khususnya pada rincian kegiatan dan volume capaian/target (fisik). Hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu :

- Kebutuhan riil di lapangan yang jauh lebih besar/rendah dari yang ditetapkan dalam Rencana Induk
- Program/kegiatan yang direncanakan diluar dari Rencana Induk
- Usulan aspirasi pemerintah daerah/lembaga pengguna/masyarakat di Kabupaten/Kota terkait

Pada kegiatan rehabilitasi dan pembangunan kantor pemerintahan, kebutuhan riil yang lebih rendah dari Rencana Induk yaitu pada pembangunan Kantor/Dinas/Badan/DPRD/Meuligo, sedangkan sarana lainnya telah melebihi target rencana induk yaitu kantor camat dan kantor desa/kelurahan. Melalui verifikasi di lapangan oleh BRR diketahui kebutuhan riil kantor mukim/balee musyawarah yaitu 419 unit, dimana di dalam rencana induk tidak dicantumkan target perencanaannya. Selain itu juga ada penambahan kegiatan oleh BRR yaitu pembangunan rumah dinas camat. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4 - 391
Perencanaan Sarana Kantor Pemerintahan Tahun 2005-2009
Antara Rencana Induk dengan Rencana Aksi BRR

Sarana kantor pemerintahan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009
Kantor KDH/Dinas/Badan/DPRD/Meuligo	Unit	76	11
Kantor Kecamatan	Unit	23	69
Rumah Dinas Camat	Unit	-	106
Kantor Desa/Lurah	Unit	450	1.119
Kantor Mukim/Bale Musyawarah	Unit	*	419

Sumber : Laporan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, BRR Juli 2007
Keterangan : *) Target spesifik belum dijabarkan di dalam Rencana Induk

Perbedaan lainnya yaitu pada cakupan lokasi, BRR membangun sistem kelembagaan secara *integratif* (keseluruhan), diawali dengan memprioritaskan membangun bangunan yang hilang/rusak akibat tsunami, kemudian membangun sistem kelembagaan pada

beberapa daerah yang merupakan daerah pemekaran, sedangkan pada Rencana Induk hanya merencanakan membangun kembali/rehabilitasi bangunan yang rusak akibat bencana tsunami yaitu di 1 provinsi dan 12 kabupaten/kota.

Pada kegiatan non fisik bidang kelembagaan (kegiatan lintas kabupaten), target pada rencana induk untuk tahun 2005-2009 tidak dijabarkan secara spesifik (kuantitas) melainkan hanya mengenai lokasi cakupan yaitu 1 provinsi dan 12 kabupaten/kota. Selain itu pada dokumen rencana aksi juga tidak tercantum kebutuhan riil kegiatan non fisik tersebut.

Konsistensi antara Rencana Induk dengan RPJMD bidang kelembagaan dapat dilihat melalui kesesuaian program dengan rencana induk yaitu:

- Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.
- Penataan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah
- Penataan Administrasi Kependudukan
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Program pengelolaan pertanahan

Program dan kegiatan rutin lainnya yang dilaksanakan oleh Pemda dan tercantum di dalam Rencana Induk, diantaranya:

- Peningkatan Profesionalisme Pemda seperti kegiatan penyediaan aparat Pemda melalui rekrutmen CPNS dan tenaga kontrak
- Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemda
- Program Peningkatan kerjasama antar daerah
- Penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi
- Pengelolaan sumberdaya manusia aparat
- Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

RPJMD BIDANG KELEMBAGAAN
Provinsi NAD (2007-2012)

- Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur
- Pembangunan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Kabupaten Nias (2006-2011)

- Penghematan anggaran aparatur negara
- Reformasi birokrasi
- Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah
- Rehabilitasi bangunan khusus
- Memberhentikan sementara dari jabatannya bagi PNS yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus TIPIKOR
- Bantuan hukum bagi PNS yang didakwa melakukan TIPIKOR
- Kerjasama program dan pembiayaan kepada LSM/organisasi untuk melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat di lokasi terisolir

Kabupaten Nias Selatan (2006-2011)

- Terciptanya *Good Governance*
- Penyusunan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- Peningkatan partisipasi masyarakat
- Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Daerah Provinsi
- Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan
- Pemekaran Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
- Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
- Tapal batas wilayah pemerintahan Kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan
- Pemetaan wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan

Sumber : Laporan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, BRR Juli 2007

4.1.1.5.2 Hukum

Konsistensi antara perencanaan sub bidang hukum antara Rencana Induk dan Rencana Aksi yaitu Rencana Aksi sudah mengacu pada Rencana Induk, namun pada perkembangannya di lapangan tidak semuanya dapat dijadikan acuan baik pada aspek program maupun kegiatan. Program di Rencana Aksi sub bidang hukum terdiri dari 2 (dua) program yaitu rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana hukum dan program pemberdayaan dan pengembangan institusi hukum. Sedangkan pada rencana induk terdiri dari 4 (empat) program. Dua program lainnya yang tidak tercantum pada Rencana Aksi adalah 1) Mewujudkan jaminan kepastian, perlindungan dan penegakan hukum dan HAM dan 2) Menetapkan payung hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada program rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana hukum terdapat perbedaan rincian kegiatan dan volume capaian/target (fisik) pada Rencana Aksi dikarenakan setelah dilaksanakannya verifikasi lapangan diketahui bahwa kebutuhan riil dalam dinamika perkembangan hukum di lapangan ada yang lebih besar dan lebih rendah dari yang ditetapkan dalam Rencana Induk. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4 - 402
Perencanaan Sarana dan Prasarana Hukum
Antara Rencana Induk dengan Rencana Aksi BRR

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009
A	Sarpras Kejaksaan Agung			
	Kejati Provinsi NAD	Unit	1	1
	Kejari	Unit	5	6
	Rumah Dinas (Kejaksaan Agung)	Unit	38	**
	Peralatan Kantor	Paket	6	**
	Kendaraan R2	Unit	38	**
	Kendaraan R4	Unit	15	**
	Kendaraan Tahanan	Unit	12	**
B	Sarpras Kanwil Depkumham			
	Rumah Dinas (Kanwil Depkumham)	Unit	70	**
	Lapas/Rutan	Unit	6	4
	Bapas/Rupbasan	Unit	2	1
	Kanwil Depkumham	Unit	1	1
	Kantor Imigrasi	Unit	2	2
	Kendaraan R2	Unit	8	**
	Kendaraan R4	Unit	10	**
	Peralatan Kantor	Paket	3	**
C	Sarpras Mahkamah Agung			
	PT/PTUN	Unit	2	1

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009
	Pengadilan Negeri	Unit	9	10
	Kendaraan R2 Pengadilan	Unit	25	**
	Kendaraan R4 Pengadilan	Unit	33	**
	Mahkamah Syari'ah	Unit	6	13
	Kendaraan R2 Mah. Syari'ah	Unit	33	**
	Kendaraan R4 Mah. Syari'ah	Unit	18	**
	Peralatan Kantor	Unit	17	**
	Pengadilan Militer	Paket	*	1
	Rumah Dinas (Mahkamah Agung)	Unit	179	**
	Pengawasan Pembangunan Gedung	Paket	*	**

Sumber : Laporan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, BRR Juli 2007

Keterangan : *) Target spesifik belum dijabarkan di dalam Rencana Induk

**) Target spesifik belum dijabarkan di dalam Rencana Aksi BRR

Kebutuhan riil yang lebih rendah dari Rencana Induk yaitu pada pembangunan Lapas/Rutan, Bapas/Rupbasan, dan Pengadilan Tinggi/PTUN, sedangkan sarana lainnya telah melebihi target rencana induk yaitu Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Syariah serta adanya penambahan kegiatan baru yaitu pembangunan Pengadilan Militer. Khusus untuk perencanaan pembangunan rumah dinas, pengadaan kendaraan dan peralatan oleh BRR belum diketahui kebutuhan riil karena belum dijabarkan di dalam Rencana Aksi.

Selain program yang bersifat fisik juga terdapat program/kegiatan non fisik sub bidang hukum yaitu pemberdayaan dan pengembangan institusi hukum, namun program tersebut baik yang terdapat di Rencana Induk maupun pada Rencana Aksi tidak mencantumkan volume capaian/target, sehingga tidak dapat disandingkan.

RPJMD BIDANG KETERTIBAN, KEAMANAN, DAN KETAHANAN MASYARAKAT
Provinsi NAD (2007-2012)

- Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

Kabupaten Nias (2006-2011)

- Mendorong partai politik untuk senantiasa memberikan pendidikan politik
- Mengupayakan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kabupaten Nias dengan DPRD

Sumber : Laporan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, BRR Juli 2007

Konsistensi antara Rencana Induk dengan dokumen perencanaan Pemda bidang hukum dapat dilihat melalui RPJMD, namun di dalam RPJMD tersebut tidak tercantum mengenai rencana pembangunan bidang hukum. Hal ini menjelaskan bahwa Pemda bukannya tidak melaksanakan kegiatan terkait dengan bidang hukum, namun hal ini dimungkinkan karena yang menangani hukum adalah instansi vertikal (hukum) di masing-masing daerah.

4.1.1.5.3 Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M)

Perencanaan program sub bidang K3M yang terdapat di Rencana Aksi sudah mengacu pada Rencana Induk yaitu sama-sama terdiri dari 4 (empat) program antara lain: refungsionalisasi kelembagaan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah, dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tergabung ke dalam penciptaan rasa aman masyarakat dan program pengembangan ketahanan masyarakat.

Beberapa kebijakan dalam sub bidang K3M diterapkan melalui koordinasi bersama Menkopolhukam, Menkominfo, Polri, TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Matra Integratif. Berdasarkan dokumen Rencana Induk pada program refungsionalisasi kelembagaan dijelaskan secara terperinci untuk bangunan yang terkait dengan Lembaga Menkopolhukam, Menkominfo, LSN, dan Polri sedangkan kegiatan lainnya tidak dijelaskan secara terperinci mengenai sasaran capaian volume/target. Kebutuhan riil refungsionalisasi kelembagaan pada Renaksi BRR belum diketahui karena belum dijabarkan secara lebih spesifik. Hal yang sama juga terjadi pada program lainnya yaitu 1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah, 2) dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi, 3) pengembangan ketahanan masyarakat, baik pada Rencana Induk dan Rencana Aksi belum mencantumkan volume capaian/target, sehingga tidak dapat disandingkan secara keseluruhan.

Konsistensi antara Rencana Induk dengan dokumen perencanaan Pemda bidang K3M dapat dilihat melalui RPJMD. Program yang sesuai dengan rencana induk yaitu pada program pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah. Sedangkan program lainnya tidak termasuk ke dalam rencana pembangunan Pemda yaitu pada program refungsionalisasi kelembagaan, dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi dan pengembangan ketahanan masyarakat.

4.1.2. Konsistensi Antar Perencanaan dengan Pelaksanaan

4.1.2.1. Bidang Perumahan dan Permukiman

Penelusuran konsistensi antar perencanaan dengan pelaksanaan adalah melalui identifikasi sisi perencanaan yang tercantum dalam Rencana Induk, Rencana Aksi NAD-Nias 2007-2009, dan komitmen hingga Oktober 2007. Sementara dari sisi pelaksanaan, diperoleh dari data rekapitulasi pelaksanaan pembangunan perumahan oleh seluruh pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk Donor/NGO dan Bapel RR, hingga Oktober 2007.

Pada pelaksanaannya, perlu adanya penyesuaian terhadap kondisi wilayah dan masyarakat melalui penyesuaian sasaran program Rencana Induk untuk kegiatan perumahan dan permukiman, tata ruang, pertanahan, dan lingkungan hidup di antaranya sebagai berikut:

Pencapaian sasaran program hingga tahun 2007 sesuai dengan Rencana Induk	Sebagian besar kegiatan lingkungan hidup diantaranya Rehabilitasi/Pemeliharaan Hutan Alam dan Lahan, Peningkatan Usaha Masyarakat Di sekitar kawasan hutan, Peningkatan kapasitas kelembagaan lokal, Rehabilitasi Hutan kota, dan Restorasi kawasan bufferzone.
Pencapaian sasaran program hingga tahun 2008 yang diperkirakan tidak akan mencapai sasaran program pada Rencana Induk <i>(sebagai akibat adanya kebutuhan yang belum</i>	Pembangunan Perumahan Penyusunan RTRW Provinsi dan Kab/Kota Sertifikat pengganti

<i>diidentifikasi pada waktu Rencana Induk disusun)</i>	
Pencapaian sasaran program dilakukan di luar sasaran program yang terdapat dalam Rencana Induk	<i>Village Mapping</i>
Sasaran Program dalam Rencana Induk yang sama sekali tidak dilaksanakan	-

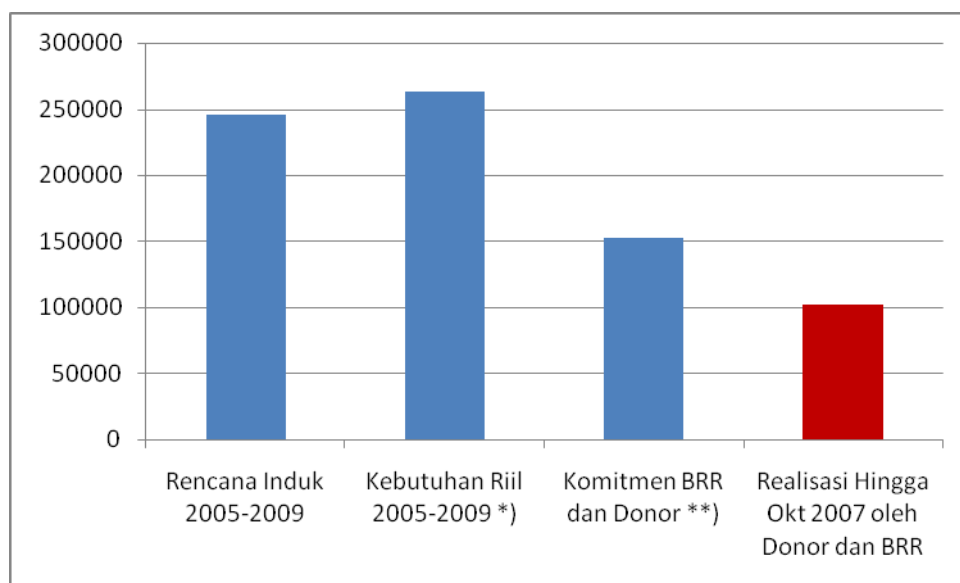
4.1.2.1.1 Perumahan dan Permukiman

Tabel 4 - 41
Perbandingan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Perumahan

Kegiatan	Rencana Induk	Kebutuhan Riil *)	Komitmen BRR dan Donor **)	Pelaksanaan Hingga Okt 2007 oleh Donor dan BRR
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah	245.996	263.425	152.526	102.063

Sumber: Rencana Induk, Rencana Aksi*), dan Dit. Pengendalian dan Monitoring, Deputy Perumahan dan Permukiman Bapel RR NAD-Nias, Nov2007 **)

Grafik 4 - 2
Gambaran Perencanaan dan Realisasi Pembangunan Rumah



Sumber: Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2007

Dari hasil analisis, terdapat beberapa poin mengenai konsistensi antar perencanaan dan pelaksanaan bidang perumahan:

- (1) Jumlah kebutuhan rumah antara Rencana Induk, Rencana Aksi, dan komitmen berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan hasil verifikasi kembali kebutuhan di

lapangan yang menunjukkan bahwa kebutuhan riil rumah lebih besar dari Rencana Induk. Sementara hingga Oktober 2007 ini, komitmen yang tercatat mengenai pembangunan rumah adalah sekitar 150 ribu rumah, atau 57,9 % dari kebutuhan riil, atau 62 % dari Rencana Induk. Hal ini mengindikasikan bahwa masih adanya kesenjangan antara kebutuhan riil rumah dengan dana yang tersedia.

- (2) Hasil pelaksanaan atau realisasi pembangunan perumahan oleh Bapel RR dan Donor/NGO hingga Oktober 2007 tercatat 102.063 rumah, atau sekitar 38,7 % dari kebutuhan riil, atau 41,5 % dari Rencana Induk. Sementara jika dibandingkan dengan komitmen, maka telah 67 % tercapai.
- (3) Dapat ditarik kesimpulan bahwa hingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias hingga Oktober 2007, pelaksanaan pembangunan perumahan mendekati 50 % kebutuhan rumah jika dibandingkan terhadap perencanaan yang tercantum di Rencana Induk maupun kebutuhan riil. Jika ditinjau dari strategi rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya pembangunan perumahan oleh Bapel RR, menggambarkan bahwa di akhir tahun 2007 diharapkan pembangunan perumahan mencapai tahap akhirnya.¹
- (4) Kontribusi Pemda dalam pembangunan perumahan dan permukiman pada beberapa contoh adalah dalam pembebasan lahan, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 3, persentase pembangunan sektor perumahan berbanding dengan total APBD pada beberapa Kab/Kota di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias masih sangat terbatas pada TA 2006 dan 2007. Dihadapkan dengan kebutuhan riil yang masih belum memenuhi target dalam pelaksanaannya, maka Pemda dalam hal ini memerlukan dukungan agar pembangunan perumahan dapat berkelanjutan pasca masa tugas BRR.
- (5) Mengenai kelengkapan Prasarana Dasar Permukiman yang belum terpenuhi dengan lengkap pada beberapa kawasan perumahan, hal ini juga perlu mendapat perhatian. Prasarana tersebut meliputi air bersih, drainase, sanitasi, dan jalan lingkungan. Di malam hari pada beberapa kawasan juga terlihat gelap karena belum terpasang dengan jaringan listrik.

Kenyataan di lapangan secara keseluruhan target pembangunan perumahan beserta kelengkapan prasarana dasarnya sulit untuk dilaksanakan. Beberapa kendala yang ada di antaranya:

- Rendahnya kualitas rumah terbangun sehingga banyak rumah yang tidak ditempati oleh penerima bantuan
- Ada sebagian *beneficiaries* yang tidak mendapat bantuan rumah atau ada yang mendapat rumah *double*
- Kontraktor mengalami hambatan fisik lokasi, hambatan non fisik lokasi, hambatan calon penerima bantuan (*beneficiaries*), internal kontraktor dan kontraktor mengalami *over cash flow* sehingga tidak melakukan penagihan tiap termin melainkan menunggu hingga termin terakhir.
- Kurangnya koordinasi internal serta koordinasi eksternal dalam Bapel BRR yang terkait dengan peran kelembagaan donor / NGO.

¹

Laporan Kegiatan 1 Tahun Bapel RR NAD-Nias: Membangun Tanah Harapan, April 2006

Ke depannya jumlah penerima bantuan perumahan ini masih perlu diverifikasi ulang terkait beberapa hal di atas, dan hal ini tentunya berdampak pada waktu pemulihan yang dapat lebih panjang dari waktu yang diperkirakan.

4.1.2.1.2 Tata Ruang

Penelusuran konsistensi antar perencanaan dengan pelaksanaan pada bidang tata ruang adalah melalui identifikasi sisi perencanaan yang tercantum dalam Rencana Induk dan Rencana Aksi NAD-Nias 2007-2009. Sedangkan sisi pelaksanaan adalah melalui proyeksi capaian kumulatif dari Rencana Aksi. Untuk bidang tata ruang pasca tsunami di NAD dan Nias, terdapat 2 (dua) kebutuhan yang utama, Revisi RTRW Kab/Kota dan Village Planning. Penataan ruang sendiri pada dasarnya adalah wewenang Pemerintah Daerah, dan hingga akhir 2007, kemajuan pekerjaan Revisi RTRW belum begitu optimal. Hingga saat ini beberapa RTRW Kab/Kota masih dalam proses pengerjaan. Sementara untuk kegiatan Village Planning, sudah 90 % selesai dari kebutuhan riil. Selengkapnya untuk kegiatan tata ruang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4 - 42
Perbandingan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Tata Ruang

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk	Kebutuhan Riil	Proyeksi Capaian Kumulatif
			2005-2009	2005-2009	2005-2007
1.	Penyusunan Rencana Tata Ruang				
a	Penyusunan RTRW Provinsi NAD	propinsi	1	1	1
b	Penyusunan dan Revisi RTRW Kabupaten/Kota (NAD dan Nias)	Kabupaten/ Kota	13	14	13
c	Perencanaan RDTR Kecamatan dan Kawasan Kota	Kota	8	27	20
d	RTBL/RTRK	Kabupaten/ Kota	13	**	16
	i. Penyusunan Rencana <i>Tsunami Heritage and Living Museum</i>		*	1	***
	ii. Penyusunan Rencana <i>Water front City</i> (Banda Aceh)		*	1	***
	iii. Perencanaan Kawasan lainnya		*	10	***
2.	Penyusunan SOP	Propinsi	1	2	3

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk	Kebutuhan Riil	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005-2007
			2005-2009	2005-2009	
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Buku Pedoman)	Kabupaten/ Kota	13		
3.	Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang	Propinsi	1	2	11
		Kabupaten/ Kota	13		
4.	Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Program Integrasi Sektoral)	Propinsi	1	1	2
		Kabupaten/ Kota	13		
5.	Pemantapan Kelembagaan Penataan Ruang	Propinsi	1	1	3
		Kabupaten/ Kota	13		
6	Rencana Tindak Manajemen Bencana	Kabupaten/ Kota	13	-	2
7	Perencanaan <i>Bottom Up Planning</i>	Unit	*	**	**
a	Kecamatan <i>Action Plan</i>	Unit	*	148	0
b	<i>Village Planning</i>	Unit	*	887	854*)
8	Studi	Unit	*	6	0

Sumber: Rencana Aksi NAD-Nias 2007-2009, Laporan Kegiatan 2 Tahun Bapel RR
Keterangan: *) Data terakhir dari Dit. Penataan Ruang Bapel RR, Jan 2008

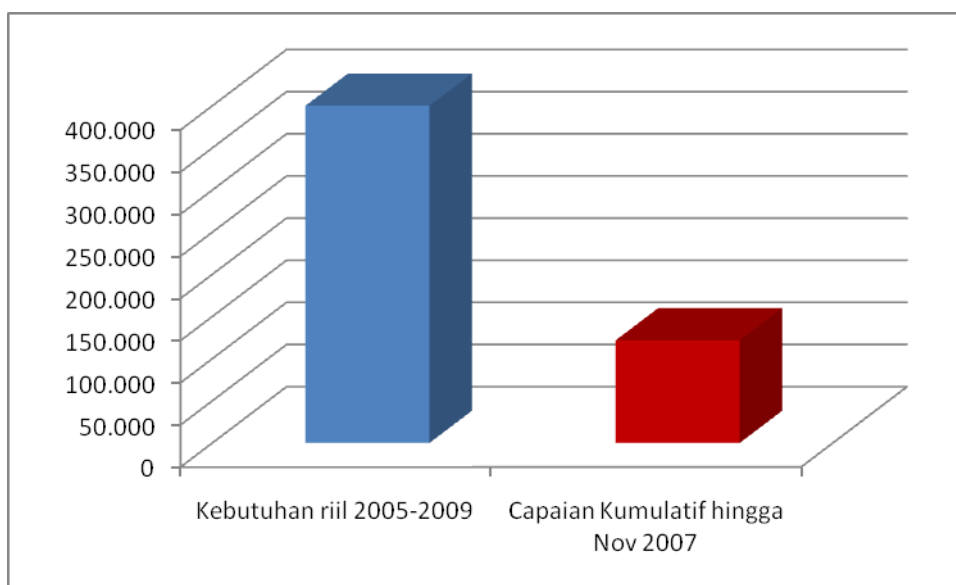
Hasil penelusuran terhadap komposisi kegiatan tata ruang terhadap APBD seperti yang sudah dijelaskan pada bab 3, menunjukkan proporsi yang sangat minim. Meskipun saat ini beberapa Kab/Kota tengah menyelesaikan penyusunan RTRW baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, namun di sisi lain pelaksanaan perencanaan mikro di tingkat desa hampir selesai dari target yang ditetapkan oleh Bapel RR. Selain itu, walaupun perencanaan desa ini dianggap sebagai unit terkecil dalam perencanaan tata ruang, kemungkinan kesenjangan akan tetap ada ketika perencanaan desa telah selesai seluruhnya.

Ditinjau dari RPJMD Provinsi NAD 2007-2012 yang tercantum dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2007-2009, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa program jangka menengah untuk tata ruang sebagian besar adalah revisi RTRW baik tingkat Kab/Kota. Dengan demikian, dokumen RTRW itu sendiri seyogyanya sudah terselesaikan seluruhnya, agar pelaksanaan revisi juga dapat dilaksanakan tepat waktu.

4.1.2.1.3 Pertanahan

Penelusuran konsistensi antar perencanaan dengan pelaksanaan pada bidang pertanahan adalah melalui identifikasi sisi perencanaan yang tercantum dalam Rencana Induk dan Rencana Aksi NAD-Nias 2007-2009. Sedangkan sisi pelaksanaan adalah melalui proyeksi capaian kumulatif dari Rencana Aksi. Terdapat 9 program kegiatan pada bidang pertanahan yang direncanakan dalam Rencana Induk seperti yang disajikan pada tabel. Dari 9 (sembilan) program dan kegiatan tersebut hanya 1 (satu) yang sudah terealisasi yakni Program Pembuatan Sertifikat Pengganti, sedangkan program-program lainnya belum. Dari identifikasi kebutuhan riil sertifikat pengganti sebanyak 400.000 buah, hingga Oktober 2007, telah diterbitkan sebanyak 121.723 bidang sertifikat (Data Kanwil BPN Provinsi NAD, Nov 2007), atau sekitar 30,4 % telah terealisasi.

Grafik 4 - 3
Realisasi Capaian Kumulatif Penerbitan Sertifikat Pengganti Hingga November 2007



Sumber: Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2007

Kendala dan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pekerjaan di antaranya: (1) Sebagian pemilik tanah/ahli waris dan aparat desa tidak berada di tempat pada saat petugas ke lokasi, (2) Peta Kadastral yang telah diterbitkan oleh Tim Ajudikasi masih terkendala terhadap penunjukan lokasi bidang tanah, (3) Terbatasnya tenaga dan dana yang memadai, (4) Adanya perbedaan khususnya terhadap pembuatan /pembatalan sertifikat lama yang terdapat dalam CDA dengan Perpu No.2 Tahun 2007 (Pasal 7), dimana dalam CDA disebutkan bahwa buku tanah di daerah yang telah dilakukan pendaftaran tanah dinyatakan tidak berlaku, sedangkan dalam Pasal 7 Perpu, pembatalan tersebut hanya berlaku terhadap sertifikat hilang rusak atau musnah.

Tabel 4 - 43
Perbandingan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pertanahan

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk	Kebutuhan Riil	Capaian kumulatif Hingga Nov 2007
			2005-2009	2005-2009	
1	Pemulihan pelayanan pertanahan 2005-2006	Propinsi	1	**	0
		Kab/Kota	13	**	0
2	Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan pengelolaan dan pelayanan pertanahan 2005-2008	Propinsi	1	**	0
		Kab./Kota	13	**	0
3	Pembangunan fisik kadastral 2005-2006	Propinsi	1	**	0
		Kab/Kota	13	**	0
4	Penyusunan rencana tata guna tanah 2005	Propinsi	1	**	0
		Kab/Kota	13	**	0
5	Pengadaan peralatan komputerisasi, training, serta pembangunan <i>database digital</i> 2005-2006	Propinsi	1	**	0
		Kab/Kota	13	**	0
6	Pembuatan sertifikat pengganti 2005-2006	Propinsi	1	400.000 Bidang Sertifikat	121.723 Bidang Sertifikat
		Kab/Kota	13		
7	Konsolidasi tanah 2005-2009	Propinsi	1	**	0
		Kab/Kota	13	**	0
8	Penanganan sengketa pertanahan 2005-2008	Propinsi	1	**	0
		Kab./Kota	13	**	0
9	Penyusunan naskah perundang-undangan dan penyuluhan	Propinsi	1	**	0
		Kab/Kota	13	**	0

Sumber: Rencana Aksi NAD-Nias 2007

Khusus mengenai kegiatan rekonstruksi administrasi pertanahan, rencana kegiatan adjudikasi RALAS (Reconstruction Aceh Land Administration System) tahun 2006 yang dilaksanakan pada bulan Juli 2006 hingga Mei 2007 meliputi 4 (empat) kegiatan yang tersebar di 9 Kab/Kota di Provinsi NAD, seperti telah diuraikan pada bab 3 (tiga). Adjudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.² Berikut dijelaskan lebih rinci mengenai kegiatannya pada tabel.

² Pengertian Adjudikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Tabel 4 - 44
Kegiatan dan Realisasi RALAS Tahun 2006/2007

No.	Hasil Kegiatan	Realisasi (Bidang)	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Penerbitan Sertifikat/ Pendaftaran Pertama Kali	103,586	Penyerahan / pendistribusian sertifikat kepada pemilik tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota terus diupayakan. Bagi pemilik sertifikat yang tidak berada di tempat / desa letak tanah akan diumumkan di papan pengumuman desa atau media cetak agar dapat mengambil sertifikatnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota setempat.	
2.	Tanah Wakaf	1,379	Peta bidang tanah hasil pengukuran Tim Ajudikasi disampaikan / dikoordinasikan dengan Kantor Agama Kabupaten / Kota untuk program pensertifikatan tanah wakaf oleh Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota.	Dana proses pendaftaran tanahnya dikoordinasi/ diprogramkan dalam kegiatan pensertifikatan tanah wakaf oleh Kantor Agama Kabupaten/Kota.
3.	Tanah Desa	937	Peta bidang tanah yang telah tersedia disampaikan / dikoordinasikan dengan Pemda/desa setempat dengan melengkapi persyaratan dan alas hak atas tanahnya untuk proses pendaftaran sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.	Dana proses pendaftaran tanahnya dialokasikan oleh instansi/desa yang bersangkutan.
4.	Tanah Kuburan	606	Setelah persyaratan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku terpenuhi selanjutnya diproses pendaftaran tanahnya dengan mempergunakan peta bidang tanah hasil pengukuran Tim Ajudikasi	
5.	Tanah Insatansi Pemerintah	1.589	Peta bidang tanah hasil pengukuran Tim Ajudikasi disampaikan / dikoordinasikan dengan instansi yang bersangkutan untuk proses lebih lanjutnya dan melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran hak atas tanahnya.	Biaya proses pendaftaran haknya dialokasikan oleh instansi yang bersangkutan atau dialokasikan dalam DIPA tahun berikutnya.
6.	Tanah Fasos/ Fasum	680	Setelah terpenuhi alah hak atau bukti penguasaan dan pemilikan tanah sesuai ketentuan yang berlaku dilanjutkan dengan proses pendaftaran haknya.	Dana proses pendaftaran haknya dibiayai oleh pemohon hak atas tanah.
7.	Tanah dalam sengketa	862	Setelah proses perdamaian atau telah mempunyai keputusan hukum yang tetap dilanjutkan pendaftaran hak atas tanahnya oleh yang berhak terhadap tanah tersebut.	
8.	Tanah belum penetapan ahli waris/ perwalian	99	Setelah kesepakatan/penetapan ahli waris dan perwalian dapat dilanjutkan proses pendaftaran hak atas tanahnya.	Mengalokasikan kembali biaya yang belum dipakai dalam DIPA tahun berikutnya untuk proses pendaftaran hak atas tanahnya
9.	Tanah Subyek hak/pemilik	5.778	Dapat diproses kembali pendaftaran hak atas tanahnya jika subyek hak telah diketahui oleh Kantah Kab/Kota.	Mengalokasikan kembali biaya yang belum dipakai dalam

No.	Hasil Kegiatan	Realisasi (Bidang)	Tindak Lanjut	Keterangan
	tidak diketahui*)			DIPA tahun berikutnya.
10.	Tanah subyek tidak mendaftar*)	30.647	Apabila subyek hak telah kembali ke lokasi letak tanah, dapat diproses kembali pendaftaran hak atas tanahnya oleh Kantah Kab/Kota.	S.d.a
11.	Tanah telah bersertifikat	10.858	a. Kantah Kab/Kota akan melakukan GIM (graphic Index Mapping) bagi sertifikat yang masih dimiliki oleh pemilik tanah b. Penerbitan sertifikat pengganti bagi sertifikat yang hilang/rusak	a. Diperlukan alokasi dana untuk melakukan GIM terhadap sertifikat dimaksud b. Mengalokasikan biaya pengumuman di media cetak dalam rangka proses penerbitan sertifikat hilang
12.	Tanah yang tidak dimohon pendaftaran hak atas tanahnya*)	433	Diadakan pendekatan sosialisasi tentang manfaat sertifikat hak atas tanah kepada pemilik tanah, jika telah bersedia diproses pendaftaran haknya dapat dilanjutkan	Mengalokasikan kembali biaya yang belum terpakai dalam DIPA tahun berikutnya.

Sumber: Paparan Laporan Kegiatan Ajudikasi RALAS 2006, Kanwil BPN NAD, Nov 2007

*) Pernyataan Kepala Desa yang bersangkutan

Perpu No.2 Tahun 2007 berisikan mengenai penanganan permasalahan hukum dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias. Khusus di bidang pertanahan, permasalahan yang muncul dengan terhambat disahkannya Perpu ini di antaranya sertifikat tanah banyak yang belum diberikan oleh BPN kepada pemiliknya karena belum adanya landasan hukum.

Mengenai kegiatan pendukung oleh Pemda, seperti telah dijelaskan pada bab 3, Pemda dalam beberapa contoh kasus melaksanakan pembebasan lahan untuk pembangunan berbagai kepentingan umum. Namun demikian proporsi kegiatannya tidak semua terdapat dalam APBD Kab/Kota yang ditelusuri. Keberlanjutan untuk kegiatan di bidang pertanahan menyangkut penyelesaian sertifikat tanah dan konsolidasi tanah yang tidak terselesaikan oleh Bapel RR pada akhirnya akan diemban oleh Pemda. Dengan demikian, dukungan kepada Pemda baik dari segi alokasi pendanaan maupun kapasitas kelembagaannya perlu diperhatikan pada masa pasca BRR.

4.1.2.1.4 Lingkungan Hidup

Penelusuran konsistensi antar perencanaan dengan pelaksanaan pada bidang lingkungan hidup adalah melalui identifikasi sisi perencanaan yang tercantum dalam Rencana Induk dan Rencana Aksi NAD-Nias 2007-2009. Sedangkan sisi pelaksanaan adalah melalui proyeksi capaian kumulatif dari Rencana Aksi. Sejauh ini, kegiatan di bidang lingkungan hidup hampir seluruhnya telah terlaksana sesuai dengan kebutuhan riil. Kegiatan yang terdapat di Rencana Induk belum dijabarkan lebih rinci untuk jumlah kegiatannya, sehingga dalam kebutuhan riil telah dilengkapi.

Tabel 4 - 45
Perbandingan Perencanaan dan Pelaksanaan
Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk	Kebutuhan Riil	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007
			2005-2009	2005-2009	
1	Rehabilitasi fasilitas kantor dinas kehutanan provinsi	Unit	*	1	1
2	Pengukuhan Kawasan Hutan (Tata Batas, Rekonstruksi, orientasi dan Pemeliharaan batas)	Km	*	134	134
3	Pengembangan Database Kehutanan dan Pelatihan Sistem Informasi Kehutanan	Paket	*	3	3
4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Hutan Alam dan Lahan	Ha	*	164.044	164.044
5	Peningkatan Usaha Masyarakat Di sekitar kawasan hutan	Klp	*	76	76
6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Hutan Pantai dan Mangrove	Ha	164.840	35.137	11.938
7	Peningkatan kapasitas kelembagaan lokal	Paket	*	23	23
8	Rehabilitasi Hutan kota	Ha	*	166	166
9	Restorasi kawasan bufferzone	Ha	*	267	267
10	Transplantasi terumbu karang	Ha	*	29.175	5.428
11	Bantuan Pembangunan Laboratorium Klimatologi Lapangan	Paket	*	1	1
12	Perbaikan dan Pengembangan fasilitas Ekowisata (Wilayah Wisata)	Paket	*	3	3
13	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	Kab	*	7	7
14	Penghijauan Reservoir Waduk Alue Baroh Desa Klip	Paket	*	1	7
15	Pengembangan Hutan Rakyat	Kab	*	13	13
16	Pengembangan Hutan Rakyat	Ha	*	1.513	**
17	Pengembangan Hutan Pendidikan STIK (Belanja Sosial)	Pkt	*	1	**
18	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Petugas Kehutanan	Org	*	150	**
19	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Sekitar Hutan	Org	*	160	**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk	Kebutuhan Riil	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007
			2005-2009	2005-2009	
20	Pemulihan Kembali Kegiatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Alam di sekitar kawasan hutan	Org	*	250	**

Sumber: Rencana Aksi NAD-Nias 2007, Laporan Kegiatan 2 Tahun Bapel RR

*) Belum dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Induk

**) Data belum tersedia

Pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup di atas belum sepenuhnya telah terealisasi. Kegiatan yang belum terlaksana sebagian besar mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dalam hal ini petugas kehutanan, dan pengembangan masyarakat (community development) sekitar hutan. Ditinjau dari penelusuran kegiatan APBD beberapa kabupaten/kota pada bab 3, maka untuk bidang lingkungan hidup, kegiatan yang telah dilakukan untuk TA 2006 dan 2007 adalah pembangunan gedung laboratorium beserta peralatannya, rehabilitasi lingkungan pantai dan SDA, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Dengan demikian, keberlanjutan kegiatan lingkungan hidup perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM, baik untuk aparat Pemda maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2007-2009 khusus bidang lingkungan hidup pasca masa tugas BRR, di mana kegiatan yang perlu diteruskan oleh Pemda selain peningkatan kapasitas adalah perlindungan dan konservasi SDA.

4.1.2.2. Bidang Infrastruktur

Pada kegiatan infrastruktur, fasilitas dan bangunan yang ditangani adalah sarana prasarana yang terkait dengan pembinaan pembangunan dan pemeliharaan jalan, energi dan listrik, sumber daya air, air bersih dan sanitasi serta fasilitas umum seperti *escape hill*, dll. Sedangkan kegiatan pembangunan infrastruktur di bidang bangunan umum, seperti pembangunan pasar, museum, tambak dsb. ditangani oleh bidang di luar infrastruktur.

Perlu adanya penyesuaian terhadap kondisi wilayah dan masyarakat melalui penyesuaian sasaran program Rencana Induk untuk kegiatan infrastruktur sebagai berikut:

Pencapaian sasaran program hingga tahun 2007 sesuai dengan Rencana Induk	- pembangunan irigasi - pengendalian banjir - pengaman pantai - beberapa ruas jalan kabupaten
Pencapaian sasaran program hingga tahun 2008 yang diperkirakan tidak akan mencapai sasaran program pada Rencana Induk (sebagai akibat adanya kebutuhan yang belum diidentifikasi pada waktu Rencana Induk disusun)	- pembangunan bandara - pembangunan jalan provinsi/nasional - pembangunan jalan kabupaten
Pencapaian sasaran program dilakukan di luar sasaran program yang terdapat dalam Rencana	pencetakan sawah,

Induk	▪ listrik tenaga surya, ▪ PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), ▪ beberapa airstrip/ helipad, ▪ beberapa pelabuhan laut dsb.
Sasaran program dalam Rencana Induk yang sama sekali tidak dilaksanakan	▪ jalan kereta api (ditangani Departemen Perhubungan), ▪ pembangkit listrik yang besar (ditangani oleh PLN) dsb

Rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias untuk bidang infrastruktur membutuhkan kecepatan dan ketepatan yang tinggi sehingga memberikan kepuasan pada masyarakat. Dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan standar yang tinggi agar bangunan atau infrastruktur terbangun memenuhi kualitas dan ketentuan bangunan tahan gempa dengan skala tertentu.

Secara umum, realisasi di tahun 2006 per Oktober mencapai 82,41% sedangkan pada tahun 2007 per November masih menunjukkan angka sekitar 41,86%. Penyerapan yang rendah ini disebabkan oleh berbagai kendala yang menghambat penyelesaian kegiatan infrastruktur antara lain:

- Pembebasan lahan
Kegiatan infrastruktur membutuhkan pembebasan lahan masyarakat dengan volume dan biaya sangat besar. Sulitnya pengadaan lahan akibat maraknya *klaim* dan permainan harga, dimanfaatkan oleh masyarakat, menyebabkan pelaksanaan program menjadi terhambat.
- Keterlambatan penyiapan detail desain
Ketidakharmonisan dapat ditimbulkan oleh keterbatasan informasi kepada masyarakat, komunikasi yang terbatas, dll sehingga sering menimbulkan kendala non teknis pada pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- Kemampuan kontraktor lokal yang sangat rendah baik dari segi keahlian, dana dan metode.
Kapasitas SDM dari kontraktor lokal sangat berpengaruh terhadap lambatnya pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan. Komitmen dan kualitas SDM baik dari kemampuan dan metode sering tidak memperhatikan kondisi lapangan bahkan sering berbeda dengan spesifikasi yang diharapkan. Sehingga banyak infrastruktur di lapangan yang cepat rusak sesaat setelah ditinggal kontraktor, sehingga memperlambat proses pekerjaan lanjutannya. Perlu ada mekanisme khusus untuk mengatasi permasalahan khusus, salah satu yang diharapkan adalah dengan mendatangkan konsultan dan kontraktor besar yang lebih *qualified*.
- Sulitnya transportasi logistik ke lokasi
Kepulauan Nias dan kabupaten Simelue merupakan daerah yang hingga saat ini target fisiknya masih terbatas. Sedangkan kondisi jalan dan jembatan penghubung yang sering mengalami kerusakan akibat overloading kendaraan, banjir dan pasang surut menyulitkan kendaraan pengangkut mencapai lokasi.
- Keterbatasan akses informasi terhadap masalah pendanaan
Akses informasi terhadap rencana dan realisasi kegiatan rehabilitasi rekonstruksi masih sangat terbatas. Hal ini berakibat terhadap penundaan bahkan pembatalan sejumlah proyek yang sudah direncanakan.
- Kualitas dan kuantitas SDM yang masih terbatas
Kapabilitas sumber daya manusia sebagian aparatur masih rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti tidak menempatkan personil yang tepat

(*right men on the right place*) dan juga pelatihan dan training sebagai aparatur perencana yang masih dirasa kurang.

- Keterlambatan pengesahan usulan DIPA
Penganggaran dan pencairan dana menjadi salah satu faktor keterlambatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini diakibatkan oleh berbagai hal seperti penetapan program dan kegiatan yang masih terlambat baik pada tingkat satker, tingkat kehati-hatian bahkan ketakutan dari setiap pelaksana kegiatan sebagai akibat dari ketatnya peraturan. Disamping itu menyangkut seringnya pelaksana kegiatan berhadapan dengan berbagai elemen masyarakat yang berfungsi mengawasi kegiatan di lapangan.
- Kualitas bangunan infrastruktur tidak memenuhi standar
Banyak bangunan infrastruktur jalan dan bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Kelemahan pengawasan dan komitmen kontraktor dalam pembangunan menjadi faktor penyebab masalah ini. Sehingga banyak infrastruktur terbangun mengalami kerusakan setelah selesai dibangun.
- Ketidakharmonisan antara Bapel dengan masyarakat
Ketidakharmonisan dapat ditimbulkan oleh keterbatasan informasi kepada masyarakat, komunikasi yang terbatas, dll sehingga sering menimbulkan kendala non teknis pada pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Hasil temuan BPK – RI dalam laporan hasil pemeriksaan Kepatuhan, Laporan BPK, 23 April 2007 :

- a. Pembentukan rekening trust fund sebesar Rp.2.213.702.756.920,00 tidak sesuai dengan ketentuan
- b. Penerimaan negara dari pajak yang dipungut oleh BRR NAD-Nias minimal sebesar Rp.25.339.685.549,00 dan jasa giro rekening trust fund minimal sebesar Rp.9.546.833.806,00 belum disetorkan ke kas negara.
- c. Pencairan dana trust fund kepada pihak ketiga terlambat dilakukan minimal sebesar Rp.2.599.263.627,00
- d. Uang persediaan (UP) pada 31 satker BRR NAD-Nias per tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp. 14.088.609.282,00 belum dipertanggungjawabkan
- e. Bantuan sosial oleh BRR NAD-Nias melalui lembaga Aceh Solidarity for Humanitarian Action (ASHA) belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.526.905.948,00
- f. Realisasi belanja perjalanan dinas BRR NAD-Nias dilaksanakan tidak sesuai ketentuan menimbulkan pemborosan minimal sebesar Rp.2.035.908.677,00
- g. Dana bantuan langsung dari masyarakat total senilai Rp.44.298.000.000,00 lambat diserap dan tersimpan pada rekening bank 272 kelompok masyarakat
- h. Terdapat sisa SPM LS dan bunga rekening bank pada bendahara pengeluaran satuan kerja pemulihan dan peningkatan kualitas kehidupan keagamaan NAD posisi per 31 Desember 2006 sebesar Rp.613.207.845,25
- i. Mekanisme penyaluran dana bantuan Bank Dunia untuk rehabilitasi dan rekonstruksirumah korban gempa dan tsunami NAD (REKOMPAK) melalui rekening PMU senilai Rp.385.919.097.600,00 tidak sesuai ketentuan dan jasa giro sebesar Rp. 1.453.878.650,00 (bruto) belum disetor ke kas negara.
- j. Mekanisme penyaliran gaji petugas fasilitator/asisten fasilitator tidak tertib dan tidak sesuai ketentuan serta jasa giro (bruto) sebesar Rp.33.485.166,00 belum disetor ke kas negara
- k. Mekanisme penyaluran dana program investasi beasiswa pendidikan lanjutan tenaga kesehatan NAD melalui rekening komite beasiswa BRR fakultas kedokteran Unsyiah banda Aceh senilai Rp.53.737.251.900,00 tidak sesuai ketentuan dan jasa giro (bruto) sebesar Rp. 439.998.607,00 belum disetor ke kas negara
- l. Pembatalan kontrak pekerjaan pengadaan kapal bermotor skala kecil 3 GT oleh PT. Sarana Fiberindo Marina merugikan negara sebesar Rp.3.264.800.000,00
- m. Kelebihan bayar atas kontrak pekerjaan survey investigasi design (SID) pantai Kota Singkil sebesar Rp. 338.525.728,00
- n. Pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan oleh beberapa satker nrr Nad-Nias senilai Rp.56.208.669.100,00 terlambat dan harus dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp.2.429.523.225,00
 - Satker BRR - Pendidikan dan Kesehatan kabupaten Nias
 - Satker BRR - Pemeliharaan rehabilitasi peningkatan pembangunan transportasi darat NAD
 - Satker BRR - pembinaan dan perencanaan jalan Sumut
 - Satker BRR - Perguruan Tinggi NAD
 - Satker BRR - Pemeliharaan, rhabilitasi, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi Nias
- o. Penyusunan kontrak konsultan tidak sesuai ketentuan
- p. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung senilai Rp.1.107.506.000,00 pada satker produksi tanaman pangan NAD tidak dapat diselesaikan

Berdasarkan hasil temuan BPK, dapat diketahui bahwa beberapa satker mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik, seperti : Satker pemeliharaan rehabilitasi peningkatan pembangunan transportasi darat NAD; satker pembinaan dan perencanaan jalan Sumut; dan Satker pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi Nias. Keterlambatan ini mengindikasikan di sejumlah daerah yang memiliki akses transportasi belum memadai cenderung terlambat baik dari segi progress maupun penyerapan anggaran.

Perencanaan dalam rencana induk telah mengalami banyak penyesuaian dalam rencana aksi di lapangan. Beberapa infrastruktur diantaranya telah selesai dibangun dan sebagian telah dialihkan pengelolaannya kepada pemerintah. Salah satu faktor penyebabnya adalah BRR kerap kali berganti prioritas akibat kondisi lapangan yang sangat dinamis. Pada tahap awal BRR berorientasi kepada rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional dan provinsi namun akhir-akhir ini ternyata jalan kabupaten/kota dan desa ternyata memegang peranan penting dalam transportasi logistik ke daerah terpencil sehingga terjadi perubahan prioritas.

(1) Jalan dan transportasi

Penyerapan sektor jalan dan jembatan sampai dengan akhir 2007 masih sangat rendah (dibawah 50%). Untuk jalan nasional dan Provinsi pada Pulau Nias sebanyak 1 paket dan 2 paket jalan di Nias Selatan. Sebanyak 1 paket yang tercantum dalam Rencana Induk dilaksanakan di lapangan oleh Satker BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi jalan Provinsi Sumut dengan perkembangan fisik 65.17%, namun perkembangan anggaran sebesar 85.75%. Hal ini mengindikasikan adanya konsistensi antara pelaksanaan di lapangan oleh BRR dengan salah satu butir Rencana Induk. Adapun ketidakcocokan antara progres fisik dan anggaran mengindikasikan adanya anomali anggaran.

Untuk jalan lintas barat NAD sampai saat ini telah selesai dikerjakan 667 km jalan dari 441 km jalan yang diamanahkan dalam rencana induk, dimana sebagiannya merupakan jalan aspal. Beberapa ruas jalan masih terputus dan rusak khususnya di lintas barat NAD, sedangkan dalam pelaporannya relaisasi sudah menunjukkan 151%. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum konsisten antara perencanaan dengan realisasi kegiatan. Pemeliharaan dan penyelesaian jalan lintas barat sudah melalui sharing kegiatan antara Donor, BRR dan pemda. Proses penyelesaian yang relatif lambat memungkinkan adanya keterlambatan penyelesaian kegiatan ini dan akan dilanjutkan oleh Pemda.

Keberadaan bandara menjadi sangat penting untuk daerah kepulauan seperti Nias, Sabang, dan Simelue. Sampai saat ini terus diadakan rehabilitasi 2 bandara yakni Bandara Binaka dan Bandara Lasonre serta rehabilitasi pelabuhan Lahewa, Teluk Dalam dan Gunungsitoli. Peningkatan landasan pacu bandara Binaka akan terus dilanjutkan pada tahun mendatang, dengan proyeksi dapat mendaratkan pesawat berbadan besar. Oleh karenanya, bandara atau landasan pacu menjadi prioritas mendesak yang terus dilakukan BRR dan Pemda. Penyelesaian kegiatan di beberapa bandara seperti Nias dan NAD masih terus dilakukan, serah terima aset maupun pengambilalihan upaya penyelesaian bandara yang belum selesai akan menjadi Departemen Perhubungan dan pemda dalam pengelolaannya.

Perencanaan bandara hampir seluruhnya telah disiapkan. Realisasi pembangunan bandara sampai dengan akhir tahun 2007 ini masih dilakukan baik dalam perbaikan, pengembangan maupun pemenuhan sarana dan prasarana pendukungnya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa konsistensi pelaksanaan transportasi udara masih sesuai dengan rencana induk.

Pelabuhan menjadi kebutuhan mendesak saat ini selain kebutuhan penambahan armada kapal penumpang dan kapal ro-ro. Kapal dan pelabuhan merupakan akses utama material yang digunakan saat ini. Pelaku kegiatan dan masyarakat selalu memberikan catatan dan perhatian terhadap proses tersebut. Penekanan diberikan oleh BRR untuk memberikan peningkatan kapasitas kerja di lapangan agar fasilitas tersebut dapat segera digunakan oleh masyarakat.

(2) Energi dan Listrik

Kelangkaan BBM dan listrik saat ini sangat menghambat kecepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan kebutuhan listrik semakin meningkat dengan munculnya berbagai perumahan baru dan perkantoran yang membutuhkan suplai listrik dalam penggunaan daya besar dan waktu yang tak terbatas. Disamping itu, pemasangan jaringan baru yang terus dilakukan mengharuskan pemadaman listrik secara bergilir masih terjadi di Aceh dan Nias. Khusus untuk Kepulauan Nias, sebagian besar instalasi jaringan listrik yang rusak sudah diperbaiki. Percepatan pemasangan jaringan listrik dan

pembangunan pembangkit tenaga listrik melalui PLTMH dan sumber lain masih dilaksanakan, sehingga pemadaman listrik di siang hari sering terjadi.

Pemulihan energi dan listrik di masyarakat dilaksanakan secara terpadu meskipun kapasitas dan kuantitasnya masih belum mencukupi seluruhnya. Pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara dan panas bumi terus diupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Percepatan distribusi jaringan listrik ke daerah-daerah di pedalaman untuk membantu PLN terus dikembangkan sehingga dapat memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, keterbatasan BBM dan suplai listrik menjadi salah satu prioritas yang akan diselesaikan pada akhir tahun 2008. Secara umum, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak konsisten tapi masih tetap relevan dengan target dalam rencana induk.

(3) Pos dan telekomunikasi

Indikasi kemajuan telekomunikasi dapat dikatakan sudah baik. Banyak sekali kemajuan telekomunikasi yang telah dicapai untuk daerah-daerah sekitar pusat kota. Pembangunan telekomunikasi merupakan stimulus untuk memompa lahirnya pasar ekonomi baru di tengah-tengah masyarakat. Namun, untuk daerah diluar pusat kota, jaringan telekomunikasi masih belum terjangkau. Di beberapa daerah masih *blank spot* karena belum tersentuh pembangunan jaringan telekomunikasi. Dalam hal ini, peran industri telekomunikasi menjadi paling dominan tanpa bergantung secara langsung kepada pemerintah. Seiring dengan hal itu, peran pemerintah melalui BRR juga masih terus mengembangkan jaringan melalui pembangunan pusat-pusat telekomunikasi di daerah.

(4) Sumber Daya Air

Masalah sumber daya air banyak mendapatkan perhatian dan penanganan dari BRR. Peningkatan dan perbaikan irigasi membantu masyarakat dan pemerintah untuk memulihkan kondisi perekonomian daerah. Sistem pengendalian banjir di beberapa kawasan sudah selesai diperbaiki, meskipun di beberapa kawasan masih mengalami banjir. Program pengendalian banjir dimaksudkan untuk melindungi komunitas masyarakat yang paling rentan terhadap banjir melalui pembangunan tanggul, pemasangan katup pengendali banjir dan perbaikan stasiun pompa di berbagai area yang rawan banjir karena hujan dan banjir karena luapan air sungai dan gelombang pasang. Kemajuan yang telah dicapai telah melebihi target dari rencana induk 93,61%. Dengan demikian masih konsisten antara pelaksanaan dengan rencana induk.

(5) Fasilitas dan Bangunan Publik

Dalam rencana induk disebutkan bahwa akan dibangun escape road dan escape hill. Untuk daerah-daerah yang dekat dengan posisi pantai, BRR telah membuat escape building seperti di Meulaboh. Perencanaan jalur evakuasi telah disediakan walaupun konstruksinya masih belum diselesaikan sepenuhnya.

Konsistensi perencanaan alokasi kegiatan dan anggaran infrastruktur Pemerintah Daerah serta stakeholder lain belum dapat berjalan dengan maksimal. Alokasi anggaran APBD daerah pasca gempa bumi dan tsunami tahun anggaran 2006 dan 2007 sudah mulai berangsur mengalami peningkatan. Anggaran tahun 2007 mengalokasikan peningkatan infrastruktur daerah melalui perencanaan kegiatan yang mendukung (suplemen) perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil daerah di kedua provinsi.

Alokasi Dana. Berdasarkan Rencana Induk alokasi anggaran untuk bidang Infrastruktur diperkirakan sebesar Rp. 21 triliun. Dari anggaran APBN, alokasi total infrastruktur tahun 2005-2006 Rp.3,66 Triliun dan 2007 sebesar Rp.2,947 Triliun. Realisasi anggaran 2006 sampai dengan 28 Desember 2006 sebesar Rp.1,991 Triliun dan realisasi anggaran dari 2005-2006 mencapai Rp.2,87 Triliun. Sedangkan realisasi anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur tahun 2007 per 31 Oktober 2007 sebesar Rp. 1,227 Triliun.

Tabel 4 - 46
Rekapitulasi Anggaran Kegiatan BRR Bidang Infrastruktur (Dalam Rp. Ribu)

SEKTOR/SUBSEKTOR	BIAYA TOTAL RENCANA INDIK 2005-2009 (Rp. X 1.000)	2006			2007		
		RENCANA INDIK ANGGARAN (Rp. X1.000)	DIPA (Rp. X 1.000)	REALISASI ANGGARAN (Rp. X 1.000)	RENCANA INDIK ANGGARAN (Rp. X1.000)	DIPA (Rp. X 1.000)	REALISASI ANGGARAN (Rp. X 1.000)
1 TRANSPORTASI	10,848,784,282	2,544,151,328	1,361,042,132	1,144,745,242	3,133,627,985	1,593,174,253	611,584,245
2 POS & TELEMATIKA	386,572,854	92,303,238			102,550,949		
3 ENERGI & LISTRIK	4,386,876,000	1,110,025,200	294,898,458	225,912,361	1,307,192,000	530,848,578	290,992,141
4 AIR MINUM & SANITASI	3,270,021,593	1,226,258,097	134,871,661	102,968,387	327,002,159	116,998,931	68,194,442
5 SUMBERDAYA AIR	1,913,842,300	583,294,450	361,341,356	294,866,718	504,263,440	215,284,633	78,829,423
6 PRASARANA LAINNYA	402,629,800	199,040,860	264,034,706	223,250,697	43,900,000	474,583,215	177,405,348
TOTAL 2006	26,593,647,109	7,909,041,285	2,416,188,313	1,991,743,405	4,551,022,002	2,930,889,610	1,227,005,599

Sumber : Laporan BRR, 2006 dan 2007.

Catatan : *) kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

4.1.2.3. Bidang Sosial Budaya

Perlu adanya penyesuaian terhadap kondisi wilayah dan masyarakat melalui penyesuaian sasaran program Rencana Induk untuk kegiatan bidang sosial budaya sebagai berikut:

Pencapaian sasaran program hingga tahun 2007 sesuai dengan Rencana Induk	- Gedung Sekolah Menengah & Madrasah - Gedung Puskesmas dan Pustu - Sarana Ibadah - Perlengkapan Sarana Olahraga
Pencapaian sasaran program hingga tahun 2008 yang diperkirakan tidak akan mencapai sasaran program pada Rencana Induk (sebagai akibat adanya kebutuhan yang belum diidentifikasi pada waktu Rencana Induk disusun)	- Rumah Sakit Gunung Sitoli, Kep Nias - Pembangunan Sekolah Menengah - Bantuan ekonomi produktif kepada masyarakat korban bencana
Pencapaian sasaran program dilakukan di luar sasaran program yang terdapat dalam Rencana Induk	- Pemberian beasiswa S2 dan S3 bagi dosen dan mahasiswa - Beasiswa bagi tenaga medis
Sasaran program dalam Rencana Induk yang sama sekali tidak dilaksanakan	- Pengadaan Buku Nikah - Pembangunan Asrama Mahasiswa di NAD - Pembangunan gedung BPOM - Rehabilitasi gedung Panti Asuhan Anak Yatim

4.1.2.3.1 Pendidikan

Program kebutuhan Pendidikan selama proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 2006 dan 2007 dilaksanakan dengan mengacu kepada dokumen acuan BRR dengan lebih menekankan penyelesaian target pembangunan prasarana dan sarana fisik tahun 2006 yang belum fungsional agar menjadi fungsional, diantaranya adalah kelengkapan bangunan fisik pendidikan untuk meningkatkan fungsi dan manfaatnya, sekolah kejuruan (*vocasional schools*), peralatan laboratorium dan komputer, pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SDM, beasiswa, perguruan tinggi dan asrama. Dalam rangka memperkuat proses pengalihan kepada dinas terkait nantinya maka kegiatan peningkatan mutu SDM pendidikan dari tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi akan terus dilanjutkan agar terjadi keseimbangan antara rehabilitasi dan rekonstruksi fisik maupun non fisik di bidang pendidikan sehingga akan dapat memacu percepatan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh di NAD dan Nias.

Komitmen NGO untuk sektor pendidikan pada tahun 2007 dalam merealisasikan program fisik bangunan dan sarana sangat tinggi terutama oleh UNICEF dan pemerintah Jerman. Pembangunan sarana pendidikan oleh lembaga donor/NGO lebih difokuskan pada pembangunan gedung sekolah dasar, sekolah menengah dan rehabilitasi perguruan tinggi. Sedangkan kegiatan non fisik lebih banyak diarahkan pada pelatihan guru dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Namun untuk program penyempurnaan fisik dan non-fisik seperti program peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan dari tingkat dasar, menengah dan perguruan tinggi masih minim dan bersifat partial sehingga dukungan dari pendanaan on budget masih sangat diperlukan. Disisi lain, RPJMD pemerintah daerah bagi sektor pendidikan selama kurun waktu rehabilitasi dan rekonstruksi sangat terbatas pada program-program strategis.

Secara umum realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2006 pada rehabilitasi gedung sekolah pendidikan anak usia dini mencapai 62%. Pada pendidikan wajib belajar 9 tahun mencapai 100% pada program paket belajar, pembangunan unit sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sekolah, pengembangan fasilitas/komputer sekolah, meubeler dan trauma konseling. Sedangkan pada pendidikan tinggi realisasi telah mencapai rata-rata 90 %, namun pelaksanaan program asrama mahasiswa belum terlaksana sama sekali. Sedangkan pada aspek anggaran untuk perguruan tinggi telah terserap 77%.Tidak dilaksanakannya pengadaan asrama mahasiswa dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini diperkirakan mahasiswa lebih memilih tinggal bersama keluarga masing-masing sehingga tidak menjadi prioritas oleh BRR, pemda dan juga lembaga donor.

4.1.2.3.2 Kesehatan

Dengan mengacu pada dokumen perencanaan BRR dan rencana induk pemulihan bidang Kesehatan memuat tentang beberapa kegiatan yang meliputi upaya pengelolaan, pemeliharaan, pemulihan, pencegahan, pemberantasan penyakit, penyehatan masyarakat, kefarmasian, peralatan, perbaikan gizi, penelitian, kebijakan dan lain-lain. Dalam implementasinya kegiatan tahun 2006 dan 2007 melalui lanjutan pembangunan sarana kesehatan berupa puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu, sekolah perawat, rumah dinas dokter dan paramedis serta penyediaan peralatan medis. Program pembangunan Polindes baru terealisasi sekitar 33% pada tahun 2007, namun pada perkembangan anggaran telah mencapai 55%. Diharapkan pada tahun 2008 sisa pelaksanaan kegiatan fisik ini menjadi program prioritas lanjutan agar pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan untuk kegiatan non fisik di tahun 2008-2009 akan dilaksanakan peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan dan standarisasi pelayanan. Hal penting lainnya yang harus dilaksanakan pada tahun 2008-2009 khususnya dalam

rangka menekan tingkat kematian ibu dan anak yaitu peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan terjadinya wabah penyakit.

Pelaksanaan kegiatan oleh lembaga donor/NGO rata-rata pencapaian realisasi kegiatan mencapai 50% yang meliputi kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan dan promosi pelayanan kesehatan, kegiatan realisasi berupa program pengelolaan limbah/sampah serta kampanye dan sosialisasi bidang kesehatan. Kegiatan lainnya berupa pelatihan dan pelayanan dibidang kesehatan seperti kesehatan anak dan orang tua, reproduksi, kesehatan mental, nutrisi dan lain sebagainya.

4.1.2.3.3 Peranan Perempuan

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada bidang pemberdayaan perempuan, yang mengacu pada rencana induk dan dokumen perencanaan BRR, terutama berkenaan dengan Program Penguatan Kelembagaan, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, dan Pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi NAD dan Nias kepulauan.

Realisasi pelaksanaan sampai dengan tahun 2006 terdapat program dengan capaian sesuai target rencana induk (100%), melebihi target rencana induk ($\geq 100\%$) dan adapula yang belum sesuai target rencana induk bahkan sampai tahun 2007, seperti revitalisasi kelembagaan (5,9%), pengarusutamaan gender dan survey *assessment* kebutuhan khusus perempuan. Untuk program/ kegiatan dengan realisasi yang belum mencapai target rencana induk akan dilakukan penajaman sasaran disesuaikan dengan kebutuhan riil. Terdapat beberapa isu dan permasalahan dalam pelaksanaan rehabilitasidan rekonstruksi bidang pemberdayaan perempuan yaitu :

4.1.2.3.4 Agama

Pada kegiatan bidang keagamaan rencana induk yang tertuang memuat tentang empat program yang terdiri dari Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan, Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Aparatur Negara. di wilayah bencana Provinsi NAD dan Kepulauan Nias (Kabupaten Nias dan Nias Selatan).

Selanjutnya untuk pembangunan kembali KUA yang direncanakan sebanyak 68 buah (rencana induk), telah terealisasi pembangunannya sebanyak 81 unit pada 2005-2006 dan memiliki sasaran program yang akan ditetapkan sebanyak 62 unit pada tahun 2007. Namun demikian untuk pengadaan buku nikah yang direncanakan sejumlah 30.000 eksemplar belum terealisasi hingga tahun 2007 (0%).

Komitmen dan pelaksanaan donor/NGO dalam bidang agama tidak sebesar bidang social lainnya terutama untuk rehaabiltasi dan pembangunan sarana ibadah. Tradisi dalam pembangunan rumah ibadah di Provinsi NAD melalui swadaya masyarakat di samping subsidi dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pembangunan rumah ibadah dijalankan secara bertahap. Hingga pertengahan tahun 2007 masih terdapat lebih 1.000 unit rumah ibadah yang belum tertangani secara maksimal. Lembaga pendidikan keagamaan juga menjadi fokus dalam kegiatan 2007 di Aceh, beberapa diantaranya adalah dayah/pesantren, TPA, dan asrama.

Mayoritas penduduk Provinsi NAD beragama Islam, maka rumah ibadah yang paling banyak adalah masjid dan meunasah/mushalla. Masjid biasanya terdapat di setiap pemukiman yang membawahi 3 - 5 desa, meunasah atau mushalla terdapat di setiap desa. Demikian juga dengan pembangunan dayah/pesantren yang diprioritaskan untuk beberapa daerah di Provinsi NAD. Sedangkan mayoritas penduduk Kepulauan Nias beragama Kristen dan Katholik sehingga rehabilitasi dan rekonstruksi rumah ibadah paling banyak dibangun di wilayah ini adalah gereja.

4.1.2.3.5 Sosial

Untuk kegiatan bidang sosial, berdasarkan rencana induk terdapat 5 (lima) kelompok program penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu: Bantuan dan jaminan sosial, Pelayanan dan rehabilitasi sosial, Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya, Penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan sosial.

Program bantuan sosial berupa kebutuhan pokok kepada korban tsunami dan pengungsi pada umumnya telah dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pada masa tanggap darurat. BRR melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi memprioritaskan pada program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarga. Namun realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut sampai tahun 2007 baru mencapai 3.3%. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh donor/NGO pada pembangunan/rehabilitasi sarana ibadah adalah berupa pembangunan/rehabilitasi gereja yang telah terlaksana 2 unit dari 3 unit komitmen, Masjid dengan realisasi 80%, pesantren (56%), dan vihara 1 unit (100%). Realisasi kegiatan lainnya yang mencapai 100% adalah pelayanan masyarakat dan pelatihan guru agama.

4.1.2.3.6 Pemuda dan Olahraga

Realisasi bidang pemuda dan olahraga pada tahun 2005-2006 meliputi dua jenis program yaitu pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda dan rehabilitasi serta pemeliharaan bangunan gedung olahraga dan pada program tahun 2007. Secara umum realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kepemudaan mencapai realisasi 60%, namun kegiatan peningkatan mutu SDM keolahragaan daerah baru terealisasi sebesar 15%. Kegiatan ini juga menjadi perhatian bagi donor/NGO melalui pelatihan peningkatan atlet di daerah NAD dan kepulauan Nias. Disamping itu juga menjadi prioritas bagi Pemerintah daerah MAD dan Kepulauan Nias sesuai dengan yang ada dalam dokumen RPJMD masing-masing.

4.1.2.3.7 Budaya

Pemulihan dalam bidang budaya dilaksanakan secara bersamaan antara BRR dan pemerintah daerah. Pengembalian nilai-nilai dan budaya lokal merupakan prioritas pemulihan pasca tsunami. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana budaya seperti rumah Cut Nyak Dhien yang belum selesai dilaksanakan pada tahun 2006 menjadi prioritas program lanjutan pada tahun 2007.

4.1.2.4. Bidang Pemulihan Ekonomi

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada sub bidang perikanan kelautan, pertanian, perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, tenaga kerja, sampai bidang pariwisata secara garis besar telah mengacu kepada rencana induk, walaupun dengan beberapa catatan.

Dalam pelaksanaan di lapangan seringkali ditemukan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya perlu disesuaikan kembali dengan keadaan di lapangan. Hal ini dikarenakan ada kebutuhan riil yang berbeda dengan apa yang direncanakan dalam rencana induk. Berdasarkan catatan Tim P3B Bappenas, khususnya pada bidang pemulihan perekonomian, terdapat 4 kategori besar hubungan antara program/kegiatan dalam rencana induk dengan pelaksanaannya, yaitu :

1. Program/kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang tertera dalam rencana induk.

2. Program/kegiatan yang dilaksanakan juga telah sesuai dengan apa yang tertera dalam rencana induk. (Namun diperkirakan tidak mencapai target yang diharapkan, akibat belum tepat diidentifikasinya kebutuhan riil pada saat penyusunan rencana induk).
3. Program/kegiatan yang dilaksanakan juga telah sesuai dengan apa yang tertera dalam rencana induk. (Namun sama sekali tidak dilaksanakan, dikarenakan tidak realistis/tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat).
4. Program/kegiatan yang dilaksanakan TIDAK tercantum (secara eksplisit) dalam Rencana Induk, namun tetap dilaksanakan di lapangan karena diperlukan/dibutuhkan.

Adapun secara lebih rinci evaluasi antara program/kegiatan dalam rencana induk dengan pelaksanaannya diuraikan pada sub-sub Bab berikut.

4.1.2.4.1 Sub bidang Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan program/kegiatan khususnya sub bidang Kelautan dan Perikanan secara garis besar sudah mengacu pada rencana induk. Pelaksanaan berbagai program/kegiatan baik yang dilaksanakan oleh BRR, Pemerintah daerah, dan Lembaga Donor/NGO secara garis besar sudah menekankan pada maksud program yang telah direncanakan, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana perikanan dan kelautan serta bantuan privat/permodalan guna pemberdayaan masyarakat korban bencana.

Adapun 4 kategori hubungan antara program/kegiatan dalam rencana induk dengan pelaksanaannya, khususnya sub bidang kelautan dan perikanan dapat diringkas pada tabel berikut.

Tabel 4 - 47
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan dengan Pelaksanaan
Sub bidang Kelautan dan Perikanan

Bidang Pemulihan	Program Kegiatan Tercantum dalam Rencana Induk	Program Kegiatan Tercantum dalam Rencana Induk (Namun diperkirakan tidak mencapai target yang diharapkan, akibat belum tepat diidentifikasinya kebutuhan riil pada saat penyusunan RI)	Program Kegiatan Tercantum dalam Rencana Induk (Namun sama sekali tidak dilaksanakan, dikarenakan tidak realistis/tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat)	Program Kegiatan yang secara eksplisit TIDAK Tercantum Dalam Rencana Induk (Namun dilaksanakan di lapangan karena diperlukan/dibutuhkan)
Perikanan Kelautan	Rehabilitasi tambak yang rusak, Pengadaan Kapal motor kayu, Rehabilitasi kapal boat, dan pengadaan alat tangkap	Pengadaan Kapal Motor sebanyak 21 ribu unit. Hingga saat ini baru terealisasi sebanyak 3.300 unit (15 persen).	Tidak Ada	Bantuan Agroinput, Pengembangan BBIP Simeulue, Hatchery skala rumah tangga, Keramba Jaring Apung , Sentra Pengolahan Ikan dan Bagan Apung.

Sumber : Analisa Tim P3B Bappenas

Potensi perikanan dan Kelautan NAD dan Nias sesungguhnya sangat besar, namun belum dikelola dengan baik dan komprehensif. Perencanaan yang telah dilakukan oleh para pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi (BRR, Pemerintah Daerah, dan Lembaga

Donor/NGO) dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perikanan sudah cukup komprehensif, mulai dari penanganan kegiatan produksi (tangkap dan budi daya) beserta prasarana dan sarana pendukungnya, pengolahan paska panen beserta prasarana dan sarana pendukung dan pemasaran beserta sebagian prasarana dan sarana pendukungnya.

Yang masih perlu ditingkatkan adalah upaya yang berorientasi pada pasar antar daerah dan ekspor. Hal ini akan terkait ke belakang (backward sector), dalam kaitan dengan pengolahan paska produksi yang sesuai hingga pada mutu dan kontinuitas produksi yang mendukung. Untuk itu kerjasama dengan swasta dan pengembangan koperasi menjadi sangat penting. Dalam jangka dekat, pembangunan hatchery, pabrik es dan cold storage, kalau tidak dikelola dengan baik akan mati, karena itu perlu dikerjasamakan dengan swasta yang telah berpengalaman dan menguasai dibidangnya. Sementara itu dipersiapkan koperasi dengan berbagai jenis kegiatan, mulai dari produksi, pengolahan hingga pemasaran.

Mengingat banyak bantuan lembaga Donor dan NGO membantu dalam bidang perikanan, maka koordinasi dan integrasi program serta upaya berbagi pengalaman perlu dilakukan, agar semua kegiatan rehab/rekon di bidang perikanan akan semakin baik dan bermanfaat.

4.1.2.4.2 Sub bidang Pertanian

Pelaksanaan program/kegiatan khususnya sub bidang Pertanian secara garis besar juga sudah mengacu pada rencana induk. Pelaksanaan berbagai program/kegiatan baik yang dilaksanakan oleh BRR, Pemerintah daerah, dan Lembaga Donor/NGO secara garis besar sudah menekankan pada maksud program yang telah direncanakan, yaitu pulihnya kembali fasilitas produksi pertanian, dan pengembangan serta peningkatan kualitas hasil pertanian.

Walaupun demikian ada juga kegiatan yang tidak disebutkan di dalam rencana induk tetapi dilaksanakan oleh BRR seperti pencetakan sawah. Kegiatan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa sawah tergolong rusak berat dan cukup luas, sehingga untuk mengganti sawah yang telah rusak tersebut dalam waktu yang cepat dilakukan dengan pencetakan sawah. Kemudian kegiatan yang sesuai dengan rencana induk tetapi belum dilakukan adalah penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna.

Adapun 4 kategori hubungan antara program/kegiatan dalam rencana induk dengan pelaksanaannya, khususnya sub bidang Pertanian dapat diringkas pada tabel berikut.

Tabel 4 - 48
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan dengan Pelaksanaan
Sub bidang Pertanian

Bidang Pemulihan	Program Kegiatan Tercantum dalam Rencana Induk	Program Kegiatan Tercantum dalam Rencana Induk (Namun diperkirakan tidak mencapai target yang diharapkan, akibat belum tepat diidentifikasinya kebutuhan riil pada saat penyusunan RI)	Program Kegiatan Tercantum dalam Rencana Induk (Namun sama sekali tidak dilaksanakan, dikarenakan tidak realistis/tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat)	Program Kegiatan yang secara eksplisit TIDAK Tercantum Dalam Rencana Induk (Namun dilaksanakan di lapangan karena diperlukan/dibutuhkan)
Pertanian	Rehabilitasi Lahan Persawahan; Rehabilitasi Lahan Perkebunan;	Restocking Ternak (besar, kecil dan Unggas) sebanyak 1,9 juta ekor. Hingga saat ini baru terealisasi 27 ribu ekor (2 persen).	Tidak Ada	Pencetakan sawah baru, Penghijauan pekarangan, Lining jaringan irigasi, Bantuan material jalan usaha tani, Balai Benih (BBU dan BBI), Alsintan, Pengadaan Gudang Alsintan, Gudang dan mesin RMU, Balai Pertemuan Petani.
				Pembangunan Jalan Produksi, Pengadaan Bibit Kelapa Sawit, bangunan kantor Layanan public, Diklat Fasilitator Daerah, dan Penyuluh Pendamping.
				Pengendalian penyakit hewan menular, Pembangunan Poskeswan, Pelayanan Inseminasi Buatan, Pembangunan pasar hewan, Tempat Pemotongan Hewan, Tempat Penjualan daging, Peningkatan laboratorium, Diklat inseminator, Rehabilitasi kandang ternak, Pengembangan kebun HMT, Tempat penempatan ternak, dan Pengembangan Kawasan Peternakan.

Sumber : Analisa Tim P3B Bappenas

Pelaksanaan program dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan pada sub bidang pemulihan pertanian masih bersifat meluas dan ditujukan kepada penerima manfaat (Beneficiaries) secara menyeluruh. Maka dari itu upaya yang masih perlu dilakukan adalah peningkatan manfaat dan dampak dari kegiatan pertanian, peternakan dan perkebunan. Yaitu seperti peningkatan produksi padi, palawija dsb, peningkatan produksi populasi ternak (besar, sedang dan unggas), serta peningkatan produksi kebun, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani.

4.1.2.4.3 Sub bidang Perindustrian dan Perdagangan

Pelaksanaan program/kegiatan khususnya sub bidang Perindustrian dan Perdagangan secara garis besar juga sudah mengacu pada rencana induk. Pelaksanaan berbagai program/kegiatan baik yang dilaksanakan oleh BRR, Pemerintah daerah, dan Lembaga Donor/NGO secara garis besar sudah menekankan pada maksud program yang telah direncanakan, yaitu menekankan pada pemulihan sarana produksi dan sarana perdagangan guna peningkatan kapasitas/produktivitas produksi dan kelancaran aktivitas perdagangan.

Adapun 4 kategori hubungan antara program/kegiatan dalam rencana induk dengan pelaksanaannya, khususnya sub bidang Perindustrian dan Perdagangan dapat diringkas pada tabel berikut.

Tabel 4 - 49
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan dengan Pelaksanaan
Sub bidang Perindustrian dan Perdagangan

Bidang Pemulihan	Program Kegiatan Tercantum dalam Rencana Induk	Program Kegiatan Tercantum dalam Rencana Induk (Namun diperkirakan tidak mencapai target yang diharapkan, akibat belum tepat diidentifikasinya kebutuhan riil pada saat penyusunan RI)	Program Kegiatan Tercantum dalam Rencana Induk (Namun sama sekali tidak dilaksanakan, dikarenakan tidak realistis/tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat)	Program Kegiatan yang secara eksplisit TIDAK Tercantum Dalam Rencana Induk (Namun dilaksanakan di lapangan karena diperlukan/dibutuhkan)
Perindustrian dan Perdagangan	Pembangunan pelabuhan Malahayati ; Pilot Project Industri Garam rakyat ; Pembangunan/rehabilitasi pasar ;	Tidak Ada	Tidak Ada	BLM Masyarakat Industri, Penyediaan Fasilitas Industri, Pengembangan Desa Batik Aceh, Pengembangan Industri oleh Dekranas, Bantuan pengembangan Ekonomi produktif, BLM Sentra dan Non Sentra Industri, dan BLM Modal LKM. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pedagang Pasar (Revolving), Alat dan Kemetorologian, Pembangunan Halte Labuy, Pembangunan Pasar Labuy dan

Bidang Pemulihan	Program Kegiatan Tercantum dalam Rencana Induk	Program Kegiatan Tercantum dalam Rencana Induk (Namun diperkirakan tidak mencapai target yang diharapkan, akibat belum tepat diidentifikasinya kebutuhan riil pada saat penyusunan RI)	Program Kegiatan Tercantum dalam Rencana Induk (Namun sama sekali tidak dilaksanakan, dikarenakan tidak realistis/tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat)	Program Kegiatan yang secara eksplisit TIDAK Tercantum Dalam Rencana Induk (Namun dilaksanakan di lapangan karena diperlukan/dibutuhkan)
				Pengadaan Cold Storage.

Sumber : Analisa Tim P3B Bappenas

Berdasarkan catatan Tim P3B Bappenas, masalah perdagangan yang utama adalah masalah pemasaran dengan segala aspek terkait, baik prasarana fisik maupun kelembagaan dan system serta kebijakan (tata niaga) yang mendukungnya. Ditinjau dari kegiatan rehab dan rekon, maka aspek perdagangan yang masih memerlukan perhatian adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bidang jasa dan perdagangan. Karena nilai tambah di kegiatan ini sangat tinggi, maka di butuhkan kemampuan kewirausahaan yang lebih dari kegiatan ekonomi lainnya.

Sedangkan permasalahan utama dalam rangka rehab dan rekon di bidang perindustrian, adalah masalah industri menengah dan kecil. Dibutuhkan keahlian dan pengalaman khusus untuk mengembangkan kemampuan usaha di bidang industri. Potensi yang masih belum dikembangkan adalah industri kerajinan rakyat. Selama ini kerajinan rakyat, baik skala produksi dan pemasarannya masih sangat terbatas dengan pemasaran yang juga terbatas. Industri kerajinan rakyat, bila dikembangkan secara lebih tersitem akan memberikan kesempatan kerja yang luas dan mempunyai nilai tambah yang tinggi dan harus mengarah kepada ekspor dan menunjang kegiatan pariwisata NAD dan Nasional.

4.1.2.4.4 Sub Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pelaksanaan program/kegiatan khususnya sub bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara garis besar juga sudah mengacu pada rencana induk. Pelaksanaan berbagai program/kegiatan baik yang dilaksanakan oleh BRR, Pemerintah daerah, dan Lembaga Donor/NGO secara garis besar sudah menekankan pada maksud program yang telah direncanakan, yaitu menekankan pada kegiatan bantuan kredit murah bergulir, pemberdayaan koperasi dan UKM, serta pembinaan kemitraan.

Adapun 4 kategori hubungan antara program/kegiatan dalam rencana induk dengan pelaksanaannya, khususnya sub bidang Perindustrian dan Perdagangan dapat diringkas pada tabel berikut.

Tabel 4 - 50
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan dengan Pelaksanaan
Sub Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Bidang Pemulihan	Program Kegiatan Tercantum dalam Rencana Induk	Program Kegiatan Tercantum dalam Rencana Induk (Namun diperkirakan tidak mencapai target yang diharapkan, akibat belum tepat diidentifikasinya kebutuhan riil pada saat penyusunan RI)	Program Kegiatan Tercantum dalam Rencana Induk (Namun sama sekali tidak dilaksanakan, dikarenakan tidak realistis/tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat)	Program Kegiatan yang secara eksplisit TIDAK Tercantum Dalam Rencana Induk (Namun dilaksanakan di lapangan karena diperlukan/dibutuhkan)
Koperasi dan UKM	Pemberdayaan Koperasi dan UKM	Tidak Ada	Tidak Ada	Bantuan Modal LKM Usaha Masyarakat, Aceh Micro Finance, Pelatihan Pengelola LKM, Pelatihan Kewirausahaan, Bantuan teknis dan manajemen LKM, Kelembagaan koperasi terpadu, Bantuan Langsung Masyarakat Masyarakat, Melalui Koperasi Terpadu, dan Modal UKM Integrated Trading House.

Sumber : Analisa Tim P3B Bappenas

Dalam pelaksanaan program pengembangan koperasi masih terbatas pada pemberian subsidi dan pelatihan namun belum pada upaya pemantapan dan pengembangan usaha koperasi yang sistematis. Berdasarkan rencana induk, seharusnya Koperasi di kembangkan dengan kemampuan kewirausahaan yang menghimpun usaha individu yang kecil, agar mampu bersaing dengan usaha menengah dan besar. Koperasi adalah bukan lembaga sosial, karena itu kewirausahaan dan kebersamaan merupakan satu kesatuan sikap di dalamnya. Koperasi harus mampu mengembangkan kegiatan usahanya dari hulu hingga hilir, dari menghimpun kegiatan produksi, pengolahan hingga pemasaran. Sebaiknya agar dapat dikembangkan lebih fokus, diarahkan pada komoditi tertentu.

Dalam kaitan dengan pengembangan UKM, hal ini terkait dengan usaha produksi/komoditi lainnya, sehingga harus dikembangkan secara terintegrasi. Kegiatan ini mencakup pemberian dana bergulir hingga pemberian pinjaman/kredit, serta kegiatan pembinaan usaha lainnya. Peran pemerintah harus sebatas menjadi penggerak dan stimulator, dari upaya yang harus dikembangkan oleh lembaga keuangan dan perbankan serta investasi. Dan pemerintah, melalui BRR dan Pemda, perlu melakukan regulasi dan kemudahan serta dorongan agar kelembagaan tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Untuk mengatasi kekurangan penyaluran kredit mikro, diusulkan belajar dari pengalaman penyaluran dana bergulir dan kredit mikro di daerah lain di Indonesia yang telah berhasil.

4.1.2.4.5 Sub Bidang Pariwisata

Pelaksanaan program/kegiatan khususnya sub bidang Pariwisata secara garis besar juga sudah mengacu pada rencana induk. Pelaksanaan berbagai program/kegiatan baik

yang dilaksanakan oleh BRR, Pemerintah daerah, dan Lembaga Donor/NGO secara garis besar sudah menekankan pada maksud program yang telah direncanakan, yaitu menekankan pada rehabilitasi rekonstruksi sarana prasarana obyek wisata dan promosi pariwisata dalam rangka peningkatan daya tarik obyek wisata.

Adapun 4 kategori hubungan antara program/kegiatan dalam rencana induk dengan pelaksanaannya, khususnya sub bidang Pariwisata dapat diringkas pada tabel berikut.

Tabel 4 - 51
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan dengan Pelaksanaan
Sub Bidang Pariwisata

Bidang Pemulihan	Program Kegiatan Tercantum dalam Rencana Induk	Program Kegiatan Tercantum dalam Rencana Induk (Namun diperkirakan tidak mencapai target yang diharapkan, akibat belum tepat diidentifikasinya kebutuhan riil pada saat penyusunan RI)	Program Kegiatan Tercantum dalam Rencana Induk (Namun sama sekali tidak dilaksanakan, dikarenakan tidak realistis/tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat)	Program Kegiatan yang secara eksplisit TIDAK Tercantum Dalam Rencana Induk (Namun dilaksanakan di lapangan karena diperlukan/dibutuhkan)
Pariwisata	Dalam Rencana Induk dijabarkan 1 (satu) program yaitu Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana & Prasarana di Kawasan serta Objek & Daya Tarik Wisata (ODTW).	Tidak Ada	Tidak Ada	Pelaksana Pemugaran Kawasan Wisata di pulau Sabang, Pulau Banyak, Ujung Batee, Lampuuk, Kota Sabang, dan pengembangan sarana dan site plan wisata, Pelatihan bidang Pariwisata, Penyelenggaraan pesta rakyat, Pengemb Usaha ekonomi pariwisata, dan Pengemb wisata kota Banda

Sumber : Analisa Tim P3B Bappenas

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang di masa depan sangat penting, apalagi pasca tsunami. Dengan potensi berbagai alam yang indah, kalau di dukung oleh pengembangan kesenian yang unik dan spesifik dan dapat dikembangkan industri kerajinan rakyat yang baik dan tepat. Pariwisata akan menjadi kegiatan ekonomi di Aceh yang penting. Karena itu sasaran dan program, harus di mulai dengan meletakkan dasar-dasar pengembangan ke arah itu.

4.1.2.4.6 Sub Bidang Tenaga Kerja

Pelaksanaan program/kegiatan khususnya sub bidang Tenaga Kerja secara garis besar juga sudah mengacu pada rencana induk. Pelaksanaan berbagai program/kegiatan baik yang dilaksanakan oleh BRR, Pemerintah daerah, dan Lembaga Donor/NGO secara garis besar sudah menekankan pada maksud program yang telah direncanakan, yaitu pada kegiatan pemulihan pendapatan masyarakat pasca bencana dan pelatihan tenaga kerja.

Adapun 4 kategori hubungan antara program/kegiatan dalam rencana induk dengan pelaksanaannya, khususnya sub bidang Tenaga Kerja dapat diringkas pada tabel berikut.

Tabel 4 - 52
Evaluasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan dengan Pelaksanaan
Sub Bidang Tenaga Kerja

Bidang Pemulihan	Program Kegiatan Tercantum dalam Rencana Induk	Program Kegiatan Tercantum dalam Rencana Induk (Namun diperkirakan tidak mencapai target yang diharapkan, akibat belum tepat diidentifikasinya kebutuhan riil pada saat penyusunan RI)	Program Kegiatan Tercantum dalam Rencana Induk (Namun sama sekali tidak dilaksanakan, dikarenakan tidak realistis/tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat)	Program Kegiatan yang secara eksplisit TIDAK Tercantum Dalam Rencana Induk (Namun dilaksanakan di lapangan karena diperlukan/dibutuhkan)
Ketenagakerjaan	Pembangunan dan Pengadaan Peralatan Balai Latihan Kerja	Tidak Ada	Tidak Ada	Pelatihan Keterampilan, Pekerja Cash for Work, Pelatihan Pegawai, Pembangunan KLIK, Pembangunan Jalan Lingkungan BLK, dan Informasi Bursa Kerja.

Sumber : Analisa Tim P3B Bappenas

4.1.2.5. Bidang Kelembagaan dan Hukum

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan dan hukum dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 yang dilaksanakan oleh BRR dengan landasan mengacu kepada Rencana Induk meliputi 4 (empat) hal yaitu :

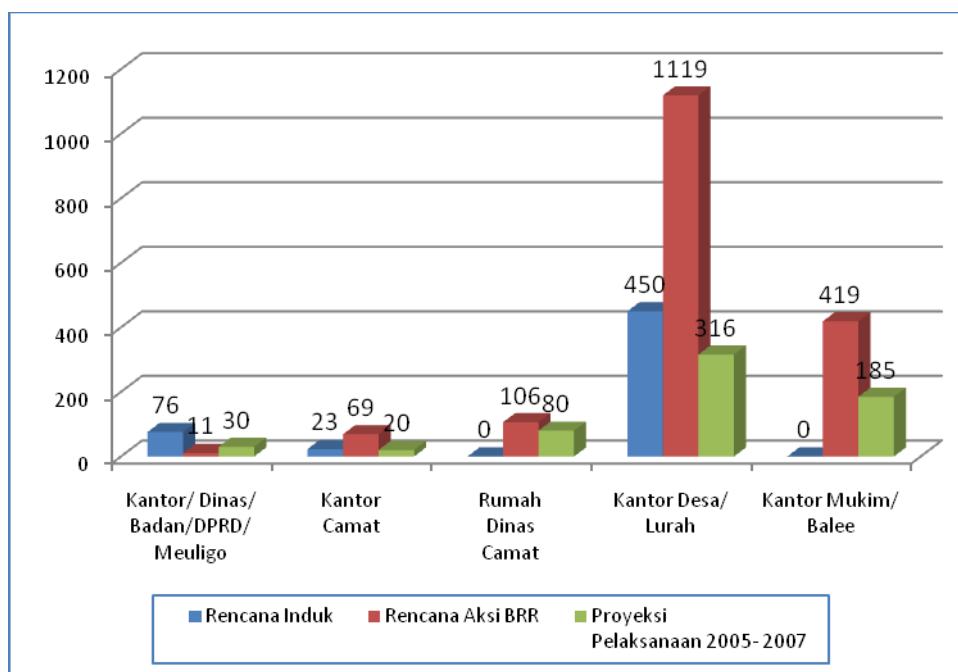
Pencapaian sasaran program/kegiatan hingga tahun 2007 sesuai atau melebihi Rencana Induk	- o Fisik : rehabilitasi dan pembangunan Ktr KDH/DPRD/Dinas/Meuligo, Kantor Kecamatan, Kantor Desa/Kelurahan, Kejati, Kejari, Bapas/Rupbasan, Kanwil Depkumham, Kantor Imigrasi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, stasiun transmisi, gedung PWI, Mapolda, Brimobda, Dit. Polair, rumah dinas serta prasarana pendukung (pengadaan material, pengadaan peralatan, kendaraan) - o Non fisik : peningkatan profesionalisme aparat Pemda, program peningkatan kapasitas kelembagaan dan keuangan Pemda, peningkatan kerjasama antar daerah, penataan administrasi kependudukan, pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi.
Pencapaian sasaran program dan kegiatan lebih rendah dari Rencana Induk	- o Fisik : pembangunan Pengadilan Tinggi/PTUN, Mahkamah Syariah, rumah dinas - o Non fisik : peningkatan kapasitas mitigasi bencana Pemda, Pemantapan dan Monev Penataan Organisasi Pemda, penataan siskom humas daerah, Penambahan dan peningkatan kualitas SDM, pemeliharaan kemandirian dan ketertiban daerah, pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah, pengembangan ketahanan masyarakat (peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan, penataan hubungan negara dan masyarakat)

Pencapaian sasaran program/kegiatan yang dilaksanakan di luar sasaran program/kegiatan yang terdapat dalam Rencana Induk	- o Fisik : pembangunan rumah dinas camat, - o Non Fisik : prasarana pendukung (peralatan) kantor bidang Keteriban, keamanan, dan ketahanan masyarakat
Sasaran program/kegiatan dalam Rencana Induk yang tidak dilaksanakan tetapi dilaksanakan oleh pihak lain	o Non fisik : Penyusunan Sistem Prosedur Administrasi Paska Bencana bagi PNS, Penyediaan tenaga-tenaga Kontrak/Suplemen, penyelesaian rekrutmen CPNS, pengelolaan pertanahan, Pengelolaan SDM Aparatur, mewujudkan jaminan kepastian, perlindungan dan penegakkan hukum dan HAM, menetapkan payung hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan pengembangan ketahanan masyarakat (pengembangan peran diplomasi)

4.1.2.5.1 Kelembagaan

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada sub bidang kelembagaan tahun 2005-2007 rata-rata sudah melebihi 50 persen dari target Rencana Induk, yaitu pada pembangunan Kantor Kecamatan dan Kantor desa Kelurahan, rumah dinas camat, dan kantor mukim/balee, sedangkan pelaksanaan yang masih jauh dibawah 50 persen yaitu pada pembangunan Kantor KDH/Dinas/Badan/DPRD/Meuligo. Perkembangan perencanaan dan pelaksanaan sarana kantor pemerintahan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 4 - 14
Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan



Sumber : Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2007.

Sampai sejauh ini pelaksanaan yang belum mencapai target disebabkan oleh adanya kendala di lapangan yaitu:

1. Penyediaan dan pembebasan tanah dari pemerintah daerah, sebagai contoh :

- Pembangunan rumah dinas camat Kuta Alam di Banda Aceh tidak dilaksanakan karena tidak tersedianya lahan.
 - Pembangunan Pendopo Walikota pada tahun 2006 sudah mencapai pembangunan tiang pondasi, namun terhenti karena adanya bentrok lahan dengan Unsyiah yang juga akan membangun Kantor Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh di lokasi yang sama. Berdasarkan kesepakatan yang difasilitasi oleh DFBU BRR NAD-Nias disepakati bahwa lokasi yang saat ini sedang atau sudah dibangun Pendopo akan dihentikan dan Pemerintah Kota Banda Aceh akan mencari pengganti lahan yang lain.
2. RDTR belum diterbitkan sehingga menghambat pembangunan kantor pemerintahan yang sudah mendapat bantuan
 3. Jangka waktu pelaksanaan pembangunan fisik tidak mencukupi
 4. Kontraktor pelaksana tidak melanjutkan/menyelesaikan pekerjaannya

Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk kegiatan non fisik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4 - 533
Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Non Fisik Bidang Kelembagaan

No	Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007
A	Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda				
1	Pemberdayaan dan Fasilitasi Aparat PEMDA	Paket	*	**	3
2	Penanganan masalah administrasi Kepegawaian	Paket	*	**	1
3	Penyusunan Sisdur Adm Paska Bencana bagi PNS	Paket	*	**	*
4	Penyediaan tenaga-tenaga Kontrak/ Suplemen	Paket	*	**	*
5	Penyelesaian rekrutmen CPNS yang telah dilaksanakan	Paket	*	**	*
6	Penataan & Penyediaan (rekrutmen & mutasi) aparatur Pemda	Paket	*	**	5
7	Penyusunan Rencana Pengelolaan Pegawai	Kab/ Kota	13	**	14
8	Peningkatan Kapasitas Mitigasi Bencana Pemda	Kab/ Kota	13	**	7
B	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PEMDA				
1	Penyelamatan Administrasi Pemerintahan	Pemda	13	**	23
2	Penyusunan Rencana Penataan Organisasi Pemda	Pemda	13	**	16
3	Pemantapan dan Monev Penataan Organisasi Pemda	Pemda	13	**	4
4	Penataan SisKom Humas daerah (media centre)	Pemda	13	**	1
5	BOP Kecamatan/Gampong (Buku, Komputer, Fax, Roda2, Seragam)	Kab/ Kota	13	**	23

No	Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007
		Kec.	77	**	263
6	Peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan/ mukim/gampong	Kab/ Kota	13	**	7
		Kec.	77	**	263
7	Rencana Perbaikan Sisdur Kerja lembaga Pemerintah	Keg	*	**	21
C	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemda				
1	Peningkatan Kapasitas Legislatif dalam PKeuD	Kab/ Kota	13	**	25
2	Penataan Keuangan Daerah dan Pengelolaannya	Kab/ Kota	13	**	22
D	Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah				
1	Optimalisasi Kerjasama antara Daerah	Paket	*	**	2
2	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah	Paket	*	**	1
E	Penataan Administrasi Kependudukan	Dok	*	**	73
F	Penataan Administrasi Wilayah Pemerintah	Kab./ Kota	13	**	*
G	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
	Layanan Rehab Kessos (Trauma centre)	Paket	*	**	1
H	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Paket	*	**	1
	Penguatan dan Fasilitasi Lembaga Masy.	Paket	*	**	2
	FKK Stakeholder RR	Paket	*	**	2
I	Penguatan Kelembagaan Demokrasi				
	Dukungan Penyiapan KDH dan DPRD	Kab/ Kota	*	**	21
J	Peraturan Perundang-Undangan (Desentralisasi/OTDA)				
	Harmonisasi Peraturan di Aceh	Paket	*	**	7
K	Pengelolaan SDM Aparatur				
	Fasilitasi Penyediaan Aparat Instansi Vertikal di Aceh		*	**	

Sumber : Laporan Evaluasi Paruh Waktu dan Rencana Aksi NAD-Nias, BRR Juli 2007

Keterangan : *) Target spesifik belum dijabarkan di dalam Rencana Induk

**) Target spesifik belum dijabarkan di dalam Rencana Aksi BRR

Kegiatan pada program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda, kegiatan yang sudah terlaksana oleh BRR dan melebihi target rencana induk yaitu 1) Pemberdayaan dan Fasilitas Aparat Pemda, 2) Penanganan masalah administrasi Kepegawaian, 3) Penataan dan penyediaan aparatur Pemda, 4) Penyusunan Rencana Pengelolaan Pegawai. Kegiatan yang baru mencapai 50 persen adalah peningkatan kapasitas mitigasi bencana Pemda. Sedangkan kegiatan yang belum terealisasi antara lain 1) Penyusunan Sistem Prosedur Administrasi Paska Bencana bagi PNS, 2) Penyediaan tenaga-tenaga Kontrak/Suplemen dan 3) Penyelesaian rekrutmen CPNS. Kegiatan tersebut belum terealisasi oleh BRR karena dimungkinkan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pemda terutama pada rekrutmen CPNS/tenaga kontrak pada masing-masing instansi yang tersebar di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

Beberapa kegiatan yang program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda yang telah melebihi target rencana induk yaitu kegiatan 1) penyelamatan administrasi pemerintahan, 2) penyusunan penataan organisasi Pemda, 3) BOP kecamatan/Gampong, 4) Peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan/mukim/gampong, dan 5) Rencana Perbaikan Sisdur Kerja lembaga Pemerintah. Selain itu beberapa kegiatan lainnya yang baru mencapai 7-30 persen diantaranya 1) Pemantapan dan Monev Penataan Organisasi Pemda, 2) penataan siskom humas daerah.

Kegiatan pada program peningkatan kapasitas keuangan Pemda telah melebihi target rencana induk yaitu peningkatan kapasitas legislatif dan penataan keuangan daerah dan pengelolaannya yang telah melaksanakan di 25 Kabupaten/Kota dibandingkan dengan yang ditargetkan pada Rencana Induk yaitu 13 Kabupaten/Kota.

Target/volume capaian pelaksanaan program peningkatan kerjasama antar daerah, belum diketahui karena keterbatasan data namun hingga 2007 ini telah dilaksanakan kegiatan yaitu optimalisasi kerjasama antar daerah dan koordinasi penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu beberapa program di rencana induk maupun rencana aksi tidak mencantumkan capaian volume/target, hingga tahun 2007 telah melaksanakan kegiatan pada program (1) Penataan Administrasi Kependudukan, (2) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, (3) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dan (4) Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan demokrasi.

Beberapa program/kegiatan lainnya yang terdapat pada Rencana Induk dan belum atau tidak dilaksanakan BRR hingga tahun 2007, antara lain pengelolaan pertanahan dan pengelolaan sumberdaya manusia aparatur. Apabila program non fisik dan kegiatan tersebut dan program fisik lainnya belum terealisasi dalam rentang waktu hingga berakhirnya masa tugas BRR hingga April 2009, maka dimungkinkan program dan kegiatan tersebut dilanjutkan dalam jangka menengah baik oleh Pemda maupun K/L, ataupun Donor/NGO.

Kontribusi Pemda dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang kelembagaan sangat terbatas. Jika dilihat dari alokasi RAPBD untuk kegiatan pendukung rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan tahun 2006 maupun 2007 hanya berkisar 1-36 persen dari total APBD di Kabupaten/Kota terpilih. Berdasarkan dokumen RPJMD dan rincian kegiatan yang tercantum di dalam dokumen APBD, kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Pemda diantaranya :

- Program peningkatan profesionalisme aparat Pemda melalui kegiatan penataan dan penyediaan (rekrutmen dan mutasi) aparat Pemda yang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Pemda. BRR hanya terlibat pada kegiatan *fit and proper test* dan meningkatkan kapasitas Pemda. BRR mengusahakan tidak melakukan mutasi dari daerah satu ke daerah lainnya, namun berusaha untuk meningkatkan kualitas aparat Pemda untuk dapat mengisi kekosongan posisi organisasi di suatu daerah.

- Kegiatan penataan batas-batas administrasi (pengelolaan pertanahan) yang telah berubah akibat bencana. Kegiatan ini memang termasuk ke dalam RPJMD dan rincian kegiatan dalam APBD. Pemda melaksanakan kegiatan penataan batas wilayah pemerintahan kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan. Selain itu, Pemda juga melaksanakan pembebasan lahan untuk Pemda dan fasilitas umum, contohnya pekerjaan yang sudah selesai di Kota Banda Aceh yaitu pembebasan lahan untuk pertapakan pembangunan balai mukim dan rumah dinas camat Jaya Baru, kantor mukim Lamjame Kecamatan Jaya Baru, rumah dinas camat Baiturrahman, rumah dinas camat Syiah Kuala, rumah dinas camat dan kantor mukim Kecamatan Jaya Baru.

Untuk program pengelolaan sumberdaya manusia aparatur melalui kegiatan fasilitasi penyediaan dan mutasi aparat pemerintah pusat untuk instansi vertikal, dapat dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan melalui instansi vertikal di daerah terkait.

Apabila kebutuhan riil rehabilitasi dan pembangunan kantor pemerintahan sangat besar dan belum dapat terealisasi, maka BRR dapat meminta bantuan kepada Donor/NGO karena apabila diserahkan kepada Pemda akan terkendala mengingat terbatasnya anggaran Pemda.

Kontribusi Donor/NGO pada sub bidang kelembagaan yang mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi diantaranya pada kegiatan peningkatan kapasitas aparat Pemda, studi/pengembangan institusional, penyusunan pedoman/panduan, penyediaan bahan dan peralatan rehabilitasi dan rekonstruksi kantor pemerintahan, penyediaan fasilitator untuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dan forum koordinasi.

4.1.2.5.2 Hukum

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang hukum pada pembangunan fisik yang sudah mencapai/melebihi target Rencana Induk adalah Kejati, Kejari, Bapas/Rupbasan, Kanwil Depkumham, Kantor Imigrasi, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Militer. Beberapa kegiatan lainnya yang belum terlaksana yang rata-rata baru mencapai 0-55 persen yaitu pembangunan Pengadilan Tinggi/PTUN, Mahkamah Syariah, rumah dinas. Rincian pelaksanaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4 - 544
Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Hukum

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007
A	Sarpras Kejaksaan Agung				
	Kejati Provinsi NAD	Unit	1	1	1
	Kejari	Unit	5	6	6
	Rumah Dinas (Kejaksaan Agung)	Unit	38	**	22
	Peralatan Kantor	Paket	6	**	79
	Kendaraan R2	Unit	38	**	17
	Kendaraan R4	Unit	15	**	**
	Kendaraan Tahanan	Unit	12	**	7

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007
B	Sarpras Kanwil Depkumham				
	Rumah Dinas (Kanwil Depkumham)	Unit	70	**	24
	Lapas/Rutan	Unit	6	4	9
	Bapas/Rupbasan	Unit	2	1	2
	Kanwil Depkumham	Unit	1	1	1
	Kantor Imigrasi	Unit	2	2	2
	Kendaraan R2	Unit	8	**	**
	Kendaraan R4	Unit	10	**	6
	Peralatan Kantor	Paket	3	**	19
C	Sarpras Mahkamah Agung				
	PT/PTUN	Unit	2	1	1
	Pengadilan Negeri	Unit	9	10	15
	Kendaraan R2 Pengadilan	Unit	25	**	**
	Kendaraan R4 Pengadilan	Unit	33	**	**
	Mahkamah Syari'ah	Unit	6	13	6
	Kendaraan R2 Mah. Syari'ah	Unit	33	**	12
	Kendaraan R4 Mah. Syari'ah	Unit	18	**	17
	Peralatan Kantor	Unit	17	**	79
	Pengadilan Militer	Paket	*	1	1
	Rumah Dinas (Mahkamah Agung)	Unit	179	**	**
	Pengawasan Pembangunan Gedung	Paket	*	**	1

Sumber : Laporan Evaluasi Paruh Waktu dan Rencana Aksi NAD-Nias, BRR Juli 2007

Keterangan : *) Target spesifik belum dijabarkan di dalam Rencana Induk

**) Target spesifik belum dijabarkan di dalam Rencana Aksi BRR

Untuk pelaksanaan kegiatan non fisik yang bidang hukum belum dapat diketahui persentase realisasinya terhadap rencana induk, karena di rencana induk sendiri belum mencantumkan capaian volume/target, namun hingga tahun 2007 telah dilaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan hukum, pengembangan hukum adat, dan pendidikan dan pelatihan teknis hukum dan HAM.

Tabel 4 - 555
Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Non Fisik Bidang Hukum

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005-2007
Pemberdayaan dan pengembangan institusi hukum				

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007
Pemberdayaan dan pengembangan isntitusi hukum					
1	Penelitian dan Pengembangan Hukum	Paket	*	**	1
2	Pengembangan Hukum Adat	Paket	*	**	1
3	Pendidikan dan pelatihan teknis hukum dan HAM	Paket	*	**	1
4	Pengembangan pusat studi hukum	Paket	*	**	
5	Pembentukan badan pembinaan hukum Aceh	Paket	*	**	
6	Peningkatan kapasitas aparatur hukum	Paket	*	**	
7	Peningkatan Akses Pelayanan Hukum bagi Masyarakat	Paket	*	**	
8	Pembangunan gedung badan pembinaan hukum Aceh	Paket	*	**	

Sumber : Laporan Evaluasi Paruh Waktu dan Rencana Aksi NAD-Nias, BRR Juli 2007

Keterangan : *) Target spesifik belum dijabarkan di dalam Rencana Induk

**) Target spesifik belum dijabarkan di dalam Rencana Aksi BRR

Pelaksanaan kegiatan bidang hukum yang belum mencapai target disebabkan oleh adanya kendala di lapangan yaitu:

1. Penyediaan dan pembebasan tanah dari pemerintah daerah, contohnya pada pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Keudah yang direncanakan akan direlokasi di Desa Meusanah Manyang dan Meusanah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, mengalami hambatan pada pembebasan lahannya. Lahan yang dibutuhkan seluas 4 Ha, dengan rincian 75 persil (75 pemilik lahan) dan sudah dibebaskan seluas 58 persil, tetapi sisanya 17 persil lagi belum dapat dibebaskan karena pemilik lahan meminta kenaikan harga. Solusinya adalah Pemkot Banda Aceh akan memberikan kompensasi atas tanah tersebut, dengan alternatif mencoba mencari lahan pengganti lain
2. RDTR belum diterbitkan yang menghambat pembangunan kantor yang sudah mendapat bantuan
3. Jangka waktu pelaksanaan pembangunan fisik tidak mencukupi
4. Kontraktor pelaksana tidak melanjutkan/menyelesaikan pekerjaannya, masa kontrak sudah lama berakhir tahun 2006 dan status kontrak lama tidak jelas, contohnya pada pembangunan rumah dinas Pengadilan Negeri Calang, Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan Pengadilan Tinggi NAD
5. Belum final hasil perencanaan oleh konsultan misalnya pada pembangunan Kantor Mahkamah Syariah Blang Keujereun

Beberapa program/kegiatan lainnya yang terdapat pada Rencana Induk dan belum atau tidak dilaksanakan BRR hingga tahun 2007, antara lain 1) Mewujudkan jaminan kepastian, perlindungan dan penegakan hukum dan HAM dan 2) Menetapkan payung

hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Apabila belum dilaksanakan dalam rentang waktu hingga berakhirnya masa tugas BRR pada April 2009, maka dimungkinkan program dan kegiatan tersebut dilanjutkan dalam jangka menengah baik oleh Pemda maupun K/L, ataupun Donor/NGO.

Kontribusi Pemda dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sangat terbatas/minim untuk bidang hukum. Dalam dokumen RPJMD tidak tercantum mengenai sub bidang hukum, dan dalam dokumen RAPBD juga belum dialokasikan kegiatan pendukung rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang hukum. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan di bidang hukum dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga melalui instansi vertikal di daerah, khususnya pada program mewujudkan jaminan kepastian, perlindungan dan penegakan hukum dan HAM. Sedangkan pada program menetapkan payung hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan program yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat.

Apabila kebutuhan riil rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana hukum sangat besar dan belum dapat terealisasi, maka BRR dapat mencari bantuan kepada Donor/NGO karena apabila diserahkan kepada Pemda akan terkendala mengingat terbatasnya anggaran Pemda.

Kontribusi Donor/NGO pada sub bidang hukum diantaranya pada kegiatan peningkatan kapasitas melalui pelatihan proses hukum dan hak-hak hukum dasar terhadap aparat penegak hukum dan juga kepada tokoh-tokoh adat untuk mendukung mereka dalam menyampaikan keadilan dengan cara-cara yang adil dan efektif. Selain itu Donor/NGO juga terlibat di dalam meningkatkan akses hukum untuk masyarakat. Dengan adanya beberapa pelaku tersebut diharapkan rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang hukum akan terus berlanjut sehingga akses keadilan di NAD dan Nias dapat terus berlangsung.

4.1.2.5.3 Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M)

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang K3M terbagi dua yaitu penciptaan rasa aman masyarakat dan pengembangan ketahanan masyarakat. Pelaksanaan yang melebihi target Rencana Induk diantaranya pembangunan stasiun transmisi, gedung PWI, Mapolda, Brimobda, Dit. Polair, rumah dinas serta prasarana pendukung (pengadaan material, pengadaan peralatan, kendaraan). Beberapa program dan kegiatan lainnya yang belum terlaksana atau pencapaiannya lebih rendah dari Rencana Induk yaitu pada program pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah dan program pengembangan ketahanan masyarakat. Rincian pelaksanaan tersebut dapat dilihat pada dua tabel di bawah ini.

Tabel 4 - 656
Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Penciptaan Rasa Aman Masyarakat

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007
I	Program Refungsionalisasi Kelembagaan				
1	Menkopolhukum				
	Gedung Kantor	unit	1	**	1
2	Menkominfo				
	Gedung Kantor Dinas Kominfo	Unit	1	**	1

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007
	Stasiun RRI	Unit	1	**	2
	Stasiun Transmisi TVRI	Unit	6	**	7
	Gedung PWI	Unit	*	**	2
	Rumah Dinas	Unit	*	**	5
	Kendaraan Roda-2 dan Roda 4	Unit	*	**	3
3	POLRI				
	Penampungan Sementara (1416 KK)	Unit	1.416	**	1
	Mapolda	Kompleks	1	**	2
	Brimobda	Kompleks	1	**	2
	Dit. Polair	Kompleks	1	**	2
	Polres	Unit	5	**	
	Rumah Dinas (Aspol)	Komplek	26	**	57
	Polsek	Unit	-	**	8
	Pengadaan Material (Gedung)	Unit	*	**	193
	Pengadaan Peralatan dan Komlek	Unit	*	**	439
	Kendaraan Roda - 4	Unit	*	**	71
	Gedung PUSDIK Pasukan Anjing/Kuda	Unit	*	**	
	Biaya Perencanaan dan Pengawasan	Unit	*	**	5
4	TNI-AD				
	Bidang ALPAL		*	**	1
	- Kendaraan	Unit	*	**	8
	- Alat Angkutan Air	Unit	*	**	2
	- Alat Berat Zeni	Unit	*	**	27
	- Alat Utama Militer (Senjata)	Unit	*	**	295
	- Alpasus Zeni	Unit	*	**	39
	- Alsatri dan Alsintor	Unit	*	**	4
	- Peralatan Lainnya	Unit	*	**	7
	- Kendaraan Roda - 2	Unit	*	**	217
	- Kendaraan Roda - 4	Unit	*	**	28
	Bidang Faskon	Unit	*	**	461
	Bidang Alkon	Unit	*	**	1
	Korem/Kodim	Unit	*	**	2
	Rumah Dinas	Unit	*	**	1
	Kompi	Unit	*	**	2
	Biaya Perencanaan dan Pengawasan	Paket	*	**	1

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007
5	TNI-AL				
	Bidang Bekal Umum	Unit	*	**	1
	Bidang ALPAL	Unit	*	**	1
	- Alat Perlengkapan Laut Lanal Sabang	Unit	*	**	4
	- Peralatan Bengkel	Unit	*	**	4
	- Peralatan Laut Komar	Unit	*	**	1
	- Peralatan Khusus Komar	Unit	*	**	130
	- Persenjataan (Senapan dan Pistol)	Unit	*	**	56
	- Amunisi	Butir	*	**	19.769
	- Kendaraan	Unit	*	**	6
	- Peralatan Lainnya	Unit	*	**	76
	Bidang Faskon	Unit	*	**	40
	Rumah Sakit Sabang	Unit	*	**	
	Rumah Dinas	Unit	*	**	2
	Posal Sitoli (Dermaga + Masjid)	Unit	*	**	2
	Pengembangan SARPRAS Gedung	Unit	*	**	3
6	TNI-AU				
	Bidang ALPAL	Paket	*	**	
	Bidang Faskon	Paket	*	**	
	Lanud Maimun Saleh	Unit	*	**	1
	Lanud Iskandar Muda	Unit	*	**	1
	Paskhas AU	Unit	*	**	1
	Satrad	Unit	*	**	3
7	Matra Integratif				
	Bidang Bekal Umum	Unit	*	**	3
	Bidang ALPAL		*	**	
	- Kendaraan Roda-2	Unit	*	**	40
	- Alat Utama Militer	Unit	*	**	958
	- Alat Angkutan Air	Unit	*	**	13
	- Jembatan Bailey	Unit	*	**	15
	- Alat Berat	Unit	*	**	483
	- Suku Cadang/Ban Pesawat	Unit	*	**	2.299
	Bidang Faskon	Unit	*	**	3
	Bidang Kesehatan	Unit	*	**	4
	Bidang Alkon	Unit	*	**	1

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007
II	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Daerah				
	Mobilisasi Pasukan TNI	Personil	*	**	
	Mobilisasi Pasukan POLRI	Personil	*	**	1650
	Pemberdayaan potensi keamanan	Personil	*	**	
III	Program Dukungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi				
	Pembukaan Daerah Terisolasi		*	**	
	Pembersihan Kota/Desa dari Puing		*	**	
	Pengadaan Rumah Sakit Lapangan		*	**	
	Pelayanan pendidikan dan Kesehatan		*	**	
	Operasi Bhakti TNI		*	**	

Sumber : Laporan Evaluasi Paruh Waktu dan Rencana Aksi NAD-Nias, BRR Juli 2007

Keterangan : *) Target spesifik belum dijabarkan di dalam Rencana Induk

**) Target spesifik belum dijabarkan di dalam Rencana Aksi BRR

Tabel 4 - 577
Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pengembangan Ketahanan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007
I	Program Pengembangan Ketahanan Masyarakat				
	a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik				
	Perencanaan dan sosialisasi kegiatan dan materi kampanye	Kegiatan	*	**	200
	Dialog antar komponen masyarakat	Paket	*	**	
	Kerjasama dengan pers dan media	Paket	*	**	
	Fasilitasi jaringan sosial tradisional	Kegiatan	*	**	150
	Advokasi dan dialog penanaman nilai demokrasi	Kegiatan	*	**	2
	Evaluasi dan Monitoring				
	b. Peningkatan Komitmen Pesatuan dan Kesatuan				
	Bintek dan replika Cinta Tanah Air dan Bhakti Pertiwi		*	**	
	Revitalisasi wawasan kebangsaan	Kegiatan	*	**	150
	Konsolidasi dan penguatan kelembagaan	Lembaga	*	**	3
	Sosialisasi Bidang POLKAM	Kegiatan	*	**	1

No	Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005-2007
	Pemantauan situasi perkembangan politik masyarakat		*	**	
	Pemantapan semangat Bela Negara		*	**	
	c. Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat			**	
	Fasilitasi pelebagaan forum kemasyarakatan	Kegiatan	*	**	1
	Pendataan ulang kependudukan		*	**	
	Tim perumus rekomendasi kebijakan ttg insentif		*	**	
	Pengkajian kondisi masyarakat	Kegiatan	*	**	1
	Pembuatan EWS		*	**	
	Operasionalisasi EWS		*	**	
	Desk Aceh	Unit	*	**	1
	d. Pengembangan Peran Diplomasi				
	Pemantapan diplomasi kemanusiaan		*	**	
	Peningkatan diplomasi kebencanaan		*	**	

Sumber : Laporan Evaluasi Paruh Waktu dan Rencana Aksi NAD-Nias, BRR Juli 2007

Keterangan : *) Target spesifik belum dijabarkan di dalam Rencana Induk

**) Target spesifik belum dijabarkan di dalam Rencana Aksi BRR

Beberapa program/kegiatan lainnya yang terdapat pada Rencana Induk yang belum atau tidak dilaksanakan BRR hingga tahun 2007, antara lain program dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan beberapa kegiatan pada program pengembangan ketahanan masyarakat. Apabila program non fisik dan kegiatan tersebut dan program fisik lainnya belum terealisasi dalam rentang waktu hingga berakhirnya masa tugas BRR hingga April 2009, maka dimungkinkan program dan kegiatan tersebut dilanjutkan dalam jangka menengah baik oleh Pemda maupun K/L, ataupun Donor/NGO.

Kontribusi Pemda dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sangat terbatas untuk bidang K3M dan di dalam dokumen RPJMD direncanakan program pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah. Di dalam dokumen APBD proporsi kegiatan pendukung K3M terhadap APBD sekitar 1-6 persen, yang terdiri dari kegiatan penyebaran informasi kepada masyarakat, pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. Apabila kebutuhan riil rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana bidang K3M sangat besar dan belum dapat terealisasi, maka BRR dapat mencari bantuan kepada Donor/NGO karena apabila diserahkan kepada Pemda akan terkendala mengingat terbatasnya anggaran Pemda.

Kontribusi Donor/NGO pada sub bidang K3M yang mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi diantaranya pada kegiatan peningkatan kapasitas Polisi melalui pelatihan dan pembangunan rumah dinas.

4.1.3. Konsistensi Antar Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

4.1.3.1. Perumahan dan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan, dan Lingkungan Hidup

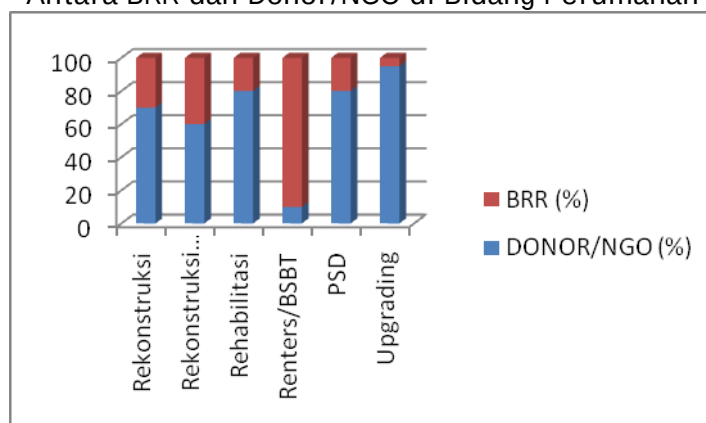
Konsistensi antar pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang perumahan didasarkan pada jenis kegiatan dalam pembangunan rumah. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Bapel BRR) meliputi kegiatan rekonstruksi, rekonstruksi relokasi, rehabilitasi, renters, upgrading, dan pembangunan Prasarana Dasar Permukiman. Jumlah kegiatan yang dilakukan oleh Bapel BRR, lebih kecil jika dibandingkan NGO /Donor. Kontribusi antara BRR dan Lembaga Donor/NGO dalam pembangunan rumah dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4 - 58
Kontribusi Antara BRR dan Donor/NGO
di Bidang Perumahan

Jenis Pembangunan Rumah	Pembagian Tugas (%)	
	DONOR/NGO	BRR
Rekonstruksi	70	30
Rekonstruksi Relokasi/ <i>Resettlement</i>	60	40
Rehabilitasi	80	20
Renters/BSBT	10	90
PSD	80	20
Upgrading	95	5

Sumber: *Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias ,BRR Juli 2007*

Grafik 4 - 5
Perbandingan Kontribusi
Antara BRR dan Donor/NGO di Bidang Perumahan



Sumber: *Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2007*

Sementara untuk bidang tata ruang, dari gambaran di lapangan, Bapel RR telah menerbitkan pedoman-pedoman yang berhubungan dengan perencanaan desa, di antaranya:

- Pedoman Pemetaan Tanah Partisipatif (BRR.1/1.01.A/01.01/2005)
- Manual Kesepakatan Warga tentang Batas Bidang Tanah, Kepemilikan, dan Penandaan Bidang Tanah dalam Peta (BRR.1/1.01B/01.01/2005)
- Pedoman Menata dan Membangun Desa (BRR.1/1.02/01.01/2005)
- Pedoman Perbaikan dan Pembangunan Perumahan (BRR.1/1.03/01.01/2005)

Pedoman-pedoman ini diharapkan akan mempercepat penyusunan rencana desa yang dilakukan berbagai pihak, antara lain USAID, ADB, YIPD, AIPRD, MercyCorps, dan GTZ. Para stakeholder juga melakukan koordinasi yang intensif untuk menyinergikan percepatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

Penyelenggaraan penataan daerah pada hakikatnya adalah kewenangan Pemerintah Daerah. Sebagai salah satu contoh, telah rampungnya penyusunan Rencana Induk Kota Banda Aceh atau Master Plan Kota yang disusun oleh pihak JICA melalui Urgent Rehabilitation and Reconstruction Project (URRP), membutuhkan proses berikutnya. Proses yang dimaksud adalah proses legalisasi untuk menjadikan masterplan tersebut sebagai peraturan daerah (perda/qanun). Dengan kata lain, muara dari produk-produk tata ruang yang dihasilkan oleh Donor/NGO berada pada kewenangan Pemda setempat.

Untuk bidang lingkungan hidup, Bapel RR juga telah menyediakan pedoman perencanaan pengelolaan lingkungan. Pedoman yang telah dipublikasikan adalah:

- Pedoman Perencanaan Mitigasi Dampak Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan menggunakan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), upaya pengelolaan lingkungan (UKL), dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) (BRR.1/5.01/01.00/2005)
- Pedoman Tata Kerja Amdal, UKL, dan UPL (BRR.1/5.02/01.00/2005)
- Buku Penyaringan Amdal, UKL, dan UPL Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD- Nias TA 2005(BRR.1/5.03/01.00/2005)

Untuk pelaksanaan di lapangannya, seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, kegiatan-kegiatan lingkungan hidup sebagian besar dilakukan oleh Donor/NGO.

Secara umum, peran masing-masing stakeholders, dalam hal ini kontribusi terbesar, untuk bidang perumahan, tata ruang, pertanian, dan lingkungan hidup dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4 - 59
Peran Tiap Stakeholder
Dalam Bidang Perumahan, Tata Ruang, Pertanian, dan Lingkungan Hidup

No.	Bidang	Peran		
		BRR	Pemda	Donor/NGO
1.	Perumahan dan permukiman	▪ Bagi warga yang rumah dan tanahnya musnah atau tidak aman huni, dibangun rumah di lokasi lain melalui mekanisme Bantuan Perumahan dan Permukiman Kembali (BPPK). ▪ Bagi warga yang rumah dan permukimannya rusak tapi tanahnya tidak musnah,	Pembebasan lahan untuk kawasan perumahan dan fasilitas umum	Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah, <i>upgrading</i> , dan prasarana dasar permukiman

No.	Bidang	Peran		
		BRR	Pemda	Donor/NGO
		dibangunkan rumah di tanah yang tersisa melalui mekanisme Bantuan Pembangunan Rumah Baru (BPRB). ▪ Bagi warga yang rumahnya rusak tapi masih dapat diperbaiki, dilakukan rehabilitasi melalui mekanisme Bantuan Perbaikan Rumah (BPR). ▪ Bagi warga berstatus penyewa, penumpang, dan “kepala keluarga gantung” yang rumahnya hancur, telah diterbitkan kebijakan terbaru untuk mengakomodasi kebutuhan mereka melalui mekanisme Bantuan Sosial untuk Bertempat Tinggal (BSBT).		
2.	Tata Ruang	Penerbitan pedoman-pedoman yang berhubungan dengan perencanaan desa (<i>rincian ada di konsistensi antar pelaksana</i>)	Proses legalisasi RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota sebagai peraturan daerah (Perda/Qanun)	Pelaksanaan perencanaan desa (<i>village mapping</i>) dan penyusunan RTRW Kab/Kota bersama-sama dengan Pemda
3.	Pertanahan		Proses legalisasi sertifikat tanah	▪ Konsolidasi batas persil tanah bersama masyarakat ▪ Tim pemantau independen serta pelayanan pengaduan oleh Tim Penanganan Keluhan.
4.	Lingkungan Hidup	Penerbitan pedoman perencanaan pengelolaan lingkungan (<i>rincian ada di bab IV.1.3 konsistensi antar pelaksana</i>)		Program dan Kegiatan pengolahan limbah tsunami, hutan dan lingkungan hidup

Sumber: Hasil Analisis Tim P3B Bappenas, 2008

4.1.3.2. Bidang Infrastruktur

Konsistensi antar pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi bidang infrastruktur dalam pelaksanaan terlihat dari pembagian tugas dan peran masing-masing stakeholder (s). Bapel RR telah menerbitkan pedoman-pedoman yang berhubungan dengan perencanaan bangunan.

Tabel 4 - 60
Pembagian peran dan tanggungjawab antar pelaksana
rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur.

Sub Sektor	BRR	Donor/NGO	Pemerintah Daerah
Jalan dan transportasi			
a. Jalan dan transportasi darat	- Rehabilitasi dan rekonstruksi : - jembatan dan jalan nasional: - jalan lintas timur, - jalan lintas barat, - jalan lintas tengah. - jalan provinsi, dan - jalan kabupaten - Pembangunan terminal, serta pengadaan bus - Pengadaan peralatan SAR dan pengadaan rescue boat. - Pembuatan sistem aplikasi bencana alam (mitigasi)	Rehabilitasi dan pembangunan jalan dan jembatan (komplemen) kegiatan BRR	Pembangunan jalan kecamatan dan jalan desa
b. Transportasi laut dan ASDP	- Pembangunan dermaga - Pembangunan pelabuhan laut - Pengadaan kapal	Pengadaan kapal ferry	Pengadaan lahan untuk pembangunan atau perluasan pelabuhan
c. Transportasi Udara	- Pembangunan bandara - Perpanjangan runway - Pembangunan fasilitas pendukung	- Pembangunan airstrip - Pembangunan helipad	Pengadaan lahan untuk pembangunan/perluasan bandara Bandara Singkil, Bandara SIM, Bandara Alas Leuser, dan Bandara Kuala Batee
Energi dan Listrik	Kerjasama dengan PLN dalam : - Pelayanan sambungan rumah untuk rumah-rumah yang baru dibangun. - Pembangunan	rehabilitasi jaringan distribusi listrik	<i>Belum teridentifikasi</i>

Sub Sektor	BRR	Donor/NGO	Pemerintah Daerah
	pembangkit listrik (mikro), antara lain PLTS dan PLTMH.		
Pos dan Telekomunikasi	• peningkatan pelayanan akses dan distribusi • Pembangunan Kantor Pos • Pengadaan peralatan operasional.	• Rehabilitasi jaringan distribusi telepon	• <i>Belum ada informasi</i>
Sumber daya Air			
a. Irigasi	• Pembangunan saluran irigasi • Pembangunan bendung • Pencetakan sawah	• Pembangunan saluran irigasi • Pembangunan bendung • Pencetakan sawah	• Pembenahan saluran irigasi
b. Sungai dan Pengendalian banjir	• Perkuatan tebing • Normalisasi sungai/saluran primer • Pembuatan tanggul baru	• Normalisasi saluran drainase primer	• Normalisasi saluran drainase tersier
c. Pengaman Pantai	• Pembuatan tanggul pengaman pantai	<i>Tidak terlibat</i>	<i>Tidak terlibat</i>
Air Bersih			
Air bersih	• pembangunan jaringan air minum • jaringan pipa air bersih	• pembangunan jaringan air bersih	• pembangunan jaringan air minum (suplemen)
Persampahan	• Pembangunan TPA, • pengadaan <i>amroll</i> truk, kontainer serta gerobak sampah	• pengadaan tempat pembuangan sampah sementara	• <i>tidak teridentifikasi</i>
Sanitasi	• pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	• pembangunan keran sambungan rumah	• <i>tidak teridentifikasi</i>
Drainase	• Pembangunan saluran drainase lokal	• Pembangunan saluran drainase lokal	• Pembangunan saluran drainase lokal
Fasilitas dan Bangunan publik	• pembangunan escape building, • Pembangunan gedung laboratorium uji mutu struktur,	<i>Tidak terlibat</i>	• <i>Support dalam pengadaan lahan</i>

Sub Sektor	BRR	Donor/NGO	Pemerintah Daerah
	• Pembangunan central and training mitigation of tsunami NAD disaster Area, • Pembangunan center ot tsunami meseum developmnet.		

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota pada umumnya telah melakukan perencanaan kegiatan melalui APBD dalam bentuk kegiatan pendukung atau komplemen dari kegiatan infrastruktur yang telah dilaksanakan BRR atau Donor/NGO. Salah satunya adalah pembebasan lahan untuk jalan, pelabuhan, bandara, dan sebagainya yang perencanaan kegiatannya sharing dengan pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi yang lain, meskipun lebih dominan dalam bentuk sharing "peran" dibanding finansial. Sedangkan pada kegiatan infrastruktur yang lain pemerintah daerah lebih banyak berkontribusi pada aspek pelaksanaan dan pengawasan. Beberapa PNS dalam pemerintah daerah juga turut disertakan dalam proses perencanaan, meskipun kewenangannya masih terbatas.

Upaya BRR membangun regional offices dan sekretariat bersama untuk menggalang koordinasi dengan berbagai stakeholders. Kegiatan dalam sekretariat bersama adalah screening proposal, yang berasal dari berbagai stakeholders, berdasarkan evaluasi prioritas, aspek teknis dan lingkungan sehingga muncul 'kegiatan terpilih'. Pertemuan koordinasi dan sinkronisasi BRR dengan Pemerintah menjadi media untuk mendapatkan beberapa butir-butir tindakan yang akan dilaksanakan secara bersama pada masa mendatang. Namun, belum seluruh sekretariat bersama di daerah yang mampu berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pada beberapa kasus, terjadi kecenderungan kompetisi antar agensi/NGO. Misalnya, yang terjadi antara program dua NGO yang sama di Kuala Bubon. Hal ini disebabkan bukan karena kedua NGO tersebut tidak tahu siapa melakukan apa, pada dasarnya mereka sudah tahu karena staf lokal mereka berasal dari daerah dampingan. Kebanyakan NGO memiliki etiket, kalau sudah ada lembaga lain bergerak di satu sektor di desa A, mereka tidak melakukan program itu lagi di tempat yang sama. Namun seringkali, mereka tidak mengindahkan apa yang sudah dilakukan oleh NGO lain, justru membuat program yang sama dengan lokasi yang sama. Akibatnya terjadi tumpang tindih program. Kasus seperti itu juga terjadi di beberapa wilayah lain di Aceh Barat. Sesungguhnya, masuknya program bantuan dari agensi yang berbeda di desa yang sama memang selain membawa banyak manfaat dalam bentuk variasi bantuan bagi para korban tsunami, akan tetapi juga telah membawa akibat munculnya kecenderungan kompetisi antar agensi.

4.1.3.3. Bidang Sosial Budaya

Terdapat 3 stakeholders yang terlibat langsung dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias. Dalam rangka percepatan pemulihan tersebut telah tercipta kerjasama antara stakelders melalui pembagian bidang sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholders tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 - 61
Peran dan Tanggung jawab Stakeholders Dalam Bidang Pemulihan Sosial Budaya

Sub Sektor	BRR	Donor/NGO	Pemda
Pendidikan	• Pengadaan peralatan sekolah (komplement kegiatan donor/NGO) • Pemberian beasiswa S2 dan S3 kepada mahasiswa dan dosen	• Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat TK - Perguruan Tinggi • Pelatihan tenaga guru	• Penyediaan tenaga guru dalam rangka peningkatan SDM
Kesehatan	• Rehabilitasi sarana kesehatan (polindes, puskesmas, pustu, kantor dinas kesehatan) (Komplemen Donor/NGO) • Pemberian beasiswa S2 dan S3 kepada tenaga medis	• Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana kesehatan (Rumah Sakit, gudang farmasi dll) • Pelatihan tenaga medis	• Rekrutmen tenaga medis dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
Agama	• Rehabilitasi sarana ibadah terutama mesjid dan mushalla • Pelatihan peningkatan SDM bagi ulama dan santri	• Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana ibadah terutama gereja dan vihara.	• Penyediaan guru agama dan trainer dalam rangka meningkatkan kembali nilai-nilai agama
Sosial	• Pemberdayaan masyarakat melalui bantuan ekonomi produktif	• Bantuan kebutuhan sandang dan pangan kepada anak yatim dan kurang mampu	• Pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana dan pengungsi secara langsung pada masa tanggap darurat.
Peranan Perempuan	• Reunifikasi keluarga bagi anak-anak yang kehilangan orang tua • Pengadaan status hukum anak melalui akte kelahiran	• Pelatihan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak • Women crisis center	• Penyediaan qanun mengenai akte kelahiran gratis bagi anak-anak korban bencana
Pemuda dan Olahraga	• Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana olahraga (komplemen NGO)	• Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana olahraga • Melengkapi peralatan	• Peningkatan kualitas SDM atlet melalui pembibitan atlet

Sub Sektor	BRR	Donor/NGO	Pemda
		atlet	
Budaya	Rehabilitasi gedung dan sarana kebudayaan dalam rangka membangkitkan nilai khasanah budaya lokal masyarakat	Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana kebudayaan (komplemen BRR)	Fasilitasi sarana dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

Sumber : Analisis P3B-Bappenas

4.1.3.4. Bidang Pemulihan Ekonomi

Konsistensi Antar pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang pemulihan perekonomian terhadap rencana induk masih perlu ditingkatkan. Dalam pelaksanaan kerap terjadi masalah, misalnya secara kontraktual bantuan sudah diberikan tetapi tidak ada kecocokan dalam jenis dan tipe barang bantuan yang diberikan. Hal ini dikarenakan stakeholders (terutama lembaga donor/NGO) hanya melihat keinginan masyarakat penerima bantuan tetapi bukan kebutuhan masyarakat tersebut. Sebagai contoh adalah pemberian kapal bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan para nelayan di Lampulo. Hal ini juga tentu sebagai bahan masukan bagi pihak perencanaan, apakah hal-hal yang direncanakan tersebut sudah tepat. Contoh lainnya adalah bantuan perahu/kapal yang tidak dapat diterima pemerintah daerah karena kondisi kapal yang tidak memenuhi syarat, dimana tentu hal ini perlu diperhatikan pihak pemberi bantuan.

4.1.3.5. Bidang Kelembagaan dan Hukum

Konsistensi antar pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan dan hukum, yaitu antara BRR, Pemda, dan Donor/NGO telah tercipta mekanisme yang bersifat saling melengkapi. Hal ini dikarenakan fokus prioritas pembangunan dari masing-masing pelaksana ini berbeda.

Pada pembangunan sarana dan prasarana kantor sub bidang kelembagaan, Pemda menyediakan lahan/lokasi kantor, apabila pendanaan kurang mencukupi akan dibantu oleh BRR. BRR dan Donor/NGO melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kantor dan rumah dinas. BRR membangun untuk semua sarana pemerintahan, sedangkan Donor/NGO terfokus pada pembangunan Kantor Camat, Kantor Desa/Lurah, dan Rumah Dinas. Mekanisme pelaksanaannya yaitu BRR memprioritaskan Donor/NGO untuk memilih lokasi pembangunan dan jenis kantor yang akan dibangun dan umumnya cakupan lokasi yang dipilih Donor/NGO untuk dibantu adalah di wilayah bencana, kemudian BRR membangun di tempat lain. Pada pembangunan kantor sub bidang hukum dan K3M, pembagian peran diantara Pemda, BRR dan Donor/NGO sama dengan bidang kelembagaan, namun Donor/NGO hanya terlibat dalam pembangunan rumah dinas.

Terkait dengan program non fisik, salah satunya adalah peningkatan kapasitas untuk Pemda, aparat hukum, dan kepolisian, tidak ditemui adanya kendala yang signifikan. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh berbagai stakeholder (BRR maupun Donor/NGO). Umumnya daerah belum memiliki prosedur dan standard baku untuk melakukan seleksi terhadap lembaga yang akan memberi bantuan atau yang diminta untuk memberi bantuan dalam kegiatan peningkatan kapasitas. Daerah memiliki kecenderungan untuk menerima bantuan program peningkatan kapasitas, sekalipun program yang diberikan

tidak dibutuhkan. Dengan demikian, BRR maupun Donor/NGO perlu lebih teliti dalam menyusun program dan memilih daerah.

Program-program yang dilaksanakan melalui pelatihan lebih menekankan pada partisipasi dalam kelas yang tidak terlalu besar, penerapan konsep dalam bentuk latihan, dengan fasilitator/instruktur yang dapat memotivasi peserta, dinilai oleh personil Pemda sebagai pendekatan yang paling efektif. Terlebih jika dalam implementasinya kemudian disediakan seorang konsultan/pendamping yang dapat membantu jika ternyata di lapangan ditemui banyak masalah yang tidak sesuai dengan konsep.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan dalam pembangunan sarana pemerintahan ini bersifat saling melengkapi, sehingga peristiwa tumpang tindih dapat dihindari. Pembagian peran dalam rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias bidang kelembagaan dan hukum dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4 - 628
Peran BRR, Pemda dan Donor/NGO dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bidang Kelembagaan dan Hukum

Sub Bidang	BRR	Pemda	Donor/NGO
Kelembagaan	1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pemerintahan (Kantor Kepala Daerah/DPRD/Dinas/Badan /Meuligo, Kantor Kecamatan, Rumah Dinas Camat, Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Mukim/Balee) 2. Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PEMDA 4. Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemda 5. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah 6. Penataan Administrasi Kependudukan 7. Penataan Administrasi Wilayah Pemerintah 8. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 9. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 10. Penguatan Kelembagaan Demokrasi 11. Peraturan Perundang-Undangan (Desentralisasi/OTDA)	1. Penyediaan dan pembebasan lahan 2. Penataan batas wilayah/administrasi 3. Rehabilitasi dan pembangunan kantor/media center dan rumah dinas/jabatan 4. Pemberdayaan Pemerintahan Gampong/Lurah dan Mukim 5. Penyediaan aparat Pemda	1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kantor Pemerintahan (Kantor Kecamatan, Kantor Desa/Kelurahan, Rumah Dinas Camat) 2. Studi/penelitian pengembangan institusi 3. Pengembangan Kapasitas Pemda berbagai level 4. Fasilitasi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat 5. Fasilitasi rapat koordinasi tingkat kecamatan
Hukum	1. Rehabilitasi dan	-	1. Pelatihan aparat

Sub Bidang	BRR	Pemda	Donor/NGO
	Rekonstruksi Sarana dan Prasarana bidang hukum (Kejati/Kejari, Lapas/Rutan, Bapas/Rupbasan, Kanwil Depkumham, Kanim, PT/PTUN, Pengadilan Negeri, Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer, Rumah Dinas) 2. Pemberdayaan dan pengembangan institusi hukum		hukum mengenai warisan, perwalian, pertanahan, dll 2. Membangun sistem perpustakaan di Pengadilan tinggi, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syariah
K3M	1. Refungsionalisasi Kelembagaan (menkopoluhukam, Menkominfo, LSN, Polri) dan TNI (Mabes TNI, TNI AD, AL, dan AU) berupa pengembangan sarana dan prasarana kantor dan rumah dinas. 2. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Daerah 3. Program Dukungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 4. Pengembangan Ketahanan Masyarakat	1. Penyebaran dan Pembangunan Informasi dan komunikasi 2. Pembinaan kesatuan bangsa 3. Perlindungan Masyarakat	1. Pembangunan rumah dinas TNI 2. Peningkatan kapasitas aparat Polri melalui pelatihan

Sumber : Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2007.

4.1.4. Masyarakat Penerima Manfaat

Tinjauan terhadap masyarakat penerima manfaat dilakukan melalui penyebaran kuisisioner sebanyak 180 buah yang tersebar di 7 (tujuh) Kab/Kota yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Aceh Singkil. Pertanyaan kuisisioner diarahkan kepada masing-masing bidang pemulihan. Hasil kuisisioner ini kemudian dianalisis sesuai jawaban yang valid, artinya tidak semua bidang pemulihan memiliki jumlah jawaban valid yang sama dengan 180 jawaban untuk pertanyaan yang terkait. Penjelasan berikut akan dilakukan per bidang pemulihan.

4.1.4.1. Perumahan dan Permukiman

Tinjauan terhadap masyarakat penerima manfaat proses rehabilitasi dan rekonstruksi khusus bidang perumahan dan permukiman untuk kondisi sebelum dan sesudah tsunami difokuskan pada 3 hal, yaitu: (1) lokasi tempat responden tinggal, (2) status kepemilikan rumah, dan (3) jarak rumah ke tempat aktivitas sehari-hari. Responden tersebar di 7 (tujuh) Kab/Kota berikut: Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Aceh Singkil. Total responden sebanyak 180 orang, tetapi untuk 3 (tiga) pertanyaan terkait perumahan dan permukiman, jawaban yang valid berjumlah sekitar 168-174.

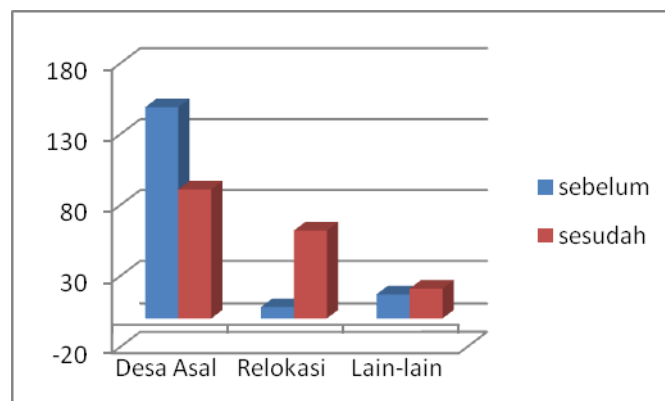
Pilihan terhadap lokasi perumahan baru

Dari hasil olahan jawaban responden terhadap pertanyaan di manakah responden tinggal sebelum dan sesudah tsunami, diperoleh temuan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Secara keseluruhan, sebagian besar responden setelah tsunami, ada yang masih berada di desa asalnya (39 %), sementara warga yang direlokasi ke tempat lain mengalami peningkatan hingga 6 (enam) kali lipat dibanding sebelum tsunami. Sementara sebanyak 12 % menjawab berada di tempat lain (rumah kerabat, penampungan, dll).
- 2) Khusus di Kab.Pidie, lokasi responden tinggal tidak mengalami perubahan baik sebelum maupun sesudah tsunami, karena wilayah ini tidak terkena dampak tsunami. Hal yang sama juga terjadi di Kab. Bireun.
- 3) Jumlah responden terbanyak yang telah pindah dari desa asal ke tempat relokasi adalah Kota Banda Aceh, jika dibandingkan dengan kabupaten lain terpilih.

Secara keseluruhan, perbandingan jumlah jawaban responden untuk kondisi sebelum dan sesudah 2 (dua) tahun tsunami ditunjukkan pada tabel berikut. Kecenderungan yang terjadi dari responden yang ditanyakan, sebagian besar mengalami relokasi tempat tinggal dari desa asalnya. Hal ini dikarenakan desa asal mereka tidak diperbolehkan lagi untuk menjadi kawasan permukiman karena termasuk daerah rawan bencana. Selain itu, belum terealisasi sepenuhnya pembangunan perumahan di daerah mereka, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, menjadi alasan mengapa warga direlokasi ke tempat lain untuk sementara waktu. Beberapa kabupaten yang menjadi sampel lokasi jika ditinjau realisasi pembangunan perumahannya, memang belum selesai seluruhnya hingga akhir tahun 2007, sehingga banyak warga yang masih bertempat tinggal di tempat penampungan sementara.

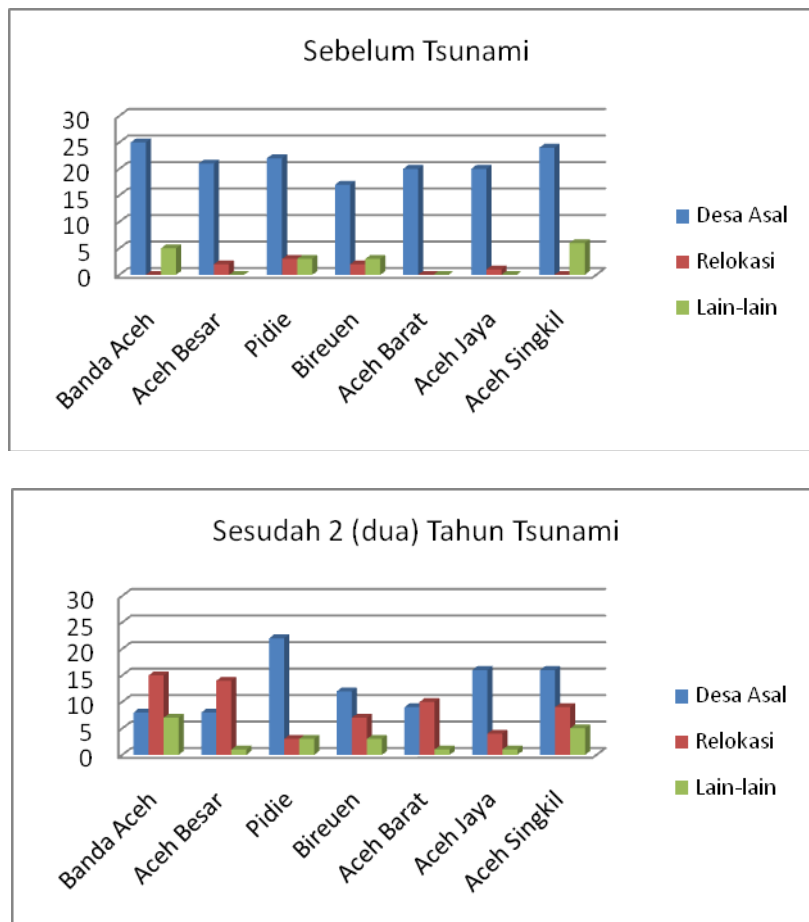
Grafik 4 - 6
Rekapitulasi Lokasi Rumah Tinggal Sebelum dan Sesudah 2 (dua) Tahun Tsunami



Sumber: Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2007

Perbandingan kondisi untuk masing-masing kabupaten dalam bentuk grafik ditunjukkan pada 2 (dua) gambar berikut. Secara umum, kondisi untuk tiap kabupaten memiliki ciri yang sama, di mana sebagian responden akibat dampak tsunami mengalami perubahan lokasi tempat tinggal.

Grafik 4 - 7
Lokasi Tempat Tinggal Responden Sebelum dan Sesudah 2 (dua) Tahun Tsunami



Sumber: Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2007

Tinjauan pada salah satu Kab/Kota, yaitu Kota Banda Aceh, menunjukkan bahwa setelah 2 (dua) tahun tsunami berlalu, peningkatan dalam jumlah besar terjadi untuk relokasi tempat tinggal. Hal ini menandakan penduduk mulai memanfaatkan rumah baru mereka di tempat yang baru dan memulai kehidupan baru pasca terjadinya bencana.

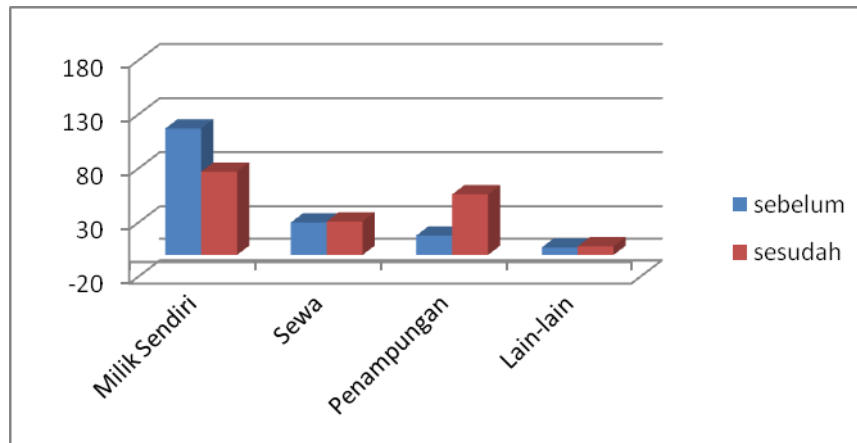
Menurunnya status kepemilikan rumah

Analisis juga dilakukan terhadap status kepemilikan rumah responden. Hal ini untuk mengetahui apakah rumah yang saat ini dimiliki sudah menjadi milik sendiri, sewa, atau sedang berada di penampungan. Beberapa temuan yang diperoleh adalah:

- 1) Rata - rata kepemilikan rumah responden mengalami penurunan setelah 2 (dua) tahun tsunami. Hingga saat ini, sebagian besar responden yang ditemui masih berada di penampungan sementara, kecuali di Kab. Bireuen dan Kab. Aceh Jaya, yang sebagian besar masih berada di rumah sendiri. Biasanya penduduk belum menempati rumah tinggal karena proses administrasi penyerahan bantuan yang membutuhkan waktu, rumah sedang diperbaiki, dll.
- 2) Responden yang menjawab lain-lain pada umumnya tinggal di rumah keluarga atau kerabat terdekatnya. Selain itu, ada juga responden yang tidak mau kembali ke tempat asal atau relokasi karena masalah psikis setelah bencana tsunami terjadi.

Secara lengkap perbandingan untuk keadaan sebelum dan sesudah 2 (dua) tsunami ditunjukkan pada tabel berikut. Jumlah responden yang memiliki rumah sendiri mengalami penurunan sebesar 34 % dari kondisi sebelum tsunami. Sementara jumlah penduduk yang tinggal di penampungan meningkat hampir 3 kali lipat.

Grafik 4 - 8
Rekapitulasi Status Kepemilikan Rumah Sebelum dan Sesudah 2 (dua) Tahun Tsunami

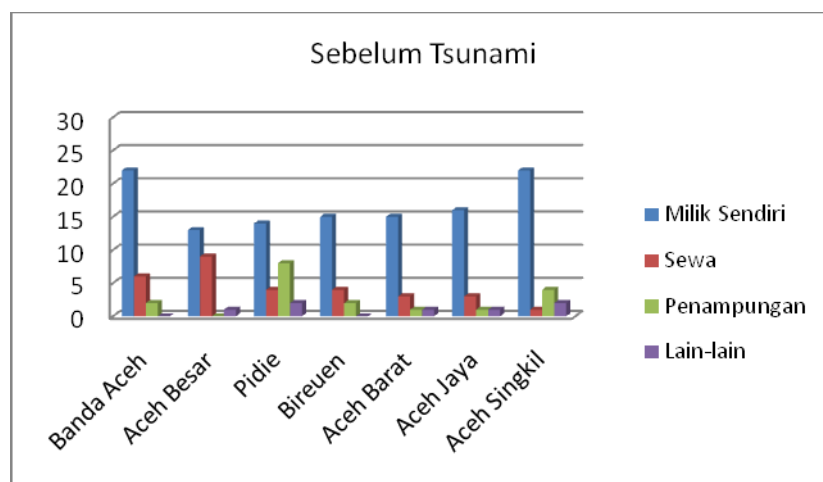


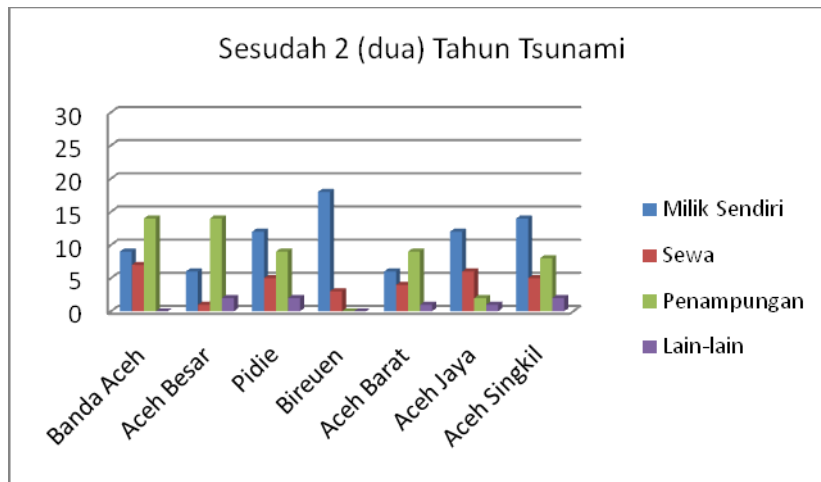
Sumber: Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2007

Masih banyaknya responden yang tinggal di penampungan hendaknya perlu mendapat perhatian. Hingga 31 Desember 2007, 3.698 KK masih tinggal di barrak (Pusdatin BRR). Di satu sisi, hal ini akan membuat mereka menjadi tergantung dengan beberapa fasilitas yang diberikan secara gratis di tempat penampungan, seperti air bersih, makanan, dan bantuan pakaian.

Perbandingan kondisi untuk masing-masing kabupaten dalam bentuk grafik ditunjukkan pada 2 (dua) gambar berikut. Secara umum, kondisi untuk tiap kabupaten memiliki ciri yang sama, di mana jumlah kepemilikan rumah sendiri mengalami penurunan dan tempat tinggal di penampungan mengalami kenaikan.

Grafik 4 - 9
Status Kepemilikan Rumah Responden Sebelum dan Sesudah 2 (dua) Tahun Tsunami





Sumber: Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2007

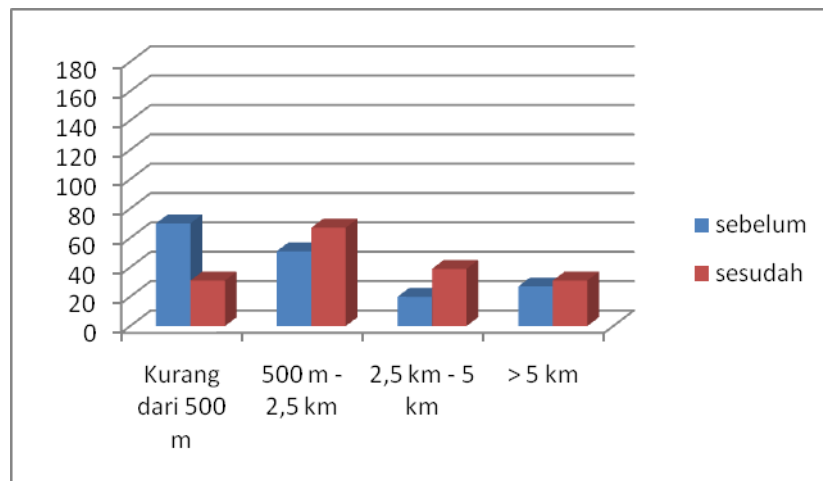
Perubahan jarak rumah ke tempat aktivitas sehari-hari

Pertanyaan mengenai jarak rumah responden ke tempat aktivitas sehari-hari dimaksudkan untuk mencoba menelusuri, apakah ada perbedaan setelah 2 (dua) tahun tsunami. Dari hasil wawancara, beberapa temuan yang ada yaitu:

- 1) Sebagian responden (hampir 50 %) yang sebelum terjadi tsunami mengatakan bahwa jarak rumah mereka ke tempat aktivitas sehari-hari kurang dari 500 m, menjadi lebih jauh setelah terjadinya tsunami. Hal ini bisa terjadi, karena responden ada yang pindah ke lokasi lain di mana pusat aktivitasnya lebih jauh dibandingkan rumah sebelumnya.
- 2) Responden yang merasakan perbedaan jarak secara signifikan terdapat di Kab. Aceh Besar. Sebelum tsunami, jarak tempuh menuju tempat aktivitas sehari-hari sebagian besar menjawab kurang dari 500 meter. Setelah tsunami, sebagian responden (52 %) menjawab jarak tempuh menjadi 500 m - 2,5 km. Hal yang serupa terjadi di Kab. Aceh Barat, di mana jarak tempuh mereka sebelum tsunami kurang dari 500 meter, setelah 2 tahun tsunami menjadi 2,5 km - 5 km. Dua kabupaten tersebut memang terkena dampak tsunami yang paling parah, di mana seluruh sarana prasarana kota dan fasilitas umum sebagian besar rusak parah.
- 3) Jarak tempuh pada kondisi sebelum tsunami di Kab. Aceh Jaya kepada responden yang ditanya, merata untuk tiap jawaban dari para responden. Namun untuk kondisi sesudah tsunami, 50 % responden menjawab jarak tempuh menjadi 500 m - 2,5 km.

Secara keseluruhan, perbandingan jarak rumah responden menuju tempat aktivitas sehari-hari menjadi lebih jauh dibandingkan sebelum tsunami. Hal ini terjadi karena kerusakan yang terjadi dalam satu kawasan, menyebabkan adanya beberapa fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat bekerja juga mengalami perubahan lokasi. Secara keseluruhan, jarak tempuh responden menuju tempat aktivitas sebagian besar menjadi 500 m - 2,5 km, di mana sebelumnya kurang dari 500 meter.

Grafik 4 - 10
Rekapitulasi Jarak Rumah Menuju Tempat Aktivitas Sebelum

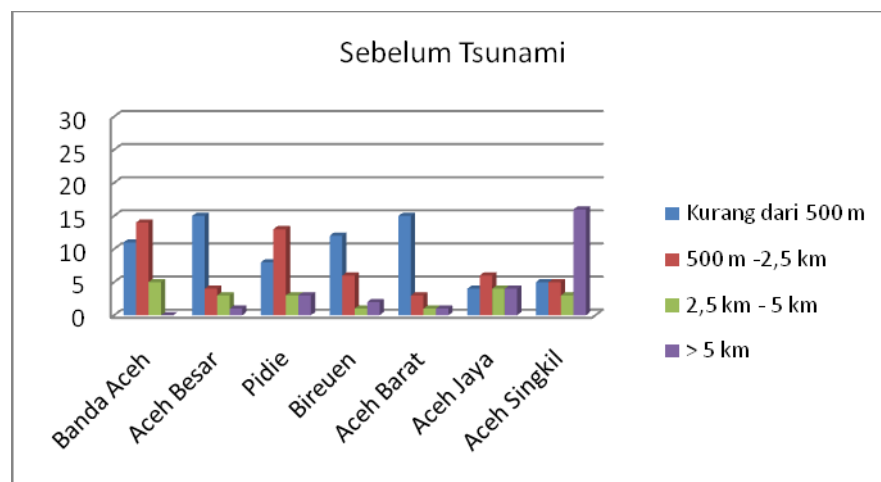


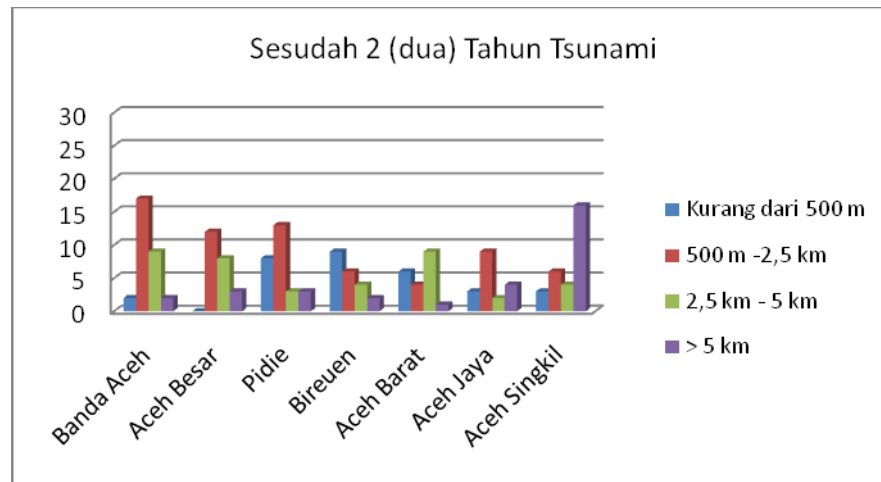
Sumber: Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2007

Pada prinsipnya seluruh pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi berusaha membangun kembali permukiman penduduk dan seluruh sarana dan prasarana untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik pasca bencana. Perbedaan jarak yang ada pada kondisi sebelum dan sesudah tsunami bukan sebagai indikator utama keadaan menjadi lebih baik atau buruk. Hal yang perlu diperhatikan adalah, apakah sarana dan prasarana wilayah dan kota yang sudah dibangun, mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan kata lain, jarak yang menjadi lebih jauh setelah tsunami bukan sebagai masalah jika didukung dengan sarana transportasi yang memadai. Pertanyaan pada kuisioner ini tidak membahas sampai ke arah sana, tetapi hanya menggambarkan persebaran jarak tempuh.

Perbandingan kondisi untuk masing-masing kabupaten dalam bentuk grafik ditunjukkan pada 2 (dua) gambar berikut.

Grafik 4 - 11
Jarak Tempuh Ke Tempat Aktivitas Sebelum dan Sesudah 2 (dua) Tsunami





Sumber: Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2007

4.1.4.2. Infrastruktur

Masyarakat korban bencana, sebagai salah satu subjek sekaligus objek penerima manfaat dari pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, sebagian diantaranya telah mulai merasakan dan menerima hasilnya. Bangunan infrastruktur yang sudah dibangun BRR dan lembaga Donor/NGO/LSM telah mulai dialihkan asetnya kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Infrastruktur sebagai salah satu sarana dan prasarana utama dalam memperlancar pembangunan sangat memerlukan akselerasi pembangunan selama sisa waktu BRR ini. Sebagian akses jalan, transportasi darat, laut dan udara, listrik, telekomunikasi, dan sebagainya menjadi salah satu prioritas yang perlu segera diselesaikan.

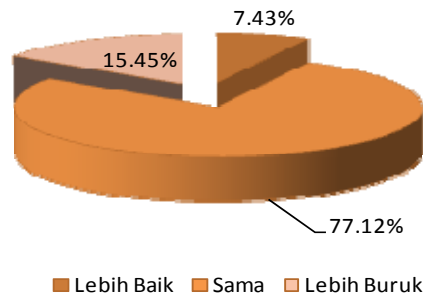
Permasalahan dan isu penting terkait kegiatan infrastruktur yang menjadi perhatian masyarakat saat ini dan manfaatnya masih belum maksimal di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias adalah:

- Pembebasan lahan
- Lambatnya proses pembangunan jalan dan jembatan
- Keterbatasan jaringan distribusi listrik
- Keterbatasan jaringan distribusi air bersih
- Keterbatasan jaringan distribusi BBM
- Keterbatasan sistem jaringan telekomunikasi
- Keberadaan tanggul pengaman pantai di sekitar permukiman dekat pantai belum terbangun dengan baik

Untuk mengetahui sejauh mana dampak kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, maka dilakukan penilaian terhadap beberapa parameter yang dianggap krusial di masyarakat. Survey terhadap 210 orang responden dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang dampak dari hasil pembangunan; jalan dan jembatan, transportasi dan alat transportasinya, ketersediaan listrik dan ketersediaan air bersih. Survei dilakukan dengan populasi semua warga Aceh berusia dewasa dari berbagai unsur dan profesi yang berbeda.

Penilaian dari masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap kondisi umum infrastruktur hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat digambarkan sebagai berikut.

Grafik 4 - 12
Respon masyarakat hasil survey terhadap kondisi infrastruktur



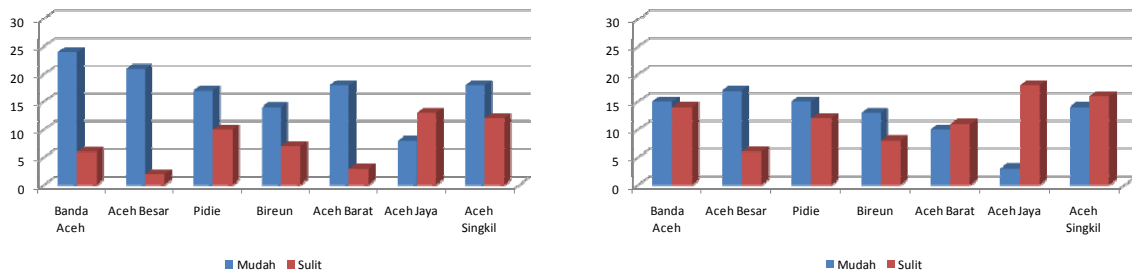
Sumber : Analisis Hasil Survey P3B, 2007.

Secara umum, masyarakat sudah merasakan manfaat perkembangan infrastruktur yang telah terbangun. Pemulihan infrastruktur dapat dilihat dari 77,12% responden menganggap kondisi infrastruktur saat ini sudah hampir sama (pulih) dengan kondisi sebelum terjadinya bencana. 15,45% responden masih menganggap kondisi saat ini masih lebih buruk dan 7,43% responden menilai infrastruktur sudah mulai pulih dan jauh lebih baik dari kondisi sebelum tsunami.

Kondisi jalan dan jembatan pendukung kemudahan mobilitas

Mobilitas antar wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi masih belum seluruhnya diselesaikan BRR. Kondisi jalan yang berlubang, belum diperkeras dan jembatan yang masih belum diperbaiki menjadi indikator untuk menunjang transportasi antar wilayah.

Grafik 4 - 13
Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan sebelum dan setelah 2 tahun tsunami



Sumber : Analisis Hasil Survey P3B, 2007.

Pada infrastruktur jalan dan jembatan, sebagian besar masyarakat sudah menganggap infrastruktur telah hampir pulih. Namun, masyarakat (30-40% responden) masih ada yang mengeluhkan kondisi jalan dan jembatan di Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Singkil dan Banda Aceh. Kondisi ini sangat dirasakan akibat kesulitan mobilitas masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Sedangkan di wilayah Pidie dan Bireun yang merupakan wilayah timur, sebagian besar kondisi jalan dan jembatan sudah terhubung dengan baik, meskipun masih ada kerusakan di beberapa ruas namun tidak signifikan.

Untuk mempercepat pemulihan jalan dan jembatan khususnya di lintas barat dan lintas tengah NAD, BRR dan donor/NGO yang memiliki komitmen menangani ruas tersebut perlu memberikan prioritas dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi

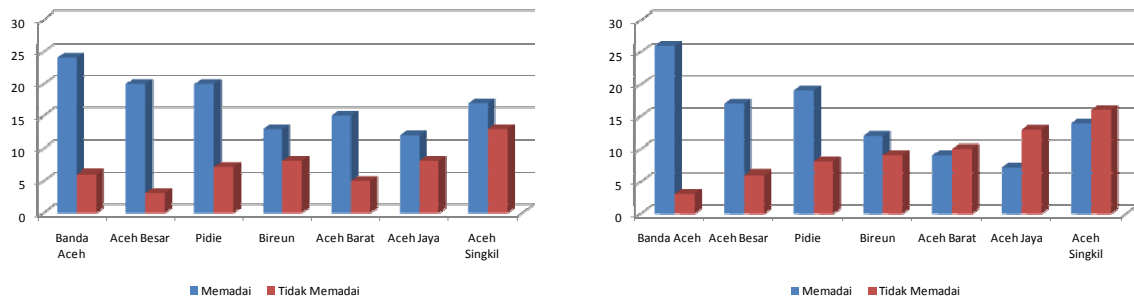
lokasi tersebut. Sehingga mobilitas material, alat berat dan kegiatan perekonomian untuk mencapai lokasi tersebut dapat segera pulih dan normal kembali.

Kondisi angkutan pendukung mobilitas antar wilayah

Sarana angkutan menjadi salah satu faktor pendukung mobilitas masyarakat antar wilayah. Seberapa besar manfaat pengadaan bus damri, rehabilitasi dan rekonstruksi terminal, dan rambu lalu lintas menjadi pertimbangan masyarakat dalam beraktifitas.

Grafik 4 - 14

Kondisi sarana transportasi (angkutan) sebelum tsunami dan setelah 2 tahun tsunami



Sumber : Analisis Hasil Survey P3B, 2007.

Hasil survei terhadap responden yang berada di masing-masing Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Aceh Singkil, sebanyak 20-35% responden menjelaskan bahwa kondisi sarana transportasi angkutan setelah dua tahun peristiwa tsunami berlalu masih sangat terbatas. Sehingga menyulitkan masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi untuk melakukan aktivitas dan mobilitas sehari-hari. Sedangkan di Banda Aceh, Pidie, dan Bireun kondisi angkutan relatif sudah pulih seperti kondisi sebelum tsunami.

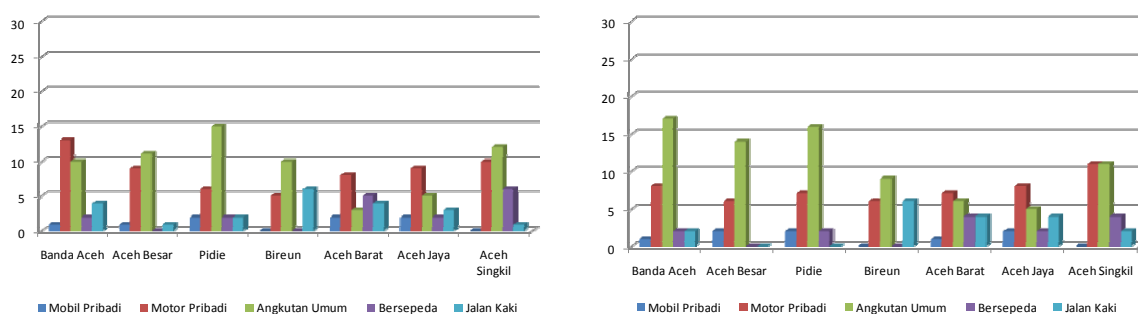
Sarana angkutan yang masih digunakan antar wilayah adalah taksi antar kota dengan kapasitas kurang dari 10 orang. Di beberapa daerah seperti Aceh Jaya, keberadaan terminal masih belum tertata dengan baik, masyarakat belum dapat menggunakan fasilitas terminal yang memadai. Sehingga perlu ada prioritas BRR untuk rehabilitasi dan rekonstruksi terminal dan pengadaan bus damri di wilayah diluar Banda Aceh, khususnya di wilayah barat. Karena pada wilayah timur dan tengah sudah ada sarana bus antar kota yang menuju Medan.

Ketersediaan alat transportasi masyarakat

Pilihan moda transportasi di NAD masih bergantung terhadap ketersediaan alat transportasi yang ada. Kondisi geografis yang berkelok-kelok dan jarak tempat aktifitas yang jauh dari tempat tinggal menuntut masyarakat untuk menggunakan moda transportasi. Alat transportasi yang digunakan antara lain mobil pribadi, motor pribadi, angkutan umum, bersepeda, jalan kaki. Sedangkan untuk transportasi antar pulau menggunakan perahu, kapal dan pesawat.

Grafik 4 - 15

Alat transportasi yang digunakan sebelum tsunami dan setelah 2 tahun tsunami



Sumber : Analisis Hasil Survey P3B, 2007.

Sebagian besar masyarakat para korban tsunami telah menggunakan kendaraan pribadi dan angkutan umum sebagai moda transportasi. Beberapa diantaranya masih memilih motor pribadi dan menggunakan angkutan umum untuk melakukan kegiatan rutin. Masyarakat yang berada di pusat perekonomian seperti Banda Aceh dan Aceh Barat, pada umumnya masih merasakan keterbatasan moda transportasi (20-25%). Kondisi ini diakibatkan area kerja masyarakat yang sebagian besar sering keluar kota bahkan keluar pulau. Sedangkan masyarakat yang bertempat tinggal di luar daerah tersebut, telah menganggap moda transportasi sudah mulai pulih karena sebagian besar area kerja lebih banyak berada di lingkungan sekitar saja.

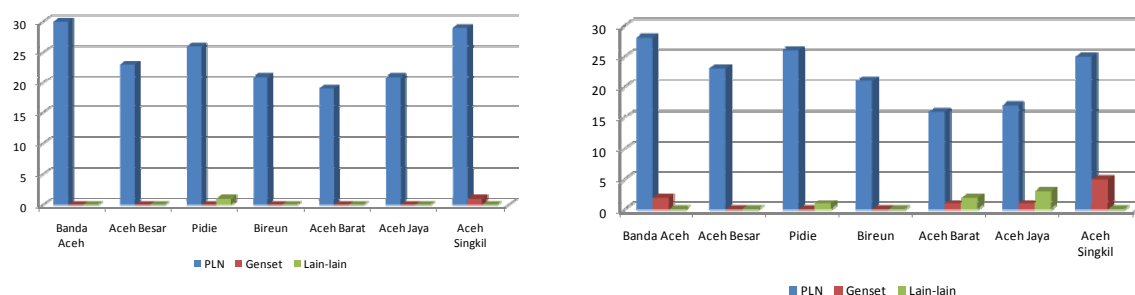
Masyarakat telah mendapatkan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan moda transportasi. Namun, BRR masih perlu segera mempercepat proses penyediaan sarana dan prasarana transportasi di wilayah barat untuk menunjang mobilisasi warga antar wilayah baik dalam menggunakan angkutan umum dan kendaraan pribadi.

Ketersediaan Listrik setelah 2 tahun tsunami

Perbaikan jaringan listrik sudah hampir diselesaikan oleh BRR dan PLN. Tetapi belum ada penambahan daya untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat dari 2 tahun sebelumnya. Beberapa lokasi di pegunungan masih sangat prihatin dengan keberadaan listrik yang hingga kini belum mendapatkan sarana penerangan listrik. Belum adanya jaringan listrik yang masuk ke wilayah tersebut membawa imbas kepada kegiatan. Sehingga masyarakat daerah tersebut masih ada yang menggunakan genset, lampu teplok dan lain-lain.

Grafik 4 - 16

Ketersediaan infrastruktur tenaga listrik sebelum dan setelah 2 tahun tsunami



Sumber : Analisis Hasil Survey P3B, 2007.

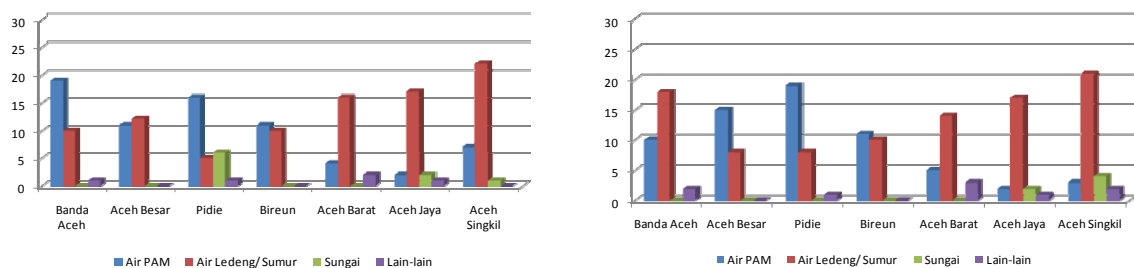
Ketersediaan listrik di Aceh saat ini belum dapat mencukupi kebutuhan yang ada. Dari survey terhadap korban bencana, ditemukan bahwa 92,35% responden mengatakan sebagian besar sistem jaringan listrik PLN sudah pulih atau terpasang jaringannya walaupun pemadaman bergilir masih terus dilakukan PLN. Hal ini diakibatkan belum pulihnya pusat pembangkit tenaga listrik dan meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat dibandingkan dengan kebutuhan listrik sebelum bencana.

Masyarakat menilai bahwa kebutuhan akan penerangan listrik sudah cukup mendesak. Pemanfaatan fasilitas listrik belum diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa adanya pemadaman bergilir lagi. Oleh karena itu, proyek pengembangan sumber daya listrik baru seperti PLTMH harus segera direalisasikan. BRR harus mempercepat proses kerjasama dengan PLN agar pekerjaan fisik dsehingga apat segera diselesaikan.

Sumber Air Bersih

Harapan masyarakat dalam mendapatkan air bersih sangat besar. Pemasangan instalasi air bersih juga banyak mendapatkan perhatian baik dari BRR, Pemda, NGO dan lembaga donor. Sumber air bersih yang digunakan warga saat ini adalah air PAM, air ledeng/ sumur, sungai, dan sumber lain seperti air hujan, air isi ulang, dan sebagainya. Untuk melihat peningkatan ketersediaan air bersih dapat dilihat dari kelancaran suplai air PAM atau sumur di masyarakat.

Grafik 4 - 17
Respon masyarakat hasil survey terhadap kondisi infrastruktur air bersih



Sumber : Analisis Hasil Survey P3B, 2007.

Pada umumnya, jaringan air bersih sudah terpasang di beberapa permukiman. Namun instalasi pengolahan air belum pulih. Sebagian masih membutuhkan perbaikan bahkan pembangunan instalasi baru karena instalasi lama rusak atau hilang. Di Aceh Jaya dan Bireun. Sedangkan di sebagian Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Barat dan Aceh Singkil sudah mulai pulih baik jaringan maupun instalasinya. Namun kualitas air dan kelancaran suplai air yang ada masih terbatas.

Masyarakat di sebagian besar wilayah barat NAD masih menggunakan air ledeng/sumur, sedangkan di wilayah timur dan utara sudah banyak yang menggunakan air PAM. Pihak BRR dan Pemda diharapkan segera melakukan koordinasi bersama dengan NGO/Donor yang terlibat guna mempercepat proses pemulihan atau pembangunan instalasi pengolahan air bersih, bak intake, bak penampung saluran perpipaan dan keran umum. Lokasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah Aceh Barat, Aceh Jaya dan Aceh Singkil. Serta beberapa wilayah lain diluar 7 wilayah yang disurvei seperti Nias, Nias Selatan, dan Simelue.

Melalui kuesioner yang disebarakan kepada masyarakat (korban bencana) dari segala kalangan diperoleh beberapa catatan terkait percepatan infrastruktur adalah sebagai berikut :

- Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) adalah ujung tombak pembangunan Aceh pasca tsunami. Namun, kerja BRR di mata publik Aceh masih dinilai kurang memuaskan di wilayah barat NAD dalam bidang jalan, transportasi dan air bersih. Sedangkan untuk bidang kelistrikan hampir seluruh masyarakat NAD belum merasa puas.
- Prioritas dalam penentuan masyarakat objek penerima manfaat pembangunan infrastruktur dinilai kurang transparan terutama pada masalah peran dan tanggung jawab. Sehingga masyarakat selalu menganggap kesalahan dan keterlambatan pembangunan selalu berada pada BRR. Hal ini terjadi pada pemulihan infrastruktur air bersih dan kelistrikan.

4.1.4.3. Bidang Sosial Budaya

Selain evaluasi terhadap dua tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias, pemantauan dan evaluasi dilanjutkan pada aspek masyarakat pemanfaat program rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap pemulihan kehidupan masyarakat NAD dan Kepulauan Nias untuk mengetahui efektifitas dan efesiensi pembangunan bidang pemulihan sosial budaya yang diprioritaskan pada bidang kesehatan dan pendidikan. Pendidikan dan kesehatan sebagai salah satu bidang penting dalam keberlanjutan kehidupan masyarakat, membutuhkan prioritas pelaksanaan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi dan juga program keberlanjutan pasca BRR tahun 2009. Selama 2 tahun rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung, sebagian diantaranya telah merasakan manfaat secara langsung bagi masyarakat korban bencana. Dalam rangka mendapatkan gambaran dampak dan masyarakat kegiatan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dilakukan melalui penyebaran kuisisioner di 7 kabupaten kota yaitu Banda Aceh, Aceh Singkil, Aceh Besar, Bireun, Pidie, Aceh Barat dan Aceh Jaya.

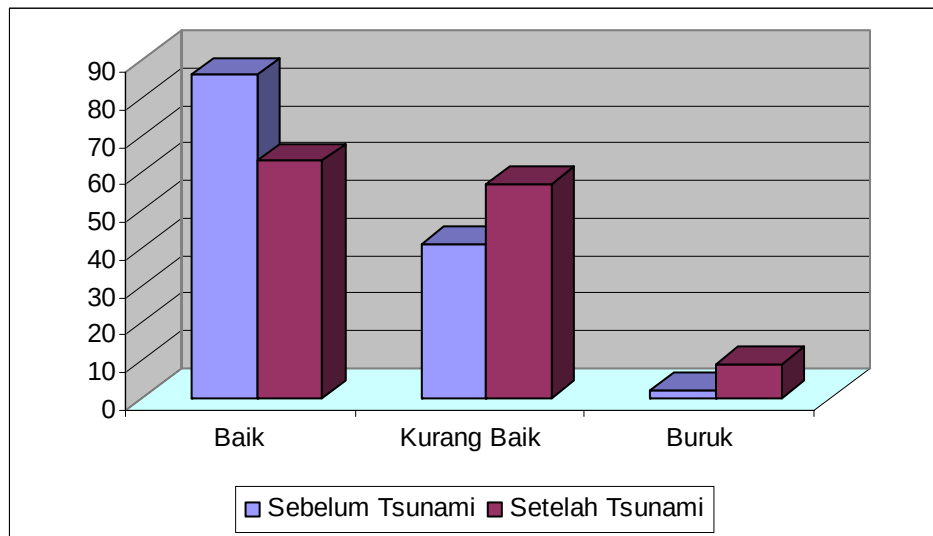
Penilaian dari masyarakat dalam rangka dampak pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kondisi umum bidang sosial budaya hasil 2 tahun pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Kualitas gedung sekolah mengalami penurunan di lokasi yang mengalami bencana tsunami yang paling parah
- b. Kenyamanan proses belajar mengajar mengalami penurunan di lokasi pasca konflik
- c. Keberadaan tenaga medis sudah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang tinggal di lokasi yang kena dampak tsunami yang paling parah

Kondisi Ruang Kelas

Dampak kemanfaatan dari aspek kondisi fisik ruang kelas yang digunakan dalam proses belajar mengajar sebelum dan setelah dua tahun tsunami bagi masyarakat dapat terlihat pada tabel berikut :

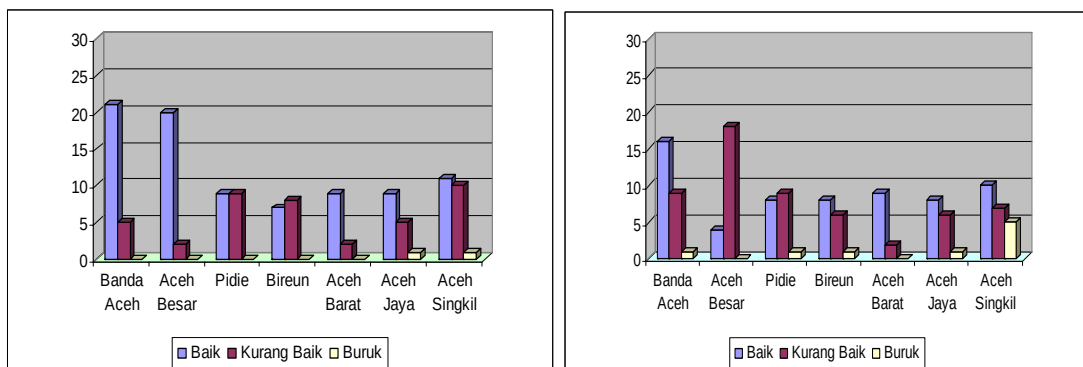
Grafik 4 - 18
Rekapitulasi Kondisi Fisik Ruang Kelas
Sebelum dan Sesudah 2 Tahun Tsunami di 7 Kabupaten/Kota



Sumber : Analisis P3B-Bappenas

Berdasarkan grafik diatas terlihat 2 (dua) kondisi fisik ruang kelas setelah dua tahun tsunami yaitu mengalami penurunan pada kategori baik dan mengalami peningkatan pada kategori kurang baik dan kategori buruk. Rincian kondisi ruang sekolah sebelum dan sesudah 2 tahun tsunami dari masing-masing 7 kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 4 - 19
Kondisi Fisik Ruang Kelas Sebelum dan Setelah 2 Tsunami



Sumber : Analisis P3B-Bappenas

Berdasarkan perbandingan hasil survey di 7 kabupaten/kota terlihat Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh mengalami penurunan kondisi fisik ruang kelas yang cukup signifikan pada kategori baik. Di Kabupaten Aceh Besar terdapat 20 responden menjawab kondisi ruang fisik sekolah sebelum tsunami lebih baik dan setelah pelaksanaan dua tahun tsunami mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan mengalami penurunan sebanyak 80% setelah dua tahun tsunami. Di Kota Banda Aceh terdapat 21 responden menjawab kondisi ruang fisik sekolah sebelum tsunami lebih baik dan setelah pelaksanaan dua tahun tsunami mengalami penurunan sebanyak 24% setelah dua tahun tsunami. Sedangkan kabupaten/kota lainnya yang menjadi sampel, mengalami fluktuasi yang berbeda sebelum dan setelah dua tahun tsunami. Dilihat

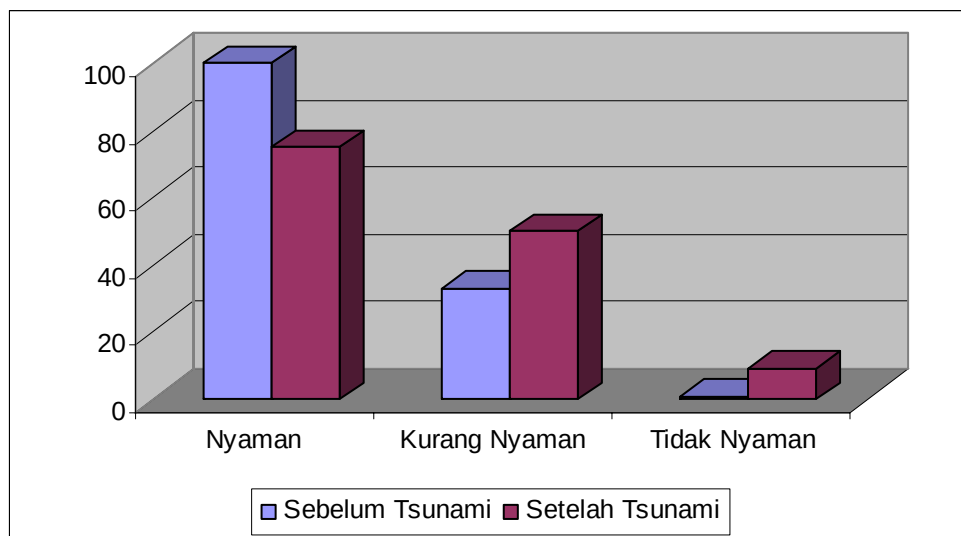
pada aspek lokasi bencana, Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh merupakan daerah yang paling parah akibat tsunami. Kondisi ini menunjukkan proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah berjalan selama dua tahun, belum dirasakan langsung manfaatnya bagi anak didik sebagai korban bencana khusus di ke dua wilayah tersebut.

Kondisi fisik ruang kelas pada kategori buruk sebelum tsunami, menunjukkan peningkatan ke arah lebih baik setelah dua tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi di Kabupaten Aceh Singkil yaitu sebesar 400%. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah dua tahun tsunami telah dapat dirasakan manfaatnya kepada anak didik melalui peningkatan kondisi fisik ruang sekolah yang berdampak pada kelancaran belajar mengajar, khususnya pada wilayah yang berada relatif cukup jauh dari dampak tsunami, namun mengalami dampak bencana. Hal tersebut terkait dengan kondisi awal fisik bangunan sebelum bencana yang memang telah membutuhkan rehabilitasi.

Kenyamanan Proses Belajar Mengajar

Rincian dampak kemanfaatan dari aspek kenyamanan proses belajar mengajar dalam proses belajar mengajar sebelum dan setelah dua tahun tsunami bagi masyarakat dapat terlihat pada tabel berikut :

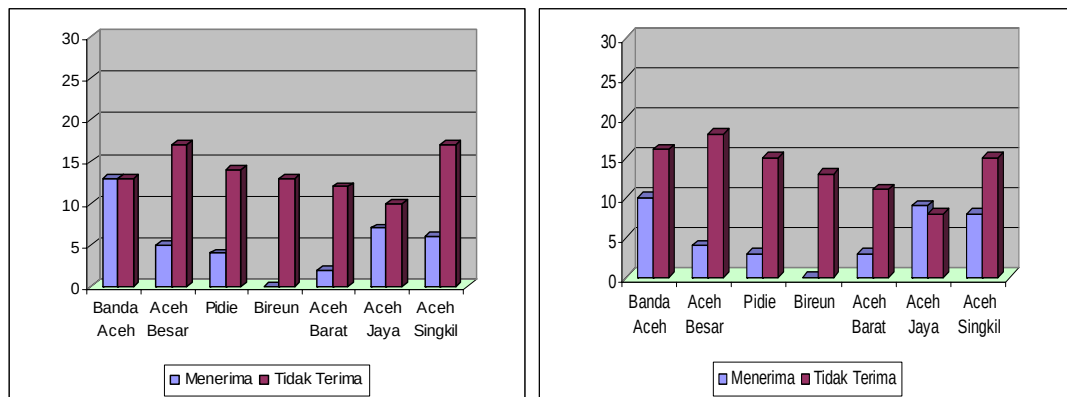
Grafik 4 - 20
Rekapitulasi Kondisi Kenyamanan Proses Belajar Mengajar
Sebelum dan sesudah Dua Tahun Tsunami



Sumber : Analisis P3B-Bappenas

Berdasarkan grafik diatas terlihat secara umum kondisi kenyamanan proses belajar mengajar mengalami penurunan sebesar 25% setelah dua tahun tsunami, kondisi proses belajar mengajar pada kategori kurang nyaman sebelum tsunami mengalami kenaikan sebesar 52% setelah dua tahun tsunami serta pada kategori kondisi proses belajar tidak nyaman sebelum tsunami juga mengalami kenaikan sebesar 800%. Rincian kondisi kenyamanan dari 7 kabupaten/kota yang menjadi sampel dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 4 - 21
Kondisi Kenyamanan Proses Belajar Mengajar
Sebelum dan sesudah Dua Tahun Tsunami



Sumber : Analisis P3B-Bappenas

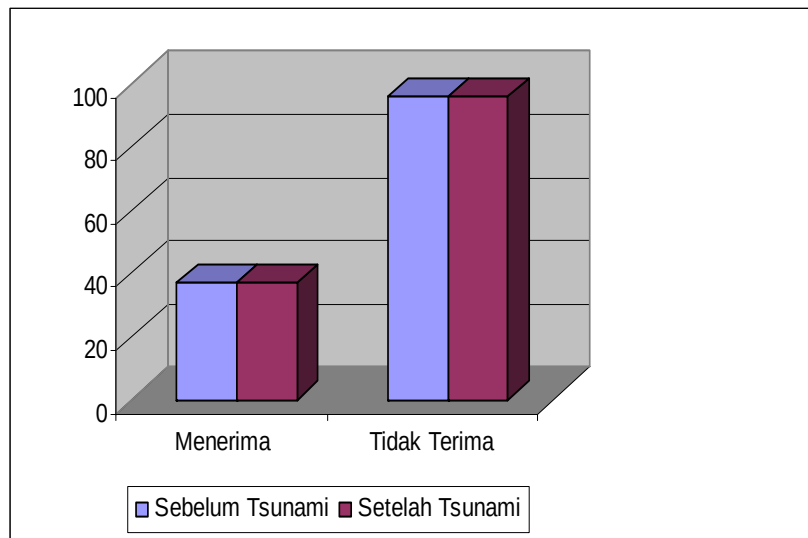
Kabupaten Pidie mengalami penurunan kenyamanan proses belajar mengajar yang cukup signifikan yaitu sebesar 57%. Jika dibandingkan dengan enam (6) kabupaten sampel lainnya, Kabupaten Pidie merupakan lokasi yang paling lama proses penyelesaian konflik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Diperkirakan kondisi ini lah yang melatarbelakangi penurunan kondisi kenyamanan proses belajar mengajar selama pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami.

Kondisi proses belajar mengajar pada kategori tidak nyaman sebelum tsunami, secara keseluruhan menunjukkan peningkatan sebesar 800 % kearah lebih nyaman setelah dua tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi di Kabupaten Aceh Singkil yaitu sebesar 400%. Dibandingkan dengan 6 kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah yang mengalami dampak bencana gempa bumi pada tanggal 28 Maret 2005 pasca bencana tsunami tanggal 26 Desember 2004. Dengan kondisi ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelah dua tahun tsunami sudah dapat dirasakan manfaatnya bagi anak didik dengan kenyamanan dalam belajar.

Penerima Beasiswa Pendidikan

Dampak kemanfaatan dari aspek penerima beasiswa pendidikan sebelum dan setelah dua tahun tsunami bagi masyarakat dapat terlihat pada grafik berikut :

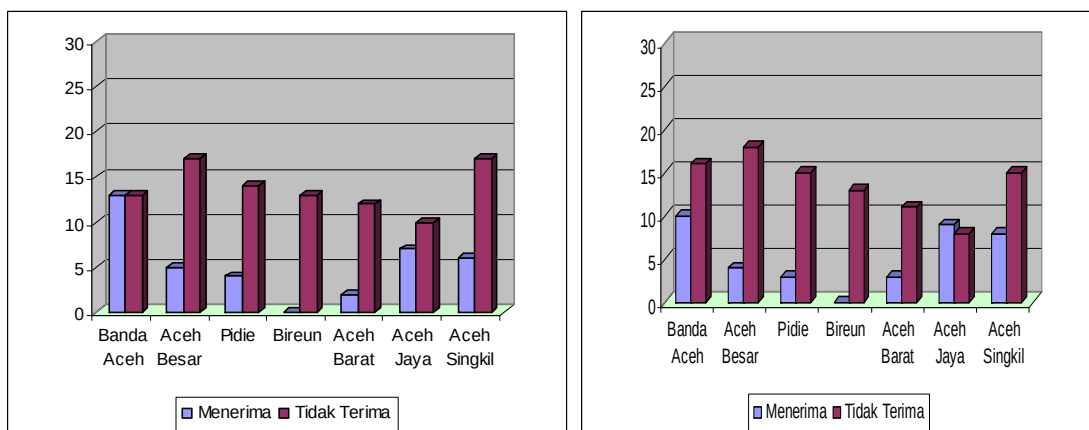
Grafik 4 - 22
Rekapitulasi Penerima Beasiswa
Sebelum dan Sesudah 2Tahun Tsunami



Sumber : Analisis P3B-Bappenas

Berdasarkan grafik diatas terlihat secara umum kondisi penerima beasiswa pada kategori menerima sebelum tsunami dengan setelah dua tahun tsunami mengalami kondisi kesamaan. Rincian kondisi penerima basiswa dari 7 kabupaten/kota yang menjadi sampel dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik IV - 23
Penerima Beasiswa
Sebelum dan Sesudah 2 Tahun Tsunami



Sumber : Analisis P3B-Bappenas

Dari 7 kabupaten/kota yang mejadi sampel survey, terlihat perbandingan yang hampir sama jawaban responden sebelum terjadinya tsunami dengan setelah dua tahun tsunami pada kategori pada kedua kategori pertanyaan yaitu menerima dan tidak menerima. Kabupaten Bireun tidak menerima beasiswa sebelum dan sesudah dua tahun tsunami. Kondisi ini menunjukkan bahwa program pemberian beasiswa dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selama dua tahun, belum dapat dirasakan manfaatnya bagi anak didik yang korban bencana.

Berdasarkan hasil analisis survey dari 3 butir pertanyaan di 7 kabupaten/kota yang menjadi sampel dalam bidang pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada kondisi fisik ruang kelas setelah dua tahun tsunami mengalami penurunan pada kategori baik di lokasi yang paling parah kena bencana tsunami yaitu Kabupaten Aceh Besar dan Banda Aceh. Sedangkan pada kategori kurang baik dan buruk mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik setelah dua tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Pada kondisi proses belajar mengajar pada kategori nyaman sebelum tsunami, mengalami penurunan setelah dua tahun tsunami di wilayah pasca konflik. Sedangkan pada kategori kurang nyaman dan tidak nyaman sebelum tsunami mengalami peningkatan kondisi yang lebih nyaman setelah dua tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
3. Pada kondisi penerima beasiswa pendidikan sebelum tsunami dan sesudah dua tahun tsunami tidak mengalami perubahan.

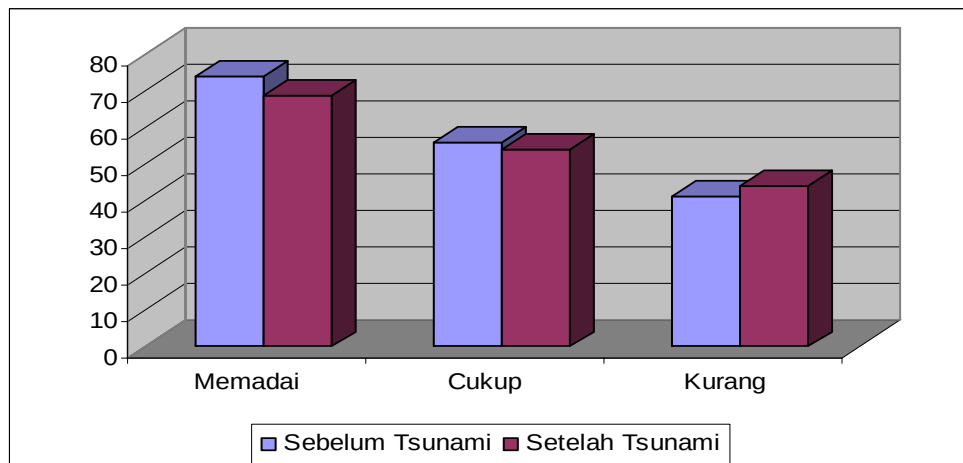
b. Kesehatan

Dalam bidang kesehatan untuk melihat dampak pelaksanaan 2 tahun tsunami dengan mengambil tiga isu utama berdasarkan 3 butir pertanyaan kuisioner yaitu *Ketersediaan tenaga medis, tempat mendapatkan obat-obatan, dan kemampuan membayar biaya pendidikan*

1. Ketersediaan Tenaga Medis

Dampak kemanfaatan dari aspek ketersediaan tenaga medis sebelum dan setelah dua tahun tsunami bagi masyarakat dapat terlihat pada tabel berikut :

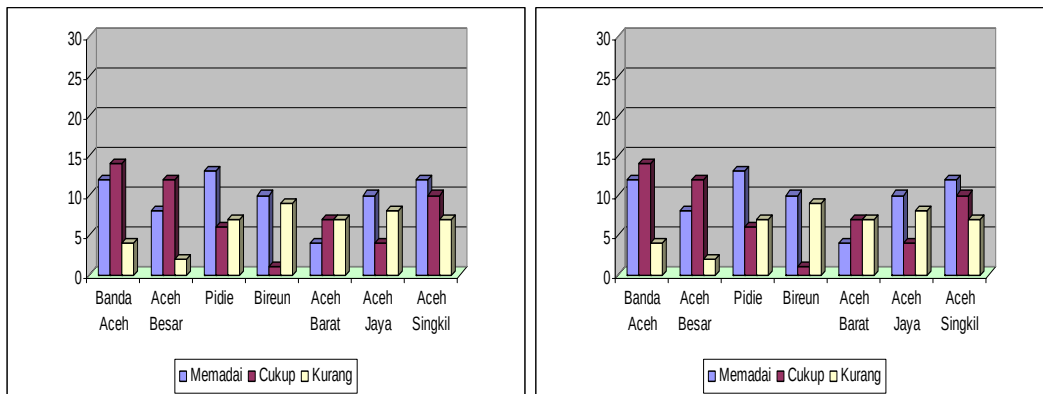
Grafik 4 - 24
Kondisi Ketersediaan Tenaga Medis
Sebelum dan Sesudah 2 Tahun Tsunami



Sumber : Analisis P3B-Bappenas

Berdasarkan grafik diatas terlihat secara umum kondisi ketersediaan tenaga medis pada kategori memadai sebelum tsunami mengalami penurunan sebesar 7% setelah dua tahun tsunami. Pada kategori kondisi ketersediaan tenaga medis juga mengalami penurunan sebesar 4%. Pada kondisi kategori ketersediaan tenaga medis cukup, mengalami kenaikan sebesar 7%. Rincian kondisi ketersediaan tenaga medis dari 7 kabupaten/kota yang menjadi sampel dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 4 - 25
Kondisi Ketersediaan Tenaga Medis
Sebelum dan Sesudah 2 Tahun Tsunami



Sumber : Analisis P3B-Bappenas

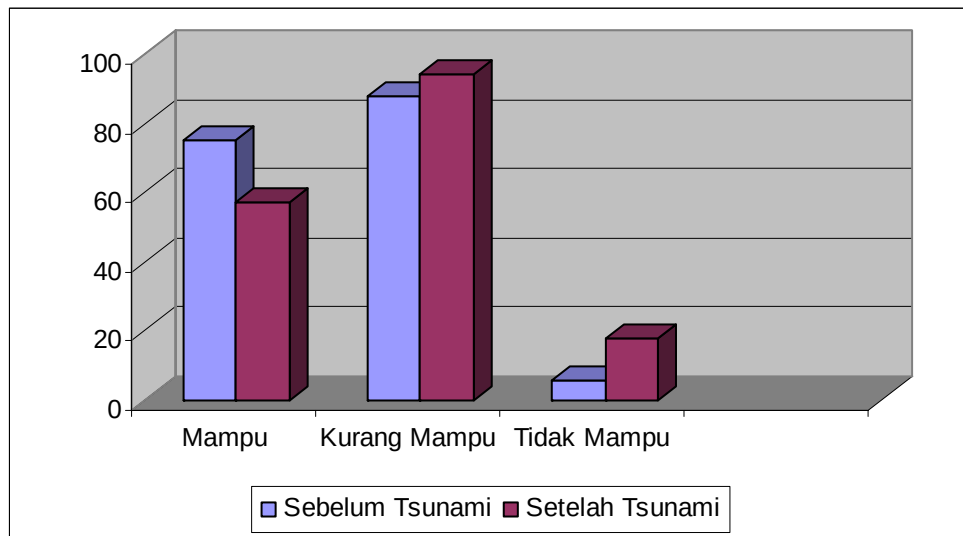
Pada kategori ketersediaan tenaga medis memadai, Kabupaten Aceh Besar mengalami kondisi penurunan yang cukup signifikan sebesar 56% yang kemudian juga diikuti oleh kabupaten Bireun, Aceh Barat dan Aceh Jaya. Namun Kota Banda Aceh mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 100% jika dibandingkan sebelum tsunami dengan dua tahun setelah tsunami. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah dua tahun tsunami khusus pada aspek ketersediaan tenaga medis belum dirasakan manfaatnya secara maksimal bagi masyarakat di lokasi yang tidak mengalami kerusakan bencana yang begitu parah dan sebaliknya dapat dirasakan manfaatnya dengan baik di lokasi yang mengalami dampak bencana di lokasi yang paling parah.

Pada kategori ketersediaan tenaga medis yang kurang menunjukkan peningkatan setelah dua tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi di Kota Banda Aceh sebesar 300% yang kemudian diikuti oleh kabupaten Bireun dan Aceh Jaya. Sedangkan Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Singkil mengalami kondisi yang sama antara sebelum tsunami dan sesudah tsunami.

Kemampuan Membayar Biaya Pengobatan

Dampak kemanfaatan dari aspek kemampuan membayar biaya pengobatan sebelum dan setelah dua tahun tsunami bagi masyarakat dapat terlihat pada grafik berikut:

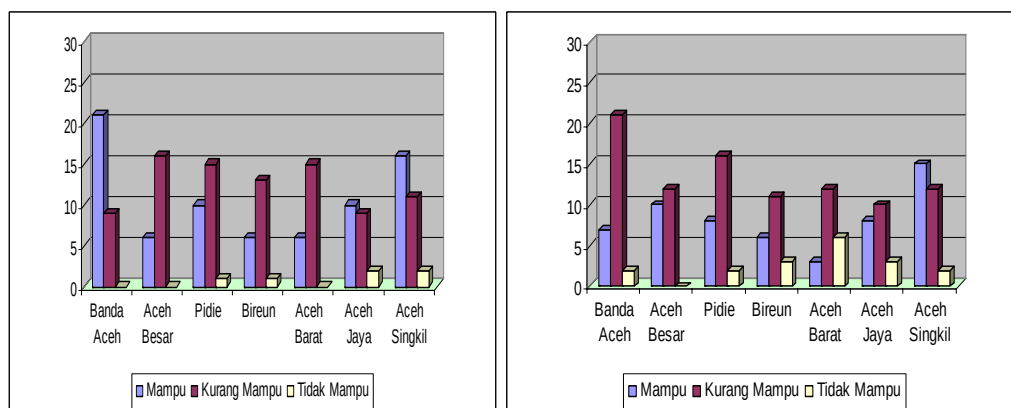
Grafik 4 - 26
Rekapitulasi Kondisi Kemampuan Masyarakat Membayar Biaya Pengobatan Sebelum dan Sesudah 2 Tahun Tsunami



Sumber : Analisis P3B-Bappenas

Berdasarkan grafik diatas terlihat secara umum kondisi kemampuan masyarakat membayar biaya pengobatan pada kategori mampu menunjukkan penurunan setelah dua tahun tsunami sebesar 24%. Pada kategori tidak mampu mengalami peningkatan kearah yang lebih mampu sebesar 7% serta pada kategori tidak mampu mengalami peningkatan sebesar 200%. Rincian kondisi kemampuan masyarakat membayar biaya pengobatan dari 7 kabupaten/kota yang menjadi sampel dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4 - 27
Kondisi Kemampuan Membayar Biaya Pengobatan Sebelum dan sesudah 2 Tahun



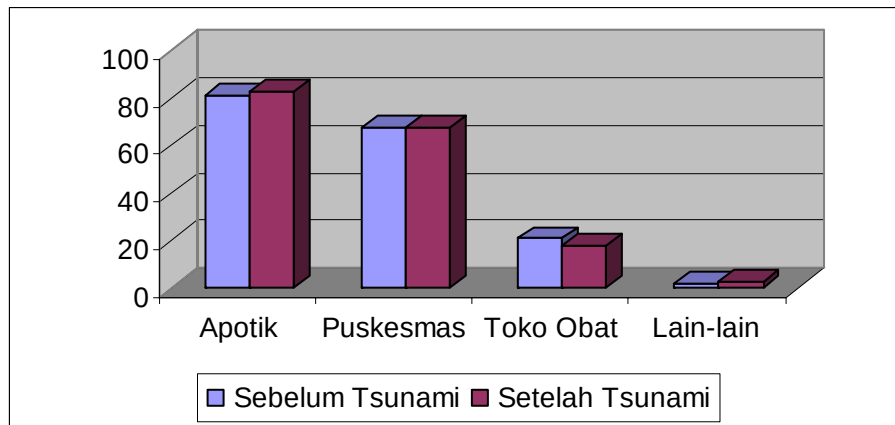
Sumber : Analisis P3B-Bappenas

Kota Banda Aceh mengalami kondisi penurunan yang cukup signifikan sebesar 67%% yang kemudian juga diikuti oleh kabupaten Pidie, Aceh Barat, Aceh Jaya dan Aceh Singkil. Sedangkan Kabupaten Bireun mengalami kondisi yang sama antara sebelum tsunami dengan sesudah dua tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 67% jika dibandingkan sebelum tsunami dengan dua tahun setelah tsunami.

Tempat Mendapatkan Pengobatan

Dampak kemanfaatan dari aspek kemampuan membayar biaya pengobatan sebelum dan setelah dua tahun tsunami bagi masyarakat dapat terlihat pada grafik berikut :

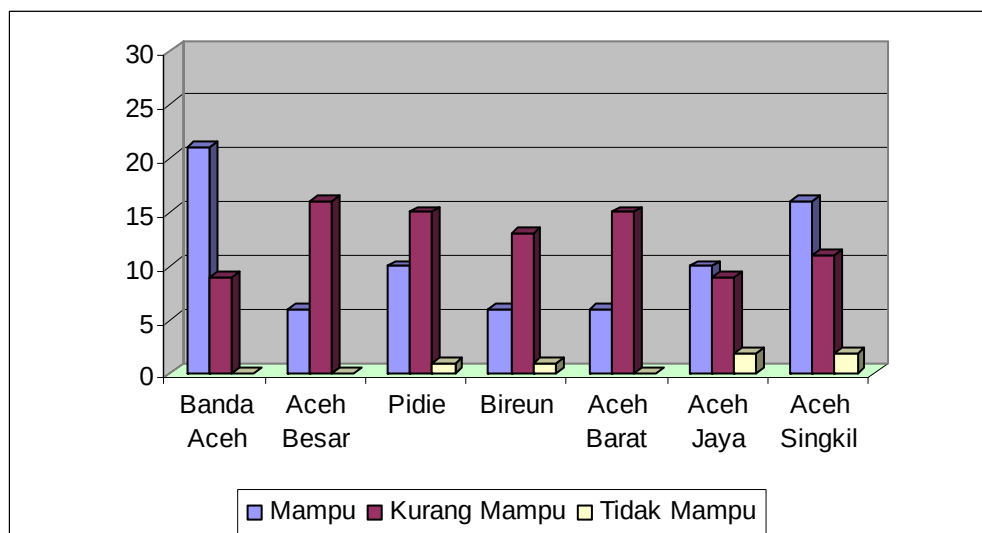
Grafik 4 - 28
Rekapitulasi Tempat Mendapatkan Pengobatan Masyarakat
Sebelum dan Sesudah 2 Tahun Tsunami



Sumber : Analisis P3B-Bappenas

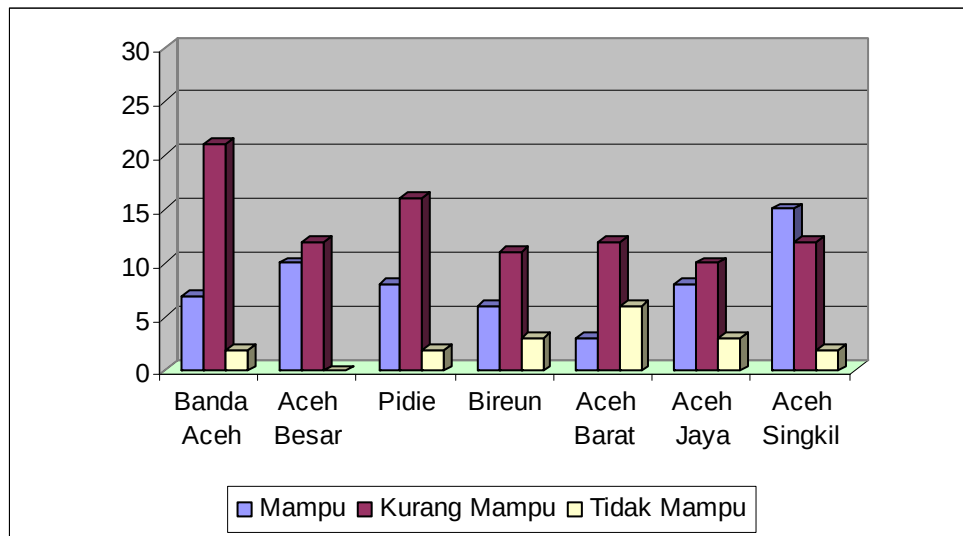
Berdasarkan grafik diatas terlihat secara umum tempat pengobatan di Apotik mengalami peningkatan sebesar 6%. Pemilihan tempat beli obat di toko obat mengalami penurunan sebesar kemampuan masyarakat membayar biaya pengobatan pada kategori mampu menunjukkan penurunan setelah dua tahun tsunami sebesar 24%. Rincian kondisi kemampuan masyarakat membayar biaya pengobatan dari 7 kabupaten/kota yang menjadi sampel dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4 - 29
Kondisi Pengobatan Sebelum Tsunami



Sumber : Analisis P3B-Bappenas

Grafik 4 - 30
Kondisi Pengobatan Setelah 2 Tahun Tsunami



Sumber : Analisis P3B-Bappenas

4.1.4.4. Bidang Pemulihan Ekonomi

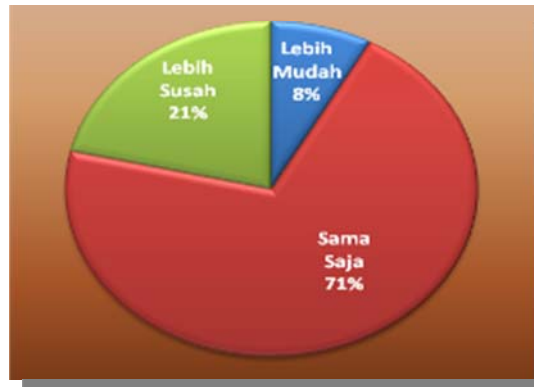
Dalam melihat manfaat rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya bidang pemulihan perekonomian terhadap sasaran yang dicantumkan dalam rencana induk, dilakukan Tinjauan/survey terhadap masyarakat korban bencana (penerima manfaat). Tinjauan/survey dilaksanakan untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi, dengan menekankan pada 3 pertanyaan, yaitu: (1) Kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan, (2) Ketersediaan Pasokan kebutuhan pokok, dan (3) Tingkat harga kebutuhan pokok.

Survey dilaksanakan terhadap 170 sample responden dari berbagai kalangan seperti petani, nelayan, pelayan restoran, pegawai hotel, pedagang, buruh bangunan dan termasuk pegawai (pemda) baik laki-laki maupun perempuan di tujuh Kabupaten/Kota (Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireun, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Singkil).

(1) Kemudahan Dalam Mendapatkan Pekerjaan

Hasil survei terhadap kondisi masyarakat dalam Mendapatkan Pekerjaan setelah dua tahun peristiwa Tsunami menunjukkan sebanyak 21 persen responden merasa semakin sulit mendapatkan pekerjaan/penghidupan, 70 persen merasa sama saja, dan hanya sebesar 8 merasa lebih mudah.

Grafik 4 - 31
Hasil Survey Kemudahan Dalam Mendapatkan Pekerjaan
Prov. NAD dan Kepulauan Nias Prov.Sumatera Utara



Sumber : Survery lapangan Tim P3B Bappenas, November 2007

Untuk masing-masing kab/kota di Provinsi NAD, pada kota Banda Aceh 13 responden merasa lebih susah mendapatkan pekerjaan/penghidupan, 53 persen merasa sama saja dan hanya 13 persen merasa lebih mudah. Di Kab.Aceh Besar 96 persen merasa sama saja dan 4 persen merasa lebih mudah. Di Kab.Pidie 13 persen merasa lebih sukar, 83 persen sama saja dan 4 persen lebih mudah. Di Kab.Bireun 5 persen merasa lebih susah dan 95 persen sama saja. Di Aceh Barat 42 persen merasa lebih susah, 53 persen sama saja, dan 5 persen merasa lebih mudah. Di Kab.Aceh Jaya 20 persen merasa lebih susah, 70 persen merasa sama saja, dan 10 persen merasa lebih mudah. Pada Kab.Aceh Singkil 33 persen responden merasa lebih susah, 52 persen sama saja dan 15 persen lebih mudah.

Grafik 4 - 32
Hasil Survey Kemudahan Dalam Mendapatkan Pekerjaan
Per Kab/Kota



Sumber : Survery lapangan Tim P3B Bappenas, November 2007

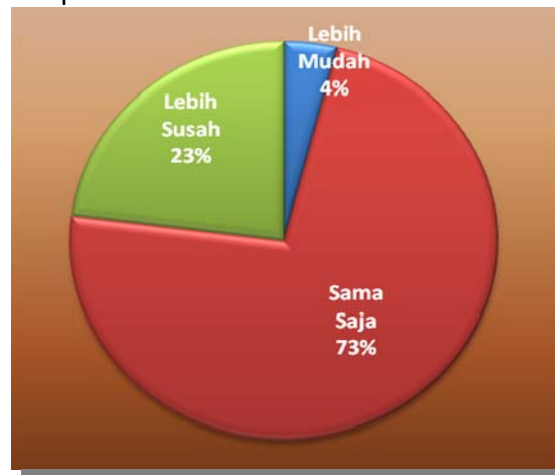
Memperhatikan hasil survey terlihat bahwa sebagian besar masyarakat merasa masih dan semakin susah mendapat pekerjaan/penghidupan. Hal ini perlu dicermati terutama

pada Kab.Aceh Barat, Singkil dan Banda Aceh dengan persentase responden yang merasa lebih susah mencapai hampir 40 persen. Hal ini perlu diperhatikan semua pihak karena salah satu tujuan utama dari Rencana Induk bidang pemulihan perekonomian adalah pemulihan mata pencaharian/penghidupan walaupun tidak menutup kemungkinan parahnya kondisi ketenagakerjaan disebabkan pengangguran yang sudah tinggi sebelum bencana dan begitu parahnya dampak bencana yang ditimbulkan.

(2) Ketersediaan Pasokan Kebutuhan Pokok

Hasil survei terhadap Ketersediaan Pasokan Bahan pokok pasca dua tahun peristiwa Tsunami menunjukkan sebanyak 23 persen responden merasa semakin sulit mendapatkan bahan kebutuhan pokok, 73 persen merasa sama saja, dan hanya 4 persen merasa lebih mudah.

Grafik 4 - 33
Hasil Survey Kondisi Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok Dua Tahun Pasca Tsunami Prov. NAD dan Kepulauan Nias Prov.Sumatera Utara



Sumber : Survery lapangan Tim P3B Bappenas,
November 2007

Untuk masing-masing kab/kota di Provinsi NAD, pada kota Banda Aceh 43 persen responden merasa lebih susah mendapatkan Bahan kebutuhan Pokok, 53 persen merasa sama saja dan hanya 3 persen merasa lebih mudah. Di Kab.Aceh Besar 39 persen merasa lebih susah dan 61 persen sama saja. Di Kab.Pidie 11 persen merasa lebih susah dan 89 persen sudah merasa sama seperti sebelum tsunami. Di Kab.Bireun 95 persen merasa sama saja dan 5 persen merasa lebih mudah. Di Aceh Barat 19 persen merasa lebih susah, 71 persen sama saja, dan 10 persen merasa lebih mudah. Di Kab.Aceh Jaya 23 persen merasa lebih susah dan 77 persen merasa sama saja. Pada Kab.Aceh Singkil 20 persen responden merasa lebih susah, 70 persen sama saja dan 10 persen lebih mudah.

Grafik 4 – 34
 Hasil Survey Kondisi Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok Dua Tahun Pasca Tsunami
 Per Kab/Kota



Sumber : Survery lapangan Tim P3B Bappenas, November 2007

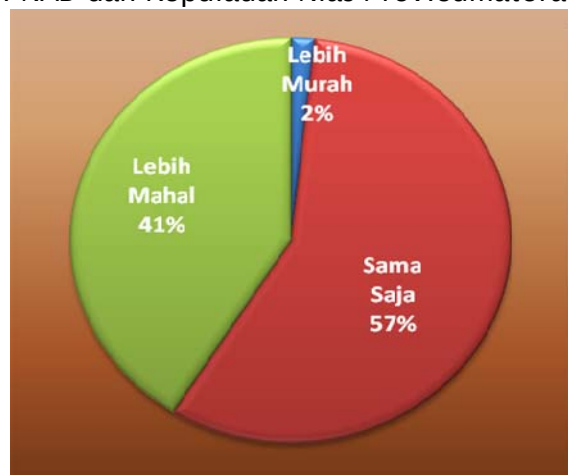
Memperhatikan hasil survey terlihat bahwa sebagian besar masyarakat merasa kondisi ketersediaan kebutuhan pokok sudah sama (puluh) seperti keadaan sebelum bencana. Namun perlu diperhatikan terutama pada Kota Banda Aceh dan Kab.Aceh Besar dimana persentase responden yang merasa ketersediaan kebutuhan semakin tersendat mencapai hampir 40 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian dinas perdagangan dan SKPD terkait, terutama terkait distribusi dan tata niaga sembako yang merupakan salah satu sasaran dalam rencana induk.

(3) Tingkat Harga Kebutuhan Pokok

Hasil survei terhadap Ketersediaan Pasokan Bahan pokok pasca dua tahun peristiwa Tsunami menunjukkan sebanyak 2 persen masyarakat merasa harga kebutuhan pokok lebih murah dibandingkan kondisi sebelum tsunami, 57 persen merasa sama saja, dan sebanyak 41 persen responden merasa semakin mahal. Hasil survey ini disebar ke berbagai kalangan masyarakat seperti petani, nelayan, pelayan restoran, pegawai hotel, pedagang, buruh bangunan dan termasuk pegawai (pemda) baik laki-laki maupun perempuan.

Survey dilaksanakan terhadap 170 sample responden dari berbagai kalangan seperti petani, nelayan, pelayan restoran, pegawai hotel, pedagang, buruh bangunan dan termasuk pegawai (pemda) baik laki-laki maupun perempuan di tujuh Kabupaten/Kota (Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireun, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Singkil).

Grafik 4 – 35
Hasil Survey Kondisi Harga Kebutuhan Pokok Dua Tahun Pasca Tsunami
Prov. NAD dan Kepulauan Nias Prov.Sumatera Utara



Sumber : Survery lapangan Tim P3B Bappenas, November 2007

Untuk masing-masing kab/kota di Provinsi NAD, pada kota Banda Aceh 30 persen merasa sama saja dan hanya 70 persen merasa lebih mahal. Di Kab.Aceh Besar 61 persen sama saja dan 35 persen merasa lebih mahal. Di Kab.Pidie 70 persen merasa sama saja dan 30 persen merasa lebih mahal. Di Kab.Bireun 95 persen merasa sama saja dan 5 persen merasa lebih mahal. Di Aceh Barat 48 persen sama saja, dan 52 persen merasa lebih mahal. Di Kab.Aceh Jaya 57 persen merasa sama saja dan 38 persen merasa lebih mahal. Pada Kab.Aceh Singkil 50 persen sama saja dan 10 persen lebih mahal. Memperhatikan hasil survey terlihat bahwa 41 persen masyarakat korban bencana merasa harga yang ada saat ini jauh lebih mahal dibandingkan keadaan sebelum bencana.

Grafik 4 – 36
Hasil Survey Kondisi Harga Kebutuhan Pokok Dua Tahun Pasca Tsunami
Per Kab/Kota



Sumber : Survery lapangan Tim P3B Bappenas, November 2007

4.1.4.5. Bidang Kelembagaan dan Hukum

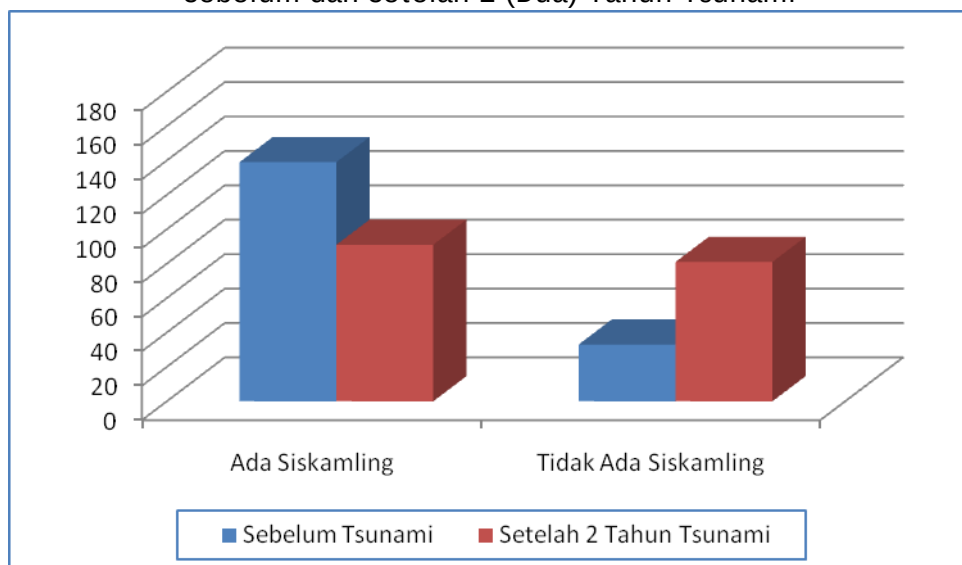
Kuesioner yang tersebar di 7 lokasi yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireun, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Singkil adalah 180 kuesioner. Pertanyaan yang terkait dengan bidang kelembagaan, hukum, dan K3M yang kemudian dianalisis lebih lanjut diantaranya adalah 1) pelaksanaan siskamling, 2) pelayanan Kantor Desa/Lurah dan 3) fungsi balee musyawarah. Sebagian masyarakat korban bencana diantaranya telah mulai merasakan dan menerima hasil pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan dan hukum. Penilaian masyarakat tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Menurunnya Frekuensi Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)

Salah satu aktivitas masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan yaitu dengan membentuk siskamling di desanya melalui keberadaan pos ronda. Berdasarkan ketentuan buku petunjuk Siskamling, setiap wilayah RT (Rukun Tetangga), minimal harus memiliki gardu ronda, bahkan idealnya setiap wilayah RT mempunyai dua buah pos ronda.

Secara keseluruhan, pelaksanaan siskamling sebelum dan setelah 2 tahun tsunami menunjukkan penurunan sebesar 34.53 persen dan tidak adanya pelaksanaan siskamling mengalami peningkatan 145.45 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan siskamling belum pulih dan belum memberikan manfaat untuk masyarakat. Penyebabnya adalah sebelum tsunami situasi keamanan di Provinsi NAD belum berjalan dengan baik terutama pada masa Darurat militer (2003-2004). Namun setelah adanya MOU Helsinki yang lalu, situasi keamanan di Aceh mulai membaik. Selain itu dikarenakan belum adanya kesadaran dari masyarakat Aceh untuk menggiatkan kembali siskamling pasca bencana tsunami dan MOU Helsinki, karena program-program BRR belum sinergis dengan upaya-upaya membangun sistem keamanan lingkungan.

Grafik 4 - 37
Rekapitulasi Pelaksanaan Siskamling
Sebelum dan Setelah 2 (Dua) Tahun Tsunami



Sumber : Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2007.

Semua lokasi mengalami penurunan pelaksanaan siskamling berdasarkan urutan adalah Kota Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Aceh Singkil, Aceh Jaya dan Bireun. Rincian tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 4 - 238
Pelaksanaan Siskamling Sebelum dan Setelah 2 (Dua) Tahun Tsunami

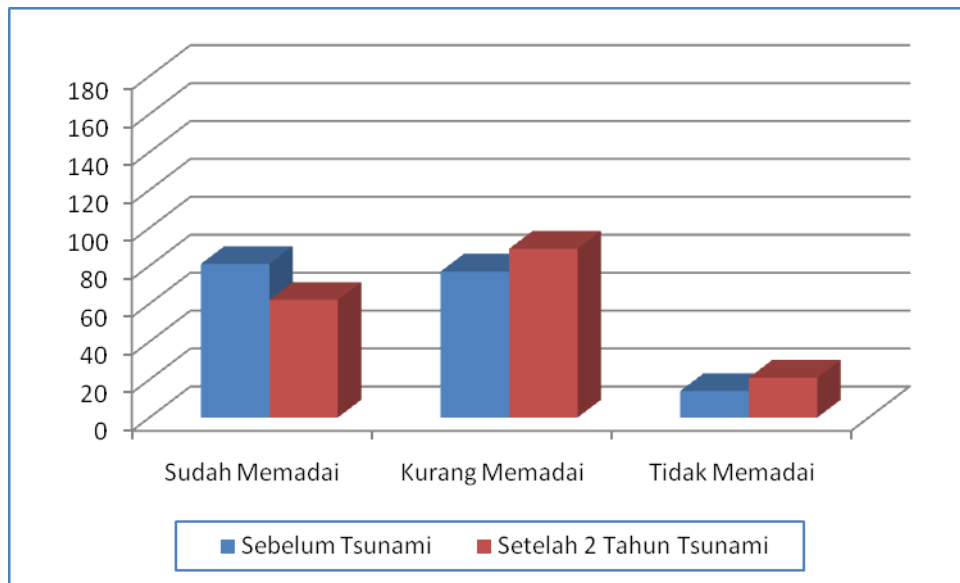


Sumber : Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2007.

2. Menurunnya Tingkat Pelayanan Kantor Desa/Lurah

Secara keseluruhan, mayoritas responden menyatakan tingkat pelayanan terhadap masyarakat di Kantor Desa/Lurah setelah dua tahun tsunami berlalu menunjukkan bahwa pelayanan kantor desa/lurah belum pulih dan belum merata pemanfaatannya di semua kabupaten/kota. Hal ini terlihat dari kualitas sudah memadai mengalami penurunan sebesar 23,46 persen kemudian pelayanan kurang memadai dan tidak memadai mengalami peningkatan masing-masing sebesar 15,58 persen dan 50 persen.

Grafik 4 - 339
Rekapitulasi Pelayanan Kantor Desa/Lurah Sebelum dan Setelah 2 (Dua) Tahun Tsunami

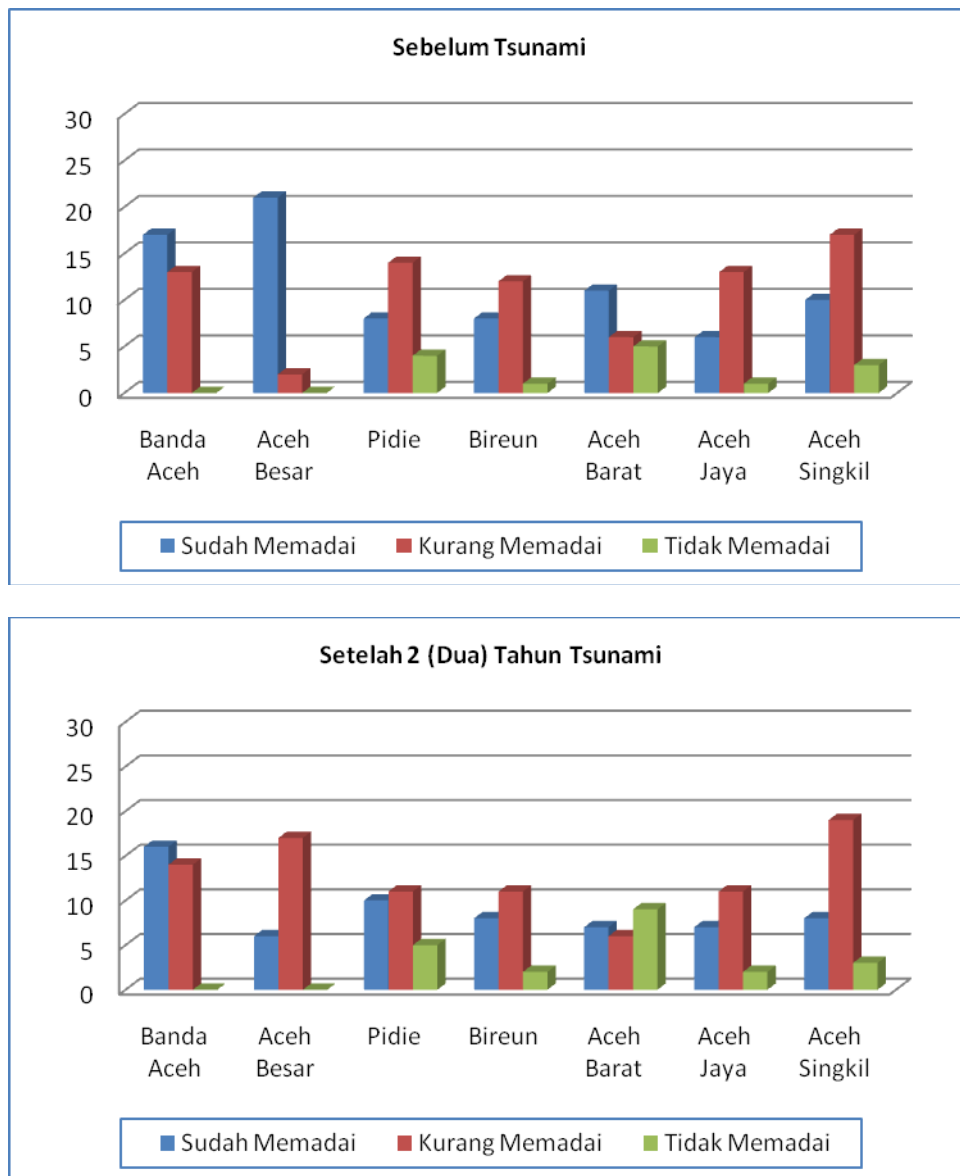


Sumber : Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2007.

Jika dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota, pelayanan kantor desa/lurah yang mengalami perubahan setelah 2 tahun tsunami yang sangat signifikan yaitu Kabupaten Aceh Besar, dimana pelayanan sudah memadai mengalami penurunan sebesar 71,43 persen. Hal ini mengindikasikan kondisi setelah tsunami untuk pelayanan kantor desa/lurah menjadi lebih buruk atau dapat dikatakan belum pulih. Hal ini juga didukung bahwa ketika tsunami kantor desa/rusak di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 103 unit, dan hingga November 2007 diketahui 17 unit kantor desa yang baru dibangun oleh BRR. Selain itu di Kabupaten Aceh Barat juga mengalami penurunan sebesar 36,36 persen, dan berdasarkan laporan BRR diketahui bahwa kantor desa/lurah yang rusak sebanyak 36 unit dan hingga November ini belum ada yang terbangun. Selain bangunan kantor desa/lurah yang belum pulih, juga disebabkan aparat yang terkait di kantor desa/lurah belum ada.

Lain halnya yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya dan Pidie, setelah 2 tahun tsunami, pelayanan kantor desa/lurah di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Jaya mengalami peningkatan kualitas sudah memadai masing-masing sebanyak 25 persen dan 16,67 persen. Hal ini dikarenakan pembangunan kantor desa/lurah di kedua kantor tersebut sudah mencapai 50 persen dari target perencanaan rencana induk, di Kabupaten Pidie sudah terbangun 14 unit dari 32 target rencana induk dan di Kabupaten Aceh Jaya sudah terbangun 37 unit dari 74 unit yang direncanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi sudah memberikan manfaat pada pembangunan kantor desa/lurah.

Grafik 4 - 440
Pelayanan Kantor Desa/Lurah Sebelum dan Setelah 2 (Dua) Tahun Tsunami

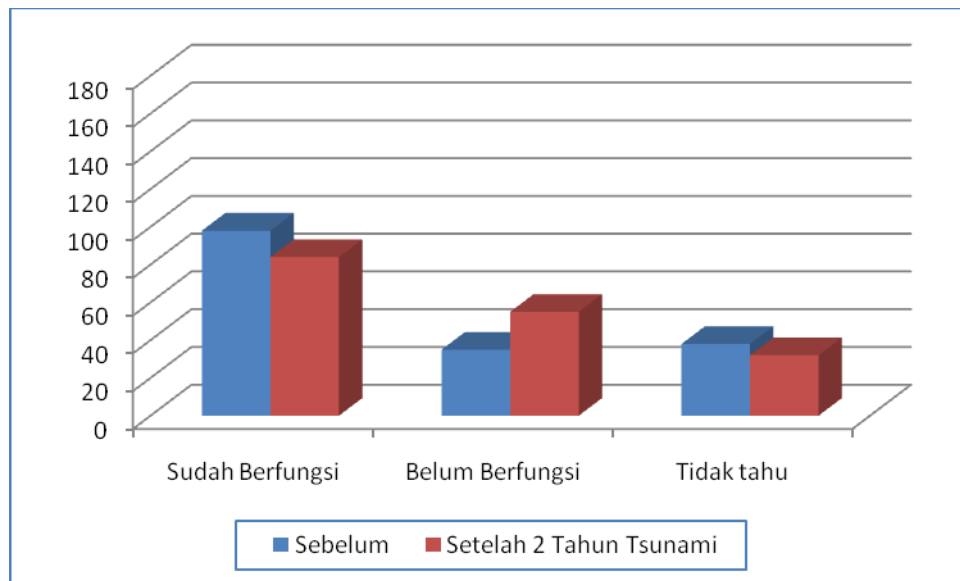


Sumber : Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2007.

3. Menurunnya Penggunaan Balee musyawarah

Balee musyawarah yang terdapat di Provinsi NAD merupakan sebuah tempat berkumpulnya (meusapat) masyarakat untuk belajar, musyawarah mencari solusi penyelesaian suatu masalah, juga melahirkan berbagai program untuk kemajuan daerah. Mayoritas responden menyatakan fungsi bale musyawarah setelah dua tahun tsunami menunjukkan bahwa balee musyawarah belum berfungsi secara maksimal atau dapat dikatakan belum pulih. Hal ini terlihat dari balee musyawarah yang sudah berfungsi mengalami penurunan sebesar 14,29 persen balee musyawarah yang belum berfungsi meningkat 57,14 persen, dan responden yang tidak tahu menurun sebesar 15,79 persen.

Grafik 4 - 541
Rekapitulasi Fungsi Bale Musyawarah
Sebelum dan Setelah 2 (Dua) Tahun Tsunami



Sumber : Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2007.

Jika dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota, fungsi balee musyawarah yang mengalami perubahan sangat signifikan yaitu di Kabupaten Aceh Besar, dimana fungsi balee musyawarah mengalami penurunan 65 persen. Perubahan ke kondisi yang lebih buruk juga terjadi di Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireun, dan Kabupaten Aceh Singkil. Hal ini dikarenakan karena bangunan balee musyawarah belum mencukupi, dimana hingga November 2007 baru terbangun 12 unit balee/kantor mukim di Kabupaten Aceh Besar, 10 unit di Banda Aceh, 30 unit di Kabupaten Pidie, 9 unit di Kabupaten Bireun, dan Kabupaten Aceh Singkil belum terbangun.

Lain halnya yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya, setelah tsunami fungsi balee musyawarah di lingkungan sekitar menjadi lebih baik, hal ini mungkin dikarenakan balee musyawarah yang ada sudah mencukupi yaitu hingga November 2007 sudah terbangun 10 unit di Aceh Barat dan 12 unit di Aceh Jaya, dan warga setempat aktif untuk bermusyawarah. Rincian jawaban responden berdasarkan Kabupaten/Kota terpilih dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 4 - 642
Fungsi bale musyawarah Sebelum dan Setelah 2 (Dua) Tahun Tsunami



Sumber : Hasil Analisis Tim P3B-Bappenas, 2007.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat telah mulai merasakan dan menerima manfaat dari hasil pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya pada bidang kelembagaan, hukum, dan K3M. Sebagai contoh, sebagian pelayanan kantor desa/lurah sudah memberikan manfaat dimana pelayanannya mengalami peningkatan di Kabupaten Aceh Jaya dan Pidie. Kemudian penggunaan balee musyawarah di Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya sudah bermanfaat bagi masyarakat. Namun untuk pelaksanaan siskamling mengalami penurunan di semua lokasi atau dapat dikatakan belum dapat memberikan manfaat yang signifikan untuk masyarakat NAD dan Nias.

4.1.5. Bidang Multi Sektor

Konsistensi antar pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi pada proyek multi sektor dalam pelaksanaan terlihat dari pembagian tugas dan peran masing-masing stakeholder. Bapel RR telah menerbitkan pedoman-pedoman yang berhubungan dengan perencanaan

bangunan. Disamping itu BRR juga membentuk perwakilan/regional, yang mewakili beberapa kabupaten untuk satu regional dalam rangka menggalang koordinasi dengan berbagai donor/NGO yang berperan di tingkat kabupaten/kota.

Namun kecenderungan kompetisi antar pelaksana proyek multi sektor dan single sektor tidak terlihat secara spesifik. Keduanya saling melengkapi, seperti lembaga MDF melalui program RE-KOMPAK yang berada di bawah proyek pemulihan komunitas melaksanakan pembangunan perumahan rakyat di kabupaten Bireun, sedangkan lembaga AusAID juga membangun perumahan yang berada di bagian barat Provinsi NAD. Namun antara kedua lembaga tersebut terdapat beberapa, seperti pada lembaga MDF yang bekerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum menerbitkan pedoman operasional umum, pedoman pelaksanaan, hingga pada pedoman operasional teknis, sedangkan lembaga AusAID pembangunan permukiman dengan memperhatikan perencanaan desa yang di rancang terintegrasi dengan infrastruktur pemerintahan. Sehingga ini lebih terlihat kepada kecenderungan kompetensi yang positif antar proyek multi sektor.

4.2 ASPEK KOORDINASI

4.2.1 Mekanisme Koordinasi dalam Penyusunan Perencanaan

4.2.1.1. Bidang Perumahan dan Permukiman

Koordinasi dalam perencanaan pada bidang perumahan dan permukiman, tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup melibatkan; Kementerian/Lembaga (terutama Dept. PU, Badan Pertanahan Nasional), pemerintah daerah provinsi dan kab/kota, lembaga donor, dan masyarakat. Kegiatan koordinasi perencanaan yang telah dilakukan antara lain; konsultasi publik, lokakarya, rapat triwulan, rapat sekretariat bersama (sekber), konsinyering, musrenbangda, musyawarah desa, dan lain lain.

Penjelasan mengenai koordinasi dalam penyusunan perencanaan khusus dalam bidang perumahan dan permukiman dilakukan melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh Tim P3B-Bappenas pada kunjungan lapangan ke beberapa Kota/Kab di Provinsi NAD pada bulan September dan November 2007. Wawancara dilakukan kepada Dinas Kimpraswil dan Bappeda. Secara umum, penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang perumahan dan permukiman antara Pemda, BRR, dan Donor/NGO telah berjalan dengan baik. Penjelasan lebih rinci di beberapa Kab/Kota dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4 - 63
Koordinasi dalam Penyusunan Perencanaan
Bidang Pemulihan Perumahan dan Permukiman di Beberapa Kab/Kota

1.	Aceh Barat	▪ Dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan antara Pemda, BRR dan Donor/NGO secara umum telah berjalan dengan baik melalui sekber. ▪ Permasalahan koordinasi yang dominan adalah pada koordinasi revisi perencanaan kegiatan yang harus dilakukan melalui kantor pusat, dan koordinasi akses ke Simeuleu kurang baik sehingga mempengaruhi pemerataan kelancaraan kegiatan. ▪ Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan diatas adalah dengan memaksimalkan sekretariat bersama.
2.	Aceh Jaya	Dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan antara Pemda, BRR dan Donor/NGO secara umum telah berjalan dengan baik.

3.	Aceh Singkil	Perencanaan yang dilakukan pada Distrik Singkil telah dikoordinasikan dengan seluruh Stakeholder yang ada di Kab.Singkil baik itu masyarakat, Donor/NGO dan Pemerintah Daerah.
4.	Bireun	Dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan sudah berjalan dengan baik, namun kurang berlanjut hingga pada pelaksanaan
5.	Pidie	- Program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi telah sesuai dengan yang tertera pada Rencana Induk. Bahkan telah melebihi dari kebutuhan utama yang harus direhabilitasi dan direkonstruksi terutama dalam bidang perumahan. - Pembangunan perumahan telah menyesuaikan prioritas RKP tentang penanganan bencana, hal ini telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Donor/NGO yang melakukan pembangunan. - Dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan antara Pemda, BRR dan Donor/NGO secara umum telah berjalan dengan baik

Sumber: Laporan Kunjungan Lapangan Tim P3B-BAPPENAS, 2007

Untuk bidang tata ruang, Pemda dan donor/NGO pada dasarnya memiliki peran tersendiri dalam perencanaan tata ruang di NAD-Nias. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemda menjalankan kewajiban dalam penyusunan maupun revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab/Kota dan Provinsi. Sementara donor/NGO sebagian besar berkecimpung pada penyusunan perencanaan desa (village mapping). Perencanaan yang telah disusun oleh donor/NGO sebelum diimplementasikan lebih lanjut, dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Pemda terkait, sehingga Pemda dapat mengetahui desa-desa mana saja yang tengah melaksanakan village mapping, dan pada selanjutnya pada penyusunan rencana tata ruang yang lebih makro, hal ini dipandang sebagai unit terkecil.

Untuk bidang pertanahan, penerbitan sertifikat dilakukan oleh BPN. Adapun penetapan lokasi kegiatan sertifikasi tanah disesuaikan dengan lokasi pembangunan fisik terutama perumahan, yang dikoordinasikan oleh Bapel RR.

Untuk bidang lingkungan hidup, di mana sebagian besar program dan kegiatan dilaksanakan oleh donor/NGO, maka koordinasi dalam perencanaan antara Pemda, BRR, dan donor/NGO dilakukan pada saat perencanaan suatu kegiatan disosialisasikan antar stakeholders tersebut. BRR yang banyak mengeluarkan pedoman-pedoman terkait pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, dapat menelaah lebih lanjut apakah program dan kegiatan yang telah disusun, sejalan dengan pedoman yang telah diterbitkan. Sementara bagi Pemda, di mana dalam hal ini juga memiliki agenda terkait lingkungan hidup seperti yang terdapat dalam APBD, dapat menginventarisasi kegiatan-kegiatan terkait, yang pada akhirnya akan dilanjutkan, mengingat pemeliharaan lingkungan hidup adalah proses yang berkesinambungan.

4.2.1.2. Bidang Infrastruktur

Upaya mempercepat pembangunan kembali infrastruktur di Aceh dan Nias membutuhkan koordinasi dan sinergisitas yang tinggi antar lembaga atau stakeholder dibawah tanggung jawab BRR. Koordinasi perencanaan dalam bidang infrastruktur melibatkan; Kementerian/Lembaga (terutama Dept. PU dan Dept. Perhubungan), pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), lembaga Donor/NGO dan masyarakat. Kegiatan koordinasi perencanaan yang telah dilakukan antara lain; CFAN, NISM, konsultasi publik, lokakarya, rapat triwulan, rapat sekretariat bersama, konsinyering, musrenbangda, musyawarah desa, dan lain lain.

Koordinasi perencanaan di wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi masih kurang berjalan baik, terutama di daerah kepulauan seperti Nias dan Simelue. Hal ini mengindikasikan bahwa masih kurangnya koordinasi antar instansi/lembaga dan perencanaan yang belum sempurna serta tidak memperhatikan kondisi daerah. Peran

Rekomendasi Hasil CFAN III untuk Infrastruktur,
(April 2007)

- Adanya kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur di Simelue dan Nias
- Kesenjangan masih dirasakan dalam pendanaan infrastruktur di donor
- Kualitas pekerjaan konstruksi masih bermasalah tapi BRR sedang melakukan tindakan melalui penerapan spesifikasi yang lebih tegas.
- Konsentrasi terhadap lemahnya kualitas perencanaan sehingga hasil pekerjaan tidak dapat digunakan. Tapi IREP dan PDCS mendukung untuk mengatasi hal tersebut.
- Isu terhadap peningkatan keterlambatan pekerjaan/proyek karena ketidaksetujuan beberapa pemerintah daerah atau kurangnya perhatian terhadap lingkungan
- Isu terhadap keadilan pemberian bantuan antara pascabencana tsunami dan pascakonflik telah didiskusikan. BRR telah mulai memberikan bantuan terhadap beberapa permintaan dari pemerintah daerah.
- Kebijakan BRR untuk memberikan bantuan terhadap banjir tahun lalu, diluar tanggungjawab BRR
- IRFF akan menyediakan strategi pendanaan infrastruktur di Aceh tapi hanya untuk 12 kabupaten
- IREP akan mengevaluasi dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah
- Isu gender perlu diutamakan dalam infrastruktur

Regional tidak optimal dan staf regional kurang mengetahui proyek yang dikerjakan pusat/BRR Banda Aceh. Dengan demikian, konsentrasi pembangunan infrastruktur lebih besar terlihat di kabupaten/kota besar atau daerah yang memiliki aksesibilitas jaringan jalan atau transportasi yang sudah baik.

Pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam agenda atau forum *sekretariat bersama*, sebagai mekanisme perencanaan bersama, ada kalanya berjalan tidak sesuai dengan harapan masing-masing pelaku kegiatan akibat sikap ego sektoral antar dinas, lembaga dan BRR yang sering muncul dalam rapat-rapat koordinasi perencanaan pembangunan. Sehingga upaya tindak lanjut yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut tidak sepenuhnya direalisasikan bersama.

Pada pelaksanaan rapat koordinasi bersama Donor/NGO dilakukan dengan *sharing* informasi *Action Plan* dan *sharing* data BRR dengan pemerintah daerah, lembaga PBB, NGO internasional dan lembaga donor. Dengan menggunakan

kerangka tersebut, dapat membantu BRR, NGO dan lembaga donor dalam mengidentifikasi proyek prioritas pemerintah daerah yang perlu dukungan. Salah satu kelemahan dari rapat-rapat koordinasi yang dilakukan adalah tindak lanjut untuk lebih mendetailkan informasi yang diperoleh, khususnya tentang infrastruktur. Sehingga keterbatasan informasi tersebut sering menyebabkan timbulnya ketidakpuasan dari beberapa pihak.

Sebagai contoh kasus mekanisme koordinasi Donor/NGO dengan pemda di Kabupaten Aceh Barat. Permasalahan koordinasi Pemda dengan sebagian Donor/NGO terdapat pada kecenderungan donor/NGO melakukan identifikasi dan pelaksanaan kegiatan langsung di lingkungan masyarakat tanpa melalui Pemda terlebih dahulu, sehingga sinkronisasi program dan kegiatan tidak berjalan baik.

Koordinasi perencanaan antara Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan Donor/NGO dilaksanakan dalam bentuk penyampaian rencana program/proyek melalui *proposal proyek* untuk disetujui Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Proses persetujuan proposal tersebut melibatkan stakeholder terkait dengan program yang dilaksanakan meliputi Pemda, tenaga ahli, dan sektor terkait.

Adanya Norma, Standar, Prosedur, Manual (NSPM) yang telah disusun baik dari tingkat pusat oleh Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah yang dalam bidang infrastruktur relatif lebih baku, maka hal ini mempermudah koordinasi perencanaan. Output yang dihasilkan dari koordinasi perencanaan tersebut antara lain:

- Review perencanaan program
- Sinergisitas perencanaan program
- Pembahasan solusi dari permasalahan dan isu penting

- Peluang kerjasama antar stakeholders
- Perkuatan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi bersama berdasarkan masukan dan rekomendasi
- Updating data informasi realisasi pelaksanaan kegiatan

Evaluasi koordinasi penyusunan perencanaan pada masing-masing sub sektor dapat disimak sebagai berikut.

(1) Jalan dan transportasi

Koordinasi penyusunan perencanaan antara BRR, Donor/NGO dan Pemda dalam perencanaan jalan dan bangunan transportasi berjalan relatif baik. Pemda lebih banyak memberikan dukungan dalam penunjukkan ruas-ruas lokasi jalan dan lokasi bangunan bandara atau pelabuhan kepada BRR dan NGO/Donor.

(2) Pos dan Telekomunikasi

Koordinasi perencanaan pos dan telekomunikasi yang dilakukan oleh BRR dengan stakeholder terkait seperti PT.Telkom dan PT. Pos Indonesia sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya realisasi yang dicapai BRR sampai akhir 2007 ini yang mencapai 84%.

(3) Energi dan Listrik

Sebagian besar proses rehabilitasi dan rekonstruksi sebagian besar ditangani oleh PLN sehingga tumpang tindih pekerjaan dapat dihindari. Sinkronisasi kegiatan telah dilakukan namun akibat keterbatasan sumber daya listrik belum mencukupi.

BRR mengalami kendala dalam melakukan koordinasi dengan PLN dan terus mendesak untuk pemulihan energi listrik melalui pembangunan sumber daya. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pembangunan dan pengadaan pembangkit sumber daya listrik BRR belum dapat digunakan secara maksimal akibat proses perencanaan yang belum selesai.

(4) Air bersih

Berbagai lembaga donor/NGO dan BRR telah melakukan koordinasi dengan PDAM daerah secara baik untuk pembangunan sumber air minum di berbagai kabupaten/kota. Keterbatasan sumber daya alam akibat faktor geografis menyebabkan perencanaan sumber daya air minum harus dilakukan secara terpadu. Namun beberapa kabupaten/kota menginginkan sumber daya air minum dibangun secara tersendiri, misalnya, Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur.

(5) Sumber Daya Air

Progress pembangunan saluran irigasi dan pengendalian banjir sudah melebihi target dalam rencana induk. Hal ini mengindikasikan bahwa koordinasi perencanaan antara BRR, Donor/NGO dan Pemda terlaksana baik dengan menggunakan mekanisme berbasis masyarakat. BRR dan Donor/NGO menyusun dokumen perencanaan dengan lokasi yang telah dikoordinasikan dengan Pemda. Dalam prosesnya masyarakat juga turut dilibatkan untuk memberikan masukan terhadap perencanaan yang disusun. Pemda menjadi fasilitator untuk memberikan informasi teknis yang berguna bagi kepentingan perencanaan BRR.

(6) Fasilitas dan Bangunan Publik

Rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan publik dilakukan secara terorganisir oleh BRR dan Pemda setempat, khususnya untuk pembangunan escape hill dan bangunan-bangunan penyelamatan (escape building) di beberapa lokasi percontohan seperti Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Barat. Pemda mengajukan usulan lokasi-lokasi jalur evakuasi yang kemudian diserahkan ke BRR. Koordinasi dengan pusat juga dilakukan agar proses pembangunan di daerah tidak bertentangan dengan kebijakan pusat.

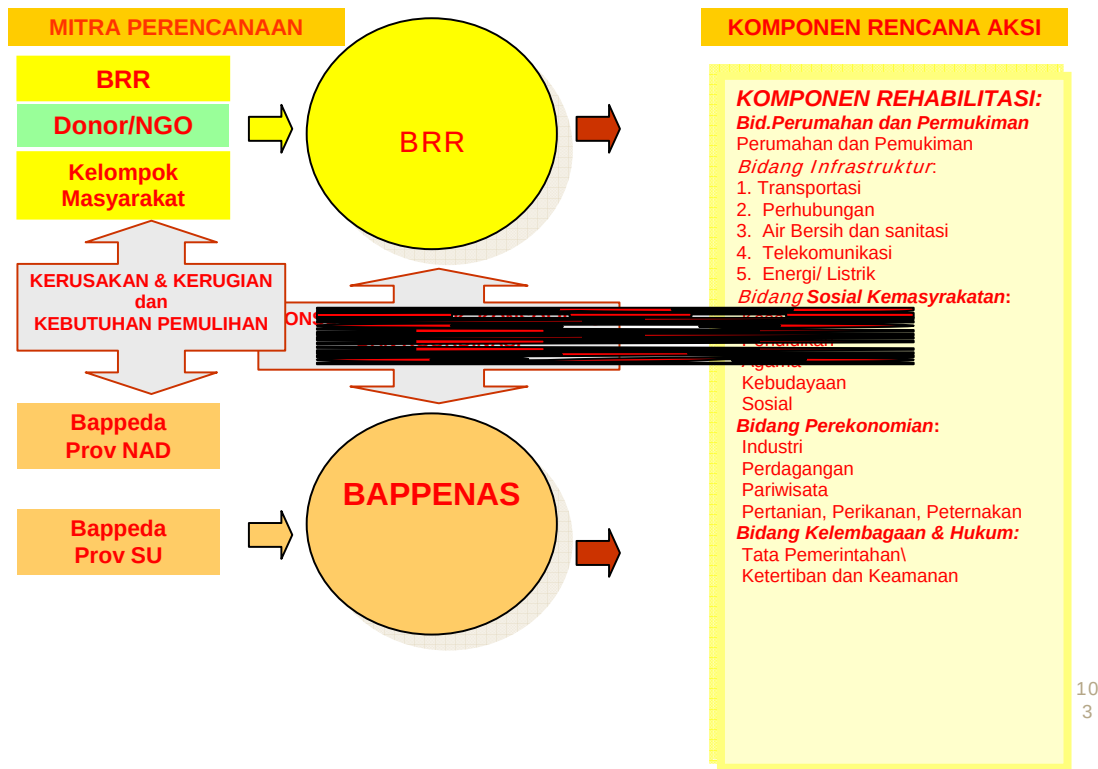
Forum yang digunakan guna mendukung proses perencanaan ini adalah forum Infrastruktur Bangunan Pengungsi Tsunami yang berada dalam wadah sekretariat bersama di Bappeda Provinsi NAD. Adapun instansi teknis yang terlibat dalam forum infrastruktur bangunan pengungsi Tsunami adalah *Sea Defence Consultant*, BRR, Bappeda, PU, Pertambangan, Dinas Perhubungan, Universitas Syahkuala, Pusat Koordinasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana (Satkorlak) Provinsi.

4.2.1.3. Bidang Sosial Budaya

Tahap terpenting dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini adalah perencanaan (*planning*). Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) pada pasal 1 (ayat 1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Terkait dengan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, setelah dua tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Bapel BRR berusaha untuk meningkatkan koordinasi bersama stakeholders di pusat dan daerah walaupun masih belum maksimal seperti yang diharapkan oleh berbagai pihak. Hal ini terlihat dari proses penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias tahun 2007 - 2009 pada bulan Juli - Agustus 2007. Dalam penyusunan tersebut, Bapel BRR melibatkan Bappenas, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Bagan 4 - 1
Proses Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi
Rekonstruksi NAD - Nias Tahun 2007 - 2009



Sumber : Rencana Aksi NAD-Nias 2007-2009, Juli 2007

Proses koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang sosial budaya secara umum berjalan melalui mekanisme koordinasi yang bersifat konsultatif antar stakeholders. Dalam upaya mempercepat pembangunan kembali bidang sosial budaya di Aceh dan Nias dilakukan melalui proses perencanaan yang simultan antara stakeholder dibawah tanggungjawab BRR. Koordinasi perencanaan dalam bidang kesehatan melibatkan BRR, Dinas kesehatan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota serta lembaga donor/NGO. Koordinasi dilakukan tidak hanya pada saat perencanaan, tetapi juga pasca proses pelaksanaan serta pengawasan secara bersama. Pembangunan rumah sakit Gunung Sitoli di Kabupaten Nias merupakan hasil konsultasi antara BRR, pemerintah daerah kabupaten Nias dan lembaga donor (Mercy Malaysia dan pemerintah cina) yang disepakati dilaksanakan melalui 4 tahap. 3 tahap pertama dilaksanakan dalam masa waktu rehabilitasi dan rekonstruksi BRR dan tahap 4 diperkirakan akan berlangsung pasca keberadaan BRR tahun 2009 dan akana dijadikan acuan perencanaan sebagai pembangunan keberlanjutan pasca tahun 2009.

Koordinasi perencanaan di bidang pendidikan dilaksanakan oleh BRR antara dinas pendidikan provinsi dan dinas kabupaten/kota serta donor/NGO yang terkait terutama Unicef. Koordinasi ini terus berlangsung menyangkut pendistribusian bentuk bantuan dalam pembangunan gedung sekolah baik secara fisik maupun non fisik.

Dalam bidang agama, sosial dan budaya pelaksanaan koordinasi perencanaan kegiatan dilaksanakan oleh BRR dengan dinas terkait. Sedangkan donor/NGO dalam pelaksanaan bidang spasial dana budaya secara umum lebih memilih melakukan *need assesment* langsung kepada masyarakat korban bencana. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi

dilapangan karena kegiatan yang menyangkut bidang sosial budaya lebih sering dihandle oleh masyarakat langsung secara bergotong royong.

4.2.1.4. Bidang Pemulihan Ekonomi

Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, khususnya bidang pemulihan perekonomian, yang dilakukan BRR NAD-Nias, Pemerintah Daerah, dan lembaga donor/NGO di tahun 2007 sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun mekanisme koordinasi penyusunan perencanaan yang selama ini terutama melalui 3 forum (Sekretariat Bersama, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Coordination Forum for Aceh and Nias) sudah berjalan baik, walaupun dengan beberapa catatan.

Tabel 4 - 64
Evaluasi Koordinasi Dalam Penyusunan Perencanaan
Bidang Pemulihan Perekonomian

Sekretariat Bersama	Berfungsinya forum Sekretariat bersama (sekber) pada tahun 2007 telah menjembatani koordinasi dan komunikasi pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor perikanan dan kelautan, pertanian, tenaga kerja, koperasi UKM, dan Perdagangan dan perindustrian di tingkat Kabupaten/kota yang selama ini terputus. Koordinasi dan komunikasi sudah berjalan baik khususnya antara BRR dengan pemerintah daerah dengan dilibatkannya beberapa orang SKPD dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi BRR. Aparat Pemda yang dilibatkan tersebut telah memberi kontribusi besar terhadap informasi kebutuhan (masyarakat) di lapangan, yang seringkali pihak BRR kurang mengetahui secara detail. Sebaliknya, perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah juga diinformasikan kepada BRR sehingga tumpang tindih kegiatan dan anggaran (overlapping) antara BRR dan Pemerintah daerah dapat dihindari. Walaupun demikian, Lembaga donor/NGO kurang terlibat dalam forum sekretariat bersama. Contoh koordinasi antara BRR dan Pemda adalah perumusan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah Kab. Aceh Besar. Pada forum tersebut ditetapkan pembagian peran antara dinas dengan BRR dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang pertanian, dalam hal penyuluhan pertanian. Dinas pertanian menyediakan tenaga penyuluh dan kelompok tani sedangkan BRR menyediakan biaya operasional penyuluhan dan bibit untuk petani. Peran Sekber dalam menyuarkan Aspirasi Pemerintah Daerah dirasakan masih kurang. Wakil pemerintah daerah hanya dapat memberikan masukan untuk perencanaan program/kegiatan BRR, namun keputusan dan kewenangan ada pada pihak Bapel BRR. Diharapkan pada perencanaan di tahun selanjutnya aspirasi Pemerintah daerah dapat lebih ditampung.
CFAN	Dalam bidang pemulihan perekonomian, Forum CFAN sangat efektif dalam mengkoordinasikan penyusunan perencanaan baik oleh BRR, Pemerintah Daerah dan terutama dengan lembaga Donor/NGO. Namun disayangkan pada CFAN terakhir (CFAN ke-3 pada Maret 2007) Pemerintah daerah tidak dapat hadir dikarenakan berbarengan dengan acara Musrenbang daerah. Pada CFAN ke-3 khususnya bidang pemulihan perekonomian telah disepakati berbagai kegiatan yang mencakup : 1. Pemulihan aktivitas ekonomi pasca bencana gempa dan tsunami (tahun pertama dan kedua pasca bencana) 2. Pemberian kredit lunak terhambat masalah tingginya kredit bermasalah

	(NPL) dan seringkali tidak terdistribusikan merata untuk daerah terpencil. 3. Dampak terhadap pekerja ketika pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berakhir. 4. Hal yang perlu dilakukan di tahun III dan IV rehabilitasi rekonstruksi (tahun 2007 dan 2008) guna memantapkan fondasi perekonomian jangka panjang 5. Kebijakan yang perlu didukung seluruh pelaksana rehabilitasi rekonstruksi guna percepatan pertumbuhan ekonomi Aceh-Nias.
Musrenbang	Forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat nasional efektif dalam mensinkronkan usulan dari Pemerintah Daerah dan pihak BRR sebagai institusi pusat yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Prov.NAD dan Kep.Nias. Dalam forum tersebut dipilah-pilah tanggungjawab masing-masing sehingga tidak ada kegiatan yang tumpang tindih (overlapping) dan/atau kegiatan yang belum tercover. Semua usulan rehabilitasi rekonstruksi bidang pemulihan perekonomian yang berasal dari daerah ditampung ke forum yang lebih tinggi, mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat provinsi. Namun yang menjadi permasalahan adalah semua kegiatan pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi lebih diserahkan kepada BRR. Seharusnya ada pembagian peran dan saling mengisi dalam pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi.

Sumber : Analisis Tim P3B Bappenas

Adapun isu dan rekomendasi pada CFAN ke-3 dapat diringkas pada tabel berikut.

Tabel 4 - 65
Isu dan Rekomendasi
Bidang Pemulihan Perekonomian Pada CFAN 3

1	Pemulihkan aktivitas ekonomi pasca bencana gempa dan tsunami (tahun pertama dan kedua pasca bencana)	Disepakati bahwa untuk pemulihan perekonomian pasca bencana, maka tindakan/kebijakan yang perlu dilakukan adalah : (i) Membangun kembali infrastruktur ekonomi yang rusak (jalan, pelabuhan, system pengairan, kolam/tabak ikan, penggilingan padi, pasar, dll); (ii) Menyediakan pembiayaan/kredit murah agar masyarakat dapat membuka kembali usahanya; dan (iii) Men-generate jobs melalui pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tentunya akan menyerap lapangan pekerjaan.	▪ BRR NAD-Nias ▪ Pemerintah Daerah ▪ Lembaga Donor/NGO
2	Pemberian kredit lunak terhambat masalah tingginya kredit bermasalah (NPL) dan seringkali tidak terdistribusikan merata untuk daerah terpencil.	Mungkin dalam jangka pendek tidak masalah jika memang ada dana khusus yang dialokasikan, tetapi sebenarnya hal ini tidak sehat dan merugikan institusi pemberi pinjaman. Maka itu peserta diskusi merekomendasikan agar institusi micro finance tsb perlu ditingkatkan capacity buildingnya. Misalnya dengan bekerjasama dengan institusi keuangan formal. Kredit lunak ini diharapkan tidak hanya mudah diakses tetapi juga dapat menjangkau daerah	▪ BRR NAD-Nias ▪ Pemerintah Daerah ▪ Lembaga Donor/NGO

		terpencil melalui perluasan kantor-kantor cabang baru.	
3	Dampak terhadap pekerja ketika pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berakhir.	Disadari semua peserta diskusi bahwa penyerapan tenaga kerja setelah masa rehabilitasi rekonstruksi akan berkurang, maka itu perlu dilakukan langkah antisipatif yaitu melalui pendidikan dan pemberian keterampilan terhadap masyarakat. Rekomendasi yang diusulkan adalah: a. Support SPMA, SMK, Dayah traditional, Vocational School b. Seiring dengan usaha membawa Aceh sebagai cyber province, maka diusahakan untuk mengadakan training berbasis internet, à Encourage E-learning. c. Pemberdayaan SDM untuk bidang terkait agar dapat disiapkan tenaga kerja siap pakai d. Bagaimana menjadikan teknologi tsb relevan dalam kehidupan sehari-hari. e. Penggunaan Audio visual dan alat peraga lainnya sebagai salah satu material di dalam training f. Mendorong DPRA untuk mewujudkan qanun tentang pengayaan kurikulum yang lebih kreatif sehingga mengarahkan minat dan talenta anak terhadap science dan technology. g. Adanya pelatihan-pelatihan tertentu dan sertifikasi bagi peserta pelatihan baik bagi anak putus sekolah maupun mantan GAM	▪ BRR NAD-Nias ▪ Pemerintah Daerah ▪ Lembaga Donor/NGO
4	Hal yang perlu dilakukan di tahun III dan IV rehabilitasi rekonstruksi (tahun 2007 dan 2008) guna memantapkan fondasi perekonomian jangka panjang	Disepakati bahwa semua pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi perlu untuk : Mengimplementasikan project prioritas utama guna membangun fondasi perekonomian dalam rangka <i>better future economy</i>; dan Mendesain serta mengimplementasikan <i>exit strategy</i> untuk <i>handover</i> program-program kepada pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kapasitasnya. Strategy dalam <i>better future economy</i> yaitu: menghilangkan hambatan seperti pungutan liar, gangguan keamanan, birokrasi dan aturan yang kurang mendukung. Pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan, jembatan, pelabuhan udara juga harus dilanjutkan. Pelatihan SDM, akses terhadap permodalan perlu ditigkatkan dan dipermudah.	▪ BRR NAD-Nias ▪ Pemerintah Daerah ▪ Lembaga Donor/NGO
5	Kebijakan yang perlu didukung seluruh pelaksana rehabilitasi rekonstruksi guna	Peserta diskusi menilai kebijakan yang telah dilakukan BRR telah <i>on the right track</i> dan oleh karena itu perlu didukung. Adapun kebijakan BRR tersebut dapat dijelaskan sbb :	▪ BRR NAD-Nias ▪ Pemerintah Daerah

	percepatan pertumbuhan ekonomi Aceh -Nias.	a. Developing Pro-Poor Growth Programs/Projects. Kebijakan ini dilaksanakan BRR mengingat kondisi Propinsi NAD jauh sebelum Tsunami adalah propinsi ke-4 termiskin di Indonesia. Pertanian merupakan sektor utama penopang perekonomian NAD. Sebelum Tsunami, pembangunan infrastruktur ekonomi di NAD juga jauh tertinggal dibandingkan Provinsi lain. b. Sustaining Private/Public Investment. Tujuan akhir fondasi perekonomian yang berkelanjutan adalah sektor swasta menjadi motor utama (Private sector driven), maka itu aliran permodalan dan institusi keuangan keuangan yang sehat perlu dikembangkan guna mendukung aktivitas bisnis swasta. Sektor UKM dengan adanya program ini juga dapat dikembangkan dan akan menyerap pengangguran sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c. Building Export Capacity. Guna mencapai perekonomian NAD yang sustainable private sektor driven termasuk sektor eksportnya harus dikembangkan. Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan kompetitifness barang dan jasa NAD agar dapat bersaing di luar negeri, yang diharapkan dapat dicapai dengan program-program diatas. d. Re-establishing Aceh as a Modern Trading Center. Letak geografis yang strategis, memungkinkan NAD menjadi pelabuhan bebas yang akan mempunyai banyak akses dan potensi bisnis ke berbagai Negara tujuan ekspor. Pelabuhan Sabang berpotensi menjadi pelabuhan bebas yang akan dijadikan tempat transit aktivitas perdagangan. Maka itu, pengelolaan menuju Modern Trading Center perlu dikembangkan.	▪ Lembaga Donor/NGO

Sumber : CFAN 3 Summit, April 2007

4.2.1.5. Bidang Kelembagaan dan Hukum

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sudah berjalan selama dua tahun, dan tingkat koordinasi pun sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya namun masih dinilai belum optimal. Dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan antara Pemda, BRR dan Donor/NGO melalui sekretariat bersama secara umum telah berjalan dengan baik walaupun belum merata di semua lokasi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Terkait dengan bidang kelembagaan dan hukum, salah

satu Sekretariat Bersama di Banda Aceh melaksanakan forum koordinasi kecamatan yang dinamakan forum koordinasi KORREXA (Komite Rehabilitasi dan Rekonstruksi Meuraxa). Pembahasan KORREXA tertuang dalam sebuah forum yang disebut urban forum yang terdiri dari kumpulan masyarakat, aparat desa, Donor/NGO, BRR dan pemerintah level kecamatan maupun kabupaten/kota. Forum tersebut merupakan tempat berinteraksi, bertukar informasi dan mencari solusi setiap permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Isu yang dibahas misalnya masalah perencanaan dan pembangunan kantor camat, serta pengaktifan forum kecamatan di Kecamatan Meuraxa, Kuta Alam, Kuta Raja dan Syiah Kuala

Pada penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan dan hukum di antara Bapel BRR dan Pemda³:

- Koordinasi penyusunan perencanaan antara Bapel BRR dan Pemda dalam perencanaan bangunan kantor telah berjalan relatif baik. Pemda lebih banyak memberikan dukungan dalam penunjukkan bangunan-bangunan kantor yang mengalami kerusakan dan kebutuhan pembangunan kantor yang baru kepada BRR. Namun koordinasi Bapel BRR lebih terfokus kepada Dinas dibandingkan dengan Badan yang ada di NAD-Nias.
- Koordinasi perencanaan bidang hukum yang dilakukan oleh Bapel BRR dengan stakeholder terkait, contohnya Kejaksaan Negeri belum berjalan optimal. Bapel BRR berkoordinasi mengenai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (dalam lingkup kejaksaan) dengan Kanwil tingkat Provinsi yaitu di Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kejaksaan Negeri tidak dilibatkan secara langsung.

Koordinasi perencanaan program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan dan hukum di diantara Donor/NGO dengan Pemda terjalin dengan baik. Pemda memberikan usulan dalam penunjukkan sarana dan prasarana kantor yang mengalami kerusakan dan kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang baru kepada Donor/NGO. Kemudian Donor/NGO berkoordinasi dengan Bapel BRR melalui penyampaian proposal proyek (RAN Database) untuk disetujui BRR dan menjabarkan rincian proyek di bidang kelembagaan, hukum maupun K3M yang ingin dilaksanakan.

4.2.2 Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan

4.2.2.1. Bidang Perumahan dan Permukiman

Meskipun BRR, Pemda, dan donor/NGO memiliki agenda masing-masing sesuai perannya dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, koordinasi dalam pelaksanaan menjadi suatu kebutuhan yang wajib dilaksanakan. Hingga saat ini, permasalahan-permasalahan yang masih timbul khusus dalam bidang perumahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mengindikasikan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan antar stakeholders terkait belum berjalan dengan baik. Di satu sisi, tidak dapat dipungkiri bahwa hambatan dan tantangan yang dihadapi di lapangan sangatlah beragam. Media yang digunakan sebagai forum koordinasi dalam pelaksanaan adalah Sekretariat Bersama, RAN Database, CFAN, NISM (Nias Islands Stakeholders Meeting), Musrenbang, dll.

Salah satu bentuk koordinasi di antara seluruh pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu CFAN (Coordination Forum for Aceh and Nias). Di tahun 2007, CFAN 3 telah diselenggarakan pada tanggal 24 April 2007 di Hotel Borobudur, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh BRR, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Donor dan NGO lokal dan

³ Hasil wawancara dengan Badan/Dinas terkait di Kabupaten/Kota Provinsi NAD, September-November 2007

internasional, Badan Reintegrasi Aceh, media, dll. CFAN kali ini fokus pada 3 bidang pemulihan yaitu perumahan, infrastruktur, dan ekonomi. Khusus di bidang perumahan, isu dan rekomendasi yang dihasilkan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4 - 66
Isu dan Rekomendasi Bidang Perumahan Pada CFAN 3

Perumahan dan Permukiman	Salah sasaran masyarakat penerima/ perhitungan ganda	▪ Melibatkan masyarakat untuk menentukan pinalti perhitungan ganda ▪ Terlibat hingga ke tingkat desa ▪ Melibatkan masyarakat dan pemuka agama untuk meningkatkan kesadaran bersyukur ▪ Hukuman/sanksi untuk segala bentuk kecurangan yang disengaja
	Kualitas rumah yang buruk	▪ Meningkatkan pemantauan ▪ Berhati-hati memilih konsultan pengawas ▪ Berbagi informasi mengenai kinerja konsultan
	Penggunaan asbes	Sosialisasi kepada masyarakat tentang potensial resiko bahan bangunan dan perawatan yang dibutuhkan
	Percepatan rekonstruksi perumahan (terutama di Aceh Jaya)	Mendukung bantuan perumahan di Aceh Jaya (utamanya dilakukan oleh Red Cross), seperti pembebasan lahan
	Pembongkaran barak	Mempercepat penyerahan perumahan untuk para pengungsi termasuk konsolidasi yang diperlukan
	Manajemen rekonstruksi perumahan di masa mendatang	▪ Integrasi unsur Pemerintah Daerah ke dalam kebijakan perumahan ▪ Mendirikan Dewan Perumahan Aceh-Nias ▪ Mensosialisasikan kompleksitas rekonstruksi perumahan kepada masyarakat melalui media
	Masalah kekurangan dana	Mendorong donor untuk meningkatkan komitmen dan bantuan

Sumber: CFAN 3, 2007

Hasil wawancara yang dilakukan oleh Tim P3B-Bappenas pada kunjungan lapangan ke beberapa Kota/Kab di Provinsi NAD pada bulan September dan November 2007 juga menyangkut koordinasi dalam pelaksanaan, salah satunya di bidang perumahan. Berbeda dengan koordinasi dalam perencanaan yang secara keseluruhan telah berjalan dengan baik di antara stakeholders terkait, koordinasi dalam pelaksanaan berbeda-beda untuk beberapa Kab/Kota yang dikunjungi.

Secara umum, koordinasi dirasakan masih belum berjalan dengan baik. Di Kab. Aceh Besar, sebagian besar Pemda terlibat pada permohonan izin prinsip saja dan keterlibatan pengawasan untuk salah satu kegiatan. Di Kab. Aceh Barat, Donor/NGO cenderung melakukan kegiatan langsung kepada masyarakat tanpa koordinasi dengan Pemda setempat. Kab. Pidie dan Kab. Aceh Jaya merupakan 2 (dua) contoh kabupaten di mana pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan pemulihan bidang perumahan telah berjalan dengan baik. Penjelasan lebih rinci di beberapa Kab/Kota dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4 - 67
Koordinasi dalam Pelaksanaan
Bidang Pemulihan Perumahan dan Permukiman di Beberapa Kab/Kota

1.	Aceh Besar	Koordinasi mengenai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh NGO/Donor - Sebagian besar, Pemda hanya terlibat dalam permohonan izin prinsip (seperti IMB). Selanjutnya NGO/Donor membangun sendiri. Dengan kata lain, tidak melibatkan Pemda dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Salah satu donor yang membantu yaitu JICS, yang membangun sekolah dan pesantren. - Ada pula NGO/Donor yang membangun kerjasama dengan Pemda (atau dinas terkait), yaitu ILO. Kerjasama ini melalui pelibatan personil dari Dinas PU sejak tahun 2006 untuk pengawasan. Selain itu, pada pelaksanaan sistem kontraktor lokal untuk pelaksanaan tender, ILO juga meminta rekomendasi dari Dinas. GTZ juga bekerjasama dengan Pemda dalam bidang pemetaan.
2.	Aceh Barat	- Dalam aspek pelaksanaan program dan kegiatan, pemda telah melakukan koordinasi yang baik dengan BRR, namun koordinasi dengan Donor/NGO tidak berjalan dengan baik, terutama dalam masalah pembangunan rumah dan PSD. - Permasalahan koordinasi Pemda dengan sebagian Donor/NGO terdapat pada kecenderungan donor/NGO melakukan identifikasi dan pelaksanaan kegiatan langsung di lingkungan masyarakat tanpa melalui Pemda terlebih dahulu, sehingga sinkronisasi program dan kegiatan tidak berjalan baik. - Pemda bekerja sama BRR melalui sekber melakukan pemantauan secara intensif melalui media, laporan masyarakat, system jaringan BRR maupun survey langsung di lapangan untuk mendapatkan beberapa kegiatan yang dilakukan Donor/NGO.
3.	Aceh Jaya	Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, koordinasi teknis maupun non teknis telah berlangsung dengan baik antara pemda dengan BRR, Donor/NGO.
4.	Banda Aceh	Koordinasi antara BRR dan Dinas tahun 2005 terjalin dengan sangat baik. Tahun 2006, koordinasi mulai berkurang (50 %) dimana Satker BRR memperkerjakan staff dari Dinas terkait. Tahun 2007 fungsi koordinasi bergeser, Pemda sudah tidak terlibat lagi, dikarenakan Satker sudah tidak ada hubungan lagi dengan Dinas.
5.	Bireun	Tidak adanya koordinasi selama pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan, sehingga dinas tidak mengetahui secara detail proses pelaksanaan program yang berlangsung. Bahkan ada, seperti BRR tidak melaporkan secara detail implementasi dari pembangunan jaringan irigasi, sehingga setelah pembangunan dianggap selesai dan ditinggal, irigasi tersebut kembali mengalami kerusakan
6.	Pidie	Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, koordinasi telah berlangsung dengan baik antara pemda dengan BRR, Donor/NGO. Seperti yang dilakukan oleh French Red Cross dalam pembangunan perumahan di benteng, Kota Sigli yang dibangun dalam beberapa tahapan.

Sumber: Laporan Kunjungan Lapangan Tim P3B-BAPPENAS, 2007

Untuk bidang tata ruang dan pertanahan, pelaksanaan koordinasi kegiatan sertifikasi tanah kurang berjalan dengan baik antara Bapel RR, BPN, dan Bank Dunia sebagai koordinator Multi Donor Fund. Hal ini lebih disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara ketiga pihak tersebut. Upaya untuk memperlancar koordinasi telah difasilitasi oleh Dewan Pengarah dan BAPPENAS melalui rapat tripartit antara BPN dan Bapel RR.

Pada bidang lingkungan hidup, koordinasi dalam pelaksanaan diwujudkan dalam sharing informasi oleh donor/NGO kepada Bapel RR dan Pemda mengenai pelaksanaan kegiatannya. Salah satu bentuk sharing informasi adalah penyelenggaraan lokakarya terkait bidang lingkungan hidup. Sebagai contoh adalah lokakarya CEPPP (Critical

Environment Pressure Point Project), yang telah diselenggarakan pada tahun 2006 dan dihadiri oleh Pemda, BRR, donor/NGO, dan masyarakat. Salah satu rekomendasi dari lokakarya ini adalah perlunya Pemda memiliki data dasar (baseline) mengenai seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayahnya, mengingat dalam saat yang bersamaan, kondisi lingkungan hidup juga mengalami penurunan kualitas. Ke depan, isu lingkungan hidup diharapkan menjadi prioritas pengarusutamaan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, salah satunya melalui pemantapan koordinasi antar stakeholders.

4.2.2.2. Bidang Infrastruktur

Fungsi koordinasi dilakukan oleh BRR, Bappeda, dan sejumlah dinas yang mengkoordinasi hal-hal sesuai dengan bidangnya masing-masing. BRR yang memiliki mandat sebagai koordinator tetapi sekaligus menjadi implementator dianggap oleh sebagian NGO maupun sebagian kalangan pemerintah menjalankan fungsi yang bertentangan. Selain itu, data mengenai siapa melakukan apa dan dimana masih tidak terkoordinir dengan baik.

Setelah dua tahun berjalan, koordinasi sudah mengalami kemajuan. Meskipun belum optimal dan masih cenderung bersifat sektoral, namun koordinasi sudah mulai berjalan. Media yang digunakan sebagai forum koordinasi pelaksanaan bersama adalah :

(1) Sekretariat bersama

Koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten atau provinsi dengan BRR berjalan baik di Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, sedangkan di daerah lain masih belum berjalan dengan baik. Bentuk koordinasi melalui pencapaian progres pelaksanaan kegiatan fisik, pembahasan permasalahan-permasalahan teknis dan non teknis di lapangan

(2) RANdatabase

Koordinasi antara BRR dengan NGO dan lembaga donor dalam informasi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Database yang dicantumkan disini selalu updating setiap hari, khususnya kegiatan BRR. Namun, updating tingkat kerincian informasi yang disampaikan kegiatan NGO dan lembaga donor masih belum optimal.

(3) Musrenbang

Koordinasi tingkat lokal antara Bappeda dan Instansi Pemda NAD; Rapat koordinasi yang merupakan koordinasi tingkat lokal yang dihadiri oleh Perwakilan Pimpinan Daerah. Sejauh ini musrenbang daerah telah mulai terintegrasi dengan BRR dan berjalan cukup efektif. BRR memberikan masukan kepada pemda sehingga hal-hal yang sesuai dengan kebijakan pusat dan daerah dapat dimasukkan dalam rencana daerah.

(4) CFAN

Koordinasi tingkat lokal antara Bappeda dan Instansi Pemda NAD; Rapat koordinasi yang merupakan koordinasi tingkat lokal yang dihadiri oleh Perwakilan Pimpinan Daerah. Sejauh ini musrenbang telah mulai terintegrasi dengan BRR.

Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Donor MDF dari implementasi di lapangan adalah dengan melakukan kampanye dan ombudsperson sebagai bentuk komunikasi terhadap penerima manfaat. Langkah yang dilakukan adalah :

- o Kampanye di media setempat yang secara komprehensif memberikan informasi kepada para penerima manfaat mengenai berbagai proyek Multi Donor Fund yang beroperasi di kabupaten mereka, hak-hak mereka dan menyediakan bagi mereka

contact point untuk mereka mengajukan pertanyaan, menyampaikan berbagai keluhan dan laporan atas berbagai dugaan kasus korupsi.

- o Ombudsperson Multi Donor Fund menerima berbagai komentar dari penerima manfaat dan kemudian meneruskannya kepada para Manajer proyek terkait atau kepada BRR. Ia secara reguler akan menelusuri proses penyelesaian dari setiap keluhan dan dugaan kasus korupsi dan memberikan umpan balik kepada pihak yang mengajukan keluhan.
- o Ombudsperson juga melakukan kunjungan lapangan secara reguler untuk berbicara secara pribadi dengan masyarakat mengenai kekhawatiran mereka atas relevansi berbagai proyek Multi Donor Fund.

Dari pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa koordinasi penyusunan perencanaan BRR, Donor/NGO dengan pemerintah daerah sudah mulai menunjukkan kemajuan di beberapa daerah seperti Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Jaya, Sigli, Bireun, Aceh Singkil dan Aceh Besar. Tapi masalah timbul di tahap pelaporan, dimana Pemda sangat kurang menerima informasi tentang apa saja program dan kegiatan yang sedang dan telah selesai dikerjakan oleh BRR terutama dalam bidang jalan, energi listrik, pos telekomunikasi dan sumber daya air.

Tidak adanya koordinasi selama pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan, sehingga dinas tidak mengetahui secara detail proses pelaksanaan program yang berlangsung. Bahkan ada, seperti BRR tidak melaporkan secara detail implementasi dari pembangunan jaringan irigasi, sehingga setelah pembangunan dianggap selesai dan ditinggal, irigasi tersebut kembali mengalami kerusakan.

Perhubungan Laut. Fokus kegiatan pelaksanaan lebih pada penyediaan layanan angkutan dan dukungan material konstruksi bagi BRR di sepanjang pantai utara dan barat Aceh serta kepulauan Simeulue dan Nias. Pencapaian terkini penyelesaian pelabuhan Gunung Sitoli di Nias, Sinabang di Simeulue, Calang, Pulo Aceh, dan pelabuhan lainnya sudah hampir 88%. Seluruh aktifitas telah dikoordinasikan Donor NGO dengan BRR, Badan Transportasi, dan Departemen Perhubungan Laut. Program ini juga berkonsultasi intensif dengan pemerintah daerah, masyarakat dan perwakilan dari nelayan setempat dan para pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan kelautan.

Jalan. Pembangunan dan pemeliharaan jalan di wilayah barat NAD terutama daerah antara Lamno-Calang terus mengalami ketertinggalan. Koordinasi antara Donor USAID dan BRR sudah sering dilaksanakan dalam sharing kegiatan namun masih kurang intensif. Sehingga penyelesaian terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi jalan di wilayah tersebut masih tersendat. Sengketa tanah juga masih menjadi kendala dalam kegiatan ini.

Pengendalian Banjir. Proyek ini berkoordinasi erat dengan tim perencanaan rekonstruksi drainase dan pencegahan banjir oleh Donor dari pemerintah Jepang. Proyek ini juga bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten untuk menjamin pemeliharaan dan kelangsungan pakai instalasi-instalasi yang telah dipasang.

Kelemahan fungsi koordinasi ini ditunjukkan dari beberapa faktor kondisi pada masing-masing sektor diatas, yaitu : (1) ketidakjelasan agenda-agenda pertemuan, (2) tidak jelasnya distribusi informasi, (3) tidak adanya database informasi mengenai siapa melakukan apa, dan (4) kesepakatan-kesepakatan (MoU) sering ditandatangani pada level pemerintahan yang berbeda yang berpengaruh pada koordinasi dan kerjasama antara NGO lokal dan internasional. Keadaan yang demikian telah membuat BRR, Pemerintah daerah dan sebagian NGO kesulitan menjalankan program-programnya.

Adanya integrasi pengawasan yang dilakukan oleh BPK, BPKP dan Dewan Pengawas akan meringankan koordinasi para staf proyek dan staf struktural dalam hal input pelaksanaan kegiatan, sehingga mereka lebih dapat berkonsentrasi melakukan pelaksanaan proyek secara responsif agar dapat berjalan dengan baik.

4.2.2.3. Bidang Sosial Budaya

Selain masalah koordinasi dalam perencanaan, tahap selanjutnya yang terpenting adalah mekanisme koordinasi dalam aspek pelaksanaan. Pentingnya adanya mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan ini untuk menghindari adanya, antara lain, tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan, termasuk tumpang tindih disini dalam hal anggaran kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lancar dan terarah antara BRR, Pemda dan Donor melalui pertemuan 3 bulanan. Tujuan rapat tersebut untuk melihat dan memantau isu dan permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Bidang pendidikan kegiatan koordinasi dilaksanakan bersama dinas pendidikan dan NGO melalui koordinasi 6 bulanan yang dilaksanakan secara bergiliran antara dinas pendidikan dengan BRR. Hal ini penting karena pembangunan fisik gedung sekolah lebih banyak dibangun oleh donor/NGO sedangkan peralatan meubelir dan SDM oleh BRR. Untuk itu perlukan upaya yang simultan antar stakeholder yang terkait dalam rangka mengembalikan pemulihan proses belajar mengajar pasca bencana.

Koordinasi langsung bersama tokoh masyarakat (ulama, santri dan budayawan) dan lembaga sosial (karang taruna dan majlis ta'lim) dalam upaya pelaksanaan dan pengawasan kegiatan secara bersama dilaksanakan dalam bidang agama, sosial dan budaya.

4.2.2.4. Bidang Pemulihan Ekonomi

Koordinasi pelaksanaan antara BRR, Pemerintah Daerah, dan lembaga Donor/NGO dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi bidang pemulihan perekonomian secara umum sudah terkoordinasi dengan baik, walaupun dengan beberapa catatan.

Koordinasi pelaksanaan dapat berjalan dengan baik terutama dengan berfungsinya sekretariat bersama. Disini selain koordinasi perencanaan, pihak BRR dan pemerintah daerah dapat saling berkomunikasi dan berkoordinasi sehingga dalam pelaksanaan pun dapat berjalan dengan baik. Namun demikian, terdapat kecemburuan dari beberapa SKPD yang walaupun terlibat dalam forum Sekretariat bersama tetapi tidak diikutsertakan dalam satker BRR. Walaupun koordinasi pelaksanaan antara BRR dengan Pemerintah daerah berjalan baik, koordinasi pelaksanaan dengan lembaga donor/NGO ditingkat bawah belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan lembaga donor/NGO sudah punya program/kegiatan yang telah ditetapkan sehingga tidak perlu terlibat dalam forum sekretariat bersama. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi kita bersama agar pelaksanaan seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya bidang pemulihan perekonomian dapat berjalan sinergis.

Berdasarkan kunjungan lapangan Tim P3B Bappenas terkait Koordinasi antar pelaksana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada bidang pemulihan perekonomian ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Beberapa Dinas (Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja) di Kota Banda Aceh tidak diberikan laporan/informasi tentang progress pelaksanaan proyek di lapangan

oleh BRR. Hal ini menyulitkan Dinas Kota Banda Aceh untuk berkoordinasi lebih lanjut. Forum sekretariat bersama dirasakan masih belum cukup.

2. Laporan dari satker ada yang dilaporkan, ada juga yang tidak dilaporkan ke dinas. Kegiatan riil yang dilakukan tidak diketahui oleh dinas, revisi dan yang disahkan selengkapanya ada di satker.
3. Koordinasi dengan Pemda dengan Donor/NGO masih sangat kurang. Yang terjadi, kebanyakan dari Donor/NGO langsung memberikan bantuan modal ke masyarakat. Hal ini menyebabkan adanya tumpang tindih antar program dan kegiatan.
4. Permasalahan yang seringkali terjadi dalam koordinasi Pelaksanaan program dan kegiatan antar pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu informasi/laporan yang tidak cukup serta kurangnya komunikasi dalam pelaksanaannya.
5. Koordinasi dengan NGO/Donor diwujudkan dalam bentuk koordinasi laporan satu pintu melalui RANDatabase BRR. Melalui RANDatabase ini Donor/NGO melaporkan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi mereka dan Bapel BRR yang mempublikasikan ke masyarakat karena ini bisa diakses oleh umum. Disamping itu koordinasi tetap berkembang dengan dibentuknya CFAN I - III secara bersama dalam koordinasi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

4.2.2.5. Bidang Kelembagaan dan Hukum

Koordinasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan dan hukum, diantaranya⁴:

- Pemda tidak mengetahui secara detail proses pelaksanaan rekonstruksi yang sedang berlangsung dan kemajuan serta hambatan di lapangan, karena tidak adanya koordinasi secara intensif dan pelaporan serta hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kelembagaan dan hukum dari BRR kepada Pemda, dan laporan Donor/NGO kepada BRR maupun Pemda. Karena minimnya koordinasi, pihak dinas hanya menunggu laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan rekonstruksi tersebut
- Koordinasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi masih tergantung pada kewenangan di BRR pusat, sehingga mempengaruhi kecepatan dan fleksibilitas regional maupun Pemda dalam melakukan pelaksanaan di lapangan.
- Bila permasalahan muncul, Pemda akan menindaklanjuti melalui pengiriman surat kepada pihak terkait dengan melampirkan form pemetaan permasalahan yang muncul, walaupun tidak semua pihak yang bermasalah menjawab.
- Koordinasi dalam pengawasan sudah melibatkan Pemda, sebagai contoh di Kota Banda Aceh BRR melibatkan Pemda melalui Dinas Tata Kota dan Permukiman untuk memonitoring/mengawasi bangunan negara dan rumah dinas negara (rumah kejaksaan, Polri, dll) sehingga dapat memenuhi kualitas dan standar bangunan

Mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan kantor/rumah dinas terjalin dengan baik yaitu terdapat pembagian peran di antara para stakeholder tersebut. Pemda menyediakan lahan, Donor/NGO membangun sarana dan prasarana kantor (kantor kecamatan/kelurahan/desa) sedangkan BRR membangun kantor lainnya yang belum terbangun (kantor kecamatan/kelurahan/desa, kantor

⁴ Hasil wawancara dengan Badan/Dinas terkait di Kabupaten/Kota Provinsi NAD, September-November 2007

KDH/DPRD/Dinas/Badan/Meuligo, rumah dinas camat, dan kantor mukim/balee musyawarah). Untuk pembangunan kantor sub bidang hukum dan K3M, koordinasi pelaksanaannya sama dengan pembangunan kantor pemerintah, namun Donor/NGO hanya terlibat dalam pembangunan rumah dinas.

Mengenai koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan non fisik, tidak ditemui adanya kendala yang signifikan. Contohnya pada kegiatan pengembangan kapasitas dapat dilakukan oleh berbagai stakeholder (BRR maupun Donor/NGO). Hal yang perlu diperhatikan adalah adanya koordinasi antara BRR maupun Donor/NGO paling tidak dari sisi berbagi informasi agar pemberian bantuan kepada daerah lebih merata.

4.2.3 Bidang Multi Sektor

Lembaga yang bergerak di proyek multi sektor mempunyai sistem dan mekanisme tersendiri dalam koordinasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Seperti MDF yang dikelola oleh suatu Komite Pengarah yang diketuai bersama (co-chair) oleh kepala BRR, Kepala Delegasi Komisi Eropa (sebagai donor terbesar) dan Direktur Bank Dunia (sebagai trustee). Komite Pengarah mencakup para perwakilan dari para pemangku kepentingan utama termasuk berbagai lembaga pemerintah tingkat nasional dan daerah, para donor, komunitas masyarakat sipil, PBB dan LSM internasional. Komposisi yang luas dari para pemangku kepentingan rekonstruksi telah memungkinkan MDF untuk berperan sebagai suatu forum koordinasi donor dan dialog kebijakan. Pada berbagai rapat reguler dari Komite Pengarah, BRR dan komunitas pemulihan memberikan pelaporan atas kemajuan proses pemulihan tersebut. Rapat-rapat ini juga telah digunakan untuk membicarakan berbagai isu kebijakan seperti dampak inflasi, tertundanya pencairan anggaran pemerintah, integrasi gender dan pertimbangan lingkungan dan strategi untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Demikian juga dengan UNDP yang bekerjasama dengan IRC dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan hasil proyek peningkatan perekonomian melalui koperasi, seperti yang terjadi di Aceh Jaya UNDP menyarankan beberapa poin: 1) memperjelas mekanisme pengelolaan koperasi, 2) bekerjasama dengan pihak yang melakukan program serupa, dan 3) bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah. BRR telah mengalokasikan Rp. 9,7 M untuk enam Institusi Keuangan Mikro, diberikan melalui Disperindagkop.

4.3 ASPEK KONSULTASI

Aspek evaluasi berikutnya yaitu konsultasi pelibatan, keikutsertaan atau partisipasi publik pada berbagai forum dalam rangka menyerap aspirasi dan pandangan, baik dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Beberapa indikator yang dilihat pada aspek konsultasi ini yaitu tingkat partisipasi masyarakat, media partisipasi masyarakat dan ketersediaan dan kemudahan akses informasi bagi publik.

4.3.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan dan Pelaksanaan

4.3.1.1. Bidang Perumahan dan Permukiman

Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh BRR, Pemda, Donor/NGO diwujudkan dalam :

- Identifikasi penilaian kebutuhan
- Sosialisasi rencana kerja pembangunan

- Legitimasi komitmen perencanaan
- Pelibatan dalam pelaksanaan kegiatan
- Pelibatan dalam pengawasan dan evaluasi

Tingkat partisipasi masyarakat bidang pemulihan perumahan dan permukiman secara khusus mengulas mengenai salah satu kegiatan yang dilakukan. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Komunitas (RE-KOMPAK) merupakan kegiatan yang didanai melalui Bank Dunia dengan Departemen Pekerjaan Umum sebagai lembaga pelaksana. Kegiatan ini membangun kembali dan memperbaiki rumah di 188 desa dan kelurahan, serta menyediakan hibah bagi 125 komunitas untuk prasarana lokal. Melalui pendekatan berbasis komunitas, masyarakat terlibat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan. Legitimasi komitmen perencanaan diwujudkan dengan memanfaatkan struktur pembangunan dengan pendekatan berbasis komunitas yang didirikan oleh Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tercermin dalam pembinaan untuk melaksanakan pemetaan serta pengkajian kerusakan, untuk menetapkan kebutuhan konstruksi dan mengidentifikasi penerima manfaat.

Di bidang tata ruang, village mapping (perencanaan desa) dilakukan dengan prinsip berbasis masyarakat. Masyarakat melalui kegiatan ini memberikan informasi/gambaran mengenai kondisi desa dan dengan fasilitas konsultan maupun Donor/NGO mampu menampilkan rencana pengembangan desa di masa yang akan datang. Selain itu juga dapat memberikan informasi mengenai jenis dan lokasi perencanaan pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan.

Di bidang lingkungan hidup, Program Pengelolaan Limbah Tsunami yang diimplementasikan oleh UNDP dan Dinas DKP Banda Aceh salah satunya mendaftarkan para pemulung untuk memperoleh ijin memulung sampah di TPA Gampong Jawa. Program ini selain meningkatkan kapasitas Pemda dalam mengelola limbah, juga menciptakan kesempatan kerja dengan segera dan menjadikannya sebagai mata pencaharian untuk jangka yang lebih panjang.

4.3.1.2. Bidang Infrastruktur

Untuk mendukung pelaksanaan dan keberlangsungan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias, maka sangat diperlukan partisipasi masyarakat. Melalui partisipasi ini diharapkan bisa memberikan arah dan ketepatan sasaran program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan. Selain itu, langkah ini dapat mendorong proses percepatan pemulihan di wilayah pasca bencana. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh BRR, Pemda, Donor/NGO diwujudkan dalam :

- Identifikasi penilaian kebutuhan
- Sosialisasi rencana kerja pembangunan
- Legitimasi komitmen perencanaan
- Pelibatan dalam pelaksanaan kegiatan
- Pelibatan dalam pengawasan dan evaluasi

Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan diwujudkan dalam bentuk: identifikasi penilaian kebutuhan untuk merencanakan pembangunan jalan pedesaan, drainase lokal, dan proyek-proyek pedesaan. Keterlibatan dalam tahap evaluasi dan monitoring masih "terbatas" secara non formal dan diluar struktur kelembagaan. Masyarakat juga memberikan masukan-masukan berupa keluhan, saran dan pendapat

dari berbagai pertemuan, seperti konsinyering, rapat koordinasi sekretariat bersama, dan sebagainya.

Terdapat banyak kelemahan pengawasan kegiatan infrastruktur yang ada pada BRR seperti organisasi belum efektif, koordinasi masih lemah, pengawasan yang belum efektif serta law enforcement sangat lemah. Sehingga good governance dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan peran masyarakat sipil dalam mengawasi setiap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan aturan dan mekanisme khusus.

Program rekonstruksi berbasis masyarakat yang dikembangkan BRR, sebagai upaya pengembangan keterlibatan masyarakat dalam proses rekonstruksi, masih belum optimal. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur masih terbatas dan lebih besar diterapkan dalam program perumahan masyarakat dan perekonomian. Kesempatan masyarakat dalam proses pengawasan kualitas bangunan atau konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor juga terbatas karena masyarakat tidak mengetahui gambar dan bestek bangunan.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam masing-masing sub sektor akan dijelaskan sebagai berikut.

(1) Jalan dan transportasi

Masyarakat dapat terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan. Intensitas keterlibatan dalam pelaksanaan dapat dilakukan hampir di seluruh bidang jalan dan transportasi sudah mulai menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan sebagian kuantitas dan kualitas pekerjaan yang dicapai tenaga kerja lokal pada beberapa proyek atau kontraktor semakin menurun. Sehingga upaya mendatangkan sebagian tenaga dari luar Aceh semakin meningkat. Masyarakat sangat berharap fungsi pengawasan ditingkatkan terhadap lapisan aspal jalan retak/amblas dan lain-lain.

(2) Pos dan Telekomunikasi

Masyarakat sangat jarang terlibat dalam pembangunan prasarana teknologi informasi ini. Keterlibatan masih terbatas dalam hal pembangunan kantor saja dibawah koordinasi kontraktor.

(3) Energi dan Listrik

Kecenderungan masyarakat pada sub sektor energi listrik ini sangat kurang. Karena sebagian besar tenaga yang digunakan untuk pemulihan energi listrik adalah tenaga kerja yang sudah ada di bawah PLN.

(4) Sumber Daya Air

Masyarakat lebih banyak terlibat dalam pembangunan irigasi secara langsung. Beberapa kawasan di Aceh Besar masyarakat dilibatkan dari tahap awal, khususnya di daerah Blangmee. Sedangkan dalam bidang pengendalian banjir dan pengaman pantai, masyarakat terlibat sebagai tenaga kerja dari kontraktor.

(5) Fasilitas dan Bangunan Publik

Ini disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya pada penyiapan program dan disain, pengangkatan satker dan pengadaan material, kemampuan konsultan dan kontraktor

dan pengadaan tanah. Keempat kendala yang disebutkan diatas mengindikasikan masih lemahnya koordinasi diantara lembaga perencana. Kendala pada pengangkatan satker dan pengadaan serta kemampuan konsultan dan kontraktor mengindikasikan kelemahan dalam aspek kapasitas pelaksana di lapangan.

4.3.1.3. Bidang Sosial Budaya

Untuk mendukung pelaksanaan dan keberlangsungan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias, maka sangat diperlukan partisipasi masyarakat. Melalui partisipasi ini diharapkan bisa memberikan arah dan ketepatan sasaran program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan. Selain itu, langkah ini dapat mendorong proses percepatan pemulihan di wilayah pasca bencana. Tingkat partisipasi yang dilaksanakan Bapel RR pada tahap perencanaan bisa diwujudkan dalam bentuk identifikasi penilaian kebutuhan melalui kegiatan penelitian identifikasi kearifan lokal dalam membangun masyarakat kreatif, inovatif dan produktif. Masyarakat perlu dilibatkan bukan hanya pada waktu pelaksanaan kegiatan, tapi juga pada tahap evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan oleh Bapel RR.

Terkait dengan partisipasi masyarakat, BRR telah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan program. Hal ini terlihat dengan keterlibatan masyarakat pada penyusunan rencana aksi Nias tahun 2007-2009 pasca gempa tanggal 28 Maret 2005 pada bulan Juni 2007 di Kabupaten Nias dan Nias Selatan melalui acara konsultasi publik. Hal serupa juga dilanjutkan pada penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias tahun 2007-2009 melalui acara konsultasi publik di Banda Aceh dan Jakarta

4.3.1.4. Bidang Pemulihan Ekonomi

Dalam bidang pemulihan perekonomian, pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi masih belum optimal. Kurangnya partisipasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengakibatkan beberapa hal seperti: 1) Beberapa masyarakat penerima manfaat tidak mengembalikan pinjaman kredit yang dilakukan karena menganggap pinjaman sebagai hibah; 2) Ada image dari masyarakat bahwa dana pinjaman adalah sebagai hibah (ada sebagian masyarakat yang tidak mau mengembalikan). Padahal dana tersebut seharusnya dikembalikan agar terus bergulir ke penerima manfaat lainnya; 3) Sulit memonitor masyarakat yang mendapat dana pinjaman karena kondisi masyarakat yang masih belum menetap.

Aspirasi yang berasal dari masyarakat kepada pemerintah daerah mekanismenya yaitu melalui Musrenbang Daerah, yang diharapkan telah menyerap partisipasi masyarakat dari tingkat yang paling bawah yaitu Desa. Dalam musrenbang daerah tidak ada utusan khusus, tapi diwakili oleh mukim/ camat melalui pengiriman delegasi.

Pada tahun 2007 ini (di Kab. Bireun), BRR dan Donor/NGO lebih banyak melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dimana 50 % lebih banyak dari keterlibatan ditahun lalu. Sebagai contoh adalah keterlibatan masyarakat dalam membangun jaringan irigasi pertanian yang didanai oleh World Bank (Bank Dunia). Mulai dari pemilihan lokasi sampai dengan pembangunan, World Bank melibatkan masyarakat disetiap prosesnya. Begitu juga halnya dengan pengawasan, masyarakat ikut mengawasi berlangsungnya penyelesaian pembangunan tersebut. Jika terdapat penyelewengan masyarakat dapat melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

4.3.1.5. Bidang Kelembagaan dan Hukum

Untuk mendukung pelaksanaan dan keberlangsungan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias, maka sangat diperlukan partisipasi masyarakat. Melalui partisipasi ini diharapkan dapat memberikan arah dan ketepatan sasaran program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan. Selain itu, langkah ini dapat mendorong proses percepatan pemulihan di wilayah pasca bencana. Tingkat partisipasi pada tahap perencanaan dapat diwujudkan dalam bentuk identifikasi penilaian kebutuhan, pelaksanaan kegiatan, dan juga pada tahap pengawasan dan evaluasi.

BRR dan Donor/NGO sangat minim dalam melibatkan masyarakat dalam identifikasi penilaian kebutuhan karena BRR maupun Donor/NGO lebih banyak melibatkan aparat Pemda, hukum dan Polri dibandingkan masyarakat. Partisipasi masyarakat biasanya terlibat dalam merencanakan pembangunan sarana dan prasarana kantor kecamatan/desa/kelurahan dan balee musyawarah bersama kepala desa atau ketua kampung dalam musyawarah tingkat desa, sedangkan bangunan lainnya secara langsung melibatkan aparat Pemda, hukum maupun Polri. Keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan, pelaksanaan maupun evaluasi masih sangat terbatas. Masyarakat sangat berpartisipasi terutama pada penyelesaian masalah pembebasan tanah dan pembangunan fisik bangunan khususnya yang dilaksanakan di daerahnya. Selain itu masyarakat pada umumnya memberikan masukan-masukan berupa saran maupun kritik melalui pertemuan (rapat, forum koordinasi, seminar, workshop dan lain sebagainya).

Partisipasi masyarakat bidang kelembagaan dan hukum melalui peran lembaga agama, adat, dan sosial dinilai masih lemah. Dengan adanya program pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang dikembangkan oleh BRR serta kegiatan pengembangan masyarakat dan penyediaan fasilitator untuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat oleh Donor/NGO, diharapkan partisipasi lembaga agama, adat, dan sosial, serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias dapat terlaksana dengan lebih optimal.

4.3.2 Media Partisipasi Masyarakat Secara Langsung

4.3.2.1. Bidang Perumahan dan Permukiman

Media partisipasi masyarakat secara langsung diwujudkan pada:

- *Sistem atau mekanisme* yang dibangun untuk memfasilitasi konsultasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaan
- *Forum pertemuan* untuk mengakomodasi permasalahan, revisi perencanaan dan pelaksanaannya, serta pengawasan pelaksanaan
- *Pola fasilitasi* pendampingan yang dilakukan Pemda, lembaga perguruan tinggi, LSM/NGO, dan lembaga profesional lainnya
- *Ketersediaan dan kemudahan akses informasi* melalui media massa lokal, website, kotak pos pengaduan, dll.

Mekanisme yang dikembangkan dalam rekonstruksi pertanahan adalah melalui Ajudikasi Berbasis Masyarakat atau Community Driven Adjudication (CDA). Melalui CDA, masyarakat diikutsertakan dalam identifikasi objek tanah mereka dan klarifikasi data pertanahan. Kegiatan CDA ini sangat mendukung dalam pelaksanaan village mapping.

Salah satu mekanisme forum pertemuan yang telah dibangun untuk memfasilitasi publik dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang tata ruang adalah lokakarya. Pada tanggal 20 Februari 2007 telah diselenggarakan Lokakarya Koordinasi Perencanaan Desa Untuk Percepatan Pemulihan NAD-Nias di Banda Aceh. Lokakarya ini diselenggarakan hasil kerjasama BRR, GTZ-CAP, AIPRD-LOGICA, dan ADB-PT Macon. Dalam lokakarya ini dibahas persoalan teknis pelaksanaan village mapping, tata laksana koordinasi untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan, serta masukan untuk penyempurnaan pedoman perencanaan desa. Perwakilan warga desa yang bersangkutan diwakili oleh Keuchik desa yang bersangkutan.

Selain lokakarya, forum pertemuan warga yang dibentuk melalui kegiatan CAP (Community Action Planning) oleh GTZ- Cipta Aksi Partisipasi merupakan salah satu bentuk pola fasilitasi pendampingan masyarakat secara langsung dalam kegiatan perencanaan desa. Masyarakat dengan fasilitator menentukan prioritas perencanaan di desanya, masterplan (perencanaan teknis) dan strategi implementasi yang didukung secara finansial. Beberapa proses partisipasi masyarakat pada perencanaan desa ditunjukkan pada gambar berikut. Perencanaan ini termasuk lokasi pembangunan rumah dan prasarana dasar, serta fasilitas umum lainnya.

Gambar 4 - 1
Proses Penstrukturan Masalah Pada Kegiatan Perencanaan Desa



Sumber: Prosiding Lokakarya Koordinasi Perencanaan Desa Untuk Percepatan Pemulihan NAD-Nias, 2007

Gambar 4 - 2
Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Teknis Desa



Sumber: Prosiding Lokakarya Koordinasi Perencanaan Desa Untuk Percepatan Pemulihan NAD-Nias, 2007

Akses informasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat belum sepenuhnya bermanfaat. Pada umumnya aspirasi masyarakat disalurkan melalui surat pembaca dalam media massa lokal. Keterbatasan penggunaan internet di kalangan masyarakat pada akhirnya menjadi hambatan bagi seluruh pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

4.3.2.2. Bidang Infrastruktur

Media partisipasi masyarakat secara langsung dilakukan melalui konsultasi publik dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan diwujudkan dalam pelaksana pekerjaan (pekerja) di lapangan dibawah koordinasi kontraktor. Kegiatan lain melaksanakan pembangunan jalan pedesaan, drainase lokal, dan proyek-proyek pedesaan yang berbasis masyarakat.

Sistem atau mekanisme yang dibangun untuk masyarakat dalam konsultasi publik masih menggunakan "pendekatan partisipatif" yang digunakan untuk mengakomodasi permasalahan, revisi perencanaan dan pelaksanaannya, serta pengawasan pelaksanaan. Penerapannya sudah berjalan baik di hampir seluruh wilayah bencana. Pengambilan keputusan untuk memasukan masukan ini masih berada di BRR pusat dengan melihat beberapa prioritas, sehingga proses mekanisme ini sering kurang mendapat tanggapan dari BRR.

Keterlibatan masyarakat dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebar di seluruh sub sektor dan wilayah rehabilitasi rekonstruksi. Kontraktor pada umumnya menggunakan tenaga lokal untuk pekerjaan-pekerjaan fisik infrastruktur. Pola dan mekanisme dalam hal ini mengikuti pola yang diterapkan kontraktor. Dalam keterlibatan masyarakat secara langsung, pada proses pelaksanaan pemulihan jalan pedesaan, drainase lokal, sawah irigasi dan proyek pedesaan lain yang berbasis masyarakat dalam proyek BRR, BRR menggunakan "pola pendampingan" melalui P2KP.

Sementara itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik masih belum memiliki forum resmi. Media yang digunakan masyarakat dalam melakukan pengawasan masih terbatas dengan menggunakan media massa lokal, media elektronik lokal dan website.

4.3.2.3. Bidang Sosial Budaya

Di dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat diperlukan media atau sarana yang dipergunakan dalam menyampaikan berbagai aspirasi, masukan dan usulan dari seluruh lapisan masyarakat. Ada banyak bentuk media yang dapat dipergunakan dalam media partisipasi masyarakat, antara lain, forum pertemuan, pengaduan masyarakat, musyawarah, forum curah pendapat, dan bentuk media lainnya.

Partisipasi dalam bentuk pertemuan besar telah dilakukan dalam rangka peningkatan dinamika masyarakat pada konteks pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Bapel RR melalui kedeputian Agama, Sosial Budaya melaksanakan acara seminar internasional tentang budaya Aceh pada bulan Maret 2007 di Banda Aceh.

4.3.2.4. Bidang Pemulihan Ekonomi

Di dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat diperlukan media atau sarana yang dipergunakan dalam menyampaikan berbagai aspirasi, masukan dan usulan dari seluruh

lapisan masyarakat. Ada banyak bentuk media yang dapat dipergunakan dalam media partisipasi masyarakat, antara lain, forum pertemuan, pengaduan masyarakat, musyawarah, forum curah pendapat, dan bentuk media lainnya.

Hasil temuan lapangan Tim P3B Bappenas terkait dengan Media Partisipasi Masyarakat Secara Langsung pada bidang pemulihan perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Sekretariat Bersama antara Bapel BRR dengan pemda provinsi dan Kab/kota sebagai wadah penyatuan visi dan misi secara bersama termasuk penyelesaina masalah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan secara besama dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Akses informasi dan komunikasi untuk masyarakat tentang proses pembangunan, seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dilakukan melalui papan pengumuman, melalui media “Serambi Indonesia” dan disiarkan juga melalui media center pemda.
3. Penyerapan aspirasi masyarakat (di Kab.Aceh Singkil) dilakukan melalui Proposal masyarakat yang diserahkan kepada BRR distrik. Selanjutnya Proposal usulan masyarakat tersebut dirapatkan pada forum Sekber bersama-sama antara BRR, Pemerintah Daerah dan Lembaga Donor/NGO. Jika diputuskan usulan masyarakat tersebut layak maka akan diteruskan usulannya kepada BRR pusat di Banda Aceh untuk dimasukkan dalam RKA-KL BRR pada tahun selanjutnya.

4.3.2.5. Bidang Kelembagaan dan Hukum

Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat diperlukan media atau sarana yang dipergunakan dalam menyampaikan berbagai aspirasi, masukan dan usulan dari seluruh lapisan masyarakat. Media partisipasi masyarakat pada bidang kelembagaan dan hukum tersebut diantaranya :

- Musrenbang di tingkat kecamatan, namun daerah belum memiliki utusan khusus, tetapi hanya diwakili oleh mukim/ camat melalui pengiriman delegasi yang mewakili setiap desa/ kecamatan
- Forum koordinasi kecamatan yang terdiri dari kumpulan masyarakat , aparat desa, Donor/NGO, BRR dan pemerintah level kecamatan maupun kabupaten/kota. Forum tersebut merupakan tempat berinteraksi, bertukar informasi dan mencari solusi setiap permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya pada bidang kelembagaan dan hukum, isu yang dibahas yaitu masalah pembangunan kantor
- Konsultasi dengan masyarakat dilakukan melalui proposal masyarakat yang diserahkan kepada BRR regional/distrik, kemudian proposal tersebut dibahas ketika rapat Sekretariat Bersama apakah usulan masyarakat tersebut layak untuk diteruskan usulannya kepada BRR pusat di Banda Aceh.
- Pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada BRR dengan tembusan kepada Pemda terkait, namun keputusan tidak selalu ada di Pemda.

Media partisipasi dalam proses pengawasan masih terbatas yaitu melalui media massa, media elektronik dan website.

4.3.3 Ketersediaan Dan Kemudahan Akses Informasi Bagi Publik

Hal yang terpenting lain dalam partisipasi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu masalah ketersediaan dan kemudahan akses informasi bagi publik. Form pengaduan dari masyarakat melalui media cetak terutama melalui penerbitan tabloid *Seumangat* dan *Ceureumen*, salah satu bentuk penyediaan dan kemudahan untuk memperoleh informasi bagi masyarakat luas yang telah disediakan oleh Bapel RR, yang menceritakan perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NAD dan Nias. Tabloid ini merupakan garda terdepan dalam penyampaian informasi kegiatan Bapel RR ke para pembacanya yang terdiri dari stakeholders yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Nias.

Selain media cetak, akses informasi juga disediakan melalui informasi dan data yang diperoleh melalui RAN Data base melalui internet, namun hanya sedikit informasi yang bisa diperoleh.

Namun berbeda halnya dengan kemudahan dan ketersediaan akses informasi bagi publik tentang perkembangan program reintegrasi di NAD. Hingga saat ini Lembaga BRA masih menggunakan peran setiap BRA Kabupaten/ Kota sebagai sarana konsultasi dan pengaduan tentang berbagai informasi yang berkembang selama proses reintegrasi. Termasuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi hingga menjadi masukan yang akan dibahas dalam forum bersama. Alat komunikasi yang digunakan masih melalui media komunikasi telepon manual dan selular.

4.3.4 Bidang Multi Sektor

Pada tingkat konsultasi untuk multi sektor dalam proses rekonstruksi, juga dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan. Pendekatan pemberdayaan menempatkan korban dengan berbagai kemampuan dan kapasitasnya, sehingga taksiran kebutuhan dilakukan dengan seksama dengan tetap memperhatikan kapasitas lokal. Pendekatan berbasis masyarakat ini diterapkan oleh sejumlah NGO, seperti UN Habitat, Uplink, World Vision, Oxfam, P2KP melalui Multi Donor Fund (MDF). Disini masyarakat diberi peran yang besar melalui pembentukan kelompokswadaya. Seperti proyek pembangunan rumah UN Habitat dan World Vision yang melibatkan partisipasi masyarakat telah memuaskan warga, dengan realisasi hampir 100%.

Demikian juga dengan proyek P2KP (Proyek Pembangunan Kecamatan dan Pemukiman) dari MDF di desa Gampong Jawa, Kutaraja, dan Desa Punge Ujong. Namun demikian pendekatan partisipatif juga cukup berhasil dalam bantuan rumah UN Habitat di Geunteng Timu, Kec. Batee; German Agra Action (GAA) di Desa Keude Panteraja; Oxfam di Desa Sagou, Kec. Trienggadeng, dan Church World Service (CWS) di Desa Meue, Trienggadeng dan UNDP di Kota Sigli, semuanya berada di Pidie.

Sehingga peran masyarakat melalui sistem yang melibatkan komunitas memang bukan jaminan. Seperti bantuan rumah UN-Habitat di Desa Peurade, Panteraja, Pidie yang dilaksanakan oleh Kelompok Pengerjaan Rumah (KPR) tidak bisa diselesaikan seperti diharapkan akibat membengkaknya harga material. Yang mengakibatkan, puluhan warga Desa Rawa Gampong, Buangan, Meurah Dua, Pidie juga mempersoalkan bantuan UN-Habitat. Masalah yang hampir sama juga terjadi di Setia Bakti dan Sampoiniet, Aceh Jaya meski akhirnya bisa diselesaikan secara musyawarah.

4.4 ASPEK KAPASITAS

Aspek terakhir dari fokus evaluasi ini yaitu aspek kapasitas yaitu kemampuan kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan sumber pendanaan, yang didayagunakan dalam melaksanakan berbagai upaya perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi. Secara garis besar pada aspek kapasitas disajikan dua indikator yaitu *kapasitas kelembagaan* dan *kapasitas Sumber Daya Manusia*.

4.4.1 Aspek Kapasitas Kelembagaan

4.4.1.1. Bidang Perumahan dan Permukiman

(1) Kelembagaan BRR

Aspek kapasitas kelembagaan khusus bidang perumahan ditinjau dari realisasi penyerapan anggaran DIPA BRR untuk TA 2006 dan 2007 untuk bidang terkait:

1. Realisasi DIPA BRR TA 2006 hingga 28 Desember 2006 sebesar Rp 3,2 triliun atau 74,68 % dari anggaran sejumlah Rp 4,3 triliun.
2. Realisasi DIPA BRR TA 2007, realisasi keuangan hingga 31 Oktober 2007 sebesar Rp 1,4 triliun atau 42,15 %. dari pagu sebesar Rp 3,4 triliun

Realisasi DIPA 2006 yang sudah di atas 50 % menunjukkan kapasitas manajemen kelembagaan yang sudah baik. Sementara untuk DIPA 2007, hambatan pelaksanaan di lapangan yang demikian besar membuat realisasi penyerapan anggaran juga terhambat.

Permasalahan yang cukup dominan terkait kapasitas kelembagaan Bapel RR dalam pelaksanaan pekerjaan melalui satker-satkernya adalah kapasitas pengendalian pelaksanaan kegiatan, dalam hal ini kapasitas dalam pelaporan keuangan, penerapan sanksi, dan administrasi kontrak. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern pada Laporan Keuangan BRR NAD-Nias TA 2006 yang disusun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanggal 23 April 2007 menyebutkan di antaranya yang terkait bidang perumahan dan permukiman:

- Penyajian persediaan data pada Satuan Kerja Pengembangan Perumahan dan Permukiman NAD Wilayah III senilai Rp 252.744.571.000,00 tidak tepat. Nilai persediaan ini dicatat berdasarkan nilai realisasi belanja bantuan sosial sampai dengan 31 Desember 2006. Hasil pemeriksaan dan uji petik atas dokumen kontrak, laporan realisasi fisik dan keuangan pada masing-masing PPK ternyata nilai persediaan yang dicantumkan di neraca Satker dinilai berdasarkan nilai realisasi kontrak awal. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut oleh BPK, diperoleh kesimpulan bahwa seharusnya nilai persediaan yang seharusnya tercantum dalam neraca adalah sebesar Rp 118.597.667.328,00 dan persediaan yang telah diserahkan kepada masyarakat seharusnya diungkapkan pada catatan atas Laporan Keuangan Satker. Hal ini tidak sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.64/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BRR NAD-Nias. Temuan ini mengindikasikan Satker Pengembangan Perumahan dan Permukiman NAD Wilayah III belum memahami prosedur pencatatan persediaan di neraca dan lemahnya pengendalian intern dari Direktorat Akuntansi BRR NAD-Nias.
- Perikatan perjanjian pemberian bantuan dana rumah yang dikelola satker BRR-Perumahan dan Pemukiman NAD MDTF lemah secara hukum. Berdasarkan hasil analisa BPK terhadap mekanisme pencairan dana hibah perumahan MDTF dan naskah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Rumah (SPP-BDR), diketahui bahwa ketentuan perjanjian belum dilengkapi mekanisme sanksi dalam hal Kelompok Pemukim tidak dapat menyelesaikan perjanjian. Hal ini mengakibatkan perjanjian SPP-BDR lemah secara hukum. Selain itu, perjanjian tersebut juga hanya dilakukan atau ditandatangani oleh pihak penanggung jawab operasional kegiatan dengan anggota kelompok pemukim, dan sama sekali tidak melibatkan kuasa Pengguna

Anggaran dan atau Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pejabat yang berwenang atas terjadinya pengeluaran anggaran. Demikian pula, tidak terdapat hubungan formal antara penanggung jawab operasional kegiatan dengan kuasa penggunaan anggaran. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip bahwa surat perjanjian seharusnya memuat mekanisme sanksi yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern pengamanan atas kegiatan (safeguarding activity), dan tidak mengikursertakannya pejabat yang berwenang mengakibatkan terjadinya pengeluaran anggaran tidak sesuai dengan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Administrasi dan Addendum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type 36 tidak tertib. Pada TA 2006, Satker BRR-Pengembangan Perumahan dan Permukiman NAD Wilayah I telah menunjuk rekanan pemborong pekerjaan pembangunan perumahan type 36 sebanyak 214 rekanan, yaitu 19 rekanan yang melaksanakan pekerjaan dari dana hibah ADB dan 195 rekanan yang melaksanakan pekerjaan dari dana APBN Moratorium. Berdasarkan hasil analisis BPK, penyelenggaraan administrasi kontrak yang bersumber dari dana hibah ADB belum menyelenggarakan addendum kontrak secara tertib. Addendum kontrak tidak berdasarkan alasan rasional (jangka waktu diubah berkisar antara 120 sampai 300 hari) dan cenderung hanya sebagai formalitas untuk memberikan toleransi atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Demikian juga untuk pekerjaan dari dana moratorium APBN, terdapat 2 (dua) kontrak yang diaddendum setelah kontrak berakhir, di mana hal ini tidak sesuai dengan prinsip kepastian jangka waktu kontrak sebagaimana diatur pada masing-masing kontrak, dan tidak sesuai dengan prinsip pengendalian intern yang memadai berupa perencanaan yang baik.

Terkait dengan kapasitas kelembagaan BRR pada bidang pertanahan, lemahnya koordinasi masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi. Lemahnya koordinasi ini terlihat dari kurangnya komunikasi dengan para pelaku kegiatan pertanahan.

(2) Kelembagaan Pemerintah Daerah

Kapasitas Pemda dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan dan permukiman, tata ruang, dan lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemda adalah dengan pelibatan Pemda dalam pengawasan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, seperti di Kab. Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.

Mengenai kapasitas Pemda dalam melanjutkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya dalam bidang perumahan, tata ruang, pertanahan, dan lingkungan hidup, seperti yang telah diuraikan pada bab 3 dan bab 4 ini sebelumnya, kapasitas Pemda dalam hal alokasi pendanaan sangat minim. Hal ini perlu tindak lanjut melalui dukungan alokasi anggaran dan juga perencanaan kegiatan. Keikutsertaan Pemda dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara keseluruhan belum begitu signifikan.

4.4.1.2. Bidang Infrastruktur

(1) Kelembagaan BRR

Secara umum, telah terjadi peningkatan kapasitas kelembagaan dalam organisasi BRR. BRR mulai berupaya meningkatkan efektifitas kerja kelembagaan dengan melakukan perubahan untuk merespon regionalisasi BRR. Wujudnya seperti restrukturisasi atau perampingan organisasi proyek disertai peningkatan pengendalian proyek dan kegiatan yang lebih besar. Pengurangan diberlakukan terhadap staf dan tenaga ahli yang telah dievaluasi berdasarkan performa dan kebutuhan. Kelemahan masih dijumpai dalam sistem pelaporan yang masih tidak terbuka dan tidak transparan.

Mekanisme perencanaan kegiatan infrastruktur dalam lingkungan BRR selalu melalui kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh konsultan. Beberapa diantaranya didahului dengan studi kelayakan terlebih dahulu sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama, seperti perencanaan bandara dan pelabuhan. Untuk proyek kegiatan fisik yang berasal dari Donor/NGO, kegiatan perencanaan hampir selalu didahului dengan studi kelayakan yang lebih komprehensif. Konsultan yang digunakan berasal dari konsultan lokal dan luar.

Secara umum, standar perencanaan yang digunakan untuk perencanaan proyek fisik oleh para konsultan mengacu kepada standar nasional dan internasional tentang bangunan dan konstruksi. Standar-standar lain untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan dan keterbatasan sumber daya juga dikeluarkan oleh instansi terkait, seperti Departemen PU, juga digunakan, khususnya dalam pembangunan jalan atau bangunan umum dengan ketahanan gempa tertentu. Kelemahan yang sering dijumpai adalah masih kuatnya mind-set budaya di antara para perencana dan pelaksana proyek yang telah terpatrit dengan “pendekatan proyek”. Sehingga penerapan standar kualitas tinggi tidak dengan gampang terlaksana.

Untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, BRR lebih mempertegas aturan dan pendetailan spesifikasi terhadap proyek fisik yang akan dilakukan oleh rekanan/kontraktor. Penindakan yang dilakukan BRR, berkaitan dengan pelanggaran di lapangan maupun organisasi, salah satunya dengan memutuskan kontrak dengan rekanan/kontraktor dan beberapa pejabat atau mantan pejabat proyek BRR yang terlibat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku atau pemberian status *black list*. Berbagai kepentingan kelompok maupun perorangan masih sangat kuat, sehingga masih ada tindak penyelewengan terhadap proyek fisik yang berakibat pada tidak selesainya proyek fisik, seperti jalan, jembatan, perpanjangan runway bandara, pelabuhan, irigasi dan pengendalian banjir.

Dalam hal pengawasan kegiatan infrastruktur, terdapat pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Untuk pengawasan internal, BRR memiliki Unit Pengawasan Internal (UPI) dan Satuan Anti Korupsi (SAK) yang kini merupakan bagian alat dari dewan pengawas BRR. Mereka memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sebuah proyek, mulai dari proses perencanaan hingga berakhirnya masa proyek. Mereka juga menerima pengaduan dari pengawasan masyarakat dan memprosesnya. Untuk pengawasan eksternal, dilakukan oleh BPK, KPK, BPKP, Bawasda dan lembaga penegak hukum lainnya. Pengawasan ini secara rutin dilaksanakan pada setiap program dan proyek. Dengan demikian, kontrol dan pengendalian terhadap praktek KKN saat ini sebenarnya sudah sangat kuat. Namun penerapannya masih belum berjalan dengan baik akibat masih ada oknum yang tidak peduli dengan mekanisme tersebut. Hal ini mengindikasikan sistem pengawasan internal belum berjalan dengan baik di lingkungan BRR.

Salah satu contoh kasus di lapangan adalah banyak alat berat bantuan NGO asing yang belum diletakkan di lapangan tanpa masuk ke tempat penyimpanan. Sehingga banyak alat berat yang dihibahkan ke pemerintah daerah (SKPD). Hal ini ternyata menimbulkan penyelewengan berupa bentuk komersialisasi alat atau aset dari hibah NGO asing dan BRR yang disewakan kepada pihak ketiga oleh SKPD setempat. Pada umumnya, penyerahan aset rehab-rekon dari NGO dan BRR harus melalui kelembagaan BRR. Sehingga perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pengelolaan aset tersebut.

Selain itu, pada pelaksanaan kegiatan fisik rekanan/kontraktor di lapangan juga dilakukan pengawasan kegiatan fisik oleh konsultan pengawas. Kinerja sebagian besar rekanan pengawas dan PPK masih belum optimal dan sering dijumpai belum tidak konsisten dalam beberapa supervisi proyek fisik. Sistem pelaporan tidak berlangsung dengan normal, dan penyerapan anggaran sering terkonsentrasi di masa terakhir

pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan output pekerjaan masih belum berjalan dengan baik. Untuk mendukung upaya pengawasan yang baik terhadap kelancaran progres fisik, tidak hanya pengawasan dari konsultan/rekanan tapi juga sangat dibutuhkan pentingnya peningkatan peran pengawasan dari masyarakat dan peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan kerja.

Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern tahun Anggaran 2006 berdasarkan Laporan BPK, 23 April 2007 :

- a. Kelemahan sistem pengendalian intern penyusunan laporan keuangan BRR NAD-Nias tahun Anggaran 2006
- b. Kelemahan sistem pengendalian intern atas pengelolaan kas pada satker-satker BRR NAD-Nias tahun Anggaran 2006
- c. Pengelolaan barang milik negara BRR NAD-Nias tidak berdasarkan SPI yang memadai
 - Satker sekretariat keuangan, komunikasi dan informasi
 - Satker pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial NAD
 - *Satker rehabilitasi dan rekonstruksi jalan kabupaten Bireun*
 - Satker BRR rumah MDTF
 - Satker BRR - produksi tanaman pangan (PTP) NAD
 - Satker BRR - Produksi tanaman pangan NAD
 - Satker BRR - pengelola pertanahan NAD-Nias
 - *Satker Irigasi NAD*
 - BRR peningkatan pelayanan kesehatan NAD
 - BRR - peternakan NAD
- d. Belanja barang digunakan untuk pembelian aktiva tetap dan pembangunan fisik serta belanja modal digunakan untuk pemberian bantuan sebesar Rp. 15.475.792.320,00.
 - Satker sekretariat, keuangan, komunikasi dan informasi
 - Satker pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial NAD
 - *Satker rehabilitasi dan rekonstruksi jalan Banda Aceh*
 - Satker koperasi dan usaha kecil NAD
- e. Penyajian persediaan pada satuan kerja pengembangan perumahan dan permukiman NAD wilayah III senilai Rp. 252.744.571.000,00 tidak tepat
- f. Perikatan perjanjian pemebrian bantuan dana rumah yang dikelola satker BRR - perumahan dan permukiman NAD MDTF lemah secara hukum
- g. Verifikasi kelengkapan tagihan kontrak konsultan manajemen wilayah belum dilaksanakan secara taat dan tertib
- h. Administrasi dan addendum kontrak pekerjaan pembangunan perumahan type 36 tidak tertib

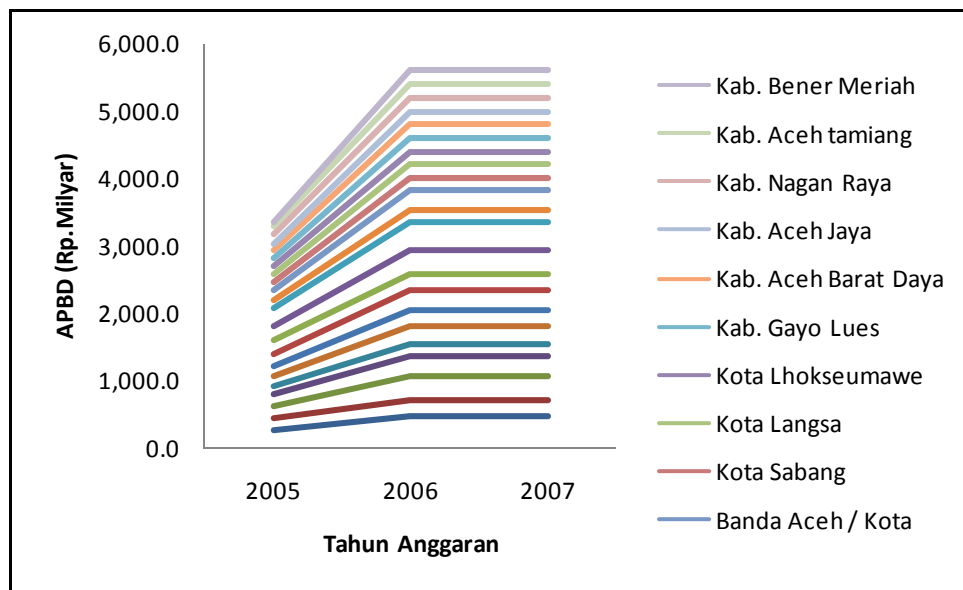
(2) Kelembagaan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah yang menangani bidang infrastruktur adalah Bappeda yang secara umum mengkoordinasikan perencanaannya serta dinas kimpraswil atau pekerjaan umum dan dinas perhubungan yang secara khusus menangani kegiatan sektoral.

Pemerintahan di NAD-Nias sedang berusaha mengkoordinasikan upaya-upaya pemulihan. Namun, ketersediaan sumber daya fisik dan manusia yang compatible untuk kegiatan infrastruktur dalam jajaran PNS pemerintah daerah masih terbatas.

Pada tahun anggaran 2008, Pemda NAD mempunyai anggaran sekitar Rp 8 trilyun, angka ini 2 kali lebih besar dibanding tahun 2007 dan 4 kali dibanding tahun 2006. Alokasi dan perencanaan tahun anggaran 2006 dan 2007 R-APBD masing-masing kabupaten/kota di Provinsi NAD mengalami peningkatan sampai 72,6% dari tahun anggaran 2005. Prosentase alokasi anggaran yang digunakan untuk infrastruktur berkisar 25%, dan hanya < 5% yang berfokus pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Grafik 4 - 43
Prosentase Alokasi Anggaran



Peningkatan APBD infrastruktur sangat membutuhkan pengelolaan dan kemampuan kelembagaan dan manajerial pemerintah daerah yang baik. Secara kelembagaan, saat ini pemda masih memiliki kendala dalam beberapa hal, terutama pemda kabupaten/kota kecil atau yang memiliki APBD rendah, adalah sebagai berikut :

- o Sistem perencanaan masih lemah,

Kurang optimalnya penerapan regulasi sebagai mekanisme pengaturan. Meliputi peraturan perundang-undangan termasuk kepegawaian, norma, standar dan prosedur teknis pelaksanaannya. Regulasi infrastruktur yang diciptakan di NAD-Nias sebagian besar masih

- o Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas,

Keterbatasan sumber daya manusia dalam organisasi Pemerintah daerah yang kompeten dalam bidang infrastruktur. Sehingga pemerintah daerah harus mendatangkan kosultan atau pendamping dari luar untuk mengisi hal tersebut. Padahal alokasi pendanaan untuk hal itu masih sangat terbatas.

- o Pendanaan yang masih terbatas,

Keterbatasan anggaran menyebabkan upaya untuk meningkatkan SDM menjadi terbatas. Sehingga *up-grading* tidak dapat dilakukan dalam waktu yang cepat.

- o Manajerial yang masih belum tertata dengan baik

Birokrasi sumber daya aparturnya maupun kelembagaannya di NAD-Nias masih belum tertata dengan baik. Masih adanya pergantian struktur manajemen SKPD di beberapa daerah, seperti kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya, menyulitkan birokrasi dalam pelaksanaan kegiatan terutama dalam proses peralihan.

Untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan diatas, saat ini BRR dan Donor/NGO sedang melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui pelatihan, seminar, pendampingan secara langsung, dan sebagainya. Dengan demikian, peningkatan alokasi anggaran yang signifikan dengan didukung proses peningkatan kapasitas dari pihak luar mengindikasikan bahwa daerah mulai memiliki

kemampuan finansial yang baik dan kelembagaan yang mulai kuat untuk melanjutkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca mandat BRR 2009.

4.4.1.3. Bidang Sosial Budaya

Secara umum kelembagaan di bidang sosial budaya BRR telah mengalami peningkatan dari tahun pertama rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah upaya yang dilakukan melalui meningkatkan koordinasi dan konsultasi antar stakeholders yang terkait sesuai bidang kerja sehingga tumpang tindih program antar stakeholder bisa diminimalisir. Dalam rangka pemahaman program dan kegiatan yang akan dilaksanakan juga telah dilaksanakan melalui standar perencanaan melalui *need assessment* kepada masyarakat sebagai sasaran program dan melakukan crosscheck dengan pemerintah setempat. Untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan diinternal BRR dilaksanakan melalui laporan mingguan dari satker kepada manajer bidang masing-masing bidang terkait. Walaupun mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih terdapat kualitas pekerjaan di bidang sosial budaya dibawah standar di internal BRR, namun kadang terjadi kualitas yang minim dan tidak sesuai jadwal oleh pihak ketiga atau kontraktor.

Laporan Keuangan Badan rehabilitasi Rekonstruksi NAD-Nias Tahun Anggaran 2006 per tanggal 16 April 2007

- Pembangunan gedung Sekolah Dasar Negeri nomor 0772884 Fararo Zai di kecamatan Lahewa Kab Nias Selatan yang dilaksanakan oleh CV Titian Baru sesuai dengan kontrak selesai tanggal 11 Oktober 2006. berdasarkan laporan kegiatan satker posisi per 31 Desember 2006 realisasi keuangan baru 30% dari nilai kontrak dan realisasi fisik baru mencapai 10.8 %. Sampai berakhirnya pemeriksaan tanggal 10 April 2007 PHO belum dilaksanakan atau terlambat 111 hari dari rencana PHO yaitu tanggal 20 Desember 2006.
- Pembangunan Puskesmas Rawat jalan Ttype 135 M di Kabupaten Nias berdasarkan kontrak selesai tanggal 11 Oktober 2006 dengan jangka waktu kerja 70 hari. Dari laporan Satker per tanggal 30 desember 2006 realisasi keuangan baru sebesar 45%. Keterlambatan selama 112 hari.

Kelembagaan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan kegiatan pembangunan reguler dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang sosial budaya di NAD dan Nias dilaksanakan oleh sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan yaitu melalui musyawarah rencana pembangunan daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh dinas terkait. Pada aspek koordinasi pelaksanaan pembangunan terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dinas terkait melakukan koordinasi bersama BRR dan donor/NGO. Secara umum dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota terkait dalam bidang sosial selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi mekanisme koordinasi perencanaan, pelaporan dan pengawasan berjalan dengan lancar sesuai prosedur dan mekanisme.

Dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca keberadaan BRR tahun 2009, secara umum pemerintah daerah masih perlu didukung dari aspek pendanaan mengingat masih banyaknya kegiatan pembangunan terutama pembangunan fisik belum bisa diselesaikan pada masa BRR. Beberapa daerah seperti Aceh Jaya, Aceh Singkil dan Pidie masih mengalami defisit pada APBD.

Secara umum pelaksanaan pembangunan di NAD dan Nias berjalan sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing SKPD terkait. Namun pada proses pelaksanaannya masih perlu peningkatan dalam skill dan manajemen. Sistem pelaporan dan manajemen belum terintegrasi secara baik. Beberapa kabupaten seperti Aceh Jaya, Aceh Singkil, Kabupaten Nias dan Nias Selatan masih diperlukan dukungan dan support untuk peningkatan kapasitas SDM.

Keterlibatan SDM pemerintah daerah dalam satuan kerja BRR merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam proses peningkatan kapasitas SDM. Keterlibatan SDM pemda pada umumnya diwakili oleh kepala dinas tidak berdampak pada peningkatan kapasitas staf institusi yang diwakili karena belum adanya proses transfer keilmuan.

4.4.1.4. Bidang Pemulihan Ekonomi

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari: Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, Deputi Bidang Pengawasan, Deputi Bidang Keuangan dan Perencanaan, Deputi Bidang Operasi, Deputi Bidang Agama, Sosial, dan Budaya, Deputi Bidang Ekonomi dan Usaha, Deputi Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Peran Perempuan, Deputi Bidang Perumahan dan Permukiman, Deputi Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan, dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, adalah dalam rangka mengantisipasi kelambatan dan permasalahan di lapangan, sehingga BRR dapat menunjukkan kinerja yang lebih optimal.

4.4.1.5. Bidang Kelembagaan dan Hukum

4.4.1.5.1 Kelembagaan BRR

Mekanisme perencanaan kegiatan kelembagaan dan hukum oleh Bapel BRR, yaitu akan didahului dengan survey/kajian terhadap kebutuhan kelembagaan suatu daerah sehingga tidak semua sarana dan prasarana kantor pemerintahan, hukum maupun K3M yang diusulkan oleh daerah akan dibangun, melainkan akan dikaji terlebih dahulu. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan organisasi yang ramping tetapi telah mampu melakukan fungsi dan tugas sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Hal yang mengherankan adalah usulan kegiatan bidang kelembagaan yang selama ini diusulkan oleh daerah hanya terbatas pada output pembangunan fisik, padahal bidang kelembagaan bukan hanya menyangkut pembangunan fisik saja.

Mekanisme pengawasan oleh konsultan BRR terdiri dari pihak yang membangun (kontraktor) dan pengawas. Untuk bangunan kantor maupun rumah dinas, Kedeputan kelembagaan dan pengembangan SDM BRR rutin melaksanakan kegiatan monitoring terhadap bangunan tersebut, apabila ditemui adanya bangunan yang tidak sesuai dengan standar akan langsung dilaporkan kepada konsultan pengawas agar segera diperbaiki. Agar pengawasan berjalan maksimal, selain oleh BRR sangat diperlukan pengawasan oleh masyarakat agar kelancaran pembangunan fisik dapat berlangsung dengan lancar.

Berdasarkan laporan anggaran BRR per 30 November 2007 dapat diketahui, kapasitas penyerapan anggaran untuk bidang kelembagaan dan hukum sekitar 50 persen. Penyerapan ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, rincian penyerapan anggaran tersebut sebagai berikut:

1. Anggaran DIPA 2006 sebesar Rp. 1.027.536.594.000,00 dan penyerapan anggaran mencapai Rp. 563.738.247.000,00 (54,86 persen)
2. Anggaran DIPA 2007 sebesar Rp. 681.259.987.000,00 dan penyerapan anggaran hingga 30 November 2007 mencapai Rp. 318.131.287.000,00 (46,70 persen)

Penyerapan dana yang belum mencapai 100 persen ini menggambarkan terjadinya kendala di lapangan yang menghambat penyerapan anggaran dan realisasi fisik,

diantaranya penyediaan dan pembebasan tanah dari pemerintah daerah, RDTR belum diterbitkan, jangka waktu pelaksanaan pembangunan fisik tidak mencukupi, dan beberapa kontraktor pelaksana tidak melanjutkan/menyelesaikan pekerjaannya.

4.4.1.5.2 Kelembagaan Pemerintah Daerah

Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dalam melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dikatakan belum siap, hal ini dapat dilihat pendanaan yang terbatas. Pada tahun 2006 maupun 2007, kontribusi Pemda dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya di bidang kelembagaan dan hukum sangat kecil. Jika dilihat secara keseluruhan, kegiatan pendukung rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi perhatian terbesar Pemda untuk bidang kelembagaan, hukum dan K3M sekitar 0-5 persen dari total APBD. Salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemda yaitu perlunya tambahan/suntikan dana demi kelancaran pembangunan NAD dan Nias di masa yang akan datang.

4.4.2 Aspek Kapasitas Sumber Daya Manusia

4.4.2.1. Bidang Perumahan dan Permukiman

(1) Sumber Daya Manusia BRR

Ditinjau dari jumlah satker BRR bidang perumahan, terdapat perbedaan antara tahun 2006 dan 2007, di mana satker pada tahun 2006 berjumlah 15 satker dan 26 satker untuk tahun 2007. Kebutuhan sumber daya manusia ini disesuaikan dengan meningkatnya intensitas kegiatan pembangunan perumahan di tahun 2007. Keterbatasan SDM Satker BRR dalam menangani volume pekerjaan yang tinggi juga menjadi persoalan tersendiri. Regionalisasi maupun restrukturisasi yang telah dilakukan belum sepenuhnya menjawab tantangan yang ada, bahkan yang terjadi pada beberapa kasus, regionalisasi dipandang sebagai perpanjangan birokrasi.

Dari segi kontraktor pelaksana, mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern pada Laporan Keuangan BRR NAD-Nias TA 2006 yang disusun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanggal 23 April 2007, sebagian besar kontraktor pelaksana pembangunan khususnya yang berasal dari dana hibah ADB, tidak menepati ketentuan penyelesaian pekerjaan seperti yang tercantum dalam kontrak.

(2) Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah

Sumber daya Pemerintah Daerah di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias secara bertahap tengah mengalami peningkatan, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Restrukturisasi satker pada beberapa contoh kasus dilakukan dengan merekrut tenaga teknis dari Dinas Kimpraswil, seperti di Kab. Aceh Besar. Dinas dalam hal ini dilibatkan pada bantuan teknis. Namun demikian, untuk keseluruhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, aparat Pemda pada umumnya belum mengetahui secara menyeluruh mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Mekanisme yang telah dibangun untuk terjadinya proses transfer informasi ini kurang didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Pemda itu sendiri.

4.4.2.2. Bidang Infrastruktur

(1) Sumber Daya Manusia BRR

Personil Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari SDM dari beragam latar belakang baik dari pegawai negeri sipil maupun swasta. Hal ini menggambarkan heterogenitas sehingga berdampak pada banyaknya perbedaan sikap dan sudut pandang dalam menyikapi suatu masalah.

Perubahan pada struktur organisasi Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah membawa dampak pada ketidakjelasan pada pola koordinasi antar unit kerja, sehingga menyebabkan kebingungan bagi pelaksana pada saat terjadi perubahan khususnya pada level satker. Standar Operasi dan Prosedur (SOP) yang telah dibakukan oleh pihak manajemen belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masing-masing satker.

Keterbatasan SDM dari Satker BRR dalam mengatur besarnya volume pekerjaan yang melonjak tinggi juga menjadi masalah. Hal tersebut di atas membuktikan adanya kekurangan dalam aspek kapasitas SDM yang tersedia. Terdapat banyak kerawanan yang membutuhkan perhatian dan mekanisme kontroling yang memadai.

Kemampuan kontraktor dan konsultan lokal dari segi keahlian, dana, dan metode, sering tidak sebanding dengan beban pekerjaan infrastruktur dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Beberapa diantara mereka masih memiliki latar belakang dan pengalaman diluar bidang konstruksi, bahkan diantaranya berasal dari pengusaha dengan dasar pendidikan di luar konstruksi. Sangat minimnya kualitas tenaga terampil dan minimnya jumlah tenaga terampil untuk membangun infrastruktur yang harus memenuhi konstruksi tahan gempa/bencana, menyebabkan rendahnya hasil infrastruktur bangunan yang dibangun.

Kebijakan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias belum sepenuhnya tepat dan belum dikomunikasikan kepada Satker BRR. Hal ini terlihat bahwa pelimpahan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran APBN-P dan Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada Satker belum tepat.

Pengorganisasian pelaksana program rehabilitasi rekonstruksi NAD-Nias belum optimal. Fungsi Bapel sebagai koordinator kegiatan rehabilitasi rekonstruksi belum terlaksana dengan baik. Kinerja Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi tidak sebanding dengan renumerasi yang diterima. Struktur organisasi, dokumen rencana dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan belum disahkan. Dan pelaksanaan pekerjaan pada beberapa Satker tidak didukung dengan pengawasan.

Beberapa evaluasi terhadap kinerja SDM serta tindakan perbaikan dan pembinaan SDM BRR adalah sebagai berikut.

- kewenangan Bapel kepada Satker,
- Sosialisasi atau mengkomunikasikan kebijakan yang telah ditetapkan Bapel,
- Penetapan ukuran kinerja Bapel dalam mengorganisasikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan RR NAD-Nias, dan
- Evaluasi dan mengupayakan kebijakan *crash program* dalam rangka mengatasi kendala administrasi, keterbatasan SDM, ketidaksiapan Satker, dan kesulitan teknis di lapangan.

Mekanisme pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan pada Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilaksanakan oleh Deputi Pengawasan, dengan penugasan Deputi Pengawasan dalam menilai kinerja di semua keDeputian Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang dilaksanakan melalui khususnya Satuan Pengawas Internal (SPI) BRR. Dalam setiap bulannya setiap direktorat di keDeputian Bapel

Rehabilitasi dan Rekonstruksi berkewajiban melaporkan kegiatan satker-satkernya kepada SPI tersebut.

Pencapaian kemajuan program pembangunan fisik dan realisasi keuangan rehabilitasi rekonstruksi NAD-Nias rendah. Gambaran tersebut terlihat dari terjadinya kendala administrasi, keterbatasan SDM, ketidaksiapan Satker dan kesulitan teknis dan non teknis telah menghambat penyerapan anggaran dan realisasi fisik.

(2) Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah

Secara umum, institusi pemerintahan di Aceh dan Kepulauan Nias masih berkembang. Keterbatasan pengendalian dan pembinaan terhadap sumber daya manusia terlihat di beberapa instansi pemerintahan.

Sumber daya manusia pemerintah daerah saat ini masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam skill maupun manajemen. Sistem pelaporan dan manajemen belum terintegrasi secara baik. Sehingga, beberapa kabupaten seperti Aceh Jaya, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Nias, dan Nias Selatan, membutuhkan dukungan untuk pembuatan sistem dan mekanisme yang dibutuhkan dan mendukung pengembangan staf-staf yang terampil.

Keterlibatan SDM pemerintah daerah dalam satuan kerja BRR menjadi salah satu upaya untuk pengembangan kualitas. Tindakan ini berjalan dengan baik di Aceh Barat, Banda Aceh, Bireun dan Aceh Besar. Sedangkan di daerah lain seperti Kepulauan Nias, Aceh Tenggara masih belum dapat berjalan dengan baik.

Indikator peningkatan kualitas kerja pemerintah daerah dari integrasi dengan BRR meliputi pemahaman terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, proses koordinasi dan konsultasi proyek. Dampak proses ini sudah mulai terlihat dalam proses musrenbangda, perencanaan APBD dan RPJMD sejak tahun 2007. Akan tetapi, pemahaman menyeluruh tersebut belum dapat terdistribusi secara baik ke level staf akibat belum tersosialisasikannya prosedur dan mekanisme kerja.

4.4.2.3. Bidang Sosial Budaya

Kemampuan SDM BRR

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri, bahwa kinerja Satker selain dilihat dari sumber daya manusianya juga tergantung dari kondisi lapangan seperti (1) adanya pengantisipasi indikasi tender yang ada unsur KKN; (2) lamanya penentuan pemetik manfaat (beneficiaries); (3) terbentur masalah peraturan dan perundangan seperti Kepres No. 80 tahun 2003; dan (4) keterlambatan pencairan DIPA dianggap menghambat kegiatan pelelangan. Kendala lainnya juga karena adanya keterbatasan jumlah pelaksana Satker untuk mendukung percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta beragam latar belakang pendidikan dan lingkup kerja personil satker sipil maupun swasta yang berdampak pada perbedaan sikap dan sudut pandang masing-masing personil satker dalam menyikapi suatu masalah dan mengambil keputusan.

Kemampuan kontraktor dan konsultan lokal dari segi keahlian, dana, dan metode, tidak sebanding dengan beban pekerjaan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Keterbatasan SDM dari Satker yang dimiliki BRR dalam mengatur besarnya volume pekerjaan yang melonjak tinggi juga menjadi masalah. Khusus dalam pemulihan bidang pendidikan, masih minimnya kualitas tenaga terampil dan minimnya jumlah tenaga terampil untuk melaksanakan pelatihan dan training.

4.4.2.4. Bidang Pemulihan Ekonomi

SDM Satker BRR dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan perekonomian berasal baik dari pihak BRR sendiri maupun pihak Pemerintah Daerah yang diperbantukan. Satker BRR secara rutin mengadakan pertemuan untuk membahas isu dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebagai contoh, BRR (Singkil) melibatkan beberapa orang Pemda sebagai tim teknis dalam sekretariat bersama. Dengan adanya keterlibatan beberapa aparat SKPD terkait bermanfaat untuk menghindari adanya overlapping atau tumpang tindih terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan penerima manfaat (Beneficiaries).

Kapasitas SDM Pemerintah daerah terutama di tingkat Kabupaten menjadi tidak memadai, akibat diperbantukan ke Satker BRR. Hal ini dikarenakan SDM diperbantukan tersebut adalah SDM yang berpengalaman dengan jumlah yang terbatas. Kiranya diperlukan pelatihan Sumber Daya Manusia guna menggantikan/regenerasi pegawai Pemda yang diperbantukan ke BRR. Hal ini mengingat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan kegiatan pembangunan reguler membutuhkan tenaga kerja yang handal.

Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Kapasitas SDM dalam melaksanakan Program dan Kegiatan dirasakan sudah cukup baik. Selama ini program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD dapat direalisasikan dengan baik. Secara khusus, pemda memiliki mekanisme dan tata kerja sendiri dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Apabila permasalahan muncul, pemda dapat berkoordinasi dengan dinas terkait yang dilanjutkan dengan pemetaan permasalahan dan dicari solusi bersama.

Kenyataan pada aspek anggaran BRR NAD-Nias yang tidak bisa terealisasi sebesar 100%, tidak bisa sepenuhnya dijadikan justifikasi atas minimnya SDM. Kondisi ini barangkali implikasi dari sistem anggaran dari pusat yang terlambat dan juga banyaknya problem dan kepentingan dari berbagai pihak. Disamping itu juga belum adanya payung hukum untuk penyelesaian persoalan tanah di masyarakat sehingga pelaksanaan program terlambat. Tentu hal ini perlu dijadikan perhatian pihak terkait dalam percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di masa datang.

4.4.2.5. Bidang Kelembagaan dan Hukum

A. Sumber Daya Manusia Bapel BRR

Personel Bapel BRR terdiri dari pegawai negeri, swasta, dan LSM baik lokal maupun asing yang berjumlah 500-an. Satker yang berada di bawah kedeputan bidang kelembagaan dan pengembangan SDM pada tahun 2006 berjumlah 22 Satker dan pada tahun 2007 berkurang menjadi 19 satker. Perubahan pada struktur organisasi Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi khususnya pada level satker bertujuan agar koordinasi di antara satker dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat lebih efektif dan efisien, misalnya:

1. Sub Bidang Kelembagaan

Ada beberapa satker yang dipisah pada tahun 2007 yaitu dari Satker Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Kepemerintahan NAD-Nias menjadi Satker Kelembagaan dan Pengembangan SDM Wil. I, II, IV, V, Nias, dan Nias Selatan. Dengan adanya satker di setiap regional tentunya akan memudahkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kelembagaan dan Pengembangan SDM. Selain itu juga terdapat Satker baru yaitu Pusat Pembelajaran dan Pengembangan SDM. Satker 2006 yang tidak dilanjutkan yaitu Pengembangan Otonomi Daerah NAD-Nias dan BAPEDALDA - NAD.

2. Sub Bidang Hukum

Satker Pengembangan Sarpras Hukum pada tahun 2007 merupakan gabungan dari 3 satker pada tahun 2006 yaitu Satker Pengembangan Sarpras Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kanwil Hukum dan HAM

3. Sub Bidang K3M

Satker Pengembangan Fasilitas POLRI pada tahun 2007 merupakan gabungan dari 3 satker pada tahun 2006 yaitu Satker Sdeops Polri, Sdesdm Polri, dan Sdelog Polri NAD-Nias. Selain itu satker yang tidak ada lagi di tahun 2007 antara lain Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional NAD-Nias dan Pengembangan Pertahanan Integratif NAD-Nias

Kapasitas kontraktor yang terkait dengan rehabilitasi dan pembangunan kantor pemerintahan yaitu selain ada kontraktor yang mengikuti aturan namun ada beberapa kontraktor pelaksana yang tidak melanjutkan/menyelesaikan pekerjaannya, dan karena masa kontrak sudah lama berakhir tahun 2006 dan status kontrak lama tidak jelas, contohnya pada pembangunan rumah dinas Pengadilan Negeri Calang, Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan Pengadilan Tinggi NAD.

Kapasitas personel konsultan pengawas BRR dalam memahami perencanaan, pelaksanaan, serta proses koordinasi dan konsultasi yang harus dilalui untuk bidang kelembagaan dan hukum belum maksimal, sebagai contoh di Kota Banda Aceh, Pejabat Pembuat Komitmen BRR di tingkat I menunjuk Pemda melalui Dinas Kota Banda Aceh dalam bentuk bantuan teknis (pengawasan) khusus untuk bangunan negara dan rumah dinas negara (rumah kejaksaan, Polri, dll).

B. Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah

Kesiapan SDM Pemda terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan proses koordinasi dan konsultasi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dikatakan belum siap paska berakhirnya masa tugas Bapel BRR di bulan April 2009. Hal tersebut dapat dilihat dari⁵ SDM yang dimiliki Pemda hanya sebagian yang dilibatkan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan apabila dilihat dari segi kualitas dan kualitas sangat diperlukan adanya peningkatan kapasitas aparat Pemda.

Untuk mendukung pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda, BRR dan Donor/NGO melaksanakan beberapa program dan kegiatan melalui pelatihan, seminar, pendampingan secara langsung, dan sebagainya. Rincian program tersebut diantaranya 1) Peningkatan profesionalisme aparat Pemda; 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda; 3) Peningkatan kapasitas keuangan Pemda; 4) Peningkatan kerjasama antara daerah; 5) Penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi (pimpinan daerah dan legislatif daerah); dan 6) Pengelolaan sumberdaya manusia aparatur. Hal yang sama juga terjadi di bidang hukum dan K3M diantaranya adalah peningkatan kapasitas aparatur hukum dan aparat TNI dan Polri serta pendidikan dan pelatihan teknis hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh BRR maupun Donor/NGO. Dengan adanya kegiatan tersebut, kapasitas Pemda diharapkan akan meningkat dan siap untuk melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca berakhirnya BRR.

⁵ Hasil wawancara dengan Badan/Dinas terkait di Kabupaten/Kota Provinsi NAD, September-November 2007

4.5 ASPEK KEBERLANJUTAN

Untuk melakukan penanganan pemulihan pasca bencana gempa bumi dan tsunami di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, maka pemerintah pusat telah membentuk sebuah institusi khusus yaitu Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Fungsi badan ini, selain berfungsi melaksanakan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana secara langsung, juga berfungsi melaksanakan koordinasi program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Donor/NGO, korporasi, masyarakat, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Perpu No. 2 Tahun 2005, *jo.* UU No. 10 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

- Ayat (1) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
- Ayat (2) Perpanjangan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usulan Dewan Pengarah.
- Ayat (3) Setelah berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (4) Dengan berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, segala kekayaannya menjadi milik Negara yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- Ayat (5) Pengakhiran masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta segala akibat hukumnya ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Landasan pembentukan institusi tersebut yaitu didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 Tahun 2005, *jo.* Undang-undang No. 10 Tahun 2005, tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan peraturan tersebut, BRR diberikan mandat untuk melaksanakan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias selama empat tahun yaitu pada bulan April 2009. Namun bila diperlukan dapat diperpanjang atas usulan Dewan Pengarah yang selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Setelah berakhirnya masa tugas BRR dalam menjalankan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maka tugas selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga tahun 2007, BRR telah melaksanakan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk tahun yang ketiga. Sedangkan pada tahun 2008 merupakan proses persiapan menjelang pengakhiran masa tugas BRR yang akan berakhir pada 2009.

4.5.1 Isu-Isu Dalam Persiapan Pengakhiran Masa Tugas BRR

A. Gambaran Kondisi Umum Pemerintah Daerah

Untuk melihat kesiapan Pemerintah Daerah dalam rangka pengakhiran masa tugas BRR untuk keberlanjutan dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain; aspek perencanaan (RPJMD dan Renstra SKPD) dan aspek penganggaran pembangunan (APBD).

Wilayah pascabencana Provinsi NAD merupakan daerah yang memperoleh porsi pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang paling besar. Hal ini sesuai dengan skala kerusakan dan kerugian yang dialami wilayah NAD. Bila dilihat dari ketersediaan APBD, Provinsi NAD sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, akan memperoleh alokasi Dana Otonomi Khusus sebesar 2 persen dari Dana Alokasi Umum Nasional selama dua puluh tahun. Alokasi pendanaan tersebut diperuntukkan untuk pembangunan dan pembiayaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, social dan kesehatan. Jadi, selain dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana dekonsentrasi dan dana tugas perbantuan, Provinsi NAD memperoleh dana otonomi khusus yang secara riil diperkirakan mencapai 4 triliun rupiah.

UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada Pasal 179 disebutkan bahwa :

- Ayat (1) Penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan
- Ayat (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari : a. Pendapatan Asli Daerah, b. Dana Pembangunan, c. Dana Otonomi Khusus, d. lain-lain pendapatan lain yang sah.

Sedangkan dalam pasal 183 disebutkan bahwa :

Ayat (1) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pembiayaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, social dan kesehatan.

Pengakhiran masa tugas BRR di Kepulauan Nias memiliki format yang berbeda dengan apa yang sedang dipersiapkan di NAD. Beberapa hal mendasar yang membuat dibutuhkan pendekatan khusus ini dapat dijelaskan sebagai berikut; (*Sumber : Strategi dan Program Pengakhiran Masa Tugas BRR di Nias, BRR Perwakilan Nias, 2007*). *Pertama*, Nias tidak memiliki anggaran pembangunan yang cukup untuk menidaklanjuti proses pembangunan paska rekonstruksi. Baik Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan adalah dua kabupaten termiskin di Sumatera Utara. Kepulauan Nias merupakan daerah termiskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinan sebelum bencana yaitu sebesar 32% atau dua kali lipat dari rata-rata nasional. Alokasi anggaran pemerintah pusat untuk kedua kabupaten ini juga merupakan yang paling rendah di Sumatera Utara, bahkan sangat jauh di bawah angka nasional. *Kedua*, kegiatan rekonstruksi selama periode 2005-2009 diperkirakan telah menambah aset Kepulauan Nias sebesar Rp 6 triliun. Aset sebesar ini diberikan atau dibangun oleh Pemerintah Pusat melalui BRR dan berbagai donor dengan menggunakan prinsip *build back better*. Isu kritis yang dihadapi adalah keberlanjutan dari operasi dan pemeliharaan dari berbagai aset yang telah dibangun. Dengan anggaran pembangunan pemerintah Kabupaten Nias dan Nias Selatan yang diperkirakan sekitar 300 miliar pertahun, maka kedua pemerintah daerah ini tidak akan

mampu dalam menyiapkan anggaran operasi dan pemeliharaan bagi keberlanjutan aset-aset tersebut. *Ketiga*, kapasitas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sangat rendah. Hasil studi Bank Dunia (2007) memberikan penilaian “sangat rendah” terhadap Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dan nilai “rendah” terhadap Pemerintah Kabupaten Nias, dalam hal pengelolaan keuangan publik. *Keempat*, sejak awal Nias memiliki hubungan yang kurang mesra dengan Pemerintah Sumatera Utara. Daerah Kepulauan Nias dianggap sebagai daerah belakang dari daratan Sumatera Utara. *Kelima*, persoalan keterbelakangan menjadi isu yang dikaitkan dalam proses pelaksanaan rekonstruksi di Kepulauan Nias sejak awal, dan ini akan terus berlanjut hingga pengakhiran masa tugas. Berdasarkan beberapa pertimbangan pemikiran di atas, pengakhiran masa tugas harus mampu diletakkan di atas dasar dan arah yang tepat bagi upaya pengentasan kemiskinan di Kepulauan Nias menuju pembangunan yang berkelanjutan. Pengakhiran masa tugas di BRR di Kepulauan Nias perlu dilihat sebagai dimulainya kawasan Nias dengan memasuki masa depan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi NAD telah mempersiapkan rencana kerja menengahnya dalam pembangunan wilayah NAD melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJMD) Provinsi NAD terkait dengan masalah keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2007-2012, yaitu sebagai berikut; 1. Bidang pembangunan infrastruktur yaitu perumahan dan permukiman, tata ruang, lingkungan hidup, jalan dan jembatan, perhubungan udara, perhubungan laut, perhubungan darat, sumber daya air, serta komunikasi dan informasi. Program pendidikan, kesehatan, kependudukan, social, pemuda dan olah raga, perempuan dan anak. 2. Bidang pembangunan pendidikan, kesehatan dan agama, social budaya yaitu; pendidikan, kesehatan, kependudukan, social, pemuda dan olah raga, serta perempuan dan anak. 3. Bidang pembangunan ekonomi yaitu kelautan dan perikanan, koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, pertanian, ketahanan pangan, peternakan, kehutanan, pariwisata dan ketenagakerjaan. 4. Bidang pembangunan pemerintahan dan hukum yaitu pemerintahan dan kesbang linmas.

Demikian pula RPJMD Kabupaten Nias terdiri dari program pekerjaan umum, perhubungan, pertanahan, komunikasi, perumahan, penataan ruang, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, social, tenaga kerja, kebudayaan, pemuda, kesatuan bangsa politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat desa, kearsipan, koperasi dan UKM, dan penanaman modal daerah. RPJMD Kabupaten Nias Selatan terdiri dari program infrastruktur, pembangunan wilayah, pemerintahan, hukum, dan politik, sumber daya manusia, kemasyarakatan dan kebudayaan, agama, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan ekonomi.

Terkait dengan kesiapan Pemda dalam menghadapi kegiatan keberlanjutan yang dihubungkan dengan produk perencanaan dan penganggaran Pemda dapat digambarkan secara umum pada bagian ini.

Bidang Pemulihan Perumahan dan Permukiman. 1. Kegiatan penyusunan beberapa dokumen rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kab/Kota masih dalam proses. Kegiatan ini merupakan salah satu arahan dari Rencana Induk dan ini sudah sejalan dengan perencanaan Pemda sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD. Bila ditinjau dari RPJMD Provinsi NAD 2007-2012 bahwa program jangka menengah untuk tata ruang sebagian besar adalah revisi RTRW baik pada tingkat Kab/Kota maupun Provinsi. Dengan demikian, dokumen RTRW itu sendiri seyogyanya sudah terselesaikan seluruhnya, agar pelaksanaan revisi juga dapat dilaksanakan tepat waktu. 2. Kegiatan di bidang pertanahan menyangkut penyelesaian sertifikat tanah dan konsolidasi tanah yang

tidak terselesaikan oleh Bapel RR pada akhirnya akan diemban oleh Pemda. Dengan demikian, dukungan kepada Pemda baik dari segi alokasi pendanaan maupun kapasitas kelembagaannya perlu diperhatikan pada masa pasca BRR.

Bidang Pemulihan Infrastruktur. 1. Kegiatan pemeliharaan dan penyelesaian jalan lintas barat sudah melalui sharing kegiatan antara Donor, BRR dan pemda. Proses penyelesaian yang relatif lambat memungkinkan adanya keterlambatan penyelesaian kegiatan ini dan akan dilanjutkan oleh Pemda. Dalam konteks itu maka diperlukan dukungan pendanaan melalui APBD yang akan mendukung terhadap proses keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun demikian kapasitas APBD masing-masing kabupaten/kota baik di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias berbeda-beda kemampuannya. 2. Kegiatan pembangunan beberapa bandara seperti di Nias dan NAD masih terus dilakukan, serah terima aset maupun pengambilalihan upaya penyelesaian bandara yang belum selesai akan menjadi tanggung jawab Departemen Perhubungan dan Pemda dalam pengelolaannya. Namun sama juga halnya dengan masalah di atas, ini juga tergantung dari kemampuan APBD untuk melakukan pengoperasian dan pemeliharaannya lebih lanjut.

Bidang Pemulihan Sosial Budaya. Di dalam dokumen RPJMD NAD program pendidikan diarahkan pada pendidikan anak usia dini. Sedangkan dalam RPJMD Kepulauan Nias program pendidikan difokuskan pada pendidikan anak SLTP dan SLTP. Diharapkan kegiatan ini menjadi pada perencanaan pembangunan keberlanjutan pasca BRR di NAD dan Kepulauan Nias. RPJMD pemerintah daerah provinsi NAD dan RPJMD Kepulauan Nias tersebut diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan tersebut menjadi program keberlanjutan dalam rangka pemulihan kesehatan pasca tsunami.

Bidang Pemulihan Perekonomian. Rencana Strategis (Renstra) BRR menerjemahkan Rencana Induk bidang pemulihan kelautan perikanan melalui Program Fasilitas Pelayanan Masyarakat, yang lebih berorientasi pada bantuan sarana prasarana dibandingkan dengan bantuan permodalan, dengan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mengembalikan aset dan peralatan penangkapan ikan, seperti kegiatan rehabilitasi tambak, bantuan perahu, jala, benih, hingga pembangunan/rehabilitasi Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI). Sementara, Pemerintah Provinsi NAD, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012, tidak saja pada bantuan sarana prasarana namun juga pada pemberdayaan masyarakat dan kebutuhan masyarakat penting lainnya seperti aspek pemasaran, pemetaan dan zonasi. RPJMD Prov.NAD juga telah merencanakan program Peningkatan Mitigasi Bencana dan Prakiraan Iklim Laut.

Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum. 1. Pada Konsistensi antara Rencana Induk dengan dokumen perencanaan Pemda bidang hukum dapat dilihat melalui Di dalam RPJMD, namun di dalam RPJMD tersebut tidak tercantum mengenai rencana pembangunan bidang hukum. Hal ini menjelaskan bahwa Pemda bukannya tidak melaksanakan kegiatan terkait dengan bidang hukum, namun hal ini dimungkinkan karena yang menangani hukum adalah instansi vertikal (hukum) di masing-masing daerah. 2. Kontribusi Pemda dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang kelembagaan sangat terbatas. Jika dilihat dari alokasi RAPBD untuk kegiatan pendukung rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan tahun 2006 maupun 2007 hanya berkisar 1-36 persen dari total APBD di Kabupaten/Kota terpilih. Berdasarkan dokumen RPJMD dan rincian kegiatan yang tercantum di dalam dokumen APBD, kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Pemda diantaranya :

- Program peningkatan profesionalisme aparat Pemda melalui kegiatan penataan dan penyediaan (rekrutmen dan mutasi) aparat Pemda.

- Kegiatan penataan batas-batas administrasi (pengelolaan pertanahan) yang telah berubah akibat bencana.
- Pembebasan lahan untuk Pemda dan fasilitas umum.

Pada tabel di bawah ini akan diberikan gambaran secara sepintas beberapa sampel kegiatan pada masing-masing bidang pemulihan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4 - 68
Beberapa Sampel Kegiatan Lanjutan

NO.	BIDANG PEMULIHAN	KEGIATAN LANJUTAN
1.	Perumahan dan Permukiman	Penyusunan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota penyelesaian sertifikat tanah dan konsolidasi tanah
2.	Infrastruktur	Pemeliharaan dan penyelesaian jalan lintas barat, penyelesaian kegiatan di beberapa bandara dan mengatasi keterbatasan BBM dan suplai listrik
3.	Sosial Budaya	Pembangunan RKB SMA dan SMK, pembangunan UGB reguler dan berasrama, rehabilitasi sekolah, pembangunan UGB Madrasah, pembangunan fasilitas ibadah, penyediaan peralatan olahraga dan seni
4.	Perekonomian	Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), program pengembangan industri kerajinan rakyat
5.	Kelembagaan dan Hukum	pengelolaan SDM aparatur. pembangunan kantor pemerintahan, program jaminan kepastian, perlindungan dan penegakan hukum dan HAM, program pengembangan ketahanan masyarakat.

Dalam rangka persiapan menuju berakhirnya masa tugas BRR di tahun 2009 nanti maka langkah-langkah sudah harus dilakukan sejak dini. Untuk itu sangat diperlukan kesiapan Pemerintah Daerah untuk melanjutkan proses pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Daerah baik secara struktural maupun sumber daya manusia menyatakan kesiapannya dalam rangka menghadapi exit strategy BRR pada tahun 2009 nanti. Kesiapan tersebut terlihat dari hasil wawancara Tim P3B Bappenas pada kunjungan lapangan Monitoring dan Evaluasi berikut:

Tabel 4 - 69
Hasil Wawancara
tentang Kesiapan Pemda menjelang PMT BRR

No.	Nara Sumber	Substansi
1.	Dinas Kesehatan Kab. Pidie	Dinas telah siap secara struktural menghadapi exit strategy BRR tahun 2009 nanti, karena hampir semua asset di bidang kesehatan yang telah dibangun oleh BRR, Donor/NGO maupun lembaga lain, telah diserahkan pengelolaannya kepada dinas.
2.	Dinas Sosial Kab. Pidie	Dinas secara kelembagaan dan struktur yang ada tidak mengalami kesulitan dalam keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi.
3.	Bappeda Kab. Aceh Jaya	Pemda hingga saat ini belum mengalami kesulitan dalam keberlanjutan.
4.	Dishub Kab. Bireun	Pemda siap untuk melanjutkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta proses peralihan asset dari BRR.
5.	Dinas Kimpraswil Kab. Bireun	Dinas secara kelembagaan dan struktur yang ada tidak mengalami kesulitan dalam keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi.
6.	Dinas Pendidikan	Telah melaksanakan persiapan akses informasi dan koordinasi yang

No.	Nara Sumber	Substansi
	Kab. Bireun	berkelanjutan sehingga memudahkan untuk melakukan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi kedepannya.
7.	Dinas Kesbang Linmas Kota Banda Aceh	Pembentukan lembaga baru yang mengelola rehabilitasi dan rekonstruksi pasca BRR tidak diperlukan, sebaiknya langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8.	Disnaker Kota Banda Aceh	Pemerintah daerah selalu siap melanjutkan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
9.	Bappeda Kab. Aceh Barat	Keberlanjutan sudah mulai diantisipasi dengan adanya keterlibatan pemda dan BRR dalam sekber maupun PPK.
10.	DKP Kab. Aceh Singkil	Perlu Tim peralihan untuk melanjutkan dan menuntaskan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

Sumber: Hasil kunjungan lapangan tim P3B Bappenas, September-November 2007

B. Penyiapan Peran Stakeholders Menuju Proses Exit Strategy

Exit strategy memerlukan persiapan *capacity building* Pemerintah Daerah dan NGO lokal. Di samping itu, diperlukan pula aktivasi dan peningkatan efektivitas Sekretariat Bersama (Sekber) yang menjadi forum dalam rangka peralihan antara BRR dan Pemerintah Daerah, yang memerlukan komitmen sinergitas pihak satu dengan lainnya. Proses transisi juga pada akhirnya memerlukan pembagian peran yang jelas, antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga dan Donor/NGO. Hal tersebut berkaitan dengan strategi para pihak untuk mempersiapkan kerangka kerja tahun anggaran 2009 yang akan datang.

Terdapat 3 stakeholders yang terlibat langsung dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias. Dalam rangka percepatan pemulihan tersebut telah tercipta kerjasama antara stakeholders melalui pembagian bidang sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholders menurut bidang pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebagai sampel dan cukup ringkas maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 - 70
Peran Stakeholder
Dalam Bidang Perumahan dan Permukiman

No.	Bidang	Peran		
		BRR	Pemda	Donor/NGO
1.	Perumahan dan permukiman	- Bantuan Perumahan dan Permukiman Kembali (BPPK). - Bantuan Pembangunan Rumah Baru (BPRB). - Bantuan Perbaikan Rumah (BPR). - Bantuan Sosial untuk Bertempat Tinggal (BSBT).	Pembebasan lahan untuk kawasan perumahan dan fasilitas umum	Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah, <i>upgrading</i> , dan prasarana dasar permukiman
2.	Tata Ruang	Penerbitan pedoman-pedoman yang berhubungan dengan perencanaan desa	legalisasi RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota	<i>village mapping</i> dan penyusunan RTRW Kab/Kota dengan Pemda
3.	Pertanahan	Penyelesaian masalah pertanahan melalui proyek RALAS	Proses legalisasi sertifikat tanah	Konsolidasi batas persil tanah bersama masyarakat

Tabel 4 - 71
Peran Stakeholder
Dalam Bidang Infrastruktur

Sub Sektor	BRR	Donor/NGO	Pemerintah Daerah
a. Jalan dan transportasi darat	Pembangunan jembatan dan jalan, terminal, serta pengadaan bus, peralatan SAR dan rescue boat dan Pembuatan sistem aplikasi bencana alam	Pembangunan jalan dan jembatan (komplemen) kegiatan BRR	Pembangunan jalan kecamatan dan jalan desa
b. Transportasi laut dan ASDP	Pembangunan dermaga, pelabuhan laut dan Pengadaan kapal	Pengadaan kapal ferry	Pengadaan lahan untuk pembangunan atau perluasan pelabuhan
c. Transportasi Udara	Pembangunan bandara, perpanjangan runway dan fasilitas pendukung	Pembangunan airstrip dan helipad	Pengadaan lahan untuk pembangunan/perluasan bandara
a. Irigasi	Pembangunan saluran irigasi, bendung dan pencetakan sawah	Pembangunan saluran irigasi, bendung dan pencetakan sawah	Pembenahan saluran irigasi

Tabel 4 - 72
Peran Stakeholder
Dalam Bidang Sosial Budaya

Sub Sektor	BRR	Donor/NGO	Pemda
Pendidikan	Pengadaan peralatan sekolah Pemberian beasiswa S2 dan S3 kepada mahasiswa dan dosen	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan semua tingkat dan Pelatihan tenaga guru	Penyediaan tenaga guru dalam rangka peningkatan SDM
Kesehatan	Rehabilitasi polindes, puskesmas, pustu, kantor dinas dan Pemberian beasiswa tenaga medis	Pembangunan Rumah Sakit, gudang farmasi dan Pelatihan tenaga medis	Rekrutmen tenaga medis dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
Agama	Rehabilitasi sarana ibadah dan Pelatihan peningkatan SDM bagi ulama dan santri	Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana ibadah	Penyediaan guru agama dan trainer

Tabel 4 - 73
Peran Stakeholder
Dalam Bidang Kelembagaan dan Hukum

Sub Bidang	BRR	Pemda	Donor/NGO
Kelembagaan	1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pemerintahan	Penyediaan dan pembebasan lahan	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kantor Pemerintahan

Sub Bidang	BRR	Pemda	Donor/NGO
Hukum	1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana bidang hukum	-	Pelatihan aparat hukum mengenai

Dari pemetaan peran diatas, sejak awal dan secara bertahap dipandang urgen disiapkan dan dilaksanakan program penguatan kelembagaan dan kapasitas lokal secara sistematis. Penguatan kelembagaan daerah ini muncul melalui peningkatan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya penguatan kelembagaan daerah ini bertujuan untuk memastikan terjadinya keselarasan dan kesinambungan pembangunan di wilayah NAD dan Kepulauan Nias pasca rekonstruksi. Termasuk dalam konteks ini yaitu bermaksud untuk memelihara dan merawat seluruh hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun dalam melanjutkan dan mengembangkan program yang bersifat strategis. Namun, tidak dapat dielakkan akan adanya potensi permasalahan dan hambatan dalam tahap keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca pengakhiran masa tugas BRR.

Untuk tindak lanjut keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi terdapat strategi pelaksanaan yang didasarkan kepada rencana aksi yang dijabarkan ke dalam rencana tata ruang wilayah yang terintegrasi dan komprehensif. Strategi pelaksanaan ini dalam rangka mempercepat pemulihan pada berbagai program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias. Selain percepatan pemulihan program dan kegiatan tersebut, hal yang sangat strategis pula yaitu penguatan mitigasi dan penanganan bencana dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat.

4.5.2 Penyiapan Sistem

Beberapa pemikiran yang mendasari diperlukannya sistem atau mekanisme yang dibangun untuk keberlanjutan RR NAD-Nias adalah:

Pertama; Proses membangun untuk menjadi lebih baik membutuhkan lebih banyak upaya dari apa yang tercantum di rencana induk yang telah ada, karena membangun NAD-Nias tidak hanya sampai pada tingkat kerusakan dan kerugian tanpa menyelesaikan permasalahan konflik dan segala akibatnya serta keterbelakangan pembangunan, khususnya di Nias.

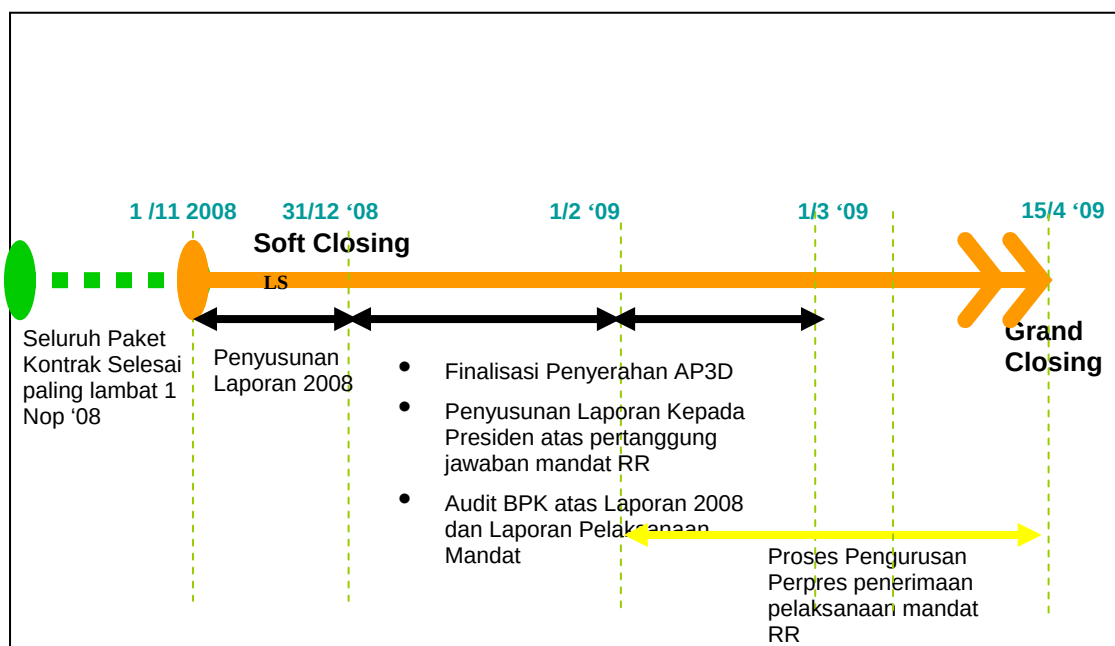
Kedua; Selama 4 tahun masa rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah dan lembaga nasional dan internasional telah menginvestasikan proyek-proyek dalam jumlah besar, lebih besar dari kemampuan Pemerintah Daerah dalam hal kapasitas manajemen, operasi, dan pemeliharaannya. Pada masa selanjutnya setelah selesai masa tugas BRR, berarti tidak ada lagi dukungan program rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah dan donor. Pertanyaan kritis yang dihadapi adalah, tanggung jawab apa yang perlu diemban kementerian/lembaga dalam memfasilitasi dan mendukung Pemerintah Daerah pada masa pasca rekonstruksi.

Ketiga; Kesiapan pemerintah daerah dan perilaku masyarakat dalam menghadapi penurunan alokasi anggaran pembangunan. Seperti diketahui bahwa dengan adanya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi anggaran APBN dan sumbangan dari donor dan NGO sangat besar dan telah menciptakan “*bubble economics*”. Sejalan dengan berakhirnya masa tugas BRR, maka anggaran pembangunan melalui APBN dan bantuan

donor NGO akan menurun. Karena itu upaya untuk membangun kemandirian masyarakat menjadi sangat penting dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.

Keempat; Kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat apabila kembali terjadi bencana serupa. Berdasarkan studi mitigasi yang dilakukan oleh UNDP dan ITB/Unsyiah, diperoleh informasi bahwa bencana yang terjadi adalah, bencana tsunami dengan ketinggian gelombang setinggi 1,5 m', akan terjadi 25 tahunan, sedangkan untuk ketinggian gelombang hingga 2,5 m' adalah 55 tahunan, 3,5 m' per 125 tahunan, dan untuk ketinggian hingga > 11 m' baru akan terjadi sekitar 550 tahunan. Meskipun demikian perlu kesiapan masyarakat dan lembaganya, dalam menghadapi bencana, apapun bentuk bencana itu. Kesiapan masyarakat menghadapi tsunami ini perlu dibudayakan sebagaimana telah ada pada masyarakat Simeulue.

Strategi pengakhiran masa tugas BRR dalam rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap Provinsi NAD dan Nias sesuai pada gambar berikut :



Dengan demikian, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi memiliki beberapa tugas untuk menyongsong pencapaian strategi pengalihan tugas (*'exit strategy'*) BRR NAD-Nias, yaitu :

- Memastikan transisi dari fase rekonstruksi menuju fase pembangunan (normal) sedini mungkin dengan melibatkan Pemerintah Daerah di dalam perencanaan, evaluasi, dan transfer sehingga seluruh kegiatan rekonstruksi dapat terus dilakukan secara berkesinambungan.
- Memastikan Pemerintah Daerah dan mitra-mitra yang terkait memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan dan memelihara fasilitas-fasilitas yang telah dibangun selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Memastikan telah dipersiapkannya mekanisme pengalihan tugas kembali secara fungsional, berbagai tugas pembangunan yang terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi serta kegiatan pembangunan lainnya, agar dapat dialihkan ke Kementerian dan Lembaga (untuk tugas yang menjadi kewenangan pemerintah

Pusat) dan ke Pemerintah Daerah sejalan dengan UU Pemerintahan Aceh no. 11 tahun 2007.

- (d) Menyiapkan mekanisme manajemen resiko bencana ke dalam kerangka pembangunan Pemerintah Daerah.

4.5.3 Mekanisme Peralihan Aset

Dalam akuntansi pemerintahan, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat diperoleh manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan. Oleh karenanya, aset tersebut harus dikelola dengan baik agar terjaga keberadaannya dan optimal pemanfaatannya.

Berdasarkan Laporan Kemajuan 2 Tahun BRR, selama tahun 2006, sesungguhnya pelaksanaan koordinasi dan kerja sama diantara para pemangku kepentingan pada tingkat kecamatan terkait asset pembangunan sudah dimulai. Hal ini semakin berjalan baik dengan dibentuknya Mekanisme Koordinasi Kecamatan (SDCM). UNORC (*UN Recovery Coordinator for Aceh and Nias*) telah memimpin dan menerapkan serta memfasilitasi SDMC di beberapa daerah yang terkena dampak bencana. Struktur organisasi SDMC ini dikepalai Camat dan beranggotakan LSM, para mukim, dan para kepala desa. Hingga saat ini, SDMC sedang diperluas sampai ke bagian lainnya dari daerah-daerah yang terkena bencana, termasuk kabupaten di pantai Timur Laut, Kota Banda Aceh, dan Kepulauan Nias.

Dalam rangka dukungan untuk para Camat dalam pengambilan keputusan, telah dibuat Format Laporan Camat yang telah dibakukan dan telah diterapkan oleh Bagian Informasi dan Analisis UNORC (UNORC IAS). Di masa mendatang, data dan informasi yang dilakukan melalui SDMC juga dimasukkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pada tingkat kabupaten dan provinsi. Hal ini pada gilirannya akan membantu dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan praktis.

Pasca berakhirnya mandat BRR pada bulan April 2009, pelaksanaan pembangunan di daerah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias akan dilanjutkan kembali oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini diperlukan mekanisme dalam hal pembiayaan gabungan terhadap pemeliharaan dan operasi fasilitas, serta untuk keperluan pembangunan wilayah. Pembiayaan ini dapat dilakukan atas kerja sama antara Pemerintah Daerah yang terdiri dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai fungsi dan kewenangannya.

Aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilaksanakan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias diperuntukkan bagi pemulihan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias - Provinsi Sumatera Utara, perlu penanganan khusus dan cepat dengan mempertimbangkan berakhirnya masa tugas BRR

Berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, yang dimaksud dengan aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat diperoleh manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan. Sedangkan Barang Milik Negara (BMN) adalah kekayaan negara, dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dengan satuan tertentu. Sehingga sesuai dengan undang-undang tersebut bahwa semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dengan demikian dapat diklasifikasikan jenis-jenis aset yang dimaksudkan di sini adalah:

- ❖ Aset Lancar dan Aset Tetap
- ❖ Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak
- ❖ Beban APBN Belanja Barang (MAK 52) atau Belanja Modal (MAK 53) atau Belanja Bantuan Sosial (MAK 57)
- ❖ Perolehan lain yang sah merupakan hibah dari NGO atau Negara Donor

NAD-Nias pada tahun 2009. Penanganan khusus dan cepat bukan berarti meninggalkan sisi administrasi berupa pencatatan dan dokumentasi kepemilikannya.

Berdasarkan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat dan Provinsi NAD Tahun 2007-2009, BRR menetapkan kriteria untuk manajemen pengalihan aset sebagai berikut:

- (1) Tersedianya database tentang jumlah, keberadaan dan besaran nilai aset hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias yang *reliable* dan mudah di *update*
 - ❖ Penyediaan aplikasi manajemen aset
 - ❖ Pelaksanaan proses inventarisasi yang dilakukan secara bertahap yaitu 3 kali dalam 1 tahun anggaran
 - ❖ Proses validasi dan rekonsiliasi dengan aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) sehingga mendapatkan kepastian nilai perolehan aset sesuai dengan realisasi belanja barang yang telah dikeluarkan dan memenuhi asersi manajemen tentang keberadaan aset
- (2) Adanya kepastian administrasi fisik dan kepastian hukum atas penguasaan aset hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias termasuk nilainya
 - ❖ Memfasilitasi pelaksanaan proses serah terima aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - ❖ Percepatan proses penetapan status kepemilikan atas aset yang dihibahkan atau dialihkan status penggunaannya ke instansi vertikal pemerintah pusat
- (3) Pemanfaatan terhadap aset hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias sehingga secara ekonomis maupun sosial dapat ditetapkan mana yang perlu di optimalkan dan yang akan dihapuskan.

Penelitian dan identifikasi terhadap seluruh aset yang berada di bawah tanggung jawab BRR NAD-Nias agar penggunaannya dapat di optimalkan sesuai dengan TUPOKSI

Mekanisme yang direncanakan oleh BRR dalam Pengalihan Aset:

- (1) Penyerahan Aset dari Satker ke BRR

Pada setiap akhir tahun anggaran, Satker sebagai pelaksana kegiatan menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada Deputy Sektor-nya. Penyerahan ini disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, juga sebagai proses dokumentasi yang mendukung pemanfaatan hasil sesegera mungkin. Proses penyerahan aset dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), didahului dengan Inventarisasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh :

- ❖ Satker yang bersangkutan,
- ❖ Deputy Sektor dan/atau Kantor Perwakilan BRR,
- ❖ Direktorat Manajemen Aset,
- ❖ Instansi Pengguna Akhir.

Hasil inventarisasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi. Selanjutnya, dokumen ini menjadi dasar dibuatnya Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (BASP). Untuk kepentingan penelitian dokumen oleh pihak Departemen Keuangan, proses serah terima ini dilengkapi dengan copy dokumen pendukung aset antara lain : kontrak, BPKB dan STNK Kendaraan bermotor, sertifikat dll. Dokumen tersebut diserahkan kepada Direktorat Manajemen Aset.

(2) Penyerahan aset dari NGO/Negara Donor ke BRR

Tidak jauh berbeda dengan tatalaksana penyerahan aset dari Satker kepada Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, namun pada proses inventarisasinya sebisamungkin melibatkan rekanan pelaksana pembangunan aset.

(3) Penyerahan aset dari BRR ke Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait sebagai pengguna akhir.

Penyerahan aset ke Pemerintah Daerah dan kementerian/lembaga sebagai pengguna akhir (*end user*) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (BASP). Serah terima pengelolaan merupakan awal dari proses serah terima aset secara formal, ditindaklanjuti dengan usulan kepada Menteri Keuangan untuk penetapan status penggunaan maupun pemindahtanganan.

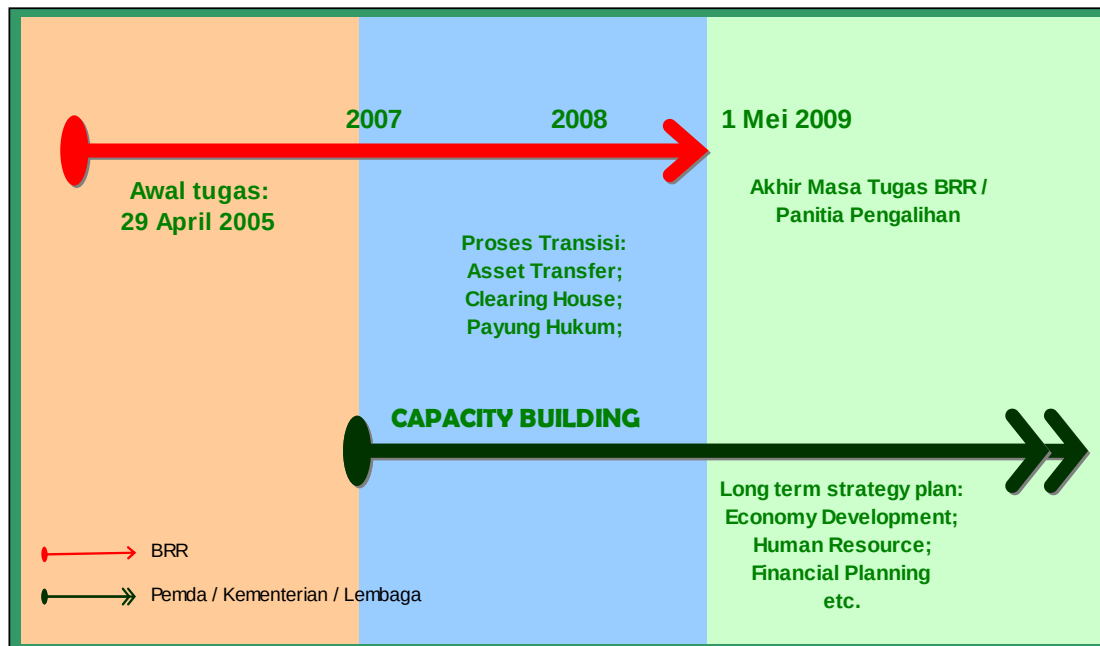
Ditambahkan kalau ada, strategi periode waktu BRR dari mulai awal 2008. dalam upaya penyiapan kapasitas Pemda (bukan strategi pengakhiran di atas yang hanya laporan dan kelanjutan transfer)

4.5.4 Persiapan Pengalihan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 2005, BRR akan mengakhiri masa tugasnya pada April 2009. Jika semua berjalan sesuai rencana, pada saat seluruh kegiatan rekonstruksi selesai, Pemerintah Daerah dan Kementerian/lembaga akan melanjutkan proses tersebut kepada fase pembangunan reguler. Oleh karenanya, diperlukan persiapan dan upaya strategis yang optimal dalam rangka pengakhiran masa tugas BRR.

Pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias dalam rangka melanjutkan proses pembangunan dapat terlihat pada bagan di bawah ini yang menjadi strategi masa tugas BRR dalam rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap Provinsi NAD dan Nias. Gambar berikut ini memberikan gambaran persiapan pengalihan yang dikaitkan *capacity building* Pemda, yaitu:

Gambar 4 - 3
Strategi Pengakhiran Masa Tugas BRR dan Capacity Building untuk Pemda



Sumber: Bapel BRR NAD- Nias, 2007

Pengembangan kelembagaan dan kapasitas ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas berbagai aparat pemerintah termasuk badan-badan Pemerintah Daerah kabupaten dan provinsi, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Nasional Indonesia. Usaha ini dilakukan melalui penyediaan bangunan fisik, peralatan, dukungan dari perusahaan konsultan independen untuk membantu dalam pengalihan keahlian teknis dan manajemen, serta mendukung pengembangan kelembagaan secara umum dan penyediaan program-program pelatihan dan pendidikan.

Selain itu, berdasarkan Laporan Kemajuan 2 Tahun BRR, BRR juga telah memberikan dukungan untuk membantu proses rekrutmen pegawai negeri. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan prosedur pendaftaran pegawai negeri dan apabila diperlukan, dapat menyelenggarakan lokakarya dan kursus pelatihan untuk memastikan dipenuhinya standar kompetensi. Serangkaian program yang dilaksanakan sejak tahun 2005 dan sepanjang 2006 adalah melatih para pegawai Pemerintah Daerah, termasuk Program Aksi Pemerintahan Daerah Aceh EU/GTZ, Program Dukungan Pemerintah Daerah USAID, dan pelatihan lainnya melalui YIPD. Dukungan yang berasal dari JICA, AusAid, GTZ, dan Pemerintah Negara Perancis, BRR juga melakukan pelatihan untuk para bupati dan kepala desa. Dukungan untuk pemerintah provinsi juga sedang dilakukan kajian mengenai kebutuhan sumber daya manusia untuk selanjutnya melakukan pelatihan dan pengembangan staf dalam waktu yang lebih panjang.

Dalam rangka persiapan peralihan tersebut maka keberadaan Sekretariat Bersama sangat signifikan. Sejak Desember 2006, melalui SK Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias nomor 208/KEP/BP-BRR/XII/2006, telah membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) di tingkat Provinsi. Sekber yang dikelola Bapel bersama sama Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota tersebut dimaksudkan untuk:

1. Memadukan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan keduanya agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam implementasinya

2. Mengidentifikasi berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta melakukan koordinasi untuk mencapai solusi
3. melakukan sinergisitas program-program dan melakukan koordinasi agar tidak terjadi duplikasi program dan mencegah inefisiensi dalam pendanaan program-program rehabilitasi dan rekonstruksi
4. menyiapkan strategi transisi dan mekanisme peralihan tugas dan tanggung jawab rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam kepada Pemerintah Daerah menjelang berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias
5. menyusun dan merumuskan kebijakan kerjasama yang tepat dalam mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
6. melaksanakan koordinasi dalam evaluasi program-program rehabilitasi dan rekonstruksi

Selain pada tingkat provinsi, Sekber juga diadakan pada tingkat Wilayah dan Distrik dengan fungsi sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan yang ada di daerah kabupaten/kota dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga terjalin integrasi dan sinkronisasi program-program yang dilaksanakan oleh BRR, Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan donor/lembaga non pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
2. Penguatan peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di seluruh provinsi NAD
3. Penguatan kelembagaan pemerintah daerah termasuk peningkatan kemampuan aparat melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh BRR NAD-Nias sehingga siap dalam memanfaatkan, memelihara, mengoperasikan dan melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan di Kabupaten/kota.

Salah satu langkah penting untuk memastikan transisi yang lancar dari fase rekonstruksi adalah dari sedini mungkin melibatkan Pemerintah Daerah. Hal ini akan memperkuat dan membangun keterlibatan Pemda dalam kegiatan rekonstruksi dan mendukung koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat. Sejak Mei 2006, BRR Nias telah meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan BRR melalui pendirian Sekretariat Bersama (Sekber).

Adapun Sekber ini mengemban fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi satu atap dalam perencanaan, pemrograman, dan evaluasi terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sekretariat Bersama akan mendukung perencanaan satu atap antara Pemda Kabupaten Nias dan BRR. Tugas-tugas khusus termasuk:
 - Melakukan perencanaan berdasarkan kebutuhan (*needs-based*), dengan memperhitungkan kapasitas setiap lembaga secara terukur.
 - Melakukan langkah-langkah khusus termasuk penetapan kriteria, evaluasi rencana program, pemrioritasan, penentuan program tahunan dan tahun jamak dan pembagian penanggungjawab program
 - Melakukan perencanaan terkait pemeliharaan aset rekonstruksi secara bersama
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terkoordinasi antara Pemda dan BRR yang berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik,

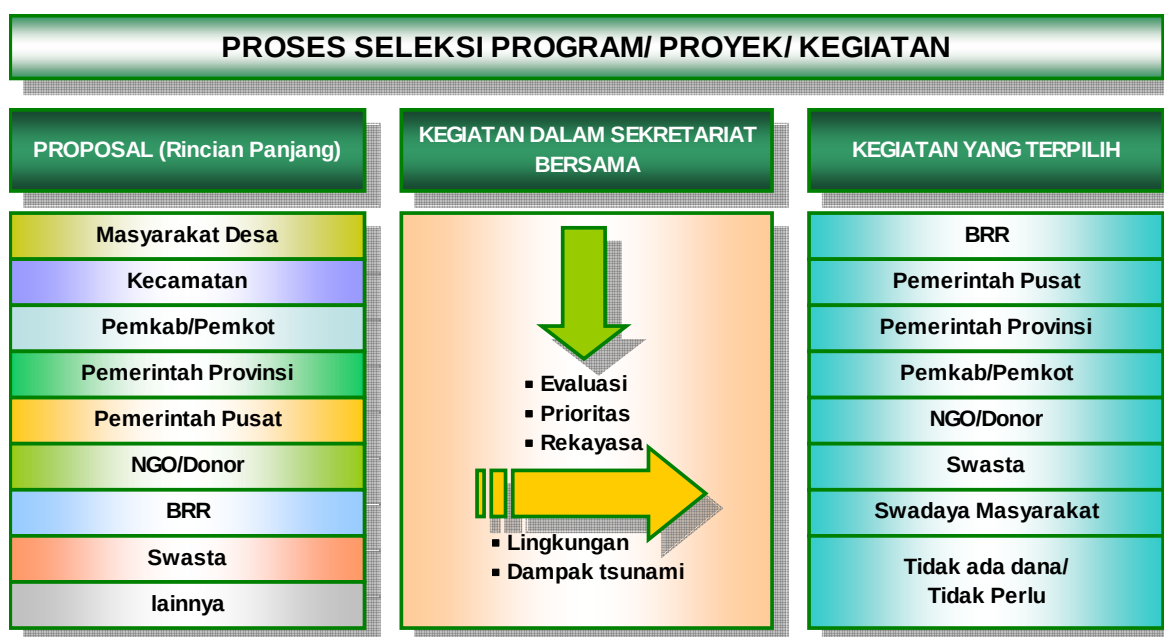
- Mendukung perencanaan kecamatan atau pembangunan kecamatan sebagai unit perencanaan rekonstruksi yang akan memperbaiki implementasi kegiatan di tingkat bawah, dan
- Mempromosikan peranan koordinasi dan integrasi antar tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan.

Untuk struktur organisasi Sekretariat Bersama terdiri dari kantor BRR Pusat, Kantor Regional dan Kantor Distrik dan Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sekretariat Bersama Pusat memfasilitasi BRR kantor pusat dengan Pemerintah Provinsi yang diwakili Bappeda provinsi. Sekretariat Bersama di tingkat regional memfasilitasi Kantor Regional dengan beberapa Bappeda kabupaten/kota yang ada di regional tersebut dan Sekretariat Bersama di tingkat distrik memfasilitasi kantor distrik dengan Bappeda kabupaten/kota.

2. Melakukan pengelolaan data dan informasi yang mencakup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sekretariat akan menjadi satu pintu untuk data/informasi yang tepat dan akurat tentang semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tugas-tugas khusus termasuk:
 - Mendukung Pemda melalui pengelolaan RAND, database sektor dan lain lain yang mencatat data/informasi tentang semua program rehabilitasi dan rekonstruksi yang didanai oleh pemerintah, BRR dan LSM di Nias, dan
 - Mengintegrasikan semua data/informasi dari instansi-instansi pemerintah, BRR dan LSM sehingga database Sekretariat Bersama dapat menjadi sumber utama informasi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias.
3. Memperkuat hubungan antar stakeholder melalui strategi komunikasi yang jelas.
Sekretariat Bersama akan mensosialisasikan data/informasi tersebut kepada instansi pemerintah di tingkat kabupaten dan kecamatan dan masyarakat, dan juga untuk memperkuat hubungan antar stakeholder pada umumnya. Tugas-tugas khusus Sekretariat Bersama meliputi :
 - Membangun strategi komunikasi untuk menyampaikan data/informasi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Pemda dan masyarakat melalui seminar, pembuatan brosur dan penyiapan bahan press release konferensi pers (*press release*) dan lain-lain
 - Bekerjasama dengan Humas, Pemda. Kab. Nias, Pusat Informasi Publik BRR dan UNORC untuk membuat pendekatan terpadu dalam penyampaian informasi kepada para stakeholder.
4. Mempromosikan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi di semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pada masa pembentukan Sekretariat Bersama, staf pegawai di Sekretariat Bersama memerlukan bimbingan dan bantuan dari stakeholder yang lain untuk berbagai tugas, misalnya:
 - Mengintegrasikan perencanaan antara pemerintah daerah, BRR dan LSM
 - Mengerti dan menguasai database operasional dan cara-cara pengumpulan data dan informasi untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sebagaimana yang terlihat dalam struktur organisasi Sekretariat Bersama di atas, setiap wakil koordinator bidang dipegang oleh staf Pemerintah Daerah. Wakil-wakil koordinator ini dalam tugasnya hingga tahun 2009, bekerjasama dengan staf BRR sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Diharapkan pasca tahun 2009, Pemda sudah dapat meneruskan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum selesai. Secara rinci proses seleksi program di Sekretariat Bersama dapat dilihat pada bagan berikut :

Bagan 4 - 2
Proses Seleksi Program Sekretariat Bersama



Sumber: Bapel BRR NAD- Nias, 2007

Skema proses seleksi kegiatan di atas menjelaskan bagaimana alur proses dari usulan-usulan kegiatan yang berasal dari berbagai pihak seperti masyarakat, Pemda, BRR, NGO, dan lainnya, akan melalui rangkaian proses di Sekretariat Bersama. Proposal kegiatan yang diajukan merupakan kebutuhan rencana pembangunan yang sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing *stakeholder*.

Kegiatan yang diusulkan dikaji berdasarkan prioritasnya, hasil evaluasi, dampak lingkungan dan rekayasa. Hal ini bertujuan agar kegiatan-kegiatan yang diusulkan dapat diintegrasikan dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan lainnya. Pada tahap selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang terpilih akan dikembalikan lagi kepada pihak terkait untuk selanjutnya dilaksanakan pembangunannya.

Setelah itu semua, Ditambahkan juga analisa disini, melihat ke strategi, kriteria dan mekanisme yang sudah disiapkan BRR, apa yang diperlukan oleh Pemda, K/L, Donor/NGO untuk mempersiapkan diri mereka sendiri. Dalam tabel.

Untuk menghadapi peralihan pengakhiran masa tugas BRR pada April 2009 yang dikaitkan juga dengan peningkatan kapasitas Pemda maka terdapat strategi yang sudah disiapkan oleh BRR, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Bagan 4 - 3
Strategi Pembangunan Kapasitas



Sumber: BRR NAD-Nias, 2007

Untuk itu, terdapat beberapa peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang perlu dilakukan dalam rangka menyongsong pengakhiran masa tugas BRR nanti. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4 - 74
Pembagian Peran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

PERAN PEMERINTAH PUSAT	PERAN PEMERINTAH DAERAH
1. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dengan berbagai stakeholders (Pemda dan Donor/NGO) untuk mendukung program keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca BRR 2. Menyusun penganggaran dan program pembangunan di level pusat untuk kesinambungan proses pembangunan daerah secara reguler pasca 2008-2009. 3. Melakukan kegiatan pusat di daerah melalui K/L terkait, melalui pendanaan dekonsentrasi dan tugas perbantuan serta skim pendanaan khusus lainnya. 4. Mendorong proses penyusunan kebijakan yang terkait dengan pengarusutamaan (mainstreaming) pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan di daerah melalui RPJMD dan RTRW.	1. Dari transisi menuju <i>exit strategy</i> diharapkan terciptanya kondisi pemulihan yang berkelanjutan pasca BRR, dan peran Pemda dalam mengawal proses rehab-rekons yang berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar. 2. Karena Pemda merupakan penanggung jawab pembangunan di daerah, maka Pemda perlu melakukan penyiapan aspek kapasitas kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, sistem dan mekanisme penganggaran.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Beberapa kesimpulan dalam laporan pemantauan dan evaluasi pada tahun 2006-2007 terhadap Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera ini dikelompokkan ke dalam lima kategori yaitu; konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan. Rekomendasi-rekomendasi yang dirumuskan diharapkan dapat menjadi masukan dan saran kepada berbagai *stakeholders* yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana.

5.1 KESIMPULAN

Laporan pemantauan dan evaluasi terhadap Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera tahun 2006-2007 didasarkan atas data dan informasi yang didapatkan melalui kegiatan pemantauan, perencanaan, maupun evaluasi atas wilayah NAD dan Kepulauan Nias Sumatera Utara sepanjang periode tahun 2007. Tahapan tersebut meliputi:

- A. Penyusunan Rencana Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Kepulauan Nias pasca gempa bumi 28 Maret 2005, dalam rangka mengakomodasi akibat dampak bencana pasca gempa bumi di Kepulauan Nias pada tanggal 28 Maret 2005, yang belum secara optimal diakomoadasikan dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah NAD dan Nias. Penyusunan perencanaan ini dikoordinasikan oleh Bappenas yang bekerja sama dengan BRR Regional VI (Kepulauan Nias), Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Bappeda Kabupaten Nias dan Bappeda Kabupaten Nias Selatan.
- B. Penyusunan Evaluasi Paruh Waktu (Mid Term Review) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara untuk melihat perkembangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam kurun waktu paruh waktu, dengan periode waktu antara 2005 hingga Mei 2007. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut terdapat empat kesimpulan utama yaitu; Pertama, pelaksanaan program sejalan dengan sasaran yang terdapat dalam Rencana Induk, namun volume pencapaiannya melebihi sasaran Rencana Induk. Kedua, pelaksanaan program sejalan dengan sasaran Rencana Induk yang diperkirakan volume pencapaiannya lebih kecil dari sasaran Rencana Induk. Ketiga, sasaran Rencana Induk tidak dilaksanakan karena telah dilakukan lembaga lain. Keempat, pelaksanaan program dilakukan meskipun tidak terdapat dalam Rencana Induk.
- C. Pasca penyusunan Evaluasi Paruh Waktu, maka disusun Rencana Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007-2009. Penyusunan perencanaan ini dikoordinasikan oleh BRR yang bekerja sama dengan Bappenas, dan Pemerintah Daerah.

- D. Penyusunan review oleh BPKP tertanggal 12 Desember 2007 terhadap Evaluasi Paruh Waktu Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2005-2007 dan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2007-2009. Hasil penting Review tersebut menyebutkan antara lain, perlunya dilakukan penyesuaian terhadap strategi dan kebijakan sebagaimana yang diatur dalam Perpres No. 30 Tahun 2005 untuk menjadi acuan dalam perubahan Rencana Induk dan penyusunan Rencana Aksi 2007-2009.

5.1.1 Aspek Konsistensi

Secara umum, realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selama periode tahun 2006-2007, belum seluruhnya mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Pada TA 2006, dari target 10,5 triliun berdasarkan perencanaan BRR tercapai sebesar 7,79 triliun atau 74% dari pagu DIPA BRR. Sedangkan untuk perencanaan BRR pada TA 2007 yaitu sebesar 10,9 triliun rupiah atau 29,32% sampai dengan status 31 Oktober 2007. Namun, secara rinci berdasarkan per bidang program dapat digambarkan pada tabel di bawah ini;

Tabel 5 - 1
Realisasi DIPA BRR TA 2007 Per Bidang Program

No.	Bidang Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Agama, Sosial dan Budaya	247.272.269.000	93.360.413.340	37,76
2.	Ekonomi dan Usaha	989.291.183.000	257.910.481.863	26,07
3.	Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan	1.531.663.164.000	408.614.565.093	26,68
4.	Perumahan dan Permukiman	3.748.661.308.000	1.112.003.252.363	29,66
5.	Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan	2.947.084.432.000	800.193.284.434	27,15
6.	Kelembagaan dan Pengembangan SDM	681.259.987.000	236.791.971.431	34,76

Beberapa masalah masih belum dapat diselesaikan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah dilaksanakan sampai dengan tahun 2007 tersebut. Antara lain: masih terdapat pengungsi yang tinggal di barak atau hunian sementara; masih rendahnya kualitas perumahan yang dibangun sehingga banyak yang tidak bisa dimanfaatkan oleh korban bencana; minimnya fasilitas pendukung permukiman yang dibangun, seperti drainase dan sanitasi; masih belum terselesaikannya masalah infrastruktur utama seperti jalan, jembatan dan pelabuhan secara menyeluruh; masih belum maksimalnya penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka mempersiapkan secara dini menyongsong berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias pada tahun 2009 mendatang.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan di lapangan antara lain :

- Penetapan tujuan dan sasaran program kegiatan yang berjangka menengah terkendala dengan keterbatasan mandat BRR yang berakhir pada April 2009,

- Kelengkapan/dukungan teknis yang tidak memadai, seperti adanya Rencana Teknis Detil (DED) dan atau dukungan studi kelayakan dan atau dokumen formal lainnya (antara lain pemenuhan kebutuhan masyarakat yang esensial),
- Keterlambatan proses pendanaan (pengesahan usulan DIPA) sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan,
- Komitmen dari pelaku di lapangan (kontraktor) yang tidak memenuhi kriteria teknis yang disyaratkan, dan rendahnya kemampuan kontraktor lokal baik dari segi keahlian dana dan metode,
- Sarana dan prasarana pendukung suatu proses perencanaan yang baik dan efektif belum dapat sepenuhnya tersedia, seperti database, perpetaan, perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) pendukung perencanaan seperti GIS dan lainnya, serta
- sulitnya transportasi pengangkutan logistik ke lokasi pembangunan.

A. Bidang Pemulihan Perumahan, Tata Ruang Pertanahan dan Lingkungan Hidup

- Menilai kesesuaian pencapaian sasaran program hingga tahun 2007 dibandingkan dengan Rencana Induk, maka terdapat beberapa kegiatan yang merupakan sasaran program rencana induk yang tidak dilaksanakan, dilaksanakan namun tidak dapat diselesaikan, serta kegiatan diluar sasaran rencana induk yang dilaksanakan sebagai akibat adanya kebutuhan yang belum diidentifikasi pada waktu penyusunan Rencana Induk. Program-program kegiatan tersebut perlu mendapatkan perhatian bagi BRR untuk ditindaklanjuti, diteruskan/lanjutan oleh Pemerintah Daerah, atau mendapatkan perhatian dalam review Rencana Induk:

Pencapaian sasaran program hingga tahun 2007 sesuai dengan Rencana Induk	Sebagian besar kegiatan lingkungan hidup diantaranya : • Rehabilitasi/Pemeliharaan Hutan Alam dan Lahan, • Peningkatan Usaha Masyarakat Di sekitar kawasan hutan, • Peningkatan kapasitas kelembagaan lokal, • Rehabilitasi Hutan kota, dan • Restorasi kawasan bufferzone.
Pencapaian sasaran program hingga tahun 2008 yang diperkirakan tidak akan mencapai sasaran program pada Rencana Induk (sebagai akibat adanya kebutuhan yang belum diidentifikasi pada waktu Rencana Induk disusun)	• Pembangunan Perumahan • Penyusunan RTRW Provinsi dan Kab/Kota • Sertifikat pengganti
Pencapaian sasaran program dilakukan di luar sasaran program yang terdapat dalam Rencana Induk	• <i>Village Mapping</i>
Sasaran Program dalam Rencana Induk yang sama sekali tidak dilaksanakan	-

- Pada dasarnya, kebutuhan riil yang teridentifikasi BRR untuk rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan mengalami perubahan bila dibandingkan dengan yang tercantum dalam Rencana Induk, setelah dilakukan verifikasi lapangan dengan menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat, sehingga melahirkan jumlah kebutuhan pembangunan rumah baru (yang jumlahnya lebih besar dari sasaran Rencana Induk), rumah yang perlu direhabilitasi (yang jumlahnya lebih kecil dari sasaran Rencana Induk), dan jenis rumah yang tidak tertuang dalam Rencana Induk; berupa program rumah bagi penyewa (*renters*) sebagai hasil verifikasi penghunian Huntara dan adanya program rumah *upgrading* (sebagai akibat tuntutan

masyarakat). Perencanaan untuk tahun 2007-2009 yang tertuang di dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias meski berbeda dalam jumlah volume kegiatannya dengan yang tercantum di Rencana Induk, tetapi dikatakan tetap mengacu kepada Rencana Induk.

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NAD, khusus pada bidang perumahan dan permukiman dalam kurun waktu tahun 2007-2012 terfokus pada penataan lingkungan permukiman melalui penyediaan berbagai prasarana dasar yang bila ditinjau dari konsistensi antar dokumen perencanaan, melengkapi perencanaan yang disusun oleh BRR.
- Rencana Induk memberikan arahan untuk melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota pasca gempa bumi dan tsunami. Hingga saat ini, beberapa dokumen RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota masih dalam proses. Keberadaan RTRW ini seyogyanya menjadi dasar dalam penetapan lokasi perumahan dan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan lokasi permukiman dengan lokasi kegiatan perekonomian rakyat, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi penghidupan masyarakat. Inisiasi penataan ruang oleh BRR yaitu *village planning* dan *Kecamatan Action Plan*, yang tidak terdapat dalam Rencana Induk, dan diupayakan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW, seharusnya dapat mengakomodasikan kebutuhan masyarakat tersebut.
- Pencapaian sertifikasi tanah masih jauh di bawah target sehingga masih perlu dipacu upaya penyelesaiannya. Sertifikat tanah merupakan masalah bukti hukum kepemilikan atas tanah dan ini merupakan persoalan utama dalam upaya memberikan manfaat pembangunan perumahan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut jika belum dapat diselesaikan hingga berakhirnya masa tugas Bapel RR NAD-Nias pada April 2009 maka harus dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah dalam jangka menengah. Pada kenyataannya, baik perencanaan jangka menengah Pemerintah Daerah di Provinsi NAD, maupun Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan belum mengantisipasi penyelesaian sertifikasi tanah tersebut, yang tercermin dalam dokumen RPJMD maupun RAPBDnya.
- Kontribusi Pemda dalam pembangunan perumahan dan permukiman terbatas dalam hal pembebasan lahan. Walaupun perencanaan jangka menengah pemerintah daerah telah mengakomodasi untuk pembangunan sarana prasarana permukiman, namun belum didukung dengan rencana optimalisasi APBD, sehingga pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sepenuhnya mengandalkan kepada DIPA BRR dan Donor/NGO. Pemulihan untuk perumahan mayoritas dilakukan oleh Donor/NGO, sedangkan BRR lebih banyak pada jenis kegiatan untuk renters atau penyewa yaitu sebanyak 90%.
- Kegiatan di bidang lingkungan hidup hampir seluruhnya telah terlaksana sesuai dengan kebutuhan riil, yang telah jauh mejabarkan rincian kegiatan yang di dalam Rencana Induk belum dijabarkan. Namun dalam pelaksanaannya, belum sepenuhnya telah terealisasi, yaitu yang terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia petugas kehutanan, dan pengembangan masyarakat (*community development*) sekitar hutan. Dengan fokus perhatian APBD beberapa kabupaten/kota sementara masih pada pembangunan gedung laboratorium beserta peralatannya, rehabilitasi lingkungan pantai dan SDA, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, maka keberlanjutan kegiatan lingkungan hidup perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM, baik untuk aparat Pemda maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Tahun 2007-2009 khusus bidang lingkungan hidup pasca masa tugas BRR.

B. Bidang Pemulihan Infrastruktur

- Penetapan program dan kegiatan bidang Infrastruktur pada umumnya mengikuti sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Induk. Beberapa kegiatan lainnya merupakan sasaran program rencana induk yang tidak dilaksanakan dan dilaksanakan namun tidak dapat diselesaikan. Bahkan terdapat pula kegiatan diluar sasaran rencana induk yang dilaksanakan sebagai akibat adanya kebutuhan yang belum diidentifikasi pada waktu penyusunan Rencana Induk.

Pencapaian sasaran program hingga tahun 2007 sesuai dengan Rencana Induk	▪ pembangunan irigasi ▪ pengendalian banjir ▪ pengaman pantai ▪ beberapa ruas jalan kabupaten
Pencapaian sasaran program hingga tahun 2008 yang diperkirakan tidak akan mencapai sasaran program pada Rencana Induk <i>(sebagai akibat adanya kebutuhan yang belum diidentifikasi pada waktu Rencana Induk disusun)</i>	▪ pembangunan bandara ▪ pembangunan jalan provinsi/nasional ▪ pembangunan jalan kabupaten
Pencapaian sasaran program dilakukan di luar sasaran program yang terdapat dalam Rencana Induk	▪ pencetakan sawah, ▪ listrik tenaga surya, ▪ PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), ▪ beberapa airstrip/ helipad, ▪ beberapa pelabuhan laut dsb.
Sasaran program dalam Rencana Induk yang sama sekali tidak dilaksanakan	▪ jalan kereta api (ditangani Departemen Perhubungan), ▪ pembangkit listrik yang besar (ditangani oleh PLN) dsb

- Berbagai kendala dan hambatan dalam upaya penyelesaian kegiatan infrastruktur antara lain adalah lambatnya pembebasan lahan; rendahnya kemampuan kontraktor lokal baik dari segi keahlian dana dan metode; sulitnya transport logistik ke lokasi; keterbatasan akses informasi terhadap masalah pendanaan; kualitas dan kuantitas SDM yang masih terbatas; keterlambatan pengesahan usulan DIPA; Kualitas bangunan infrastruktur tidak memenuhi standar; dan ketidakharmonisan antara BRR dengan masyarakat.
- Perencanaan dalam rencana induk mengalami penyesuaian akibat kondisi kebutuhan lapangan. Hal ini terjadi karena BRR sering melakukan perubahan prioritas akibat kondisi lapangan yang sangat dinamis, misalnya, pada tahap awal BRR berorientasi kepada rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional dan provinsi namun terjadi perubahan prioritas pada rehabilitasi dan rekonstruksi jalan kabupaten/kota dan desa, disebabkan jalan kabupaten/kota dan desa mempunyai peranan penting dalam transportasi logistik ke daerah terpencil.
- Di dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota terdapat penganggaran yang mendukung kegiatan pemulihan infrastruktur, yang menjadi komplemen dari kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan oleh BRR maupun Donor/NGO, misalnya anggaran untuk pembebasan lahan untuk jalan, pelabuhan, dan bandara. Sedangkan pada kegiatan pemulihan infrastruktur yang lain, Pemerintah Daerah lebih banyak berkontribusi pada aspek pelaksanaan dan pengawasan melalui keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Perencanaan sektor energi dan tenaga listrik pada umumnya konsisten antara sasaran program yang ditetapkan oleh BRR dengan ditetapkan oleh PLN, dimana

perencanaan BRR merupakan komplemen terhadap yang dilakukan oleh PLN. Sementara, perencanaan kegiatan sumber daya air jauh melebihi sasaran pada Rencana Induk, disebabkan kebutuhan yang lebih tinggi di lapangan yang diakibatkan oleh bencana, walaupun terdapat juga peningkatan sasaran yang di luar dari akibat bencana.

- Terdapat pembagian tugas dan peran yang cukup jelas antar masing-masing stakeholder yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, yaitu BRR, Donor/NGO dan Pemerintah Daerah. BRR lebih banyak perannya untuk pemulihan di bidang infrastruktur, Donor/NGO lebih banyak mendukung dan komplemen pada pemulihan infrastruktur, sedangkan Pemerintah Daerah lebih banyak pada pembebasan lahan yang akan dijadikan lokasi untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur.
- Hasil survey masyarakat secara umum menunjukkan bahwa walaupun sebagian besar masyarakat sudah menganggap infrastruktur telah hampir pulih dan dapat merasakan manfaat dari hasil rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur, terdapat beberapa permasalahan infrastruktur yang menjadi perhatian masyarakat dan manfaatnya masih belum maksimal dirasakan oleh masyarakat yaitu lambatnya proses pembangunan jalan dan jembatan, keterbatasan jaringan distribusi listrik, keterbatasan jaringan distribusi air bersih, keterbatasan jaringan distribusi BBM, keterbatasan sistem jaringan telekomunikasi, keberadaan tanggul pengaman pantai di sekitar permukiman dekat pantai yang belum terbangun dengan baik. Rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan kelistrikan yang sudah hampir selesai dilaksanakan belum dapat dirasakan manfaat secara memuaskan karena sering terjadinya pemadaman secara bergilir sebagai akibat ketersediaan pasokan tenaga listrik sangat terbatas.
- Khusus masyarakat di wilayah Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Singkil dan Banda Aceh mengeluhkan kondisi jalan dan jembatan, disebabkan karena tingkat dan dampak kerusakan pada beberapa wilayah tersebut tergolong sangat parah sehingga belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah bencana tersebut.
- Sementara, pembangunan sarana transportasi yang seyogyanya memperlancar mobilitas masyarakat dari satu wilayah kepada wilayah lain dan mendorong pertumbuhan perekonomian wilayah, ternyata lebih banyak terkonsentrasi di wilayah pantai utara-timur NAD dibandingkan wilayah pantai barat-selatan NAD, sehingga pembangunan sarana prasarana lainnya tidak dapat secara langsung dirasakan dampak manfaatnya bagi masyarakat di wilayah pantai barat-selatan, sebagai akibat akses yang sulit di dalam wilayah tersebut maupun ke wilayah-wilayah lain. Dengan kata lain, jarak yang menjadi lebih jauh antara lokasi permukiman dengan lokasi kegiatan perekonomian setelah tsunami bukan sebagai masalah jika didukung dengan sarana transportasi yang memadai.

C. Bidang Sosial dan Budaya

- Perlu adanya penyesuaian terhadap kondisi wilayah dan masyarakat melalui penyesuaian sasaran program Rencana Induk untuk kegiatan bidang sosial budaya sebagai berikut:

Pencapaian sasaran program hingga tahun 2007 sesuai dengan Rencana Induk	▪ Gedung Sekolah Menengah & Madrasah ▪ Gedung Puskesmas dan Pustu ▪ Sarana Ibadah ▪ Perlengkapan Sarana Olahraga
Pencapaian sasaran program hingga tahun 2008 yang diperkirakan tidak akan mencapai sasaran program pada Rencana	▪ Rumah Sakit Gunung Sitoli, Kep Nias ▪ Pembangunan Sekolah Menengah ▪ Bantuan ekonomi produktif kepada masyarakat korban bencana

Induk

(sebagai akibat adanya kebutuhan yang belum diidentifikasi pada waktu Rencana Induk disusun)

Pencapaian sasaran program dilakukan di luar sasaran program yang terdapat dalam Rencana Induk

- Pemberian beasiswa S2 dan S3 bagi dosen dan mahasiswa
- Beasiswa bagi tenaga medis

Sasaran program dalam Rencana Induk yang sama sekali tidak dilaksanakan

- Pengadaan Buku Nikah
- Pembangunan Asrama Mahasiswa di NAD
- Pembangunan gedung BPOM
- Rehabilitasi gedung Panti Asuhan Anak Yatim

-
- Kebijakan dan perencanaan bidang pemulihan sosial budaya yang digariskan BRR pada dasarnya mengikuti Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi, walaupun tetap diperlukan penyesuaian sesuai kondisi wilayah dan kebutuhan riil masyarakat. Konsistensi perencanaan yang sesuai dengan Rencana Induk diharapkan dapat mendorong proses pemulihan di bidang kehidupan sosial budaya pada masyarakat korban bencana.
 - Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) provinsi NAD dan kepulauan Nias provinsi Sumatera Utara saling melengkapi dengan perencanaan BRR, ditunjukkan misalnya program pendidikan formal yang tidak menjadi program utama di bidang pendidikan oleh BRR dilengkapi dalam RPJMD provinsi NAD. Hal ini mendorong proses percepatan pemulihan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemulihan kehidupan dan meningkatkan proses belajar mengajar di wilayah pasca bencana.
 - Program kegiatan sub sektor pendidikan yaitu program pendidikan anak usia dini, program wajib belajar 9 tahun, program pendidikan menengah, program pendidikan tinggi program pendidikan tinggi, pada umumnya konsisten antara dokumen Rencana Induk dengan kebutuhan riil dalam dokumen perencanaan BRR. Sementara di sub sektor kesehatan, beberapa kegiatan menurut kebutuhan riil melebihi Rencana Induk yaitu; Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas, dan Rumah Sakit. Demikian juga pada sub sektor agama, realisasi tahun 2006 telah melebihi rencana induk dan pada tahun 2007 bertambah kelebihannya terhadap rencana induk. Bila melihat kepada realisasi tersebut sangat jauh di atas Rencana Induk dan mungkin saja terjadi peningkatan kebutuhan di wilayah pascabencana.
 - Komitmen Donor/NGO untuk sektor pendidikan pada tahun 2007 sangat tinggi, dan lebih terfokus pada pembangunan gedung sekolah dasar, sekolah menengah dan rehabilitasi perguruan tinggi. Sedangkan dalam RPJMD pemerintah daerah untuk sektor pendidikan selama kurun waktu rehabilitasi dan rekonstruksi sangat terbatas pada program-program strategis. Dengan demikian dari kedua stakeholders tersebut menunjukkan adanya saling melengkapi antara satu dengan lainnya.
 - Terdapat pembagian peran yang saling melengkapi (komplemen) untuk kegiatan-kegiatan sub sektor pendidikan dan kesehatan. BRR lebih banyak pembangunan secara fisik dan pemberian beasiswa, Donor/NGO selain pembangunan sarpras juga melakukan pelatihan, sedangkan Pemda lebih banyak menyediakan tenaga Sumber Daya Manusia.
 - Sejalan dengan RPJMD yang telah ditetapkan untuk pembangunan jangka menengah wilayah NAD dan Nias, tinjauan terhadap kontribusi APBD untuk sektor pendidikan dari 7 kab/kota. Sebagian besar kabupaten/kota sampel mengalokasikan anggaran

untuk sektor pendidikan. APBD Kota Banda Aceh memberikan kontribusi anggaran terbesar dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang pendidikan, kecuali Kab Bireun, Aceh Singkil, dan Kabupaten Nias kurang optimal dalam mengalokasikan APBDnya untuk subsektor pendidikan.

- Rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilakukan di sub sektor pendidikan memberikan pengaruh dampak manfaat yang kurang optimal oleh masyarakat pada lingkup Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh yang merupakan wilayah yang terparah yang terkena dampak bencana gempa dan tsunami. Namun dampak manfaat tersebut dirasakan cukup optimal pada wilayah-wilayah berlokasi jauh dari pengaruh tsunami, seperti halnya di Singkil, termasuk peningkatan kenyamanan dalam belajar mengajar. Hasil yang berbeda di wilayah Kabupaten Pidie, dimana dengan latar belakang konflik yang berkepanjangan mengakibatkan kelambatan dalam pemulihan, dan berakibat masih rendahnya tingkat kenyamanan belajar di wilayah tersebut.
- Di lain pihak, pada sub sektor kesehatan, dampak rehabilitasi dan rekonstruksi setelah dua tahun tsunami khusus pada aspek ketersediaan tenaga medis, belum dirasakan manfaatnya secara maksimal bagi masyarakat di lokasi yang tidak mengalami kerusakan bencana yang begitu parah dan sebaliknya dapat dirasakan manfaatnya dengan baik di lokasi yang mengalami dampak bencana dilokasi yang paling parah. Hal ini terjadi bisa saja karena konsentrasi kegiatan pemulihan untuk ketersediaan tenaga medis banyak tersedia Kota Banda Aceh karena banyak berkumpul berbagai bantuan pada sub sektor kesehatan.

D. Bidang Pemulihan Perekonomian

- Pada dasarnya, dibandingkan dengan Rencana Induk, maka dari pencapaian sasaran program hingga tahun 2007, terdapat beberapa kegiatan yang merupakan sasaran program rencana induk yang tidak dilaksanakan, dilaksanakan namun tidak dapat diselesaikan, serta kegiatan diluar sasaran rencana induk yang dilaksanakan sebagai akibat adanya kebutuhan yang belum diidentifikasi pada waktu penyusunan Rencana Induk. Evaluasi konsistensi antar dokumen perencanaan dengan pelaksanaan bidang pemulihan perekonomian adalah sebagai berikut:

Program Kegiatan Tercantum dalam Rencana Induk	Program Kegiatan Tercantum dalam Rencana Induk (Namun tidak mencapai target, akibat belum tepat identifikasi kebutuhan riil)	Program Kegiatan Tercantum dalam Rencana Induk (Namun tidak dilaksanakan, karena tidak realistis/tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat)	Program Kegiatan yang secara eksplisit TIDAK Tercantum Dalam Rencana Induk (Namun dilaksanakan di lapangan karena diperlukan/dibutuhkan)
Perikanan Kelautan			
Rehabilitasi tambak yang rusak, Pengadaan Kapal motor kayu, Rehabilitasi kapal boat, dan pengadaan alat tangkap	Pengadaan Kapal Motor sebanyak 21 ribu unit.	Tidak Ada	Bantuan Agroinput, Pengembangan BBIP Simeulue, Hatchery skala rumah tangga, Keramba Jaring Apung , Sentra Pengolahan Ikan dan Bagan Apung.
Pertanian			

Rehabilitasi Persawahan; Rehabilitasi Perkebunan;	Lahan Lahan	Restocking Ternak (besar, kecil dan Unggas) sebanyak 1,9 juta ekor.	Tidak Ada	Pencetakan sawah baru, Penghijauan pekarangan, Pembangunan Jalan Produksi, Pengendalian penyakit hewan menular.
Perindustrian dan Perdagangan				
Pembangunan pelabuhan Malahayati ;Pilot Project Industri Garam rakyat; Pembangunan/rehabilitasi pasar ;		Tidak Ada	Tidak Ada	Penyediaan Fasilitas Industri, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pedagang Pasar (Revolving), Alat dan Kemetrolagian, Pembangunan Halte Labuy, dan Pengadaan Cold Storage.
Koperasi dan UKM				
Pemberdayaan Koperasi dan UKM		Tidak Ada	Tidak Ada	Pelatihan Pengelola LKM, Pelatihan Kewirausahaan, Bantuan teknis dan manajemen LKM,
Pariwisata				
Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana & Prasarana di Kawasan serta Objek & Daya Tarik Wisata (ODTW).		Tidak Ada	Tidak Ada	pengembangan sarana dan site plan wisata, Pelatihan bidang Pariwisata, Penyelenggaraan pesta rakyat.
Ketenagakerjaan				
Pembangunan dan Pengadaan Peralatan Balai Latihan Kerja		Tidak Ada	Tidak Ada	Pembangunan Jalan Lingkungan BLK, dan Informasi Bursa Kerja.

- Dokumen perencanaan bidang pemulihan pertanian, perdagangan dan perindustrian, perikanan, serta ketenaga kerjaan, baik yang disusun BRR, Pemerintah Daerah, dan Donor/NGO, pada dasarnya menjabarkan lebih rinci program dan kegiatan dalam perencanaan pemulihannya, walaupun hanya konsisten pada salah satu atau beberapa aspek saja dibandingkan dengan Rencana Induk. Pada umumnya, perencanaan strategis BRR lebih terfokus pada bantuan sarana prasarana, dan belum membangun dalam artian pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Demikian pula dengan perencanaan lembaga donor/NGO yang lebih memperhatikan bantuan sarana prasarana, walaupun ada sedikit perhatian pada bantuan modal. Pemberdayaan masyarakat, pengelolaan dan pemasaran diisikan melalui perencanaan jangka menengah Pemerintah Daerah (RPJMD).
- Perkoperasian, dalam Rencana Induk dikembangkan dengan kemampuan kewirausahaan yang menghimpun usaha individu yang kecil, agar mampu bersaing dengan usaha menengah dan besar, namun dalam pelaksanaannya, program pengembangan koperasi masih terbatas pada pemberian subsidi dan pelatihan dan belum ada upaya pementapan dan pengembangan usaha koperasi yang sistematis.
- Sebagian kegiatan, mengalami penyesuaian di lapangan, seperti halnya terdapat kegiatan yang tidak disebutkan di dalam rencana induk tetapi dilaksanakan oleh BRR seperti pencetakan sawah. Walaupun dasar pelaksanaan kegiatan ini bukan didasarkan kepada Rencana Induk tapi dilakukan dengan pertimbangan bahwa sawah tergolong rusak berat dan cukup luas, sehingga untuk mengganti sawah yang telah rusak tersebut dalam waktu yang cepat dilakukan dengan pencetakan sawah.
- Dampak rehabilitasi dan rekonstruksi di sektor-sektor perekonomian belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, terlihat dari hasil survey yang mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat merasa masih dan semakin susah

mendapat pekerjaan/penghidupan, terutama di Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Singkil dan Kota Banda Aceh, padahal Rencana Induk memberikan amanat untuk melakukan pemulihan mata pencaharian/penghidupan bagi masyarakat di wilayah pascabencana. Sementara, walaupun sebagian besar masyarakat merasakan kondisi ketersediaan kebutuhan pokok sudah pulih seperti keadaan sebelum bencana, ada juga wilayah yang masih yang dinilai masih mengalami ketersendatan kebutuhan pokok. Masalah distribusi dan tata niaga sembako perlu mendapatkan perhatian, dan ini merupakan salah satu sasaran dalam rencana induk.

E. Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum

- Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan dan hukum dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 yang dilaksanakan oleh BRR dengan landasan mengacu kepada Rencana Induk meliputi 4 (empat) hal yaitu:

Pencapaian sasaran program/kegiatan hingga tahun 2007 sesuai atau melebihi Rencana Induk	- o Fisik : rehabilitasi dan pembangunan Ktr KDH/DPRD/Dinas/Meuligo, Kantor Kecamatan, Kantor Desa/Kelurahan, Kejati, Kejari, Bapas/Rupbasan, Kanwil Depkumham, Kantor Imigrasi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, stasiun transmisi, gedung PWI, Mapolda, Brimobda, Dit. Polair, rumah dinas serta prasarana pendukung (pengadaan material, pengadaan peralatan, kendaraan) - o Non fisik : peningkatan profesionalisme aparat Pemda, program peningkatan kapasitas kelembagaan dan keuangan Pemda, peningkatan kerjasama antar daerah, penataan administrasi kependudukan, pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi.
Pencapaian sasaran program dan kegiatan lebih rendah dari Rencana Induk	- o Fisik : pembangunan Pengadilan Tinggi/PTUN, Mahkamah Syariah, rumah dinas - o Non fisik : peningkatan kapasitas mitigasi bencana Pemda, Pemantapan dan Monev Penataan Organisasi Pemda, penataan siskom humas daerah, Penambahan dan peningkatan kualitas SDM, pemeliharaan kemananan dan ketertiban daerah, pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah, pengembangan ketahanan masyarakat (peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, peningkatan komitmen pesatuan dan kesatuan, penataan hubungan negara dan masyarakat)
Pencapaian sasaran program/kegiatan yang dilaksanakan di luar sasaran program/kegiatan yang terdapat dalam Rencana Induk	- o Fisik : pembangunan rumah dinas camat, - o Non Fisik : prasarana pendukung (peralatan) kantor bidang Keteriban, keamanan, dan ketahanan masyarakat
Sasaran program/kegiatan dalam Rencana Induk yang tidak dilaksanakan tetapi dilaksanakan oleh pihak lain	o Non fisik : Penyusunan Sistem Prosedur Administrasi Paska Bencana bagi PNS, Penyediaan tenaga-tenaga Kontrak/Suplemen, penyelesaian rekrutmen CPNS, pengelolaan pertanahan, Pengelolaan SDM Aparatur, mewujudkan jaminan kepastian, perlindungan dan penegakkan hukum dan HAM, menetapkan payung hukum bagi pelaksanaan rehabiliasi dan rekonstruksi, dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan pengembangan ketahanan masyarakat (pengembangan peran diplomasi)

- Perencanaan program bidang kelembagaan, hukum dan K3M yang terdapat di Rencana Aksi BRR sudah mencerminkan rincian program/kegiatan pada Rencana Induk, namun untuk rincian kegiatan dan pencapaian/target terdapat perbedaan dikarenakan kebutuhan riil di lapangan yang jauh lebih kecil/besar dari yang ditetapkan dalam Rencana Induk dan usulan aspirasi pemerintah daerah/lembaga pengguna/masyarakat di Kabupaten/Kota terkait yang mengusulkan perencanaan pembangunan sarana kantor pemerintahan.
- Pembagian peran antar pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan dan hukum, yaitu antara BRR, Pemda, dan Donor/NGO telah cukup baik dan menciptakan mekanisme yang bersifat saling melengkapi. Pemerintah Daerah menyediakan lahan/lokasi kantor, BRR dan Donor/NGO melaksanakan peningkatan kapasitas untuk Pemda dan Aparatur Hukum serta Kepolisian, serta rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kantor. BRR membangun semua sarana pemerintahan bidang kelembagaan, hukum dan K3M sedangkan Donor/NGO terfokus pada pembangunan Kantor Camat, Kantor Desa/Lurah, dan Rumah Dinas.
- Pada dasarnya, secara menyeluruh, dampak rehabilitasi dan rekonstruksi bidang keamanan dan kelembagaan belum terlalu signifikan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik dari faktor keamanan lingkungan maupun pelayanan pemerintah desa dan pemanfaatan balee musyawarah desa. Hal tersebut cukup beralasan mengingat sebagian besar realisasi pembangunan masih dalam pencapaian yang rendah sehingga belum pulih seperti sebelumnya. Namun, sebagian masyarakat telah mulai merasakan manfaatnya pada beberapa daerah. Sebagai contoh, sebagian pelayanan kantor desa/lurah sudah memberikan manfaat dimana pelayanannya mengalami peningkatan di Kabupaten Aceh Jaya dan Pidie. Kemudian penggunaan balee musyawarah di Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya sudah bermanfaat bagi masyarakat. Namun untuk pelaksanaan keamanan lingkungan mengalami penurunan di semua lokasi atau dapat dikatakan belum dapat memberikan manfaat yang signifikan untuk masyarakat NAD dan Nias.
- Beberapa kendala yang menyebabkan rendahnya pencapaian adalah penyediaan dan pembebasan tanah dari pemerintah daerah, yang terhambat karena tidak tersedianya lahan, atau karena adanya bentrok lahan antar kepentingan; belum diterbitkannya RDTR sehingga menghambat pembangunan kantor pemerintahan yang sudah mendapat bantuan; jangka waktu pelaksanaan pembangunan fisik tidak mencukupi; dan kontraktor pelaksana yang tidak melanjutkan/ menyelesaikan pekerjaannya.
- Memperhatikan adanya beberapa program/kegiatan lainnya yang terdapat pada Rencana Induk dan belum atau tidak dilaksanakan BRR hingga tahun 2007, dan apabila program non fisik dan kegiatan tersebut dan program fisik lainnya belum terealisasi dalam rentang waktu hingga berakhirnya masa tugas BRR hingga April 2009, maka dimungkinkan program dan kegiatan tersebut dilanjutkan dalam jangka menengah baik oleh Pemda maupun K/L, ataupun Donor/NGO. Dalam kenyataannya, kontribusi Pemda dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pada bidang hukum, kelembagaan dan K3M sangat terbatas. Alokasi RAPBD untuk kegiatan pendukung rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2006 maupun 2007 sangat kecil dibandingkan total APBD di Kabupaten/Kota terpilih. Sedangkan dokumen RPJMD pun cukup terbatas dalam mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang masih harus dilaksanakan selanjutnya.
- Dengan demikian, pada beberapa kegiatan, Kementerian/Lembaga yang bersangkutan melalui instansi vertikal di daerah terkait dapat melaksanakan program pengelolaan sumberdaya manusia aparatur, program mewujudkan jaminan kepastian, perlindungan dan penegakan hukum dan HAM dan program payung

hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, melalui kegiatan fasilitasi penyediaan dan mutasi aparat pemerintah pusat untuk instansi vertikal. Selain itu, apabila kebutuhan riil rehabilitasi dan pembangunan kantor pemerintahan sangat besar dan belum dapat terealisasi, maka BRR dapat meminta bantuan kepada Donor/NGO karena apabila diserahkan kepada Pemda akan terkendala mengingat terbatasnya anggaran Pemda.

F. Bidang Multi Sektor

- Lembaga-lembaga donor dalam kerangka proyek multi sektor rehabilitasi dan rekonstruksi pada umumnya memberikan perhatian tidak hanya kepada proyek berbantuan fisik atau sarana prasarana, baik melalui program pemberian hak kepemilikan tanah pada buku tanah, pembangunan pelayanan publik, pembangunan kembali rumah penduduk, pembangunan kembali infrastruktur pemerintah dan komunitas, pemetaan tanah di daerah permukiman, namun juga memperhatikan proses delivery bantuan termasuk hal-hal terkait dengan peningkatan kapasitas SDM seperti pembangunan kapasitas pemerintah daerah, pengembangan sistem perencanaan, peningkatan sumber daya badan usaha lokal, bantuan teknis bagi BRR NAD-Nias dan staff pemerintah lokal, peningkatan kapasitas dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan berbagai organisasi berbasis komunitas, penguatan kapasitas pemimpin dan staf pemerintahan daerah, serta dukungan terhadap sistem dan proses untuk efektifitas pemerintahan daerah, bahkan mempromosikan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- Namun di lain pihak, dalam implementasinya, terdapat kesenjangan dalam realisasi pelaksanaan kegiatan dimana berbeda dengan realisasi kegiatan fisik yang hampir 100%, proyek-proyek pembangunan kapasitas dan tata kelola mayoritas program baru mencapai 50 % dari alokasi dana yang diimplementasikan termasuk program bantuan teknis bagi BRR NAD-Nias. Demikian pula dengan proyek pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan yang masih belum mencapai target komitmen yang ditetapkan.
- MDF merupakan lembaga yang melaksanakan rekonstruksi di berbagai sektor, dan terdapat keterkaitan yang saling mendukung diantara kegiatan proyek multi sektor dengan penyelesaian program di bidang pemulihan. Seperti misalnya, proyek RALAS mengenai kegiatan rekonstruksi administrasi pertanahan, rencana kegiatan adjudikasi RALAS (*Reconstruction Aceh Land Administration System*) sangat terkait dengan bidang pemulihan permukiman, pertanahan, tata ruang, dan lingkungan hidup. Contoh yang lain, pembangunan permukiman dengan memperhatikan perencanaan desa yang di rancang terintegrasi dengan infrastruktur pemerintahan. Hal-hal tersebut di atas membentuk kecenderungan kompetensi yang positif antar proyek multi sektor.

5.1.2 Aspek Koordinasi

Secara umum, peningkatan proses koordinasi dalam penyusunan perencanaan maupun dalam pelaksanaan, setelah dua tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, telah diupayakan Bapel BRR bersama stakeholders di pusat dan daerah walaupun masih belum maksimal seperti yang diharapkan oleh berbagai pihak. Hal tersebut ditunjukkan BRR pada proses penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias tahun 2007 – 2009 yang baru disusun pada bulan Juli – Agustus 2007, dimana dalam penyusunan tersebut, Bapel BRR melibatkan Bappenas, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah pun telah dibentuk *sekretariat bersama* baik di tingkat propinsi maupun di kabupaten yang bertujuan untuk

menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun demikian, fungsi sekretariat bersama tidak seluruhnya berjalan dengan baik di seluruh daerah, terutama di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah daerah dan masyarakat masih banyak yang merasakan ketidakpuasan dengan keberadaan BRR dalam sekretariat bersama tersebut. Fungsi sinkronisasi dalam perencanaan kegiatan antara Pemerintah daerah dan BRR tidak seimbang, sehingga sering menimbulkan persepsi atau pandangan yang tidak tepat di masing-masing pihak.

Di lain pihak, pola koordinasi reguler yang dilakukan melalui komunikasi dan pelaporan atas berbagai program dan kegiatan antara BRR dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya belum berjalan secara optimal. Antara Kementerian/Lembaga dengan Bapel BRR belum terciptanya koordinasi secara baik. Hal ini terlihat dengan tidak adanya ketersediaan data dan informasi kegiatan oleh BRR sebagai lembaga koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias.

Bapel BRR yang seyogyanya merupakan badan yang mengkoordinasikan bantuan-bantuan donor dan NGO, pada umumnya masih melaksanakan koordinasinya secara pasif. Pada umumnya, pihak pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi menyampaikan rencana program/proyek melalui proposal proyek untuk disetujui Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Proses persetujuan proposal tersebut dilaksanakan secara periodik setiap 2-3 minggu dan melibatkan stakeholder terkait dengan program yang dilaksanakan meliputi Pemda, tenaga ahli, dan sektor terkait. Namun setelah selesainya proyek, koordinasi pelaksanaan antara Bapel RR dengan Donor/NGO hanya dilaksanakan dalam bentuk penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Donor/NGO kepada Bapel RR melalui Operation Center BRR yang dipublikasikan di *Recovery NAD and Nias Database* (RAND).

Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah melakukan usaha peningkatan *koordinasi melalui kebijakan regionalisasi*. Dengan adanya regionalisasi dapat memperpendek rentang kendali baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi karena tidak semuanya dikendalikan dari BRR pusat. Kemudian, dengan adanya regionalisasi ini sudah dibentuk Sekretariat Bersama pada tingkat regional dengan melibatkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sekber di tingkat regional dapat melakukan koordinasi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan dengan pihak Bappeda dan SKPD setempat. Sedangkan jumlah pembagian regionalisasi yaitu terbagi ke dalam enam wilayah dengan kantor perwakilan yaitu di Banda Aceh, Meulaboh, Singkil, Takengon, Lhok Seumawe dan Gunung Sitoli.

A. Bidang Pemulihan Perumahan, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

- Permasalahan-permasalahan yang masih timbul khusus dalam bidang perumahan, mengindikasikan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan antar *stakeholders* terkait belum berjalan dengan baik.
- Koordinasi perencanaan di beberapa wilayah kabupaten/kota menunjukkan gambaran koordinasi dan pelibatan Pemda yang sangat terbatas. Di Kab. Aceh Besar, sebagian besar Pemda terlibat pada permohonan izin prinsip saja, tanpa dilibatkan dalam proses perencanaan, apalagi pelaksanaan, dan yang selanjutnya NGO/Donor membangun sendiri. Di lain pihak NGO/Donor yang membangun kerjasama dengan Pemda (atau dinas terkait), yaitu ILO, dan Pemda pun terlibat hanya dalam pengawasan kegiatan. Sementara, di Kab. Aceh Barat, pemda telah melakukan koordinasi yang baik dengan BRR, namun koordinasi dengan Donor/NGO tidak berjalan dengan baik, terutama dalam masalah pembangunan rumah dan PSD. Donor/NGO cenderung melakukan kegiatan langsung kepada masyarakat tanpa koordinasi dengan Pemda setempat. Sehingga terpaksa Pemda bekerja sama BRR

melalui sekretariat bersama melakukan pemantauan secara intensif melalui media, laporan masyarakat, sistem jaringan BRR maupun survey langsung di lapangan untuk mendapatkan beberapa kegiatan yang dilakukan Donor/NGO.

- Koordinasi diantara Bapel BRR dengan Pemda pun bermasalah. Tidak adanya koordinasi selama pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan, sehingga dinas tidak mengetahui secara detail proses pelaksanaan program yang berlangsung. Bahkan BRR tidak melaporkan secara detail implementasi dari pembangunan jaringan irigasi, sehingga setelah pembangunan dianggap selesai dan ditinggal, irigasi tersebut kembali mengalami kerusakan
- Sementara pelaksanaan koordinasi kegiatan sertifikasi tanah kurang berjalan dengan baik antara Bapel RR, BPN, dan Bank Dunia sebagai koordinator Multi Donor Fund, sehingga perlu difasilitasi oleh Dewan Pengarah dan BAPPENAS melalui rapat tripartit antara BPN dan Bapel RR.
- Koordinasi pelaksanaan bidang lingkungan hidup dilakukan secara terbatas, diwujudkan dalam *sharing* informasi oleh donor/NGO kepada Bapel RR dan Pemda melalui penyelenggaraan lokakarya terkait bidang lingkungan hidup, seperti lokakarya CEPPP (*Critical Environment Pressure Point Project*), yang telah diselenggarakan pada tahun 2006 dan dihadiri oleh Pemda, BRR, donor/NGO, dan masyarakat.

B. Bidang Pemulihan Infrastruktur

- Walaupun kegiatan koordinasi perencanaan telah dilakukan melalui CFAN, NISM, konsultasi publik, lokakarya, rapat triwulan, rapat sekretariat bersama, konsinyering, musrenbangda, musyawarah desa, dan lain lain, koordinasi perencanaan di wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi masih kurang berjalan baik, terutama di daerah kepulauan seperti Nias dan Simelue.
- Kurangnya koordinasi antar instansi/lembaga dan perencanaan yang tidak memperhatikan kondisi daerah terisolasi, menunjukkan pembagian tugas dan peran Regionalisasi Bapel BRR tidak optimal dan staf regional kurang mengetahui proyek yang dikerjakan pusat/BRR Banda Aceh, yang menyebabkan konsentrasi pembangunan infrastruktur lebih besar terlihat di kabupaten/kota besar atau daerah yang memiliki aksesibilitas jaringan jalan atau transportasi yang sudah baik.
- Pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam agenda atau forum sekretariat bersama, sebagai mekanisme perencanaan bersama, ada kalanya berjalan tidak sesuai dengan harapan masing-masing pelaku kegiatan akibat sikap ego sektoral antar dinas, lembaga dan BRR yang sering muncul dalam rapat-rapat koordinasi perencanaan pembangunan. Koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten atau provinsi dengan BRR berjalan baik di Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, sedangkan di daerah lain masih belum berjalan dengan baik. Bentuk koordinasi melalui pencapaian progres pelaksanaan kegiatan fisik, pembahasan permasalahan-permasalahan teknis dan non teknis di lapangan.
- Koordinasi bersama Donor/NGO dilakukan dengan *sharing* informasi Action Plan dan *sharing* data BRR dengan pemerintah daerah, lembaga PBB, NGO internasional dan lembaga donor, sehingga membantu BRR, NGO dan lembaga donor dalam mengidentifikasi proyek prioritas pemerintah daerah yang perlu dukungan. Namun demikian, pertemuan koordinasi tersebut lemah dalam tindak lanjut untuk lebih mendetailkan informasi yang diperoleh. Terdapat kecenderungan donor/NGO melakukan identifikasi dan pelaksanaan kegiatan langsung di lingkungan masyarakat tanpa melalui Pemda terlebih dahulu, sehingga sinkronisasi program dan kegiatan tidak berjalan baik.

- Koordinasi perencanaan antara Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan Donor/NGO dilaksanakan dalam bentuk penyampaian rencana program/proyek melalui proposal proyek untuk disetujui Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Proses persetujuan proposal tersebut melibatkan stakeholder terkait dengan program yang dilaksanakan meliputi Pemda, tenaga ahli, dan sektor terkait. Adanya Norma, Standar, Prosedur, Manual (NSPM) yang telah disusun baik dari tingkat pusat oleh Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah yang dalam bidang infrastruktur relatif lebih baku, maka hal ini mempermudah koordinasi perencanaan. Namun demikian, BRR yang memiliki mandat sebagai koordinator tetapi sekaligus menjadi implementator dianggap oleh sebagian NGO maupun sebagian kalangan pemerintah menjalankan fungsi yang bertentangan. Selain itu, data mengenai siapa melakukan apa dan dimana masih tidak terkoordinasikan dengan baik.
- Musrenbang, sebagai koordinasi tingkat lokal antara Bappeda dan Instansi Pemda NAD; Rapat koordinasi yang merupakan koordinasi tingkat lokal yang dihadiri oleh Perwakilan Pimpinan Daerah. Sejauh ini musrenbang daerah telah mulai terintegrasi dengan BRR dan berjalan cukup efektif. BRR memberikan masukan kepada pemda sehingga hal-hal yang sesuai dengan kebijakan pusat dan daerah dapat dimasukkan dalam rencana daerah.
- Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Donor MDF jauh lebih efektif dan bermanfaat yang dilaksanakan beberapa stakeholders di atas, khususnya kampanye dan ombudsperson sebagai bentuk komunikasi terhadap penerima manfaat. Kampanye di media setempat memberikan informasi kepada para penerima manfaat mengenai berbagai proyek Multi Donor Fund yang beroperasi di kabupaten mereka, hak-hak mereka dan menyediakan bagi mereka contact point untuk mereka mengajukan pertanyaan, menyampaikan berbagai keluhan dan laporan atas berbagai dugaan kasus korupsi. Sedangkan, *Ombudsperson* Multi Donor Fund menerima berbagai komentar dari penerima manfaat dan kemudian meneruskannya kepada para Manajer proyek terkait atau kepada BRR. *Ombudsperson* juga melakukan kunjungan lapangan secara reguler untuk berbicara secara pribadi dengan masyarakat mengenai kekhawatiran mereka atas relevansi berbagai proyek Multi Donor Fund.
- Koordinasi di beberapa daerah seperti Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Jaya, Sigli, Bireun, Aceh Singkil dan Aceh Besar, telah menunjukkan kemajuan antara BRR, Donor/NGO dengan pemerintah daerah. Namun tetap masalah selalu timbul di tahap pelaporan, dimana Pemda sangat kurang menerima informasi tentang apa saja program dan kegiatan yang sedang dan telah selesai dikerjakan oleh BRR terutama dalam bidang jalan, energi listrik, pos telekomunikasi dan sumber daya air.

C. Bidang Pemulihan Sosial Budaya

- Koordinasi perencanaan pada bidang pendidikan sudah berjalan secara baik karena ada keterkaitan kegiatan yang dilaksanakan oleh BRR dengan Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota serta Donor/NGO. Koordinasi ini terus berlangsung menyangkut pendistribusian bentuk bantuan dalam pembangunan gedung sekolah baik secara fisik maupun non fisik. Dengan adanya koordinasi perencanaan yang baik dalam sektor ini maka mempercepat proses pemulihan masyarakat dalam memperoleh perbaikan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat.
- Sedangkan koordinasi perencanaan dalam bidang agama, sosial dan budaya lebih banyak dilakukan oleh BRR dengan dinas terkait sedangkan donor/NGO lebih memilih melakukan *need assesment* langsung kepada masyarakat korban bencana.

Pertimbangan kalangan Donor/NGO karena pada bidang sosial budaya ini lebih banyak dilakukan oleh masyarakat secara langsung.

- Dalam hal koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, sudah tercipta koordinasi yang baik untuk bidang pendidikan dan kesehatan, didukung oleh komitmen antara pihak BRR, dinas terkait dan Donor/NGO yang mempunyai agenda pertemuan secara rutin dalam kerangka waktu 6 dan 3 bulanan. Dengan adanya pertemuan rutin tersebut maka dapat dilihat isu dan permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan. Model koordinasi pelaksanaan pada kedua sektor ini kiranya dapat menjadi percontohan proses koordinasi pada sektor-sektor lainnya.

D. Bidang Pemulihan Perekonomian

- Salah satu forum yang dipergunakan untuk melakukan koordinasi perencanaan untuk bidang pemulihan perekonomian yaitu CFAN 3. Di dalam forum tersebut isu perekonomian merupakan salah satu agenda utama dalam CFAN. Hasilnya antara lain yang penting adalah rekomendasi tentang perlunya pemantapan fondasi perekonomian jangka panjang yaitu mengimplementasikan project prioritas utama guna membangun fondasi perekonomian dalam rangka *better future economy*; serta mendesain dan mengimplementasikan *exit strategy* untuk *handover* program-program kepada pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kapasitasnya. Strategy dalam *better future economy* yaitu: menghilangkan hambatan seperti pungutan liar, gangguan keamanan, birokrasi dan aturan yang kurang mendukung; percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan, jembatan, pelabuhan udara; pelatihan sumber daya manusia; serta peningkatan dan mempermudah akses terhadap permodalan.
- Di lain pihak, koordinasi antara Bapel BRR dengan Pemda NAD dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi belum berjalan dengan semestinya, disebabkan tidak adanya komunikasi atau pelaporan reguler dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi antara Bapel BRR, Dinas maupun Bappeda. Hal yang mencolok adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Bapel dengan Pemda Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan, yang mengakibatkan tidak terakomodasinya kebutuhan daerah dalam pemulihan pasca bencana. Koordinasi dalam pelaksanaan ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam kegiatan atau pendanaan.

E. Bidang Kelembagaan, Hukum, dan K3M

- Tingkat koordinasi dalam penyusunan perencanaan di bidang kelembagaan dan hukum sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya namun masih dinilai belum optimal. Dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan antara Pemda, BRR dan Donor/NGO melalui sekretariat bersama secara umum telah berjalan dengan baik walaupun belum merata di semua lokasi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Sekretariat Bersama di Banda Aceh melaksanakan forum koordinasi kecamatan yang dinamakan forum koordinasi KORREXA (Komite Rehabilitasi dan Rekonstruksi Meuraxa), terdiri dari kumpulan masyarakat, aparat desa, Donor/NGO, BRR dan pemerintah level kecamatan maupun kabupaten/kota. Forum tersebut cukup efektif merupakan tempat berinteraksi, bertukar informasi dan mencari solusi setiap permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Di antara Bapel BRR dan Pemda, koordinasi penyusunan perencanaan fisik kelembagaan berjalan relatif baik, walaupun koordinasi Bapel BRR lebih terfokus

kepada Dinas dibandingkan dengan Badan yang ada di NAD-Nias. Sementara itu, koordinasi perencanaan bidang hukum yang dilakukan oleh Bapel BRR dengan stakeholder terkait, contohnya Kejaksaan Negeri belum berjalan optimal, disebabkan Bapel BRR berkoordinasi dengan Kanwil tingkat Provinsi yaitu di Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kejaksaan Negeri tidak dilibatkan secara langsung.

- Di antara Donor/NGO, Pemda dan BRR, pola koordinasi perencanaan program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan dan hukum terjalin dengan baik. Pemda memberikan usulan dalam penunjukkan sarana dan prasarana kantor yang mengalami kerusakan dan kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang baru kepada Donor/NGO, dilanjutkan oleh Donor/NGO berkoordinasi dengan Bapel BRR melalui penyampaian proposal proyek (RAN Database) untuk disetujui BRR dan menjabarkan rincian proyek di bidang kelembagaan, hukum maupun K3M yang ingin dilaksanakan.
- Di lain pihak, koordinasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan dan hukum, tidak ada koordinasi secara intensif maupun pelaporan serta hasil evaluasi pelaksanaan dari BRR kepada Pemda, dan laporan Donor/NGO kepada BRR maupun Pemda. Koordinasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi masih tergantung pada kewenangan di BRR pusat, sehingga mempengaruhi kecepatan dan fleksibilitas regional maupun Pemda dalam melakukan pelaksanaan di lapangan.
- Koordinasi dalam pengawasan sudah melibatkan Pemda, sebagai contoh di Kota Banda Aceh BRR melibatkan Pemda melalui Dinas Tata Kota dan Permukiman untuk memonitoring/mengawasi bangunan negara dan rumah dinas negara (rumah kejaksaan, Polri, dll) sehingga dapat memenuhi kualitas dan standar bangunan.

F. Multi Sektor

- Lembaga yang bergerak di proyek multi sektor mempunyai sistem dan mekanisme tersendiri dalam koordinasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. MDF yang dikelola oleh suatu Komite Pengarah yang diketuai bersama (*co-chair*) oleh kepala BRR, Kepala Delegasi Komisi Eropa (sebagai donor terbesar) dan Direktur Bank Dunia (sebagai trustee). Komite Pengarah mencakup para perwakilan dari para pemangku kepentingan utama termasuk berbagai lembaga pemerintah tingkat nasional dan daerah, para donor, komunitas masyarakat sipil, PBB dan LSM internasional. Komposisi yang luas dari para pemangku kepentingan rekonstruksi telah memungkinkan MDF untuk berperan sebagai suatu forum koordinasi donor dan dialog kebijakan yang cukup efektif.
- Koordinasi yang intensif juga telah digalang pada masing-masing proyek dan program kegiatan, seperti misalnya RALAS yang dalam implementasinya dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) bekerjasama dengan pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Proyek Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang berbasis pada masyarakat ini dilaksanakan dengan koordinasi oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Direktorat Cipta Karya, dan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman berbasis Komunitas (RE-KOMPAK) pembangunan kembali rumah penduduk yang implementasinya dilaksanakan dengan koordinasi oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Direktorat Cipta Karya dengan partisipasi langsung masyarakat.

5.1.3 Aspek Konsultasi

Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan bisa diwujudkan dalam bentuk *identifikasi penilaian kebutuhan, sosialisasi rencana kerja pembangunan, legitimasi komitmen perencanaan, pelibatan dalam pelaksanaan kegiatan, serta pelibatan dalam*

pengawasan dan evaluasi. Masyarakat perlu dilibatkan bukan hanya pada waktu pelaksanaan kegiatan, tapi juga pada tahap evaluasi dan monitoring "terbatas" secara non formal dan diluar struktur kelembagaan. Masyarakat juga memberikan masukan-masukan yang dapat berupa keluhan, saran dan pendapat dari berbagai pertemuan, salah satunya adalah rapat koordinasi sekretariat bersama. Secara umum, dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, BRR telah melibatkan konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program. Hal ini terlihat dengan keterlibatan masyarakat pada penyusunan Rencana Aksi Kepulauan Nias tahun 2007-2009 pasca gempa tanggal 28 Maret 2005 pada bulan Juni 2007 di Kabupaten Nias dan Nias Selatan melalui acara konsultasi publik. Hal serupa juga dilanjutkan pada penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias tahun 2007-2009 melalui acara konsultasi publik di Banda Aceh dan Jakarta. Sebaliknya, program rekonstruksi berbasis masyarakat yang dikembangkan BRR, sebagai upaya pengembangan keterlibatan masyarakat dalam proses rekonstruksi, masih belum optimal. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan masih terbatas dan lebih besar diterapkan dalam program perumahan masyarakat dan perekonomian. Kesempatan masyarakat dalam proses pengawasan kualitas bangunan atau konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor juga terbatas karena masyarakat tidak mengetahui gambar dan bestek bangunan.

Namun demikian, ketersediaan dan kemudahan akses informasi bagi publik dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi sangat penting. Hal tersebut dapat disediakan melalui *keberadaan sistem atau mekanisme yang dibangun untuk memfasilitasi konsultasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaan, forum-forum pertemuan untuk mengakomodasi permasalahan, revisi perencanaan dan pelaksanaannya, serta pengawasan pelaksanaan, fasilitasi-fasilitasi pendampingan yang dilakukan oleh Pemda, lembaga perguruan tinggi, LSM/NGO, dan lembaga profesional lainnya, serta ketersediaan akses informasi melalui media massa lokal, website, kotak pos pengaduan, maupun telpon bebas pulsa.*

A. Bidang Pemulihan Perumahan, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

- Rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang perumahan, pada dasarnya menggunakan pendekatan pelibatan partisipasi masyarakat. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Komunitas (RE-KOMPAK). Misalnya, bertujuan untuk membangun kembali dan memperbaiki rumah dengan menggunakan pendekatan berbasis komunitas dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan.
- Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang tata ruang juga menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat yaitu *village mapping* (perencanaan desa) yang dilakukan dengan prinsip berbasis masyarakat. Masyarakat melalui kegiatan ini memberikan informasi/gambaran kondisi desa dan dengan fasilitas konsultan maupun Donor/NGO mampu menampilkan rencana pengembangan desa di masa yang akan datang. Selain itu juga dapat memberikan informasi mengenai jenis dan lokasi perencanaan pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan. Manfaat yang bisa diperoleh melalui penyusunan *village planning* ini bisa diperoleh kondisi penataan ruang pada skala yang lebih kecil lagi. Dengan demikian masyarakat mengetahui kondisi secara riil mengenai kawasannya sendiri.
- Pendekatan partisipasi masyarakat juga tercermin dalam program RALAS. Adanya partisipasi masyarakat dan NGO yang membantu fasilitasi dan dibantu penggunaan media yang luas. Walaupun terdapat beberapa hambatan namun di lapangan sudah terlaksana *community mapping* (kegiatan penunjukan batas bidang tanah kembali oleh masyarakat sendiri yang difasilitasi oleh NGO. Kemudian dibuat sketch yang dilanjutkan dengan pemetaan pada citra Ikonos) sehingga terlihat masyarakat ikut dilibatkan.

- Terdapat beberapa media yang dipergunakan untuk kegiatan penyusunan tata ruang yaitu lokakarya dan forum pertemuan warga. Sebenarnya masih banyak media lainnya yang dapat dipergunakan untuk program perumahan maupun pertanahan sehingga masyarakat luas bisa mempunyai akses terhadap proses pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

B. Bidang Pemulihan Infrastruktur

- Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan diwujudkan dalam bentuk identifikasi penilaian kebutuhan untuk merencanakan pembangunan jalan pedesaan, drainase lokal, dan proyek-proyek pedesaan. Keterlibatan dalam tahap evaluasi dan monitoring masih "terbatas" secara non formal dan diluar struktur kelembagaan. Terdapat banyak kelemahan pengawasan kegiatan infrastruktur yang ada pada BRR seperti organisasi belum efektif, koordinasi masih lemah, pengawasan yang belum efektif serta *law enforcement* sangat lemah.
- Program rekonstruksi berbasis masyarakat yang dikembangkan BRR, sebagai upaya pengembangan keterlibatan masyarakat dalam proses rekonstruksi, masih belum optimal. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur masih terbatas. Kesempatan masyarakat dalam proses pengawasan kualitas bangunan atau konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor juga terbatas karena masyarakat tidak mengetahui gambar dan bestek bangunan.
- Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan transportasi, namun intensitas keterlibatannya sudah mulai menurun dari tahun sebelumnya, diakibatkan kuantitas dan kualitas pekerjaan tenaga kerja lokal yang semakin menurun. Namun di sektor-sektor pos dan telekomunikasi, dan energi dan listrik, masyarakat sangat jarang terlibat. Sebagian besar tenaga yang digunakan untuk pemulihan energi listrik adalah tenaga kerja yang sudah ada di bawah PLN.
- Media partisipasi masyarakat secara langsung dilakukan melalui konsultasi publik dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksana pekerjaan (pekerja) di lapangan dibawah koordinasi kontraktor, khususnya pembangunan jalan pedesaan, drainase lokal, dan proyek-proyek pedesaan yang berbasis masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebar di seluruh sub sektor dan wilayah rehabilitasi rekonstruksi. Kontraktor pada umumnya menggunakan tenaga lokal untuk pekerjaan-pekerjaan fisik infrastruktur. Pola dan mekanisme dalam hal ini mengikuti pola yang diterapkan kontraktor. Dalam keterlibatan masyarakat secara langsung tersebut, BRR menggunakan "pola pendampingan" melalui P2KP.
- Sementara itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik masih belum memiliki forum resmi. Media yang digunakan masyarakat dalam melakukan pengawasan masih terbatas dengan menggunakan media massa lokal, media elektronik lokal dan website.

C. Bidang Pemulihan Sosial dan Budaya

- Partisipasi yang dilaksanakan Bapel RR pada tahap perencanaan bidang pemulihan sosial dan budaya diwujudkan dalam bentuk identifikasi penilaian kebutuhan melalui kegiatan penelitian identifikasi kearifan lokal dalam membangun masyarakat kreatif, inovatif dan produktif. Proses pelibatan masyarakat ini dilibatkan bukan hanya pada waktu pelaksanaan kegiatan, tapi juga pada tahap evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan oleh Bapel RR.
- Bentuk partisipasi masyarakat proses pemulihan kehidupan masyarakat lainnya yaitu pertemuan besar yang dilakukan dalam rangka peningkatan dinamika

masyarakat pada konteks pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Bapel RR melalui kedeputian Agama, Sosial Budaya melaksanakan acara seminar internasional tentang budaya Aceh. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut telah melibatkan masyarakat secara baik kalangan nasional maupun internasional sehingga masyarakat secara langsung dapat memberikan gagasan dan pemikiran tentang dinamika budaya dan permasalahannya di Aceh.

D. Bidang Pemulihan Perekonomian

- Konsultasi di bidang pemulihan perekonomian sangat kurang antara stakeholders yang terkait. Sebagai akibatnya muncul beberapa masalah yaitu masyarakat tidak mengembalikan pinjaman kredit, ada sebagian masyarakat yang tidak mau mengembalikan dana pinjaman, dan sulit memonitor masyarakat yang mendapat dana pinjaman.
- Pada tahun 2007 ini pada beberapa kabupaten/kota, BRR dan Donor/NGO lebih banyak melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan 50 % lebih banyak dari keterlibatan ditahun lalu. Sebagai contoh, keterlibatan masyarakat dalam membangun jaringan irigasi pertanian yang didanai oleh World Bank (Bank Dunia), mulai dari pemilihan lokasi sampai dengan pembangunan, serta pengawasan. Jika terdapat penyelewengan masyarakat dapat melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
- Media yang dimanfaatkan dalam pelibatan masyarakat antara lain, Sekretariat Bersama antara Bapel BRR dengan pemda provinsi dan Kab/kota sebagai wadah penyatuan visi dan misi secara bersama termasuk penyelesaian masalah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan, pengumuman dan media "Serambi Indonesia" serta media center Pemda untuk memberikan akses informasi dan komunikasi tentang proses pembangunan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam penyusunan proposal pembangunan untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelum diserahkan kepada BRR distrik, dan dirapatkan dalam forum Sekber bersama-sama antara BRR, Pemerintah Daerah dan Lembaga Donor/NGO.

E. Bidang Kelembagaan dan Hukum

- BRR dan Donor/NGO sangat minim dalam melibatkan masyarakat dalam identifikasi penilaian kebutuhan, maupun dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi, karena BRR maupun Donor/NGO lebih banyak melibatkan aparat Pemda, hukum dan Polri dibandingkan masyarakat. Partisipasi masyarakat bidang kelembagaan dan hukum melalui peran lembaga agama, adat, dan sosial dinilai masih lemah. Masyarakat biasanya terlibat dalam merencanakan pembangunan sarana dan prasarana kantor kecamatan/desa/kelurahan dan balee musyawarah bersama kepala desa atau ketua kampung dalam musyawarah tingkat desa, dan terutama hanya dalam penyelesaian masalah pembebasan tanah dan pembangunan fisik bangunan khususnya yang dilaksanakan di daerahnya.
- Masyarakat menyampaikan masukan saran maupun kritiknya melalui rapat, forum koordinasi, seminar, workshop dan lain sebagainya. Pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada BRR dengan tembusan kepada Pemda terkait, namun keputusan tidak selalu ada di Pemda. Selain itu, forum koordinasi kecamatan yang terdiri dari kumpulan masyarakat, aparat desa, Donor/NGO, BRR dan pemerintah level kecamatan maupun kabupaten/kota, juga menjadi media berinteraksi masyarakat, untuk bertukar informasi dan mencari solusi setiap permasalahan. Musrenbang di tingkat kecamatan yang merupakan media konsultasi antara masyarakat dengan stakeholders lain masih belum efektif mengingat daerah belum memiliki utusan

husus, tetapi hanya diwakili oleh mukim/camat melalui pengiriman delegasi yang mewakili setiap desa/ kecamatan.

F. Multisektor

- Pendekatan berbasis masyarakat diterapkan oleh sejumlah NGO, seperti UN Habitat, Uplink, World Vision, Oxfam, P2KP melalui Multi Donor Fund (MDF). Masyarakat diberi peran yang besar melalui pembentukan kelompok swadaya, seperti proyek pembangunan rumah UN Habitat dan World Vision yang melibatkan partisipasi masyarakat, cukup berhasil dalam bantuan rumah UN Habitat.

5.1.4 Aspek Kapasitas

Sampai dengan 31 Oktober 2007, realisasi total pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah NAD dan Nias masih sangat rendah, yaitu baru mencapai 29,32 %. Sementara pelaksanaan program dan kegiatan khusus pada sektor-sektor perumahan, kesehatan, pendidikan serta infrastruktur jalan, masih rendah dari penyelesaian targetnya, baik menurut kebutuhan riil yang ditetapkan BRR sendiri maupun Rencana Induk.

Rendahnya pencapaian target atau sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi oleh BRR tersebut tidak lepas dari kapasitas lembaga dan kapasitas sumber daya manusia yang menjadi pelaku pembangunan. Efektivitas mekanisme perencanaan dalam lingkungan internal BRR, keberadaan standar perencanaan dan pelaksanaan, serta sejauh mana pengendalian dan pengawasan termasuk evaluasi dilakukan secara berkala, menjadi syarat mutlak dalam mengoptimalkan capaian rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, kualitas personel Bapel BRR, Satker, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dalam memahami perencanaan, pelaksanaan, serta proses koordinasi dan konsultasi yang harus dilalui, serta keberadaan aturan maupun kebijakan terkait pola pembinaan SDM akan memberikan pengaruh besar dalam capaian kinerja pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

A. Bidang Pemulihan Perumahan, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

- Realisasi pembangunan bidang perumahan tahun 2007 hingga 31 Oktober 2007 baru mencapai 42,15 % dari pagu sebesar Rp 3,4 triliun. Kondisi ini terjadi tidak terlepas dari hambatan pelaksanaan di lapangan yang demikian besar yang membuat realisasi penyerapan anggaran juga terhambat.
- Sementara, ditinjau dari kapasitas sumber daya manusia untuk bidang pemulihan perumahan dan permukiman, bila melihat pada jumlah satker BRR, terdapat peningkatan jumlah dari tahun 2006 berjumlah 15 satker dan 26 satker untuk tahun 2007, ternyata tidak secara langsung dapat meningkatkan kecepatan penyelesaian dan pencapaian target perumahan dan permukiman. Permasalahan yang cukup dominan adalah terkait pengendalian pelaksanaan kegiatan BRR terhadap pekerjaan satker-satkernya, dalam hal ini kapasitas dalam pelaporan keuangan, penerapan sanksi, dan administrasi kontrak.
- Secara kinerja, kontraktor perumahan mengalami kondisi yang tidak mencapai efisiensi dalam pencapaian target karena tidak bisa memenuhi ketentuan penyelesaian pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian atau kontrak. Hal ini terjadi karena kualitas pelaksana teknis kegiatan di lapangan yang terkadang berada di bawah standar dan sangat minim pengalaman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan.
- Memperhatikan “sisa” pekerjaan yang mungkin ditinggalkan BRR kepada Pemda, sementara kemungkinan kemampuan APBD dalam mendukung pemulihan

perumahan sangat sedikit, sangat diperlukan peningkatan kapasitas pemda dalam melanjutkan pemulihan di bidang tersebut. Sementara, kapasitas Pemda dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan dan permukiman, tata ruang, dan lingkungan hidup masih minimal dan perlu ditingkatkan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemda adalah dengan melibatkan Pemda dalam pengawasan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, seperti di Kab. Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.

- Restrukturisasi satker menurut regionalisasi yang telah ditetapkan BRR pada beberapa contoh kasus dilakukan dengan merekrut tenaga teknis dari dinas Kimpraswil, melibatkan dinas dilibatkan pada bantuan teknis. Namun demikian, untuk keseluruhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, aparat Pemda pada umumnya tidak memahami proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Mekanisme yang telah dibangun untuk terjadinya proses transfer informasi ini kurang didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Pemda itu sendiri.

B. Bidang Pemulihan Infrastruktur

- Realisasi total pencapaian rehabilitasi dan rekonstruksi bidang infrastruktur sampai dengan november 2007 adalah 41,86% dari total Rp 2,9 triliun. Pencapaian rendah tersebut sangat dipengaruhi oleh pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan, serta lemahnya kualitas kontraktor dan konsultan pelaksana.
- Lemahnya sistem pengendalian intern BRR dalam pembangunan infrastruktur memberikan andil dalam kelambatan pembangunan, baik penyusunan laporan keuangan, pengelolaan kas pada satker-satker, maupun pengelolaan barang milik negara BRR NAD-Nias yang tidak berdasarkan SPI yang memadai, belanja barang digunakan untuk pembelian aktiva tetap dan pembangunan fisik serta belanja modal digunakan untuk pemberian bantuan, dan penyajian persediaan pada satuan kerja pengembangan perumahan dan permukiman tidak tepat.
- Kesenjangan antara kemampuan kontraktor dan konsultan lokal dari segi keahlian, dana, dan metode dengan beban pekerjaan yang dilaksanakan, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Beberapa permasalahan tersebut, yaitu latar belakang dan pengalaman di luar bidang konstruksi, sangat minim kualitas tenaga terampil dan minimnya jumlah tenaga terampil untuk membangun infrastruktur yang sesuai konstruksi tahan gempa/bencana yang menyebabkan rendahnya kualitas hasil pekerjaan di bidang infrastruktur. Kontraktor dan konsultan merupakan pelaksana teknis langsung di lapangan sehingga berpengaruh langsung terhadap pemanfaatan hasil kegiatan infrastruktur bagi masyarakat korban bencana.
- Sementara Pemda yang diharapkan dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur masih memiliki kendala dalam beberapa hal, terutama pemda kabupaten/kota kecil atau yang memiliki APBD rendah, yaitu sistem perencanaan masih lemah, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, pendanaan yang masih terbatas, dan manajerial yang masih belum tertata dengan baik.

C. Bidang Pemulihan Sosial dan Budaya

- Secara umum kelembagaan di bidang sosial budaya BRR telah mengalami peningkatan melalui peningkatan koordinasi dan konsultasi antar stakeholders sehingga tumpang tindih program antar stakeholder bisa diminimalkan. Mekanisme perencanaan yang telah menggunakan standar perencanaan melalui *need*

assessment kepada masyarakat sebagai sasaran program dan melakukan *crosscheck* dengan pemerintah setempat juga mendukung kelancaran penyelesaian pekerjaan. Sistem laporan mingguan dari satker kepada manajer bidang masing-masing juga mempermudah proses pengendalian internal. Walaupun mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, kualitas beberapa pekerjaan di bidang sosial budaya masih dibawah standar di internal BRR yang lebih disebabkan oleh pihak ketiga atau kontraktor.

- Dari sisi sumber daya manusianya, tidak dapat dipungkiri, bahwa kinerja Satker juga tergantung dari upaya-upaya antisipasi terhadap (1) indikasi tender yang ada unsur KKN; (2) pemahaman peraturan dan perundangan seperti Kepres No. 80 tahun 2003; dan (3) kegiatan pelelangan yang terhambat karena keterlambatan pencairan DIPA. Keterbatasan jumlah pelaksana Satker serta beragam latar belakang pendidikan dan lingkup kerja personil satker sipil maupun swasta, juga berdampak pada pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan di lapangan.
- Kemampuan kontraktor dan konsultan lokal dari segi keahlian, dana, dan metode, tidak sebanding dengan beban pekerjaan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Khusus pemulihan bidang pendidikan, kualitas tenaga terampil dan jumlah tenaga terampil untuk melaksanakan pelatihan dan training juga masih sangat minimal.
- Dalam upaya melanjutkan pekerjaan pembangunan yang belum tuntas, telah banyak didukung dengan cukup baiknya proses mekanisme koordinasi perencanaan, pelaporan dan pengawasan dimana dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota dilibatkan dalam bidang sosial selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun demikian, dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca keberadaan BRR tahun 2009, pemerintah daerah masih perlu dukungan aspek pendanaan, mengingat daerah seperti Aceh Jaya, Aceh Singkil dan Pidie masih mengalami defisit pada APBDnya.
- SDM Pemda masih memerlukan peningkatan dalam keahlian dan manajemen, termasuk dalam sistem pelaporan dan manajemen yang belum terintegrasi secara baik. Kabupaten seperti Aceh Jaya, Aceh Singkil, Kabupaten Nias dan Nias Selatan, yang relatif jauh dari pusat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi masih memerlukan dukungan peningkatan kapasitas SDM. Keterlibatan SDM pemerintah daerah yang diwakili oleh dinas/SKPD terkait, dalam satuan kerja BRR merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam proses peningkatan kapasitas, namun hal tersebut tidak berdampak pada peningkatan kapasitas staf institusi yang diwakili karena belum adanya proses transfer keilmuan.

D. Bidang Pemulihan Perekonomian

- Satker BRR secara rutin mengadakan pertemuan untuk membahas isu dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebagai contoh, BRR (Singkil) melibatkan beberapa orang Pemda sebagai tim teknis dalam sekretariat bersama. Dengan adanya keterlibatan beberapa aparat SKPD terkait bermanfaat untuk menghindari adanya overlapping atau tumpang tindih terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan penerima manfaat (Beneficiaries).
- Kapasitas SDM Pemerintah daerah terutama di tingkat Kabupaten menjadi tidak memadai, akibat diperbantukan ke Satker BRR. Hal ini dikarenakan SDM diperbantukan tersebut adalah SDM yang berpengalaman dengan jumlah yang terbatas. Diperlukan pelatihan Sumber Daya Manusia guna menggantikan/regenerasi pegawai Pemda. Secara khusus, pemda memiliki mekanisme dan tata kerja sendiri dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Apabila

permasalahan muncul, pemda dapat berkoordinasi dengan dinas terkait yang dilanjutkan dengan pemetaan permasalahan dan dicari solusi bersama.

E. Bidang Kelembagaan dan Hukum

- Sampai dengan 30 November 2007, penyerapan anggaran untuk bidang kelembagaan dan hukum mulai meningkat yaitu sekitar 50 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun demikian, penyerapan anggaran tersebut yaitu sebesar Rp. 681.259.987.000,00 dan penyerapan anggaran hingga 30 November 2007 masih belum optimal yaitu mencapai Rp. 318.131.287.000,00 (46,70 %). Penyerapan dana yang belum mencapai 100 persen ini menggambarkan terjadinya kendala di lapangan yang menghambat penyerapan anggaran dan realisasi fisik, diantaranya penyediaan dan pembebasan tanah dari pemerintah daerah, RDTR belum diterbitkan, jangka waktu pelaksanaan pembangunan fisik tidak mencukupi, dan beberapa kontraktor pelaksana tidak melanjutkan/menyelesaikan pekerjaannya.
- BRR telah memiliki mekanisme perencanaan kegiatan kelembagaan dan hukum yang didahului dengan survey/kajian terhadap kebutuhan kelembagaan suatu daerah. Mekanisme pengawasan pun telah dibangun oleh konsultan BRR yang terdiri dari pihak yang membangun (kontraktor) dan pengawas. Kedeputian kelembagaan dan pengembangan SDM BRR rutin melaksanakan kegiatan monitoring terhadap bangunan tersebut.
- Dari sisi kapasitas kelembagaan, Satker yang berada di bawah kedeputian bidang kelembagaan dan pengembangan SDM pada tahun 2006 berjumlah 22 Satker dan pada tahun 2007 berkurang menjadi 19 satker, melalui penggabungan beberapa satker, dengan maksud agar koordinasi di antara satker dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat lebih efektif dan efisien. Selain itu, dengan adanya satker di setiap regional tentunya akan memudahkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kelembagaan dan Pengembangan SDM.
- Di lain pihak, kapasitas SDM kontraktor merupakan salah satu kelambatan pembangunan rehabilitasi dan pembangunan kantor pemerintahan. Beberapa kontraktor pelaksana tidak melanjutkan/menyelesaikan pekerjaannya, karena masa kontrak sudah lama berakhir tahun 2006 dan status kontrak lama tidak jelas. Sementara, kapasitas personel konsultan pengawas BRR dalam memahami perencanaan, pelaksanaan, serta proses koordinasi dan konsultasi yang harus dilalui untuk bidang kelembagaan dan hukum belum maksimal.
- Dengan pendanaan yang terbatas kelembagaan Pemerintah Daerah dapat dikatakan belum cukup siap dalam melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi, mengingat perkembangan APBDnya pada tahun 2006 maupun 2007, dimaba kontribusi Pemda dalam rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan dan hukum sangat kecil.
- Kesiapan SDM Pemda terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan proses koordinasi dan konsultasi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dikatakan belum siap paska berakhirnya masa tugas Bapel BRR di bulan April 2009. Untuk mendukung pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda, BRR dan Donor/NGO melaksanakan beberapa program dan kegiatan melalui pelatihan, seminar, pendampingan secara langsung, dan sebagainya. Rincian program tersebut diantaranya 1) Peningkatan profesionalisme aparat Pemda; 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda; 3) Peningkatan kapasitas keuangan Pemda; 4) Peningkatan kerjasama antara daerah; 5) Penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi (pimpinan daerah dan legislatif daerah); dan 6) Pengelolaan sumberdaya manusia aparatur. Hal yang sama juga terjadi di bidang

hukum dan K3M diantaranya adalah peningkatan kapasitas aparat hukum dan aparat TNI dan Polri serta pendidikan dan pelatihan teknis hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh BRR maupun Donor/NGO. Dengan adanya kegiatan tersebut, kapasitas Pemda diharapkan akan meningkat dan siap untuk melanjutkan

F. Multisektor

- Dari aspek kapasitas kelembagaan, dalam kerangka proyek multi sektor, standar optimal suatu kelembagaan telah dipenuhi, seperti halnya penerbitan pedoman-pedoman yang berhubungan dengan perencanaan bangunan telah dilaksanakan, dan disamping itu BRR juga membentuk perwakilan/regional, yang mewakili beberapa kabupaten untuk satu regional dalam rangka menggalang koordinasi dengan berbagai donor/NGO yang berperan di tingkat kabupaten/kota.

5.1.5 Aspek Keberlanjutan

- Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa masa tugas BRR NAD-Nias yaitu selama empat tahun dan akan berakhir pada April 2009. Secara hukum, dimungkinkan untuk dilakukan perpanjangan masa tugas lembaga tersebut namun sesuai prosedur harus berdasarkan rekomendasi Dewan Pengarah BRR NAD-Nias. Dengan berakhirnya masa tugas BRR maka tanggung jawab pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi diserahkan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- Dalam rangka mempersiapkan berakhirnya masa tugas BRR maka sangat urgen untuk melihat kesiapan Pemerintah Daerah dalam proses tersebut. Hal ini terkait dengan aspek keberlanjutan dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana NAD dan Kepulauan Nias. Untuk melihat kesiapan itu dapat dilihat dari aspek perencanaan (RPJMD dan Renstra SKPD) dan aspek penganggaran pembangunan (APBD).
- Terkait dengan kesiapan Pemda, khusus terkait dengan APBD, untuk wilayah Provinsi NAD terdapat UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur mengenai pendapatan bagi hasil gas alam dan minyak bumi serta Dana Otonomi Khusus. Bila melihat pemetaan tersebut maka APBD Provinsi NAD nampaknya cukup untuk melakukan proses keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui kemampuan APBD provinsi tersebut. Karena secara kalkulasi, jumlah dana yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yaitu mencapai 4 triliun rupiah per tahun anggaran.
- Sedangkan dengan kondisi APBD di Kepulauan Nias berdasarkan hasil data dan informasi menunjukkan masih minim dalam melakukan pembangunan di daerah tersebut. Termasuk adanya keterbatasan pendanaan untuk mendukung pemeliharaan dan pengoperasian seluruh hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi baik yang dilaksanakan oleh BRR maupun Donor/NGO.
- Dari aspek perencanaan yang terdapat dalam RPJMD, baik Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, sudah dapat dikatakan mengakomodasi hal-hal yang terkait dengan program dan kegiatan yang mendukung keberlanjutan dan kesinambungan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah tersebut. Karena di dalam perencanaan itu tercakup berbagai kerangka kebijakan program dan kegiatan yang dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- Terdapat beberapa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih perlu dilanjutkan baik oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan sisa-sisa pekerjaan yang masih belum selesai pada masa tugas BRR NAD-Nias. Kegiatan lanjutan itu meliputi semua bidang pemulihan yaitu perumahan

dan permukiman, infrastruktur, sosail budaya, perekonomian, dan kelembagaan dan hukum. Dari hasil capaian dan proyeksi capaian di tahun 2008 sudah bisa digambarkan kegiatan-kegiatan yang masih perlu dilanjutkan pada saat mandat BRR sudah habis.

- Di dalam proses pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, melibatkan tiga stakeholders utama yaitu BRR, Donor/NGO dan Pemerintah Daerah. Ketiga pelaku utama tersebut nampak adanya saling mendukung dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Walaupun tidak menutup kemungkinan pula adanya kegiatan-kegiatan yang sama dilakukan oleh pelaku dimaksud. Dengan tercipta kerjasama antara stakehlders melalui pembagian bidang sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholders menurut bidang pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi maka dapat terwujud percepatan pemulihan di wilayah pascabencana NAD dan Kepulauan Nias.
- Sejak awal dan secara bertahap dipandang urgen disiapkan dan dilaksanakan program penguatan kelembagaan dan kapasitas lokal secara sistematis. Penguatan kelembagaan daerah ini muncul melalui peningkatan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya penguatan kelembagaan daerah ini bertujuan untuk memastikan terjadinya keselarasan dan kesinambungan pembangunan di wilayah NAD dan Kepulauan Nias pasca rekonstruksi. Termasuk dalam konteks ini yaitu bermaksud untuk memelihara dan merawat seluruh hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun dalam melanjutkan dan mengembangkan program yang bersifat strategis. Namun, tidak dapat dielakkan akan adanya potensi permasalahan dan hambatan dalam tahap keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca pengakhiran masa tugas BRR.
- Beberapa pemikiran yang mendasari diperlukannya sistem atau mekanisme yang dibangun untuk keberlanjutan RR NAD-Nias adalah: Pertama; Proses membangun untuk menjadi lebih baik membutuhkan lebih banyak upaya dari apa yang tercantum di rencana induk yang telah ada, karena membangun NAD-Nias tidak hanya sampai pada tingkat kerusakan dan kerugian tanpa menyelesaikan permasalahan konflik dan segala akibatnya serta keterbelakangan pembangunan, khususnya di Nias. Kedua; Selama 4 tahun masa rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah dan lembaga nasional dan internasional telah menginvestasikan proyek-proyek dalam jumlah besar, lebih besar dari kemampuan Pemerintah Daerah dalam hal kapasitas manajemen, operasi, dan pemeliharannya. Pada masa selanjutnya setelah selesai masa tugas BRR, berarti tidak ada lagi dukungan program rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah dan donor. *Ketiga*; Kesiapan pemerintah daerah dan perilaku masyarakat dalam menghadapi penurunan alokasi anggaran pembangunan. Dengan berakhirnya masa tugas BRR, maka anggaran pembangunan melalui APBN dan bantuan donor NGO akan menurun. Karena itu upaya untuk membangun kemandirian masyarakat menjadi sangat penting dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Keempat; Kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat apabila kembali terjadi bencana serupa. Meskipun demikian perlu kesiapan masyarakat dan lembaganya, dalam menghadapi bencana, apapun bentuk bencana itu. Kesiapan masyarakat menghadapi tsunami ini perlu dibudayakan sebagaimana telah ada pada masyarakat Simeulue.
- Aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilaksanakan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias diperuntukkan bagi pemulihan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias – Provinsi Sumatera Utara, perlu penanganan khusus dan cepat dengan mempertimbangkan berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias pada tahun 2009. Penanganan khusus dan cepat bukan berarti meninggalkan sisi administrasi berupa pencatatan dan dokumentasi kepemilikannya.

- Salah satu langkah penting untuk memastikan transisi yang lancar dari fase rekonstruksi adalah dari sedini mungkin melibatkan Pemerintah Daerah. Hal ini akan memperkuat dan membangun keterlibatan Pemda dalam kegiatan rekonstruksi dan mendukung koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat. Sejak Mei 2006, BRR Nias telah meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan BRR melalui pendirian Sekretariat Bersama (Sekber).

Mengenai posisi dan peran Sekretariat Bersama dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi sangat penting keberadaannya. Fungsi Sekber ini menjadi forum koordinasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan di lapangan.

5.2 REKOMENDASI

5.2.1 Penyusunan Kebijakan dan Program Tahun Anggaran 2008

- Secara umum, berdasarkan evaluasi terhadap proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di setiap bidang pemulihan, perlu diidentifikasi hal-hal yang perlu segera dikoordinasikan, disinkronkan, ditetapkan, diputuskan, dikembangkan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2008. Dengan demikian, dapat segera dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan mendatang, terutama terkait dengan Rencana Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pascabencana NAD dan Kepulauan Nias.
- Dalam rangka mempersiapkan penyusunan kebijakan dan program serta kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengendalian penanganan bencana di wilayah Provinsi NAD dan wilayah Nias Sumatera Utara tahun 2008, aspek-aspek utama berikut ini yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, koordinasi antar berbagai pihak yang terkait penanganan bencana, serta keterlibatan aktif dari berbagai unsur masyarakat terutama yang berkaitan langsung dengan penanganan dan pengendalian bencana.

1. Konsistensi Perencanaan dan Pelaksanaan

Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan dapat terjadi dengan beberapa tindak yang terkait dengan dokumen perencanaan, hukum dan per Undang-Undangan, berbagai aturan pendukung, kegiatan pengawasan, optimalisasi kontribusi stakeholders dan komitmennya, pembiayaan, dan penyelesaian masalah-masalah di lapangan, yang digambarkan sebagai berikut:

- Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi perlu memperhatikan saran dan rekomendasi hasil temuan BPK RI Per April 2007 tentang pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan sistem pengendalian intern dan pemeriksaan kepatuhan terhadap laporan keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Hasil pemeriksaan tersebut memberikan rekomendasi bahwa: antara lain; (1) Agar Kepala Bapel BRR NAD-Nias mengkaji ulang dan memperbaiki Sistem Pengendalian Interin yang menadai dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan kas, dan pengelolaan aset tetap serta meningkatkan pengawasan secara berjenjang sampai pada tingkat Satker. 2) Nengkaji ulang mekanisme penyaluran bantuan kepada masyarakat agar lebih efektif. 3. Mengenakan sanksi keterlambatan kepada rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan. 4. Menertibkan rekening-rekening di luar

mekanisme APBN. Dengan memperhatikan hasil-hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian sasaran dan target dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi, serta meningkatkan upaya-upaya pemulihan kondisi wilayah dan masyarakat di wilayah pascabencana NAD dan Kepulauan Nias.

- Perencanaan dan Keuangan. Bapel RR hendaknya dapat melakukan langkah-langkah konkret dan taktis dalam rangka mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan, yaitu penetapan tujuan dan sasaran program yang lebih jelas, menyusun strategi dan mempercepat upaya untuk kelancaran proses pendanaan.
- Dukungan di Lapangan. Dalam rangka mempercepat proses pemulihan wilayah NAD dan Nias, Bapel RR perlu konsisten pada perencanaan kerjanya dengan mengoptimalkan dukungan teknis di lapangan, meningkatkan fasilitasi dan mengawal komitmen dari pelaku di lapangan, dan meningkatkan kemudahan untuk transportasi pengangkutan. Perhatian pada upaya tersebut diharapkan membantu capaian program dan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga dapat dirasakan manfaat dan dampaknya bagi masyarakat korban bencana. Dengan adanya penyelesaian hambatan dan kendala tersebut dapat mendukung percepatan pemulihan pada wilayah yang terkena dampak bencana, khususnya pada bidang pemulihan infrastruktur merupakan kunci utama dan prioritas kerangka pemulihan untuk menormalkan wilayah Prov NAD dan Kep Nias.
- Peraturan dan Perundangan. Beberapa peraturan dan perUndangan perlu mendapatkan perhatian dan memerlukan *langkah-langkah kebijakan lanjutan*, yaitu:
 - a. Perlu upaya sinkronisasi dan harmonisasi antar para pelaku dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Payung hukum ini dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam kerangka waktu yang bersifat jangka panjang bagi para pihak yang berkepentingan dalam proses pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - b. Mempercepat proses legalitas terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui payung hukum qanun atau peraturan daerah sehingga dapat menjadi acuan yang lebih kuat dan pasti dalam proses keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi di masa yang akan datang.
 - c. Mempercepat proses penyelesaian sertifikasi tanah bagi para korban bencana di wilayah NAD dan Kepulauan Nias sehingga dapat memperoleh kepastian hukum bagi pemilik bantuan rumah. Keberadaan sertifikasi ini sangat urgen dan prioritas bagi korban bencana dalam jangka panjang, karena berkaitan dengan hak kepemilikan terhadap tanah di masa depan. Bila dalam jangka waktu masa tugas BRR penyelesaian ini tidak dapat diselesaikan maka diperlukan tindak/langkah strategis yang dipersiapkan Bapel BRR bersama dengan Pemda dan Kementerian/Lembaga.
 - d. Mempercepat penyelesaian masalah krusial dalam pembebasan lahan dan pengadaan lahan yang sering memicu permasalahan di lapangan. Aturan terkait penyediaan lahan dan penegakan hukumnya, dapat mempercepat pembangunan secara fisik sarana dan prasarana baik untuk mendukung

proses jalannya roda pemerintahan baik pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota maupun pelayanan terhadap masyarakat secara lebih baik dibandingkan sebelum terjadi peristiwa bencana.

- Kontribusi dan Komitmen. Untuk mendukung pemulihan wilayah NAD dan Nias, termasuk pemulihan sektor perumahan dan permukiman yang merupakan masalah prioritas dan utama bagi penanganan korban bencana, hendaknya Pemerintah Daerah kiranya turut memberikan kontribusi juga dalam sektor tersebut. Dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah ini sangat diperlukan untuk melakukan pemulihan wilayah dan kehidupan masyarakat melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkelanjutan pasca berakhirnya BRR pada April 2009. Dukungan tersebut perlu ditunjukkan dengan penyiapan pembiayaan yang cukup melalui APBD setempat.
- Masalah di Lapangan: Pengawasan. Pengawasan merupakan aspek penting yang dapat mengoptimalkan dan mempercepat pelaksanaan rencana di lapangan. Khususnya bidang pemulihan infrastruktur, terdapat beberapa isu krusial yang harus diperhatikan oleh BRR, yaitu masalah-masalah lapangan yang terkait dengan akses logistik/material dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan, serta masalah kontraktor pengawasan yang kiranya dapat menjaga kualitas kegiatan.

2. Koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan

Penyusunan kerangka program dan kegiatan memerlukan koordinasi yang efektif, baik dalam perencanaan maupun dalam upaya mengimplementasikannya. Koordinasi dalam pemulihan bidang-bidang perumahan, pertanahan dan infrastruktur, perekonomian, serta kelembagaan dan hukum, memerlukan komitmen untuk bekerjasama secara intensif dan memerlukan pengawalan antara Bapel BRR dengan Pemerintah Daerah, Donor/NGO, serta Kementerian/Lembaga terkait bidang pemulihan, khususnya pada daerah-daerah terisolasi, di wilayah regional ataupun antara wilayah regional dengan Banda Aceh (pusat BRR), yang didukung dengan proses evaluasi program dan kegiatan dan proses pelaporan yang komunikatif dan intensif.

- Berbagai pola koordinasi yang telah dilaksanakan sejauh ini perlu lebih ditingkatkan lagi. Fungsi sinkronisasi dalam perencanaan kegiatan antara Pemerintah daerah dan BRR melalui sekretariat bersama perlu lebih seimbang, sehingga tercipta kesepakatan bersama yang memberi dampak semakin meningkatnya kualitas pembangunan di wilayah NAD dan Nias. Koordinasi yang dilakukan melalui komunikasi dan pelaporan atas berbagai program dan kegiatan antara BRR dengan Kementerian/Lembaga dan lembaga-lembaga pemerintah perlu lebih dimaksimalkan, sehingga pendataan dan pencatatan terkait kebencanaan dan upaya-upaya pemulihannya dapat diketahui secara transparan oleh semua pihak dan memberi manfaat bagi upaya perbaikan dan percepatan pemulihan secara lebih cepat dan tepat. Bapel BRR seyogyanya mengkoordinasikan bantuan-bantuan donor dan NGO secara lebih aktif, mulai dari aspek perencanaan sehingga tumpang tindih, kesalahan pemilihan lokasi, ketidakpatuhan pada standar, dapat dihindarkan, termasuk monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaannya.
- Karena perumahan dan permukiman merupakan sasaran prioritas dan strategis sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Induk, dan menjadi prioritas penyelesaian pemulihan bagi Bapel BRR, maka tahun 2008 menjadi tolok ukur penuntasan masalah perumahan dan permukiman. Koordinasi perencanaan dan

pelaksanaan mutlak harus segera terwujud antara BRR dengan Donor/NGO dan Pemda secara baik supaya dapat dihindari tumpang tindih kegiatan di lapangan, segera diselesaikannya perumahan yang perlu mendapatkan kelengkapan fasilitas permukiman, dan dapat diselesaikannya masalah korban bencana yang masih menempati hunian sementara. Maksimalisasi peran Pemda dalam koordinasi, perlu memperhatikan gambaran kondisi lapangan yang telah terjadi sebelumnya, baik terkait fungsi forum sekretariat bersama, pola komunikasi verbal melalui data dan pelaporan, serta fungsi koordinasi terhadap donor/NGO, mengingat peran Pemda yang sangat penting dalam menerima tongkat estafet pembangunan selanjutnya.

- Khusus terkait dengan beberapa sektor yang penting namun belum mendapatkan perhatian koordinasi yang memadai adalah tata ruang dan lingkungan hidup. pemulihan lingkungan hidup yang sangat perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan dan program kegiatan tahun 2008 dan masa-masa mendatang, perlu lebih mendapatkan porsi koordinasi yang semakin meningkat antara donor/NGO, Pemda, dan Kementerian/Lembaga terkait yang tidak hanya terbatas dan sifatnya benar-benar menindaklanjuti penyelenggaraan CEP (Critical Environment Pressure Point Project).
- Khusus bidang pemulihan infrastruktur, koordinasi masih perlu dimaksimalkan terutama pada daerah terisolasi. Untuk itu diharapkan adanya koordinasi antara staf Bapel RR yang terdapat di tingkat regional dengan di Pusat. Dengan demikian pembangunan di bidang infrastruktur dapat dilakukan secara merata pada seluruh wilayah pasca bencana. Dalam hal ini, fungsi Sekretariat Bersama untuk koordinasi pada bidang infrastruktur supaya dilakukan secara sinkron antar berbagai pelaku dengan menghilangkan sikap ego sentris antar sektoral, antar dinas, Donor/NGO dan Bapel RR. Pertemuan koordinasi seperti CFAN, NISM, konsultasi publik, lokakarya, rapat sekretariat bersama, perlu lebih diperkuat dalam tindak lanjut untuk lebih mendetailkan informasi dan solusi yang diperoleh dan akan dilaksanakan. Mekanisme yang jelas perlu ditegakkan dalam koordinasi perencanaan antara donor/NGO, BRR dan Pemda, sehingga sinkronisasi program dan kegiatan tidak berjalan. Pola koordinasi seperti yang dilakukan dalam kerangka MDF dapat menjadi contoh baik melalui cara kampanye untuk memberikan informasi kegiatan, hak masyarakat, dan penyampaian keluhan, serta adanya Ombudsperson yang melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan.

3. Evaluasi Kegiatan 2006/2007 dan Tindak Lanjut 2008

Pemulihan bidang-bidang perumahan, infrastruktur, perekonomian, kelembagaan dan hukum, hanya dapat terwujud efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat korban bencana, bila mengikutsertakan secara aktif masyarakat dari mulai identifikasi penilaian kebutuhan, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan, serta evaluasi, khususnya dengan pemeranan lembaga agama, adat, dan sosial kemasyarakatan.

- Walaupun keterlibatan masyarakat telah dilaksanakan pada beberapa kegiatan pemulihan perumahan dan infrastruktur, yang melibatkan LSM dan donor, dalam bentuk identifikasi penilaian kebutuhan untuk merencanakan pembangunan jalan pedesaan, drainase lokal, dan proyek-proyek pedesaan, serta keterlibatan dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan pada beberapa kegiatan, namun keterlibatan dalam tahap evaluasi dan monitoring masih terbatas. Untuk itu keterlibatan masyarakat perlu diperluas lagi dalam monitoring dan pengawasan proses, untuk menghindarkan hasil kegiatan perumahan dan infrastruktur yang

berada di bawah kualitas. Pengawasan yang melibatkan masyarakat di bidang infrastruktur hendaknya dapat diwadahi dalam forum resmi, sehingga berbagai masukan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dapat diproses dan ditindaklanjuti secara langsung.

- Diperlukan peningkatan konsultasi antar berbagai stakeholders dan kalangan masyarakat untuk pemulihan perekonomian, khususnya dalam memonitor pendistribusian dana pinjaman dan pengembalian pinjaman kredit.
- Bapel RR dan Donor/NGO sebaiknya dapat melibatkan masyarakat dalam identifikasi penilaian kebutuhan maupun dalam pelaksanaan serta evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan kelembagaan dan penegakan hukum. Salah satu upaya yang penting untuk ditempuh yaitu dengan melakukan peningkatan peran lembaga agama, adat, dan sosial. Peran kelembagaan ini kiranya dapat menjadi perwakilan masyarakat dalam menyampaikan berbagai masukan, saran dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu, forum kecamatan dan Musrenbang dapat lebih ditingkatkan dan diperluas sebagai wadah penyiapan perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa.
- Pendekatan pembangunan berbasis masyarakat seperti yang diterapkan oleh sejumlah NGO, melalui Multi Donor Fund (MDF), dengan memberi peran yang besar kepada masyarakat melalui pembentukan kelompok swadaya untuk pemulihan perumahan, dapat dilaksanakan BRR atau Pemda, dan dapat diperluas pada bidang-bidang pemulihan perekonomian dan infrastruktur lainnya.

5.2.2 Mekanisme dan Prosedur Perencanaan dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Rangka Persiapan Pengakhiran Masa Tugas (PMT) BRR.

- Dalam rangka persiapan pengakhiran masa tugas BRR, perlu disiapkan mekanisme dan prosedur perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memadai, dengan memperhatikan penyusunan perencanaan dan pembiayaan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan Pemda melalui forum koordinasi yang telah ada (Musrenbang dan Sekretariat Bersama), didukung regulasi dan kebijakan yang kuat serta penciptaan tata cara dan prosedur yang tersistem dalam setiap bidang pemulihan.
- BRR bersama Pemda perlu melakukan peningkatan dan maksimalisasi koordinasi perencanaan secara resmi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai sarana sinkronisasi dan konsolidasi kegiatan pembangunan reguler dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam hal perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan. Selanjutnya, Pemda perlu melakukan integrasi secara terpadu kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah secara reguler.
- Perlu dilakukan optimalisasi keberadaan Sekretariat Bersama (Sekber) antara BRR, Pemda dan Donor/NGO sehingga dapat terwujud koordinasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Keberadaan Sekretariat Bersama diharapkan dapat menjadi wahana transisi dari BRR kepada Pemerintah Daerah menuju pengakhiran masa tugas BRR pada 2009 nanti.
- Pasca berakhirnya mandat BRR pada bulan April 2009, pelaksanaan pembangunan di daerah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias akan dilanjutkan kembali oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini diperlukan mekanisme dalam hal pembiayaan gabungan

terhadap pemeliharaan dan operasi fasilitas, serta untuk keperluan pembangunan wilayah. Pembiayaan ini dapat dilakukan atas kerja sama antara Pemerintah Daerah yang terdiri dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai fungsi dan kewenangannya.

- Mengidentifikasi dan menginventarisasi kegiatan fisik dan non fisik semua hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilaksanakan oleh BRR, Donor/NGO, Kementerian/Lembaga dan pihak lainnya dalam rangka persiapan exit strategy BRR terkait dengan pelimpahan aset kepada Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing .
- Perlu disusun berbagai regulasi atau kebijakan yang terkait dengan pengakhiran masa tugas BRR sehingga memiliki dasar hukum dalam rangka pengakhiran. Selain itu, dalam rangka pengakhiran masa tugas BRR penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan berbagai regulasi atau kebijakan yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Berbagai kerangka regulasi yang sudah ada sebelumnya dapat menjadi dasar pijakan hukum untuk melakukan tahapan-tahapan pengakhiran masa tugas BRR pada April 2009.
- Perlu disusun berbagai sistem dan mekanisme yang dapat dijadikan tata cara dan prosedur serta langkah-langkah dalam proses pengalihan tugas dan tanggung jawab dari BRR kepada Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga.
- Program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum selesai dilaksanakan pada masa tugas BRR harus dilanjutkan penyelesaiannya. Kesenambungan dan keberlanjutan dari program dan kegiatan ini selanjutnya akan menjadi tanggung jawab bersama dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan ini perlu dilakukan berdasarkan fungsi dari aset-aset yang telah ditransfer oleh BRR, sesuai dengan tingkat peran dan kewenangan masing-masing pelaksana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Salah satu langkah penting untuk memastikan transisi yang sukses dan lancar dari fase rekonstruksi menuju pada pembangunan daerah secara reguler adalah dari sedini mungkin melibatkan Pemerintah Daerah dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini akan memperkuat dan membangun keterlibatan peranan Pemda dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkelanjutan.
- Dalam rangka persiapan peralihan aset hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maka dipandang signifikan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak Kementerian/Lembaga yang akan melanjutkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana NAD dan Kepulauan Nias sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing Kementerian/Lembaga tersebut.

5.2.3 Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Rangka Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayah pasca bencana

Dalam rangka mempersiapkan keberlanjutan proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah NAD dan Kep Nias, Pemerintah Daerah perlu didorong untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusianya dalam aspek perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca berakhirnya BRR pada April 2009, sehingga pemulihan di setiap bidang kehidupan masyarakat dapat terlaksana secara menyeluruh. Beberapa upaya yang perlu dilakukan adalah melalui:

- Proses pembelajaran dari kekurangan dan kelebihan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan dalam periode BRR, untuk lebih dioptimalkan dalam melaksanakan keberlanjutan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca BRR, termasuk:

- a. Melengkapi perencanaan dengan pedoman, prosedur standar operasional, rencana kerja yang jelas, yang dapat dijabarkan dan dikomunikasikan dengan pelaksana lapangan.
 - b. Menciptakan mekanisme koordinasi yang intensif dikalangan stakeholders vertikal dan horisontal.
 - c. Melaksanakan proses monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan, yang mengikutsertakan kalangan masyarakat, dan mengefektifkan masukan dari hasil evaluasi tersebut kepada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 - d. Melengkapi pelaksanaan pembangunan dengan peraturan/perUndangan yang dibutuhkan, dan penegakan hukum pelaksanaannya.
- Pengintegrasian program dan kegiatan kebencanaan ke dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengintegrasian program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara ke dalam program pembangunan Pemda, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini dimaksudkan untuk memastikan transisi dari fase rekonstruksi ke fase pembangunan yang berkelanjutan sedini mungkin dengan melibatkan Pemda di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
 - b. Pengintegrasian program pengurangan resiko bencana (disaster risk reduction) ke dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memasukkan bagian dari kebijakan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan tata ruang dan wilayah, rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana (RAD-PRB) serta berbagai kebijakan daerah lainnya. Sehingga dengan langkah-langkah tersebut dapat terwujud pengarusutamaan (mainstreaming) pengurangan risiko bencana di daerah baik pada level provinsi maupun pada level kabupaten/kota.
 - Pemahaman dan komitmen dalam penyiapan APBD, mengikuti program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi, dimulai dengan pendampingan pembiayaan pada tahun 2008 sebelum masa berakhirnya BRR secara penuh, untuk seluruh bidang pemulihan yang memungkinkan dan sampai saat ini masih sangat terbatas pengalokasiannya, termasuk pemulihan perumahan, pemulihan sosial budaya, pemulihan perekonomian, infrastruktur dan lingkungan hidup.
 - Koordinasi dengan fasilitasi bersama BRR dan Pemda dengan berbagai Donor dan NGO yang masih melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias pasca berakhirnya masa tugas BRR pada tahun 2009. Dengan demikian proses keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana tersebut dapat terus berlangsung baik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Donor/NGO maupun Kementerian/Lembaga.
 - Penyiapan sistem/mechanisme, aturan, dan pengawasan yang berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga serta instansi terkait lainnya, dalam melanjutkan

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk memelihara fasilitas yang dibangun selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

- Pelatihan khusus / keahlian / profesional bagi pegawai, sebagai salah satu upaya penggantian/regenerasi pegawai, mengingat adanya SDM pegawai yang telah diperbantukan pada Satker BRR.

5.2.4 Tinjauan kembali strategi dan sasaran program dan kegiatan dalam Rencana Induk

- Penyesuaian terhadap Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias perlu dilakukan untuk dapat tercapainya sinkronisasi antar dokumen perencanaan yang sekaligus dalam pelaksanaannya dapat memenuhi dan mengakomodasi kebutuhan riil di lapangan secara langsung yang merupakan dampak dari peristiwa bencana gempa dan tsunami.
- Penyesuaian terhadap Rencana Induk dilakukan terhadap kebijakan, strategi, program/kegiatan, dan besaran sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan kebutuhan riil sesuai kondisi di lapangan. Penyesuaian terhadap Rencana Induk juga memperhatikan masalah lain, yaitu ketentuan pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias, pengaturan mengenai pengalihan seluruh asset yang berasal dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi serta masalah pengawasan fungsional pemerintah.
- Empat kesimpulan mengenai implementasi Rencana Induk perlu menjadi perhatian dalam upaya penyesuaian Rencana Induk maupun penyelesaian masa tugas BRR, yaitu;
 - a. Pertama, pelaksanaan program sejalan dengan sasaran Rencana Induk yang diperkirakan volume pencapaiannya lebih kecil dari sasaran Rencana Induk. Hal ini menjadi capaian keberhasilan sinkronisasi antara Rencana Induk dan Pencapaian BRR.
 - b. Kedua, pelaksanaan program sejalan dengan sasaran yang terdapat dalam Rencana Induk, namun volume pencapaiannya melebihi sasaran Rencana Induk. Hal tersebut berarti, yang perlu menjadi perhatian dalam Rencana Aksi/Rencana Kerja BRR untuk diselesaikan.
 - c. Ketiga, pelaksanaan program dilakukan meskipun tidak terdapat dalam Rencana Induk. Program-program ini yang perlu menjadi bahan review penyempurnaan Rencana Induk, mengingat terjadi penyesuaian di lapangan sesuai kebutuhan dan kondisinya.
 - d. Keempat, sasaran dalam program Rencana Induk sama sekali tidak dilaksanakan, yang perlu menjadi bahan review lebih lanjut bagi Rencana Induk maupun Rencana Aksi BRR, baik untuk disesuaikan dalam target Rencana Induk atau ditindaklanjuti penanganannya oleh BRR.

Tabel 5 - 2
Strategi dan Sasaran Program dan Kegiatan dalam Rencana Induk

Empat (4) kelompok program/kegiatan	Pemulihan Perumahan, Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup	Pemulihan Infrastruktur	Pemulihan Sosial Budaya	Pemulihan Hukum dan Keamanan	Pemulihan Ekonomi
Pencapaian sasaran program hingga tahun 2007 sesuai dengan Rencana Induk, yang menjadi capaian keberhasilan sinkronisasi antara Rencana Induk dan Pencapaian BRR.	Sebagian besar kegiatan lingkungan hidup diantaranya : - Rehabilitasi/Pemeliharaan Hutan Alam dan Lahan, - Peningkatan Usaha Masyarakat Di sekitar kawasan hutan, - Peningkatan kapasitas kelembagaan lokal, - Rehabilitasi Hutan kota, dan - Restorasi kawasan bufferzone.	- pembangunan irigasi - pengendalian banjir - pengaman pantai - beberapa ruas jalan kabupaten	- Gedung Sekolah Menengah & Madrasah - Gedung Puskesmas dan Pustu - Sarana Ibadah - Perlengkapan Sarana Olahraga	- rehabilitasi dan pembangunan kantor KDH/DPRD/Dinas/Meuli, Kecamatan, Desa, Kejati, Kejari, Kanwil Depkumham, Imigrasi, Pengadilan Negeri/ Militer, stasiun transmisi, gedung PWI, Mapolda, Brimobda, Dit. Polair, rumah dinas - pengadaan material, pengadaan peralatan, kendaraan - peningkatan profesionalisme aparat Pemda - peningkatan kapasitas kelembagaan keuangan Pemda - kerjasama antar daerah - penataan administrasi kependudukan - pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial - pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial - penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi.	- Rehabilitasi tambak yang rusak, Pengadaan Kapal motor kayu, Rehabilitasi kapal boat, dan pengadaan alat tangkap - Rehabilitasi Lahan Persawahan; Rehabilitasi Lahan Perkebunan - Pembangunan pelabuhan Malahayati ;Pilot Project Industri Garam rakyat; - Pembangunan/rehabilitasi pasar - Pemberdayaan Koperasi dan UKM - Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana & Prasarana di Kawasan serta Objek & Daya Tarik Wisata (ODTW). - Pembangunan dan Pengadaan Peralatan Balai Latihan Kerja
Pencapaian sasaran program hingga tahun 2008 yang diperkirakan tidak akan mencapai sasaran program pada Rencana Induk, yang perlu menjadi perhatian dalam Rencana Aksi/Rencana Kerja BRR untuk diselesaikan.	- Pembangunan Perumahan - Penyusunan RTRW Provinsi dan Kab/Kota - Sertifikat pengganti	- pembangunan bandara - pembangunan jalan provinsi/nasional - pembangunan jalan kabupaten	- Rumah Sakit Gunung Sitoli, Kep Nias - Pembangunan Sekolah Menengah - Bantuan ekonomi produktif kepada masyarakat korban bencana	- pembangunan Pengadilan Tinggi/PTUN, Mahkamah Syariah, rumah dinas - peningkatan kapasitas mitigasi bencana Pemda - Pemantapan dan Monev Penataan Organisasi Pemda - penataan siskom humas daerah - Penambahan dan peningkatan kualitas SDM - pemeliharaan kemandirian dan ketertiban daerah - pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah - pengembangan ketahanan masyarakat	- Pengadaan Kapal Motor sebanyak 21 ribu unit. - Restocking Ternak (besar,kecil dan Unggas) sebanyak 1,9 juta ekor.

Empat (4) kelompok program/kegiatan	Pemulihan Perumahan, Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup	Pemulihan Infrastruktur	Pemulihan Sosial Budaya	Pemulihan Hukum dan Keamanan	Pemulihan Ekonomi
Pencapaian sasaran program dilakukan di luar sasaran program yang terdapat dalam Rencana Induk, yang perlu menjadi bahan review penyempurnaan Rencana Induk.	<i>Village Mapping</i>	- pencetakan sawah, - listrik tenaga surya, - PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), - beberapa airstrip/ helipad, - beberapa pelabuhan laut dsb.	- Pemberian beasiswa S2 dan S3 bagi dosen dan mahasiswa - Beasiswa bagi tenaga medis	- pembangunan rumah dinas camat, - prasarana pendukung (peralatan) kantor bidang Keteriban, keamanan, dan ketahanan masyarakat	- Bantuan Agroinput, Pengembangan BBIP Simeulue, Hatchery skala rumah tangga, Keramba Jaring Apung, Sentra Pengolahan Ikan dan Bagan Apung. - Pencetakan sawah baru, Penghijauan pekarangan, Pembangunan Jalan Produksi, Pengendalian penyakit hewan menular. - Penyediaan Fasilitas Industri, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pedagang Pasar (Revolving), Alat dan Kemetrolagian, Pembangunan Halte Labuy, dan Pengadaan Cold Storage. - Pelatihan Pengelola LKM, Pelatihan Kewirausahaan, Bantuan teknis dan manajemen LKM - pengembangan sarana dan site plan wisata, Pelatihan bidang Pariwisata, Penyelenggaraan pesta rakyat - Pembangunan Jalan Lingkungan BLK, dan Informasi Bursa Kerja
Sasaran Program dalam Rencana Induk yang sama sekali tidak dilaksanakan, yang perlu menjadi bahan review lebih lanjut bagi Rencana Induk maupun Rencana Aksi BRR, baik untuk disesuaikan dalam target Rencana Induk atau ditindaklanjuti penanganannya oleh BRR.		- jalan kereta api (ditangani Departemen Perhubungan), - pembangkit listrik yang besar (ditangani oleh PLN) dsb	- Pengadaan Buku Nikah - Pembangunan Asrama Mahasiswa di NAD - Pembangunan gedung BPOM - Rehabilitasi gedung Panti Asuhan Anak Yatim	- Penyusunan Prosedur Administrasi Paska Bencana bagi PNS, - Penyediaan tenaga-tenaga Kontrak/Suplemen, - penyelesaian rekrutmen CPNS, - pengelolaan pertanahan, - pengelolaan SDM Aparatur, - mewujudkan kepastian, perlindungan dan penegakan hukum dan HAM, - menetapkan payung hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, - pengembangan ketahanan masyarakat	

5.2.5 Optimalisasi Kemanfaatan dan Dampak Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah NAD dan Kepulauan Nias

Secara umum, para stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana NAD dan Kepulauan Nias hendaknya dapat meningkatkan kemanfaatan dan dampak dari berbagai bidang pemulihan kehidupan yang dilaksanakan. Percepatan dalam pencapaian dan target pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi pemulihan kehidupan masyarakat perlu ditingkatkan secara lebih baik lagi bila dibandingkan.

- Walaupun pemulihan di bidang infrastruktur sudah dianggap telah hampir pulih dan sudah dirasakan manfaat dan dampaknya oleh masyarakat, namun perlu diselesaikan berbagai permasalahan yaitu percepatan pembangunan jalan dan jembatan, perluasan jaringan distribusi listrik, air bersih, BBM dan jaringan telekomunikasi.
- Pemerataan dalam pembangunan infrastruktur antar wilayah, khususnya antara wilayah barat-selatan dengan utara-timur. Dengan terciptanya pemerataan pada berbagai wilayah tadi maka dapat dirasakan manfaat dan dampaknya bagi para korban bencana yang berada di wilayah yang terkena dampak bencana secara langsung.
- Bapel RR dan stakeholders lainnya perlu meningkatkan manfaat dan dampak pada program bidang pendidikan bagi para korban bencana, khususnya pada wilayah-wilayah yang terkena bencana yang sangat parah, mengingat manfaat dan dampaknya belum dirasakan masyarakat sekitar. Adanya peningkatan manfaat dan dampak pada bidang pendidikan ini dapat mempercepat proses pemulihan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk di daerah bencana.
- Dalam upaya meningkatkan manfaat dan dampak bagi para korban bencana dalam rangka pemulihan kehidupan perekonomian masyarakat, maka setelah dua tahun bencana diharapkan Bapel RR, Pemerintah Daerah, Donor/NGO dan Kementerian/Lembaga bisa lebih memperhatikan aspek pemberian mata pencaharian dari berbagai sektor dalam rangka kesinambungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam memperoleh mata pencaharian untuk dapat mempertahankan kehidupannya.
- Walaupun masalah ketersediaan pangan sudah mulai pulih tapi dinilai masih belum merata di semua wilayah pascabencana. Agar masyarakat korban bencana dapat lebih merasakan manfaat dan dampak pemulihan perekonomian, perlu diperhatikan masalah pendistribusian ketersediaan pangan ke semua wilayah secara merata dan seimbang. Selain itu, masalah yang terpenting lainnya yaitu masalah tata niaga bahan sembako karena hal ini menyangkut kepada kemampuan daya beli masyarakat.
- Dalam hal bidang kesehatan, hendaknya dapat ditingkatkan ketersediaan dan peningkatan kebutuhan akan tenaga medis di wilayah pasca bencana secara lebih merata dan tidak terpusat pada kawasan tertentu saja. Penyediaan tenaga medis yang memadai pada semua kawasan akan membuat masyarakat dapat merasakan manfaat dan dampak pemulihan kesehatan terhadap kehidupan masyarakat dan taraf kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana NAD dan Kepulauan Nias.
- Untuk meningkatkan manfaat dan dampak pemulihan keamanan dan kelembagaan bagi masyarakat secara optimal, diperlukan percepatan pemulihan di bidang keamanan dan kelembagaan, penyelesaian masalah

keamanan dan pelayanan pemerintahan bagi masyarakat, sehingga masyarakat di wilayah pasca bencana dapat merasakan kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupannya sehari-hari dan mendapatkan pelayanan publik yang layak melalui normalisasi roda pemerintahan sehari-hari di wilayah NAD dan Kepulauan Nias.

- Bapel BRR diharapkan dapat meningkatkan kegunaan dari hasil pembangunan perumahan yang telah dibangun dengan melakukan uji/reviu kelayakan huni termasuk dengan menyediakan prasarana dan sarana dasar permukiman. Dengan demikian masyarakat korban bencana dapat menempati perumahan dan permukiman yang layak untuk kelangsungan hidup. Masalah ini sangat penting mendapatkan perhatian bagi para pihak yang melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman supaya dapat memperhitungkan tingkat kelayakan huni dan sudah dapat dijadikan sebagai tempat tinggal dalam jangka panjang.

5.2.6 Peran dan Kewenangan Pemerintah Pusat, BRR, Pemda, dan Donor/NGO untuk percepatan pelaksanaan RIRRWANS

A. Pemerintah Pusat

Bappenas perlu melakukan koordinasi sejak awal dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah bersama dengan BRR, dalam rangka kesinambungan dan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca keberadaan BRR, mengingat pasca berakhirnya BRR masih banyak program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih perlu dilanjutkan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Beberapa hal penting yang perlu perhatian adalah:

- Rencana kerja tahun 2008 dan tahun 2009 merupakan irisan waktu bagi Kementerian/Lembaga untuk menindaklanjuti keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca BRR, maka Kementerian/Lembaga hendaknya perlu menyusun kebijakan mengenai program dan kegiatan serta penganggaran di wilayah pascabencana NAD dan Kepulauan Nias sehingga dapat mendukung penyelesaian sisa pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih belum tuntas pada saat BRR.
- Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai instansi penanggung jawab dalam aspek pertanahan secara nasional, agar segera menyelesaikan masalah sertifikasi tanah bagi para korban bencana. Kegiatan penyelesaian sertifikasi tanah ini merupakan bagian dari proyek RALAS yang sudah berlangsung sejak awal peristiwa bencana namun hingga akhir masa tugas BRR diperkirakan belum dapat dituntaskan. Oleh karena itu, instansi penanggung jawab perlu kiranya mengambil langkah-langkah kebijakan yang lebih operasional untuk melakukan penyelesaian kegiatan dimaksud.
- Mengingat infrastruktur antar wilayah adalah kunci dalam upaya percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi, maka Kementerian/Lembaga terkait, khususnya Dep PU dan Dep Perhubungan dapat mulai memberikan dukungan sesuai kewenangannya, dalam upaya memberikan akses yang lebih mudah bagi pemulihan perekonomian, sosial budaya, dan perumahan permukiman.
- Untuk pemulihan di bidang kelembagaan secara jangka panjang maka kiranya dapat dilanjutkan prosesnya oleh instansi Kementerian/Lembaga yang terkait, seperti pembangunan berbagai gedung pemerintahan dan berbagai upaya peningkatan SDM. Hal ini merupakan program kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilakukan pada masa tugas BRR. Pemulihan pada bidang ini dapat mendukung kegiatan

pelaksanaan tugas pemerintahan secara umum dan dapat mendukung tingkat pelayanan publik sehari-hari.

B. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR)

Bapel RR perlu melakukan upaya dan langkah-langkah, baik yang masih dapat dilakukan dalam masa tahun 2008 dan awal tahun 2009, maupun dalam rangka persiapan menjelang berakhirnya masa mandat BRR. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus Bapel RR adalah:

- Mekanisme perencanaan dalam lingkungan internal BRR perlu diefektifkan dalam masa tahun 2008 dan 2009, melalui keberadaan standar perencanaan dan pelaksanaan yang baik, serta pelaksanaan pengendalian dan pengawasan termasuk evaluasi secara berkala, untuk mengoptimalkan capaian rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Bapel RR perlu membuat aksi strategis dalam rangka percepatan pemulihan perumahan dan permukiman bagi korban bencana sehingga masyarakat dapat mewujudkan kondisi pemulihan kehidupan mereka secara layak dan wajar. Kebutuhan terhadap perumahan dan permukiman merupakan permasalahan yang prioritas dan utama untuk memulihkan kondisi kehidupan masyarakat secara lebih permanen.
- Memperhatikan diperlukannya peningkatan kapasitas pemda dalam melanjutkan pemulihan di berbagai bidang, disamping telah adanya sistem regionalisasi dengan merekrut tenaga teknis dari dinas-dinas yang melibatkan dinas pada bantuan teknis, masih diperlukan pelibatan Pemda dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, demi untuk mendukung mekanisme sekretariat bersama maupun forum yang lain, yang telah dibangun untuk terjadinya proses transfer informasi.
- Bapel RR, dalam upayanya memenuhi tingkat capaian program dan sasaran prioritas sesuai target yang telah ditetapkan, perlu meningkatkan kapasitas baik secara kelembagaan maupun Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk personel Bapel BRR, Satker, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dalam memahami perencanaan, pelaksanaan, serta proses koordinasi dan konsultasi yang harus dilalui. Keberadaan aturan maupun kebijakan terkait pola pembinaan SDM akan memberikan pengaruh besar dalam capaian kinerja pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Bapel RR hendaknya melakukan peningkatan sistem pengendalian intern BRR terhadap satker-satkernya, khususnya untuk percepatan pembangunan perumahan dan infrastruktur, termasuk di dalamnya penyusunan laporan keuangan, pengelolaan kas satker-satker, administrasi kontrak, pengelolaan barang milik negara (BRR NAD-Nias) dan penerapan sanksi. Dalam hal ini, kinerja Satker juga sangat tergantung dari upaya-upaya antisipasi dan penindakan lanjutan masalah-masalah indikasi tender yang ada unsur KKN.
- Bapel RR diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan kontraktor dan konsultan lokal dari segi keahlian, dana dan metode. Untuk itu perlu ditingkatkan kualitas tenaga terampil dan jumlah tenaganya dengan melaksanakan pelatihan atau training.
- BRR dapat mendukung dalam peningkatan kapasitas SDM Pemda melalui program dan kegiatan pelatihan, seminar, pendampingan Pemda secara langsung, khususnya pengembangan aspek profesionalisme, kapasitas kelembagaan, kapasitas keuangan, serta pendidikan dan pelatihan teknis

sesuai dengan bidang-bidang pemulihan. Dengan adanya kegiatan tersebut, kapasitas Pemda diharapkan akan meningkat dan siap untuk melanjutkan.

C. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan peningkatan kapasitas baik kelembagaan maupun Sumber Daya Manusia dalam rangka menghadapi keberlanjutan dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca berakhirnya BRR pada 2009 nanti. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah:

- Kapasitas SDM pemda dalam melanjutkan pemulihan perumahan, infrastruktur, perekonomian, sosial budaya, dan kelembagaan sangat perlu dipersiapkan untuk ditingkatkan. Pemda perlu terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta meningkatkan kemampuannya, termasuk dalam sistem pelaporan dan manajemen yang terintegrasi secara baik. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung mekanisme regionalisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, sekertariat bersama, dan forum lain yang telah dibangun untuk terjadinya proses transfer informasi. Hal tersebut terutama sangat diperlukan oleh kabupaten-kabupaten yang relatif jauh dari pusat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, seperti Aceh Jaya, Aceh Singkil, Kabupaten Nias dan Nias Selatan, masih memerlukan dukungan peningkatan kapasitas SDM.
- Untuk mendukung proses keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi Pemda perlu memberikan alokasi penganggaran PBD yang memadai, berdasarkan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi yang disepakati dalam Rencana Induk atau Rencana Aksi. Hal ini terkait dengan penyelesaian sisa pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi, juga untuk membiayai pengoperasian dan perawatan hasil-hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Secara khusus, Pemda Provinsi NAD melalui alokasi dana otonomi khusus Aceh sebagaimana diatur dalam UU No. 11 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk dapat mendukung proses keberlanjutan dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan alokasi dana otonomi khusus yang sangat besar ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan wilayah dan kehidupan masyarakat di wilayah Provinsi NAD.
- Pemda sebagai penanggung jawab dan pelaku pembangunan di daerah secara langsung, perlu membangun koordinasi dan konsolidasi sejak dini dengan kalangan Donor/NGO dalam menghadapi berakhirnya masa tugas BRR sehingga kalangan Donor/NGO dapat melanjutkan kesinambungan dan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias secara terkoordinasi secara lebih sistematis dan terpadu. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak kalangan Donor/NGO yang masih melanjutkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana NAD dan Kepulauan Nias pasca berakhirnya masa tugas BRR.
- Pasca berakhirnya masa tugas BRR, Pemda hendaknya dapat memberikan perhatian untuk sektor lingkungan hidup khususnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk aparat Pemda dan masyarakat. Isu lingkungan hidup ini merupakan salah satu isu penting pasca terjadinya bencana gempa dan tsunami di wilayah NAD dan Kepulauan Nias.
- Pemda supaya dapat memberikan dukungan, sesuai kewenangan dalam lingkup provinsi maupun kabupaten/kota, dalam rangka membangun infrastruktur jalan. Diperlukan pemerataan moda transportasi di luar kota

Banda Aceh, sehingga dapat menunjang mobilisasi dan interaksi sosial kemasyarakatan sehari-hari yang sampai sekarang belum dirasakan pulih oleh masyarakat. Permasalahan ini juga merupakan bagian dari proses keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus mendapatkan perhatian dari Pemda dalam kerangka kebijakan pembangunan di daerah.

- Dalam rangka menanggulangi keterbatasan sumber daya energi yang bersumber dari PLN, hendaknya Pemda perlu memikirkan penyediaan sumber energy alternatif seperti energi yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Walaupun instalasi jaringan sudah berhasil dilakukan pemulihan secara fisik namun masih terkendala dalam penyediaan sumber daya energi yang cukup di wilayah pascabencana.
- Pemerintah Daerah kiranya dapat memberikan porsi penganggaran yang cukup signifikan untuk bidang pendidikan. Permasalahan penyiapan sumber daya manusia juga merupakan salah satu masalah urgen dan strategis untuk kesinambungan dan keberlanjutan pada konteks pembangunan di daerah dalam jangka panjang, mengingat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan potensial menjadi bagian dari proses pembangunan di daerah pascabencana NAD dan Kepulauan Nias.

D. Donor/NGO

Mengingat peran donor/NGO sangat besar dalam pemulihan wilayah provinsi NAD dan Kepulauan Nias, maka sangat diperlukan upaya koordinasi yang lebih intensif dalam mengkomunikasikan hasil evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk dalam rangka percepatan maupun penyiapan pengakhiran masa tugas BRR tahun 2009, yaitu:

- Donor/NGO juga dapat mengambil peranan yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur, untuk mendorong percepatan pemulihan di bidang ini, mengingat cukup banyak kondisi infrastruktur yang belum pulih di wilayah NAD dan Kepulauan Nias yang terkena dampak bencana secara langsung, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan yang telah berjalan.
- Komitmen Donor/NGO untuk bidang pendidikan sangat tinggi pada tahun 2007, diharapkan dapat meningkatkan komitmen tersebut pada tahun 2008, karena masalah pendidikan di wilayah bencana menjadi masalah yang sangat strategis dalam rangka melanjutkan proses pembangunan di daerah secara reguler dengan tersedianya Sumber Daya Manusia yang terdidik dan terlatih secara memadai.
- Kalangan Donor/NGO hendaknya dapat memberikan perhatian lebih pada kegiatan yang terkait dengan peningkatan kapasitas dan tata kelola. Dengan demikian, Donor/NGO tidak hanya memfokuskan diri pada pembangunan secara fisik namun juga dari aspek non fisik. Dari data yang didapat bahwa capaian untuk aspek non fisik baru mencapai 50 persen. Peningkatan kapasitas dan tata kelola ini sangat signifikan bagi Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka kesinambungan dan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pada 2009 nanti. Untuk mendukung pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola tersebut, Donor/NGO dapat melaksanakan beberapa program dan kegiatan melalui pelatihan, seminar, pendampingan secara langsung, diantaranya melalui peningkatan profesionalisme aparat Pemda, peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda, peningkatan kapasitas keuangan Pemda, peningkatan kerjasama antara daerah, penyempurnaan

dan penguatan kelembagaan demokrasi (pimpinan daerah dan legislatif daerah), serta pengelolaan sumberdaya manusia aparatur.

- Donor/NGO, khususnya melalui Multi Donor Fund, kiranya dapat mendorong percepatan implementasi program RALAS di wilayah NAD dan Kepulauan Nias, karena program ini sangat terkait dengan permasalahan permukiman, pertanahan, tata ruang, dan lingkungan hidup secara menyeluruh. Diharapkan adanya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih sinergis dengan instansi penanggung jawab kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BRR-NAD Nias

1. BRR NAD-Nias, *DIPA Umum 2007*, (Direktorat Anggaran BRR NAD-Nias: 31 Okt 2007).
2. BRR NAD-Nias, Draft Rencana Transisi BRR, (Dokumen BRR NAD-Nias: 7 Nov 2007).
3. BRR NAD-Nias, Progress Rehab-Rekon dalam Bidang Perumahan, (Dokumen BRR NAD-Nias: 31 Okt 2007).
4. BRR NAD-Nias, Monitoring Kemajuan Pekerjaan APBN 2007 di Bapel RR NAD-Nias: Menggunakan Kurva "S", (Laporan BRR NAD-Nias: 27 Nov 2007).
5. BRR NAD-Nias, Sebaran Gedung Hasil Pelaksanaan Program Kedeputian kelembagaan dan SDM TA 2005/2006/2007, (Laporan BRR NAD-Nias: Agustus 2007).
6. RANTF, Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan Pra Audit, (Dokumen RANTF: 31 Desember 2006).
7. BRR Regional V, Laporan Kegiatan Tahun 2006 Regional V Singkil, (BRR Regional V Singkil: Desember 2006).
8. BRR Regional V, Laporan Kegiatan DIPA Tahun 2007 Regional V Singkil, (BRR Regional V Singkil: Maret-April 2007).
9. BRR NAD-Nias, Aceh dan Nias 2 Tahun Setelah Tsunami; Laporan Kemajuan Tahun 2006, (Laporan Bersama BRR NAD-Nias dan Lembaga Donor/NGO: Desember 2006).
10. BRR NAD-Nias, Laporan Kegiatan 2 Tahun BRR NAD-Nias, (BRR NAD-Nias: Agustus 2007).
11. BRR NAD-Nias, Pagu Per Bidang dan Realisasi Keuangan, (Direktorat Anggaran BRR NAD-Nias: 30 Nov 2007).
12. BRR NAD-Nias, Data Sebaran Pembangunan Fisik, (BRR NAD-Nias Bidang Kelembagaan: September 2007)
13. BRR NAD-Nias, Laporan Kinerja Instansi pemerintah BRR NAD-Nias, TA 2006, (BRR NAD-Nias: 27 Februari 2007).
14. BRR NAD-Nias, Laporan Kegiatan Paket Pekerjaan Tahun 2006, Satker Pengadilan Negeri, TA 2005, TA 2006, (BRR NAD-Nias Bidang Kelembagaan dan Hukum: 30 April 2007).
15. BRR Regional IV, Laporan Kegiatan BRR Regional IV, (BRR NAD-Nias Regional IV Aceh Barat: 31 Agustus 2007).
16. BRR NAD-Nias, Realisasi Trust Fund Per 30 Juni 2007, (Direktorat Anggaran BRR NAD-Nias: Juni 2007).

17. BRR NAD-Nias, Progress dan Tantangan Rehab-Rekon (Bedah DIPA 2007), (BRR NAD-Nias: Januari 2007).
18. BRR Regional VI Kep. Nias, Laporan Lengkap Dari Regional VI Kep.Nias, (BRR Regional VI Kep.Nias: Agustus 2007).
19. BRR Regional VI Kep. Nias, Laporan Lengkap Dari Regional VI Kep.Nias, (BRR Regional VI Kep.Nias: Desember 2007).
20. BRR Regional V, Laporan Sosialisasi RTRW Kabupaten dan Kawasan Permukiman Utama, Modul Kab. Aceh Singkil, (BRR Regional V Aceh Singkil: Tahun 2007).
21. Dewan Pengarah BRR NAD-Nias, Laporan Kunjungan Kerja Anggota Dewan Pengarah (Ir.Usman Hasan,M.Si) di NAD, (Sekretariat Dewan Pengarah BRR NAD-Nias: 20 Agustus - 2 September 2007).

Lembaga Donor/ NGO

22. Asian Development Bank, Brief ETESP Progress Summary, (ADB: Oct 2007).
23. ADB, Status Report on the Asian Tsunami Fund (Jan-June 2007), (ADB: Sept 2007).
24. ADB, A Fact Sheet 2007, (ADB: Desember 2006).
25. BRR NAD-Nias and Partner, Pencapaian Partner/ NGO di Aceh Barat, (BRR Reg.IV and Partner: 30 Juli 2007).
26. AUSAID, Report AUSAID to World Bank, (AUSAID: July 2007).
27. FAO, 15 Langkah Rehabilitasi Lahan Budidaya Perikanan di Aceh Indonesia, (FAO: 2007).
28. FAO, Panduan Untuk Konstruksi Kapal Kayu Nelayan Tradisional, (FAO: 2007)
29. FAO, Rebuilding Livelihoods, (FAO: April-June 2006).
30. FAO, Rebuilding Livelihoods, (FAO: Sep-Dec 2006).
31. IOM, Laporan Tahunan 2006, (IOM: November 2006).
32. IOM, Livelihood Support Programme, (IOM: July 2007).
33. IOM, Migration Health, (IOM: July 2007).
34. IOM, National Construction Services, (IOM: July 2007).
35. IOM, Panduan Rumah Permanen, (IOM: Februari 2007).
36. IOM, Psychosocial Programme in Aceh's Conflict-Affected Districs,(IOM: June 2007).
37. Multi Donor Fund, Photo Exebition 2007, (MDF: Nov 2007).
38. Multi Donor Fund, Implementing Projects, Achieving Results, Progress Report III, (MDF: Desember 2006).
39. Multi Donor Fund, MDF Quarterly Financial Management Report No.9, (MDF: 30 Juni 2007).

40. P3B Bappenas, Notulensi FGD dengan NGO, LSM (Lokal), dan BRR dengan tema : "Dampak Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Persiapan Exit Strategy Pasca BRR NAD-Nias", (P3B Bappenas: 6 Sept 2007).
41. UNDP, Building Blocks for Sustainable Recovery, ERTR Programme Report, (UNDP: 2005-2006).
42. UNDP, FAST FACT, ERTR Programme, (UNDP: Jan 2005-Dec 2007).
43. UNDP, Laporan ERTR Programme, Livelihoods, (UNDP: Jan 2005-Dec 2006).
44. UNDP, Laporan Tahun 2006, (UNDP : Tahun 2006).
45. UNDP, BRR dan MDF, Support to Strengthen the Capacity and Role of CSOS in the Recovery Communities in Aceh and Nias, ANNUAL REPORT 2006, (UNDP: Jan-Dec 2006).
46. UNORC dan BRR NAD-Nias, Tsunami Recovery Indicators Package (TRIP) For Aceh and Nias, (UNORC dan BRR NAD-Nias: Maret 2007).
47. USAID, Aceh West Coast Highway Project, (USAID: June 2007).
48. USAID, Tsunami Reconstruction, (USAID: June 2007).
49. World Bank, et.all, Analisis Pengeluaran Publik Aceh (Pengeluaran Untuk Rekonstruksi dan Pengentasan Kemiskinan), (World Bank, DSF, BRR NAD-Nias, Pemda NAD: Desember 2006).

Pemerintah/ Daerah/ Provinsi, Kab/Kota dan SKPD

50. Bappeda Aceh Besar, APBD TA 2007, Qanun No.7 2007, Aceh Besar, (Bappeda Aceh Besar: Tahun 2007).
51. Bappeda Aceh Besar, Monitoring Pelaksanaan Pembangunan, Aceh Besar, TA 2006, (Bappeda Aceh Besar: Desember 2006).
52. Bappeda Aceh Barat, APBD TA 2006, (Bappeda Aceh Barat: 2006).
53. Bappeda Aceh Jaya, APBD TA 2006, (Bappeda Aceh Jaya: Desember 2006).
54. Bappeda Aceh Singkil, APBD TA 2006, Qanun No.1 2006, Aceh Singkil, (Bappeda Aceh Singkil: 17 Juli 2006).
55. Bappeda Aceh Singkil, APBD TA 2007, Qanun No.1 2007, Aceh Singkil, (Bappeda Aceh Singkil: 16 April 2007).
56. Bappeda Bireun, APBD TA 2006, Qanun No.7 Tahun 2006, (Bappeda Bireun: 7 Desember 2006).
57. Bappeda Bireun, APBD TA 2007, Qanun No.6 Tahun 2007, (Bappeda Bireun: 19 April 2007).
58. Bappeda Kab. Nias, APBD TA 2006, Kab. Nias, (Bappeda Kab. Nias: 2006).
59. Bappeda Kota Banda Aceh, APBD TA 2006, Banda Aceh, (Bappeda Kota Banda Aceh: Desember 2006).
60. Bappeda Kota Banda Aceh, Monitoring Pelaksanaan Pembangunan, Kota Banda Aceh, TA 2006, (Bappeda Kota Banda Aceh: April 2007).

61. Bappeda Pidie, APBD TA 2006, (Bappeda Pidie: 2006).
62. Bappeda Pidie, Buku I dan Buku II, APBD TA 2006, Penjabaran, (Bappeda Pidie: 2006).
63. Bappeda Pidie, APBD TA 2007, Qanun No.10 Tahun 2007, (Bappeda Pidie: 2007).
64. Bappeda Pidie, Buku I dan Buku II, APBD TA 2007, Penjabaran, (Bappeda Pidie:2007).
65. Bappeda NAD, Laporan Konsolidasi DIPA APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Triwulan III, TA 2007, (Bappeda NAD: Nov 2007).
66. BPK-RI, BUKU I, BUKU II dan BUKU III, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan BRR NAD-Nias TA 2006, (BPK RI: April 2007).
67. BPS Aceh Besar, Aceh Besar dalam Angka 2005, (BPS Aceh Besar: Tahun 2006).
68. BPS Aceh Singkil, Aceh Singkil Dalam Angka, Tahun 2006, (BPS Singkil: Agustus 2007).
69. BPS Aceh Singkil, Produk Domestik Regional Bruto,PDRB, A.Singkil, TA 2000-2006, (BPS Aceh Singkil: Agustus 2007)
70. Dinas Kimpraswil Aceh Jaya, Laporan Progress Fisik dan Keuangan, Prasarana Jalan dan Jembatan, Bid.Kimpraswil, TA 2007,(Dinas Kimpraswil Aceh Jaya: 2007).
71. Dinas Kimpraswil Aceh Jaya, Matrix Program 5 Tahunan RPJMD, Bid.Kimpraswil, 2007-2012, (Dinas Kimpraswil Aceh Jaya: Mei 2007).
72. Dinas Kimpraswil Aceh Jaya, Rencana Definitif Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2007, Bid.Infrastruktur Jalan, (Dinas Kimpraswil Aceh Jaya: Desember 2006).
73. Dinas Pendidikan Aceh Besar, Data Dinas Pendidikan TA 2007, (Dinas Pendidikan Aceh : 2007).
74. Dinas Pendidikan Aceh Jaya, DATA BASE Dinas Pendidikan Tahun 2007, (Dinas Pendidikan Aceh Jaya : Juli 2007).
75. Dinas Pendidikan Aceh Jaya, Matrix Program 5 Tahunan RPJMD, Bid.Pendidikan, 2007-2012, (Dinas Pendidikan Aceh Jaya: 2007).
76. Dinas Pendidikan Aceh Jaya, Realisasi Fisik Sekolah SD, MIN, TK, Yang Dibangun NGO/Donor, APBN, (Dinas Pendidikan Aceh Jaya: Januari 2007).
77. Dinas Pendidikan Aceh Jaya, Realisasi Fisik Sekolah SMP, SMA, SMK, MAS, Yang Dibangun NGO/Donor, APBN, (Dinas Pendidikan Aceh Jaya: Januari 2007).
78. Dinas Pendidikan Aceh Jaya, Rencana Definitif Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2006, (Dinas Pendidikan Aceh Jaya: November 2006).
79. Dinas Pendidikan Aceh Jaya, Rencana Definitif Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2007, Bid.Pendidikan Dasar, (Dinas Pendidikan Aceh Jaya: Desember 2006).
80. Dinas Pendidikan Aceh Jaya, RENCANA KERJA Dinas Pendidikan Tahun 2007, (Dinas Pendidikan Aceh Jaya: Oktober 2006).
81. Dinas Pendidikan Aceh Jaya, RKA Dinas Pendidikan TA 2007, (Dinas Pendidikan Aceh Jaya: Juli 2007).

82. Dinas Perindustrian Aceh Singkil, Pembangunan Perikanan Kab Aceh Singkil, Industri Perikanan Terpadu, (Dinas Perindustrian Aceh Singkil: Agustus 2007).
83. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bireun, Realisasi Pembangunan Pasar Tradisional Di Kab. Bireun Tahun 2005-2007, (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bireun: November 2007).
84. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Jaya, Realisasi Kegiatan BRR, di Bid.Perkebunan dan Kehutanan TA 2006 dan Rencana TA 2007, (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Jaya: Februari 2007).
85. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Jaya, Sekilas Informasi/ Data Kehutanan, (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Jaya: 2007).
86. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun, Laporan Akhir Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan TA 2006, (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun: Sept 2006).
87. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun, Laporan Foto-foto Kegiatan Pemberdayaan dan pembukaan Lahan Baru TA 2006, (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun: Sept 2006).
88. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun, Laporan Akhir Kegiatan Pembinaan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian TA 2006, (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun: Sept 2006).
89. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun, Laporan Akhir Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Penyuluhan Pertanian TA 2006, (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun: Sept 2006).
90. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun, Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Modal Usaha dan Sarana Produksi TA 2006, (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun: Sept 2006).
91. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun, Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan Produktifitas dan Mutu Spesifikasi Padi dan Palawija TA 2006, (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun: Sept 2006).
92. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun, Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan Pengembangan Komoditi Unggulan/ Andalan dan Agribisnis TA 2006, (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun: Sept 2006).
93. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun, Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan/ Optimaisasi Lahan Tidur TA 2006, (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun: Sept 2006).
94. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun, Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian di Lahan Sawah TA 2006, (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun: September 2006).
95. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun, Laporan Akhir Kegiatan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) TA 2006, (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun: Sept 2006).
96. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun, Laporan Akhir Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penangkaran Benih/ Bibit TA 2006, (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun: Sept 2006).

97. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun, Laporan Akhir Kegiatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Holtikultura (Pengembangan Jeruk Giri Matang) TA 2006, (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun: Sept 2006).
98. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun, Laporan Akhir Kegiatan Promosi Produk Pertanian Unggulan/ Andalan TA 2006, (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun: Sept 2006).
99. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun, Laporan Pertemuan Jamaah Kaom Meugoe/ Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) TA 2006, (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun: Sept 2006).
100. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun, Laporan Pertemuan Koordinasi Jamaah Kaom Meugoe TA 2006, (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Bireun: Sept 2006).
101. DPR-RI, Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, (DPR-RI: Agustus 2005 - November 2006).
102. DPRA-NAD, Laporan Panitia Khusus II, DPR-Aceh tentang Pelaksanaan Rehab dan Rekon di NAD, (DPRA: 7 Juni 2007).
103. Pemda Aceh Singkil, Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Aceh Singkil, Tahun 2006, (Pemda Aceh Singkil: Maret 2007).
104. Sekber Distrik Banda Aceh, Laporan Semester II Januari - Juli 2007, Sekretariat Bersama Distrik Banda Aceh, (Sekber Distrik Banda Aceh: Tahun 2007).
105. Sekber Pidie, Data Perkembangan Bantuan Perumahan dari Donor/NGO di Kab, Pidie, (Sekber Pidie: November 2007).

Sumber Lain

106. Majalah TEMPO, Lepas Ladas Aceh Berkelanjutan, (MAJALAH TEMPO: 13-19 Agustus 2007).
107. Majalah TEMPO, Dua Tahun Momentum Keterlantaran, (Majalah TEMPO: 7 Januari 2007).
108. Majalah TEMPO, Siap-Siap Menjelang Tenggat, (Majalah Tempo: 10-16 Desember 2007).